

2019

ANNUAL REPORT
LAPORAN TAHUNAN

50 th Pertamina Trans Kontinental

DIGITALISASI PROSES BISNIS DAN PENGUATAN SDM

Digitalization of Businesses Process and
Strengthening HR



50th Pertamina Trans Kontinental

Digitalisasi Proses Bisnis Dan Penguatan SDM

*Digitalization of Businesses Process
and Strengthening HR*

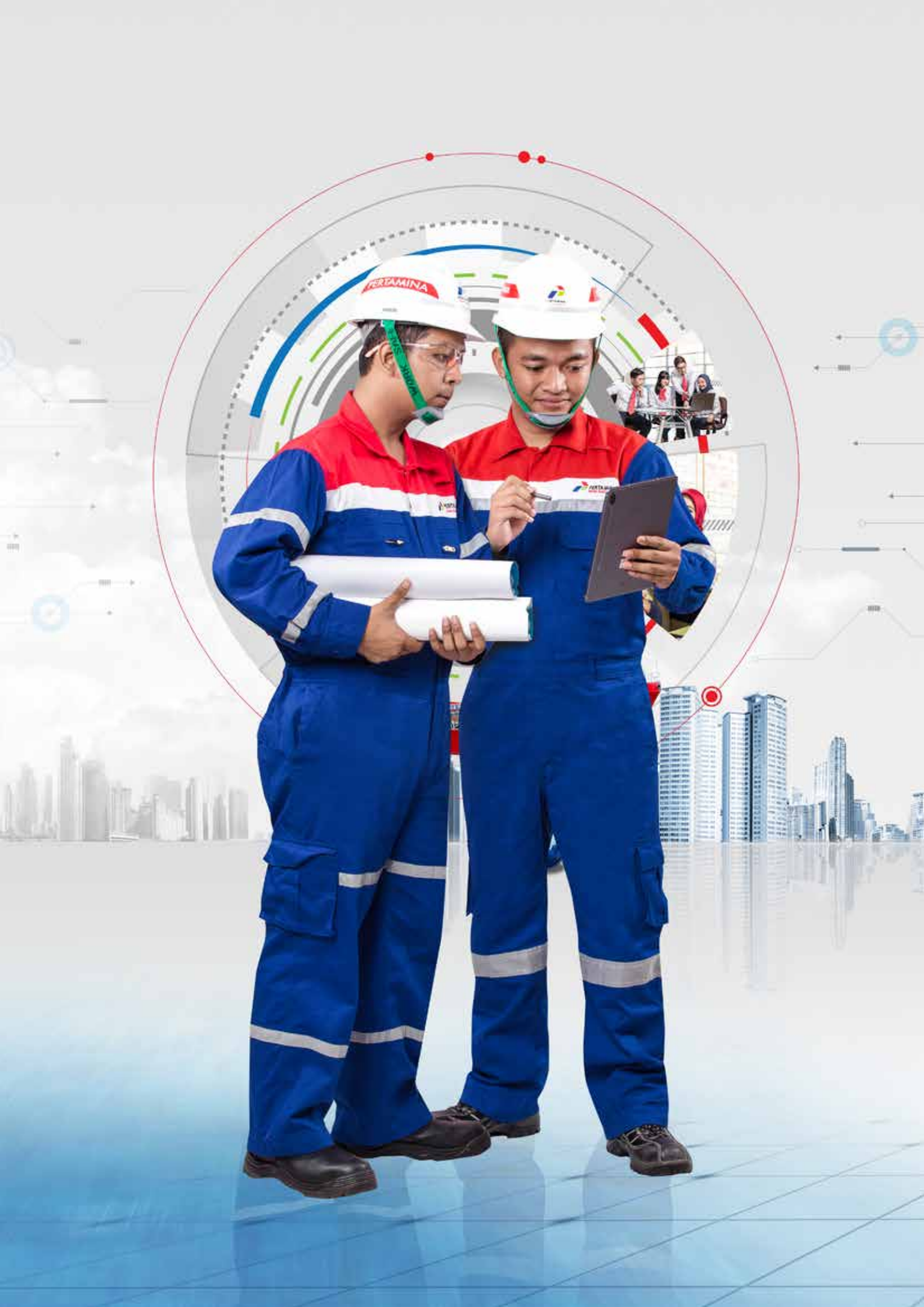
Memasuki usianya ke 50 tahun, PT Pertamina Trans Kontinental terus melakukan berbagai upaya untuk guna mendukung program sinergi Pertamina Group melalui digitalisasi seluruh proses bisnis serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Menyambut era industri 4.0 digitalisasi proses bisnis bagi setiap perusahaan merupakan suatu keharusan. Apalagi semakin hari teknologi pun terus berkembang, dan setiap perusahaan juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tujuannya, agar mempercepat dan mengefisiensi pekerjaan sehingga target perusahaan dapat tercapai.

Untuk itu kami telah menyusun road map digitalisasi guna mendukung operasi bisnis Perseroan agar mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen di semua lini. Integrasi sistem informasi di semua lini proses bisnis ini sangat penting bagi Perseroan tidak hanya untuk menciptakan efisiensi serta kecepatan layanan, tetapi juga sejalan dengan strategi diversifikasi usaha untuk menciptakan bisnis-bisnis baru di bidang *marine services*.

Entering the age of 50 years, PT Pertamina Trans Kontinental resumes to implement various efforts to support Pertamina Group synergy program through digitalization of all business processes and strengthening human resources (HR). Welcoming the 4.0 industrial era, it is mandatory for every companies to digitizing their business processes, because technology is progressively developing and every companies must use it to increase their productivity and to streamline the work, thus the company sustainability can be achieved.

For this reason, we have formulated a strategic initiative in the form of a digitalization roadmap to support the Company's business operations in order to integrate management functions in all lines. The integration of information systems in all lines of business processes is very important for the Company, because it not only creates efficiency and speed of service, but is also in line with the strategy of business diversification in order to create new businesses in the field of marine services.



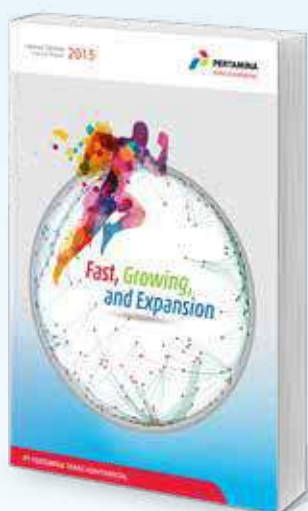


KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN (2015-2019)

ANNUAL REPORT (2015-2019) THEME CONSISTENCY

Tema yang disajikan dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental merupakan gambaran pencapaian kinerja ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh Pertamina Trans Kontinental.

The theme adapted in PT Pertamina Trans Kontinental depicts achievement of performance or objectives pursued by Pertamina Trans Kontinental.



2015

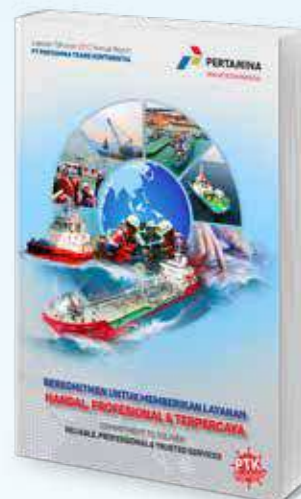
**Fast, Growing
and Expansion**



2016

**Menuju Momentum
Baru, Mencapai
Prestasi Kelas Dunia**

*Towards New Momentum,
Achieving World Class
Achievement*



2017

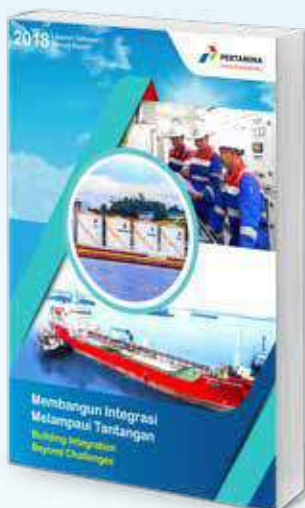
**Berkomitmen
untuk Memberikan
Layanan Handal,
Profesional &
Terpercaya**

*Commitment To
Deliver Reliable,
Professional & Trusted
Services*



Dimulai dari transformasi yang dilaksanakan pada tahun 2012, Pertamina Trans Kontinental melakukan perubahan arah bisnis, membangun kesiapan menghadapi hari esok, dengan berkomitmen pada kinerja dan pertumbuhan yang cepat, meningkatkan akselerasi ekspansi bisnis guna membangun momentum mencapai prestasi kelas dunia.

Ever since the transformation process undertaken in 2012, Pertamina Trans Kontinental had adjusted its business direction, where already build infrastructures pursuing the future with commitment towards rapid performance and growth, speed-up the business expansion acceleration to shape momentum towards world-class performance achievement.



2018

Membangun Integrasi, Melampaui Tantangan

Building Integration, Beyond Challenges



2019

Digitalisasi Proses Bisnis dan Penguatan SDM

Digitalization of Businesses Process and Strengthening HR

TENTANG LAPORAN TAHUNAN PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

ANNUAL REPORT ON PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

PT Pertamina Trans Kontinental atau disebut "PTK" dan "Perusahaan" atau "Perseroan", menyajikan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang memuat informasi kinerja keuangan dan hasil usaha berdasarkan hasil audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik. Dalam Laporan Tahunan PTK juga menyertakan Laporan Keberlanjutan.

Laporan tahunan ini juga memuat informasi-informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis yang pada umumnya menggunakan kata seperti "percaya", "mengharapkan", "mengantisipasi", "memperkirakan", "memproyeksikan" atau kata-kata serupa lainnya, dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (forwardlooking statement) sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau Rp atau IDR merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan "Dollar AS atau US\$" merujuk pada mata uang resmi Amerika. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

PT Pertamina Trans Kontinental, or "PTK" or "the Company", is presenting The Annual Report ended on December 31, 2019 which contains information about the financial performance and the results of operations based on the Financial Statements audited by a Public Accounting Firm. The Annual Report of PTK also contains a Sustainability Report.

This annual report also contains information on projections, plans, strategies, and objectives that are not statements of historical data, which generally uses words such as "believe", "expect", "anticipate", "estimate", "projected" or other similar words, and can be categorized as statements that may be forward looking statement as defined by the existing regulations.

Statements containing the foresight to load the risk and uncertainty of the results and events may differ materially from what is expected and mentioned in the statement including those caused by changes in the economic environment, political and social in Indonesia.

The mention of the currency unit "Rupiah" or "Rp" or "IDR" refers to the official currency of Indonesia, while "US Dollars" or "USD" refers to the official currency of the United States. Unless otherwise stated, all financial information presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
For further information please contact:



Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Tel : (+6221) 31923005
Faks : (+6221) 3106804

Laporan Tahunan Pertamina Trans Kontinental 2019 juga dapat dilihat dan di unduh pada :

Pertamina Trans Kontinental Annual Report 2019 can also viewed and downloaded in :

www.ptk-shipping.com



DAFTAR ISI

TABEL OF CONTENTS



Daftar isi yang lebih rinci dapat dilihat pada setiap awal bab dan sub bab penting di Laporan Tahunan Pertamina Trans Kontinental Tahun 2019.

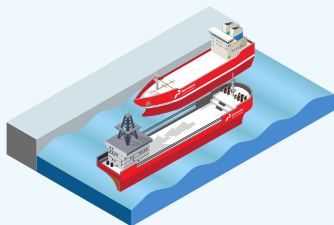
Detailed contents can be viewed on every opening of chapter and important sub-chapter in Pertamina Trans Kontinental's Annual Report 2019.



CAPAIAAN 2019

ACHIEVEMENT IN 2019

Kinerja Operasional | Operational Performance

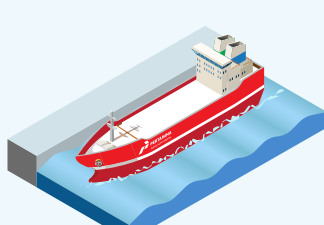


Jumlah Kapal

Number of Vessels

84 unit

↑ 25,37%



Hari Operasi Kapal Milik

Operational Days of Owned Vessels

29.151 hari

days

↑ 34,37%



Commission Day Kapal Milik

Commission Days of Owned Vessels

23.015 hari

days

↑ 17,67%

Kinerja Keuangan | Financial Performance



Pendapatan

Revenues

Rp2,77 triliun

trillion

↑ 35,21%



Laba Kotor

Gross Profit

Rp679,97 miliar

billions

↑ 4,54%



Laba Tahun Berjalan

Profit for the Year

Rp295,00 miliar

billions

↑ 5,70%



Jumlah Aset

Total Assets

Rp4,73 triliun

trillion

↑ 6,30%



Jumlah Liabilitas

Total Liabilities

Rp2,39 triliun

trillion

↑ 0,19%



Ekuitas

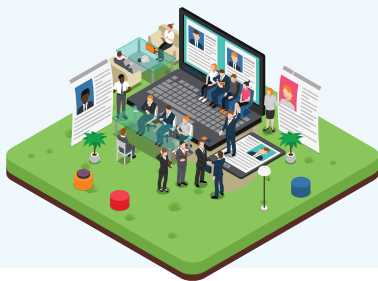
Equity

Rp2,34 triliun

trillion

↑ 13,35%

Pengembangan SDM | Human Resource Development



Jumlah Jam Pelatihan

Number of Training Hours

13.316 jam
Hours

Rata-rata Jam Pelatihan Pekerja

Average Employee Training Hours

8 jam/hari
Hours/day

K3 dan Lindung Lingkungan | Work Safety and Environmental Protection



Jam Kerja Selamat

Safe Work Hours

6.271.064 jam
Hours
↑ **6,18%**

Fatalitas

Fatality

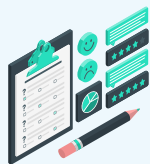
0 Kejadian
Occurrence

Tumpahan Minyak

Oil Spill

0 Kejadian
Occurrence

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan | Social and Environmental Responsibility



Indeks Kepuasan Pelanggan

Customer Satisfaction Index

3,91 Skala Likert
Likert Scale



Indeks Loyalitas Pelanggan

Customer Loyalty Index

3,76 Skala Likert
Likert Scale



Realisasi Biaya CSR

CSR Cost Realization

1.487.500.000

Tata Kelola | Governance



Asesmen GCG

GCG Assessment

77,73 Baik
GOOD

Kinerja Lainnya | Other Performance



Tingkat Kesehatan Perusahaan 2019

The Company Soundness Level 2019

91,00 AA SEHAT
HEALTHY





IKHTISAR KINERJA 2019

2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- 10** Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Highlight
- 12** Grafik Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Graph
- 13** Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operational
Business And Operational Performance Highlights
- 14** Ikhtisar Saham dan/atau Efek Lainnya
Other Shares and/or Securities Summary
- 14** Ikhtisar Dividen
Dividend Summary
- 14** Ikhtisar Kinerja Lainnya
Other Performance Summary

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHT

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position							
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*	2016**	2015
	%	Juta Rp Millions of Rp					
Aset Lancar Current Assets	17,51	265.046	1.778.646	1.513.600	1.187.840	1.149.924	1.068.765
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	0,52	15.297	2.954.877	2.939.580	2.699.512	2.263.049	1.737.506
Jumlah Aset Total Assets	6,30	280.343	4.733.523	4.453.180	3.888.352	3.412.973	2.806.271
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	6,77	85.712	1.351.807	1.266.095	1.250.799	1.086.373	674.809
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	(7,25)	(81.231)	1.039.575	1.120.806	806.580	662.928	628.753
Jumlah Liabilitas Total Liability	0,19	4.481	2.391.382	2.386.901	2.057.378	1.749.301	1.303.562
Ekuitas Equity	13,35	275.862	2.342.141	2.066.279	1.830.973	1.663.673	1.502.709
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities & Equity	6,30	280.343	4.733.523	4.453.180	3.888.352	3.412.973	2.806.271
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD Exchange Rate per 1 USD	(4,01)	(580)	13.901,01	14.481,00	13.384,00	13.307,00	13.392,00

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income							
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*	2016**	2015
	%	Juta Rp Millions of Rp					
Pendapatan usaha Revenue	35,21	721.948	2.772.220	2.050.272	1.779.411	1.717.495	1.625.451
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(49,46)	(692.390)	(2.092.246)	(1.399.856)	(1.331.380)	(1.311.438)	(1.152.337)
Laba bruto Gross profit	4,54	29.558	679.974	650.416	448.031	406.057	473.114
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	14,50	47.386	374.161	326.775	235.881	222.380	255.146
Laba tahun berjalan Profit for the year	5,70	15.906	294.998	279.092	182.984	163.028	225.677
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	17,24	40.556	275.862	235.306	167.300	157.965	238.606
EBITDA EBITDA	7,16	42.392	634.089	591.697	412.617	387.544	393.168
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Profit for the year attributable to:							
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	5,70	15.906	294.998	279.092	182.984	163.028	225.677
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive income attributable to:							
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	17,24	40.556	275.862	235.306	167.300	157.965	238.606



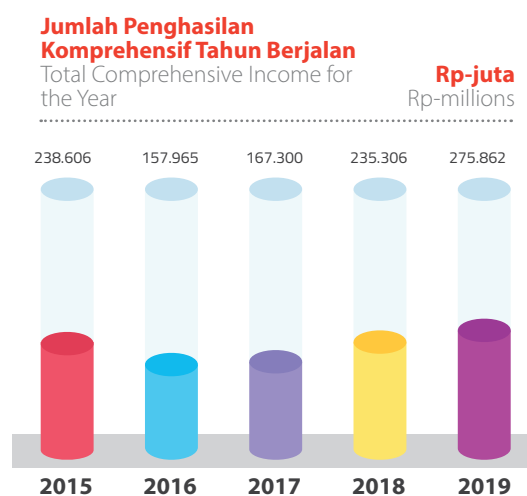
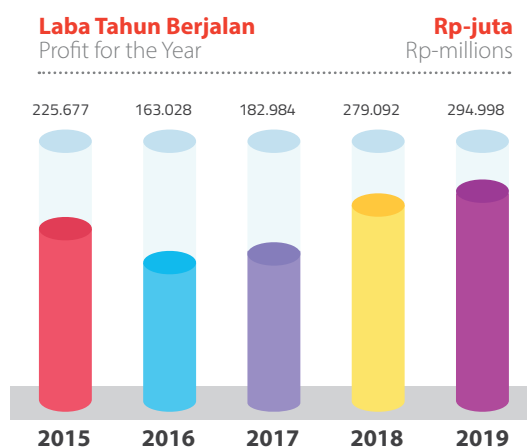
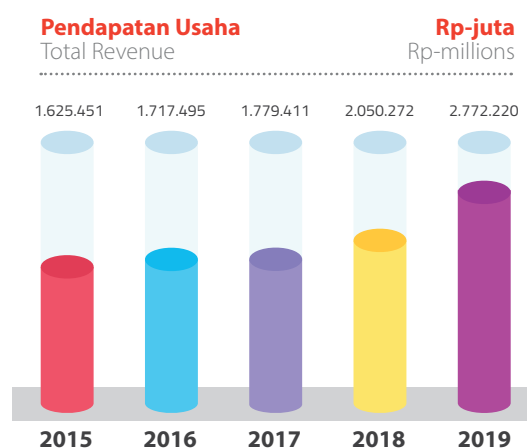
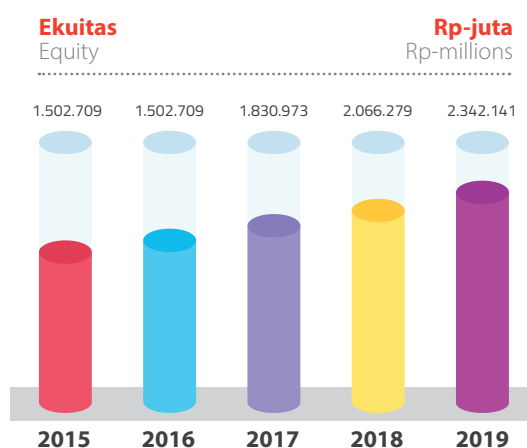
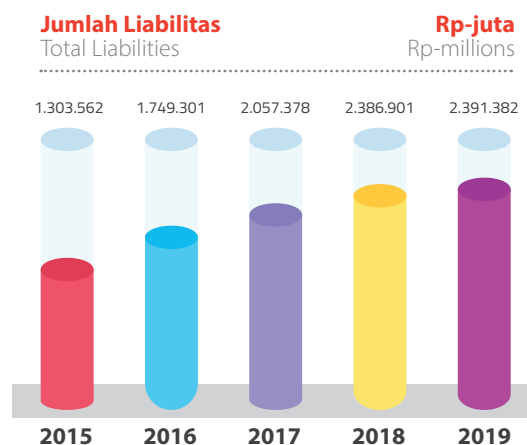
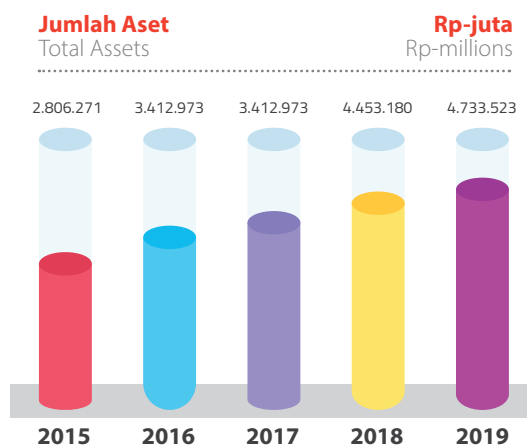
dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flow							
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*	2016**	2015
	%	Juta Rp Millions of Rp					
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	102,80	216.549	427.195	210.646	186.204	304.769	364.005
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	54,16	154.528	(130.796)	(285.324)	(444.723)	(545.565)	(307.110)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(159,61)	(348.835)	(130.282)	218.553	242.069	113.769	125.033
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate on cash and cash equivalents	(147,84)	(38.404)	(12.427)	25.977	(1.956)	13.114	(38.959)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas Increase (decrease) of net cash and cash equivalents	(9,52)	(16.162)	153.690	169.852	(18.406)	(113.913)	142.969
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of year	43,45	169.852	560.808	390.956	409.362	523.275	380.306
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of year	27,41	153.690	714.498	560.808	390.956	409.362	523.275

Rasio Keuangan Financial Ratios						
Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017*	2016**	2015
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios						
Rasio Kas Cash Ratio	%	52,90%	44,36%	31,25%	37,68%	80,03%
Rasio Lancar Current Ratio	%	131,58%	119,55%	91,39%	104,23%	163,58%
Rasio Solvabilitas Solvability Ratios						
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset Equity to Total Assets	%	49,48%	46,40%	47,09%	48,70%	55,23%
Kolektibilitas Piutang Collection Period						
Rata-rata Periode Penagihan Piutang Average Collection Periods (ACP)	hari days	84,59	93,89	98,44	130,61	108,55
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios						
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity	%	14,41%	15,62%	11,10%	10,89%	18,35%
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment	%	13,57%	13,42%	10,85%	12,13%	15,09%
Marjin Laba Operasi (OPM) Operating Profit Margin (OPM)	%	14,13%	20,57%	13,54%	14,30%	18,16%
Marjin Laba Bersih (NPM) Net Profit Margin (NPM)	%	10,64%	13,61%	10,28%	9,00%	14,29%
Rasio Aktivitas Activity Ratios						
Perputaran Persediaan Inventory Turn Over (ITO)	hari days	0,00	0,00	0,07	0,03	0,04
Perputaran Total Assets Total Assets Turn Over (TATO)	%	60,14%	46,98%	48,92%	56,31%	61,41%

GRAFIK IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE GRAPH



IKHTISAR KINERJA BISNIS DAN OPERASIONAL

BUSINESS AND OPERATIONAL PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Ikhtisar Kinerja Bisnis dan Operasional Business and Operational Performance Highlights								
Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018	2017	2016	2015
		%	Nominal					
HSSE								
NOA (Number of Accident)	kejadian occurence	0,00%	0	0	0	0	0	0
Fatalitas Fatalities	-	-	0	0	0	0	0	0
Tumpahan Minyak	-	-	0	0	0	0	0	0
TRIR (Total Recoverable Incident Rate)	-	(100,00%)	(0)	0	0,34	0	0,99	0,37
Jam kerja selamat Safe Working Hours	-	6,18%	365.088	6.271.064	5.905.976	5.333.160	3.012.032	2.722.824
Sumber Daya Manusia (SDM) Human Resource (HR)								
Pekerja Permanent Permanent Employee	orang people	(5,72%)	(21)	346	367	366	367	348
Pekerja Temporary Temporary Employee	orang people	(52,38%)	(44)	40	84	55	88	35
Pekerja Outsourcing Outsourced Employees	orang people	27,03%	60	282	222	188	190	197
Eksplorasi Kapal Ship Exploitation Activities								
Jumlah Armada Kapal Milik Amount of Owned Ships	unit	25,37%	17	84	67	54	44	38
Jumlah Operation Days Kapal Milik dan Brokerage Total Operation Days of Own Vessels and Brokerage	hari days	34,37%	7.457	29.151	21.694	16.275	8.320	7.927
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Own Vessels	hari days	17,67%	3.456	23.015	19.559	13.604	11.037	10.524
Volume Angkut COA COA Freight Volume	kl	0,45%	3.492	784.003	780.511	834.363	804.853	814.271
Jasa Maritim Marine Service								
Jumlah Call Keagenan Tanker Pusat dan Cabang Total Tanker Agency Call Head and Branch Offices	call	41,46%	692	2.361	1.669	2.163	1.913	1.414
Jumlah Call Administrasi Pelabuhan Khusus Total Administration Call of Specific Port	call	(100,00%)	(24)	0	24	278	350	3.206
Jasa Operasi Kepelabuhan – Deiversifikasi Usaha Port Operations Service – Business Diversification								
Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhan Port Operations Service Segment Income		80,25%	615.473	1.382.443	766.970	735.995	-	-

IKHTISAR SAHAM DAN/ATAU EFEK LAINNYA

OTHER SHARES AND/OR SECURITIES SUMMARY

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PTK tidak melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham umum maupun penerbitan efek lainnya. Oleh karena itu, PTK tidak memiliki informasi terkait ikhtisar saham dan/atau efek lainnya.

As of December 31, 2019, PTK has not executed any corporate action related to shares public offering or other securities issuance. Therefore, PTK does not disclose any information related to shares and/or other securities highlights.

IKHTISAR DIVIDEN

DIVIDEND SUMMARY

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan 2019, PTK tidak memberikan dividen kepada pemegang saham atas laba Perusahaan tahun 2018.

Pursuant to Annual GMS 2019 resolutions, PTK did not pay dividends to the shareholders from the Company's profit in 2018.

IKHTISAR KINERJA LAINNYA

OTHER PERFORMANCE SUMMARY

Kinerja Lainnya Other Performance			
Uraian Description	2019	2018	2017
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Soundness Level	91,00 (AA) SEHAT HEALTHY	94,37 (AA) SEHAT HEALTHY	82 (AA) BAIK GOOD
Skor GCG GCG Score	77,73 BAIK GOOD	80,06 BAIK GOOD	71,64 CUKUP BAIK FAIR



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank





LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

- 18** Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioner's Report
- 26** Laporan Direksi
Board of Director's Report

LAPORAN KOMISARIS UTAMA

REPORT FROM PRESIDENT COMMISSIONER



Ignatius Tallulembang
Komisaris Utama
President Commissioner



Mendorong Pengelolaan Perusahaan yang Berkinerja Positif

Encourage Company's Management with Positive Performance

“

Di tengah situasi yang dipenuhi tantangan, Perusahaan berhasil mencatatkan kinerja yang menggembirakan baik operasional dan keuangan di tahun 2019. Hal tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh insan PTK untuk mendorong pengelolaan Perusahaan yang berkinerja positif.

Amidst the challenging situation, the Company managed to record a satisfying operational and financial performance in 2019. This is contributed from hard work of all PTK's people to encourage the Company's management with positive performance.

”

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

OUR ESTEEMED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

Perkenalkanlah kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan Pengawasan Kinerja Direksi PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019. Apa yang kami sampaikan dalam laporan ini merupakan hasil penelaahan secara mendalam atas jalannya operasional Perusahaan.

On behalf of Board of Commissioners, allow us to present Supervisory Report over Performance of PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) performance for the fiscal year ended on December 31, 2019. We would present several matters as result of in-depth review over the Company's operations.

Selain itu, laporan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi dan peranan kami selaku Dewan Komisaris dalam melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* – GCG) dalam rangka *check and balance* serta transparansi informasi bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Furthermore, this report is an inseparable part of our function and role as the Board of Commissioners in exercising Good Corporate Governance (GCG) principles with regards to check and balance as well as information transparency for all Stakeholders.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DIJALANKAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah ikut mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional secara intens untuk bahan kajian dan rekomendasi

VIEW ON BUSINESS PROSPECT IMPLEMENTED BY BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2019, the Board of Commissioners has been carefully watching development of the global and national economy as materials of our review and recommendations

atas jalannya Perusahaan. Dan sebagaimana dapat kita rasakan bersama, situasi perekonomian global di tahun 2019 memang tidak cukup menggembirakan dan turut mempengaruhi perekonomian nasional. Perkembangan yang demikian itu telah memberikan efek domino terhadap industri dan para pelaku pasar.

Apa yang sering disampaikan dan dipaparkan oleh Direksi kepada kami selaku Dewan Komisaris, memang memiliki pijakan dan dasar yang kuat untuk mendorong pencapaian baru dalam bisnis PTK di tahun 2019. Kami selaku Dewan Komisaris juga menyepakati terobosan-terobosan yang diambil manajemen seraya tetap memberikan arahan, masukan, serta nasihat-nasihat kepada Direksi untuk menjalankan operasional Perusahaan dengan penuh tanggung jawab.

Akhirnya, sampailah kami pada satu kesimpulan bahwa semua langkah dan inisiatif yang diambil Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan di tahun 2019, tetap memberikan prospek yang baik. Untuk itu kami menilai apa yang dilaksanakan Direksi sudah *on track* dalam merespon berbagai perubahan dan dinamika industri dengan melakukan tiga langkah utama yaitu melalui: diversifikasi usaha, digitalisasi proses bisnis, dan penguatan SDM.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Melalui pengamatan dan penelaahan secara mendalam di sepanjang tahun 2019 terhadap kinerja Direksi, kami berpendapat bahwa program kerja yang disusun Direksi sudah sesuai untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Secara khusus, penilaian atas kinerja Direksi didasarkan kepada capaian kinerja operasional maupun keuangan.

Pendapatan jasa Kapal Milik mengalami kenaikan 6,12% atau setara dengan Rp52,29 miliar dari Rp854,54 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp906,83 miliar pada tahun 2019. Sedangkan pendapatan Back-to-Back Charter mengalami pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 33,98% dari Rp188,72 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp252,86 miliar.

over the Company's operations. And broadly sensed, the global economic situation in 2019 was relatively sluggish and also affected the national economy. This development had encouraged a domino effect to the industry and market players.

Several issues that were often presented and explained by the Board of Directors to us as the Board of Commissioners, does have a solid foundation and foundation to encourage new achievements in the PTK business throughout 2019. As the Board of Commissioners, we also approved the breakthroughs taken by management while continuously direction, recommendation, as well as advice to the Board of Directors to perform the Company's operations with responsible manner.

Finally, we arrive in a conclusion that all of the steps and initiatives taken by the Directors in running the Company's business in 2019 have provided good prospects. For this reason, we consider that what the Board of Directors has been implemented on track in responding to every industry dynamics and by adapting three main initiatives such as: business diversification, business processes digitalization and HR development.

ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

Through the in-depth observation and review over the Board of Directors performance throughout 2019, we assume that the work program prepared by the Board of Directors has been suitable to achieve the Company's vision and mission. Specifically, assessment on Board of Directors' performance is based on the operational and financial performance achievement. 2019.

Revenues from own vessels services increased by 6.12% or equal to Rp52.29 billion from Rp854.54 billion in 2018 to Rp906.83 billion in 2019. Meanwhile, Back-to-Back Charter income grew by 33.98% in 2019 from Rp188.72 billion in 2018 to Rp252.86 billion.



Sementara itu untuk jasa maritim atau keagenan memang mengalami penurunan sebesar 3,34% dari Rp238,04 miliar di tahun 2018 menjadi Rp230,09 miliar pada tahun 2019. Meskipun demikian, kinerja cabang tercatat melebihi target yakni 2.320 *call* dari target yang ditetapkan sebesar 1.813 *call*, atau tercapai 127,96%.

Direksi juga berhasil mendorong Perusahaan membukukan pertumbuhan pendapatan tertinggi untuk jasa operasi kepelabuhan dibandingkan dengan segmen lainnya. Pada tahun 2019, jasa operasi kepelabuhan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,38 triliun atau tumbuh 80,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi keuangan, jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4,73 triliun, meningkat 6,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,45 triliun. Perusahaan mencatat kenaikan laba tahun berjalan sebesar 5,70% dari Rp279,09 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp295,00 miliar pada tahun 2019. Jumlah penghasilan komprehensif Perusahaan turut tumbuh 17,24% menjadi Rp2,76 triliun pada tahun 2019.

Selain pencapaian di atas, Dewan Komisaris juga mengapresiasi atas kinerja Tingkat Kesehatan Perusahaan di 2019 yang memiliki skor 91,00 (AA) atau kategori Sehat. Kami juga ikut berbangga karena PTK berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang tahun 2019, diantaranya *Brand Identity* Terbaik Corporate Branding Anak Perusahaan BUMN yang diberikan oleh majalah BUMN Track.

PENERAPAN GCG DAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memandang bahwa penguatan GCG secara holistik ikut memberikan peranan penting bagi pencapaian kinerja PTK selama ini. Diantaranya adalah Pencapaian PTK sebagai *Top Three* untuk *Downstream Category Implementation of Good Corporate Governance* 2018 pada ajang *Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) 2019*. Hal itu membuktikan bahwa PTK telah menerapkan *best practice* dalam setiap operasi bisnisnya. Pencapaian ini merupakan kinerja dan strategi Perusahaan dalam penerapan operasional sehingga mendorong pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

On the other hand, revenues from maritime or agency services that decreased by 3.34% from Rp238.04 billion in 2018 to Rp230.09 billion in 2019. However, performance of the branch office exceeded the target with 2.320 calls from 1.813 calls targeted, or achieved 127.96%.

The Board of Directors also succeeded in encouraging the Company to record the highest revenue growth for port operating services compared to other segments. In 2019, port operating services generated revenue of Rp1.38 trillion or grew 80.25% compared to the previous year.

Financial wise, As of December 31, 2019, the Company booked total assets of Rp4.73 trillion, increased by 6.30% if compared to Rp4.45 trillion booked in previous year. The Company also recorded profit for the year growth by 5.70% from previously was Rp279.09 billion in 2018 to Rp295.00 billion in 2019. Total comprehensive income also grew by 17.24% to Rp2.76 trillion in 2019.

In addition to the achievements mentioned above, the Board of Commissioners would also appreciate the Company's soundness level achieving the score of 91.00 (AA) or Health category. We are also proud as PTK managed to receive awards throughout 2019, including the The Best Brand Identity of Corporate Branding for Subsidiary of SOEs awarded by BUMN Track magazine.

GCG IMPLEMENTATION AND BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION

The Board of Commissioners views the holistic GCG enforcement also contributes an important role for the PTK's performance achievement until now. This includes PTK's achievement as Top Three for Downstream Category Implementation of Good Corporate Governance 2018 in Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) 2019. This proves that PTK has implemented best practice in every business operations. This achievements becomes the Company's performance and strategy in the operational activity thereby will encourage a sustainable growth of the Company.

Pengukuran kinerja implementasi GCG PTK di 2019 juga ditunjukkan dengan hasil penilaian oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor 77,73 berkategori "Baik". Hasil ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan skor penilaian GCG oleh BPKP tahun 2017 yang mendapatkan skor 71,64.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan kinerja Direksi melalui rekomendasi-rekomendasi yang meliputi: (1) Persetujuan kesepakatan KPI direktur utama tahun 2018; (2) Persetujuan realisasi KPI direktur utama 2018 *audited*; (3) KPI direktur utama tahun 2019 dan tahun 2020; (4) Persetujuan RKAP tahun 2019 dan 2020 serta revisi RKAP tahun 2020; (5) Persetujuan revisi ABI 2019; (6) Persetujuan penghapusan dan pelepasan Kapal MPV Petrogas 2 dan RIB 4 serta persetujuan penggunaan kembali RIB 2.

Assessment on the GCG implementation performance at PTK in 2019 is also indicated by result of assessment by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) with the score of 77.73 with "Good" category. The result increased significantly compared to the score GCG assessment by BPKP that achieved the score of 71.64.

Throughout 2019, the Board of Commissioners have performed the supervisory function over the Board of Directors performance through the recommendations, including: (1) Approval on agreement of President Director KPI for 2018; (2) Approval on realization of President Director audited KPI for 2018; (3) President Director KPI for 2019 and 2020; (4) Approval on RKAP for 2019 and 2020 and RKAP 2020 revision; (5) Approval on ABI 2019 revision; (6) Approval on MPV Petrogas 2 and RIB 4 Vessels disposal and approval on the re-utilization of RIB 2.

PANDANGAN ATAS PELAKSANAAN PROGRAM CSR

Adalah sangat tepat keputusan manajemen Pertamina Trans Kontinental yang menitikberatkan kepada empat isu utama CSR yakni di bidang pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesehatan. Isu-isu tersebut memang dipandang krusial dan menjadi perhatian PT Pertamina (Persero) sebagai induk Perusahaan yang menjadi arahan implementasi CSR kami. Meskipun pada detail kegiatannya PTK memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam menentukan target, sasaran, serta bentuk-bentuk kegiatannya.

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen telah melakukan tahapan yang sangat baik, diantaranya melakukan *due diligence* terlebih dahulu sebelum membuat keputusan dan menentukan target pelaksanaan CSR. Bahkan manajemen juga melibatkan pihak perguruan tinggi untuk melakukan *social mapping* dan *assessment program*. Dengan demikian implementasi CSR benar-benar didasarkan oleh kajian yang ilmiah dan mengedepankan kewajiban.

VIEW ON CSR PROGRAM IMPLEMENTATION

Decision of Pertamina Trans Kontinental's management to emphasize on four main CSR issues on education, environment, social economics development and health has been very precise. These issues are seen crucial and have become the concern of PT Pertamina (Persero) as Parent Company as well as the direction of our CSR implementation direction. Despite on the detail activity PTK still has flexibility and independency to set the target, objectives as well as other activities.

In the implementation process, the management has implemented a very good steps, including the advance due diligence prior taking decision and setting the CSR implementation target. The management has even involved the universities to perform social mapping and assessment program. Therefore, the CSR implementation can be really departed from a factual review and promoting fairness principle.



Untuk itu Dewan Komisaris mengapresiasi langkah-langkah tersebut dan hendaknya dipertahankan serta ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah menjaga efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran anggaran sebesar Rp1,48 miliar di tahun 2019.

Therefore, the Board of Commissioners appreciates the steps and shall be maintained as well as enhanced for the upcoming years. This includes to maintain effectiveness and accuracy of the budget disbursement target of Rp1.48 billion in 2019.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WBS DAN PERAN DEWAN KOMISARIS

PTK telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sejak tahun 2014, dengan tujuan menciptakan kegiatan operasional Perusahaan yang bersih dan mencegah praktik penyimpangan. Dengan demikian pengalaman Perusahaan dalam menerapkan sistem ini sudah cukup banyak sehingga semakin meningkatkan kemampuan dalam mencegah praktik penyimpangan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris juga memiliki peranan penting sebagai badan yang berada di atas Direksi untuk terus memantau dan mengawasi efektivitas jalannya WBS.

Dewan Komisaris terus mendorong agar penerapan WBS ini dijadikan perwujudan nyata dari komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan praktik terbaik dari tata kelola Perusahaan, yaitu sebagai dasar memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atas asas kewajaran dan kesetaraan.

Kami juga mengapresiasi langkah manajemen yang intens melakukan sosialisasi WBS melalui media *wallpaper* yang terdapat di *desktop* seluruh pekerja, sehingga memudahkan dalam menyalurkan pengaduan melalui WBS. Hasilnya cukup menggembirakan dengan terjaringnya 1 pengaduan serta penanganan yang telah diproses sebagaimana mestinya.

VIEW ON WBS IMPLEMENTATION AND ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

PTK has implemented the Whistleblowing System (WBS) since 2014, with the purpose to establish clean operational activity within the Company and to prevent any unlawful practice. Therefore, experience of the Company in implementing this system has been sufficient and will improve our capability in preventing any fraud case. In this case, the Board of Commissioners also holds an imperative role as a structure above the Board of Directors to supervise and oversee effectiveness of the WBS implementation.

The Board of Commissioners always encourages the WBS implementation as manifestation of the Company's commitment in implementing the Corporate Governance best practice, as the basis to concerns interests of the stakeholders upon the fairness and equality principles.

We would also appreciate initiatives by the management who have intensely disseminated WBS through wallpaper media on the desktops of all employees, to ease the report submission via WBS. The result is quite favourable with 1 report accepted and the handling has been processed appropriately.

PANDANGAN ATAS KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi GCG. Hal ini untuk memastikan bahwa Perusahaan telah menjalankan GCG dengan baik dan sesuai kaidah bisnis.

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melakukan penelaahan melalui rapat, dan berdasarkan kesimpulan penelaahan rapat tersebut, disampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain: (1) Penelaahan informasi keuangan dan kinerja keuangan; (2) Pengawasan atas pekerjaan auditor eksternal; (3) Evaluasi efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi audit internal; (4) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Dewan Komisaris memandang semua fungsi dan tugas Komite Audit telah berjalan dengan baik sesuai aturan tata kerja yang telah ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2 (dua) kali perubahan susunan Dewan Komisaris PTK melalui RUPS Sirkuler yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Dharmawan H. Samsu selaku Komisaris Utama. RUPS Sirkuler juga mengangkat dan menetapkan Ignatius Tallulembang sebagai Komisaris Utama. Perubahan komposisi Dewan Komisaris ini dilakukan karena penugasan lain.

RUPS Sirkuler juga memberhentikan dengan hormat Joko Eko Purwanto selaku Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Alfian Nasution sebagai Komisaris. Perubahan komposisi Dewan Komisaris ini dilakukan untuk penyegaran dinamika organisasi dan penugasan lain. Berikut adalah komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris PTK sepanjang tahun 2019:

ASSESSMENT ON PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing the duties, the Board of Commissioners is supported by Audit Committee to supervise GCG implementation. This aims to assure the Company has implemented GCG appropriately and according to the business practice.

Throughout 2019, Audit Committee has conducted several reviews through meetings, and, according to the meeting review summary, the recommendations have been submitted to the Board of Commissioners, among others: (1) Review on financial information and performance; (2) Monitoring on external auditor's duties; (3) Evaluation on effectiveness of internal control and internal audit function implementation; (4) Compliance to the law and regulation.

The Board of Commissioners view all of the Audit Committee's functions and duties have been implemented properly based on working procedure as stipulated in the Audit Committee Charter.

CHANGES IN BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Throughout 2019, there were 2 (two) changes in Board of Commissioners composition in PTK through Circular GMS that decided to honorary dismiss Dharmawan H. Samsu as President Commissioner. The Circular GMS also appointed and stipulated Ignatius Tallulembang as President Commissioner. The changes in Board of Commissioners composition were following other assignments to the former members.

The Circular GMS also honorary dismissed Joko Eko Purwanto as Commissioner and appointed as well as stipulated Alfian Nasution as Commissioner. Changes in Board of Commissioners composition were done with the purpose of organizational dynamics refreshment and other assignments. The PTK's Board of Commissioners composition and terms of office throughout 2019 are as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition and Terms of Office

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Terms of Office
Dharmawan H Samsu	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 1 tanggal 10 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 10, 2018	1 Januari 2019 – 19 September 2019 January 1, 2019 – September 19, 2019
Ignatius Tallulembang	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2019 Deed No.5 dated October 7, 2019	19 September 2019 - 31 Desember 2019 September 19, 2019 – December 31, 2019
Joko Eko Purwanto	Komisaris Commissioner	Akta No. 28 tanggal 28 September 2018 Deed No. 28 dated September 28, 2018	1 Januari 2019 - 1 November 2019 January 1, 2019 – November 1, 2019
Alfian Nasution	Komisaris Commissioner	Akta No.7 tanggal 20 November 2019 Deed No.7 dated November 20, 2019	1 November 2019 – 31 Desember 2019 November 1, 2019 - December 31, 2019
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018 Deed No. 15 dated February 14, 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 - December 31, 2019
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 14, 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 - December 31, 2019

PENUTUP

Sebagai penutup, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh pekerja atas berbagai upaya, kerja keras, serta kesungguhan yang telah diberikan sepanjang tahun 2019.

CLOSING REMARKS

As our closing remarks, the Board of Commissioners would convey the utmost appreciation and gratitude to the Board of Directors and all employees for their endeavours, perseverance and dedication throughout 2019.

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of The Board of Commissioners



Ignatius Tallulembang
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR'S REPORT



Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama
President Director

Optimisme di Tahun yang Penuh Tantangan

Optimism in Year full of Challenges

“

Tahun 2019 merupakan periode menantang bagi Pertamina Trans Kontinental yang dihadapi dengan optimisme melalui serangkaian langkah strategis. Kami bersyukur telah berhasil melaluinya dengan baik serta mencatatkan sejumlah prestasi dan kinerja yang membanggakan.

Year of 2019 became a challenging period for Pertamina Trans Kontinental that was encountered with optimism through series of strategic initiatives. We are grateful to close the year very well and recorded some proud accomplishments and performance.

”

PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG KAMI HORMATI,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya kita mampu melalui periode yang penuh tantangan di tahun 2019 dengan prestasi dan catatan yang membanggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil kinerja Perusahaan sebagaimana disajikan dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) untuk Tahun Buku 2019.

OUR VALUED SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS,

We would praise the Almighty God for His blessings and guidance, we successfully passed a year full of challenges throughout 2019 with proud achievements and records. In this opportunity, allow us to present the Company's performance report as presented in PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Annual Report Fiscal Year 2019.

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi melambat pada tahun 2019. Laporan Bank Dunia dengan tajuk *Global Economic Prospects* menyebutkan ekonomi dunia tahun 2019 hanya mampu tumbuh 2,4%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu maupun proyeksi sebelumnya. Kendati demikian, Bank Dunia memperkirakan perekonomian global akan memulih dengan angka pertumbuhan 2,5% pada tahun 2020. Hal ini terutama karena ketegangan perang dagang yang berangsur mereda seiring dengan negosiasi bilateral antara Amerika Serikat dan Cina yang dimulai sejak Oktober 2019.

ECONOMICS AND INDUSTRY REVIEW

The global economic growth is predicted to slow down in 2019. A report by the World Bank titled *Global Economic Prospects* claimed that the global economy in 2019 will only grow by 2.4%, lower than last year and previous projections. Nevertheless, the World Bank estimated that the global economy will recover with a growth rate of 2.5% in 2020. This is mainly due to the gradually subsided tension of the trade war following the bilateral negotiations between the United States and China which began in October 2019.

Kondisi perekonomian global yang masih tertekan tersebut juga berpengaruh secara domestik. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2019 tumbuh di angka 5,02%. Situasi demikian pada akhirnya juga ikut mewarnai dinamika industri serta para pelaku pasar. Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang di 2019, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam kebijakan moneter yang masih di atas 12%, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit.

The prolong pressure against the global economic conditions also affected the domestic level. The Central Statistics Agency (BPS) released data on Indonesia's economic growth in 2019, growing at 5.02%. Such a situation is eventually also overshadowed the industrial dynamics and market participants. The growth of the national shipping industry is considered will remain moderate in 2019, as dealing with several challenges. The national shipping will encounter some challenges, particularly related to monetary policy which will be still above 12%, while the national shipping profit margin will remain at single digit.

Berkaca dari situasi tersebut, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) tetap optimis dengan melakukan sejumlah insiatif strategis melalui diversifikasi usaha serta mendorong penambahan armada pada tahun 2019. Penambahan jumlah armada kapal merupakan keniscayaan seiring dengan meningkatkan permintaan jasa perkapalan serta jasa-jasa maritim yang tumbuh dari tahun ke tahun.

Reflecting on this situation, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) remains optimistic by performing series of strategic initiatives through business diversification and encouraging additional fleets in 2019. Increasing the number of vessels is a necessity along with increasing demand for shipping services and maritime services that is growing every year.

Sampai dengan akhir Desember 2019, total jumlah armada kapal yang dimiliki oleh PTK adalah sebanyak 84 unit. Mengalami penambahan jumlah kapal sebanyak 17 unit dari tahun 2018 sebanyak 67 unit kapal.

As of the end of December 2019, the total fleet of ships owned by PTK was 84 units. Experienced the addition of 17 ships from 2018 by 67 ships.

Kami juga berkeyakinan, terjaganya pertumbuhan ekonomi nasional akan mendatangkan prospek pertumbuhan yang menjanjikan bagi bidang usaha lain, seperti pengelolaan pelabuhan, keagenan kapal maupun diversifikasi usaha yang dijalankan Anak Perusahaan PTK. Untuk mewujudkan hal tersebut, PTK telah menyusun strategi yang meliputi strategi bisnis pelayaran; strategi pengelolaan pelabuhan dan layanan jasa maritim; serta strategi pengelolaan shorebase dan industri kelautan. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengarahkan tahun yang penuh tantangan dengan optimisme.

We also believe that the stable national economic growth will bring promising growth prospects for other business sectors, including port management, ship agency and business diversification run by subsidiaries of PTK. To realize this, PTK has compiled a strategy which also covers the shipping business strategy; port management and marine service strategies; and shorebase and marine industry management strategies. These initiatives are designed to navigate a challenging year with optimism.

TANTANGAN DAN KENDALA YANG KAMI HADAPI

Pada tahun 2019 kami menghadapi tantangan terkait penurunan mata uang Rupiah terhadap USD sehubungan dengan kebutuhan investasi pengadaan kapal-kapal baru yang harus dibeli dengan mata uang USD.

ISSUES AND CHALLENGES

In 2019, we will encounter the challenges related to the depreciation of Rupiah against USD related to the investment needs on new vessels procurements that shall be purchased in USD.



Tantangan berikutnya adalah kebijakan terkini pemerintah yang melarang membeli kapal dari luar negeri untuk jenis di bawah 4000 HP. Kebijakan ini mengharuskan untuk membeli kapal dari dalam negeri atau membangun kapal di galangan dalam negeri dengan risiko biaya yang lebih tinggi. Memang tersedia juga produk-produk dalam negeri dengan harga yang lebih terjangkau, namun kualitasnya masih belum memadai.

Tantangan lain adalah perubahan kebijakan pemerintah tentang keharusan membangun tanki-tanki minyak sendiri dalam waktu lima tahun, sementara investasinya membutuhkan jangka waktu hingga 20 tahun. Perubahan kebijakan ini membutuhkan kajian mendalam dari sisi manajemen risiko, mengingat ketidakpastian keberlangsungan kebijakan tersebut, apakah masih akan tetap berlaku atau berubah setelah jangka lima tahun.

Berbagai kondisi dan tantangan tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tarif jasa yang akan diberikan oleh Pertamina Trans Kontinental kepada customer.

The next challenge is the current government's policy that restricts the vessels purchase from overseas for types under 4000 HP. This policy requires the domestic vessels purchase or construction at the domestic docks to have higher cost risks. Indeed, there are some available domestic products with more affordable prices yet the quality is still considered inadequate.

Another challenge is the change in government policy concerning the urgency to build their own oil tanks within five years, while the investment requires a timeline up to 20 years. This policy change requires an in-depth study in terms of risk management, considering the uncertainty of the policy sustainability, whether it will continuously prevail or revise after five years of implementation.

These various conditions and challenges will surely affect the service tariffs that will be charged by Pertamina Trans Kontinental to the customers.

INISIATIF STRATEGIS

Kami telah mengkaji serta mengevaluasi semua perkembangan dan dinamika industri yang terjadi di tahun 2019 serta pengaruhnya terhadap Perusahaan. Kajian tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan target kinerja Perusahaan.

Meskipun dihadapkan pada situasi yang menantang di tahun 2019, kami merespon hal tersebut dengan penuh gairah dan optimisme. Di mana manajemen aktif menyusun berbagai langkah transformatif melalui diversifikasi usaha, digitalisasi proses bisnis, dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Seluruh materi yang kami sajikan dalam buku ini, secara ringkas kami sampaikan dalam laporan sebagai berikut.

Dalam bidang diversifikasi usaha manajemen melakukan penguatan anak-anak Perusahaan dengan mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Dalam hal digitalisasi proses bisnis, manajemen melakukan integrasi antar aplikasi dan platform

STRATEGIC INITIATIVES

We have reviewed and evaluated all of industrial developments and dynamics occurred throughout 2019 altogether with impact to the Company. The review generated policy recommendations and strategic initiatives to achieve the Company's performance targets and targets.

Despite dealing with challenging situation in 2019, we responded the condition with passion and optimism. Hence, the management have actively designed various transformative plans through business diversification, digitizing business processes, and strengthening Human Resources (HR). All of the material that we present in this book have been briefly presented in the following report.

In terms of business diversification, the management have strengthened our subsidiaries by driving innovation and operational efficiency. In encouraging the business process digitalization, the Management integrated existing separated

yang semula masih terpisah menjadi saling terhubung. Sedangkan di bidang penguatan SDM, kami melakukan scale up kompetensi para pekerja secara menyeluruh.

applications and platforms to connect to each other. Meanwhile, in HR enforcement initiative, we have implemented a competency a worker's competency scale up comprehensively.

ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN 2019

Melalui serangkaian langkah strategis yang kami paparkan di atas, kami bersyukur bahwa PTK di tahun 2019 masih mampu memberikan kinerja yang menggembirakan baik dari sisi operasional maupun keuangan sebagaimana dapat kami paparkan berikut ini:

Pada tahun 2019, pendapatan dari jasa Kapal Milik mengalami kenaikan 6,12% atau setara dengan Rp52,29 miliar dari Rp854,54 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp906,83 miliar pada tahun 2019. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah kapal Perusahaan menjadi 84 unit pada tahun 2019 dari semula 67 unit di tahun 2018.

Pendapatan Back-to-Back Charter mengalami pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 33,98% dari Rp188,72 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp252,86 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pendapatan cabang Balikpapan yang meningkat signifikan di tahun 2019.

Perusahaan mencatat pendapatan dari jasa maritim atau keagenan yang turun sebesar 7,38% dari Rp256,99 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp238,04 miliar pada tahun 2019, penurunan ini disebabkan oleh kinerja pusat yang hanya terealisasi 41 *call* dari target yang ditetapkan 580 *call* atau hanya tercapai 7,07%. Meskipun demikian, kinerja cabang tercatat melebihi target yakni 2.320 *call* dari target yang ditetapkan sebesar 1.813 *call*, atau tercapai 127,96%

Pendapatan dari jasa operasi kepelabuhan mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Pada tahun 2019, jasa operasi kepelabuhan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,38 triliun atau tumbuh 80,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh pengalihan kegiatan bisnis jasa Port Operation Service kepada anak usaha PTK yakni PT Peteka Karya Samudra.

ANALYSIS ON COMPANY'S PERFORMANCE IN 2019

Through series of strategic initiatives explained above, we are grateful that in 2019, PTK still managed to deliver a satisfying result in terms of operational and financial aspects as described below:

In 2019, revenues from own vessels services increased by 6.12% or equal to Rp52.29 billion from Rp854.54 billion in 2018 to Rp906.83 billion in 2019. The increase was in line with increasing number of the Company's vessels to 84 units in 2019 from previously was 67 units in 2018.

Back-to-Back Charter income grew by 33.98% in 2019 from Rp188.72 billion in 2018 to Rp252.86 billion. The growth was mainly contributed from Balikpapan branch that significantly increased in 2019.

The Company recorded revenues from maritime or agency services that decreased by 7.38% from Rp256.99 billion in 2018 to Rp238.04 billion in 2019, the decrease was due to the head office performance realization only booked 41 calls from 580 calls targeted or only achieved by 7.07%. However, performance of branch office exceeded the target with 2.330 calls from 1.813 calls targeted, or achieved 127.96%.

Revenues from ports operations services recorded the highest growth compared to other segments. In 2019, port operations earned the revenues of Rp1.38 trillion or grew by 80.25% compared to previous year. The growth was mainly driven by the shifting of Port Operation Service business activity to PTK's subsidiary, PT Peteka Karya Samudra.



Jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4,73 triliun, meningkat 6,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,45 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar Perusahaan sebesar 17,51% atau setara dengan Rp265,05 miliar.

Perusahaan mencatat kenaikan laba tahun berjalan sebesar 5,70% dari Rp279,09 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp295,00 miliar pada tahun 2019. Jumlah penghasilan komprehensif Perusahaan ikut tumbuh 35,21% menjadi Rp2,77 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha Perusahaan.

Pencapaian lain yang dapat kami catat di tahun 2019 adalah tingkat kesehatan Perusahaan yang memiliki skor 91,00 (AA) atau kategori Sehat. Selain itu sepanjang tahun 2019, Pertamina Trans Kontinental juga meraih sejumlah penghargaan diantaranya *Brand Identity* Terbaik Corporate Branding Anak Perusahaan BUMN yang diberikan oleh majalah BUMN Track.

As of December 31, 2019, the Company booked total assets of Rp4.73 trillion, increased by 6.30% if compared to Rp4.45 trillion booked in previous year. The increment was mainly driven by increasing current assets by 17.51% or equal to Rp265.05 billion.

The Company recorded profit for the year growth by 5.70% from previously was Rp279.09 billion in 2018 to Rp295.00 billion in 2019. Total comprehensive income also grew by 35.21% to Rp2.77 trillion in 2019. The increment was in line with the Company's revenues growth.

Other achievements recorded in 2019 is the Company's soundness level achieving the score of 91.00 (AA) or Health category. In addition, throughout 2019, Pertamina Trans Kontinental also won several awards such as The Best Brand Identity of Corporate Branding for Subsidiary of SOEs awarded by BUMN Track magazine.

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu kekuatan PTK adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan kemampuan beragam yang secara berantai dan bersinergi mendukung pencapaian Perusahaan. Pada tahun 2019, jumlah pekerja PTK sebanyak 668 orang, hanya berkurang sejumlah 5 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 673 pekerja. Penurunan tersebut erat kaitannya dengan tingkat *turn over* dari pekerja yang mengundurkan diri dan pekerja yang telah mencapai masa pensiun. Namun demikian, penurunan jumlah pekerja tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap jalannya operasi Perusahaan. Di sisi lain program regenerasi melalui rekrutmen pekerja baru juga tetap berjalan untuk memastikan keberlanjutan Perusahaan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pekerja, pada tahun 2019 manajemen telah menyelenggarakan berbagai program kompetensi bagi pekerja, diantaranya *technical training* di bidang mining, SHE, dan pengelolaan aset yang diikuti oleh 626 orang. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang diikuti oleh 442 orang pekerja.

HUMAN RESOURCES

One of PTK's strengths is Human Resources (HR) with various educational backgrounds and abilities that are synergized and consolidated to support the Company's achievements. In 2019, total employees of PTK achieved 668 people, was slightly decreased by 5 people compared to 673 employees in the previous year. The decrease is closely related to the turnover rate of resigned and retired employees. However, the decreasing number of employees did not have any significant impact on the Company's operational activities. Meanwhile, the regeneration program through the recruitment of new employees also continues to run to ensure sustainability of the Company.

In order to improve employee competency, in 2019, management has organized various competency programs for employees, including technical training in mining, SHE, and asset management aspects, which was attended by 626 people. This figure has increased compared to 2018 which was attended by 442 employees.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Seluruh rangkaian proses serta pencapaian yang kami raih selama ini, tidak dapat dilepaskan dari peranan implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance-GCG*). Pada tahun 2019 kami terus melakukan berbagai langkah dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas implementasi GCG. Sejalan dengan kelengkapan infrastruktur yang kami miliki, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsi dalam struktur GCG yang ada.

Di bidang manajemen risiko efektifitas sistem dijaga dengan peningkatan mekanisme pengelolaan dan proses penyusunan *Enterprise Risk Management* (ERM). Pelaksanaan fungsi internal audit, kelengkapan panduan kode etik, fungsi sekretaris Perusahaan, serta *whistleblowing system*, telah berjalan dengan baik.

Kami juga bersyukur pencapaian implementasi GCG di tahun 2019 yang diraih melalui *assessment* oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor 77,730 (masuk dalam kategori "Baik"). Hasil ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan skor penilaian GCG oleh BPKP tahun 2018 yang mendapatkan skor 71,639.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Di bidang CSR, Pertamina Trans Kontinental menyoroti empat isu utama yaitu Pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesehatan. Isu-isu tersebut kami pandang sangat krusial dan mendesak untuk dilaksanakan dalam program CSR PTK tahun 2019. Fokus perhatian PTK terhadap empat isu tersebut sejalan dengan program pemerintah serta arahan induk Perusahaan yakni PT Pertamina (Persero).

Adapun rumusan pelaksanaannya mengacu pada arahan dari induk Perusahaan yang mengemban misi Pemerintah untuk menciptakan SDM unggul agar Indonesia maju serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari kerangka tersebut, maka Pertamina Trans Kontinental menyusun rumusan program pelaksanaan CSR Perusahaan.

CORPORATE GOVERNANCE

The entire process and achievements are contributed from the role of Good Corporate Governance (GCG) implementation. In 2019, we have also implemented several initiatives to strengthen and improve quality of the GCG implementation. In line with the completion of existing infrastructure, the management also has evaluated functions in the existing GCG structure.

In risk management aspect, system effectiveness risk is also mitigated by improving the Enterprise Risk Management (ERM) formulation process and management. Implementation of internal audit, completion of Code of Conducts, corporate secretary function, and whistleblowing system have been implemented properly.

We are also grateful that the GCG implementation achievement in 2019 accomplished through assessment by the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) achieved the score of 77.730 (classified in "Good" category). The result improved significantly compared to GCG assessment score by BPKP of 71.639 in 2018.

SOCIAL RESPONSIBILITY

In CSR aspect, Pertamina Trans Kontinental emphasizes on four primary issues such as Education, Environment, Social Economic Development and Health. We view the issues are very crucial and urgent to be implemented in PTK's CSR program in 2019. Focus of PTK's concern on those four issues are in line with the Government's program as well as direction from PT Pertamina (Persero) as our parent company.

The implementation formulation refers to the direction of parent company who is mandated by the Government's mission to create excellent HR to develop Indonesia and improve welfare of the society. Based in this framework, Pertamina Trans Kontinental has formulated the Company's CSR program implementation guideline.

Sejalan dengan hal tersebut kami telah melakukan *social mapping* untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna menyusun program CSR agar tepat sasaran. *Mapping* tersebut meliputi letak geografis, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan lingkungan. Pada tahun 2019 *due diligence* dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan independen.

Perusahaan juga telah memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan amanah Undang-undang. Selama tahun 2019 Perusahaan telah merealisasikan anggaran Rp1,48 miliar untuk pembiayaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

In line with this purpose, we have conducted a social mapping to acknowledge the necessary requirements in order to design an effective CSR program. The Mapping covers geographical location, total population, social economics profile, educations, healthy, public facilities and environment. In 2019, we have also conducted a due diligence in collaboration with independent consultant.

The Company also has fulfilled Social and Environmental Responsibility (CSR) as mandated under the Law. Throughout 2019, the Company has allocated the budget of Rp1.48 billion to finance the Corporate Social Responsibility program activity.

PERUBAHAN KOMPOSISI SUSUNAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, terdapat 4 (empat) kali perubahan susunan Direksi PTK melalui RUPS Sirkuler. Perubahan komposisi Direksi dilakukan untuk penyegaran dinamika organisasi dan penugasan lain. Berikut adalah komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris PTK sepanjang tahun 2019:

CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Throughout 2019, there were 4 (four) changes in PTK Board of Directors composition through Circular GMS. The Changes in Board of Directors compositions were done as refreshment to the organizational dynamics and other assignments. The PTK's Board of Directors composition and terms of office throughout 2019 is as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi Board of Directors Composition and Terms of Office			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Terms of Office
Giri Santoso	PJ Direktur Utama Act. President Director	Akta No.12 tanggal 12 April 2017 Deed No.12 dated April 12, 2017	1 Januari 2019 - 15 Juli 2019 January 1, 2019 - July 15, 2019
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Akta No.5 tanggal 17 Juli 2019 Deed No.5 dated July 17, 2019	15 Juli 2019 - 31 Desember 2019 July 15, 2019 - December 31, 2019
Wedi Kamaludin	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No.32 tanggal 13 Oktober 2017 Deed No.32 dated October 13, 2017	1 Januari 2019 - 20 Juni 2019 January 1, 2019 - June 20, 2019
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No.4 tanggal 12 Juli 2019 Deed No.4 dated July 12, 2019	20 Juni 2019 - 31 Desember 2019 June 20, 2019 - December 31, 2019
Siswoyo	Direktur Operasi Operation Director	Akta No.1 tanggal 1 September 2016 Deed No.1 dated September 1, 2016	1 Januari 2019 - 02 April 2019 January 1, 2019 - April 2, 2019
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	Akta No.9 tanggal 24 April 2019 Deed No.9 dated April 24, 2019	2 April 2019 - 31 Desember 2019 April 2, 2019 - December 31, 2019
Demi aswan	Direktur Keuangan dan SDM Finance and Human Resources Director	Akta No.39 tanggal 18 Mei 2018 Deed No.39 dated May 18, 2018	1 Januari 2019 - 25 November 2019 January 1, 2019 - November 25, 2019
Nepos MT Pakpahan	PLT Direktur Keuangan dan SDM Act. Finance and Human Resources Director	Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019 Letter of Acting Appointment No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019	25 November 2019 - 31 Desember 2019 November 25, 2019 - December 31, 2019

PROSPEK USAHA

Perekonomian dunia di tahun 2020 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan menyusul adanya wabah penyakit yang ditimbulkan oleh virus Covid-19. Situasi tersebut juga membayangi perekonomian nasional akibat menurunnya lalu-lintas pergerakan manusia dan arus barang. Lembaga pemeringkat Moody's menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9% menjadi 4,8%. Virus Covid-19 menjadi pemicu penurunan tersebut karena menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global.

Meskipun demikian kebutuhan akan jasa-jasa maritim, logistik, dan kepelabuhanan masih akan berlangsung meski akan terjadi penurunan. Kondisi demikian telah diantisipasi oleh manajemen dalam kajian-kajian yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020. Seraya tetap mengedepankan optimisme yang diikuti dengan berbagai langkah efisiensi operasi bisnis melalui program digitalisasi, kami tetap meyakini bahwa usaha yang dijalankan oleh Pertamina Trans Kontinental tetap akan tumbuh dan berkelanjutan.

Peluang yang masih kita harapkan dan menjadi prospek yang baik di tahun 2020 adalah adanya program Sinergi Pertamina Group. Sinergi tersebut merupakan salah satu kerjasama untuk saling berbagi peluang antara PTK dengan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) grup lainnya. Dari program sinergi di tahun 2019, Pertamina Trans Kontinental memperoleh 7 kontrak bisnis senilai Rp 1 triliun.

Berkaca dari capaian tersebut, kami masih optimis dan meyakini bahwa usaha yang dijalankan oleh Pertamina Trans Kontinental masih akan memberikan prospek yang menjanjikan di masa mendatang.

APRESIASI

Kami bersyukur manajemen beserta jajaran di seluruh lini organisasi telah mendedikasikan serta mengerahkan segala kemampuan terbaik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan.

BUSINESS PROSPECT

In 2020, the global economy was projected to remain challenging following the pandemic of Covid-19 virus. The situation is also estimated will overshadow the national economy due to declining human and commodities traffic. Moody's, a rating agency, had the Indonesian economic growth projection this year corrected from 4.9% to 4.8%. The Covid-19 virus is seen as the trigger of the deceleration as causing the global economics activity slow down.

However, the demands on maritime, logistics and port services are seen prospective despite will also slow down. The management has anticipated the condition through the reviews as disclosed in the Company's Budget and Operations Plan (RKAP) for 2020. While keep promoting optimism followed by various business operation efficiency through digitalization program, we believe that the businesses run by Pertamina Trans Kontinental will still grow and sustainable.

We pursue an opportunity that become a promising prospect in 2020 after the Pertamina Group Synergy program implementation. The synergy becomes one of the cooperation to share opportunity between PTK and other subsidiaries of PT Pertamina (Persero) group. Based on the synergy program in 2019, Pertamina Trans Kontinental acquired 7 business contracts valued Rp1 trillion.

Reflecting from this achievement, we are optimistic and believe that the businesses run by Pertamina Trans Kontinental still bring a promising prospect in the future.

APPRECIATION

We are grateful that the management and everyone at all organizational lines have dedicated and contributed the best endeavours in exercising the mandated duty and responsibility.



Untuk itu, kami selaku Direksi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan atas kepercayaan, masukan dan saran dalam rangka pengembangan Perusahaan, baik di Tahun Buku 2019 maupun untuk tahun yang akan datang.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris yang secara aktif melakukan proses pengawasan serta pemberian saran dalam rangka terwujudnya pengelolaan Perusahaan yang tepat sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku.

Therefore, on behalf of Board of Directors, we would express the highest appreciation to the Shareholders and Stakeholders for their trusts, recommendation and suggestion to develop the Company, either throughout 2019 or in the future.

Our appreciation is also addressed to all of Board of Commissioners who have actively performed supervisory and advisory process to establish an effective management of the Company according to the prevailing regulation and standard.

Atas Nama Direksi
On behalf of The Board of Directors

Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama
President Director





PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

38	Sejarah Singkat Perusahaan Brief History	90	Pemegang Saham & Informasi Kepemilikan Saham Shareholders & Shares Ownership Information
42	Identitas Perusahaan Corporate Identity	91	Struktur Pemegang Saham Utama dan Pengendali Majority And Controlling Shareholders
46	Bidang Usaha Line Of Business	92	Kronologi Pencatatan Saham Share Listing Chronology
54	Visi, Misi Dan Tata Nilai Perusahaan Vision, Mission And Corporate Values	93	Kronologi Pencatatan Efek dan Obligasi Securities And Bonds Listing Chronology
64	Logo Dan Filosofinya Logo And The Philosophy	93	Nama & Alamat Lembaga dan/ atau Profesi Penunjang Name & Address Of Supporting Institution And/ Or Profession
66	Struktur Organisasi Organizational Structure	94	Jaringan Wilayah Operasi Operational Area
67	Daftar Nama Pengurus dan Pejabat Perusahaan List Of Management And Executives of The Company	96	Daftar Alamat Kantor Office Address
68	Profil Dewan Komisaris Board Of Commissioners Profile	100	Informasi Pada Website Perusahaan Information On Official Website
74	Profil Direksi Profile Of Board Of Directors	102	Penghargaan Dan Sertifikasi Tahun 2019 Awards And Certifications In 2019
80	Profil Pejabat Perusahaan Executives Profile	105	Peristiwa Penting Tahun 2019 Significant Events 2019
84	Sumber Daya Manusia Human Resources		
87	Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure		
88	Entitas Anak Dan/Atau Entitas Asosiasi Subsidiary And/Or Associated Company		

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY



Setengah Abad Melaju sebagai Perusahaan Maritime Services

Half of the Century as a Maritime Service Company Development for business continuity

“

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) selaku Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dibidang pelayaran jasa maritim terus melaju dengan kokoh pada usianya yang ke 50 tahun di 2019. Dalam kurun waktu tersebut sejumlah milestone dan prestasi telah ditorehkan. Diantaranya adalah diraihya dua penghargaan yaitu kategori Brand Identity Terbaik Corporate Branding Anak Perusahaan BUMN dan CMO Marketing Teamwork CMO Anak Perusahaan BUMN oleh lembaga independen.

As a subsidiary of PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Trans Kontinental engages in shipping and maritime services continues firmly in its 50th years of journey in 2019. Within this period, several milestones and achievements have been recorded, including two awards for The Best Brand Identity Corporate Branding Subsidiary of SOEs and CMO Marketing Teamwork CMO Subsidiary of SOEs categories from an independent institution.

”



Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969 di Jakarta yang menjalankan usaha di bidang industri jasa maritim. Perusahaan ini berfungsi memberikan dukungan bagi aktivitas PT Pertamina (Persero) dengan tiga kegiatan strategis yaitu:

- Pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang tidak dapat terjangkau oleh kapal tanker;
- Pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal – kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang disewakan.

The Company was formerly named PT Pertamina Tongkang and established on September 9, 1969 in Jakarta engaging maritime service industry. The Company is functioned to support activities of PT Pertamina (Persero) in three strategic activities, as follows:

- Provision of fuel distribution to all ports in the Indonesian territory that cannot be reached by tanker ship;
- Provision of maritime transport for Pertamina Logistik for the development of projects spread across the Indonesian territory;
- Acting as a General Agent and Handling Agent for chartered-out tanker ships owned by PT Pertamina (Persero).



Pada awalnya peranan PTK masih sebagai sebatas unit bisnis yang diperbantukan pada aktivitas pengembangan PT Pertamina (Persero). Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1974 Perusahaan menerima tambahan armada kapal sejenis supply vessel. Hal ini untuk melayani dan mendukung pelaksanaan eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai dan juga keperluan produksi.

In the beginning, PTK under the name of PT Pertamina Tongkang was assisted to the development activities of PT Pertamina (Persero). To support operations, in 1974 the Company received additional fleet of supply vessel-type ships to serve and support the implementation of offshore oil and gas drilling exploration and also production requirements.

Empat tahun kemudian Perusahaan memperluas layanan jasa pada perusahaan lain, menyusul selesainya program konstruksi depot bahan bakar baru di belahan timur dan tengah Indonesia. Selanjutnya, Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk tujuan mencari keuntungan dan fokus kepada aktivitas lepas pantai dengan menyediakan layanan:

Four years later, the Company expanded its services to other companies, following the completion of the new fuel depot construction program in the eastern and central regions of Indonesia. The Company altered its business model with the purpose of gaining profit and focusing in offshore activities by providing the following services:

- Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai
- Menjadi *Handling Agent* dari penyewa kapal milik PT Pertamina (Persero) dan kapal pihak ketiga.
- Assisting offshore oil and gas exploration
- Becoming a Handling Agent for charterers of vessels owned by PT Pertamina (Persero) and third parties.

Pada tahun 1988 Perusahaan melakukan penyesuaian izin dari semula izin bisnis sebagai perusahaan pelayaran yang spesifik di bidang lepas pantai sesuai Peraturan

In 1988, the Company aligned its licensing from the business license as a shipping company with specification in the offshore sector in accordance with



Pemerintah No. 17 tahun 1988 (Penataan Ulang dan Pengusaha dari Transportasi Laut), menjadi Perusahaan pelayaran dengan SIUPP No.3.XXX-256/AL.58. Penyesuaian perizinan diikuti penerbitan SIUPAL BXXV-1203/AL 58 pada tanggal 26 Maret 2002 oleh Direktorat Umum Komunikasi Kelautan Departemen Perhubungan.

Kian luasnya pelayanan dan jasa yang diberikan, menjadikan Perusahaan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya perubahan nama dari PT Pertamina Tongkang menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Perubahan nama berlaku efektif 29 November 2011 sesuai dengan Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Pada tahun 2019, Perusahaan memasuki usianya yang ke 50 tahun. Hal ini merupakan momentum penting bagi PTK untuk terus melanjutkan kiprahnya dengan melakukan berbagai pengembangan usaha. Langkah tersebut juga dilandasi dengan perubahan visi yaitu "menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dengan skala global pada tahun 2026".

Government Regulation No. 17 of 1988 (Sea Transport Organization and Business) to a shipping Company with SIUPP No. 3.XXX-256/AL.58. The licensing alignment was followed by the issuance of SIUPAL No. BXXV-1203/AL 58 on March, 26 2002 by the General Directorate of Sea Communications of the Department of Transportation.

The expanding provided services urged the Company to make several changes, including the name change from PT Pertamina Tongkang to PT Pertamina Trans Kontinental. The name change was effective from November 29, 2011 in accordance with Deed No. 012 of 26 October 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.02 of 2011 of 29 November 2011.

In 2019, the Company reached the age of 50 years. This becomes a very important momentum for PTK to advance our existence through various business developments. The initiatives are also supported by the revised vision to be "an integrated maritime service company on global scale in 2026."

IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY





Identitas Perusahaan Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	: PT Pertamina Trans Kontinental
Nama Singkat Nick Name	: PTK
Alamat Kantor Address	: Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450
Telepon Phone	: (+6221) 31923005
Faksimili Fax	: (+6221) 3106804
E-mail	: ptkpusat@ptk-shipping.com
Website	: www.ptk-shipping.com
Bidang Usaha Line of Business	: Jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik Shipping services, maritime services, and logistics services
Status Perusahaan Company Status	: Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Subsidiary of a State-Owned Enterprise (SOE)
Tanggal Berdiri Date of Establishment	: 9 September 1969 September 9, 1969
Tanggal Beroperasi Date of Operation	: 9 September 1969 September 9, 1969
Dasar Hukum Pendirian Usaha Legal Business of Establishment	: - Akta No 3 Tanggal 9 September 1969 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Tan Thong Kie, di Jakarta. - Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA yang disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, nama PT Pertamina Tongkang berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. - Deed No. 3 dated September 9, 1969 drafted by and before Notary Tan Thong Kie in Jakarta. - Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA approved under the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.01 Year 2011 dated November 29, 2011, the name alteration of PT Pertamina Tongkang into PT Pertamina Trans Kontinental.
Modal Dasar Authorized Capital	: Rp2.000.000.819.000,- Terbagi atas 2.000.000 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,- Rp2.000.000.819.000,- Terbagi atas 2.000.000 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-in Capital	: Rp693.708.819.000,- Terbagi atas 693.708 lembar saham seri A dengan nominal masing-masing Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,- Rp2,000,000,819,000 divided into 2,000,000 Series A shares with par value of Rp1,000,000 and 819 Series B Shares with par value of Rp1,000.
NPWP Tax Indication Number	: 01.000.501-5.051.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) Business Registry	: 8120110071176
SKDP	: 78/27.1BU.1/31.71.04.1004/071.562/e/2017 (Berlaku s/d 06 September 2022)
SIUPAL	: BXXV-1203/AL 58
SKPP	: PEM-00094/WPJ.07/KP01032005
Kantor Layanan Service Offices	: 1 Kantor Pusat Head Office 11 Kantor Cabang Branch Office 26 Kantor Sub-cabang Sub-Branch Office
Jumlah Pekerja Total Employees	: 668 Pekerja di tahun 2019 Employees in 2019 673 Pekerja di tahun 2018 Employees in 2018 609 Pekerja di tahun 2017 Employees in 2017
Pemegang Saham Shareholders	: PT Pertamina (Persero) 99,999% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0,001%
Serikat Pekerja Trade Union	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pertamina Trans Kontinental (SPSI PTK) Worker's Union of PT Pertamina Trans Kontinental

JEJAK LANGKAH MILESTONE



1969

Berdiri dengan nama PT Pertamina Tongkang pada tanggal 9 September 1969 di Jakarta, sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero).

Established under the name of PT Pertamina Tongkang on 9 September 1969 in Jakarta as a Subsidiary of PT Pertamina (Persero).

1978

Perubahan orientasi bisnis menjadi perusahaan komersial dengan melebarkan sayap untuk melayani perusahaan lain.

Changing the business orientation to a commercial company by expanding its wings to serve other companies

1987

Pendirian anak Perusahaan PT Peteka Karya Gapura

Establishment of the PT Peteka Karya Gapura subsidiary.

1991

Pendirian anak Perusahaan PT Peteka Karya Jala

Establishment of the PT Peteka Karya Jala as subsidiary

2002

Direktorat Umum Komunikasi Kelautan dengan peraturan barunya telah mengeluarkan SIUPAL B.XV-1203/ AL.58 pada tanggal 26 Maret 2002 untuk PTK

The Directorate General of Sea Communications with the new regulation issued SIUPAL B.XV-1203/ AL.58 on 26 March 2002 for PTK.

1988

Perubahan izin bisnis sebagai perusahaan di bidang lepas pantai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 Pendirian anak perusahaan PT Peteka Karya Tirta

Revision of the Company's business permit in the offshore sector based on Government Regulation No. 17 of 1988 Establishment of the PT Peteka Karya Tirta as subsidiary

1986

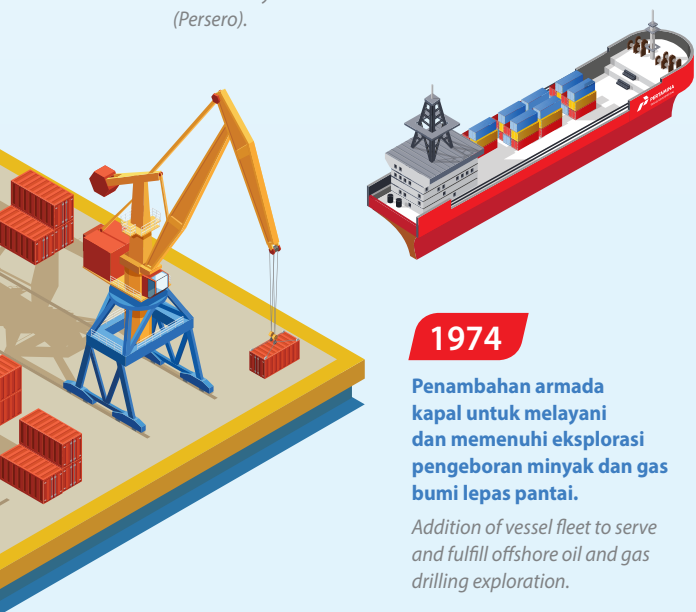
Pendirian anak perusahaan PT Peteka Karya Samudera

Establishment of the PT Peteka Karya Samudera subsidiary.

1974

Penambahan armada kapal untuk melayani dan memenuhi eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai.

Addition of vessel fleet to serve and fulfill offshore oil and gas drilling exploration.





2011

Perubahan nama menjadi PT Pertamina Trans Kontinental
Penetapan visi misi menjadi perusahaan bisnis pelayaran dan jasa maritim kelas dunia

Name alteration into PT Pertamina Trans Kontinental.
Establishment of the vision and mission to be a world class shipping business and maritime services company

2013

Sejak tanggal 3 Juli 2013, kepemilikan saham Perseroan berubah menjadi: 99,999% saham milik PT Pertamina (Persero), 0,001% milik PT Pertamina Training & Consulting

Since 3 July 2013, the shares ownership of the Company changed to 99.999% of shares owned by PT Pertamina (Persero), 0.001% of shares owned by PT Pertamina Training & Consulting

2015

Pencanangan Kebijakan Reborn, Revitalization, Expansion (RRE)

Initiation of the Reborn, Revitalization, Expansion (RRE) policy

2017

Peluncuran Dashboard Monitoring System:

- Ship Arrival and Departure Information System,
- Marine Service Application

The launch of the Dashboard Monitoring System:

- Ship Arrival and Departure Information System
- Marine Service Application

2019

- Memiliki kapal Harbour Tug Dual Fuel Pertama di Indonesia Transko Rajawali.
- Perubahan visi misi PTK, dengan misi: Menjadi perusahaan jasa maritime yang terintegrasi dengan skala global pada tahun 2026. Dan visi: Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, Keandalan Operasional dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam bidang:
 1. Penyedia jasa pelayaran sektor energi;
 2. Penyediaan layanan maritim;
 3. Penyediaan jasa logistik.

2018

Pengelolaan dan Pengembangan Shorebase Tanjung Batu

Tanjung Batu Shorebase Management and Development.

2016

Go International Bersandarnya Kapal MT Transko Aries di pelabuhan Terminal Singapura Sinergi antar anak perusahaan PT Pertamina (Persero)

Go International with the Docking of MT Transko Aries Ship at the Port of Singapore. Synergy among the subsidiaries of PT Pertamina (Persero).

2014

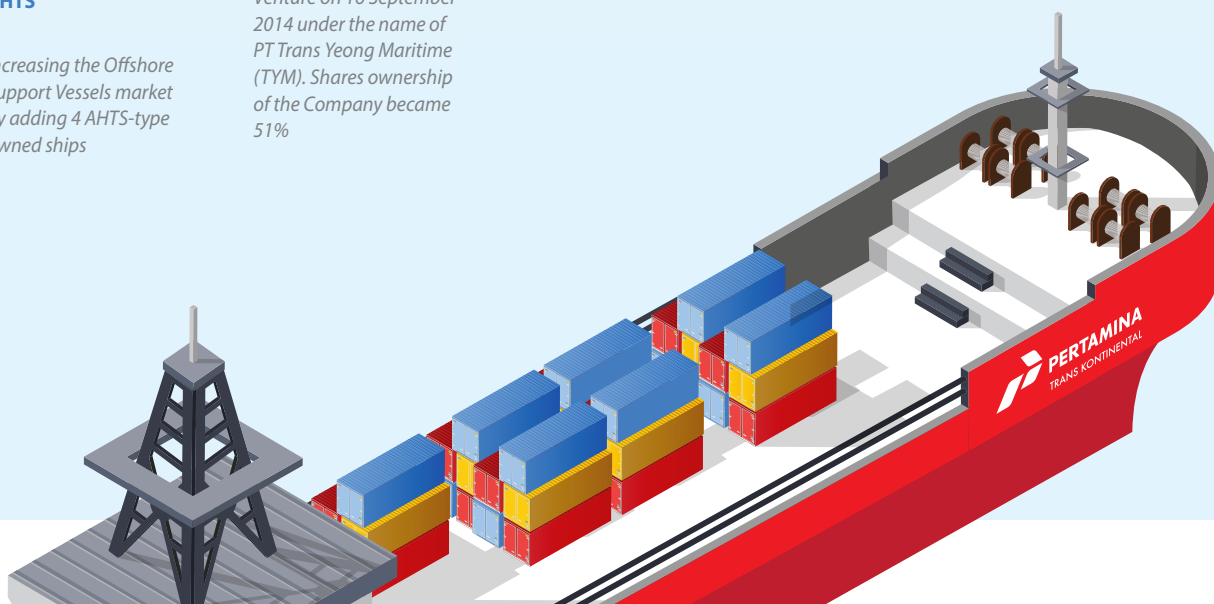
Pembentukan Perusahaan Patungan (Joint Venture) pada tanggal 26 September 2014 yang bernama PT Trans Yeong Maritime (TYM). Kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 51%.

Establishment of the Joint Venture on 16 September 2014 under the name of PT Trans Yeong Maritime (TYM). Shares ownership of the Company became 51%

2012

Peningkatan pangsa pasar Offshore Support Vessels dengan penambahan 4 kapal milik jenis AHTS

Increasing the Offshore Support Vessels market by adding 4 AHTS-type owned ships



PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Perusahaan ini semula bernama PT Pertamina Tongkang yang berdiri pada 9 September 1969. Pada tahun 2011, Perusahaan mengalami perubahan nama menjadi PT Pertamina Trans Kontinental sesuai Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA. Akta tersebut disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

NAME ALTERATION

The Company was formerly named PT Pertamina Tongkang and established on September 9, 1969. In 2011, the Company had its name altered into PT Pertamina Trans Kontinental according to Deed No. 012 dated October 26, 2011 by Notary Dewantari Handayani, MPA. The Deed was approved under Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia Decree No. AHU-58581.AH.01.02 year 2011 dated November 29, 2011.

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS



Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan No. 7 tanggal 3 Juli 2013, Pasal 3 disebutkan bahwa PTK menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik baik di dalam maupun luar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, jasa maritim dan jasa logistik tersebut.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association No. 7 of 3 July 2013, PTK runs business activities in the shipping services, maritime services, and logistics services line of business, whether domestic or overseas, as well as other business activities relevant to or supporting said business activities in the shipping services, maritime services, and logistics services line of business.



JASA PELAYARAN

Kegiatan usaha PTK dibidang jasa pelayaran adalah sebagai berikut :

- Usaha-usaha dalam bidang pengangkutan hasil industri pertambangan dan umum;
- Usaha dalam bidang pengangkutan laut antar pelabuhan serta jasa penunjangnya, baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal serta jasa penunjangnya;
- Usaha di bidang pelayaran/pengangkutan khusus peralatan dan kebutuhan pengeboran migas, muatan batubara, muatan cair dan gas serta kargo umum lainnya;
- Menjalankan usaha penunjang bidang pelayaran;
- Usaha di bidang jasa manajemen kapal/*ship management services (ship crewing, ship operator, ship maintenance)*;
- Menjalankan usaha penyewaan kapal (*ship chartering & brokerage*);
- Menjalankan usaha keagenan kapal (*ship agencies*);
- Usaha *salvage* dan penundaan kapal;
- Jasa pemeliharaan peralatan pelayaran (navigasi);

SHIPPING SERVICE

Business activity of PTK in shipping services are including:

- Business in the transport of mining and general industry products sector
- Business in the inter-port sea transport as well as supporting services, whether domestic or overseas, performed permanently and regularly and/or impermanent and irregular shipping using all types of vessels and supporting services sector
- Business in the specific shipping/freight of oil and gas drilling equipment and needs, coal cargo, liquid and gas cargo, as well as other general cargo
- Conducting the shipping sector supporting business
- Business in the ship management services sector (*ship crewing, ship operator, ship maintenance*)
- Conducting the ship charter business (*ship chartering & brokerage*)
- Conducting the ship agency business (*ship agencies*)
- Ship salvaging and delaying business
- Navigation equipment maintenance services (*navigation*)

JASA MARITIM

Kegiatan usaha PTK dibidang jasa maritim adalah sebagai berikut :

- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, tapi tidak terbatas pada kapal tanker, supply vessel, tongkang, kapal tunda dan RIB;
- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan general cargo;
- Melaksanakan *bunker service* berupa pengisian dan/atau pendistribusian BBM untuk kapal baik di laut maupun di darat;
- Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air untuk keperluan kapal dan industri;
- Melaksanakan kegiatan distribusi dan *supply* bahan bakar dan air untuk kebutuhan kapal-kapal, depot-depot dan industri;
- Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadang kapal dan alat transportasi lainnya;
- Melakukan jasa perencanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi-konstruksi bangunan di lepas pantai dan di bawah air beserta peralatannya;
- Jasa tank cleaning dan pengelolaan limbah (*sludge*);
- Melakukan usaha jasa bongkar muat barang di kapal;
- Melakukan usaha bidang kepelabuhanan dan administrasi pelabuhan khusus;

MARITIME SERVICE

Business activity of PTK in maritime services are including:

- Purchasing and selling of transportation and/or logistic equipment including spare-parts but are not limited in tankers, supply vessels, barge, tug boat, and RIB
- Liquid, gas and general cargo transport and storing business
- Providing bunker services including fuel oil refilling and/or distribution for vessels, whether on or offshore
- Conducting water processing and supply services for vessels and industry needs
- Conducting fuel and water distribution and supply activities for vessels, depots, and industry needs
- Conducting the ship manufacturing and repair business as well as provision of spare parts for ships and other means of transportation
- Conducting the business of planning, construction, repair, and maintenance services for vessels, flotation devices, and construction of offshore and underwater constructs and their equipment
- Tank cleaning and waste management (*sludge*) services
- Ship loading and unloading services
- Port Activities and Special Port Administration





- Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
- *Jasa Recognize Security Organization (RSO);*
- Survei kelautan mengenai arus dan kedalaman laut (*Hydrografi Oceanography* dan Pemetaan/HOP);
- Konstruksi bawah air berupa pemasangan dan pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut dan lain-lain;
- Jasa pengerukan dan reklamasi pantai;
- Jasa perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air;
- Jasa penyelaman dan pekerjaan bawah air.
- Ports and Special Ports Administration services
- Recognized Security Organization (RSO) services
- Maritime Survey on Ocean Stream and depth (Hydrographic and Oceanographic Prediction/HOP)
- Underwater construction service as submarine pipe and cable installation and maintenance and other services
- Beach dredging and reclamation services
- Subsea oil and gas project maintenance service
- Subsea diving and project services

Jasa Logistik

Kegiatan usaha PTK dibidang jasa logistik adalah sebagai berikut :

- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Jasa ekspor impor barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor impor (*customs clearance*);
- Mengadakan usaha di bidang International Freight Forwarding, tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman, dan pendistribusian barang;
- Penyewaan alat-alat berat dan atau peralatan kerja serta produksi;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang serta usaha lainnya (*logistic base*);
- Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.

Logistic Service

Business activity of PTK in logistic services are including:

- Conducting the liquid, gas, and general cargo transportation and storing business
- Export, import, and customs clearance services
- International Freight Forwarding business, not limited to logistics, delivery, and distribution services
- Heavy equipment and/or production equipment rental
- Storage, warehouse, logistics and distribution services of various commodities and other services (logistics base)
- Building and office rental and management services



BISNIS UTAMA DAN PRODUK USAHA

Penyediaan Kapal

PTK memiliki bisnis inti penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero), perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan lainnya.

Charter & Brokerage

Aktivitas bisnis melalui charter and brokerage dilakukan atas permintaan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh PTK. Charter and Brokerage dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Keagenan Kapal

PTK menyediakan layanan keagenan kapal sebagai Agen Umum (*General Agent*) atau Agen Penanganan (*Handling Agent*) untuk kapal yang berlabuh di semua pelabuhan di Indonesia. Sebagai keagenan kapal, maka tugas utama Perusahaan adalah mewakili pemilik/*principal* dalam

CORE BUSINESS AND BUSINESS PRODUCTS

Vessel Provider

PTK has the core business as a provider of vessels as an operational fleet, used in fulfilling the needs of charterers to support the offshore and onshore oil exploration activities, such as PT Pertamina (Persero), Contractors of Cooperation Contract (KKKS) oil and gas companies, and others.

Charter & Brokerage

Business activities through charter and brokerage are conducted on the basis of customer demand to meet the needs for types of vessels not owned by PTK. Charter and Brokerage is performed by chartering vessels according to demand.

Vessel Agency

PTK provides the ship agency services as a General Agent (GA) or Handling Agent (HA) for ships docking at all ports in Indonesia. As a ship agency, then the main duty of the Company is to represent the owner/*principal* in meeting the requirements or obligations for ships



memenuhi persyaratan atau kewajiban bagi kapal yang tiba di Indonesia. Selama periode pelaporan PTK telah melaksanakan keagenan kapal yang meliputi Agen Umum atau Agen Penanganan. Perusahaan menjadi Agen Penanganan di semua pelabuhan di Indonesia serta pelabuhan umum atau *port* tertentu. Jasa yang diberikan mencakup penyediaan *crew*, penanganan bunker, penyediaan air dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agen.

Jasa shipping agent yang diberikan PTK melayani:

- *In/out clearance* kapal di pelabuhan;
- Mengurus perizinan yang berkaitan dengan keimigrasian atau perhubungan laut;
- Menyiapkan fasilitas darat maupun laut;
- Layanan untuk awak dan kapal;
- Penyelesaian kewajiban keuangan (pencairan).

Tanggung jawab PTK sebagai *shipping agent*:

- Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan;
- Menyelesaikan Kewajiban finansial;
- Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia.

arriving in Indonesia. In the reporting period, PTK has performed ship agency which included General Agency and Handling Agency. The Company acts as a Handling Agent in all ports in Indonesia, whether general ports or special ports. The services provided include crew supply, bunker management, water provision, and agent-relevant activities.

The shipping agent services provided by PTK:

- *In / out clearance of ships at the port*
- *Managing permits relating to immigration or sea transportation*
- *Preparing onshore and/offshore facility*
- *Services for crew and vessel*
- *Financial liability settlement (disbursement)*

Responsibilities of PTK as a shipping agent:

- Ensuring the ease of operational ships at the port
- Settling financial liability
- Submitting the report for the visits of ships at Indonesian ports

Pemanduan Kapal

Dalam bidang usaha ini telah melaksanakan Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Pertamina.

Ship Scout Services

In this business field, the Company has carried out ship scout services at Pertamina's Special Purposes Terminal (Tersus) and Private Interest Terminal (TUKS).

Pengelolaan Pelabuhan

PTK melalui anak perusahaan PT Peteka Karya Samudera melaksanakan jasa Administrasi Pelabuhan Khusus (Pelsus) di enam belas lokasi Terminal Khusus (Tersus) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas.

Port Management

PTK through its subsidiary PT Peteka Karya Samudera implements Special Port (Pelsus) Administration services in sixteen locations of Special Purposes Terminal (Tersus) Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK) Migas - Contractors of Cooperation Contract (KKKS).

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perseroan di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan administrasi pada layanan pelabuhan yang meliputi labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), dimana pekerjaan Perseroan atas nama PT Pertamina (Persero);
- Membuat laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perusahaan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero);
- Mengurus perizinan;
- Mengelola administrasi pelabuhan khusus. Dalam hal ini Perseroan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB;
- Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen;
- Melakukan penyetoran Jasa Pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah;
- Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/ Administrasi Pelabuhan;
- Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JOB.

The scope of the Company's duties and responsibilities in this sector includes:

- Conducting the administration of port services, which include anchoring, mooring, guidance, delay (outside the PT Pelindo operational areas) as a delegate of PT Pertamina (Persero) where the Company acts on behalf of PT Pertamina (Persero)
- Preparing periodic reports relevant to job completion, the Company is responsible to PT Pertamina (Persero)
- Permits handling
- Managing special port administration. In this case, the Company only manages KKKS and JOB special ports
- Conducting the collection for port services to the Agent
- Conducting the Port Services deposit to PT Pertamina (Persero) and the Government
- Composing reports of port activities to PT Pertamina (Persero), BP Migas, Port/Port Administration Office
- Assisting management relevant to port administration at KKKS and JOB Special Ports.

Bunker Agent

Bunker agent merupakan fasilitas yang disediakan PTK untuk jasa pengiriman bahan bakar minyak untuk kapal atau tanker.

Bunker Agent

Bunker agent is a facility provided by PTK for the transport of fuel oil for vessels or tankers services.

Offshore & Onshore Logistic Base

PTK menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam offshore & onshore logistic base, meliputi:

- Gudang penyimpanan seluas 45,28 hektar;
- Pengiriman kargo dan jasa kargo administrasi;
- Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap;
- Menyediakan layanan pasokan air bersih, pasokan bahan bakar gas dan jasa lainnya;
- Persewaan gedung kantor di Batam di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar-Pulau Batam terdiri dari tiga lantai untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas pendingin ruangan/AC, area parkir, keamanan 24 jam, 50 saluran telepon dan dilengkapi dengan sistem

Offshore & Onshore Logistic Base

The Company provides integrated services in Offshore & Onshore Logistics Base, including:

- A 45.28 ha2 storage warehouse
- Cargo shipping and cargo administration services
- Cargo repair and cleaning with full facilities
- Providing clean water supply, gas fuel supply, and other services
- Office building rental located at Yos Sudarso Street, Batu Ampar-Batam Island comprising of 3 floors for office needs, equipped with facilities of Air Conditioner (AC), parking lot, 24 hours security, 50 phone lines, and PABX system facilities. Additionally, the building also



PABX. Selain itu, memiliki 350 KVA generator listrik dengan lokasi strategis di kargo jalur utama dan pelabuhan Batu Ampar;

- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - Lalu lintas dermaga;
 - Peralatan derek (*crane*) dengan kapasitas 50 tons ph, American crane kapasitas 75 ton, crane Todano kapasitas 20 ton, derek petty bone, carrylift kapasitas 20 ton, forklift kapasitas 3 dan 5 ton, prime over setinggi 40 feet, dan trailer caps setinggi 40 feet.

has a 350 KVA electricity generator with a strategic location at primary cargo route and Batu Ampar port

- Equipment and infrastructure support includes:
 - Harbor traffic
 - Crane with 50 tons ph capacity, American Crane with 75 tons capacity, Todano Crane with 20 tons capacity, petty bone crane, carrylift with 20 tons capacity, forklift with 3 and 5 tons capacity, 40-feet prime over, and 40-feet trailer caps.

Recognized Security Organization (RSO)

PTK ditunjuk sebagai RSO sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KI. 93/1/15-04 yang telah diperbaharui sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Direksi RSO untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi ISPS Code di Indonesia.

RSO merupakan konsultan dalam bidang keamanan yang memberikan saran atau menyediakan bantuan dalam bidang operasional kapal dan fasilitas pelabuhan, meliputi:

- Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi ISPS Code untuk kapal (ISSC) dan Fasilitas Pelabuhan (SoCPF).
- Melaksanakan atau menyelesaikan Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA).
- Membantu dalam menyiapkan rencana keamanan fasilitas pelabuhan (PFSP).

Recognized Security Organization (RSO)

The Company was appointed as RSO since 2004 based on the Director General of Sea Transportation Decree No. KI. 93/1/15- 04 which has been updated until now. This is the realization of the commitment of the RSO Board of Directors to participate in ISPS Code implementation in Indonesia.

RSO is a security sector consultant that provides suggestion or assistance in vessel operations and ports facilities, including:

- Organizing activities of ISPS Code Certification for vessels (ISSC) and Ports Facilities (SoCPF).
- Conducting and completing the Ports Facilities Security Assessment (PFSA).
- Assisting in the preparation of the Ports Facilities Security Plan (PFSP).

VISI, MISI DAN TATA NILAI PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE VALUES

Penetapan Visi dan Misi yang kini berlaku telah mendapatkan persetujuan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina Trans Kontinental secara sirkuler tanggal 18 November 2019 tentang Perubahan Visi dan Misi. Maka berlaku efektif sejak keputusan tersebut, Visi dan Misi Perusahaan kami adalah sebagai berikut:

Stipulation of current Vision and Mission has been ratified by the Board of Directors under PT Pertamina Trans Kontinental Circular BOD Decree dated November 18, 2019 concerning the Change in Vision and Mission. The change is effective since date of the decree, thereby, the Vision and Mission are as follows:

VISI Vision

Menjadi Perusahaan Jasa Maritim Yang Terintegrasi Dengan Skala Global pada Tahun 2026

To be an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026

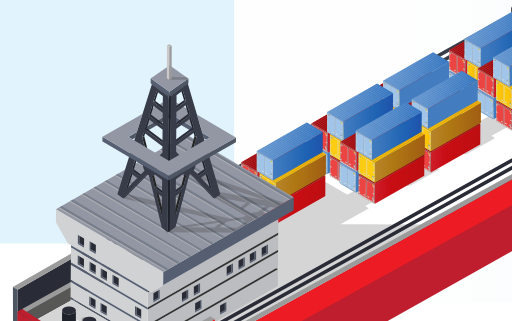
MISI Mission

Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, Keandalan Operasional dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam bidang:

- 1. Penyediaan jasa pelayaran sektor energi;**
- 2. Penyediaan layanan maritim;**
- 3. Penyediaan jasa logistik.**

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

- 1. Providing shipping services in the energy sector;*
- 2. Providing maritime services;*
- 3. Providing logistics services.*





Perubahan visi tersebut merupakan tonggak Perusahaan yang harus ditegakkan segenap Insan PTK. Maka untuk mewujudkan PTK sebagai Perusahaan Jasa Maritim yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026 diperlukan langkah-langkah strategis yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE;
2. Meningkatkan Kehandalan Operasional;
3. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam Penyediaan jasa pelayaran *sector energy*, layanan maritim dan jasa logistik.

The change of vision has become a milestone of the Company to be uphold by all of PTK's people. To realize PTK as an Integrated Maritime Service Company on Global Scale in 2026, the strategic initiatives have been prepared, as follows:

1. Carrying out business activities oriented to HSE aspects;
2. Increasing Operational Reliability;
3. Prioritizing Customer Satisfaction in shipping service provision for energy sector, maritime services and logistics services.



NILAI-NILAI UTAMA PERUSAHAAN

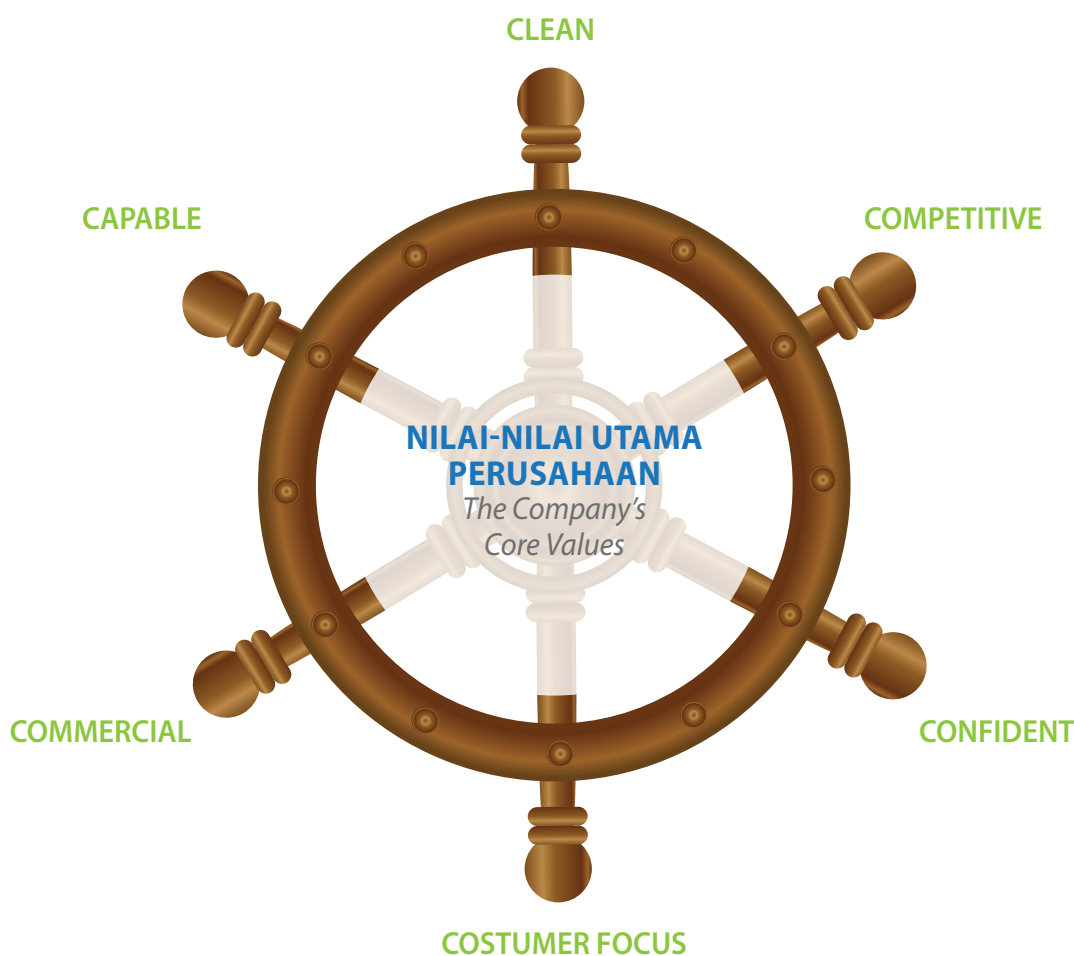
Nilai-nilai Perusahaan yang dianut PTK merujuk kepada Nilai-nilai PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi No. Kpts-22/C00000/2013-S0 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penerapan Tata Nilai 6C di Pertamina dan Anak Perusahaan (Operational Holding).

Di lingkup internal PTK, tata nilai tersebut mulai berlaku tanggal 5 Januari 2015 berdasarkan SK Direksi No. Kpts-017/ C0000/2015-S0 tentang Penerapan Tata Nilai 6C di PT Pertamina Trans Kontinental.

CORPORATE VALUES

The Corporate Values held by PTK refer to the Values of PT Pertamina (Persero) as the parent company, which was established by the PT Pertamina (Persero) Board of Directors based on the Board of Directors' Decree No. Kpts-22/C00000/2013-S0 of 25 March 2013 in the Implementation of the 6C Values in Pertamina and Subsidiaries (Operational Holding).

In the internal scope of PTK, the values was effective from January 5, 2015 based on the Board of Directors' Decree No. Kpts- 017/ C0000/2015-S0 on the Implementation of the 6C Values in PT Pertamina Trans Kontinental.





Clean

PTK dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak ada praktik suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas, serta berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

Panduan Perilaku

- Menjadi *Role Model* Integritas
 - o Mendorong orang lain bertindak sesuai dengan prinsip kejujuran sekalipun mengandung risiko yang tinggi bagi kedua belah pihak
 - o Mendorong terciptanya situasi yang mendukung kebebasan mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab
 - o Mendorong orang lain menghindari benturan kepentingan
 - o Mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan
- Membangun Dedikasi dan Kepatuhan
 - o Menggalang komitmen untuk bersikap jujur didalam melaksanakan pekerjaan
 - o Menciptakan situasi yang mendukung kebebasan mengemukakan pendapat berdasarkan data dan fakta
 - o Menggalang komitmen untuk menghindari benturan dan kepentingan
 - o Mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan
- Bersikap jujur dalam bekerja
 - o Mau dan mampu menyatakan sikap dengan baik dan sopan
 - o Menghindari benturan kepentingan
 - o Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi/golongan
 - o Mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan

Competitive

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

Clean

PTK is managed professionally, avoiding conflict of interest, not tolerating bribery, upholding trust and integrity, as well as guided by good corporate governance principles.

Behavioral Guidelines

- Being an Integrity Role Model
 - o Encouraging others to act in accordance with the honesty principles despite carrying high risks for both parties
 - o Encouraging the creation of situations that support the freedom of responsible expression of opinion
 - o Encouraging others to avoid conflicts of interest
 - o Preventing the occurrence of abuse of power
- Build Dedication and Compliance
 - o Raising the commitment to honest behavior on the job
 - o Creating situations that support the freedom to express opinions based on data and facts
 - o Cultivating the commitment to avoiding conflicts of interest
 - o Preventing the occurrence of abuse of power
- Honest in Performing The Job
 - o Willing and able to state behavior well and politely
 - o Avoiding conflicts of interest
 - o Prioritizing the interest of the company above personal/group interest
 - o Preventing the occurrence of abuse of power

Competitive

Capability to compete on a regional and international scale, encouraging growth through investment, cultivating cost-aware and performance-appreciating culture.

Panduan Perilaku

- Membangun Tim Pemenang
 - o Mendorong inovasi, kreativitas, dan inisiatif untuk perbaikan terus menerus
 - o Mengupayakan suasana yang saling menghargai, bebas risiko, adil, dan transparan agar muncul ide-ide segar dari anggota tim
 - o Berinisiatif mengembangkan ide-ide dan solusi baru yang efektif untuk mengembangkan perusahaan
 - o Menumbuhkan keinginan seluruh anggota tim untuk berbuat lebih banyak
 - o Mendorong anggota tim untuk bekerja efektif dan efisien
- Mengembangkan Inovasi & Prestasi
 - o Berinisiatif mengembangkan dan menerapkan ide-ide solusi baru yang efektif untuk peningkatan kinerja tim
 - o Mendorong anggota tim untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan tidak sesuai hasil kerja dengan apa yang diharapkan
 - o Mendorong anggota tim untuk mengambil langkah konkrit yang dapat memperbaiki prestasi
 - o Membangun sistem dan cara kerja yang efektif dan efisien
- Meningkatkan Prestasi
 - o Secara konsisten mau menerima pendapat dan ide orang/ pihak lain dan memandangnya sebagai kekayaan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk hasil yang lebih baik
 - o Mengusulkan ide-ide dan solusi baru
 - o Mengambil peran dalam penerapan ide-ide dan solusi baru yang sesuai dengan tujuan perusahaan
 - o Mencapai prestasi melebihi yang diharapkan
 - o Bekerja dengan efektif dan efisien

Behavioural Guidelines

- Build a Winning Team
 - o Encouraging innovation, creativity, and initiative for constant improvement
 - o Attempting an atmosphere of mutual appreciation, risk-free, fair, and transparent, for fresh ideas to arise from team members
 - o Taking the initiative to develop effective new ideas and solutions to improve the company
 - o Cultivating the desire of all team members to do more
 - o Encouraging team members to work effectively and efficiently
- Develop Innovation & Achievement
 - o Taking the initiative to develop and implement effective new ideas and solutions for the improvement of team performance
 - o Encouraging team members to identify problems causing the discrepancy between job results and expectations
 - o Encouraging team members to take concrete steps to improve achievement
 - o Building an effective and efficient work system and procedure
- Improving Achievement
 - o Consistently willing to accept the opinions and ideas of other people/parties and view them as a wealth of knowledge to be utilized for better results
 - o Proposing new ideas and solutions
 - o Taking a role in the implementation of new ideas and solutions which are in accordance with company objectives
 - o Reaching achievements exceeding expectations
 - o Working effectively and efficiently

Confident

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.

Confident

Playing a role in the development of national economy, becoming a pioneer in SOE reform, and building national pride.



Panduan Perilaku

- Menjadi Inspirator Kebanggaan Perusahaan
 - o Menunjukkan sikap keteladanan, komitmen pribadi dan kegigihan dalam mencapai tujuan perusahaan
 - o Memiliki keberanian mengambil risiko untuk mencapai tujuan perusahaan
 - o Mendorong tim menimbang dan mengambil risiko yang layak dalam pengambilan keputusan
 - o Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas hasil kerja korporasi
 - o Mengarahkan dan membimbing orang lain untuk mengambil peran
- Membangun Rasa Percaya Diri Tim
 - o Memiliki keberanian dan keyakinan untuk bertindak di tengah perbedaan pendapat
 - o Mengorganisasikan anggota tim untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan
 - o Menekankan kerjasama lebih daripada persaingan antar anggota tim
 - o Menerangkan kepada anggota tim secara jelas tugas dan tanggung jawab yang diberikan

Behavioral Guidelines

- Being a Proud Role Model for the Company
 - o Showing role model behavior, personal commitment, and perseverance in achieving company objectives
 - o Having the courage to take risks in achieving company objectives
 - o Encouraging the team to consider and take feasible risks in decision making
 - o Admitting mistakes and being responsible for the results of the work of the company
 - o Directing and guiding others to take roles
- Build Team Confidence
 - o Having the courage and assurance to act in the midst of difference of opinion
 - o Organizing team members to contribute towards the achievement of company objectives
 - o Emphasizing cooperation more than competition among team members
 - o Clearly explaining to team members the given tasks and responsibilities

- o Bertanggung jawab atas hasil kerja tim
- o Mengakui kesalahan yang dilakukan timnya, serta berupaya memperbaiki kesalahan tersebut
- o Mengatur peran seluruh anggota tim dan mempersiapkan second man dengan baik
- o Menyelesaikan masalah yang terjadi karena ketidakmampuan dan ketidakmauan anggota tim dalam mengemban tanggung jawab
- Memiliki Rasa Percaya Diri
 - o Membangun rasa percaya diri sesuai perannya didalam pekerjaan
 - o Mempunyai semangat tinggi dan bersikap menerima terhadap segala tugas yang diberikan
 - o Mengakui kesalahan yang dilakukan, dan berupaya memperbaiki kesalahan tersebut
 - o Berbagi mengenai proses kerja yang sedang berlangsung
 - o Memberikan masukan untuk kemajuan tim
 - o Saling mengingatkan atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan
- Having Confidence
 - o Building confidence in accordance with the roles in the job
 - o Having high spirits and accepting all the tasks given
 - o Admitting mistakes made and attempting to correct said mistakes
 - o Sharing about the process of ongoing work
 - o Giving inputs for team improvement
 - o Reminding each other of the given tasks and responsibilities

Customer Focus

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

Panduan Perilaku

- Menetapkan Komitmen Pelayanan
 - o Memberikan komitmen jangka panjang kepada para pemangku kepentingan
 - o Membina dan mempertahankan hubungan baik dengan para pemangku kepentingan
 - o Membangun kebijakan berkaitan dengan upaya meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan
- Memahami Kebutuhan Pelanggan
 - o Menyediakan waktu untuk memahami kebutuhan pelanggan

Customer Focus

Oriented to customer interest and committed to deliver excellent service to customers.

Behavioral Guidelines

- Establishing a Service Commitment
 - o Giving long-term commitment to stakeholders
 - o Cultivating and maintaining good relations with stakeholders
 - o Building policies relevant to the efforts to increase stakeholder satisfaction
- Understanding Customer Needs
 - o Providing the time to understand customer needs



- o Mempertimbangkan kepentingan pelanggan dalam mengambil keputusan
- o Memperlakukan semua pelanggan dengan rasa hormat dan adil
- o Membangun sistem umpan balik untuk mendengarkan suara pelanggan
- Membangun Dedikasi Untuk Memberikan Pelayanan
 - o Memberikan nilai tambah kepada pelanggan pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari
 - o Memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan
 - o Memberikan tanggapan dan perhatian terhadap permintaan dan permasalahan yang dihadapi pelanggan
 - o Membuka diri dan bersikap besar hati atas semua umpan balik dari pelanggan
- Cultivating Dedication in Delivering Service
 - o Giving added value to customers in performing everyday work
 - o Giving service in accordance with what is promised
 - o Giving response and attention to the requests and problems faced by customers
 - o Being open and accepting of all customer feedback
- o Considering customer needs in decision making
- o Treating all customers with respect and fairness
- o Building a feedback system to listen to the customers' voice

Commercial

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

Commercial

Creating added-value with a commercial orientation, making decisions based on sound business principles.

Panduan Perilaku

- Menetapkan Arah Perkembangan Usaha
 - o Memaksimalkan seluruh sumber daya untuk perkembangan bisnis
 - o Menetapkan strategi pemanfaatan fungsi bisnis untuk pengembangan bisnis di masa depan
 - o Memiliki kepekaan terhadap kondisi bisnis, baik menyangkut dunia, negara dan masyarakat
 - o Menciptakan kesempatan untuk kesinambungan bisnis di masa depan
- Membangun Kolaborasi dan Sinergi Untuk Keberlangsungan Usaha
 - o Menggalang seluruh sumber daya agar bisnis dapat berjalan dengan efektif
 - o Membangun kolaborasi dan sinergi antar bagian agar bisnis dapat berjalan dengan efektif
 - o Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang dapat menghalangi tercapainya target bisnis

Behavioral Guidelines

- Determining the Business Development Direction
 - o Maximizing all resources for business development
 - o Establishing the strategies for the utilization of business functions for future business development
 - o Having the sensitivity towards business conditions, whether regarding the world, the country, or the people
 - o Creating the opportunity for future business continuity
- Building Collaboration and Synergy for Business Continuity
 - o Empowering all resources for effective business performance
 - o Building collaboration and synergy among departments for effective business performance
 - o Identifying key factors that may obstruct the achievement of business goals



- o Mengenali kesempatan yang mungkin muncul dalam rangka keberlangsungan bisnis jangka menengah
- o Identifying potentially arising opportunities in medium-term business continuity
- Memberikan Kontribusi Untuk Kemajuan Usaha
 - o Mengerahkan seluruh potensi diri untuk kemajuan usaha
 - o Memahami perannya dalam proses bisnis yang sedang berjalan
 - o Melaksanakan prinsip-prinsip bisnis di dalam pekerjaan
 - o Memiliki cost consciousness pada proses kerja yang sedang berjalan
- Contributing to Business Advancement
 - o Bringing forth all self-potential for business advancement
 - o Understanding the roles in ongoing business process
 - o Implementing business principles on the job
 - o Having cost-consciousness in ongoing business process

Capable

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

Capable

Managed by professional leaders and workers with high technical talents and mastery, committed in developing research and development skills.



Panduan Perilaku

- Menetapkan Parameter Kompetensi
 - o Menentukan persyaratan standar kerja untuk mencapai *safe, reliable and environmental friendly operation*
 - o Membangun kebijakan yang memotivasi peningkatan kompetensi
 - o Mengarahkan dan membimbing anggota tim untuk mengambil langkah pencegahan maupun perbaikan
- Menilai Kompetensi dan Memberi Penghargaan
 - o Menggalang komitmen untuk bersikap jujur di dalam pelaksanaan pekerjaan
 - o Mendorong anggota tim untuk terus menerus meningkatkan kompetensi serta melampaui sasaran dan standar kerja, standar keselamatan, standar kesehatan kerja dan standar lingkungan hidup
 - o Mengevaluasi dan mengupayakan peningkatan kompetensi secara berkala
 - o Mengkaitkan penghargaan yang diberikan kepada anggota tim dengan perkembangan kompetensi terbaik
 - o Mendorong anggota tim untuk merencanakan standar kerja dan cara mengontrolnya
 - o Mengembangkan riset yang berkesinambungan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pekerjaan
- Meningkatkan Kompetensi
 - o Menentukan standar kerja yang tinggi untuk diri sendiri
 - o Melakukan pekerjaan sesuai dengan standar prosedur, standar keselamatan, standar kesehatan kerja dan standar lingkungan hidup
 - o Terus menerus mengembangkan kompetensi diri
 - o Melakukan *continuous improvement* pada proses kerjanya

Behavioral Guidelines

- Establishing Competency Parameters
 - o Establishing the requirements for work standards to achieve safe, reliable, and environmentally-friendly operations
 - o Developing policies that motivate the improvement of competencies
 - o Directing and guiding team members to take steps of prevention and improvement
- Assessing Competencies and Giving Appreciation
 - o Empowering the commitment to be honest in performing jobs
 - o Encouraging team members to continuously improve competencies as well as exceed work goals and standards, safety standards, work health standards, and environmental standards
 - o Periodically evaluating and making an effort for the improvement of competencies
 - o Associating the appreciation given to team members with the best competencies improvement
 - o Encouraging team members to plan work standards and methods of control
 - o Developing continuous research to maintain and increase work quality
- Improving Competencies
 - o Establishing high work standards for oneself
 - o Performing jobs in accordance with procedural standards, safety standards, work health standards, and environmental standards
 - o Continuously develops self competencies
 - o Conducting continuous improvements on the work process

LOGO DAN FILOSOFINYA

LOGO AND THE PHILOSOPHY



Simbol Anak Panah

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

"Arrow" Symbol

The "Arrow" symbol represents the Company's organizational aspiration to continuously move forward, be advanced and progressive. The three elements symbolize islands in various scales, which the shape of the Republic of Indonesia. The Symbol appears as a monogram of the letter "P", which is the first letter in "PERTAMINA".



Warna Merah

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.

Red Color

Reflects the Pertamina Trans Kontinental personnel who are hard workers, courageous, and diligent as well as capable of facing challenges.



Warna Hijau

Mencerminkan sumber energi yang ramah lingkungan dan sebuah organisasi yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

Green Color

Reflecting an environmentally friendly energy source and an organization that cares about the surrounding environment.



Logo Perusahaan telah disahkan berdasarkan PEDOMAN STANDARISASI IDENTITAS PERUSAHAAN, NOMOR : REVISI :PDM-001/G0000/2011- S0 dan berlaku sejak 22 Desember 2011

The Company logo has been endorsed by CODE OF CORPORATE IDENTITY STANDARDIZATION, Number: REV: PDM-001 / G0000 / 2011-S0 and effective since December 22, 2011



Warna Biru

Mencerminkan sisi organisasi yang andal, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Penekannya lebih kepada kekuatan dan kewibawaan perusahaan.

Blue Color

Reflects an organizational aspect that is reliable, trustworthy, and responsible. The emphasis is on corporate strength and charisma.



Kata "PERTAMINA"

Merupakan nama dari PT Pertamina (Persero) dan bukan merupakan singkatan atau akronim dan tulisannya harus berwarna hitam kecuali ditentukan lain.

"PERTAMINA" Terms

The name of PT Pertamina (Persero) and not an abbreviation or acronym and the fontype shall be black unless stated otherwise.



Kata "TRANS" dan "KONTINENTAL"

Berdasarkan kamus berarti melalui, melewati. KONTINENTAL berdasarkan kamus berarti benua. Jadi Pertamina Trans Kontinental adalah Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang core bisnisnya menunjang kegiatan usaha induknya di bidang oil & gas dimana siap untuk menjadi Perusahaan Bisnis Pelayaran dan Jasa Maritim Kelas Dunia.

Based on the dictionary, means pass through. Meaning of KONTINENTAL, based on the dictionary is a continent. Pertamina Trans Kontinental is a Subsidiary of PT Pertamina (Persero) with core business to support business activity of the parent company in oil & gas sector and ready to become a world-class Shipping and Marine Service Company.

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi berikut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTK No. Kpts-01/C00000/2016-S0 tanggal 07 Februari 2016.

The following organization structure refers to PTK BOD Decree No. Kpts-01/C00000/2016-S0 dated February 7, 2016.



DAFTAR NAMA PENGURUS DAN PEJABAT PERUSAHAAN

LIST OF MANAGEMENT AND EXECUTIVES OF THE COMPANY

Komisaris & Direksi Perusahaan per 31 Desember 2019 Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2019			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Terms of Office
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Dharmawan H Samsu	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 1 tanggal 10 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 10, 2018	1 Januari 2019 – 19 September 2019 January 1, 2019 – September 19, 2019
Ignatius Tallulembang	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2019 Deed No.5 dated October 7, 2019	19 September 2019 - 31 Desember 2019 September 19, 2019 – December 31, 2019
Joko Eko Purwanto	Komisaris Commissioner	Akta No. 28 tanggal 28 September 2018 Deed No. 28 dated September 28, 2018	1 Januari 2019 - 1 November 2019 August 1, 2019 – November 1, 2019
Alfian Nasution	Komisaris Commissioner	Akta No.7 tanggal 20 November 2019 Deed No.7 dated November 20, 2019	1 November 2019 – 31 Desember 2019 November 1, 2019 - December 31, 2019
Achmad Fachrudin	Komisaris Commissioner	Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018 Deed No. 15 dated February 14, 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 - December 31, 2019
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 14, 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 - December 31, 2019
Direksi Board of Directors			
Giri Santoso	PJ Direktur Utama Act. President Director	Akta No.12 tanggal 12 April 2017 Deed No.12 dated April 12, 2017	1 Januari 2019 - 15 Juli 2019 January 1, 2019 – July 15, 2019
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Akta No.5 tanggal 17 Juli 2019 Deed No.5 dated July 17, 2019	15 Juli 2019 – 31 Desember 2019 July 15, 2019 - December 31, 2019
Wedi Kamaludin	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No.32 tanggal 13 Oktober 2017 Deed No.32 dated October 13, 2017	1 Januari 2019 – 20 Juni 2019 January 1, 2019 – June 20, 2019
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No.4 tanggal 12 Juli 2019 Deed No.4 dated July 12, 2019	20 Juni 2019 – 31 Desember 2019 June 20, 2019 - December 31, 2019
Siswoyo	Direktur Operasi Operation Director	Akta No.1 tanggal 1 September 2016 Deed No.1 dated September 1, 2016	1 Januari 2019 – 02 April 2019 January 1, 2019 – April 2 2019
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	Akta No.9 tanggal 24 April 2019 Deed No.9 dated April 24, 2019	2 April 2019 – 31 Desember 2019 April 1, 2019 - December 31, 2019
Demsi aswan	Direktur Keuangan dan SDM Finance and Human Resources Director	Akta No.39 tanggal 18 Mei 2018 Deed No.39 dated May 18, 2018	1 Januari 2019 – 25 November 2019 January 1, 2019 – November 25, 2019
Nepos MT Pakpahan	PLT Direktur Keuangan dan SDM Act. Finance and Human Resources Director	Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019 Letter of Acting Appointment No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019	25 November 2019 – 31 Desember 2019 November 25, 2019 - December 31, 2019
Pejabat Perusahaan per 31 Desember 2019 Company's Executives as of December 31, 2019			
Nama Name	Jabatan Position	Periode Masa Jabatan Term of Office	
Mufti	VP HR & GA	1 Maret 2017- sekarang March 1, 2017 – now	
Baheramsyah	VP Finance	1 November 2019 - sekarang November 1, 2019 – now	
Monica Oktaria Yos	VP Marketing	1 Januari 2019 - sekarang January 1, 2019 - now	
Abdullah Faishol	VP Fleet	1 Desember 2015- sekarang December 1, 2015 – now	
Joko Pramono	VP Operation	1 Desember 2017 -sekarang December 1, 2017 – now	
Triana Aria Rini	Head of Internal Audit	01 Desember 2017 - sekarang December 1, 2017 – now	
Dwi Indra Kuntoadji	Corporate Secretary	27 November 2017- 2 November 2019 November 27, 2017 – November 2, 2019	

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Ignatius Tallulembang
Komisaris Utama
President Commissioner

Alfian Nasution
Komisaris
Commissioner



Ivan Airlangga EP
Komisaris
Commissioner

Achmad Fachruddin
Komisaris
Commissioner



Ignatius Tallulembang

Komisaris Utama
President Commissioner

Berusia 56 tahun
Warga Negara Indoneisa, berdomisili di Jakarta. Lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan pada 21 Maret 1963.

56 years
Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Rantepao, South Sulawesi on March 21, 1963

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Trans Kontinental sejak 19 September 2019, berdasarkan Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2019.

Position And Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since September 19, 2019 according to Deed No. 5 dated October 7, 2019.

PENDIDIKAN

Menyelesaikan pendidikan Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988.

Education

Graduated Bachelor's degree of Checmical Engineering in Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 1988.

PERJALANAN KARIR

- VP Engineering Services PT Pertamina (Persero) periode Juli 2017 – September 2017
- SVP Project Engineering & Services PT Pertamina (Persero) periode September 2017 – Oktober 2017

Career Experience

- VP Engineering Services PT Pertamina (Persero) for July 2017 – September 2017 period
- SVP Project Engineering & Services PT Pertamina (Persero) for September 2017 – October 2017 period

RANGKAP JABATAN

Merangkap jabatan sebagai Direktur Megaprojek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) sejak tanggal 13 September 2018 hingga sekarang

Concurrent Position

Concurrently serving as Director of PT Pertamina (Persero) Megaproject Processing and Petrochemicals since September 13, 2018 until now

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Alfian Nasution

Komisaris
Commissioner

Berusia 52 tahun
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Pekanbaru pada 14 Februari 1967.

52 years
Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Pekanbaru on February 14, 1967.

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 1 November 2019, berdasarkan Akta No.7 tanggal 20 November 2019.

Position And Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 1, 2019 according to Deed No. 7 dated November 20, 2019.

PENDIDIKAN

Menyelesaikan pendidikan Teknik Mesin di Universitas Indonesia pada tahun 1992.

Education

Graduated Bachelor's degree of Mechanical Engineering in Universitas Indonesia in 1992.

PERJALANAN KARIR

- VP Supply & Distribution PT Pertamina (Persero) periode 2013 – 2016.
- VP Supply & Export Operation PT Pertamina (Persero) periode 2016 – 2017.

Career Experience

- VP Supply & Distribution PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2016 period.
- VP Supply & Export Operation PT Pertamina (Persero) for 2016 – 2017 period.

RANGKAP JABATAN

Merangkap jabatan sebagai Senior Vice President Gas & LNG PT Pertamina (Persero) sejak Oktober 2019.

Concurrent Position

Concurrently serving as Senior Vice President of Gas & LNG of PT Pertamina (Persero) since October 2019.

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Ivan Airlangga EP

Komisaris
Commissioner

Berusia 56 tahun
Warga Negara Indoneisa, berdomisili di Bogor. Lahir di Surabaya pada tanggal 31 Desember 1963.

56 years
Indonesian Citizen, domiciled in Bogor. Born in Surabaya on December 31, 1963.

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 22 November 2018, berdasarkan Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018.

Position And Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since November 22, 2018 according to Deed No. 1 dated December 14, 2018.

PENDIDIKAN

Menyelesaikan pendidikan Teknik Kimia di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1988.

Education

Earned Bachelor's degree of Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya in 1988.

PERJALANAN KARIR

- Operation Excellence Manager PT Pertamina (Persero) periode 2012 – 2013.
- Sebagai Direktur Operasi Produksi PT Pertamina (Persero) periode 2013 – 2017.
- VP Process & Facility PT Pertamina (Persero) periode 2017 – 2018.

Career Experience

- Operation Excellence Manager PT Pertamina (Persero) for 2012 – 2013 period.
- Sebagai Direktur Operasi Produksi PT Pertamina (Persero) for 2013 – 2017 period.
- VP Process & Facility PT Pertamina (Persero) for 2017 – 2018 period.

RANGKAP JABATAN

Merangkap jabatan sebagai SVP Business Development & Perform Excellence PT Pertamina (Persero) sejak 2018 – 31 Desember 2019 (Pensiun).

Concurrent Position

Currently, he is also serving as SVP Business Development & Perform Excellence PT Pertamina (Persero) since 2018 – December 31, 2019 (Pension).

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Achmad Fachruddin

Komisaris
Commissioner

Berusia 44 tahun
Warga Negara Indoneisa, berdomisili di Bogor. Lahir di Jakarta pada 10 Mei 1975.

44 years
Indonesian Citizen, domiciled in Bogor. Born in Jakarta on May 10, 1975.

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental sejak 31 Januari 2018, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018.

Position And Appointment Decree

Appointed as Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental since January 31, 2018 according to Deed No. 15 dated February 14, 2018.

PENDIDIKAN

Meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada tahun 2002.

Education

Earned Bachelor's degree of Social Science from Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) in 2002.

PERJALANAN KARIR

- Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Washthex Indonesia periode 2009-2017,
- Sebagai analis PT Media Track periode 2010-2015,
- Sebagai Direktur PT Media Fakta Nusantara periode 2014-2017

Career Experience

- Previously was appointed as Commissioner at PT Washthex Indonesia for 2009-2017 period,
- Analyst at PT Media Track for 2010-2015 period,
- Director at PT Media Fakta Nusantara for 2014-2017 period.

RANGKAP JABATAN

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Concurrent Position

Currently, he does not serve in concurrent position in any Company.

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS



Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama
President Director

Hadi Purnomo
Direktur Operasi
Operations Director



Arsono Kuswardanu
Direktur Pemasaran
Marketing Director

Demsi Aswan
Direktur Keuangan dan SDM
Finance and HR Director



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Berusia 56 tahun
Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Laguboti, Sumatera Utara pada 8 November 1963.

*56 years
Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Laguboti,
North Sumatera on November 8, 1963*

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan Akta No.5 tanggal 17 Juli 2019.

Position And Appointment Decree

Appointed as Operations Director since July 15, 2019 according to Deed No.5 dated July 17, 2019.

PENDIDIKAN

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya pada tahun 1989 dan gelar Master-MBA Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2001.

Education

Earned Bachelor's degree of Mechanical Engineering from Universitas Brawijaya in 1989 and Master – MBA of Engineering from Universitas Jenderal Soedirman in 2001.

PERJALANAN KARIR

Pernah menjabat sebagai VP HSSE Upstream PT Pertamina (Persero) periode 2017 - 2019.

Career Experience

Previously, he was assigned as VP HSSE Upstream at PT Pertamina (Persero) for 2017 – 2019 period.

RANGKAP JABATAN

Beliau merangkap jabatan sebagai PLT Direktur Keuangan dan SDM PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019 sejak 25 November 2019 - sekarang

Concurrent Position

Currently, he is also serving as Finance and Human Resources Director PT Pertamina Trans Kontinental according to Letter of Acting Appointment No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019 since November 25, 2019 - now

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Hadi Purnomo

Direktur Operasi
Operations Director

Berusia 54 tahun

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bekasi, Lahir di Surakarta, Pada tanggal 31 Agustus 1965.

54 years

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Surakarta on August 31, 1965.

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 2 April 2019, berdasarkan Akta No.9 tanggal 24 April 2019.

Position And Appointment Decree

Appointed as Operations Director since April 2, 2019 according to Deed No. 9 dated April 24, 2019.

PENDIDIKAN

Meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Manajemen Transport dari STIE Kampus Ungu pada tahun 2007.

Education

Earned Bachelor's degree of Industrial Engineering from Institut Teknologi Bandung in 1991 and Bachelor's degree of Transport Management from STIE Kampus Ungu in 2007.

PERJALANAN KARIR

- Manager Strategic Planning PT Pertamina (Persero) periode Januari 2013 - Mei 2017.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) periode Mei 2017 - April 2019.

Career Experience

- Manager Strategic Planning PT Pertamina (Persero) for January 2013 - May 2017 period.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) for May 2017 - April 2019.

RANGKAP JABATAN

Merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Peteka Karya Tirta

Concurrent Position

Currently, he is also serving as Commissioner PT Peteka Karya Tirta

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Arsono Kuswardanu

Direktur Pemasaran
Marketing Director

Berusia 53 tahun

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Surabaya pada 1 November 1966.

53 years

Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta. Born in Surabaya on November 1, 1966.

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental sejak tanggal 20 Juni 2019, berdasarkan Akta No. 4 tanggal 12 Juli 2019.

Position And Appointment Decree

Appointed as Marketing Director of PT Pertamina Trans Kontinental since June 20, 2019 according to Deed No. 4 dated July 12, 2019.

PENDIDIKAN

Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Indonesia pada tahun 1996.

Education

Earned Bachelor's degree of Architectural Engineering from Institut Teknologi Indonesia in 1996.

PERJALANAN KARIR

- Product Services Account Division Head PT Pertamina Patra Niaga periode Maret 2017 - Maret 2019.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) periode April 2019 - Juni 2019.

Career Experience

- Product Services Account Division Head PT Pertamina Patra Niaga for March 2017 - March 2019 period.
- VP Commercial PT Pertamina (Persero) for April 2019 - June 2019 period.

RANGKAP JABATAN

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan di Perusahaan manapun.

Concurrent Position

Currently, he does not serve in concurrent position in any Company

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.



Demsi Aswan

Direktur Keuangan dan SDM
Finance and HR Director

Berusia 51 tahun

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor. Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 15 Mei 1968.

51 years

Indonesian Citizen, domiciled in Bogor. Born in Tanjung Karang, Lampung on May 15, 1968.

JABATAN DAN DASAR PENUNJUKAN

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & SDM PT Pertamina Trans Kontinental sejak 8 Mei 2018, berdasarkan Akta No.39 tanggal 18 Mei 2018.

Position And Appointment Decree

Appointed as HR & Finance Director of PT Pertamina Trans Kontinental since May 8, 2018 according to Deed No.39 dated May 18, 2018.

PENDIDIKAN

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Manajemen dari Universitas Lampung pada tahun 2014 dan gelar Master of Management dari PPM School of Management, Jakarta.

Education

Earned Bachelor's degree of Economics and Management from Universitas Lampung in 2014 and Master of Management degree from PPM School of Management, Jakarta.

PERJALANAN KARIR

- General Manager Keuangan PT Nusantara Regas periode 2010 – 2013
- General Accounting Manager Pertamina (Persero) periode 2013 – 2015.
- Accounting Senior Manager PT Pertamina EP periode 2015 – 2018.

Career Experience

- General Manager of Finance PT Nusantara Regas for 2010 – 2013 period
- General Accounting Manager Pertamina (Persero) for 2013 – 2015 period.
- Accounting Senior Manager PT Pertamina EP for 2015 – 2018 period.

RANGKAP JABATAN

Merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Trans Yeong Maritime

Concurrent Position

Currently, he is also serving as Commissioner PT Trans Yeong Maritime

HUBUNGAN AFILIASI

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

Affiliated Relation

He does not have any affiliation with members of Board of Commissioners, Board of Directors or other majority and/or controlling shareholders.

PROFIL PEJABAT PERUSAHAAN EXECUTIVES PROFILE



Mufti

VP HR & GA
VP of HR & GA

Lahir di Medan, pada tanggal 01 Desember 1963 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Magister Manajemen SDM dari Universitas Mulawarman, Samarinda pada tahun 2002. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Unit Manager HR PT Pertamina (Persero) Jawa Bagian Barat.

Born in Medan on December 1, 1963 and domiciled in Jakarta. He earned Master's degree in HR Management from Universitas Mulawarman, Samarinda in 2002. Previously, he was assigned as HR Unit Manager at PT Pertamina (Persero) West Java Region.



Muhammad Priadi

VP Finance (periode 2018 - 1 November 2019)
VP Finance (period from 2018 - November 1 2019)

Lahir di Palembang, pada 16 Oktober 1967 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, pada tahun 1998. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Finance PT Pertamina (Persero) RU III.

Born in Palembang on October 16, 1967 and domiciled in Jakarta. He earned Bachelor's degree of Accounting Economics from Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon in 1998. Previously, he was assigned as Finance Manager at PT Pertamina (Persero) RU III.



Baheramsyah

VP Finance (periode 1 November 2019 – sekarang)
VP Finance (period from November 1 2019 – now)

Lahir di Lampung Utara, pada 28 Maret 1968 dan berdomisili di Bogor. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akutansi dari STIE Insan Cendekia pada tahun 2005. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Portofolio & Investasi PT Pertamina (Persero).

Born in Lampung Utara on March 28, 1968 and domiciled in Jakarta. He earned Bachelor's degree of Accounting Economics from STIE Insan Cendekia in 2005. Previously, he was assigned as Portfolio & Investment Manager at PT Pertamina (Persero).



Monica Oktaria Yos

VP Marketing
VP Marketing

Lahir di Jakarta, pada 23 Oktober 1976 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2000 dan Magister Manajemen Transport dari Universitas Trisakti pada tahun 2013. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Manager Cabang Tanjung Priok

Born in Jakarta on October 23, 1976 and domiciled in Jakarta. She earned Bachelor's degree of Accounting Economics from Universitas Trisakti in 2000 and Master's degree of Transport Management in 2013. Previously, she was assigned as Manager at Tanjung Priok Branch.



Abdullah Faishol

VP Fleet
VP Fleet

Lahir di Gresik, pada 16 Juni 1964 dan berdomisili di Bogor. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin Universitas Gresik, pada tahun 1991. Sebelumnya menjabat sebagai Marine Region Manager I

Born in Gresik on June 16, 1964 and domiciled in Jakarta. He earned Bachelor's degree of Mechanical Engineering from Universitas Gresik in 1991. Previously, he was assigned as Marine Region Manager I.



Joko Pramono

VP Operation
VP Operation

Lahir di Banyuwangi, pada 27 September 1971 dan berdomisili di Bekasi. Beliau meraih gelar Advance Diploma in Maritime Transportation dan Ahli Nautika Tingkat II dari Singapore Polytechnic.

Born in Banyuwangi on September 27, 1971 and domiciled in Jakarta. He earned Advance Diploma in Maritime Transportation and Expert in Nautical Science Level II from Singapore Polytechnic.



Triana Aria Rini

Head of Internal Audit
Head of Internal Audit

Lahir di Jakarta, pada 23 Januari 1968 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta, pada tahun 1996. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai VP Operation

Born in Jakarta on January 23, 1968 and domiciled in Jakarta. She earned Bachelor's degree of Management Economics from Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta in 1996. Previously, she was assigned as VP Operation.



Dwi Indra Kuntoadji

Corporate Secretary
Corporate Secretary

Lahir di Jakarta, pada 22 Februari 1971 dan berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Merdeka Malang, pada tahun 1993. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Anak Perusahaan PTK yaitu PT Peteka Karya Tirta.

Born in Jakarta on February 22, 1971 and domiciled in Jakarta. He earned Bachelor's degree of Accounting Economics from Universitas Merdeka Malang in 1993. Previously, he was assigned as Subsidiary of PT Peteka Karya Tirta, a subsidiary of PTK.

SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES

Jumlah Pekerja Total Employees		
2019	2018	2017
668	673	609

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level					
Pendidikan	YoY 2018:2019	2019	2018	2017	Education
Pasca Sarjana	(18,84)%	56	69	28	Post-graduate
Sarjana	4,85%	346	330	295	Undergraduate
Diploma	(9,60)%	113	125	113	Diploma
Sekolah Menengah Atas	1,43%	142	140	162	Senior High School
Lain-lain	22,22%	11	9	11	Others

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia Employee Composition by Age					
Usia	YoY 2018:2019	2019	2018	2017	Age
<20 tahun	200%	3	1	1	<20 years
21-30 tahun	12,26%	174	155	109	21-30 years
31-40 tahun	(1,46)%	203	206	173	31-40 years
41-50 tahun	(1,05)%	189	191	186	41-50 years
51-55 tahun	(18,18)%	81	99	102	51-55 years
>55 Tahun	(14,29)%	18	21	38	>55 years

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi Employee Composition by Organization Level					
Jabatan	YoY 2018:2019	2019	2018	2017	Position
Non Staff	26,46%	282	223	187	Non Staff
Staff	(25,97)%	228	308	285	Staff
Asisten Manager	23,38%	95	77	74	Manager Assistant
Manager	0%	47	47	45	Manager
Eksekutif	(11,11)%	16	18	18	Executive

Komposisi Pekerja Berdasarkan Gender Employee Composition by Gender					
Gender	YoY 2018:2019	2019	2018	2017	Gender
Laki-laki	(3,53)%	519	538	487	Male
Perempuan	10,37%	149	135	122	Female



Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition by Employment Status

Status	YoY 2018:2019	2019	2018	2017	Status
Pekerja Tetap	(5,72)%	346	367	366	Permanent Employees
Pekerja Tidak Tetap	5,23%	322	306	243	Non-Permanent Employees

PROGRAM PENGEMBANGAN KARYAWAN

EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAM

Program Pengembangan Karyawan Employee Development Program

Deskripsi Description	% YoY	2019	2018	2017
Jumlah Pelatihan Number of Trainings	25,00%	65	52	103
Peserta/ Participants	6,61%	613	575	668
Biaya/ Cost	-21,55%	Rp2.391.594.795	Rp3.048.484.853	Rp1.826.301.839

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan leadership skill, berikut adalah program pelatihan yang diikuti oleh karyawan di tingkat managerial:

In order to develop competency and leadership skill, the following are training programs participated by managerial level employees:

Training untuk Jabatan Managerial Training for Managerial Position

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/Training/ Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Provider	Lokasi Pelaksanaan Location
Risk Management ISO 31000:2018	Juli 2019 July 2019	Managerial dan Cabang Managerial & Branch	79	Pertamina	Jakarta & Cabang Jakarta & Branch
Terminal Operation	Maret 2019 March 2019	Managerial & Cabang Managerial & Branch	27	PT Adicipta Anugerah Mandiri	Jakarta
Shipping Practice	Febuari – Maret 2019 February – March 2019	Manager, Ast. Manager & Cabang Managerial & Ast. Manager & Branch	21	PT Menara 79	Jakarta

Training untuk Jabatan Managerial Training for Managerial Position

Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/Training/ Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Position	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksana Provider	Lokasi Pelaksanaan Location
Port Management	Juli 2019 July 2019	Manager & Cabang Managerial & Branch	25	PT SAR	Jakarta
Fire Fighting Training Level D	September 2019 September 2019	Manager & Ast. Manager Managerial & Ast. Manager	18	PT Robere Manajemen Indonesia	Jakarta

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

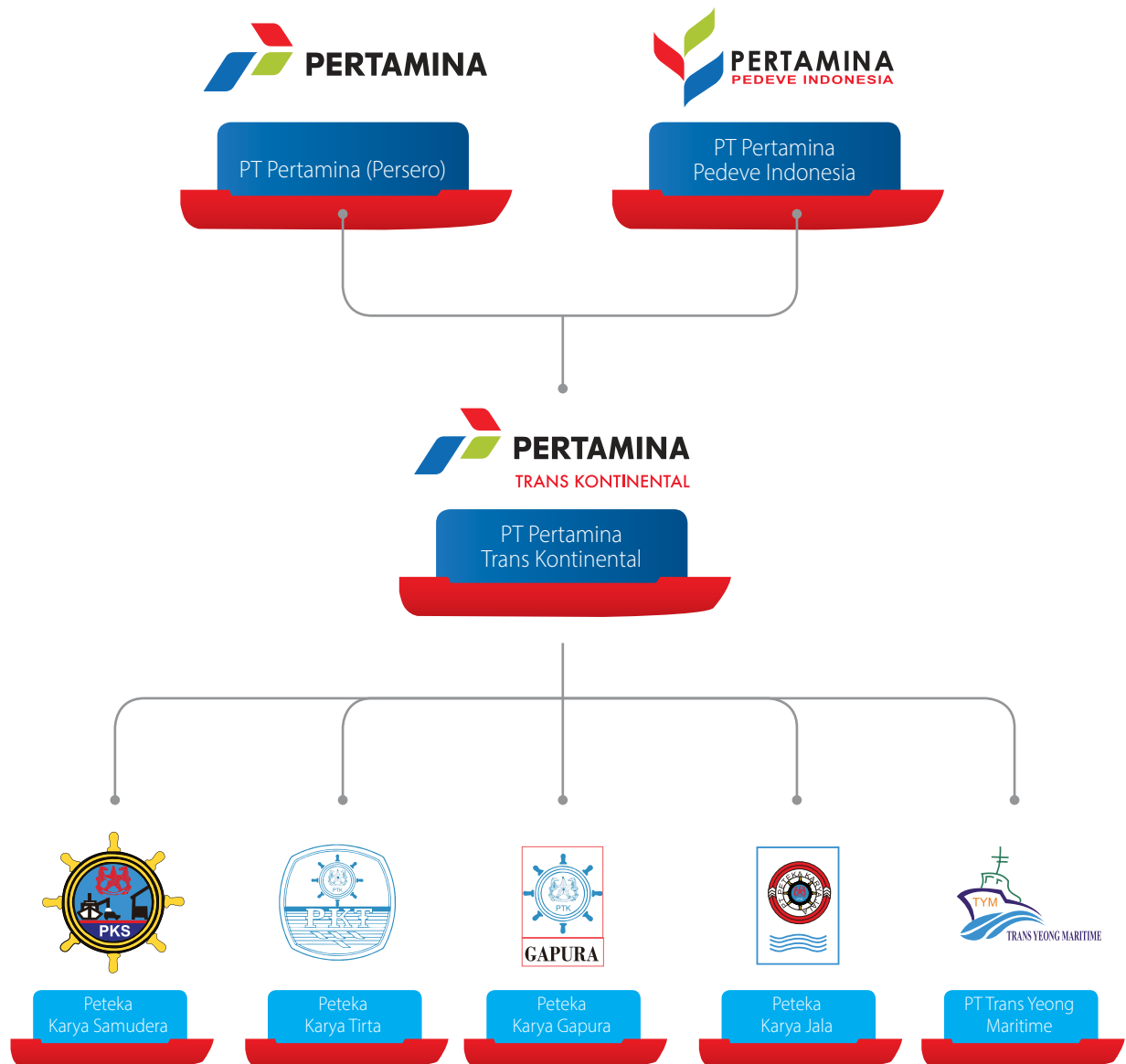
Informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan & Unit Audit Internal di sepanjang tahun 2019, dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan Laporan Tahunan ini.

EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND INTERNAL AUDIT UNITS

Information on the education and/or training of members of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary & Internal Audit Unit throughout 2019, can be seen in the Good Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

CORPORATE GROUP STRUCTURE



ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

SUBSIDIARY AND/OR ASSOCIATED COMPANY

PT Peteka Karya Samudera



Tahun Pendirian Establishment Year	10 Februari 1986 February 10, 1986 Akta pendirian No. 48 tanggal 10 Februari 1986 dibuat dihadapan NY Yetty Taher S.H ed No. 48 of 10 February 1986 drafted before Mrs. Yetty Taher, S.H.,
Kegiatan Usaha Business Activity	• Badan usaha pelabuhan meliputi port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water • Logistic service meliputi crane warehouse & open storage • Pilotage service and port management • Port business entities include port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water • Logistic service includes crane warehouse & open storage • Pilotage service and port management
Kepemilikan Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,753% Peteka Karya Gapura 0,247%
Jumlah Aset Total Assets	Rp114.155.401.139
Status Operasional Operational Status	Beroperasi sejak 10 Februari 1986 Operating since February 10, 1986
Alamat Address	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam – Kepri Telepon : +62 - 778 – 711543, 711126 Faksimili : +62 - 778 -711842 Homepage : www.pekaes-bup.com

PT Peteka Karya Tirta



Tahun Pendirian Establishment Year	21 Januari 1988 January 21, 1988. Akta pendirian No. 69 tanggal 21 Januari 1988 dibuat dihadapan Ny. Yetty Taher, SH. Deed No. 69 of January 21, 1988 drafted before Mrs. Yetty Taher, SH.
Kegiatan Usaha Business Activity	• Pengelolaan dan penyediaan air • Perdagangan bahan kimia cair • Water management and supply. • Liquid chemicals trading.
Kepemilikan Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,94% Peteka Karya Samudera 0,06%
Jumlah Aset Total Assets	Rp42.220.682.946
Status Operasional Operational Status	Beroperasi sejak 21 Januari 1988 Operating since January 21, 1988.
Alamat Address	Jl. Raya Anyer KM 119 Ciwandan - Cilegon – Banten Telepon : +62 – 254 – 601147 Faksimili : +62 – 254 – 601148 Homepage : www.petekakaryatirta.com



PT Peteka Karya Jala



Tahun Pendirian Establishment Year	6 November 1991 November 6, 1991 Akta Pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH. Deed No. 62 of November 6, 1991, drafted before Sinta Susikto, SH.
Kegiatan Usaha Business Activity	Jasa dan Perdagangan Services and Trading.
Kepemilikan Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,17% Peteka Karya Tirta 0,83%
Jumlah Aset Total Assets	Rp53.704.213.619
Status Operasional Operational Status	Beroperasi sejak 6 November 1991 Operating since November 6, 1991.
Alamat Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon : +62 - 21 - 29615165 Faksimili : +62 - 21 - 29615166

PT Peteka Karya Gapura



Tahun Pendirian Establishment Year	5 Juni 1987 June 5, 1987 Akta Pendirian No. 20 tanggal 5 Juni 1987, dibuat dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH dengan nama awal "PT Peteka Karya Samudera" dan diubah berdasarkan risalah rapat yang telah diaktakan dengan No. 68 pada 21 Januari 1988 menjadi PT Peteka Karya Gapura. Deed No. 20 of 5 June 1987, drafted before Notary Yudo Paripurno, SH, with the initial name "PT Peteka Karya Samudera" and had its name altered under minutes of meeting enactment in Deed no. 68 dated January 21, 1988 into PT Peteka Karya Gapura.
Kegiatan Usaha Business Activity	Jasa Angkutan, Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Jasa Perdagangan dan Kegiatan Usaha yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha dibidang Jasa Pelayaran, Jasa Angkutan dan Jasa Logistic. Transportation Services, Manpower Supply Services, Trade Services, and Business Activities relevant to and/or supporting the activities in Shipping Services, Transportation Services, and Logistics Services sectors
Kepemilikan Ownership	Pertamina Trans Kontinental 99,98% Peteka Karya Jala 0,02%
Jumlah Aset Total Assets	Rp106.973.381.208
Status Operasional Operational Status	Beroperasi sejak 5 Juni 1987 Operating since June 5, 1987
Alamat Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok - Jakarta Utara Telepon : +62 - 21 - 65307030 Faksimili : +62 - 21 - 6510030 Homepage : www.pekage.com

PT Trans Yeong Maritime



Tahun Pendirian Establishment Year	16 September 2014 September 16, 2014 Akta Pendirian No. 41 tanggal 16 September 2014, dibuat dihadapan Dewantari Handayani, SH, MPA. Deed No. 41 of 16 September 2014, drafted before Dewantari Handayani, SH, MPA.
Kegiatan Usaha Business Activity	Jasa pelayanan kepelabuhan laut Sea port services
Kepemilikan Ownership	Pertamina Trans Kontinental 51,00% Tong Yeong Tug, Co.Ltd 49,00%
Jumlah Aset Total Assets	Rp408.020.469.287,83
Status Operasional Operational Status	Beroperasi sejak 16 September 2014 Operating since September 16, 2014
Alamat Address	Gedung Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan Lt. 2 Jl. Yos Sudarso Kav 2015 Sunter, Jakarta Utara, 14350 Telepon : +62 21 6530 7032 Faksimili : +62 21 651 6375 Homepage : www.tym-shipping.com

PEMEGANG SAHAM & INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM

SHAREHOLDERS & SHARES OWNERSHIP INFORMATION

Pemegang saham Perusahaan per 31 Desember 2019 adalah PT Pertamina (Persero) dengan jumlah kepemilikan saham 99,999%. dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan jumlah kepemilikan saham 0,001%.

The Company's Shareholders as of December 31, 2019 are PT Pertamina (Persero) with ownership of 99,999% and PT Pertamina Pedeve Indonesia with ownership of 0,001%.

PT Pertamina Pedeve Indonesia menjadi pemegang saham PT Pertamina Trans Kontinental, berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 13 Desember 2017 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat PT Pertamina Trans Kontinental No. 4 tanggal 8 Januari 2018. PT Pertamina Pedeve Indonesia menjadi pemegang saham PT Pertamina Trans Kontinental setelah rapat menyetujui pengambilalihan saham dari PT Pertamina Training & Consulting.

PT Pertamina Pedeve Indonesia becomes the shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental, based on The Circular GMS Resolution dated December 13, 2017, which has been stated in the Deed of Decision of the Decree outside the Meeting of PT Pertamina Trans Kontinental No. 4 dated January 8, 2018. PT Pertamina Pedeve Indonesia becomes a shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental after the meeting approved the takeover of shares from PT Pertamina Training & Consulting.



Kepemilikan Saham Pertamina Trans Kontinental Per 31 Desember 2019 Pertamina Trans Kontinental Shares Ownership as of December 31, 2019

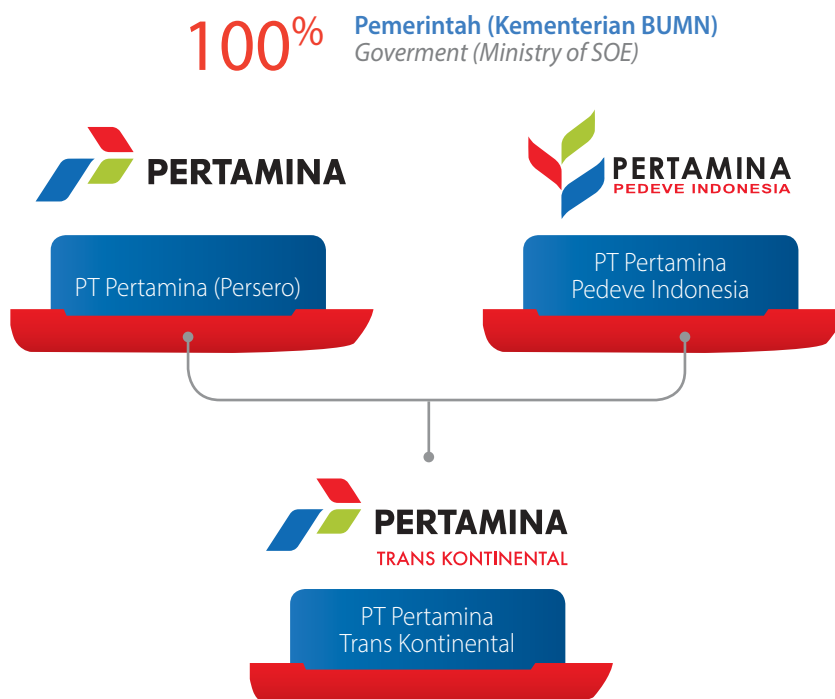
Keterangan Description	Jumlah Lembar Number of sheets	%	Jumlah (Rp) Total (Rp)
PT Pertamina (Persero) Tbk			
Saham Seri A Series A Shares	693.698	99,999	693.698.000.000
Saham Seri B Series B Shares	819		819.000
PT Pertamina Pedeve Indonesia			
Saham Seri A Series A Shares	10	0,001	10.000.000
Jumlah Total		100,00	693.708.819.000

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham pengendali PT Pertamina Trans Kontinental adalah PT Pertamina (Persero), yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN.

MAJORITY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The controlling shareholder of PT Pertamina Trans Kontinental is PT Pertamina (Persero), whose shares are owned entirely by the Government of Indonesia through the Ministry of SOE.



20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR DAN PERSENTASE KEPEMILIKANNYA

Pertamina Trans Kontinental memiliki 2 pemegang saham yakni PT Pertamina (Persero) dengan kepemilikan 99,999% dan PT Pertamina Pedeve Indonesia dengan kepemilikan 0,001%.

TOP 20 SHAREHOLDERS AND OWNERSHIP PERCENTAGE

Pertamina Trans Kontinental has 2 shareholders, which are PT Pertamina (Persero) with 99.999% ownership and PT Pertamina Pedeve Indonesia with 0.001% ownership.

PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI 5% ATAU LEBIH SAHAM

PT Pertamina (Persero) dengan komposisi sebesar 99,999%.

SHAREHOLDERS WITH 5% OR HIGHER SHARES

PT Pertamina (Persero) with 99.999% composition.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OWNERSHIP

The Board of Commissioners and Board of Directors do not have direct and non-direct ownership in the Company.

PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM Masing-masing kurang dari 5%

PT Pertamina Trans Kontinental belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sehingga tidak memiliki Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

PUBLIC SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5% OWNERSHIP

PT Pertamina Trans Kontinental has not listed its shares at Indonesia Stock Exchange, therefore, the Company does not have any public shareholders with less than 5% ownership.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM SHARE LISTING CHRONOLOGY

Sampai dengan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham. Laporan ini tidak menyertakan informasi terkait kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku, tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*) jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*) dan nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan maupun didaftarkan.

As end of December 31, 2019, the Company did not have a chronology for the listing of shares. This report does not include information relevant to shares listing chronology (including private placement) and/or shares listing from the beginning of the issuance until the end of the fiscal year, shares listing year, total shares, shares par value, and shares offering price for each corporate action, total shares outstanding after the corporate action, and name of stock exchange where the Company's shares are listed



KRONOLOGI PENCATATAN EFEK DAN OBLIGASI SECURITIES AND BONDS LISTING CHRONOLOGY

Selama periode pelaporan, PTK tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya. Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait kronologi pencatatan efek lainnya, meliputi nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

During the reporting period, PTK did not have any share listing chronology. This report does not present information related to other share listing chronology, including the name, year of listing, interest rate/yield, maturity date, value, or name of other stock exchanges where securities are listed, and securities ratings.

NAMA & ALAMAT LEMBAGA DAN/ ATAU PROFESI PENUNJANG

NAME & ADDRESS OF SUPPORTING INSTITUTION
AND/OR PROFESSION

No	Nama & Alamat/ Name & Address	Jasa/ Service
1	Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkono & Surja (Ernst & Young) Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: 021 5289 5000 Faks: 021 5289 4100 Website: www.ey.com/id	Kantor Akuntan Publik/ Public Accounting Firm
2	Kantor Hukum Hakim dan Rekan Rukan Permata Senayan Unit B19 Jalan Tentara Pelajar No. 5 Patal Senayan, Jakarta Telp : 021 579 40690 Faks : 021 579 41144 Email : wisjnu@hakimdanrekan.com Website : www.hakimdanrekan.com	Penasehat Hukum Legal Advisor
3	Hendri J. Pandiangan Partners Law Graha Chantia 2nd Floor Jl. Bangka Raya No. 6 Jakarta Selatan Telp: 021 7179 4448 Faks: 021 7179 4449 Email: hjplawoffice@gmail.com Website: www.hjplawoffice.com	Penasehat Hukum Legal Advisor
4	Dewantari Handayani S.H., MPA. Jl. Pondok Pinang Raya No 3, Pondok Pinang Jakarta Selatan, 12310 Telp : 021 765 1859, 751 4828 Faks : 021 765 1859, 751 4828 Email: dewantari@notaris-jakarta.com	Notaris Notary
5	Rismalena Kasri, SH Prosperity Tower Lt.9, District 8, SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: 021 50 3000 29 Email: rismalena@dnnet.net.id	Notaris Notary

JARINGAN WILAYAH OPERASI

OPERATIONAL AREA



MEDAN

- Belawan Medan
- Arun Lhokseumawe



MAKASSAR

- Bitung
- Bau-bau
- Kolonodale



PLAJU

- Plaju- Palembang
- Jambi



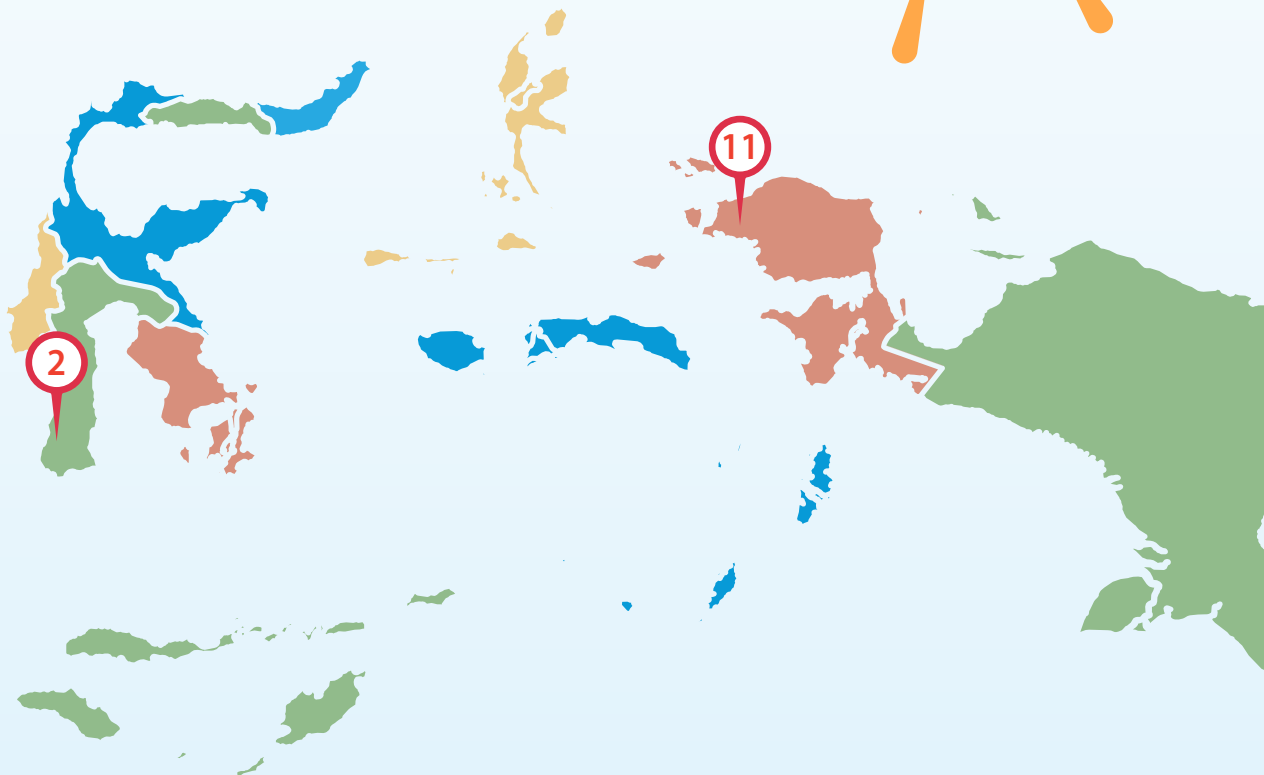
BALIKPAPAN

- Kota Baru
- Kuala Semboja
- Samarinda
- Tanjung Santan
- Tarakan



BATAM

- Pulau Sambu
- Tarempa
- Tanjung Uban



6

TANJUNG PRIOK

- Merak
- Cirebon
- Balongan



7

DUMAI

- Sei Pakning



8

CILACAP

- Semarang



9

BONTANG

- Bontang dan sekitar



10

SURABAYA

- Tuban
- Gresik
- Telaga Biru
- Situbondo
- Tanjung Wangi



11

SORONG

- Bintuni
- Bula (Seram Timur)

DAFTAR ALAMAT KANTOR OFFICE ADDRES



KANTOR PUSAT / Head Office

Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450

Telp : (021) 31923005

Faks : (021) 3106804

KANTOR CABANG / Branch Office

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1 Komp. Pertamina PO BOX 432

Balikpapan

Phone : (0542) 734693, 515663

Fax : (0542) 423766

Email : ptkbpp@ptk-shipping.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4 Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang

Makassar-Sulawesi Selatan

Phone : (0411) 873683

Fax : (0411) 873683

Email : ptkmakassar@ptk-shipping.com

Surabaya

Jl. Perak Timur 260 Perak Surabaya

Phone : (031) 3282057, 3299112

Fax : (031) 3299113

Email : ptksurabaya@ptk-shipping.com

Batam

Jl. Raya Pelabuhan Kabil

Batam 29435

Phone : (0778) 711741 – 42

Fax : (0778) 711263, 711136

Email : ptkbatam@ptk-shipping.com

Plaju-Palembang

Jl. Beringin No. 70 Plaju Palembang, Sumatra Selatan

Phone : (0711) 595473, 595376, 595475, 596474

Fax : (0711) 542367, 542377

Email : ptkplaju@ptk-shipping.com

Belawan

Jl. Minyak No. 1 Lingkungan I Kel. Belawan I, Kec. Medan

Belawan Medan

Phone : (061) 6943464

Fax : (061) 694241-45

Email : ptkmedan@ptk-shipping.com

Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262. Kode Pos 28811 Dumai-Riau

Phone : (0765) 443981, 38370

Fax : (0765) 35173

Email : ptkdumai@ptk-shipping.com

Bontang-Kalimantan Timur

Jl. Selat Bone No.29 RT.21 Tanjung Laut Bontang Selatan
75321

Phone : (0548) 26182, 26165

Fax : (0548) 551573, 21265

Email : ptkbontang@ptk-shipping.com

Cilacap

Jl. Tongkol No.20 Cilacap Selatan Cilacap – Jawa Tengah
53211

Phone : (0282) 521852

Fax : (0282) 521852

Email : ptkcilacap@ptk-shipping.com

Sorong-Papua

Jl. Yos Sudarso No. 78 Komperta Lido Sorong – Papua

Phone : (0951) 322294, 329502, 329503

Fax : (0951) 322729

Email : ptkorong@ptk-shipping.com



Tanjung Priok

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistic
Pertamina Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok, Jakarta
Utara
Phone : (021) 65307028, 65307026, 65307029
Fax : (021) 65307035
Email : ptkpriok@ptk-shipping.com

KANTOR SUB-CABANG

Sub-Branch Offices

Sub Cabang Balikpapan

Balikpapan Sub-Branch

Kota Baru

Gedung PT Pertamina (Persero) UPMS V
Jl. Pertamina RT.21
Ds. Semayap Kec Pulau Laut Utara
Kab. Kotabaru – Kalimantan Selatan
Phone : (0518) 23256

Kuala Semboja

Kuala Semboja RT.003
Kel. Senipah, Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Phone : (0542) 535137

Samarinda

Jl. Dr. Sutomo 40 Kel. Sanga-Sanga Dalam
Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur
Phone : (0541) 671300
Fax : (0541) 671487

Tanjung Santan

Komp. Chevron Santan Terminal RT.XI
Desa Semangko, Kec. Marang Kayu
Kab. Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
Phone : (0542) 548275
Fax : (0542) 548278

Tarakan

Jl. Kesuma Bangsa RT.04 RW.03
Kel. Lungkas Ujung
Kec. Tarakan Timur
Tarakan – Kalimantan Timur

Sub Cabang Batam

Batam Sub-Branch

Pulau Sambu

Pertamina Pulau sambu RT. 01 /RW. 06
Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang
Batam

Tarempa

Ds. Payamaran RT.07 RW 01 Kec. Palmatak
Kab. Kepri Anabas – Kepri

Tanjung Uban

Jl. Hang Tuah No.24
RT. 001/RW.007, Kel. Tanjung Uban
Kec. Bintan Utara
Kab. Bintan – Kepri



Sub Cabang Makassar

Makassar Sub-Branch

Bau-Bau

Jl. Dayanu Ikhsanuddin Km. 8 Kel. Sulla,
Kec. Betoambari Bau-Bau, Sulawesi Utara

Kolonodale

Jl. Wolter Mongonsidi No. 25
Kolonodale – Sulawesi Tengah
Phone : (0518) 21624

Sub Cabang Belawan

Belawan Sub-Branch

Arun Lhokseumawe

2nd Floor Marine Offline PT. Arun NGL Blang Lancang,
Lhokseumawe NAD
Phone : (0645) 654248
Fax : (0645) 654165
Email : ptkarun@ptk-shipping.com

Sub Cabang Dumai

Dumai Sub-Branch

Sei Pakning

Gd. Marine Jasra Pertamina (Persero)
UPMS II Jl. Jend. Sudirman Sei Pakning 28761
Phone : (0766) 91112
Fax : (0766) 91112
Email : ptkdumai@ptk-shipping.com

Sub Cabang Cilacap

Cilacap Sub-Branch

Semarang

Mangunharjo RT. 002 RW 003 Kel. Mangunharjo,
Kec. Tugu Semarang

Sub Cabang Sorong

Sorong Sub-Branch

Bintuni

Bintuni – Babo
Irian Jaya Barat



Bula – Seram Timur

Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Bula
Jl. Lumba – Lumba RT. 002/01
Kel. Bula, Seram Timur

Wayame

Jl. Ir. M Putuhena Rt.006/RW.03
Ds. Wayame Kec. Teluk Ambon
Ambon –Maluku
Phone : (0911) 310087
Fax : (0911) 346155

Sub Cabang Tanjung Priok *Tanjung Priok Sub-Branch*

Merak

Jl. Pulatorida Kav. M 90-92 Tanjung Sekong
Merak, Banten
Phone : (0254) 571617, 571178
Fax : (0254) 571617

Balongan

Jl. Kerang A8 Komplek Pertamina EP
Balongan – Indramayu
Phone : (0234) 4288888
Email : ptkbalongan@ptk-shipping.com

Cirebon

Jl. Sawo 1 C No. 46A
Komperta Klayan – Cirebon
Phone : (0231) 211691
Fax : (0231) 211691
Email : ptkcirebon@ptk-shipping.com

Sub Cabang Surabaya *Surabaya Sub-Branch*

Tuban

Jl. Tanjung Awar – awar No 10 RT.02 RT.01
Dusun Boro, Ds Tasik Harjo Kec. Jenu, Tuban

Gresik

Jl. Yos Sudarso No.01 RT.002 RW.004
Kel. Bedilan Gresik Jawa Timur
Phone : (031) 3282057

Telaga Biru

Jl. Raya Pelabuhan No. 60
Bangkalan, Madura
Phone : (031) 3071229

Situbondo

Jl. Raya Pelabuhan No. 1
Kalbut, Situbondo
Phone : (0338) 675141

Tanjung Wangi

Jl. Raya Situbondo No 8A
Kec. Kalipuro Kab. Banyuwangi
Phone : (031)3282057
Fax : (031)3299113

Sub Cabang Plaju-Palembang *Plaju – Palembang Sub-Branch*

Jambi

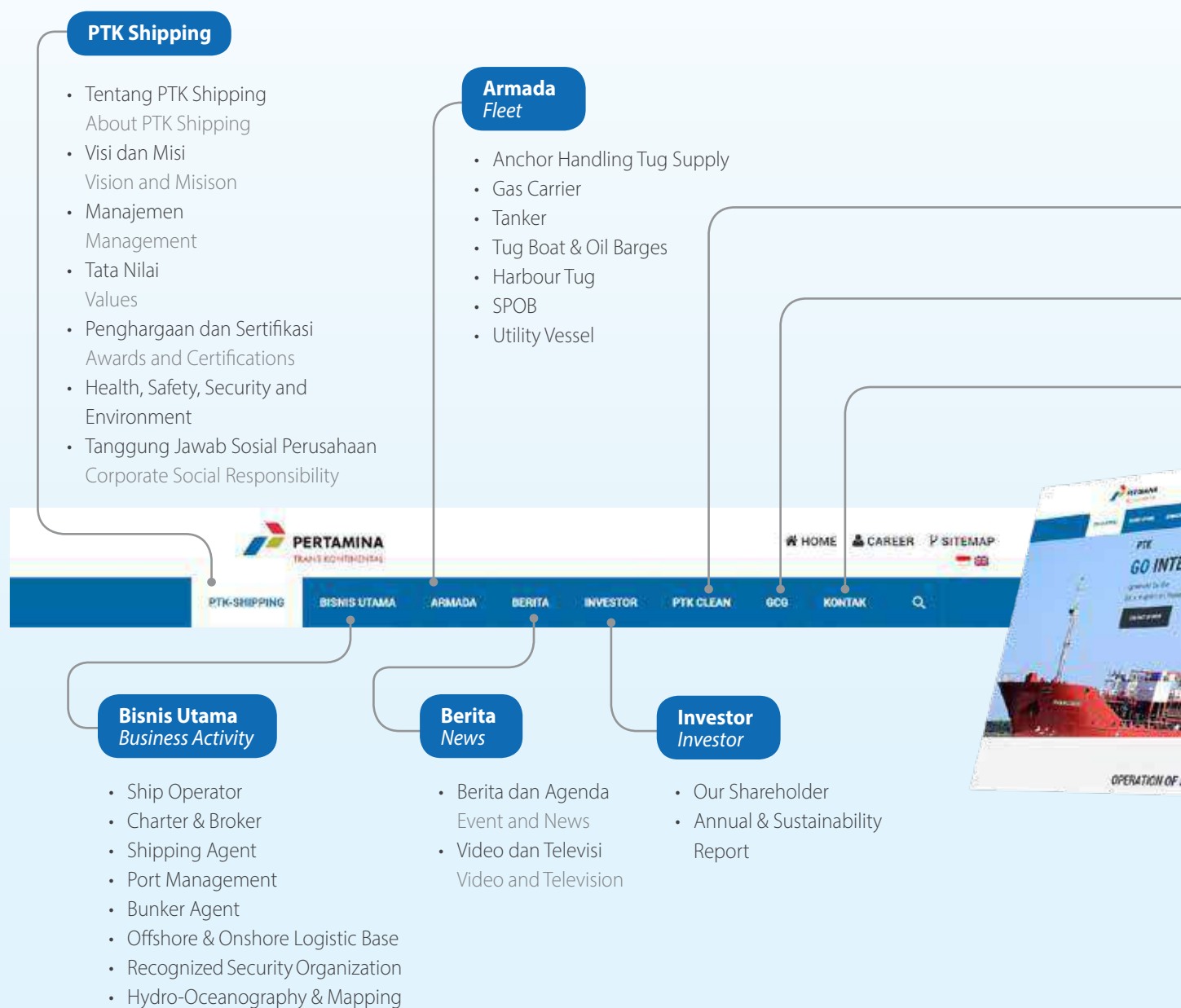
Jl. Yos Sudarso No. 36 Kasang, Jambi
Phone : (0741) 31623
Fax : (0741) 7552186
Email : ptkjambi@ptk-shipping.com

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON OFFICIAL WEBSITE

Informasi terkait PTK yang dimuat pada website Perusahaan (<http://www.ptk-shipping.com/id/>) antara lain sebagai berikut :

Information related to PTK are presented on our official website (<http://www.ptk-shipping.com/id/>), as follows:





PTK Clean PTK Clean

- Tentang PKT Clean
About PTK Clean
- Apa yang Perlu Dilaporkan
What Should be Reported
- Pembuatan Laporan
Create Report

PTK Clean PTK Clean

- Board Manual
Board Manual
- Pedoman Code of Conduct
Code of Conduct
- Pedoman Code of Corporate
Governance
Code of Corporate Governance
- Pedoman Gratifikasi
Gratification Guideline
- Pedoman Conflict of Interest
Conflict of Interest Guideline
- Pedoman Gratifikasi Fungsi
Pengendalian Gratifikasi
Gratification Guideline
Anti-Gratification Function
- Pedoman Whistleblowing System
Whistleblowing System Guideline

Kontak Contact

- Kontak Kami
Contact Us
- Cabang
Branches
- Anak Perusahaan
Subsidiary



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2019

AWARDS AND CERTIFICATIONS IN 2019

PENGHARGAAN

Penghargaan yang diterima Perusahaan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

AWARDS

Awards received by the Company in 2019 is as follows:



No	Penghargaan/ Awards	Tanggal/ Date
1.	PT Donggi-Senoro LNG on National Occupational Health and Safety Month (K3) 2019 Without Lost Time Incident	21 Januari 2020 January 21, 2020
2.	Work Case PT Donggi-Senoro LNG 28.356.348 Man Hours without Days Away	21 Januari 2020 January 21, 2020
3.	In Appreciation of your ships calls contribution at Port of Banten on year 2019 The Best Shipping Agent	22 Januari 2020 January 22, 2020
4.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dukungan dan kerjasama dalam meraih capaian kinerja 2019 Customs and Excise Inspection and Service Office Support and cooperation in achieving 2019 performance achievements	29 Januari 2019 January 29, 2019



No	Penghargaan/ Awards	Tanggal/ Date
5.	Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2019: Platinum, kategori PC Prove GAMMARA Shipping Gold, FT PROVE – Harbour Squad PC Prove CRV	20 Maret 2019 March 20, 2019
6.	Shipping Award PT Pertamina (Persero) The Best Operation Performace 2018 (TB Patra 1204 – OB Patra 2304)	28 – 29 Maret 2019 March 28-29, 2019
6	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Penghargaan Kecelakaan Nihil Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia Zero Accident Award	29 Maret 2019 March 29, 2019
7.	Vendor day Pertamina 2019 oleh Direktorat Manajemen Aset Kategori The Best Vendor Score, In Mysap PT Pertamina kategori besar Pertamina Vendor Day 2019 by the Directorate of Asset Management Category of The Best Vendor Score, In Mysap PT Pertamina in major category	19 April 2019 April 19, 2019
8.	Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) 2018: Top 3 in Downstream category Best Implementation of Enterprise Risk Management (ERM) 2018 Top 3 in Downstream category Best EBITDA Growth Subsidiary 2018 Top 3 in Downstream category Best Company's Soundness Level 2018 Top 3 in Downstream category Best Investment Realization 2018 Top 3 in Downstream category Best Implementation of Good Corporate Governance 2018 Top 5 Best Implementation Community Involvement & Development (CID) in Green Category	5 September 2019 September 5, 2019
9.	Penyerahan Laporan Umpan Balik (Feedback Report) QMA tahun 2019 dengan nilai 579 kategori Emerging Submission of QMA Feedback Report 2019 with 579 Emerging categories	9 Oktober 2019 October 9, 2019
10.	BUMN Branding and Marketing Award 2019: Brand Identity Terbaik Corporate Branding Anak Perusahaan BUMN CMO Marketing Teamwork CMO Anak Perusahaan BUMN Kepada Arsono Kuswardanu (Direktur Pemasaran) BUMN Branding and Marketing Award 2019: Best Brand Identity Corporate Branding of SOEs Subsidiary CMO Marketing Teamwork CMO of SOEs Subsidiary to Arsono Kuswardanu (Director of Marketing)	5 November 2019 November 5, 2019
11.	Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) 2019: 9 (Sembilan) Gold 17 (Tujuh Belas) Silver 2 (Dua) Bronze Continuous Improvement Program (CIP) Presentation Forum 2019: 9 (Nine) Gold 17 (Seventeen) Silver 2 (Two) Bronze	27 November 2019 November 27, 2019
12.	Kontribusi dan Kerjasama yang baik dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon Tahun 2019 Contribution and good cooperation with the Customs and Excise Inspection and Service Office Office Type C Cirebon 2019	27 November 2019 November 27, 2019
13.	IPC Customer of The Year & Gathering 2019 di Hanoi – Vietnam Success Through Synergy IPC	27 November 2019 November 27, 2019
14	Perusahaan Nihil Kecelakaan Kerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019 dengan Total 349.116 Jam Kerja Tanpa Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Hilangnya Jam Kerja Zero Level of Work Accident in Banten Province in 2019 with a Total of 349,116 Work Hours Without Work Accidents that Causes Loss of Working Hours	27 November 2019 November 27, 2019



SERTIFIKASI

Sertifikasi yang dimiliki perusahaan selama tahun 2019:

CERTIFICATES

Certificates of the Company in 2019 are as follows:

No	Sertifikasi/ Certifications	Pemberi/ Certifying Institution	Tanggal Date
1	Quality Management System ISO 9001:2015	RINA Services Sp.A	19 Desember 2016 – 18 Desember 2019 December 19, 2016 – December 18, 2019
2	Environmental Management System ISO 14001:2015	RINA Services Sp.A	7 November 2014 – 6 November 2020 November 7, 2014 – November 6, 2020
3	Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018	RINA Services Sp.A	13 November 2014 – 12 November 2020 November 13, 2014 – November 12, 2020
4	Sertifikat KADIN Certificate from Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)	Kamar Dagang Indonesia Indonesian Chamber of Commerce and Industry	1 Januari 2018 - 30 Desember 2019 January 1, 2018 – December 30, 2019



PERISTIWA PENTING TAHUN 2019

SIGNIFICANT EVENTS 2019



11 Januari 2019 | January 11, 2019

Penandatanganan Kontrak Jasa Pendukung Logistik Lepas Pantai PPT Pertamina Hulu Mahakam dengan konsorsium PT Pertamina Trans Kontinental dan PT Peteka Karya Samudera
Signing of Pertamina Hulu Mahakam PPT Offshore Logistics Support Services Contract with PT Pertamina Trans Kontinental and PT Peteka Karya Samudera consortium



16-20 Maret 2019 | March 16-20, 2019

PTK Raih 2 Gold Dalam APQ Award 2019
PTK Wins 2 Gold in the 2019 APQ Award



20 Maret 2019 | March 20, 2019

PTK Peduli Korban Banjir Sentani
PTK Cares for Sentani Flood Victims



28 Maret 2019 | *March 28, 2019*

PTK meraih penghargaan kategori Best Commercial Performance dari Shipping Awards 2018 - Yogyakarta

PTK Won award for Best Commercial Performance dari Shipping Awards 2018 category – Yogyakarta.



16 Mei 2019 | *May 16, 2019*

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PTK Tahun Buku 2018

PTK Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2018



14 Juni 2019 | *June 14, 2019*

Lanching ceremony kapal milik PTK yang diberi nama Transko Rajawali

Launching ceremony of PTK's vessel named Transko Rajawali.



Serah terima jabatan Direktur Utama PTK yaitu
Giri Santoso kepada Nepos MT Pakpahan
Inauguration of President Director from Giri
Santoso to Nepos MT Pakpahan.



Peduli Kesehatan melalui CSR UP-Skill Kader
Posyandu Tahap II
Health Care through Phase II Posyandu Cadre
UP-Skill CSR



Peresmian Fasilitas Produksi Sumur Bor
Ciwandan
Inauguration of Ciwandan Drilling Well
Production Facility.



Penandatanganan Mooring Boat antara PTK dengan Galangan Dok Bahari Nusantara dan Orela

Arrival of Mooring Boat between PTK with Nusantara Bahari Shipyard and Orela.



PTK meraih dua penghargaan dari BUMN Branding & Marketing Award 2019

PTK won two awards from BUMN Branding & Marketing Award 2019.



Serah Terima 3 unit Mooring Boat dari PT Pahala Harapan Lestari Kepada PT Pertamina Trans Kontinental.

Handover of 3 Mooring Boat units from PT Pahala Harapan Lestari to PT Pertamina Trans Kontinental.



Serah Terima Mooring Boat 9 Meter
PT Pertamina Trans Kontinental
Handover of PT Pertamina Trans Kontinental
Mooring Boat 9 Meters



PTK melakukan Penandatanganan Perjanjian
Pembelian dan Pembangunan 22 unit Kapal
Mooring Boat.
PTK conduct Signing of the Purchase and the
Construction Agreement for 22 units of Mooring
Boat.





PENDUKUNG BISNIS

BUSINESS SUPPORT

- 112** Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 132** Teknologi Informasi
Information Technology
- 141** Manajemen Persediaan, Pengadaan Barang
dan Jasa
Inventory Management, Good and Services
Procurement

SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES

Penguatan SDM untuk Keberlanjutan Usaha

HR Development for business continuity

“

Memasuki periode yang penuh tantangan di tahun 2019, kami melakukan serangkaian langkah insiatif untuk mendukung proses bisnis serta pengembangan usaha melalui penguatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini merupakan keniscayaan yang harus ditempuh mengingat kualitas SDM merupakan kunci bagi keberlanjutan usaha.

Approaching a period full of challenges in 2019, we have conducted series of initiatives to support business process and business development through Human Resources (HR) development. This becomes a necessity that shall be taken considering the HR quality as key to business continuity.

”

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Langkah-langkah inovatif yang diambil dalam upaya penguatan SDM di tahun 2019, tetap sejalan dengan kebijakan Perusahaan di bidang pengelolaan SDM. Kami memandang bahwa SDM merupakan salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan terus berjalan karena manusialah penggerak utama suatu organisasi.

Keberhasilan atau kesuksesan Perusahaan dalam menjalankan bisnis sangat erat kaitannya dengan peran SDM yang secara terus-menerus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mendorong serta meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan yang senantiasa melakukan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang memadai dan kompetensi organisasi yang sejalan dengan kegiatan bisnis akan memungkinkan pertumbuhan pada bisnis Perusahaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Guna memenuhi tuntutan tersebut, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) secara konsisten dan kontinyu dari tahun ke tahun menyiapkan kader-kader yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan. Kami bersyukur bahwa berbagai

HR MANAGEMENT POLICY

The innovative actions taken to strengthen HR in 2019 are assured to stay in line with the Company's policies in the field of HR management. We consider that HR is one of the most important elements that will drive the Company's business to sustain as the manpower becomes engine of an organization.

The success or achievement of the Company in running the business is very closely related to role of HR which is continuously being developed with capability to encourage and improve the Company's performance. Therefore, the Company that always drives continuous improvements in terms of sufficient human resources quality and competence as well as organizational competencies that are in line with business activities, will enable growth in the Company's business in a sustainable and sustainable manner.

To meet these expectations, PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) has prepared quality talents consistently and continuously every year to fulfill these needs. We are grateful that these various efforts implemented in 2019



upaya yang kami lakukan di tahun 2019 telah ikut memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menciptakan kinerja positif serta berbagai prestasi yang telah diraih.

have contributed to a very significant endeavours in creating positive performance and various achievements.

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengembangan dan peningkatan SDM membentuk manusia yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kepada Perusahaan akan berpengaruh kepada kinerja Perusahaan. Berdasarkan visi, misi dan tata nilai, PTK menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang dimilikinya dan berbagai kegiatan yang dilakukannya. PTK dalam memperjuangkan pekerja di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini PTK segera membuat strategi pengelolaan dan pengembangan SDM melalui peningkatan skill dan daya saing dalam bidang pekerjaan yang digeluti.

SDM yang unggul dan berkualitas akan membantu Perusahaan agar menjadi lebih berkembang dan dapat mencapai tujuan Perusahaan. Setiap jajaran Manajemen SDM harus menciptakan manusia yang handal dengan melakukan *training*, *coaching* dan *motivation* pada setiap pekerja agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemampuan inilah yang akan menjadi salah satu kunci kemajuan dan keberhasilan dari sebuah perusahaan. Bahkan daya saing tinggi akan membuat pekerja siap dengan tantangan arus globalisasi dan membuat perusahaan mampu memanfaatkan peluang sebaik baiknya.

Dalam jangka panjang, perusahaan melalui manajemen sumberdaya manusia akan diarahkan untuk:

1. Memberikan kesempatan sumber daya manusia untuk berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain untuk kebaikan perusahaan juga untuk kebaikan perorangan itu sendiri;
2. Memperkuat produk unggulan di setiap unit kerja untuk menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam perusahaan;
3. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan;
4. Dapat membangun peralatan produksi yang maju dan canggih,

HR MANAGEMENT STRATEGY

The HR development and enhancement to create quality manpower with skills, work ability and loyalty to the Company will affect the Company's performance. Based on the Vision, Mission and Values, PTK has stipulated the targets to be achieved through the management of its resources and the various activities that it does. In prioritizing the employees in the midst of this uncertain economic situation, PTK has immediately prepared human resources management and development strategies through increased skills and competitiveness in each of the assigned work.

Superior and qualified human resources will help the Company to become more developed and able to achieve the Company's goals. Every HR Management must create reliable human beings by conducting training, coaching and motivation for each employee to be able to carry out their duties properly. This ability will be one of the keys to the progress and success of a company. Even high competitiveness will make employees ready for the challenges of the current globalization and make the Company able to make the best use of opportunities.

In the long run, through human resource management, the Company will align to:

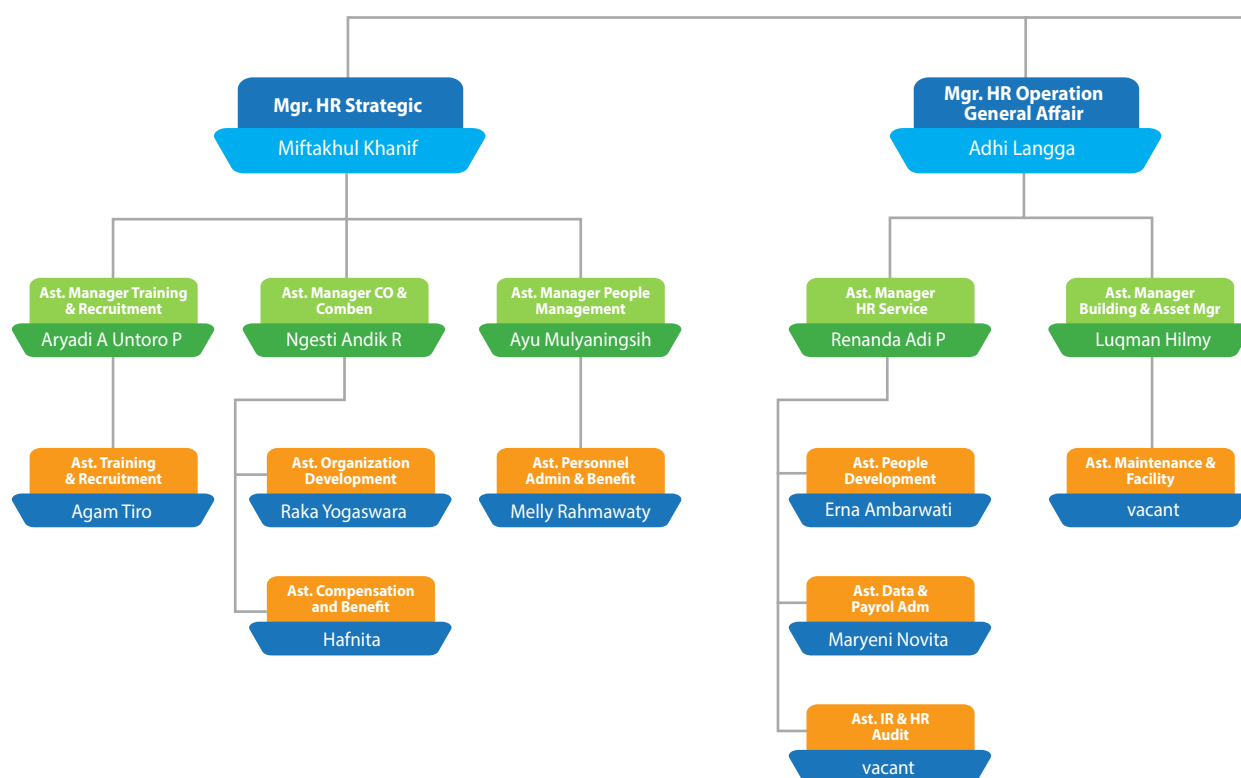
1. Providing opportunities for human resources to develop into a quality person and have high competitiveness. In addition to the good of the company, it is also for the good of the individuals themselves;
2. Strengthening superior products in each work unit to achieve competitive advantage by building linkages in the production, distribution and service systems within the company;
3. Increasing the mastery, utilization, and creation of knowledge;
4. Can build advanced and sophisticated production equipment.

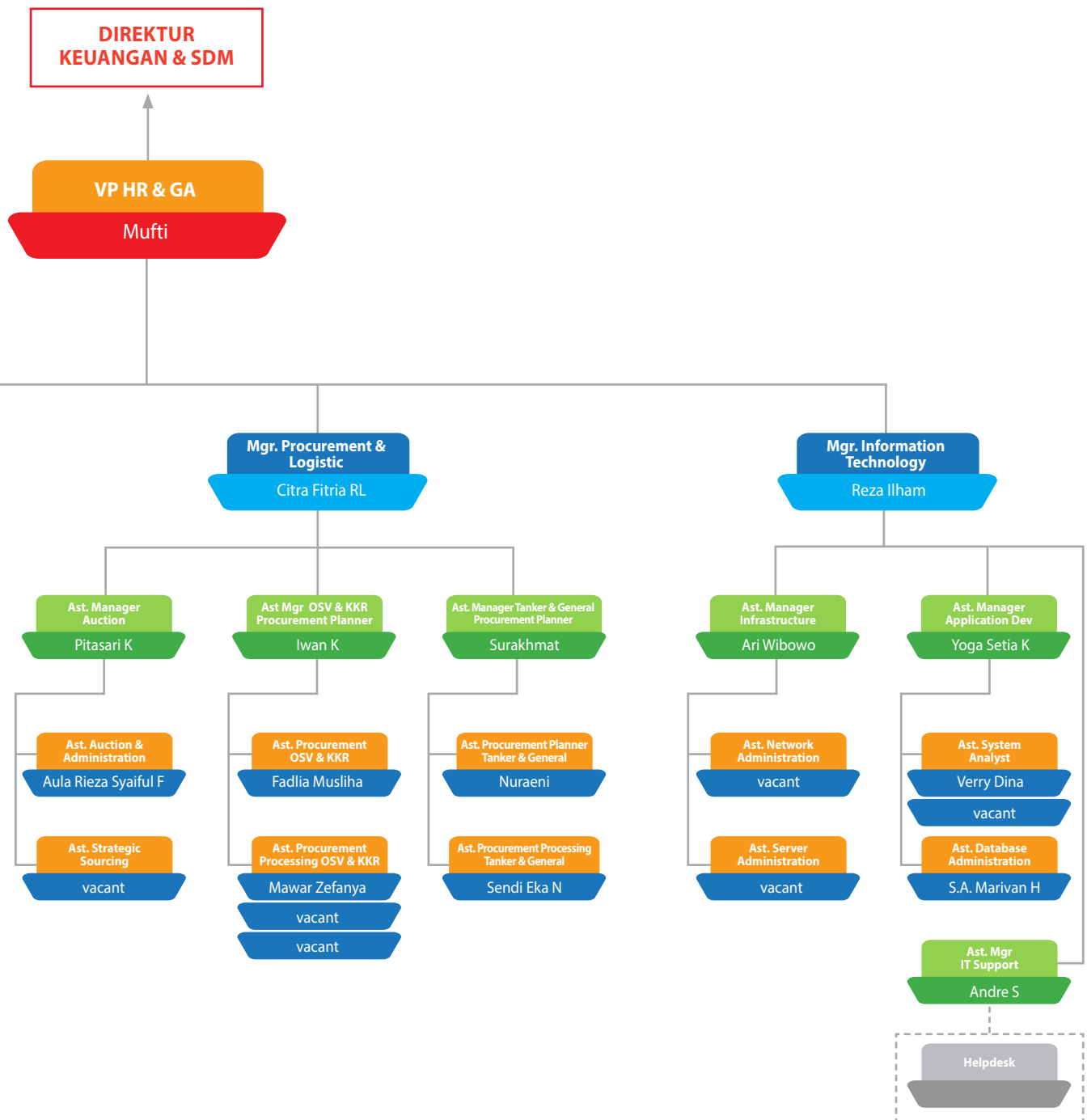
STRUKTUR ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen SDM di Perusahaan kami dibangun mulai dari penataan struktur organisasi yang ramping dan kokoh. Berikut ini kami sajikan Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia PT Pertamina Trans Kontinental:

HR ORGANIZATION STRUCTURE

HR Management in the Company is built starting from arrangement of lean and firm organization structure. The Human Resources Division Organization Structure in PT Pertamina Trans Kontinental is as follows:





FUNGSI DAN RUANG LINGKUP DIVISI HUMAN RESOURCE

Divisi Human Resource (HR) merupakan pelaku utama dalam kegiatan pengelolaan SDM, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, yang dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi yang ada. Pada prinsipnya, penetapan kebijakan pengelolaan SDM merupakan tanggung jawab Divisi HR. Namun mengingat operasional perusahaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dinilai perlu untuk mendelegasikan tugas dan tanggung jawab tersebut secara berjenjang berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku.

Berikut dibawah ini merupakan Fungsi dan ruang lingkup tugas Divisi HR PT Pertamina Trans Kontinental:

Analisis Organisasi

Analisis/kajian organisasi dilakukan berdasarkan strategi dan tujuan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Lingkup kajian meliputi wewenang dalam penyusunan struktur organisasi, uraian jabatan, jumlah formasi, kompetensi dan golongan jabatan. Perusahaan bertanggung jawab dalam menetapkan pedoman dan sistem penyusunan organisasi dan kelengkapannya, melakukan kajian organisasi, formasi maksimal, dan golongan jabatan serta menetapkan struktur organisasi dan kelengkapannya untuk seluruh level.

Perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja

Lingkup perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan tenaga kerja di setiap tingkat yang meliputi identifikasi kebutuhan dan inventarisasi ketersediaan tenagakerja, identifikasi permanen dan nonpermanen (*seasonal*), identifikasi kegiatan *core* dan *non core*, status hubungan kerja, penyelenggaraan rekrutmen, serta seleksi dan pengisian jabatan.

HUMAN RESOURCES DIVISION FUNCTION AND SCOPE

Human Resources (HR) Division is the main player in HR management activity with responsibility to perform the duty optimally. The purpose is to create quality human resources with capability to create added value for the Company, which in the implementation always coordinates with the existing functions. Principally, stipulation of the HR management policy becomes responsibility of HR Division. However, considering the Company's operations spread in almost all Indonesian region, it is seen necessary to delegate the duty and responsibility in stages based on prevailing organizational regulation.

The HR Division function and scope of duty in PT Pertamina Trans Kontinental are as follows:

Organization Analysis

Organization analysis/review is done based on organization strategy and objective disclosed in Corporate Plan (RJPP). Scope of the review covers authority in formulating organization structure, job description, formation, competence and job grade. The Company is responsible in determining the organization and supporting structure guideline and formulation system, to perform organization review, maximum formation and job grade as well as determine the organization and supporting structure for all levels.

Manpower planning and recruitment

Scope of man power planning and recruitment refers to arrangement of authority and responsibility on man power planning and recruitment at all levels including man power need analysis identification and formation inventory, identification of permanent and non-permanent (*seasonal*) personnel, identification of core and non-core activities, working relation status, recruitment process as well as selection and assignment.



Pengelolaan Kinerja Pekerja

Lingkup pengelolaan kinerja pekerja adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab penetapan pedoman dan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang digunakan. Kantor Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan pedoman SMK, sementara Cabang bertanggung jawab dalam menjabarkan SMK agar dapat diimplementasikan di lingkungannya. Anak Perusahaan bersama-sama melaksanakan pedoman SMK sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Employee Performance Management

Scope of employee performance management refers to arrangement of authority and responsibility in formulating the applied Performance Management Guideline and System (SMK). Head Office has the authority and responsibility in stipulating SMK Guideline, however, Branch is responsible in explaining the SMK to be implemented under its circumstances. The subsidiaries will exercise the SMK guideline altogether according to the stipulated regulation.

Pengembangan Karir

Lingkup pengembangan karir pekerja yang diatur dalam pedoman ini meliputi wewenang dan tanggung jawab dalam penetapan pedoman dan sistem pengembangan karir, pelaksanaan promosi, mutasi, rotasi dan suksesi serta penugasan pekerja dalam rangka perbantuan dan *assessment center*.

Career Development

Scope of employee career development regulated in this guideline includes authority and responsibility in stipulating career development manual and system, implementation of employee promotion, mutation, rotation and succession as well as assignment and assessment center.

Pembelajaran

Lingkup pembelajaran adalah mengatur kewenangan dan tanggung jawab penetapan pedoman, *Training Need Analysis* (TNA), pelaksanaan program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta internalisasi dan pengembangan budaya Perusahaan.

Learning

Scope of learning arranges authority and responsibility in stipulating the manual, Training Need Analysis (TNA), implementation of learning program, learning evaluation as well as corporate culture internalization and development.

Pengupahan dan Benefit

Lingkup pengupahan dan benefit adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam penetapan pedoman, kebijakan serta program pengupahan dan benefit, pelaksanaan pemberian upah, tunjangan dan kompensasi, penghargaan, fasilitas, pemberian benefit kesehatan, dan jaminan hari tua.

Payroll and Benefit

Scope of salary and benefit covers authority and responsibility in stipulating the salary and benefit manual, policy and program, implementation of salary, allowance and compensation, rewards, facility, health benefit and pension insurance procedure.

Pengelolaan Hubungan Industrial

Lingkup pengelolaan hubungan industrial adalah mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan hubungan industrial, hubungan dengan instansi terkait bidang ketenagakerjaan, hubungan dengan Serikat Pekerja, penyelesaian masalah hubungan industrial.

Industrial Relation Mapping

Scope of industrial relation management regulates authority and responsibility in stipulating industrial relation policy, relationship with related institution in manpower aspect, relationship with Workers Union, industrial dispute settlement.

PROFIL KEPALA UNIT SDM

Profil kepala Unit SDM telah disajikan pada Profil Pejabat, bab Profil Perusahaan, Laporan Tahunan ini.

REKRUTMEN PEKERJA

Rekrutmen merupakan tahapan proses paling penting dalam pengembangan SDM di PTK. Sebab rekrutmen adalah proses awal sebagai regenerasi serta pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam rangka pemenuhan jabatan yang masih *Vacant* di kantor pusat maupun di cabang-cabang, PTK telah membuka lowongan kerja baik untuk pekerja darat (*fresh graduate* dan *experienced*) maupun pekerja laut khusus jabatan Nakhoda, Mualim I dan Masinis I. Pelaksanaan perekrutan dibagi menjadi dua tahap, lowongan kerja untuk *fresh graduate* dan yang berpengalaman

1. Perekrutan *Freshgraduated*

Pada akhir tahun 2019 PTK telah merekrut lima puluh pekerja untuk penempatan di PTK Pusat dan Cabang-cabang seluruh Indonesia melalui perekrutan *fresh graduate* yang akan melaksanakan masa *on-job training* (OJT) selama tiga bulan. Dengan mekanisme OJT, pekerja akan menjalani pergerakan penempatan fungsi yang disusun oleh Fungsi HR Strategic. Selain itu, pekerja baru dibekali beberapa pembekalan sebelum OJT, antara lain *character building*, pengenalan proses bisnis Perusahaan, dan pelatihan wajib *Completed Staff Work* (CSW) serta komunikasi.

2. Perekrutan *Experienced*

Proses perekrutan jalur *experienced* dilakukan untuk mengisi formasi pekerja darat dan pekerja laut dan telah sampai pada tahap IV (wawancara dengan Direksi).

Online recruitment

Salah satu pola rekrutmen dilakukan secara online dengan memanfaatkan situs web perusahaan. Metode seleksi digunakan untuk melakukan penerimaan pekerja baru dengan tahapan sebagai berikut :

PROFILE OF HEAD OF HR UNIT

Profile of Head of HR Unit is presented in Executives Profile, Company Profile chapter in this Annual Report.

EMPLOYEE RECRUITMENT

Recruitment becomes the most important stage in the development of human resources in PTK. Because recruitment is the initial process as a talent regeneration and recruitment which continues to increase every year.

In the context of assignment to vacant positions at the head and branch offices, PTK has published job vacancies both for ground workers (*fresh graduates* and *experienced*) as well as special off shore workers for the position such as Captain, Mualim I and Machinist I. The recruitment is divided into two stages, vacancies for *fresh graduates* and *experienced*

1. Freshgraduated Recruitment

By the end of 2019 PTK has recruited fifty workers for placement in Central CAR and Branches throughout Indonesia through the recruitment of *fresh graduates* who will carry out the *on-job training* (OJT) for three months. With the OJT mechanism, workers will go through the placement of functions arranged by the Strategic HR Function. In addition, new workers are provided with a number of provisions prior to OJT, including *character building*, introduction of the Company's business processes, and compulsory staff work (CSW) training and communication.

2. Experienced Recruitment

The recruitment process for *experienced* track is carried out to fill the formation of land workers and sea workers and has reached stage IV (interview with the Board of Directors)

Online Recruitment

One of the recruitment schemes is done online by using the Company's website. The selection method used for new workers recruitment passed the following stages:

1. Seleksi administrasi dan verifikasi persyaratan jabatan
2. Pemeriksaan psikologis (tes psikologi)
3. Penilaian kompetensi
4. Tes keahlian sesuai kebutuhan (sesuai keperluan)
5. Wawancara User (Fungsi Pengguna dan fungsi HR&GA)
6. Tes Kesehatan
7. Wawancara Direksi

1. Administration selection and position requirement verification
2. Psychological test
3. Competency assessment
4. Skill test based on needs
5. User interview (User Function and HR & GA Function)
6. Medical check-up
7. Interview with BOD

Selain tahapan tersebut di atas, pekerja baru melaksanakan *On Job Training* selama 3 (tiga) bulan dengan mekanisme setiap bulan pekerja akan dilakukan pergerakan penempatan Fungsi yang disusun oleh Fungsi Human Resource. Sebelum pekerja melaksanakan OJT diberikan pembekalan sebagai berikut :

1. *Character Building* dengan tujuan pembentukan budaya perusahaan dan disiplin.
2. Pengenalan Proses Bisnis Perusahaan yang dipresentasikan oleh Pimpinan masing-masing Fungsi.
3. Pemberian pembekalan dengan pelatihan Mandatory

In addition to those stages, the new employees are eligible to join *On Job Training* within 3 (three) months with the mechanism where the worker will be rotated every month in different Function arranged by the Human Resources Function. Prior the OJT, the workers will receive some materials, as follows:

1. Character Building with the purpose to build corporate and discipline cultures.
2. Introduction to Company's business process presented by Executive in each Function.
3. Material given in Mandatory trainings.

Komposisi Pekerja baru PT Pertamina Trans Kontinental
Composition of New Employees in PT Pertamina Trans Kontinental

Gender	YoY 2018:2019	2019	2018	2017
Laki-laki Male	-85,29%	5	34	13
Perempuan Female	100%	2	1	7
Total	-80%	7	35	20

PROFIL DAN KOMPOSISI PEKERJA

Salah satu kekuatan Perusahaan adalah sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan dan kemampuan yang beragam yang secara berantai dan bersinergi mendukung pencapaian Perusahaan. Berikut adalah profil Sumber Daya Manusia untuk tahun 2019.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah Sarjana S1 sebanyak 346 orang. Disusul kemudian adalah pekerja dengan latar belakang pendidikan Diploma sebanyak 113 orang dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 142 orang.

EMPLOYEE PROFILE AND COMPOSITION

One of the Company's strengths is human resources with various educational background and skill that builds synergy and cooperate to support the Company's achievement. Human Resources profile for 2019 is as follows:

Employess Composition by Education Level

Based on educational level, the highest composition of PT Pertamina Trans Kontinental's employees has Bachelor's degree of 346 employees, followed by 113 employees with Diploma degree and 142 employees as High School graduates.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition Based on Educational Level

Pendidikan	YoY 2018:2019	2019	2018	2017
Pasca Sarjana Post Graduate	(18,84)%	56	69	28
Sarjana Bachelor's degree	4,85%	346	330	295
Diploma Diploma	(9,60)%	113	125	113
Sekolah Menengah Atas High School	1,43%	142	140	162
Lain-lain others	22,22%	11	9	11

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah berusia 31-40 tahun sebanyak 203 orang. Disusul kemudian adalah pekerja berusia 41-50 tahun sebanyak 189 orang.

Employee Composition based on Age

Based on age, the highest composition of Pertamina Trans Kontinental is on 31 – 40 years with 203 employees followed by 189 employees on 41 – 50 years group.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Usia Employee Composition based on Age

Usia	YoY 2018:2019	2019	2018	2017
<20 tahun Years	200%	3	1	1
21-30 tahun Years	12,26%	174	155	109
31-40 tahun Years	(1,46)%	203	206	173
41-50 tahun Years	(1,05)%	189	191	186
51-55 tahun Years	(18,18)%	81	99	102
>55 Tahun Years	(14,29)%	18	21	38

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi

Berdasarkan level organisasi pekerja Pertamina Trans Kontinental dikelompokkan menjadi Staf, Non Staf, Manager, dan Eksekutif. Pekerja Non Staff menempati urutan pertama sebanyak 282 orang. Menyusul pekerja Staf sebanyak 228 orang.

Employee Composition Based on Organizational Level

Based on organizational level, employees of Pertamina Trans Kontinental are classified into Staffs, Non-Staffs, Manager and Executive. Non-staff employees is on the first rank with 282 employees followed by 228 employees at Staff level.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi Employee Composition based on Organizational Level

Jabatan Job Grade	YoY 2018:2019	2019	2018	2017
Non Staff	26,46%	282	223	187
Staff	(25,97)%	228	308	285
Asisten Manager Assistant Manager	23,38%	95	77	74
Manager	0%	47	47	45
Eksekutif Executive	(11,11)%	16	18	18



Komposisi Pekerja Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender komposisi pekerja Pertamina Trans Kontinental terbesar adalah laki-laki sebanyak 519 orang. Disusul kemudian adalah pekerja perempuan sebanyak 149 orang.

Employee Composition based on Gender

Based on gender, the highest composition of Pertamina Trans Kontinental's employees is male employees with 519 employees and followed by 149 female employees.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Gender Employee Composition based on Gender				
Gender	YoY 2018:2019	2019	2018	2017
Laki-laki Male	(3,53)%	519	538	487
Perempuan Female	10,37%	149	135	122

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian komposisi karyawan Pertamina Trans Kontinental dibagi menjadi Pekerja Tetap dan Pekerja Tidak Tetap. Jumlah Pekerja Tetap pada tahun 2019 sebanyak 346 orang, sedangkan pekerja tidak tetap sebanyak 322 orang.

Employee Composition based on Employment Status

Based on employment status, composition of Pertamina Trans Kontinental's employees is classified into Permanent and Non-Permanent Employees. In 2019, total Permanent Employees reached 346 employees, meanwhile Non-Permanent Employees reached 322 employees.

Komposisi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian Employee Composition based on Employment Status				
Status	YoY 2018:2019	2019	2018	2017
Pekerja Tetap Permanent Employees	(5,72)%	346	367	366
Pekerja Tidak Tetap Non-Permanent Employees	5,23%	322	306	243

TINGKAT TURNOVER PEKERJA

Sepanjang tahun 2019, tingkat *turnover* sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pekerja sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap jalannya operasi perusahaan. Berikut ini kami sajikan statistik komparatif dalam tiga tahun terakhir:

EMPLOYEE TURN OVER RATE

Throughout 2019, turn over rate remains very low compared to total employees thereby not causing any significant impact on the Company's operations. The comparative statistical turn over rate within 3 recent years are as follows:

Jumlah Turnover Pekerja Employee Turnover Rate			
Uraian Description	2019	2018	2017
Jumlah Pekerja Total Employees	668	673	609
Pekerja Mengundurkan Diri Resigned Employees	3	3	6
Turnover Pekerja (%) Employees Turnover (%)	0,45%	0,45%	0,99%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJA

Pengembangan SDM merupakan bagian utama dari proses pengelolaan SDM di PT Pertamina Trans Kontinental yang harus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan guna mendapatkan pekerja yang profesional agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan dapat diharapkan mampu berkontribusi tinggi kepada Perusahaan melalui kinerja yang produktif.

Perusahaan menyelenggarakan 2 jenis program pengembangan pekerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pekerja yang memiliki kompetensi, kemampuan serta *know-how* untuk menampilkan kinerja yang mendukung pencapaian strategi perusahaan.

1. Program Pengembangan *General (General Program)*
Program ini ditujukan kepada seluruh Pekerja PTK dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian pekerja guna memenuhi gap kompetensi pekerja di jabatannya saat ini
2. Program Pengembangan *Talent (Talent Development)*
Program ini ditujukan kepada para *Talent/Successor* dan pekerja baru PTK dengan tujuan:
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pada *talent/successor* dalam rangka menyiapkan pada *talent/successor* agar dapat menampilkan kinerja yang optimal pada jabatan yang lebih tinggi (*Talent Readiness*).
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja baru agar menjadi *early professional* di bidangnya serta mengidentifikasi pekerja potensial yang akan dimasukkan ke dalam *talent acceleration pool*.

Technical Training Program

Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dengan *scope* kegiatan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya *crew* secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

HR development becomes the primary part of the HR management process in PT Pertamina Trans Continental that shall be carried out consistently and continuously in order to hire professional workers to provide added value to the Company and expected to contribute significantly to the Company through productive performance.

The Company arranges 2 types of employee development programs with the purpose to ensure availability of workers with competency, ability and know-how to display performance that supports the achievement of the company's strategy.

1. General Development Program
The program is aimed at all CAR workers and focuses on developing employee competencies and expertise to meet the competency gap of workers in their current positions
2. Talent Development Program
This program is aimed at Talent/Successor and new PTK employees with the aim of:
 - a. Develop and enhance competencies in talent/successors in order to prepare talent/successors in order to display optimal performance in higher positions (*Talent Readiness*).
 - b. Develop and improve the competence of new workers to become early professionals in their fields and identify potential workers who will be included in the talent acceleration pool.

Technical Training Program

Technical competency development is carried out with *scope* of activities as follows:

1. Fulfillment of crew in number and certification (COC, COP) in accordance with regulations and timeliness of fulfillment.



- Pemberdayaan Crew PWTT
- *Sourcing* melalui *crew Agent* dengan mengutamakan sinergi bersama Anak Perusahaan yang bergerak dalam bisnis *crew agent*. Merekrut pelaut-pelaut dengan mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi sesuai regulasi serta kecakapan yang dibutuhkan dengan dituangkan ke dalam kontrak *crew agent*.
- 2. Penyiapan kader-kader Pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan talent management darat dengan *background Shipping* sesuai *core* bisnis perusahaan di masa yang akan datang.
- 3. Mempertahankan Pelaut Memberikan sistem remunerasi menarik yang bersaing dengan industri pelayaran sejenis.
 - Peningkatan KPAK / *Ship Allowance*
 - Kenaikan UJBM / *Meal Allowance*
 - Pemberian *Bonus Performance Crew*
- Empowerment of the PWTT Crew
- Sourcing through Crew Agents by prioritizing synergies with subsidiaries engaged in the crew agent business. Recruiting seafarers by requiring the fulfillment of certification in accordance with the regulations and the skills needed by disclosing in a crew agent contract.
- 2. Preparation of the best Seaman cadres for ship operations and fulfillment of ground talent management with Shipping background in accordance with the company's core business in the future.
- 3. Retain Sailors Provide an attractive remuneration system that competes with similar shipping industries.
 - Increasing KPAK/Ship Allowance
 - Increasing UJBM/Meal Allowance
 - Payment of Crew Performance Bonus

Training Lainnya

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan *leadership skill*, jabatan *managerial* telah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan, di antaranya:

Other Trainings

In order to develop competency and leadership skill, the managerial position has been participated in several trainings and educations, among others:

Training untuk Jabatan Managerial Training for Managerial Position					
Nama Program/Training/ Seminar Name of Program/Training/ Seminar	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Jabatan Peserta Level of the Participant	Jumlah Peserta Total Participants	Pelaksananya Provider	Lokasi Pelaksanaan Location
Risk Management ISO 31000:2018	Juli 2019 July 2019	Managerial dan Cabang Managerial & Branch	79	Pertamina	Jakarta & Cabang Jakarta & Branch
Terminal Operation	Maret 2019 March 2019	Managerial dan Cabang Managerial & Branch	27	PT Adicipta Anugerah Mandiri	Jakarta
Shipping Practice	Febuari – Maret 2019 February - March 2019	Manager, Ast.Manager & Cabang Manager, Ast.Manager & Branch	21	PT Menara 79	Jakarta
Port Management	Juli 2019 July 2019	Manager & Cabang Manager & Branch	25	PT SAR	Jakarta
Fire Fighting Training Level D	September 2019 September 2019	Manager & Ast. Manager	18	PT Robere Manajemen Indonesia	Jakarta

Program Pengembangan Pekerja 2019

Berikut adalah jumlah pelatihan, peserta serta biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2019:

Employee Development Program 2019

List of trainings, participants and budget allocated by the Company as end of 2019 are as follows:

Program Pengembangan Pekerja Employee Development Program				
Uraian Description	% YoY	2019	2018	2017
Jumlah Pelatihan Number of Trainings	25,00%	65	52	103
Peserta/ Participants	6,61%	613	575	668
Biaya/ Budget	-21,55%	Rp2.391.594.795	Rp3.048.484.853	Rp1.826.301.839

PROGRAM PENGEMBANGAN PEKERJA

Pengelolaan atau pembinaan SDM PTK menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki SDM yang andal. Dalam hal pembinaan SDM, perusahaan telah menyiapkan:

1. Sistem *career path* pekerja, pembuatan career path tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pencarian dan pemilihan kandidat dalam proses *Succession Planning* serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas;
2. Sistem *talent pool* sebagai salah satu alat pembinaan;
3. *Talent Management System*, merupakan *Strategic Initiative* fungsi HR. PTK telah mempersiapkan pembuatan penyusunan *Talent Management System*.

Career Path

Dalam rangka mendorong tercapainya *high performance organization*, Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan telah diisi oleh pekerja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Evaluasi penempatan pekerja (*placement*) pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja melalui proses *Job Person Mapping* (JPM) serta PRL Pribadi yang merupakan refleksi dari *exposure*, pengalaman dan kapasitas pekerja.

EMPLOYEE DEVELOPMENT PROGRAM

HR management or development in PTK is a long-term investment for the Company. This aims to ensure that the company has reliable HR. In terms of HR development, the Company has prepared:

1. Career Path System of workers, the creation of career paths aims to speed up the process of finding and selecting candidates in the *Succession Planning* process and the availability of leaders and qualified workers;
2. Talent Pool System as one of the coaching tools;
3. Talent Management System, a Strategic Initiative HR function. PTK has prepared the preparation of the Talent Management System.

Career Path

In order to encourage the achievement of high performance organizations, the Company conducts evaluations to ensure that every position has been filled by workers who have the appropriate capacity and capabilities. Evaluation of placement of workers (*placement*) in principle is done by considering the results of the assessment of workers through the process of *Job Person Mapping* (JPM) as well as Personal PRL which is a reflection of the exposure, experience and capacity of workers.



Perusahaan menyadari bahwa mengingat besarnya organisasi, jumlah jabatan dan populasi pekerja, serta mempertimbangkan bahwa penempatan pekerja dalam implementasi RPSDM merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan proses penempatan sebelumnya. Dengan demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang belum ideal, dimana tidak semua jabatan dapat diisi oleh pekerja yang sesuai/tidak ada gap dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

Talent Pool

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi *talent management*, maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan memetakan pekerja yang masuk sebagai *Talent Pool*. *Talent Pool* adalah kelompok pekerja yang diidentifikasi sebagai talenta terbaik yang memenuhi kriteria *performance*/nilai kinerja dan potensi/ kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.

Pada prinsipnya *Talent Pool* digunakan perubahan untuk dasar penetapan *successor list* jabatan di PTK dan AP serta dasar penetapan program pengembangan pekerja. Saat ini kami sedang membuat *system talent pool* bekerja sama dengan Fungsi Information Technology. Tujuan *system* tersebut agar alat bantu baik Tim Management dan Direksi dalam program pengembangan pekerja dan mempercepat keputusan dalam pergerakan pekerja secara tepat (kompetensi).

PENILAIAN KINERJA PEKERJA

Untuk mengukur program pengembangan SDM, PTK melakukan penilaian kinerja pekerja yang dilakukan 1 kali pada akhir tahun. Penilaian tersebut dilakukan melalui Forum People Review dengan target kurva distribusi rating/hasil penilaian. Proses pelaksanaan penilaian kinerja terbagi dua kelompok yaitu:

1. Penilaian kinerja pekerja menggunakan KPI yang ditujukan untuk jenjang jabatan manager ke atas;
2. Penilaian kinerja pekerja menggunakan SMK yang ditujukan untuk jenjang jabatan assistant manager ke bawah.

The company realizes that given the size of the organization, the number of positions and the worker's population, and considers that the placement of workers in the implementation of RPSDM becomes a very fundamental change compared to the previous assignment process. Thus in practice there are still conditions that are not yet ideal, where not all positions can be filled by workers who are suitable / there are no gaps in their capacity and capabilities.

Talent Pool

As a manifestation of the company's commitment to the implementation of talent management, one of the first steps taken is to identify and map workers who enter the Talent Pool. Talent Pool is a group of workers who are identified as the best talent that meets the performance criteria/performance values and potential/competencies required by the Company.

In principle, Talent Pool is used to change the basis for determining the successor list of positions in CAR and the AP and the basis for establishing employee development programs. Currently we are making a talent pool system in collaboration with the Information Technology Function. Purpose of the system is to assist both the Management Team and Directors in the employee development program and speed-up the decisions in the accurate workers (competence) movement.

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

To measure the HR development program, PTK conducts an employee performance assessment conducted once every end of the year. The assessment is carried out through People Review Forum with a target distribution rating curve/rating results. The performance evaluation implementation process is divided into two groups, as follows:

1. Employee performance assessment using KPIs aimed at managerial levels and above;
2. Employee performance assessment using SMK which is provided for assistant manager level and below.

Dalam penilaian tersebut, dilakukan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Jenis kelompok kalibrasi dilakukan berdasarkan kelompok layer dan proses dilingkungan masing-masing (*supporting dan operation*).
2. Hasil penilaian akhir adalah hasil penilaian awal yang telah dikalibrasi, baik yang menggunakan KPI maupun yang menggunakan SMK; a) metoda kalibrasi KPI adalah diskusi kalibrasi, b) metoda kalibrasi SMK adalah anchoring. Anchoring adalah suatu mekanisme proses kalibrasi, biasanya dilakukan untuk jumlah *evaluee* yang banyak, dimana yang dilakukan adalah menentukan *evaluee* yang menjadi anchor/patokan di setiap rating kinerja, misalnya dimulai dengan menentukan *evaluee* sebagai *best performance*, *lowest performance* dan seterusnya.
3. Target distribusi yang digunakan sebagai pedoman rating ditetapkan perusahaan.

Hasil penilaian kinerja pekerja pada tahun 2018 dengan jumlah pekerja yang dinilai sebanyak 372 pekerja, adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja 6 sebanyak 109 orang atau 29 %
2. Nilai kinerja 5 sebanyak 188 orang atau 51 %
3. Nilai kinerja 4 sebanyak 71 orang atau 19 %
4. Nilai kinerja 3 sebanyak 4 orang atau 1 %

Sedangkan penilaian kinerja pekerja pada tahun 2019, hingga Laporan Tahunan ini dibuat masih dalam proses penilaian.

The assessment, carried out with the following rules:

1. The type of calibration group is done based on the layer group and the process in each environment (*supporting and operation*).
2. The results of the final assessment are the results of the initial assessment that has been calibrated, both those using KPIs and those using SMKs; a) KPI calibration method is a calibration discussion, b) SMK calibration method is anchoring. Anchoring is a calibration process mechanism, usually done for a large number of *evaluees*, where what is done is to determine the *evaluee* that becomes the anchor/benchmark in each performance rating, for example starting with determining the *evaluee* as best performance, lowest performance and more.
3. Distribution targets that are applied as rating guidelines are set by the company

The results of the employee performance appraisal in 2018 with the number of assessed employees of 372 workers are as follows:

1. Performance Value 6 for 109 people or 29%
2. The performance value 5 for 188 people or 51%
3. Performance score 4 for 71 people or 19%
4. Performance score 3 for 4 people or 1%

However, the employee performance assessment in 2019 is still under evaluation process until this Annual Report is prepared..

PROGRAM KESEJAHTERAAN DAN REMUNERASI

Program kesejahteraan dan sistem remunerasi diberikan dan dievaluasi secara berkala oleh Fungsi *Human Resource* PTK. Program tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan persaingan industri sejenis dan regulasi yang berlaku.

Selain itu pemberian program kesejahteraan dan remunerasi yang kompetitif diharapkan untuk dapat meningkatkan performa kinerja pekerja dan perusahaan secara menyeluruh. PTK berkomitmen untuk melaksanakan program kesejahteraan dan sistem remunerasi secara adil dan merata

WELFARE PROGRAM AND REMUNERATION

Welfare program and remuneration system are provided and evaluated regularly by Human Resources Function at PTK. The program is done by considering competition with similar industry and prevailing regulation.

In addition, the provision of competitive welfare program and remuneration is expected to increase performance of the workers and Company comprehensively. PTK is committed to perform the welfare program and remuneration system fairly and equally.

Berikut adalah rincian komponen remunerasi yang diterima oleh pekerja:

Detail remuneration component received by the employees are as follows:

Komponen Remunerasi Pekerja PTK PTK Employees Remuneration Component							
Komponen Remunerasi & Benefit Remuneration & Benefit Component	Status Pekerja Employee Status		Periode Kalkulasi Calculation Period			Tipe Type	
	Staf Staff	Non Staf Non Staff	Harian Daily	Bulanan Monthly	Tahunan Annually	Fix Fix	Variabel Variabel
Remunerasi Remuneration							
Gaji Pokok Basic Salary	√	√		√		√	
Tunjangan Allowance	√	√	√	√		√	√
Lembur Overtime	√	√	√				√
Benefit Lainnya Other Benefits							
Tunjangan Hari Raya Religious Holiday	√	√			√	√	
Fas. Istirahat Tahunan Annual Leave Facility	√				√	√	
Bonus Bonus	√	√			√		√
Insentif Incentive	√	√			√		√
BPJS BPJS							
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	√	√		√		√	
BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan	√	√		√		√	
BPJS Pensiun BPJS Pensiun	√	√		√		√	

Anggaran Biaya

Berikut rincian biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kesejahteraan pekerjanya:

Budget Allocation

Detail budget allocated by the Company for employee welfare is as follows:

Biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk kesejahteraan pekerja (Dalam Rupiah Penuh) Budget Allocation of the Company for Employee Welfare (in Full Rupiah)			
Keterangan Description	YoY 2018:2019	2019	2018
Gaji Pekerja Employee Salary	0,19%	60.553.049.650	60.438.545.908
Tunjangan pekerja Employee Allowance	(1,68%)	17.888.737.151	18.193.804.719
Program Pensiun Pekerja Employee Retirement Program	(10,59%)	1.620.788.382	1.812.697.111
Bonus & Penghargaan Bonus & Reward	65,33%	30.312.027.549	18.334.590.660
Total	11,74%	110.374.602.732	98.779.638.398

Program Pensiun

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja yang telah mendedikasikan diri kepada Perusahaan, PTK memberikan program pensiun. Program pensiun tersebut terdiri dari dua program, yaitu:

Retirement Program

As manifestation of responsibility to employees who have dedicated themselves to the Company, PTK provides a pension program. The pension program comprising of two programs, as follows:

1. Program pensiun diberikan kepada para pekerja yang diangkat pada usia minimum 18 (delapan belas) tahun dengan diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kepada para pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang telah mencapai usia minimum 46 (empat puluh enam) pada tahun anggaran berjalan dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun dapat diberikan uang panjar penghargaan atas pengabdian (PAP) sebesar 10% yang akan diperhitungkan pada saat PHK atau mencapai usia MPPK (55 Tahun). PAP 10% dapat dibayarkan kepada pekerja jika hasil perhitungan PAP 10% lebih kecil atau sama dengan perhitungan penghargaan Masa Kerja. Tabel kecil terhitung pada saat pengajuan panjar PAP 10% setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada).
2. Program pelatihan persiapan masa purna karya diberikan sebagai persiapan pengelolaan mental pekerja dalam menghadapi masa-masa pensiun. Selain itu pada program pelatihan tersebut juga diberikan pengarahan mengenai kegiatan wirausaha, sehingga para pekerja pensiun yang ingin melanjutkan berkarya di bidang lain mendapatkan modal dasar yang tepat.

Program Penghargaan

PTK memiliki program penghargaan khusus bagi pekerja yang telah menempuh masa kerja selama 10, 15, 20, 25, 30, 35 tahun. Program penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

Reward Program

PTK has a special rewards program for employees who have worked for 10, 15, 20, 25, 30, 35 years. The award program is an acknowledgment and expression of appreciation to the workers based on the designated criteria for their dedication and achievements. The company awards the Service Anniversary (UTD) award with several service levels as follows:

Program Penghargaan Pekerja tahun 2019 Employee Reward Program 2019			
Masa Kerja Years of Service	Penghargaan yang Diterima Reward		Jumlah Pekerja Penerima Penghargaan Total Rewarded Employees
	Lencana/Peniti Badge/Pin	Uang Penghargaan Cash Reward	
10 Tahun	2,5 gram emas murni / fine gold	0,5 x Basic Salary	34 orang / employees
15 tahun	5,0 gram emas murni / fine gold	1,0 x Basic Salary	9 orang / employees
20 Tahun	7,5 gram emas murni / fine gold	1,5 x Basic Salary	20 orang / employees
25 Tahun	10,0 gram emas murni / fine gold	2,0 x Basic Salary	7 orang / employees
30 tahun	12,5 gram emas murni / fine gold	2,5 x Basic Salary	10 orang / employees
35 Tahun	15,0 gram emas murni / fine gold	3,0 x Basic Salary	-



Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang pekerja. Oleh karena itu PTK berupaya memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi seluruh pekerja. Diantaranya dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang memadai. Fasilitas yang diberikan oleh PTK kepada pekerja adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Koperasi Pertamina Trans Kontinental sebagai sarana usaha yang menyediakan tidak hanya kegiatan koperasi konvensional namun juga mencakup penyediaan barang dan jasa umum yang dibutuhkan oleh perusahaan;
2. Penyediaan Ruang Menyusui bagi para pekerja perempuan di lantai 2. Penyediaan ruang ini diharapkan untuk membantu para pekerja perempuan dalam menyediakan nutrisi terbaik kepada anaknya;
3. Pembentukan komunitas olahraga, seperti bulutangkis, voli, futsal, tenis meja, dan basket. Komunitas ini diharapkan dapat menyalurkan hobi dari para pekerja setelah selesainya jam kerja.

Working Environment

Working environment becomes a factor that influence performance of an employees. Therefore PTK seeks to concern on a comfortable and conducive work environment for all employees. Among them by providing adequate supporting facilities. The facilities provided by PTK to employees are as follows:

1. Establishment of Pertamina Trans Kontinental Cooperative as a business facility that provides not only conventional cooperative activities but also includes the provision of general goods and services required by the Company;
2. Provision of Nursery Room for female employees on the second floor. Provision of this space is expected to assist women workers in providing the best nutrition for their children;
3. The establishment of sports communities, such as badminton, volleyball, futsal, table tennis and basketball. This community is expected to channel the hobbies of the workers after the end of the working hours.

SURVEI KEPUASAN PEKERJA

PTK secara rutin melakukan survei setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan yang secara langsung mengatur hak dan kewajibannya didalam perusahaan. Survei Kepuasan Pekerja (SKP) dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran kuisioner secara *online* melalui *Broadcast* Pertamina Trans Kontinental.

Berdasarkan SKP yang telah dilakukan, nilai kepuasan pekerja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimana nilai kepuasan pekerja tahun 2019 adalah sebesar 3,66 (Skala 5), mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,56. Perbaikan nilai tersebut berhasil dicapai dengan tiga catatan utama kepada Fungsi *Human Resource* sebagai berikut:

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

PTK conducts an annual survey to measure the employee satisfaction level to the policies that directly governs their rights and obligations within the company. The Employee Satisfaction Survey (SKK) was conducted using the online questionnaire distribution method via the Pertamina Trans Kontinental Broadcast.

Based on the SKK conducted in 2019, the value of employee satisfaction has increased from the previous year. Where the value of employee satisfaction in 2019 amounted to 3.66 (Scale of 5), experiencing an increase compared to 2018 of 3.56. The improvement in value was achieved with three main concerns to the Human Resource Function as follows:

1. Konsistensi penerapan kebijakan *reward* dan *punishment*.
2. Kemudahan mendapatkan informasi atas kebijakan-kebijakan SDM.
3. Kejelasan ketentuan dan prosedur tentang promosi dan mutasi jabatan.

1. Consistency of the reward and punishment policy implementation.
2. Ease of getting information about HR policies.
3. Clarity of job promotion and mutation policy and procedure.

Ketiga catatan utama tersebut secara bertahap ditindaklanjuti untuk perbaikan dengan menyusun kebijakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

The three main concerns have been gradually followed up for improvement by formulating policies in 2020, namely:

1. Pembentukan Komite Disiplin yang dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan & SDM. Pembentukan Komite ini juga merupakan salah satu arahan langsung dari Pertamina (Persero).
2. Digitalisasi Fungsi *Human Resource* merupakan salah satu program utama dari Pertamina Trans Kontinental, dengan salah satu sistem yang sedang dibangun adalah Datalenta. Datalenta merupakan salah satu platform untuk menyediakan informasi kepada pekerja tidak hanya mengenai hak dan kewajibannya tetapi juga mengenai kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
3. Ketentuan dan prosedur promosi dan mutasi jabatan telah disusun melalui kebijakan Restrukturisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (RPSDM) Pertamina Trans Kontinental pada tahun 2018. Pada masa transisi pelaksanaan kebijakan ini diharapkan para pekerja dapat memahami ketentuan dan prosedur tersebut secara komprehensif melalui sosialisasi maupun pendekatan personal.

1. Establishment a Disciplinary Committee that is chaired directly by the Finance & HR Director. The formation of this Committee is also one of the recommendation from PT Pertamina (Persero);
2. Human Resource Function digitalization is one of the main programs of Pertamina Trans Continental, with one of the systems being developed is Datalenta. Datalenta is a platform to provide information to workers not only about their rights and obligations but also about the overall employment policy;
3. Job promotion and mutation policy and procedure have been formulated through the Pertamina Trans Kontinental Human Resources Management (RPSDM) Restructuring policy in 2018. During the transition period, it is expected that workers will be able to understand the policy and procedures comprehensively through socialization and a personal approach.

ROADMAP DAN RENCANA KE DEPAN

ROADMAP AND FUTURE PLAN

Sebagai bagian dari kesinambungan proses kerja, manajemen telah menyusun *Roadmap* SDM Tahun 2020 dengan tema "Digitalisasi Sistem dan Peningkatan Kompetensi Pekerja". *Roadmap* ini disusun dengan dua agenda besar yaitu:

As part of work processes continuity, the management has designed the 2020 HR Roadmap with the theme "System Digitalization and Enhancing Worker Competency". This roadmap has been prepared with two major agendas, as follows:

1. Digitalisasi Sistem
Digitalisasi sudah menjadi salah satu arahan untuk semua lini Pertamina Trans Kontinental. Digitalisasi yang sudah berjalan pada fungsi Human Resource

1. System Digitalization
Digitalization becomes a direction for all levels in Pertamina Trans Kontinental. Digitalisation that is currently implemented in the Human Resource



adalah pada kegiatan yang bersifat administratif. Pada tahun 2020 diharapkan sistem pengambilan keputusan berdasarkan data-data tersebut dapat dijalankan.

Sistem yang diberi nama Datalenta ini akan memberikan manfaat dari dua sisi. Pada sisi pekerja, mereka akan mendapatkan akses secara menyeluruh mengenai informasi, hak dan kewajiban pribadi, maupun kebijakan perusahaan mengenai ketenagakerjaan. Pada sisi perusahaan, fungsi Human Resource akan mencoba untuk menggunakan Datalenta dalam meningkatkan transparansi dan keakuratan dalam melaksanakan kegiatan krusial seperti, *Performance Management*, *Talent Management*, dan *Industrial Relation*.

Digitalisasi sistem tidak hanya akan menekan waktu pengambilan keputusan tetapi juga meningkatkan kepercayaan pekerjaan khususnya dalam hal transparansi.

2. Peningkatan Kompetensi Pekerja

Penugasan-penugasan lini bisnis baru yang diberikan kepada Pertamina Trans Kontinental tentunya perlu diimbangi dengan tersedianya kader-kader yang akan mengelola lini bisnis tersebut. Program peningkatan kompetensi tentunya akan diberikan kepada *talent-talent* terbaik dengan memberikan training teknis mengenai *core business* dari bisnis baru, seperti *Port Management*. Dengan demikian peningkatan kompetensi ini diharapkan akan memperluas peluang karir pekerja Pertamina Trans Kontinental.

function is administrative. By 2020 this is expected that a decision-making system based on these data can be implemented.

The system named Datalenta will provide benefits from two sides. On the workers side, they will get comprehensive access to information, personal rights and obligations, as well as the Company's policies regarding employment. On the Company side, the Human Resource function will try to use Datalenta in increasing transparency and accuracy in carrying out important activities such as, *Performance Management*, *Talent Management*, and *Industrial Relations*.

The system digitalization will not only reduce the time of decision making but also increase work confidence, especially for transparency.

2. Employee Competency Development

Assignments of the new business lines assigned to Pertamina Trans Kontinental shall be followed by availability of the talents who will manage these business lines. The competency development program will certainly be given to the best talents by providing technical training on the core business of new businesses, such as *Port Management*. Therefore, the competency development is expected to expand the career opportunities for the workers of Pertamina Trans Kontinental.

TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY



Mengintegrasikan Seluruh Platform Digital

Integrating All Digital Platform

“

Pada tahun 2019 kami menyusun road map baru manajemen teknologi informasi guna mendukung inisiatif manajemen melakukan digitalisasi proses bisnis menyambut tuntutan era industri 4.0.

In 2019, we have prepared a new information technology management roadmap to support the management's initiatives in driving the business process digitalization approaching the demand in 4.0 industry era.

”

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting bagi PTK untuk mendukung pengelolaan proses baik *front office* maupun *back office*. Sejalan dengan digitalisasi proses bisnis yang digalakkan di tahun 2019, manajemen telah melakukan inisiatif strategis mulai dari penyusunan *road map* hingga pengembangan aplikasi.

Fokus dari pengembangan TI di tahun 2019 adalah mengintegrasikan berbagai *platform* atau aplikasi yang ada agar dapat terhubung satu sama lainnya di masing-masing fungsi dan lini operasi perusahaan. Hal tersebut merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan mengingat selama ini aplikasi yang ada masih terpisah satu sama lainnya.

Untuk itu ada dua langkah yang dilakukan yaitu: Pertama, mengoneksikan aplikasi yang sudah ada dengan sistem atau aplikasi lainnya. Kedua mengembangkan aplikasi baru yang didesain sesuai kebutuhan.

Berikut ini adalah daftar aplikasi yang dikembangkan di tahun 2019:

Information Technology has a very essential role for PTK to support process management both at front office and back office. In addition to the business process digitalization enforced in 2019, the management also has performed strategic initiatives starting from roadmap formulation up to application development.

Focus of IT development in 2019 is to integrate various existing platforms or applications to connect each other in every function and operational line of the Company. These initiatives become inevitable demand considering the existing applications are still separated nowadays.

Therefore, there are two initiatives that have been implemented: First, connecting existing application with other systems or applications. Second, develop new application designed based on needs.

List of applications developed in 2019 is as follows:

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic of Application Development
PESUT	PSTB	Aplikasi Mngement pelayanan terintegrasi kegiatan Shorebase Tanjung Batu Integrated service management application for Tanjung Batu Shorebase activity	Running	Memo Permintaan GM PSTB GM PSTB Request Memo
P-Acman (PTK-Archive Management)	PR	Aplikasi untuk management surat masuk dan keluar pada setiap fungsi di PTK Incoming and outgoing letter management application at every function in PTK	Running	Inisiatif Fungsi PR & Adm PR & Adm Function Initiative
HEROES	IT	Aplikasi monitoring dan mencatat semua inventaris atau barang sewa dalam satu wadah agar dapat di manage sesuai dengan kebutuhan tim IT dan user PTK. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini maka adanya wadah dalam menghubungkan IT dan user dalam hal permintaan sarana IT dan kerusakan terkait perangkat IT yang terjadi di user Application for Monitoring and recording all inventory or leased goods in one container so that it can be managed in accordance with the needs of the IT team and PTK users. In addition, with this application the existence of a container in connecting IT and users in terms of requests for IT facilities and damage related to IT devices that occur in the users.	Running	Inisiatif Fungsi IT IT Function Initiative

Nama Aplikasi Application Name	Fungsi Function	Deskripsi Description	Status Status	Dasar Pembuatan Aplikasi Basic of Application Development
ICONS (Integrated Contract System)	Legal & Compliance	Aplikasi untuk monitoring kontrak dan dokumen pendukungnya Application for monitoring contracts and supporting documents	Go Live	Memo Permintaan Manager Legal Manager Legal Request Memo
Simulasi Virtual Reality Kapal - ARA Project	SMR	Aplikasi simulasi virtual reality pengenalan potensi bahaya pada kapal Transko Antasena Virtual Reality simulation application on introduction to hazard potential at Transko Antasena vessel	Running	Inisiatif Fungsi IT dan SMR Initiatives of IT and SMR Functions
ACTIVE (Aplikasi Consulting & Assurance Informative)	Internal Audit	Aplikasi untuk monitoring temuan internal audit dan tindak lanjut dari Auditee berbasis web Web-based application for monitoring internal audit findings and follow-up by the Auditee	Running	Memo Permintaan Head of Internal Audit Head of Internal Audit Request Memo
Aplikasi BPI dan NTM online	Vessel Compliance	Aplikasi untuk upload dokumen kepelautan secara online Online application for maritime documents upload	Running	Memo permintaan Manager Vessel Compliance Vessel Compliance Manager Request Memo
PTK-Cash	Treasury	Aplikasi untuk pencatatan, monitoring dan pembuatan arus cash di PTK Application for cash flow administration, monitoring and formulation at PTK	Running	Memo permintaan Manager Treasury Treasury Manager Request Memo
ROSY	Financial Accounting	Aplikasi Reminder untuk Outstanding UMK Reminder Application for UMK Outstanding	Running	Memo permintaan Manager Financial Accounting Financial Accounting Manager Request Memo
Datalenta	HRS	Aplikasi HR terkait talent tool dan profil lengkap employee mulai dari data pribadi, performance, dan lain-lain HR application related to talent tool and complete profile of the employees starting from personal data, performance, and others	Running	Memo Permintaan Manager HRS HRS Manager Request Memo

TATA KELOLA TI

Kami memiliki tata kelola IT pada 5 (lima) bidang terkait, yaitu IT Policy, IT Architecture, IT Infrastructure, IT Business Application Needs dan IT Investment & Prioritisasi. Adapun kelima bidang tersebut dikelola oleh pihak-pihak yang melakukan perancangan, pengesahan, pengembangan, monitoring, enforcement.

IT GOVERNANCE

We have designed IT governance in 5 (five) related fields, such as the IT Policy, IT Architecture, IT Infrastructure, IT Business Application Needs and IT Investment & Priority. These five fields are managed by parties who carry out the design, endorsement, development, monitoring and enforcement.



IT *Strategic Maps* terbagi atas 4 (empat) perspektif yakni; (1) *Financial*, (2) *Customer or Stakeholder*, (3) *Internal Business Process*, (4) *Learning & Growth*. Penjabaran untuk masing-masing perspektif sebagaimana dibawah ini:

Perspektif *Financial*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu :

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization*

Pada perspektif *Customer or Stakeholders*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu :

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services*

Pada perspektif *Internal Business Process*, terdapat 3 (tiga) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah :

- IBP.1. *Resource Consolidation*
- IBP.2. *Sustainable Development*
- IBP.3. *IT Data Classification Preparation*
- IBP.4. *Archive IT Operational Excellence*

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- L.1. *Enhance Informational Capital*
- L.2. *Develop the Competence Workforce*

Keempat perspektif organisasi tersebut untuk selanjutnya didefinisikan menjadi *strategic objectives* yang terhubung dengan IT *Strategy Maps* PTK.

Fungsi IT sebagai *supporting workforce unit* turut mendukung kegiatan bisnis PTK. Pengelolaan faktor-faktor *financial* yang baik, memberikan jaminan bagi Fungsi IT PTK untuk memberikan layanan terbaiknya bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Fungsi IT PTK memberikan layanan kepada para pengguna jasanya, yaitu pekerja di kantor pusat, kantor cabang, dan anak perusahaan dengan sebaik-baiknya. Fungsi IT PTK memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada para pelanggan dan pemangku kepentingan.

IT *Strategic Maps* is divided into 4 (four) perspectives namely; (1) *Financial*, (2) *Customer or Stakeholder*, (3) *Internal Business Process*, (4) *Learning & Growth*. The description for each perspective is as follows:

Perspektif *Financial*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu :

- F.1. *Manage Cost and Budget Compliance*
- F.2. *Improve IT Asset Utilization*

Pada perspektif *Customer or Stakeholders*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu :

- S.1. *Increase Customer-Centric Services Capacity*
- S.2. *Provide Timely Provision of Services*

Pada perspektif *Internal Business Process*, terdapat 3 (tiga) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah :

- IBP.1. *Resource Consolidation*
- IBP.2. *Sustainable Development*
- IBP.3. *IT Data Classification Preparation*
- IBP.4. *Archieve IT Operational Excellence*

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, diantaranya adalah:

- L.1. *Enhance Informational Capital*
- L.2. *Develop the Competence Workforce*

The four perspectives of the organization are further defined as *strategic objectives* that are connected to the PTK IT *Strategy Maps*.

supports PTK business activities. Management of financial factors that are good, provide guarantees for the PTK IT function to provide the best service for customers and stakeholders. The PTK IT function provides the best service to its service users, namely employees at the head office, branch offices and subsidiaries. The PTK IT function has a view to being able to provide measurable, controlled and planned service capacity with orientation to customers and stakeholders.

Dalam rangka memberikan layanan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan, fungsi IT melaksanakan proses bisnis internal (*Internal Business Process*), yang tertuang dalam 3 (tiga) area kerja fungsi IT, yaitu Infrastruktur TI, Pengembangan Aplikasi dan Layanan TI dan Operasional TI. Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi IT memerlukan kemampuan literasi untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait bidang usaha PTK. Fungsi IT memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan dan pembelajaran yang positif.

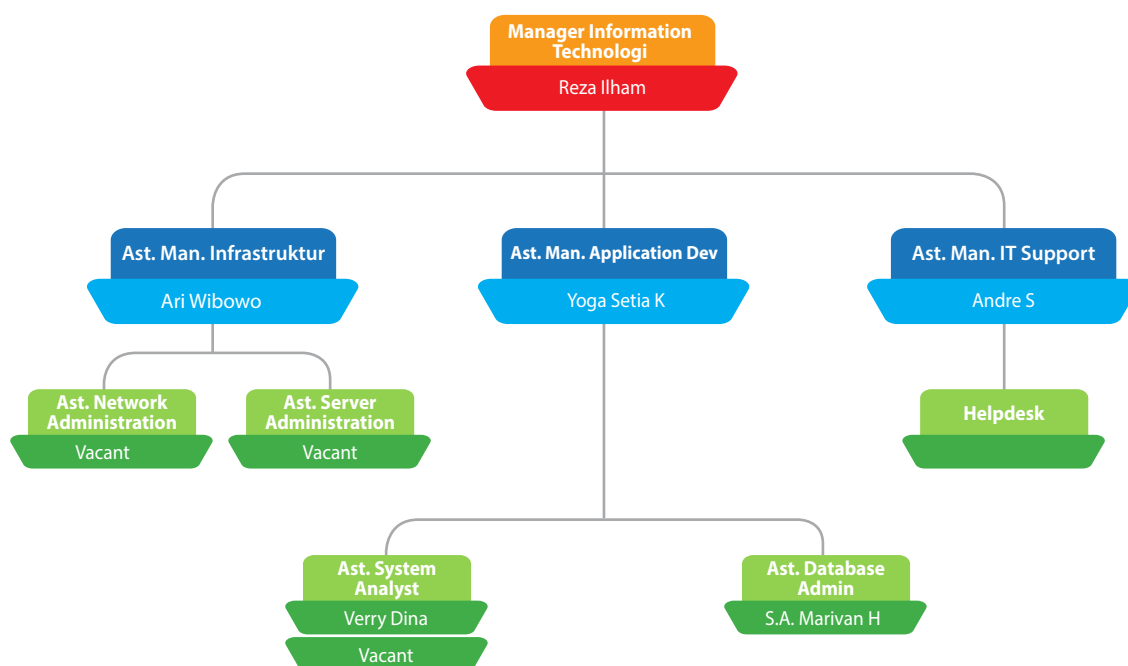
In order to provide services to customers and stakeholders, the IT function carries out internal business processes, which are contained in 3 (three) IT function work areas, namely IT Infrastructure, Application Development and IT Services and IT Operations. To ensure that internal business processes can run well, the IT function requires the ability of literacy to adapt to the times and business changes related to the business of PTK. The IT function requires competent human resources in their field of work and is able to exploit the information they have as much as possible for the benefit of the organization or company and in order to achieve positive growth and learning.

STRUKTUR ORGANISASI TI

Struktur Organisasi TI di PTK terbagi menjadi tiga lapisan: Operational Level, Knowledge Level dan Strategic Level. Tingkatan dalam tiga lapisan tersebut menunjukkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi guna mendukung proses bisnis sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI TI

Struktur Organisasi TI di PTK terbagi menjadi tiga lapisan: Operational Level, Knowledge Level dan Strategic Level. Tingkatan dalam tiga lapisan tersebut menunjukkan peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi guna mendukung proses bisnis sebagaimana dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:





BELANJA INVESTASI TI TAHUN 2019

Manajemen menetapkan kebijakan belanja investasi TI tahun 2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan strategis dari rencana kerja. Untuk itu sasaran kebutuhan belanja investasi TI dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan proses bisnis yaitu sebagai berikut :

- a. IT Support
Pembelanaan di bidang operasional bisnis TI meliputi sewa komputer, pengadaan material cetak, perbaikan perangkat komputer milik dan lisensi MODP Office sebesar Rp1,5 Miliar.
- b. IT Development
Pembelanaan bidang *development* meliputi pembelian lisensi add-on dalam pengembangan aplikasi seperti lisensi, aplikasi *template web*, dll. Adapun untuk belanja IT tahun 2019 bidang *development* sebesar Rp1,3 juta.
- c. IT Infrastructure
Investasi pada bidang infrastruktur meliputi pembelian *storage server*, pembelian *UPS server*, Charge Back Jaringan Internet MySAP dengan biaya investasi sebesar Rp1,2 Miliar.

PENERAPAN TI

Sustainable Development merupakan prioritas tugas Fungsi TI di tahun 2019, sebagai tindak lanjut dari tahun sebelumnya yang menitikberatkan pada *Resource Consolidation*. Target akhir dari *Sustainable Development* adalah "*meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Sebagai implemntassi dari pogram Sustainable Developemnt tersebut maka program kerja TI tahun 2019 antara lain:

- *Integrating Enterprise Framework. (ASP MVC)*
- *Virtual Reality (VR).*
- *Developing Multi Delivery Channel Applications.*
- *Security aware in Application Development.*
- *Modernized Software Quality Assurance.*
- *Enterprise Management System (Avtech, APC)*

IT INVESTMENT EXPENDITURE IN 2019

The Management has stipulated IT investment expenditure in 2019 that was aligned with strategic need sand planning of the work plan. Therefore, targets of the IT investment expenditure needs are classified into three groups according to the business process, as follows:

- a. IT Support
Learning in IT business operational aspect including computer lease, printed material procurement, owned-computer software repair and MODP Office license valued Rp1.5 billion.
- b. IT Development
Expenditure in development aspect includes purchase of add-on license for application development such as license, web template application and others. IT expenditure in 2019 for development aspect amounted Rp1.3 million.
- c. IT Infrastructure
Investment in infrastructure aspect includes storage server purchase, UPS server purchase, MySAP Internet Network Charge Back with investment budget of Rp1.2 billion.

IT IMPLEMENTATION

Sustainable Development merupakan prioritas tugas Fungsi TI di tahun 2019, sebagai tindak lanjut dari tahun sebelumnya yang menitikberatkan pada *Resource Consolidation*. Target akhir dari *Sustainable Development* adalah "*meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*". Sebagai implemntassi dari pogram Sustainable Developemnt tersebut maka program kerja TI tahun 2019 antara lain:

- Integrating Enterprise Framework (ASP MVC)
- Virtual Reality (VR).
- Developing Multi Delivery Channel Applications.
- Security aware in Application Development.
- Modernized Software Quality Assurance.
- Enterprise Management System (Avtech, APC)

Dalam pemanfaatan teknologi telah melakukan inovasi baru untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi yang telah dilakukan yaitu dengan pembuatan aplikasi *Peteka Shorebase Ultimate Technology (PESUT)*. Aplikasi ini digunakan untuk optimalisasi proses operasional shorebase di Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB) Balikpapan, Kalimantan Timur. Aplikasi ini mampu mengintegrasikan proses pencatatan kegiatan operasional hingga proses *cost control* untuk penagihan ke client dan memudahkan manajemen dalam memonitoring *cost*/biaya dan *revenue* perusahaan.

Sementara itu untuk *value creation*, melalui aplikasi Pesut ini kita dapat melakukan penghematan dan menambah pendapatan sebesar Rp3,6 miliar per tahun.

Selain itu Fungsi IT juga telah membuat aplikasi simulasi berbasis *Virtual Reality (VR)* yang dapat bermanfaat terkait proses familiarisasi dan pengenalan potensi bahaya yang ada di kapal. Proses familiarisasi yang telah terdigitalisasi tersebut sangat bermanfaat sekali bagi pekerja/crew sehingga dapat menghindari potensi terjadinya kecelakaan kerja.

In the technology utilization, new innovations have been made to help improve the Company's performance. The innovation that has been made is by making the application *Peteka Shorebase Ultimate Technology (PESUT)*. This application is used to optimize the shorebase operational process in Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB) Balikpapan, East Kalimantan. This application is able to integrate the process of recording operational activities to the process of cost control for billing to clients and facilitates management in monitoring the costs and costs of the Company.

Meanwhile, in terms of value creation, we are capable to make savings and increase revenue of Rp3.6 billion per year through this Pesut application.

In addition, the IT function has also made a simulation application based on Virtual Reality (VR) that can be useful related to the familiarization process and the introduction of potential hazards on the ship. The digitalized familiarization process is very beneficial for workers/crew so as to avoid the potential for work accidents.

Ilustrasi Aplikasi Virtual Reality ARA PTK *Illustration of Virtual Reality ARA PTK Application*





Pada tahun 2019 Pertamina Trans Kontinental juga mengimplementasikan teknologi VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) untuk kapal-kapal milik yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari implementasi teknologi tersebut adalah agar komunikasi antara darat dan laut dapat terjaga secara konstan dan stabil, sehingga diharapkan performansi kapal-kapal PTK dapat meningkat yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan.

PT Pertamina Trans Kontinental dalam pemanfaatan teknologi telah melakukan inovasi baru untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi yang telah dilakukan yaitu dengan pembuatan aplikasi *Portal Realtime Integrated Data Enterprise* (PRIDE). PRIDE merupakan transformasi digital perusahaan untuk mengintegrasikan data serta mendigitalisasi semua proses bisnis perusahaan ke dalam satu platform aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

PRIDE dapat memonitoring status kapal secara realtime, *cargo monitoring, losses controlling, maintenance, early warning system crew and certificate* guna mendukung *operational excellent* perusahaan. Teknologi digital PRIDE memberikan kemudahan bagi pekerja sehingga menciptakan budaya digital dimana seluruh organisasi dan segala fungsi dapat terhubung dan berkolaborasi didalamnya. Informasi yang didapat lebih cepat serta proses bisnis perusahaan semakin efektif dan efisien.

Pertamina Trans Kontinental juga telah berhasil mengembangkan dua aplikasi Dashboard Monitoring System yaitu; (1) *Ship Arrival and Departure Information System* dan (2) *Marine Service Application*. Kedua aplikasi tersebut merupakan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan pemantauan kinerja kapal. Ilustrasi Aplikasi *Ship Arrival and Departure Information System* Sebagai Berikut :

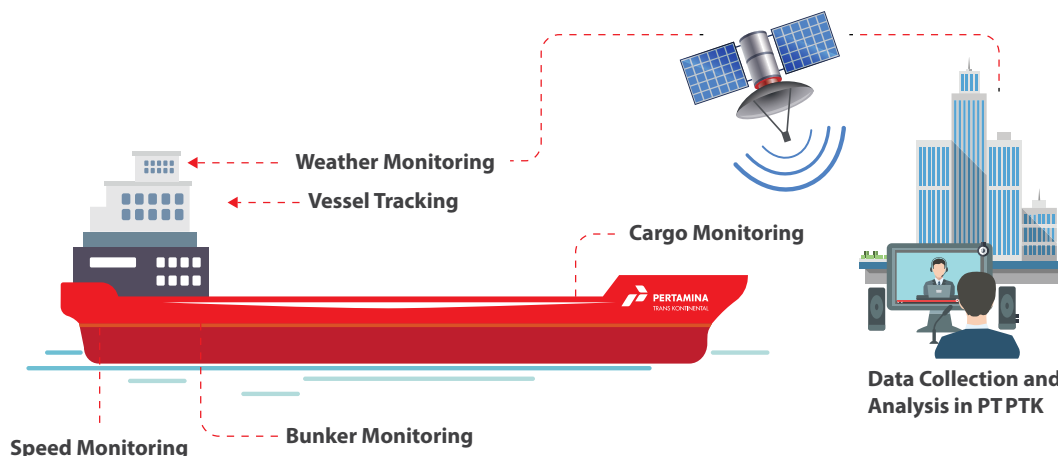
In 2019, Pertamina Trans Kontinental also implemented VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) technology for owned vessels operating in all regions of Indonesia. The purpose of implementing this technology is that communication between land and sea can be maintained in a constant and stable manner, so that the performance of PTK's vessels is expected to increase which will ultimately increase the Company's profit.

In the technology application, PT Pertamina Trans Kontinental has developed new innovations to help improve the performance of the Company. The innovation that has been made is by making a *Realtime Integrated Data Enterprise* (PRIDE) Portal application. PRIDE is a digital transformation of the company to integrate data and digitize all of the Company's business processes into one application platform that can be accessed anytime and anywhere.

PRIDE can monitor vessel status in real time, *cargo monitoring, losses controlling, maintenance, early warning system crew and certificates* to support the Company's excellent operational. PRIDE digital technology makes it easy for employees to create a digital culture where the entire organization and all functions can be connected and collaborate in it. The information obtained is faster and the Company's business processes more effective and efficient.

Pertamina Trans Kontinental has also successfully developed two Dashboard Monitoring System applications, namely; (1) *Ship Arrival and Departure Information System* and (2) *Marine Service Application*. Both applications are the company's efforts to optimize monitoring of ship performance

Ilustrasi Aplikasi Ship Arrival and Departure Information System Illustration of Ship Arrival and Departure Information System Application



STRATEGI TI KE DEPAN

Sebagai upaya *continuous improvement* di bidang TI, pada tahun 2020 Pertamina Trans Kontinental akan mengimplementasikan *Crisis Room* yang direncanakan dibangun di Kantor Pusat berfungsi sebagai :

- Facilities yang digunakan oleh Tim Manajemen Krisis (Crisis Management Team) dalam mencegah dan melakukan mitigasi terhadap krisis secara cepat dan efektif untuk menjamin kelangsungan bisnis perusahaan.
- Dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk kerja tim dan peralatan komunikasi kepada pemangku kepentingan strategis baik internal dan external.
- Dapat juga digunakan oleh Tim Manajemen Insiden sebagai pusat Komando Insiden dalam penanggulangan insiden atau keadaan darurat.

Sedangkan untuk layanan komunikasi di darat Fungsi Teknologi Informasi akan melakukan integrasi jaringan VoIP dengan jaringan telepon analog (PABX - PSTN). Tujuan dari Integrasi jaringan VoIP tersebut agar komunikasi antara Kantor Pusat, Cabang dan Kapal Milik PTK dapat berjalan dengan lancar.

Sementara itu, di bidang pengembangan aplikasi untuk tahun 2020, Fungsi TI akan menambah fitur yaitu *Mobile Application* dengan harapan pengguna Layanan Fungsi TI dapat mengakses aplikasi menggunakan smartphone mereka masing – masing.

FUTURE IT STRATEGY

As a continuous improvement in IT aspect, in 2020 Pertamina Trans Kontinental will implement a Crisis Room planned to be built at the Head Office to function as:

- A facility used by the Crisis Management Team to prevent and mitigate crises quickly and effectively to ensure the continuity of the Company's business.
- Equipped with facilities and infrastructure for teamwork and communication equipment to strategic stakeholders both internal and external.
- May also be used by the Incident Management Team as the center of the Incident Command in response to incidents or emergencies.

Whereas for onshore communication services the Information Technology Function will integrate VoIP networks with analog telephone networks (PABX - PSTN). The purpose of the VoIP network integration is so that communication between the Head Office, Branches and PTK Owned Vessels can run smoothly.

Meanwhile, in terms of application development for 2020, the IT Function will add features, such as the Mobile Application expecting IT Function Service users will be able to access applications using their respective smartphones.



MANAJEMEN PERSEDIAAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA

INVENTORY MANAGEMENT, GOOD AND SERVICES PROCUREMENT

Fungsi *Procurement* yang menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, memiliki peranan yang sangat penting terhadap kelancaran proses operasional di PT Pertamina Trans Kontinental. Seiring dengan bertambahnya jumlah kapal, maka permintaan akan pengadaan barang dan jasa juga meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2018 hingga 2019, Fungsi *Procurement* melakukan reformasi digital pada proses pengadaan barang dan jasa.

Pada tahun 2019, Fungsi *Procurement* bekerja sama dengan CICT PT Pertamina (Persero) membuat aplikasi *e-Procurement* untuk memastikan proses GCG dalam pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik. *e-Procurement* tersebut akan diimplementasikan mulai tahun 2020. Pada Tanggal 15 Januari 2019, Fungsi *Procurement* telah mengimplementasikan aplikasi *Procurement* yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses monitoring pengadaan barang dan jasa serta *scoring vendor* yang dapat diakses secara *real time*.

Procurement function who performs goods and services procurement process, with a very important role on smooth operational process at PT Pertamina Trans Kontinental along with the increasing number of vessels, the goods and services procurement request will be also higher. With regards to this condition, from 2018 until 2019, the Procurement Function has performed a digital process on goods and services procurement.

In 2019, the Procurement Function cooperated with CICT of PT Pertamina (Persero) has developed an e-procurement application to ensure the GCG process within the goods and services procurement is implemented properly. The e-Procurement will be implemented starting from 2020. On January 15, 2019, the Procurement Function has implemented Procurement application that is functioned to optimize the goods and services monitoring process as well as vendor scoring that can be accessed real time.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PTK mengacu pada :

1. Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa No. Pdm-002/E2300/2016-SO Revisi Ke 00.
2. Prosedur Pelelangan Pengadaan Barang Dan jasa No. Psd-001/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00
3. Prosedur Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/ Material No. Psd-002/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00
4. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat No. Psd-003/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00
5. Prosedur Penunjukan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa No. Psd-004/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00

GOOD AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Implementation of goods and services procurement at PTK refers to :

1. Goods and Services Procurement Manual No. Pdm-002/E2300/2016-SO 00 Revision.
2. Goods and Services Procurement Tender Procedure No. Psd-001/E2300/2017 –SO 00 Revision.
3. Goods/Material Examination and Acceptance Procedure No. Psd-002/E2300/2017 –SO 00 Revision
4. Goods and Services Procurement Procedure in Emergency Situation No. Psd-003/E2300/2017 –SO 00 Revision
5. Goods and Services Procurement Direct Appointment and Selection Procedure No. Psd-004/E2300/2017 –SO 00 Revision

6. Prosedur Sertifikasi/Prakualifikasi Penyedia Barang / Jasa No. Psd-005/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00 7. Instruksi Kerja Pelaksanaan Laporan Scoring Vendor No. IK-202/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00 8. Instruksi Kerja Pelaksanaan Evaluasi Harga dan Negosiasi Pengadaan Barang/Jasa No. IK-001/E2300/2017 –SO Revisi Ke – 00 9. Sistem management terintegrasi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007, ISM Code)	6. Goods and Services Supplier Certification/Pre-Qualification Procedure No. Psd-005/E2300/2017 –SO 00 Revision 7. Vendor Scoring Report Implementation Work Instruction No. IK-202/E2300/2017 –SO 00 Revision 8. Goods and Services Procurement Price Evaluation and Negotiation Implementation Work Instruction No. IK-001/E2300/2017 –SO 00 Revision 9. Integrated management system (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18001:2007, ISM Code)

Dalam pelaksanaannya PTK memegang prinsip pengadaan jasa sebagai berikut:

1. Efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
2. Efisien, berarti diusahakan dengan menggunakan dana, daya, fasilitas yang sekecil-kecilnya, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administrasi termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan penyedia barang/jasa harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa.
5. Adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
7. Kehati-hatian, berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi atau tindakan atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan immaterial

In its implementation PTK holds the principles of procurement of services as follows:

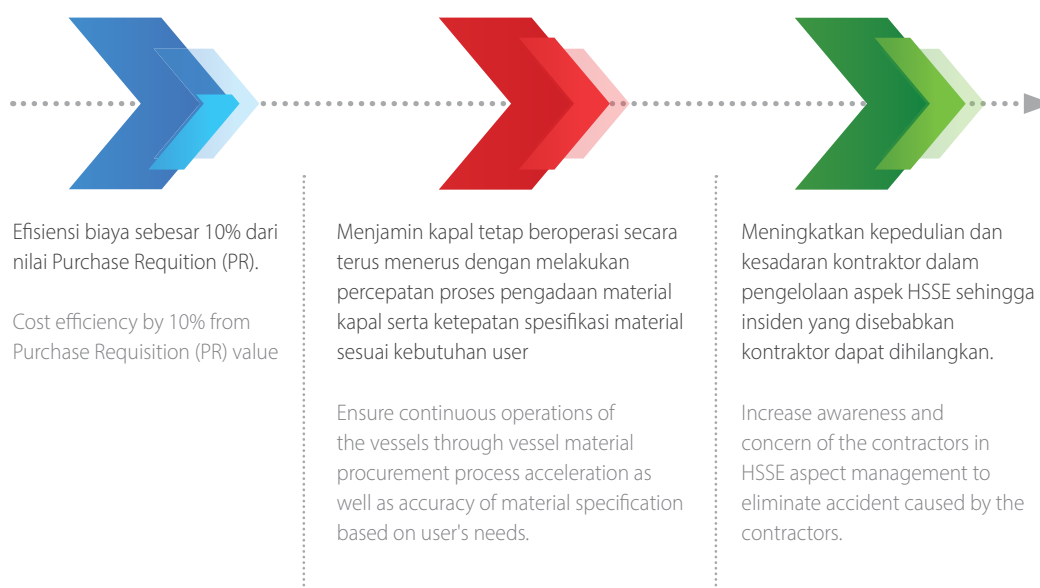
1. Effective, means that it must be in accordance with the requirements set and can provide maximum benefits in accordance with the goals set by the Company.
2. Efficient, means that it is endeavored to use the smallest funds, power, facilities, to achieve the targets set in the shortest possible time and can be accounted for.
3. Competitive, means that it must be done through healthy selection and competition among providers of goods/services that are equal and meet certain conditions/criteria based on clear and transparent provisions and procedures.
4. Transparent, means that all provisions and information, both technical and administrative including evaluation procedures, evaluation results and determination of goods/service suppliers must be accessible for the of goods/services suppliers.
5. Fair, means non-discriminatory in providing treatment for all prospective suppliers of goods/services and does not lead to provide benefits to certain parties, by any means and or reasons.
6. Responsible, means that it must achieve the targets both physical, financial and benefits for the smooth running of the business in accordance with the principles and policies and provisions that apply in the procurement of goods/services.
7. Caution, means to always pay attention or reasonably suspect to information or actions or any form as an anticipatory step to avoid material and immaterial losses to the Company during the procurement



terhadap Perusahaan selama proses pengadaan, proses pelaksanaan/pekerjaan, dan pasca pelaksanaan pekerjaan.

8. Kemandirian, berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Integritas, berarti pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan.
 10. Berwawasan HSE, berarti memenuhi dan memperhatikan aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan.
 11. Penerapan GCG, berarti menjalankan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, sehingga perusahaan dapat dijalankan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan.
8. Independence, means a situation where the procurement of goods/services is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations.
 9. Integrity, means the implementation of procurement of goods/services must be fully committed to meeting the ethics of procurement.
 10. Having HSE insight, means fulfilling and paying attention to aspects of occupational health and safety and environmental protection.
 11. The implementation of GCG, means to run the principles that underlie a process and mechanism of company management based on laws and regulations and business ethics, so that the company can be run well and can be accountable to all stakeholders.

Kriteria Utama & Ukuran Kinerja Excellent Excellent Performance Key Indicators & Criteria

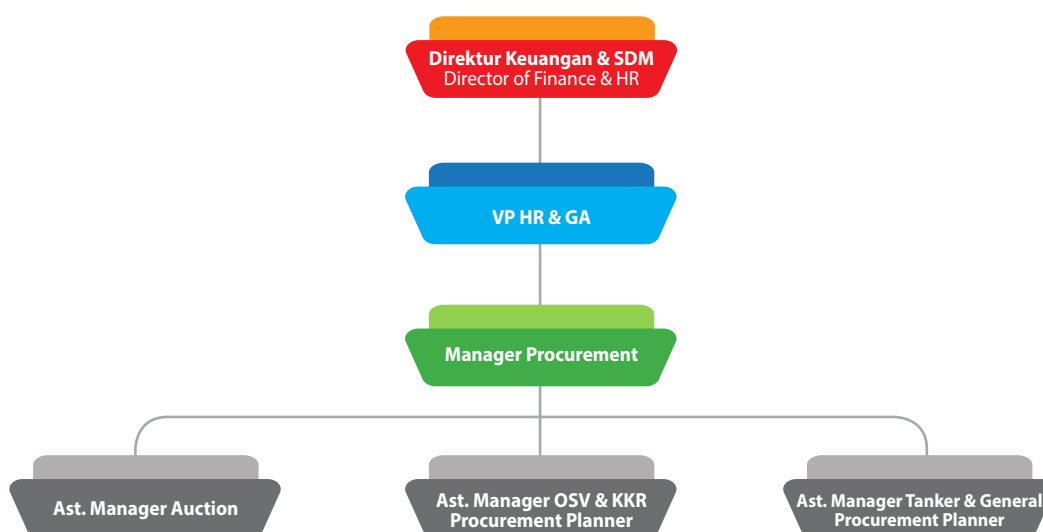


STRUKTUR PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan jasa di PTK dikelola oleh Fungsi *Procurement* berada dibawah Direktorat Keuangan dan SDM yang diuraikan dalam bagan di bawah ini.

GOODS AND SERVICES MANAGEMENT STRUCTURE

Goods and services procurement at PTK is managed by Procurement Function under the Finance and HR Directorate as illustrated in the following chart:



Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Fungsi *Procurement* sebagai berikut:

Main duty and responsibility of the Procurement Function are as follows:

- Mengadakan pelelangan, pemilihan langsung, *beauty contest*, penunjukan langsung, *swakelola*, *cash and carry* (pembelian tunai).
- Menyusun daftar penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta informasi untuk pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi.
- Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen sertifikasi/prakualifikasi, serta kriteria dan tata cara penilaian penawaran.
- Menerima dokumen/berkas HPS/OE/EE dari fungsi yang bertanggung jawab, menyusun jadwal dan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

- Organize tender, direct selection, beauty contest, direct appointment, self-managed, cash and carry (cash purchase).
- Prepare list of goods/services suppliers who fulfil the qualification and classification requirements (business unit and sub-unit) to be invited to participate in procurement and, if necessary, to request information to verify validity of the qualification and classification.
- Prepare the procurement document, certification/prequalification documents, as well as tender mechanism and criteria.
- Accept the HPS/OE/EE document/files from the supervising function, to prepare the tender schedule and mechanism as well as location.



- e. Menilai/mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, negosiasi dan menetapkan urutan dan mengusulkan calon penyedia barang/jasa.
- f. Menyimpan semua dokumen pengadaan.

Fungsi *Procurement* memiliki tiga program utama yaitu: (a) efisiensi biaya pengadaan barang dan jasa; (b) Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengadaan material kapal; (c) Peningkatan kepedulian dan kesadaran kontraktor dalam pengelolaan aspek HSSE

- e. Assess/evaluate every incoming offering, perform clarification, negotiation and stipulate sequence and recommend the goods/services supplier candidate.
- f. Maintain all of the procurement documents.

Procurement function has three main programs, such as (a) goods and services procurement cost efficiency, (b) increasing vessel material procurement speed and accuracy, (c) increasing contractor's awareness and concern on HSSE aspect management.

METODE PENGADAAN BARANG DAN JASA

Praktik pengadaan merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang berkepentingan, yang meliputi Fungsi Pengadaan (*Procurement*), Fungsi Pengguna (*User*), Penyedia Barang/Jasa (*Supplier*) dan pemangku kepentingan. PTK menerapkan kebijakan dan strategi praktik pengadaan melalui tiga metode pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan metode lelang, sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

GOOD AND SERVICES PROCUREMENT METHOD

Procurement practice becomes responsibility of all interested parties, including the Procurement Function, User Function, Goods/Services Procurement and stakeholders. PTK applies the procurement practice policy and strategy through three goods and services procurement methods such as direct selection, direct appointment and tender method according to the prevailing regulation in the Goods and Services Procurement Guideline.

ALUR PROSES PENGADAAN BARANG DAN LOGISTIK

GOODS PROCUREMENT AND LOGISTICS PROCESS SCHEME

Proses Pengadaan Sparepart, Komponen Kapal dan Umum

Vessels sparepart, component and general procurement process



Keterangan :

RL : Repair List
RR : Repair Requisition
PR : Purchase Requisition
PO : Purchase Order
WO : Work Order
SPK : Surat Perintah Kerja
SPJ : Surat Perjanjian
OA : Out Agreement

Remarks :

RL : Repair List
RR : Repair Requisition
PR : Purchase Requisition
PO : Purchase Order
WO : Work Order
SPK : Work Order Letter
SPJ : Agreement Letter
OA : Out Agreement



Proses Bisnis Pemilihan Galangan untuk Perbaikan Kapal

Vessels sparepart, component and general procurement process



Keterangan :

RL : Repair List
RR : Repair Requisition
PR : Purchase Requisition
PO : Purchase Order
WO : Work Order
SPK : Surat Perintah Kerja
SPJ : Surat Perjanjian
OA : Out Agreement

Remarks :

RL : Repair List
RR : Repair Requisition
PR : Purchase Requisition
PO : Purchase Order
WO : Work Order
SPK : Work Order Letter
SPJ : Agreement Letter
OA : Out Agreement

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENCAPAIAN TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019 Fungsi Procurement melaksanakan 8 kegiatan dan pencapaian sebagai berikut:

1. Realisasi pencapaian efisiensi biaya sebesar 7%, lebih tinggi dari target yang sebesar 5%.
2. Realisasi Pencapaian kesesuaian & ketepatan pengadaan barang dan jasa – khusus kapal (on time, on budget, on spec) sebesar 100% lebih tinggi dari target yang sebesar 95%.
3. Pembuatan Aplikasi *Procurement* dan di presentasikan dalam forum CIP tahun 2019 mendapatkan peringkat kategori silver
4. Koordinasi *e-Procurement* dengan TIM CICT PT Pertamina (Persero)
5. Sosialisasi *e-Procurement* kepada Rekanan PTK tanggal 20 Agustus 2019
6. Pelaksanaan Kontrak payung ekspedisi untuk efisiensi dan ketepatan waktu pengiriman barang.
7. Implementasi *Safety/CSMS* untuk vendor aktif. Telah dilakukan evaluasi tingkat risiko/CSMS terhadap 213 perusahaan yang mendaftar dan aktif sebagai rekanan pengadaan barang dan jasa.
8. Telah dilaksanakan pelatihan dan sertifikasi untuk 9 pekerja fungsi *procurement* dengan 458 Jam dan 50,9 *learning & Development days*.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITY AND ACHIEVEMENT IN 2019

Throughout 2019, Procurement Function held 8 activities with achievements, as follows:

1. Realization of cost efficiency achievement by 7% higher than 5% targeted.
2. Realization of goods and services procurement suitability & accuracy achievement – vessel only (on time, on budget, on spec) of 100% higher than the target of 95%.
3. Preparation of Procurement Application and presented in CIP Forum 2019 and won silver category.
4. e-Procurement coordination with ICT Team of PT Pertamina (Persero)
5. Socialization of e-Procurement to PTK's vendors on August 20, 2019.
6. Implementation of expedition umbrella contract for the goods delivery time efficiency and accuracy.
7. Implementation of Safety/CSMS for active vendor. An evaluation has been conducted for the risk level/CSMS in 213 companies who registered and are active as our goods and services procurement vendors.
8. Training and certification have been conducted for 9 workers in procurement functions with 458 hours and 50.9 learning & development days.

RENCANA TAHUN 2020

Untuk program kerja tahun 2020, Fungsi *Procurement* merencanakan empat agenda kegiatan utama sebagaimana diuraikan dalam matrik kegiatan di bawah ini.

2020 PLAN

For working program in 2020, the Procurement Function has planned four main activity agenda as described in the following activity matrix.

No	Potensi Bisnis Business Potential	Road Map	Strategi Pencapaian Achievement Strategy	Quick Win
1	Percepatan pengadaan <i>spare part dan jasa maintenance</i> yang bersifat <i>continue</i> . Spare part procurement acceleration and continuous maintenance service	Jaminan ketersediaan spare part dan teknisi untuk pemeliharaan kapal. Spare part and technician availability guarantee for vessel maintenance	Kontrak Payung dengan <i>Maker/ Agen Tunggal</i> . Umbrella Contract with the Maker/Sole Agent.	Melakukan koordinasi dengan fungsi pengguna dan rekanan dalam bentuk Rapat koordinasi Perform coordination with users function and vendors in form of coordination meeting



No	Potensi Bisnis Business Potential	Road Map	Strategi Pencapaian Achievement Strategy	Quick Win
2	Monitoring pendaftaran, kelengkapan dan status rekanan. Vendor completeness and status registration monitoring	Menjamin rekanan yang dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa adalah rekanan yang telah terdaftar di PTK untuk memperkaya referensi rekanan sehingga kompetisi bisnis yang sehat dapat terlaksana. Guarantee the vendors who are eligible to participate in the goods and services procurement process are vendors registered at PTK to enrich the vendors' reference thereby a fair business competition can be established.	1. Pendataan rekanan terdaftar. 2. Proses migrasi data manual ke dalam aplikasi. 3. Terjalin hubungan bisnis yang sehat antar stakeholder melalui penyelenggaraan <i>vendor day</i> . 1. Registered vendors administration 2. Manual data migration process into the application 3. Establishment of healthy business relation with the stakeholders through vendor day event.	Pembuatan aplikasi <i>Vendor Management System</i> Vendor Management System application development
3	Percepatan proses administrasi Pengadaan barang & jasa. Goods & services procurement administration process acceleration	1. Informasi kebutuhan dari fungsi user 2. Pemilihan rekanan/penyedia barang & jasa 1. Requirement information for the user function 2. Selection of goods & services suppliers/vendors	Pemilihan rekanan untuk mengikuti proses pengadaan barang & jasa dilakukan secara otomatis pada sistem sesuai dengan <i>scoring vendor</i> . Selection of vendor to participate in goods & services procurement process is done automatically on system based on vendor scoring	Pengembangan aplikasi <i>E-Procurement</i> E-Procurement application development
4	Penyelesaian pengiriman material oleh rekanan. Completion of material delivery by vendors	Menjamin ketepatan waktu pengiriman material. Guarantee on time material delivery	Pengingat/ <i>reminder</i> otomatis untuk rekanan agar menyelesaikan proses pengiriman material sesuai dengan <i>delivery date</i> yang telah ditentukan dalam PO Automatic reminder for the vendors to complete the material delivery process according to the delivery date mentioned on the PO.	Pengembangan aplikasi <i>Procurmon</i> Procurmon application development





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 152** Tinjauan Ekonomi Global
Global Economic Review
- 155** Tinjauan Perekonomian Nasional
National Economic Review
- 163** Tinjauan Industri
Industrial Review
- 167** Sinergi Bisnis Perusahaan – Grup Pertamina
Company Business Synergy – Pertamina Group
- 168** Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Operational Review per Business Segment
- 181** Tinjauan Keuangan
Financial Review
- 198** Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitment on Capital Expenditure Investment
- 198** Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Material Information and Fact After Accountant Reporting Date
- 199** Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
- 205** Kebijakan Dividen
Dividend Policy
- 205** Program Kepemilikan Saham kepada Manajemen (MSOP) dan Karyawan (ESOP)
Management and Employee Stock Option Plan
- 205** Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Public Offering Proceeds
- 206** Buy Back Saham dan Buy Back Obligasi
Shares Buy Back and Bonds Buy Back
- 206** Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information on Investment, Ekspansi, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring
- 207** Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Information Containing Conflict of Interest and/or Affiliated Party Transaction
- 210** Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Financial Information Containing Extraordinary Event
- 210** Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan pada Tahun Buku Terakhir
Changes in Accounting Policies Applied by the Company in the Last Financial Year
- 210** Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan
Changes in Laws and Regulations that are Significant to the Company
- 211** Prospek Usaha
Business Prospects
- 213** Informasi Kelangsungan Usaha
Information about Business Continuity

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL

GLOBAL ECONOMIC REVIEW



Optimisme terhadap pemulihan ekonomi global sempat menguat pada triwulan IV-2019. Optimisme dipicu oleh berbagai respons kebijakan yang ditempuh banyak negara untuk memperkuat perekonomiannya. Optimisme makin kuat saat tercapai kesepakatan tahap I perundingan perdagangan AS-Tiongkok. Berbagai faktor kemudian menurunkan ketidakpastian global dan meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Sejumlah indikator dini ekonomi global seperti keyakinan pelaku ekonomi, Purchasing Manager Index (PMI) dan pesanan ekspor menunjukkan perbaikan pada Desember 2019 - Januari 2020. Dalam perkembangannya, proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merebak pada akhir Januari 2020. Optimisme berubah karena COVID-19 diperkirakan akan menekan perekonomian Tiongkok dan kemudian menghambat keberlanjutan pemulihan ekonomi global, setidaknya pada triwulan I 2020.

The optimism towards global economic recovery was strengthened in the fourth quarter of 2019. The optimism is triggered by various policy responses implemented by many countries to strengthen their economies. The optimism is even stronger following the 1st stage agreement on US-China trade negotiations was reached. These factors then reduce global uncertainty and increase the confidence of economic actors in the prospects for global economic recovery. A number of early indicators of the global economy such as the confidence among the economic players, the Purchasing Manager Index (PMI) and export orders showed improvement in December 2019 - January 2020. In its development, the process of global economic recovery was again constrained following Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) outbreak at the end of January 2020. Such optimism is then changed as the COVID-19 is predicted to pressure Chinese economy and constrain continuity of the global economic recovery, at least for the first quarter of 2020.



%yoy

Pertumbuhan Ekonomi Global Global Economics Growth																		
PDB	2018	WEO (IMF)						Consensus Forecast (CF)						Bank Indonesia				
		Oktober 2019 October 2019			Januari 2020 January 2020			Desember 2019 December 2019			Januari 2019 January 2019			November 2019 November 2019		Februari 2019 February 2019		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2020	2021	2019	2020	2021
Dunia World	3,6	3	3,4	3,6	2,9	3,3	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,1	3,4	3,1	3,2	2,9	3	3,4
Negara Maju Developed Country	2,3	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,7	1,4	1,6	1,7	1,4	1,6	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7
Amerika Serikat USA	2,9	2,4	2,1	1,7	2,3	2	1,7	2,3	1,8	1,8	2,3	1,9	1,9	2	2	2,3	2,1	2
Kawasan Euro EURO Area	1,8	1,2	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,1	1	1,3	1,1	1	1,2	1	1,1	1,2	1,1	1,3
Jepang Japan	0,8	0,9	0,5	0,5	1	0,7	0,5	1	0,2	0,8	1	0,4	0,8	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7
Negara Berkembang Developing Country	4,5	3,9	4,6	4,6	3,7	4,4	4,6	4,3	4,6	4,9	4,3	4,6	4,7	4,1	4,3	3,7	3,9	4,4
Tiongkok China	6,6	6,1	5,8	5,9	6,1	6	5,8	6,1	5,8	5,8	6,1	5,9	5,7	6	6	6,1	5,6	6,2
India India	7,1	6,1	7	7	4,8	5,8	6,5	5,8	6,7	7	5,2	5,8	6,7	6,6	6,8	5,1	5,5	6,2
ASEAN-5	5,2	4,8	4,9	4,9	4,7	4,8	5,1	4,3	4,4	4,7	4,3	4,4	4,7	4,9	5	4,7	4,8	5,2
Amerika Latin Latin America	1	0,2	1,8	1,8	0,1	1,6	2,3	1	1,6	2,4	0,7	1,6	2,4	1,8	2	0,1	1,8	2
Emerging Europe Emerging Europe	3,6	1,8	2,5	2,5	1,8	2,6	2,5	1,3	2,2	2,5	1,3	2,2	2,5	2,1	2,2	1,8	2,2	2,3
MENA, Afganistan & Pakistan	1,8	0,1	2,7	2,7										2	2,1	0,1	2	2,1

*Perhitungan Volume Perdagangan Dunia WEO (IMF) memperhitungkan goods & Services, Perhitungan Perdagangan Dunia Bank Indonesia hanya memperhitungkan goods

Sumber : IMF, Consensus Forecast, Bank Indonesia

*Perhitungan Volume Perdagangan Dunia WEO (IMF) memperhitungkan goods & Services, Perhitungan Perdagangan Dunia Bank Indonesia hanya memperhitungkan goods

Sumber : IMF, Consensus Forecast, Bank Indonesia

Berbagai indikator pada triwulan IV-2019 dan Januari 2020 mengindikasikan optimisme pelaku ekonomi dunia terhadap perbaikan ekonomi global. Indikator di pasar barang menunjukkan kegiatan ekonomi domestik di berbagai negara meningkat. Keyakinan pelaku ekonomi dalam tren meningkat dan diikuti kenaikan Purchasing Manager Index (PMI) di banyak negara. Perkembangan ini juga diikuti peningkatan pesanan ekspor serta kegiatan ekspor dan impor yang membaik pada Desember 2019-Januari 2020. Kondisi ini diperkuat dengan gambaran rilis data sementara CPB yang mengonfirmasi perbaikan volume perdagangan dunia pada triwulan IV 2019, yang didukung oleh perbaikan ekspor, terutama di Kawasan Eropa. Perkembangan ini kemudian mendorong kenaikan

By the fourth quarter of 2019 and January 2020 couple of indicators indicated optimism of the global economic players towards the global economics recovery. Indicators in the commodity market show that domestic economic activity in various countries has increased. Economic confidence in the trend is increasing and followed by the increasing Purchasing Manager Index (PMI) in many countries. This development was also followed by an increase in export orders as well as improved export and import activities in December 2019-January 2020. This condition was reinforced by an illustration of temporary CPB release data which confirmed the global trading volume recovery by the fourth quarter of 2019, which was supported by improving exports, especially in the European region, this condition further encourages

harga minyak dan komoditas dunia, yang juga sempat meningkat akibat kenaikan permintaan dan eskalasi risiko geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat di awal tahun 2020 seiring dengan optimisme pemulihan perekonomian global.

Optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global berdampak positif pada menurunnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kesepakatan dagang tahap I AS-Tiongkok juga memberikan sentimen positif terhadap pasar keuangan global. Berbagai indikator risiko seperti *Economic Policy Uncertainty* (EPU) menurun sejak Oktober 2019. Sejalan dengan itu, risiko pasar keuangan negara berkembang pada awal Januari 2020 juga menurun ke level terendah sepanjang 5 tahun terakhir. Berbagai perkembangan positif ini kemudian mendorong peningkatan aliran modal ke negara berkembang dan memicu apresiasi mata uang negara berkembang.

Beberapa faktor mempengaruhi optimisme pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi global. Faktor pertama terkait dengan dampak positif respons kebijakan yang ditempuh banyak negara dalam memitigasi risiko perlambatan ekonomi, termasuk melalui pelonggaran kebijakan moneter. Dalam kaitan ini, berbagai bank sentral tetap menempuh kebijakan akomodatif guna mendukung upaya pemulihan ekonomi di negara masing-masing.

Namun demikian, Optimisme terhadap perekonomian berubah saat COVID-19 mulai merebak di Tiongkok. COVID-19 berawal dari daerah Wuhan yang terjadi pada akhir Desember 2019. COVID-19 memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan dengan wabah SARS. Tingkat penyebarannya lebih cepat karena terjadi menjelang Tahun Baru Lunar ketika lalu lintas penduduk yang tinggi ke berbagai wilayah di Tiongkok. Selain itu, masa inkubasi COVID-19 yang lebih panjang menyebabkan penanganan penyakit secara dini menjadi terhambat.

Penurunan ekonomi Tiongkok tersebut menahan pemulihan ekonomi dunia, baik melalui dampak langsung penurunan Tiongkok maupun dampak rambatan (*spillover effect*) ke negara lain. Kondisi ini disebabkan peran Tiongkok yang cukup besar dalam perdagangan dan konsumsi

the increasing global oil and commodity price, which also had increased due to higher demand and geopolitical risk escalation. the increasing global oil and commodity prices in early 2020 is in line with optimism towards the global economic recovery.

The optimism of economic players towards the global economic recovery prospect has a positive impact to reduce the uncertainty in global financial markets. The US-China phase I trade agreement also gave positive sentiment to the global financial markets. Various risk indicators such as the Economic Policy Uncertainty (EPU) have declined since October 2019. In line with this, the risk of developing countries' financial markets in early January 2020 also declined to the lowest level in the past 5 years. These positive developments have then led to increased capital flows to developing countries and triggered appreciation of the developing country currencies.

Several factors influence the optimism of economic actors towards the prospect of global economic recovery. The first factor is related to the positive impact of the policy response adopted by many countries in mitigating the risk of an economic slowdown, including through easing monetary policy. In this regard, various central banks continue to take accommodative policies to support economic recovery efforts in their respective countries.

However, optimism about the economy changed when COVID-19 spread in China. COVID-19 was originated in the Wuhan area which occurred by the end of December 2019. The COVID-19 has slightly different characteristics compared to the SARS outbreak. It has faster level of spread as occurred approaching the Lunar New Year when population traffic is high to various regions in China. In addition, a longer incubation period for COVID-19 causes several burden to perform early disease management.

The decline in the Chinese economy had constrained the global economic recovery, both through the direct impact of China's decline and the impact of the propagation (*spillover effect*) to other countries. This condition is due to the sizeable role of China in world commodity trade and



komoditas dunia. Penurunan permintaan Tiongkok memberikan dampak rambatan ke negara lain melalui jalur pariwisata, perdagangan, dan investasi. Pariwisata diperkirakan akan menurun sejalan dengan berbagai pembatalan kunjungan turis ke berbagai negara, dan kemudian diikuti penurunan perdagangan dan investasi sejalan penurunan permintaan dunia.

COVID-19 juga meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini memicu berkurangnya penempatan aliran dana global ke negara berkembang dan mendorong kenaikan penempatan kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman. Dalam beberapa hari pada awal Februari 2020, imbal hasil *T-Bond US* menurun sejalan dengan peningkatan permintaan. Saat bersamaan, harga emas juga meningkat sering dengan penyesuaian portofolio penempatan dana di tengah kenaikan ketidakpastian di pasar keuangan global. Dalam perkembangannya pada minggu selanjutnya, sentimen di pasar keuangan global mulai membaik seiring dengan respons penanganan yang cepat di berbagai negara termasuk pemerintah Tiongkok untuk menahan penyebaran COVID-19 lebih luas.

consumption. The decline in Chinese demand has had a propagating effect on other countries through tourism, trade and investment. Tourism is predicted to decline in line with various cancellations of tourist visits to various countries, and then be followed by a decline in trade and investment in line with the fall of global demand.

COVID-19 also increases the uncertainty in the global financial markets. This development triggered a reduction in the global funds investment flow to developing countries and encouraged an increase in investment in financial assets and commodities that are considered safe. Within a few days in early February 2020, US T-Bond yields declined in line with increased demand. At the same time, gold prices have also risen frequently with adjustments to portfolio placement of funds amid rising uncertainty in the global financial market. In its development the following week, sentiment of global financial markets sentiment began to improve in line with the rapid response of response in various countries including the Chinese government to restrain the broader COVID-19 spread.

TINJAUAN PEREKONOMIAN NASIONAL

NATIONAL ECONOMIC REVIEW

Optimisme yang sempat mengemuka di perekonomian global pada triwulan IV-2019 dan awal 2020 juga terlihat di perekonomian domestik. Beberapa indikator menunjukkan keyakinan pelaku ekonomi meningkat di dua bulan terakhir 2019. Kegiatan ekspor dan impor juga meningkat sehingga mengindikasikan arah penguatan perekonomian ke depan. Perkembangan tersebut kemudian juga diikuti oleh meningkatnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sampai dengan Januari 2020 dan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah.

Keberlanjutan optimisme tertahan saat COVID-19 mulai terjadi akhir Januari 2020. Peran ekonomi Tiongkok di perekonomian global yang besar tidak dapat dihindari

The arising optimism towards the global economy in the fourth quarter of 2019 and early 2020 was also seen in the domestic economy. Several indicators indicated that economic players' confidence increased in the last two months of 2019. Export and import activities also increased, thus indicating the direction of strengthening the economy going forward. This development was also followed by an increase in foreign capital inflows into the domestic financial market until January 2020 and encouraged the appreciation of the Rupiah exchange rate.

Sequence of the optimism was restrained when COVID-19 started to spread by the end of January 2020. The role of the Chinese economy in a major global economy

memengaruhi perekonomian Indonesia. Aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik berkurang sejalan dengan penyesuaian penempatan dana asing ke negara berkembang dan sempat memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Peran Tiongkok yang tidak kecil terhadap perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, ekspor, dan investasi diperkirakan akan memengaruhi prospek perekonomian Indonesia tahun 2020, setidaknya pada triwulan I-2020. Sementara itu, stabilitas ekonomi diperkirakan tetap terkendali ditopang inflasi yang tetap dalam kisaran sasaran 3,0+1%, serta stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga.

Beberapa indikator ekonomi pada triwulan IV-2019 mengindikasikan arah penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020. Indikator keyakinan pelaku ekonomi bulanan seperti keyakinan konsumen dan investasi terlihat mulai meningkat pada bulan Desember 2019 yang mengindikasikan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indikator produksi seperti *Purchasing Manager Index* (PMI) dan kegiatan ekspor-impor nonmigas yang dalam arah meningkat makin menguatkan indikasi perbaikan tersebut. Kegiatan ekspor yang meningkat tersebut juga sejalan dengan indikasi meningkatnya volume perdagangan dunia yang kemudian meningkatkan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia.

Peran permintaan domestik cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019, terutama melalui konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap baik pada 2019 didorong oleh daya beli yang tetap terjaga dan keyakinan konsumen yang tetap baik. Daya beli rumah tangga tetap terjaga sejalan dengan inflasi pada 2019 yang tetap rendah dan terkendali, serta pendapatan kelompok masyarakat kelas bawah yang tetap terjaga seperti tercermin pada nilai tukar petani (NTP) yang meningkat. Tetap baiknya keyakinan konsumen tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada zona optimis di seluruh kelompok pengeluaran konsumen. Konsumen memandang positif kondisi ekonomi pada 2019, baik dari aspek ketersediaan lapangan kerja dan kondisi penghasilan, maupun dari kemampuan membeli barang tahan lama (*durable goods*). Di samping itu, konsumsi rumah tangga juga ditopang oleh konsumsi Lembaga

inevitably affected the Indonesian economy. The foreign capital inflow into the domestic financial market were reduced in line with adjustments to the foreign funds investment in developing countries and also pressured the Rupiah exchange rate. The significant role of China in the Indonesian economy through tourism, exports and investment is estimated to influence the Indonesian economy outlook in 2020, at least in the first quarter of 2020. Meanwhile, the economic stability is projected to remain stable underpinned by inflation that stable around the 3.0 + 1% target range, as well as the stable financial system.

Several economic indicators in quarter IV-2019 indicate the direction of strengthening Indonesia's economic growth in 2020. Indicators of confidence in monthly economic actors such as consumer confidence and investment are seen to have begun to increase in December 2019 which indicates the strengthening of Indonesia's economic growth momentum. Production indicators such as the Purchasing Manager Index (PMI) and non-oil and gas export-import activities which are in the direction of increasing reinforce these indications of improvement. The increased export activity is also in line with indications of increased volume of world trade which then increases demand for Indonesian export products.

The role of domestic demand is quite large in sustaining Indonesia's economic growth in 2019, mainly through household consumption. Growth in household consumption will remain good in 2019 driven by maintained purchasing power and good consumer confidence. The purchasing power of households is maintained in line with inflation in 2019 which remains low and controlled, and the income of the lower class groups is maintained as reflected in the increased exchange rate of farmers (NTP). The continued improvement in consumer confidence is reflected in the Consumer Confidence Index (IKK), which is in the optimistic zone across all consumer spending groups. Consumers look positively at economic conditions in 2019, both in terms of employment availability and income conditions, as well as in the ability to buy durable goods. In addition, household consumption is also supported by the consumption of the Household

Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) yang meningkat sebagai dampak positif dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019.

Nonprofit Institution (LNPR) which increased as a positive impact of the holding of the General Election in 2019.

%yoy

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Economci Growth from Expenditure Side													
Komponen Component	2017	2018				2018	2019				2019*	2020*	2021*
		I	II	III	IV		I	II	III	IV			
Konsumsi Swasta Private Consumption	4,94	4,96	5,17	5	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	4,9-5,3	5,0-5,4
Konsumsi Pemerintah Government Consumption	2,13	2,71	5,21	6,26	4,56	4,8	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,0-3,4	3,0-3,4
Investasi (PMTDB) Investation (PMTDB)	6,15	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	4,7-5,1	6,0-6,4
Ekspor Export	8,91	5,84	7,48	8,34	8,34	6,55	-1,58	-1,73	0,1	-0,39	-0,87	2,2-2,6	4,9-5,3
Impor Import	8,06	12,46	14,94	13,77	13,77	11,88	-7,47	-6,84	-8,3	-8,05	-7,69	-0,4	4,0-4,4
PDB GDP	5,07	5,06	5,27	5,17	5,17	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	5,0-5,4	5,2-5,6
Sumber : BPS Source : BPS													

Investasi pada 2019 juga tetap baik, terutama ditopang investasi bangunan yang tetap tinggi. Pencapaian pertumbuhan investasi bangunan didorong oleh pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN) Pemerintah yang terus berlanjut, serta kinerja konstruksi swasta yang meningkat. Peningkatan tersebut terindikasi dari penjualan semen yang kembali pada tren peningkatan. Sementara itu, kinerja investasi non-bangunan masih tertahan dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang menurun akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dan harga komoditas dunia yang menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan impor barang modal serta penjualan alat berat yang mengalami penurunan.

In 2019, the investment also remained positive underpinned by the construction investment which remained high. Achievement of growth in the construction investment is driven by infrastructure development and the ongoing Government's national strategic project (PSN), as well as the improving performance of the private sector's construction. The increase was indicated from the sales of cement which returned to an upward trend. Meanwhile, non-construction investment performance was still restrained due to declining export performance due to slowing world economic growth and declining world commodity prices. This is in line with the decline in imports of capital goods and heavy equipment sales.

Ekspor pada 2019 belum kuat akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi global yang melemah dan penurunan harga komoditas. Perkembangan pada 2019 menunjukkan permintaan terhadap barang ekspor Indonesia berkurang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang belum kuat, meskipun ekspor beberapa produk seperti otomotif tetap baik sejalan dengan permintaan dari beberapa negara ASEAN yang

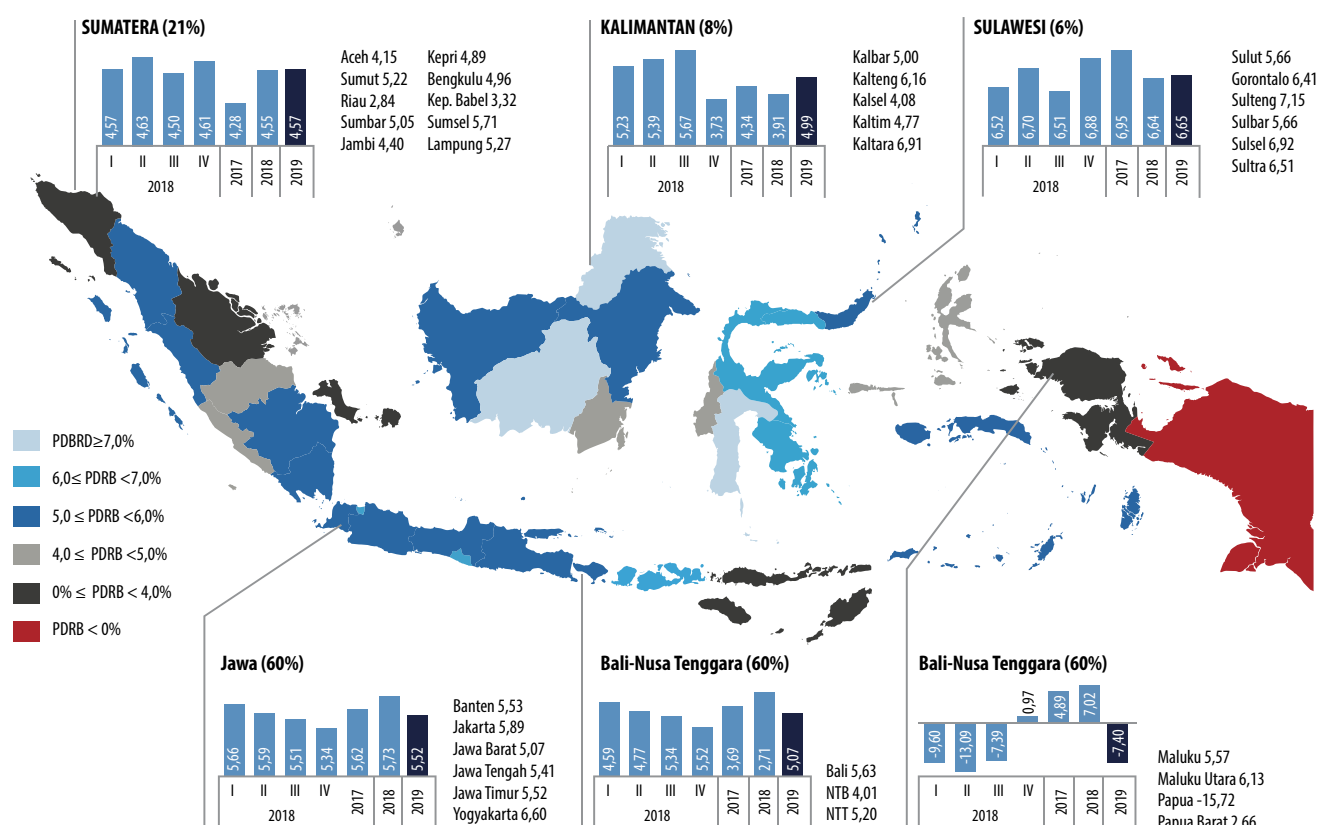
In 2019, exports saw a sluggish condition as the impact from global economic growth slowdown and falling commodity prices. Developments in 2019 show the demand for Indonesia's export goods is reduced in line with the global economic growth that has not been strong, although exports of some products such as automotive remain well in line with the demand from several ASEAN countries that remain strong. The global condition that also affected

tetap kuat. Kondisi global yang juga memengaruhi ekspor Indonesia pada 2019 berkaitan dengan dampak kebijakan beberapa negara seperti India yang melakukan kebijakan tarif impor CPO dan Tiongkok yang melakukan kebijakan pembatasan impor batu bara. Selain kondisi global, kinerja ekspor Indonesia 2019 juga dipengaruhi kebijakan untuk memperkuat nilai tambah domestik seperti pelarangan ekspor bijih nikel dan optimalisasi produksi minyak dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi domestik.

Indonesia's exports in 2019 was related to the impact of the policies of several countries such as India which implemented a CPO import tariff policy and China which implemented a coal import restriction policy. In addition to global conditions, Indonesia's export performance in 2019 is also influenced by policies to strengthen domestic added value such as the ban on nickel ore exports and optimization of domestic oil production for domestic consumption needs.

Pertumbuhan Ekonomi Regional 2019

Regional Economic Growth 2019



Sumber : BPS, Diolah | Source : BPS, Edited



Secara spasial, permintaan domestik yang tetap baik ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera pada 2019 meningkat ditopang perdagangan antardaerah yang meningkat, terutama perdagangan produk minyak sawit sejalan dengan implementasi program B20. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kalimantan tetap terjaga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas primer, antara lain ekspor batubara ke Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Bali-Nusa Tenggara juga naik dipengaruhi oleh perbaikan ekspor komoditas tembaga dan bijih nikel. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) melambat terutama dipengaruhi oleh kinerja ekspor yang menurun seiring penurunan permintaan global terhadap komoditas manufaktur Jawa serta kendala produksi tembaga di Sulampua.

Spatially, domestic demand that remained well was supported by increased economic growth in most regions. Economic growth in Sumatra in 2019 will increase supported by increased inter-regional trade, especially trade in palm oil products in line with the B20 program implementation. In addition, Kalimantan's economic growth has been maintained supported by improved exports of primary commodities, including coal exports to China. Bali-Nusa Tenggara economic growth also rose due to improved exports of copper and nickel ore commodities. Meanwhile, economic growth in the regions of Java and Sulampua (Sulawesi-Maluku-Papua) slowed mainly due to declining export performance in line with the decline in global demand for Javanese manufacturing commodities and copper production constraints in Sulampua.

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA

Optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang sempat menguat pada akhir 2019 menopang kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Secara keseluruhan, NPI tahun 2019 tercatat surplus sebesar 4,7 miliar dolar AS, setelah pada 2018 mengalami defisit 7,1 miliar dolar AS. Perbaikan NPI ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat sejalan dengan kinerja ekonomi Indonesia yang terjaga, daya tarik pasar keuangan yang besar, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga menurun dari 2,94% PDB pada 2018 menjadi 2,72% PDB pada 2019. Perkembangan itu terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang tercatat surplus, membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami defisit.

Kinerja NPI tahun 2019 yang membaik juga ditopang oleh kinerja NPI triwulan IV-2019 yang lebih baik dari triwulan sebelumnya, termasuk didorong oleh meningkatnya aliran masuk modal asing. Pada triwulan IV-2019, secara keseluruhan NPI tercatat surplus 4,3 miliar dolar AS, meningkat tinggi dari defisit 0,1 miliar dolar AS di triwulan III-2019. Surplus ini banyak dipengaruhi oleh meningkatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio dari

INDONESIA PAYMENT BALANCE SHEET

The optimism towards the economic recovery arising by end of 2019 sustained the performance of Indonesia's Balance of Payments (NPI), which remained good, supported supporting the resilience of the external sector. Overall, the balance of payments in 2019 recorded a surplus of 4.7 billion US dollars, after in 2018 a deficit of 7.1 billion US dollars. The improvement in the balance of payments was bolstered by an increased capital and financial transaction surplus in line with the maintained performance of the Indonesian economy, the attractiveness of large financial markets, and the uncertainty of the global financial markets. Meanwhile, the current account deficit also declined from 2.94% of GDP in 2018 to 2.72% of GDP in 2019. This development was mainly supported by the goods trade balance which recorded a surplus, improved compared to the previous year which experienced a deficit.

The improving balance of payments performance in 2019 was also supported by the performance of the balance of payments by the fourth quarter of 2012 which was higher than the previous quarter, including being driven by increased inflows of foreign capital. In quarter IV-2019, overall the balance of payments recorded a surplus of 4.3 billion US dollars, a high increase from a deficit of 0.1 billion US dollars in quarter III-2019. This surplus was largely influenced by the

penerbitan obligasi global pemerintah dan korporasi. Investasi lainnya juga tercatat surplus sejalan dengan penarikan simpanan bank di luar negeri oleh pelaku usaha domestik dan bertambahnya penempatan dana non-residen di bank dalam negeri.

increased inflows of foreign capital in portfolio investments from the issuance of global government and corporate bonds. Other investments also recorded a surplus in line with the withdrawal of bank deposits abroad by domestic business actors and the increasing placement of non-resident funds in domestic banks.

NILAI TUKAR RUPIAH

Nilai tukar Rupiah pada triwulan IV-2019 dan awal 2020 tetap terjaga sesuai nilai fundamental ditopang kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap baik. Pada triwulan IV 2019 Rupiah menguat 2,55% secara rerata atau 1,67% secara *point-to-point*. Penguatan Rupiah didorong pasokan valas dari para eksportir serta aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Dengan perkembangan tersebut, Rupiah secara keseluruhan tahun 2019 menguat 3,58% (ptp) atau 0,76% secara rerata.

Rupiah melanjutkan berada dalam lintasan menguat pada awal 2020 didorong terus mengalirnya modal asing yang masuk ke pasar domestik. Rupiah menguat pada Januari 2020 yang secara rerata tercatat apresiasi 2,13% dibandingkan dengan rerata level Desember 2019. Penguatan Rupiah pada Januari 2020 sejalan dengan penguatan mata uang negara-negara *peers* didukung oleh sentimen positif kesepakatan dagang tahap I antara AS-Tiongkok. Pada 19 Februari 2020, Rupiah secara rerata juga tetap menguat 0,27% dibandingkan dengan rerata level Januari 2020, namun secara *point to point* harian melemah sebesar 0,24% dibandingkan dengan level akhir Januari 2020. Rupiah yang melemah pada awal Februari 2020 terutama dipicu oleh sentimen terhadap COVID-19, meskipun dalam perkembangan berikutnya kembali stabil ditopang oleh pasokan valas eksportir dan aliran masuk modal asing.

RUPIAH EXCHANGE RATE

The stable Rupiah exchange rate in quarter IV-2019 and early 2020 was in accordance with the fundamental value supported by the performance of Indonesia's balance of payments which remained favorable. In the fourth quarter of 2019 Rupiah was appreciated 2.55% on average or 1.67% on a point-to-point basis. The strengthening of the Rupiah is driven by the supply of foreign exchange from exporters as well as continued foreign capital inflows in line with Indonesia's economic prospects that are maintained, the attractiveness of the domestic financial market remains large, and the uncertainty of the global financial market is easing. Considering these developments, the overall Rupiah in 2019 strengthened 3.58% (ptp) or 0.76% on average.

Furthermore, the Rupiah continued to be in a strengthening trend at the beginning of 2020 driven by the continued foreign capital flow into the domestic market. The Rupiah strengthened in January 2020 which averaged a 2.13% appreciation compared to the average level in December 2019. The strengthening of the Rupiah in January 2020 was in line with the strengthening of peer currencies supported by positive sentiment of the first phase of the US-China trade agreement. On February 19, 2020, the Rupiah also strengthened 0.27% compared to the average level of January 2020, but on a daily point-to-point basis it weakened by 0.24% compared to the level at the end of January 2020. The weakening of the Rupiah in early February 2020 was mainly triggered by sentiment towards the COVID-19, although in subsequent developments it has stabilized, supported by exporters' foreign exchange supply and foreign capital inflows.



INFLASI

Inflasi pada triwulan IV-2019 dan Januari 2020 tetap terkendali dalam sasaran inflasi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) triwulan IV- 2019 tercatat tetap rendah yakni 0,51% (qtq), meskipun meningkat dari 0,15% (qtq) pada triwulan III-2019 terutama akibat kenaikan musiman akhir tahun pada kelompok *volatile food* (VF) dan *administered prices* (AP). Inflasi inti pada triwulan IV-2019 tetap terkendali pada level 0,39% (qtq) dan 3,02% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat dipengaruhi pola musiman naiknya permintaan akhir tahun dan terganggunya produksi komoditas hortikultura akibat kemarau yang berlangsung lebih panjang. Kenaikan inflasi kelompok *administered prices*, antara lain disebabkan dampak pengumuman kenaikan cukai tembakau pada 2020. Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK 2019 tetap rendah yakni 2,72% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi 2018 sebesar 3,13% dan berada dalam kisaran sasaran sebesar 3,5%. Ke depan, inflasi IHK 2020 diperkirakan tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasarannya. Terjaganya inflasi tersebut bersumber dari tekanan inflasi dari kelompok inti dan *volatile food* yang menurun. Inflasi inti diperkirakan lebih rendah sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang terkelola baik, serta pergerakan nilai tukar yang stabil sesuai fundamental. Inflasi VF juga diperkirakan lebih rendah sejalan terkendalinya inflasi komoditas bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam. Kendati demikian, beberapa risiko perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek inflasi (Grafik 2.11). Risiko antara lain berasal dari kenaikan harga komoditas global, terutama harga minyak global, emas, dan komoditas pangan lainnya. Selain itu, perkembangan COVID-19 juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu distribusi komoditas impor, seperti bawang putih.

Inflasi yang rendah terkendali berlanjut pada Januari 2020 ditopang inflasi inti yang tetap terjaga dan kelompok *administered prices* yang tercatat deflasi. Dengan menggunakan pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) 2018, inflasi IHK pada Januari 2020 tercatat 0,39% (mtm) atau 2,68% (yoy) pada Januari 2020, tidak berbeda jauh dibandingkan dengan inflasi Desember (Boks: Pemutakhiran SBH 2018 dan Grafik 2.10).

INFLATION

In the fourth quarter of 2019 and January 2020 remained under control in the inflation target. Consumer Price Index (CPI) inflation in quarter IV-2019 was recorded to remain low at 0.51% (qtq), although it increased from 0.15% (qtq) in quarter III-2019 mainly due to year-end seasonal increase in the volatile food (VF) group and administered prices (AP). Core inflation in quarter IV-2019 remained under control at 0.39% (qtq) and 3.02% (yoy). Meanwhile, volatile food inflation increased due to seasonal patterns of rising demand at the end of the year and disruption of horticultural commodity production due to drought that lasted longer. The increase in administered prices inflation was partly due to the impact of announcing an increase in tobacco excise in 2020. With this development, 2019 CPI inflation remained low at 2.72% (yoy), down compared to 2018 inflation of 3.13% and within the target range by 3.5%. Going forward, CPI 2020 inflation is predicted to remain low and stable within its target range. The subdued inflation came from inflationary pressures from the core group and declining volatile food. Core inflation is forecasted to be lower in line with expectations of controlled inflation, well-managed domestic demand and stable exchange rate movements in accordance with fundamentals. VF inflation is also predicted to be lower in line with the controlled inflation of shallots, broiler eggs and chicken meat. Nevertheless, several risks need to be examined because they can influence the inflation outlook (Graph 2.11). Risks include rising global commodity prices, especially global oil prices, gold and other food commodities. In addition, the development of COVID-19 is also a concern because it can disrupt the distribution of imported commodities, such as garlic.

Controlled low inflation continued in January 2020 supported by sustained core inflation and administered prices that recorded deflation. Using the updated 2018 Cost of Living (SBH) Survey, CPI inflation in January 2020 was recorded at 0.39% (mtm) or 2.68% (yoy) in January 2020, not much different from December inflation (Box: Updated 2018 SBH and Graph 2.10). Core inflation remains under control in line with expectations, managed domestic

Inflasi inti tetap terkendali sejalan dengan ekspektasi yang terjaga, permintaan domestik yang terkelola dengan baik, nilai tukar yang terapresiasi, dan tekanan eksternal yang minimal. Inflasi inti tercatat 0,19% (mtm) pada Januari 2020 atau 2,88% (yoy), melambat dibandingkan dengan inflasi inti sebesar 3,00% (yoy) pada bulan sebelumnya. Sementara itu, kelompok *administered prices* (AP) tercatat deflasi dipengaruhi oleh penurunan harga bahan bakar khusus dan tarif angkutan udara. Kelompok *administered prices* mengalami deflasi sebesar 0,28% (mtm) 0,64% (yoy) pada Januari 2020, menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,72% (yoy).

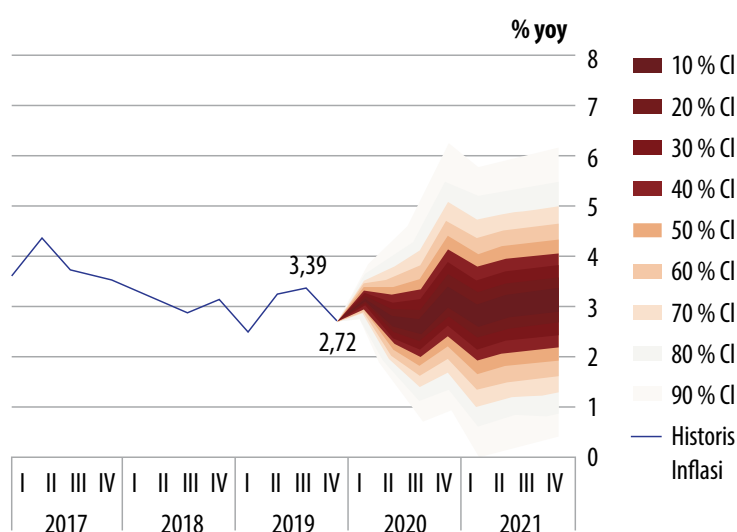
Inflasi kelompok *volatile food* (VF) pada Januari 2020 meningkat didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas pangan. Kelompok *volatile food* tercatat inflasi 1,93% (mtm) atau 4,13%(yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,99% (yoy). Peningkatan tersebut disumbang oleh komoditas aneka cabai, ikan segar, minyak goreng, beras, aneka bawang, kentang, dan tomat. Kenaikan harga beberapa komoditas VF tersebut antara lain disebabkan oleh dampak banjir di sebagian daerah sehingga memengaruhi produksi dan distribusi. Kenaikan inflasi *volatile food* tertahan oleh deflasi pada komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras sejalan dengan pasokan yang melimpah.

demand, an appreciating exchange rate, and minimal external pressure. Core inflation recorded 0.19% (mtm) in January 2020 or 2.88% (yoy), it slowed compared to core inflation of 3.00% (yoy) in the previous month. Meanwhile, the administered prices (AP) group recorded deflation affected by a fall in special fuel prices and air transportation rates. Administered prices group experienced deflation of 0.28% (mtm) 0.64% (yoy) in January 2020, down from the previous month recorded inflation of 0.72% (yoy).

The volatile food (VF) inflation in January 2020 increased driven by rising prices of some food commodities. The volatile foods category recorded inflation of 1.93% (mtm) or 4.13% (yoy), an increase compared to the previous month's inflation of 2.99% (yoy). The increase was contributed by various chilli commodities, fresh fish, cooking oil, rice, various onions, potatoes and tomatoes. The increase in prices of some of the VF commodities was partly due to the impact of flooding in some areas that affected production and distribution. The increase in volatile food inflation was restrained by deflation in the commodity of broiler chicken eggs and broiler eggs in line with the the oversupply.

Proyeksi Inflasi

Inflation Project



Sumber : Bank Indonesia | Source Bank Indonesia



Ke depan, inflasi IHK 2020 diperkirakan tetap rendah dan stabil dalam kisaran sasarannya. Terjaganya inflasi tersebut bersumber dari tekanan inflasi dari kelompok inti dan *volatile food* yang menurun. Inflasi inti diperkirakan lebih rendah sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang terkelola baik, serta pergerakan nilai tukar yang stabil sesuai fundamental. Inflasi VF juga diperkirakan lebih rendah sejalan terkendalnya inflasi komoditas bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam. Kendati demikian, beberapa risiko perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek inflasi. Risiko antara lain berasal dari kenaikan harga komoditas global, terutama harga minyak global, emas, dan komoditas pangan lainnya. Selain itu, perkembangan COVID-19 juga menjadi perhatian karena dapat mengganggu distribusi komoditas impor, seperti bawang putih.

Going forward, CPI 2020 inflation is predicted to remain low and stable within its target range. The subdued inflation came from inflationary pressures from the core group and declining volatile food. Core inflation is forecasted to be lower in line with expectations of controlled inflation, well-managed domestic demand and stable exchange rate movements in accordance with fundamentals. VF inflation is also predicted to be lower in line with the controlled inflation of shallots, broiler eggs and chicken meat. Nevertheless, several risks need to be examined because they can influence the inflation outlook. Risks include rising global commodity prices, especially global oil prices, gold and other food commodities. In addition, the development of COVID-19 is also a concern because it can disrupt the distribution of imported commodities, such as garlic.

TINJAUAN INDUSTRI

INDUSTRIAL REVIEW

Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang di 2019, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam kebijakan moneter yang masih di atas 12 persen, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit.

The national shipping industry saw a stagnant growth in 2019 as experiencing several challenges. The national shipping industry still deals with couple of challenges, especially in monetary policy which is still above 12 percent, while the national shipping profit margin was only achieved a single digit.

Di sisi fiskal, pelayaran nasional juga masih dibebani sejumlah pajak yang antara lain seperti Pajak PPN atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri. INSA mengatakan, pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka. Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, dia optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional.

On the fiscal side, national shipping is also still burdened with a number of taxes, including the VAT tax on domestic shipping fuel purchases. INSA said, basically national shipping only requires equal treatment or equal treatment as other countries impose policies on their shipping industry. If the policy has led to this equal treatment, he is optimistic that shipping will be increasingly competitive and able to record positive performance, which in turn will contribute more to the national economy.

Pelayaran ini motor bagi industri lainnya, seperti galangan, industri komponen kapal, asuransi dan pendidikan SDM.

Shipping becomes the engine for other industries, such as dock yard, vessels component industry, insurance and HR

Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut tumbuh. Tantangan lainnya terkait efisiensi biaya kepelabuhanan dalam menekan biaya logistik, dan juga pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah.

Sebagai negara maritim, Indonesia dinilai sangat membutuhkan transportasi laut untuk mendistribusikan ke berbagai penjuru daerah karena dinilai lebih efisien dan efektif. Sekalipun industri transportasi laut itu sangat dibutuhkan namun bukan berarti sektor usaha jasa itu tidak menemui hambatan di tengah ketatnya persaingan bisnis. Sejumlah pihak menilai pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang di 2019, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut, terutama dalam kebijakan moneter berupa suku bunga tinggi mencapai 12,25 persen, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit. Di sisi fiskal, pelayaran nasional juga masih dibebani sejumlah pajak yang antara lain seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengatakan, pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka. Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, dia optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional.

Hal ini mengingat pelayaran merupakan motor bagi industri lainnya, seperti galangan dan industri komponen kapal. Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut tumbuh.

Tantangan lainnya terkait efisiensi biaya kepelabuhanan dalam menekan biaya logistik, dan juga pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Wakil Ketua I DPP INSA Witono Soeprapto mengatakan, pada tahun ini pelayaran nasional secara umum tumbuh tipis. Khusus angkutan kargo umum masih dihadapkan pada pertumbuhan yang kurang meyakinkan.

education. If the shipping grows, other related industries will also grow. Other challenges related to port cost efficiency in reducing logistics costs, as well as periodic data collection in terms of number, size and type of vessels done by the government.

As a maritime country, Indonesia is considered having high demand on the maritime transportation to distribute across various regions as considered more efficient and effective. Even though the sea transportation industry is very much needed, it does not mean that the service business sector does not encounter obstacles in the midst of intense business competition. Several parties consider that the growth of the national shipping industry will remain less favorable in 2019 as still dealing with several challenges.

These challenges, especially with regards to the monetary policy in form of high interest rates, reaching to 12.25 percent, while profit margin of the national shipping was only achieved a single digit. On the fiscal side, the national shipping was also burdened by couple of taxes, including the Value Added Tax (VAT) on purchases of domestic shipping fuels.

Carmelita Hartoto, Chairwoman of the Indonesian National Shipowners' Association (INSA), claimed that the national shipping principally only requires equal treatment as other countries that implemented range of policies on their shipping industry. If the policy has encouraged this equal treatment, she is optimistic that shipping will be increasingly competitive and able to record positive performance, which in turn will contribute higher to the national economy.

This considers the shipping industry is engine for other industries, such as dock yard and ship component industries. If the shipping grows, other related industries will also grow.

Other challenges related to efficiency of port expenditure in reducing the logistics costs, as well as periodic data collection on the number, size and type of vessels that is done regularly by the government. Deputy Chairman I of DPP INSA Witono Soeprapto explained, this year the national shipping sector generally grew thin. Specifically public cargo transportation is still faced with inconclusive



Sektor kargo umum diprediksi akan semakin terpuruk mengingat fasilitas kepelabuhanan selalu memprioritaskan kapal kontainer, sehingga menghadapi tantangan potensi terjadinya kongesti. Sedangkan komoditas untuk kargo umum sudah banyak berkurang, dan lebih banyak muatan-muatan curah bahan baku. Dari dulu, tantangan sektor ini terkait kekhawatiran terjadinya kongesti pelabuhan karena pelabuhan memprioritaskan kontainer. Selain itu, muatan kapal ini juga terus berkurang.

Adapun sektor kontainer domestik akan sangat dipengaruhi pada kinerja ekonomi Indonesia. Dari kuartal I hingga III 2018, ekonomi nasional tumbuh berkisar lima persen. Pada RAPBN 2019, ekonomi nasional juga dipatok tumbuh 5,3 persen. Dengan melihat itu, sektor kontainer diprediksi mencatatkan pertumbuhan yang tidak jauh berbeda.

Baik sektor kontainer dan kargo umum juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, seiring dengan permintaan dan penawaran muatan pada momen-momen tertentu. Seperti di hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun jumlah muatan akan ikut naik.

Meski angkutan ekspor impor masih didominasi pelayaran asing, sektor kontainer pelayaran nasional optimistik akan mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun depan. Namun peningkatan jumlah muatan tidak terjadi pada kegiatan impor, kecuali untuk komoditas bahan baku. Salah satu tantangan pelayaran kontainer saat ini terkait pemberlakuan Serfikat Keselamatan Kontainer, yang seharusnya merujuk pada "*best common international practice*". Hingga kini, sektor kontainer juga tengah mempersiapkan diri dalam era digital.

KAPAL TANKER TUMBUH

Sektor kapal tanker domestik masih mencatatkan kinerja positif di 2018. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan muatan unsur nabati (*fatty acid methyl ester*/FAME) terkait kebijakan B20 yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan perubahan arus muatan dan terjadi kelangkaan sementara untuk tipe kapal ukuran 2.000-5.000 tonnase bobot mati (DWT).

The general cargo sector is predicted to be getting worse given the port facilities always prioritize container ships, thus facing the potential challenges of congestion. Whereas commodities for general cargo have been much reduced, and there are more bulk loads of raw materials. The sector's challenges have always been related to concerns over port congestion because ports prioritize containers. In addition, the ship's load also continues to decrease.

The domestic container sector will be highly influenced by Indonesia's economic performance. From the first quarter to 2018, the national economy grew by around five percent. In the State Budget 2019 Draft, the national economic growth is also set to achieve 5.3 percent. By considering this target, the container sector is predicted to record a fairly equal growth.

Both the container and general cargo sectors also experienced a volatile growth, along with the demand and supply of cargo at certain moments. As in religious holidays and at the end of the year the amount of cargo will increase.

Despite the export-import transportation is still dominated by foreign shipping, the national shipping container sector remains optimistic to record higher performance next year. However, the increase in the cargo amount did not occur in import activities, except for raw material commodities. One of the challenges of container shipping is currently related to the implementation of the Container Safety Association, which should refer to "*best common international practice*". Recently, the container sector is also preparing itself towards the digital era.

THE TANKER VESSELS

Domestic tanker sector still recorded a positive performance in 2018. In 2018, there was a significant surge in the content of vegetable acids (*fatty acid methyl ester*/FAME) related to the B20 policy, causing a change in cargo flow and a temporary scarcity of 2,000 - 5,000 ship types dead weight tonnage (DWT).

Hal ini di samping ketersediaan kapal tanker yang terbatas juga disebabkan oleh pola operasi distribusi FAME yang masih belum optimal, sehingga penggunaan ruang muat kapal tidak efisien serta waktu menunggu bongkar yang relatif lama. Ketua Bidang Cair DPP INSA Nick Djatnika mengatakan, pertumbuhan kapal berbendera Indonesia di 2018 capai 152 unit atau naik 1,68 persen ketimbang tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 19 unit merupakan kapal tanker, sedangkan pertumbuhan kapal tanker pada 2018 mencapai 3,42 persen.

Secara lebih rinci, jumlah armada kapal tanker kecil (ukuran 10.000 DWT) pada tahun 2018 bertambah sebanyak tujuh unit sedangkan untuk kapal tanker besar bertambah sebanyak 12 unit. Pelaku usaha tanker nasional tetap mengkhawatirkan terjadinya gejolak pasar domestik, sebagai dampak dari pengaruh kondisi sektor pelayaran tanker global yang mencatatkan kinerja negatif tahun ini.

Di tahun 2019 ini, sektor tanker nasional diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan armada ukuran kecil yang akan menetralkan kelangkaan kapal tanker, terkait perubahan arus muatan dan lonjakan muatan sebagai dampak pemberlakuan kebijakan B20. Adapun sektor kapal tanker ukuran lebih besar, ada dua hal yang akan berpengaruh pada kebijakan pengadaan kapal, yaitu pemberlakuan kewajiban kapal tanker berbendera Indonesia untuk mengangkut ekspor CPO dan kebijakan batasan sulfur pada tahun 2020.

Di sektor tongkang dan curah untuk angkutan batu bara optimistik akan mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2018, target volume produksi batu bara sebesar 485 juta ton, utilisasi curah dan tongkang mencapai 100 persen. Dengan kenaikan volume produksi batu bara pada 2019 naik 28,3 persen, maka utilisasi serapan curah dan tongkang akan menjadi setara atau berada pada level yang menggaikan bagi pelaku industri bulk dan tongkang. Apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan tetap tumbuh di kisaran 5-5,3 persen sehingga sektor pelayaran diharapkan tetap mendukung perekonomian nasional.

In addition to the limited availability of tankers, this condition was also caused by the FAME distribution operation scheme that is less optimal thereby the use of cargo capacity is inefficient and the unloading time is relatively long. Chairman of the Liquid Sector DPP INSA Nick Djatnika explained, the growth of Indonesian-flagged vessels in 2018 reached 152 units, up 1.68 percent over the previous year. Of that number, 19 units are tankers, while tanker growth in 2018 will reach 3.42 percent.

More comprehensively, the number of small tanker fleets (size 10,000 DWT) in 2018 increased by seven units while for large tankers increased by 12 units. National tanker business operators continue to worry about domestic market turmoil, as a result of the influence of the global tanker shipping sector which recorded negative performance this year.

In 2019, the national tanker sector is predicted to continue to experience a growth in small-size fleet that will offset the tanker scarcity, related to changes in cargo flow and cargo surges as a result of the enactment of B20 policy. As for the larger tanker sector, there are two conditions that will affect ship procurement policies, including the enforcement of the obligation of Indonesian-flagged tankers to transport CPO exports and the sulfur restriction policy in 2020.

The barge and bulk sector for coal transportation is optimistic to record positive growth. In 2018, the coal production volume target is 485 million tons, bulk and barge utilization reaches 100 percent. With the increase in coal production volume in 2019 increasing by 28.3 percent, the utilization of bulk and barge absorption will be equal or at an exciting level for the bulk and barge industry players. Moreover, the projected growth of Indonesia's economy this year is expected to continue to grow in the range of 5-5.3 percent so that the shipping sector is expected to continue to support the national economy.



SINERGI BISNIS PERUSAHAAN-GRUP PERTAMINA

COMPANY BUSINESS SYNERGY – PERTAMINA GROUP

Langkah strategis lain adalah membangun sinergi PTK dengan Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) atau AP Pertamina. Sinergi dimaksudkan untuk memberikan peluang bekerja sama sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing Anak Perusahaan dan memperkuat bisnis Pertamina Group.

Sinergi yang terbangun akan mendorong PTK dan seluruh AP Pertamina dapat memanfaatkan fasilitas yang sama sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Efisiensi mendorong kinerja PTK dan AP Pertamina lain menjadi lebih baik, sehingga akan mengoptimalkan pencapaian Pendapatan maupun Laba Usaha, serta mendukung pengembangan usaha. Selama tahun 2019 PTK telah membangun sinergi dengan sejumlah AP Pertamina.

Other strategic action is by building the synergy between PTK and subsidiaries of PT Pertamina (Persero) or its subsidiaries. The synergy is intended to provide an opportunity to cooperate and improve performance of each Subsidiary as well as strengthen the Pertamina Group business.

The developed synergy will encourage PTK and all subsidiaries of Pertamina in using the same facilities to improve efficiency. The efficiency will encourage performance of PTK and other subsidiaries of Pertamina to be better, to optimize Revenues and Operating Profit achievement, as well as support business development. Throughout 2019, PTK has build synergy with some subsidiaries of Pertamina.

Proyeksi Sinergi antar Pertamina Group
Synergy Projection in Pertamina Group

Proyek Project	Mitra Sinergi Synergy Partner	Volume Bisnis Business Volume	Periode Proyek Project Period
Penyediaan 2 unit WO tanker Small II 6500DWT Provision of 2 units WO Small II 6500 DWT Tanker	PT Pertamina (Persero)	Rp849,87 miliar Rp849,87 billion	Feb 2019 - Feb 2027 Feb 2019 - Feb 2027
Provision of Logistics Offshore Supply Base Service Provision of Logistics Offshore Supply Base Service	PT Pertamina Hulu Indonesia	Rp109,70 miliar Rp109,70 billion	Jan 2019 - Ags 2020 Jan 2019 - Aug 2020
Penyediaan 3 unit mooring boat Provision of 3 units mooring boat	PT Pertamina (Persero)	Rp69,23 miliar Rp69,23 billion	Feb 2019 - Feb 2027 Feb 2019 - Feb 2027
Rental of 1 (one) unit AHTS Rental of 1 (one) unit AHTS	PT Pertamina Hulu Energi	Rp55,91 miliar Rp55,91 billion	Apr 2019 - Apr 2021 Apr 2019 - Apr 2021
To Provide: two (2) unit AHTS and one (1) unit AHT to support 1st Drilling Rig (Soehanah)	PT Pertamina Hulu Energi	Rp39,33 miliar Rp39,33 billion	Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2019
Pengadaan Jasa Recognized Security Organization (RSO), keagenan kapal & administrasi dokumen kepelabuhan, dan pengurusan perijinan kemaritiman Procurement of Recognized Security Organization (RSO), ship agency & port documents administration and maritime permit processing services	PT Nusantara Regas	Rp22,35 miliar Rp22,35 billion	Jan-Dec 2019 Jan-Dec 2019
Provision of 9 units LCT Provision of 9 units LCT	PT Pertamina Hulu Indonesia	Rp14,01 miliar Rp14,01 billion	Jan-Jun 2019 Jan-Jun 2019

TINJAUAN OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

PT Pertamina Trans Kontinental awalnya didirikan dengan nama PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang bergerak di bidang pelayaran khusus industri (industrial carrier) dengan jasa:

1. Melaksanakan angkutan BBM ke daerah-daerah yang tidak dapat atau tidak ekonomis dilayani oleh kapal tanker;
2. Melaksanakan angkutan logistik keperluan proyek Pertamina; dan
3. Sebagai general agent/handling agent terhadap kapal-kapal tanker/charter Pertamina.

Nama Perusahaan berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Akta No. 012 Tanggal 26 Oktober 2011 Tentang Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Pertamina Tongkang, Notaris Dewantari Handayani, S. H. MPA, dengan bernafaskan new brand, new vessels, new spirit untuk bertransformasi dan mencapai visi menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim kelas dunia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan No. 7 tanggal 3 Juli 2013 pasal 3, Perseroan menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang jasa pelayaran, jasa maritim, dan jasa logistik, baik di dalam maupun luar negeri. Jasa Perseroan juga termasuk kegiatan usaha lain terkait usaha di ketiga bidang tersebut.

Seiring pergantian nama Perusahaan, jumlah kapal yang dimiliki PTK terus bertambah. Pada tahun 2019 Perusahaan memiliki 84 kapal dari semula 67 kapal pada tahun 2018.

PT Pertamina Trans Kontinental was initially established under the name PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang engaged in the industrial carrier sector with the following:

1. Conducting fuel oil freight to areas which are unavailable to or uneconomical for tanker ship service;
2. Conducting the logistics freight for Pertamina project necessities;
3. Acting as general agent/handling agent of Pertamina tanker/charter ships.

The name of the Company was changed to PT Pertamina Trans Kontinental on 14 September 2011 based on Deed No. 012 of 26 October 2011 on PT Pertamina Tongkang Statement of Decision Outside of the Meeting, Notary Dewantari Handayani, S. H. MPA., with the themes of new brand, new vessels, new spirit, to transform and achieve the vision to be a world class shipping and maritime services company.

Based on the Articles of Association of the Company No. 7 of 3 July 2013 article 3, the Company runs business activities in the sectors of shipping services, maritime services, and logistics services, whether domestic or overseas. Company services also include other business activities relevant to the business in the three sectors.

Following the Company's name alteration, the number of 2019 owned by PTK continued to increase. In 2018, the Company was supported by 84 vessels from previously as 67 vessels in 2018.



KINERJA OPERASIONAL PER SEGMENT USAHA

Secara umum, perusahaan memiliki tiga segmen usaha, yaitu: 1) Eksploitasi kapal, 2) Jasa maritim, dan 3) Jasa operasi kepelabuhan – diversifikasi usaha.

Segmen Eksploitasi Kapal

Perusahaan memiliki core business sebagai penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, baik kapal milik maupun brokerage, dengan sistem sewa berjangka (time charter) dengan durasi sewa minimal antara 2-10 tahun, sewa jangka pendek (*spot charter*) berdurasi kurang dari 1 tahun, dan sistem muatan (*cost of affreightment*), yaitu sistem sewa berdasarkan pada volume muatan.

Perusahaan melakukan sewa-menyewa kapal bekerjasama dengan Pihak ke-tiga untuk berbagai jenis kapal penunjang kegiatan migas dan kapal sarana pelabuhan. Kegiatan Charter Brokerage (*Back-to-Back*) terdiri dari Back-to-Back Charter Non-COA (*time charter*) dan Back-to-Back Charter COA.

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal

Pada tahun 2019, realisasi commission days kapal milik PTK meningkat 17,67% menjadi 23.015 hari dari 19.559 hari pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penambahan armada kapal milik yang sudah siap beroperasi. Pada tahun 2019, jumlah kapal milik bertambah sebanyak 17 kapal menjadi 84 kapal atau meningkat 25,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Operation days kapal tahun 2019 turut meningkat 34,37% menjadi 29.151 hari dari 21.694 hari pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya jumlah operation days baik kapal *back-to-back* maupun kapal milik yang masing-masing tumbuh sebesar 113,11% dan 18,93% atau setara dengan 4.416 dan 3.367 hari. Meningkatnya *operation days* kapal *back-to-back* tak lepas dari peningkatan tajam pada cabang Balikpapan yang tumbuh 131,16% atau setara dengan 3.554 hari menjadi 6.246 hari pada tahun 2019.

OPERATIONAL PERFORMANCE PER BUSINESS SEGMENT

In general, the Company has three business segments, as follows: 1) Ship Exploitation, 2) Maritime Service, and 3) Port operations service – business diversification.

Ship Exploitation Segment

The Company's core business is ship provider and ship operations services, whether owned or brokerage, with a time charter system and a minimum charter duration of 2-10 years, spot charter with the duration of less than 1 year, and a cost of affreightment system, which is a charter system based on cargo volume.

The Company commences a ship leasing in cooperation with third parties for various supporting vessels for oil and gas activity and port facility vessels. The Charter Brokerage (*Back-to-Back*) activity consists of Back-to-Back Charter Non-COA (time charter) and Back-to-Back Charter COA.

Productivity of Ship Exploitation Segment

In 2019, commission days realization of PTK's own-vessel increased by 17.67% to 23,015 days from 19,559 days in previous year. The increment was contributed from additional own-vessels fleet ready to operate. In 2019, total own-vessels increased by 17 vessels to 84 vessels or increased by 25.37% compared to previous year.

Operation days of the vessels in 2019 also increased by 34.37% to 29,151 days from 21,694 days in previous year. The increment was driven by increasing operation days both the back-to-back vessels and own-vessels that grew by 113.11% and 18.93%, respectively or equal to 4,416 and 3,367 days. The increasing operations days of back-to-back vessels was related to sharp increase in Balikpapan branch that grew by 131.16% or equal to 3,554 days to 6,246 days

Produktivitas Segmen Eksploitasi Kapal Productivity of Ship Exploitation Segment

Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018	2017
		%	Nominal			
Armada Kapal Milik Owned Ships						
Jumlah Armada Kapal Milik Amount of Owned Ships	Unit	25,37%	17	84	67	54
Commisson Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	Hari Days	17,67%	3.456	23.015	19.559	13.604
Kapal Milik Existing Existing Vessels	Hari Days	16,68%	3.240	22.663	19.423	13.604
New Vessels	Hari Days	158,82%	216	352	136	0
Operation Days Kapal Milik Operation Days of Owned Ships	Hari Days	18,93%	3.367	21.156	17.789	10.750
Kapal Milik Existing Existing Vessels	Hari Days	80,31%	9.282	20.840	11.558	10.750
New Vessels	Hari Days	(94,93%)	(5.915)	316	6.231	0
Muatan Diangkut (Kapal Milik) Loads Transported (Owned Ship)	KL	(9,77%)	(45.822)	423.342	469.164	482.320
Kapal Back-to-Back Back-to-Back Chartered Ships						
Jumlah Kapal Back-to-Back Total Back-to-Back Ships	Unit	133,33%	16	28	12	20
Operation Days Back-to-Back Operation Day of Back-to-Back Ship	Hari Days	113,11%	4.416	8.320	3.904	5.525
- Kantor Pusat Head Office	Hari Days	72,55%	872	2.074	1.202	2.256
- Cabang Branch	Hari Days	131,16%	3.544	6.246	2.702	3.269
Muatan Diangkut (Back-to-Back) Loads Transported (Back-to-Back)	KL	6,20%	19.314	330.661	311.347	352.043
Jumlah Operation Days Kapal Milik dan Back-to-back Number of Operation Days of Owned ships and Back-to-back	Hari Days	34,37%	7.457	29.151	21.694	16.275
Commisson Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	Hari Days	17,67%	3.456	23.015	19.559	13.604
Volume Angkut COA COA Freight Volume	KL	0,45%	3.492	784.003	780.511	834.363

Sementara itu volume angkut *Contract of Affreightment* (COA) juga mengalami pertumbuhan sebesar 3.492 KL menjadi 784.003 KL pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya muatan yang diangkut kapal *back-to-back* sebesar 6,20% atau setara dengan 19.314 KL menjadi 330.661 KL pada tahun 2019. Namun penurunan terjadi pada muatan yang diangkut kapal milik sebesar 9,77% atau 45.822 KL menjadi 423.342 KL pada tahun 2019.

Meanwhile, cargo volume of *Contract of Affreightment* (COA) also recorded a 3,492 KL growth to 784,003 KL in 2019. The increase was mainly driven by increasing cargo carried by the back-to-back vessels of 6.20% or equal to 19,314 KL to 330,661 KL in 2019. However, a decrease occurred in cargo carried by the own-vessels by 9.77% or 45,882 KL to 423,342 KL in 2019.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal

Pada tahun 2019, pendapatan dari jasa Kapal Milik mengalami kenaikan 6,12% atau setara dengan Rp52,29 miliar dari Rp854,54 miliar pada tahun 2018 menjadi

Revenues and Profitability of Ship Exploitation Segment

In 2019, revenues from Own-Vessels increased by 6.12% or equal to Rp52.29 billion from Rp854.54 billion in 2018 to Rp906.83 billion in 2019. The increment was in line with

Rp906.83 miliar pada tahun 2019. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya jumlah kapal Perseroan menjadi 84 unit pada tahun 2019 dari semula 64 unit.

increasing number of the Company's vessels from 84 units to 64 units in 2019.

Pendapatan *Back-to-Back Charter* mengalami pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 33,98% dari Rp188,72 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp252,86 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pendapatan cabang Balikpapan yang meningkat signifikan pada tahun 2019.

Back-to-Back Charter Revenues increased a 33.98% growth in 2019 from Rp188.72 billion in 2018 to Rp252.86 billion in 2018. The increase was mainly contributed from significant increase in revenues booked by Balikpapan branch in 2019.

dalam jutaan Rupiah | in millions of Rupiah

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal Revenue and Profitability of Ship Exploitation					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Nominal			
Pendapatan Kapal Milik Own-Vessels	6,12%	52.291	906.832	854.541	558.414
Pendapatan Back-to-back Charter Back-to-back Charter	33,98%	64.135	252.856	188.721	219.277
Jumlah Pendapatan Segmen Eksploitasi kapal Total Revenues from Ships Exploitation Segment	11,16%	116.426	1.159.688	1.043.262	777.691
Beban Pokok Kapal Milik Cost of Revenue Own-Vessels	15,16%	81.937	622.516	540.579	448.760
Beban Pokok Back-to-back Charter Back-to-Back Charter Cost of Revenue	36,66%	62.343	232.414	170.071	201.656
Jumlah Beban Pokok Segmen Eksploitasi Kapal Total Cost of Revenues from Ships Exploitation Segment	20,30%	144.280	854.930	710.650	650.416
Laba Operasi Kapal Milik Own-Vessels Operating Income	(9,44%)	(42.304)	284.316	313.962	109.650
Laba Operasi Charter & Brokerage Charter & Broekrage Operating Income	25,15%	3.232	16.082	12.850	15.840
Laba Operasi Contract of Affreightment (COA) Contract of Affreightment (COA) Operating Income	(24,83%)	(1.669)	4.360	5.800	2.460
Profitabilitas Segmen Eksploitasi Kapal Profitability of Ships Exploitation Segment	(8,37%)	(27.854)	304.758	332.612	127.950

*) reklasifikasi | reclassification

Profitabilitas segmen eksploitasi kapal mengalami penurunan 8,37% dari Rp332,61 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp304,76 miliar pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan karena beban pokok yang meningkat pada 2019 menjadi Rp854,93 miliar.

Profitability of ships exploitation segment decreased by 8.37% from Rp332.61 billion in 2018 to Rp304.76 billion in 2019. The decrease was mainly due to the increasing cost of revenues to Rp854.93 billion in 2019.

Jasa Maritim

PT Pertamina Trans Kontinental menyediakan layanan jasa maritim atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum) maupun di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal tanker charter/milik Pertamina).

Maritime Services

PT Pertamina Trans Kontinental provides agency services at all Indonesian ports, whether as general ports (general agency) or Pertamina special ports (agency of Pertamina charter/owned tanker ships).



Layanan yang disediakan mencakup: (1) pengurusan perizinan: in-out clearance (formality); (2) menyiapkan kebutuhan kapal dan crew (*crew supply, bunker handling, water supply*), (3) menyiapkan kebutuhan kapal dan crew, membuat perhitungan dan mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal, dan (4) pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

The provided services include: (1) permit administration: in-out clearance (formality), (2) preparing the needs of ship and crew (*crew supply, bunker handling, water supply*), (3) preparing the needs of ship and crew, making ship service calculations and accountability, and (4) preparing Import Declaration (PIB) and Export Declaration (PEB) documents.

Produktivitas Segmen Jasa Maritim

Segmen jasa maritime terdiri atas keagenan tanker dan umum. Pada tahun 2019, layanan keagenan tanker mengalami kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah call keagenan tanker yang meningkat 39,72% pada tahun 2019 menjadi 2.364 call dari 1.692 call pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah call keagenan tanker baik pusat dan cabang sebesar 41,46%.

Layanan keagenan umum juga menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2019. Adapun rincian dari kinerja keagenan tanker dan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Productivity of Maritime Service Segment

Maritime services consist of tanker and general agencies. In 2019, the tanker agency service experienced a higher performance from previous year. This is indicated from total call of the tanker agency that increased by 39.72% in 2019 to 2,364 calls from 1,692 calls in 2018. The increase was due to increasing total tanker agency call by 41.46% both at head and branch offices.

General agency service also achieved a positive performance in 2019. Detail explanation of performance in tanker and general agency are presented in table below:



Produktivitas Segmen Jasa Maritim Productivity of Maritime Service Segment					
Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018
		%	Nominal		
Keagenan Tanker Tanker Agency					
Keagenan Tanker Kantor Pusat Head Office Tanker Agency	call	5,13%	2	41	39
Jumlah Call Charter Out Pertamina Total Call of Pertamina Charter	call	-	0	0	
Jumlah Call Keagenan Tanker Charter Out Pertamina Total Agency Call of Pertamina Charter Out	Call	-	0	0	0
Jumlah Call Keagenan Kapal Luar Negeri Total Agency Call of Foreign Ships	Call	0,00%	0	2	2
Charter Call Bosowa Bosowa Charter Call	call	5,41%	2	39	37
Charter Milik Pertamina Pertamina-owned Charter	call	-	0	0	0
Keagenan Tanker Cabang Branch Office Tanker Agency	call	42,33%	690	2.320	1.630
Jumlah Call Keagenan Kapal C M Pertamina Total Agency Call of C M Pertamina Ship	call	11,26%	143	1.413	1.270
Jumlah Call Keagenan Kapal C M Pertamina di Pel. Pertamina Total Agency Call of Pertamina C M Ship-	call	151,94%	547	907	360
Jumlah Call Keagenan Tanker Pusat dan Cabang Number of Agency Call for Central and Branch Tankers	call	41,46%	692	2.361	1.669
Administrasi Pelabuhan Khusus RSO & HOP Administration of Specific (Special) Ports RSO & HOP					
Jumlah Call Administrasi Pelabuhan Khusus Total Administration Call of Specific Port	Call	(100,00%)	(24)	0	24
Jumlah lokasi Pelabuhan yang di-assess Total Assessed Port Location (Port)	Bandar Port	(70,00%)	(7)	3	10
Jumlah Call Keagenan Tanker Jumlah Call Keagenan Tanker	Call	39,72%	672	2.364	1.692
Keagenan Umum Keagenan Umum					
In Out Clearance	call	4,65%	134	3.014	2.880
Izin Olah Gerak Shifting Permit	call	0,00%	0	36	36
Bunker Service	call	...	...	...	8.592
Crew Expenses/Crew Service/Attending Fee	call	(24,82%)	(34)	103	137
Keagenan Lain Non-tanker (Lumpsum) Other Non-tanker Agency (Lumpsum)	call	1137,50%	91	99	8
Port Charges/Agency Fee	call	5,23%	87	1749	1.662
Custom Clearance	set	(60,69%)	(159)	103	262
Handling Fee	kru	0,00%	0	12	12
Boat Service/Crew Boat	call	(22,36%)	(127)	441	568
Ship Expenses	call	(21,90%)	(23)	82	105
Water Service	metric ton	-	0	0	0
Perpanjangan Dahsuskim/Sertifikat Renewal of Seafarer's Visa/Certificate	kegiatan activity	-	0	0	0

*) reklasifikasi | reclassification

**) disajikan kembali | restated

Pendapatan Segmen Jasa Maritim

Perusahaan mencatat pendapatan dari jasa maritim atau keagenan turun sebesar 7,38% dari Rp256,99 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp238,04 miliar pada tahun 2018, penurunan ini disebabkan oleh kinerja pusat yang hanya terealisasi 41 call dari target yang ditetapkan 580 call atau hanya tercapai 7,07%. Meskipun demikian, kinerja cabang tercatat melebihi target yakni 2.320 call dari target yang ditetapkan sebesar 1.813 call, atau tercapai 127,96%.

Revenues from Maritime Service Segment

The Company booked a decrease in revenues from maritime or agency services by 7.38% from Rp256.99 billion in 2017 to Rp238.04 billion in 2018, the decrease was due to the performance realization of head office only achieved 41 calls from 580 calls targeted, or only achieved 7.07%. However, performance of the branch office exceeded the target by 2.320 calls from 1.813 calls targeted or achieved 127.96%.

Profitabilitas Segmen Jasa Maritim

Profitability of Maritime Service Segment

dalam jutaan Rupiah | in millions of Rupiah

Profitabilitas Segmen Jasa Maritim Profitability of Maritime Service Segment					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Nominal			
Jumlah Pendapatan Segmen Jasa Maritim Total Revenues from Maritime Service Segment	(3,34%)	(7.951)	230.089	238.040	256.997
Jumlah Beban Pokok Segmen Jasa Maritim Total Cost of Revenues from Maritime Service Segment	18,49%	19.193	122.969	103.776	95.915
Profitabilitas Segmen Jasa Maritim Profitability of Maritime Service Segment	(12,77%)	(17.142)	117.121	134.263	160.570

*) reklasifikasi | reclassification

Profitabilitas segmen jasa maritim mengalami penurunan 12,77% atau sebesar Rp17,14 miliar dari Rp134,26 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp117,12 miliar pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan karena pendapatan segmen jasa maritim yang menurun dan beban pokok segmen ini yang meningkat.

Profitability of the maritime service segment decreased by 12.77% or Rp17.14 billion from Rp134.26 billion in 2018 to Rp117.12 billion in 2019. The decrease was mainly driven by the decreasing revenues from maritime service segment and increasing cost of revenues from this segment.

Jasa Operasi Kepelabuhanan - Diversifikasi usaha

Kegiatan operasi kepelabuhanan meliputi kegiatan; (1) Administrasi Pelabuhan Khusus, (2) *Recognized Security Organization* (RSO), dan (3) *Hydrography, Oceanography* dan Pemetaan (HOP), meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

1. *Labour supply/crewing agent*
2. Layanan *bunker service agency*, yaitu berupa pengisian dan/atau pendistribusian BBM untuk kapal baik di laut maupun di darat.
3. Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air (*fresh water supply*) untuk keperluan kapal dan industri

Port Operation Services – Business Diversification

Port operation activities includes following activities; (1) Special Port Administration, (2) *Recognized Security Organization* (RSO), and (3) *Hydrography, Oceanography* and Mapping (HOP). Performance of port operation services is as follows:

1. Labour Supply/Crewing Agent.
2. Bunker Service Agency, providing Fuel recharge and/or distribution for ships on shore and off shore.
3. Fresh water supply and management service for ship and industrial needs.



4. Melakukan usaha jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal 5. Jasa pengerukan dan reklamasi pantai 6. Jasa ekspor import barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor import (<i>customs clearance</i>). 7. Mengadakan usaha di bidang international freight forwarding, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman dan pendistribusian barang. 8. Pengelolaan pelabuhan umum dan <i>logistic base</i> 9. Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran. 10. Layanan inspeksi pipa bawah laut dimana pekerjaan survei untuk memeriksa kondisi existing pipa bawah laut meliputi bentangan, posisi, tekanan dan parameter teknis lainnya sesuai dengan desain yang ditetapkan. 11. Trading yang meliputi kegiatan pengadaan barang kebutuhan APD, PRF (<i>Pneumatic Rubber Render</i>), <i>freight forwarding</i>.	4. Ships loading and unloading business activities. 5. Beach excavation and reclamation services. 6. Good and service export and import services including export import custom clearance 7. Business in international freight forwarding, including but not limited on cargo transportation, delivery and distribution. 8. General Port and Logistic base Management. 9. Building and office rental and management services. 10. Submarine pipeline inspection service where the survey project supports submarine pipeline existing condition including spread, position, pressure and other technical parameters based on stipulated design. 11. Trading activities including APD, PRF (<i>Pneumatic Rubber Vender</i>), Freight Forwarding supply.

Produktivitas Diversifikasi Usaha – Cabang

Kegiatan serta kinerja diversifikasi usaha yang dilaksanakan oleh cabang selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Branch Business Diversification Productivity

Business diversification activity and performance done by the branch office throughout 2019 are as follows:

Diversifikasi Usaha oleh Cabang Branch Business Diversification Activity					
Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018
		%	Nominal		
PEB	set	102,20%	93	184	91
PPFTZ - Pertamina KSO Kabil	set	(1,24%)	(6)	476	482
GAS Additional Charges Premier Oil	set	(33,33%)	(15)	30	45
Fee MOU (Management Fee)	KL	0,00%	0	24	24
Sewa Gedung/Kantor/Housing Building/Office/Housing Rent	bulan month	0,00%	0	14	14
Logistik Base/Sewa Lahan Logistic Base/Sewa Lahan/Land Rent	hectare	(2,04%)	(454)	21.753	22.207
Japom	personel personnel	0,00%	0	0	0
Ships Management kapal Pertamina Marine (AKK) Pertamina Marine Ships Management (AKK)	bulan month	1.073,17%	880	962	82
Handling Crew, Certificate, Oli, Cargo & PNB	kegiatan activity	(65,71%)	(23)	12	35
Fresh Water	ton	23.514,22%	105.814	106.264	450

Diversifikasi Usaha oleh Cabang Branch Business Diversification Activity

Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018
		%	Nominal		
Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Rutin" Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Recurring"	kegiatan activity	0,00%	0	12	12
Project PAG Blang Lancang - Lhokseumawe "Non- Rutin" "Non-Recurring"	kegiatan activity	-	0	0	0
Monthly Fee (Sei Pakning)	bulan month	-	0	0	0
Perawatan Kapal Ringan Pertamina Pertamina Light Vessel Maintenance	unit	(100,00%)	(2)	0	2
ISPS – CODE	kegiatan activity	(66,67%)	(2)	1	3
Bongkar Muat Loading	kegiatan activity	-	48.001	48.001	0
Jasa Angkut BBM Fuel Transportation	kegiatan activity	(100,00%)	(1)	0	1
Jasa Pandu Guiding Service	call	140,00%	14	24	10
Lain lain Others (Table Top, Finance Support, Trucking Trailer)	bulan month	-	-	-	26
Bunker Service	metric ton	-	-	-	21.941.748

Produktivitas Diversifikasi Usaha - Anak Perusahaan

Sampai dengan akhir periode pelaporan Perusahaan memiliki empat anak perusahaan:

1. Peteka Karya Gapura
2. Peteka Karya Tirta
3. Peteka Karya Samudera
4. Peteka Karya Jala

Perusahaan memiliki satu perusahaan patungan (*joint venture*), yaitu PT Trans Yeong Maritime. PTK juga merupakan pemegang saham minoritas pada PT Pertamina Patra Niaga sebesar 0,09%.

Subsidiary Business Diversification Productivity

As of the end of the reporting period, the Company has four subsidiaries:

1. Peteka Karya Gapura
2. Peteka Karya Tirta
3. Peteka Karya Samudera
4. Peteka Karya Jala

The company has one joint venture, PT Trans Yeong Maritime. PTK is also a minority shareholder of 0.09% in PT Pertamina Patra Niaga.

Kinerja bisnis kegiatan diversifikasi anak perusahaan selama 2019 adalah sebagai berikut:

Diversification activity business performance of the subsidiaries in 2019 is as follows:

Jasa Operasi Kepelabuhanan – Diversifikasi Usaha oleh Anak Perusahaan Port Operation Services – Subsidiary Business Diversification Activity						
Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018	2017
		%	Nominal			
PT Peteka Karya Tirta						
Penjualan Air Water Sales	m3/ton	(21,39%)	(1.082.739)	3.978.238	5.060.977	5.049.165
PT Peteka Karya Samudera						
Cover Storage - Lease	m2	3,59%	282	8.129	7.847	7.847
Open Storage - Lease	m2	(9,39%)	(2.250)	21.703	23.953	8.613
Cargo Handling	R/T	7,12%	116.500	1.752.854,72	1.636.354,34	1.445.220,26
Fasilitas Dermaga Dock Facilities	hari days	109,14%	860	1.648	788	712
Jumlah Call Kapal Ship Call	call	41,77%	586	1.989	1.403	414
Jumlah Supply Air ke Kapal Water Supply to the Ship	ton	7,14%	1.518	22.789	21.271	16.064
PT Peteka Karya Gapura						
Labor Supply	crew	1,19%	39	3.315	3.276	2.158
JAPOM	crew	(9,44%)	(174)	1.669	1.843	2.343
PT Peteka Karya Jala						
General Trading	PO	(30,28%)	(152)	350	502	318
Pengerukan Dredging	ports	50,00%	1	3	2	0
PT Trans Yeong Maritime						
Jumlah Kapal Operasi Operating Vesels	unit	0,00%	0	8	8	8
Operation Days of Owned Fleet	days	(0,68%)	(20)	2900	2.920	2.900

PT Peteka Karya Tirta

PT Peteka Karya Tirta (PKT) bergerak di bidang pemasok air untuk industri dan kapal. Pada tahun 2019 PKT memasok air bersih sebanyak 3.978.238 m³ ke berbagai industri dan ke kapal-kapal milik Pertamina, PTK & kapal Charter, mengalami penurunan 21,39% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya permintaan pasokan air bersih dari pelanggan utama PKT di Ciwandan, sedangkan di Batam terjadinya musim kemarau panjang yang menyebabkan kolam penampungan air di Batam mengalami kekeringan sehingga tidak dapat mensuplai air ke pelanggan.

PT Peteka Karya Tirta

PT Peteka Karya Tirta is operated in water supply business for industry and vessel. In 2019, PTK has supplied fresh water of 3,978,238 m³ to various industries and to vessels owned by Pertamina, PTK & Charter vessels, was decreased by 21.93% if compared to previous year. The decrease was mainly due to decreasing clean water supply demand from primary customers of PKT in Ciwandan, meanwhile, Batam experienced a long drought season and caused the water reserves pool in Batam dried and could not supply water to the customers.

PT Peteka Karya Samudra

PT Peteka Karya Samudera ("PKS") bergerak dibidang kepelabuhanan yang meliputi kegiatan bongkar muat dan sewa pergudangan serta cargo handling.

PT Peteka Karya Samudera

PT Peteka Karya Samudera is operated in Port business including loading and unloading activities and warehouse lease and cargo handling.

Pada 2019 jumlah pergudangan yang disewakan adalah seluas 29,832 m² turun 6,19% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 31.800 m². Penurunan ini terutama disebabkan karena ini dikarenakan situasi perekonomian yang belum stabil sehingga beberapa Perusahaan diantaranya PT Al Marwan yang tidak memperpanjang penyewaan Lahan di Shorebase PKS karena tidak berjalannya kegiatan operasional internal mereka dan PT Peralahan Arnebetara Natuna (PAN) terjadi gagal Project.

As of December 2019, total leased warehouses covered 29,832 m² decreased 6.19% from 31,800 m² in 2018. The decrease was mainly due to the less stable economic situation where some of the companies such as PT Al Marwan not extending the Land lease at PKS Shorebase as their internal operational activity was suspended and PT Peralahan Arnebetara Natuna (PAN) experienced a project default.

Jumlah cargo handling telah tertangani sebesar 1.752.854,72 R/T mengalami kenaikan 7,12% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh seiring meningkatnya kegiatan bongkar *general cargo* Material Pabrik dan Batu Bara (milik PT Ecogreen Oleochemicals), Bongkar Curah Cair *Crude Palm Oil* (milik PT Musim Mas dan Pipa (milik PT Servotech Indonesia).

Total cargo handling achieved 1,752,854.72 R/T increased by 7,12% compared to previous year. The increment was driven by increasing unloading activity of Plant Material and Coal general cargo loading and unloading (for PT Ecogreen Oleochemicals), Loading of Bulk Liquid Crude Palm Oil (for PT Musim Mas and Pipeline (for PT Servotech Indonesia).

Jumlah pemakaian fasilitas dermaga pada 2019 mencapai 1.648 Hari, tercapai 102% dari target *challenge KPI* 2019.

Total usage of pier facilities in 2019 achieved 1,648 days, achieved 102% from KPI 2019 challenge target.

Jumlah call pemanduan kapal mencapai 1.989 call, naik 41,77% dari tahun 2018. Peningkatan ini karena bertambahnya lokasi wilayah kerja pada tahun 2019 diantaranya STS Muntok, TBBM Donggala, TBBM Poso.

Total ship pilotage call achieved 1,989 calls, increased by 41.77% from 2018. The increment was due to additional work area location in 2019 including STS Muntok, TBBM Donggala, TBBM Poso.

Adapun jumlah supply air ke kapal pada tahun 2019 tercatat sebesar 22.789 ton atau naik 7,14%. Peningkatan ini didominasi dengan adanya permintaan pengisian air pada kapal-kapal dari PT Musim Mas yang melakukan kegiatan bongkar muat di Jetty PKS.

Total water supply to vessels achieved Rp22,789 ton in 2019 or increased by 7.14%. The increment was dominated by water filling request at vessels from PT Musim Mas that conducted loading and unloading act

PT Peteka Karya Gapura

PT Peteka Karya Gapura ("PKG") bergerak di bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari Crew Kapal PTK dan JAPOM Pertamina. Pada tahun 2019, pasokan tenaga kerja mengalami penurunan 9,4% atau setara dengan personil menjadi 1669 personil dari semula 1843 personil pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena TKJP Japom Region III tidak lagi dikerjakan oleh PKG, akan tetapi TKJP Region III akan dikerjakan kembali oleh PKG di tahun 2020.

PT Peteka Karya Gapura

PT Peteka Karya Gapura is operated in Labour Supply business consisting of AKK and JAPOM Pertamina. In 2019, manpower supply decreased by 9.4% or equal to 1,669 personnel from previously as 1,843 personnel in 2018. The decrease was due to the TKJP Japom Region III is no longer handled by PKG where the TKJP Region III will be re-handled by PKG in 2020.



PT Peteka Karya Jala

PT Peteka Karya Jala ("PKJ") bergerak di bidang pengerukan (dredging) dan general trading. Perusahaan telah melakukan pengerukan pada tahun 2019 sebanyak 3 Pengerukan Yaitu Pengerukan Tanjung Sekong, Pengerukan Bula dan Pengerukan RDMP RU V Balikpapan. Mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya atau setara dengan volume keruk 509.963 m³

Sementara itu general trading Realisasi Perolehan PO tahun 2019 Adalah 350. Mengalami Penurunan dari Tahun Sebelumnya disebabkan Pekerjaan yang diluar kontrak payung dengan nilai diatas 200 juta Dilakukan dengan mekanisme lelang secara terbuka oleh fungsi procurement.

PT Trans Yeong Maritime

PT Trans Yeong Maritime ("TYM") merupakan perusahaan patungan (joint venture) Perusahaan dengan Tong Yeong Tug, perusahaan dari Korea. TYM bergerak dibidang perkapalan. Pada tahun 2019 jumlah kapal operasi Perusahaan sebesar 8 unit, sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan karena TYM diminta fokus untuk melayani bisnis dengan DSLNG sehingga tidak bisa melakukan diversifikasi usaha

Adapun *operation days of owned fleet* pada tahun 2019 sebesar 2.900 sedikit menurun atau setara dengan 0,689% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 2.920 hari. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya docking untuk 2 (dua) kapal Pilot Boat.

Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan – Diversifikasi Usaha

Pendapatan dari jasa operasi kepelabuhanan mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Pada tahun 2019, jasa operasi kepelabuhanan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,38 triliun atau tumbuh 80,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong oleh pengalihan kegiatan bisnis jasa *Port Operation Service* kepada anak usaha PTK yakni PT Peteka Karya Samudra.

PT Peteka Karya Jala

PT Peteka Karya Jala ("PKJ") is operating in dredging and general trading. The Company has conducted 3 dredgings in 2019 such as Tanjung Sekong Dredging, Bula Dredging and RDMP RU V Balikpapan Dredging. The amount increased from previous year or equal to dredging volume of 509,963 m³.

Meanwhile, realization of general trading PO Acquisition in 2019 reached 350, decreased from previous year due to the project outside non-umbrella contract valued 200 million and done under open tender mechanism by the procurement function.

PT Trans Yeong Maritime

PT Trans Yeong Maritime ("TYM") is Joint Venture of PTK and Tong yeong Tug, a Korean Company. TYM is operated in shipping sector. In 2019, total operated vessels of the Company are 8 units, or equal to previous year, this was due to TYM was requested to focus in serving the business with DSLNG that not conducting any business diversification.

Operation days of owned fleet in 2019 amounted 2,900, was slightly decreased or equal to 0.689% compared to 2,920 days in previous year. The decrease was mainly due to the docking for 2 (two) Pilot Boat vessels.

Revenues from Port Operations Service Segment – Business Diversification

Revenues from port operations service booked the highest growth compared to other segments. In 2019, the port operations earned revenues of Rp1.38 trillion or grew by 80.25% compared to previous year. The increment was mainly driven by transfer of Port Operation Service business activity to subsidiary of PTK, PT Peteka Karya Samudra.

Selain itu, pertumbuhan ini juga tak lepas dari penambahan bisnis baru STS FAME di Balikpapan. PT Pertamina Trans Kontinental mendapatkan penugasan dari PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Jasa Pengelolaan Floating Storage FAME di Balikpapan. FAME (*Fatty, Acid, Methyl, Ester*) merupakan salah satu varian bahan bakar terbarukan berbahan baku lemak hewani maupun nabati. Pemerintah melalui Pertamina memiliki program untuk mulai mendistribusikan bahan bakar FAME tersebut.

In addition, the growth was also contributed from additional new business, STS FAME in Balikpapan. PT Pertamina Trans Kontinental received several assignments from PT Pertamina (Persero) to commence the Floating Storage FAME service in Balikpapan. The FAME (*Fatty, Acid, Methyl, Ester*) refers to one of renewable fuel variant from animal and nab fats raw material. Through Pertamina, the Government has formulated a program to distribute the FAME fuel.

Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan – Diversifikasi Usaha

Profitabilitas segmen jasa kepelabuhanan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dari segmen jasa ini.

Profitability of Port operation Service Segment – Business Diversification

Profitability of port service segment increased along with the increasing revenues from this service segment.

dalam jutaan Rupiah | in millions of Rupiah

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan – Diversifikasi Usaha Profitability of Port operation Service Segment – Business Diversification						
Uraian Description	Satuan Unit	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
		%	Nominal			
Pendapatan Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan Revenues from Port Operations Service Segment		80,25%	615.473	1.382.443	766.970	735.995
Beban Pokok Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan Cost of Revenues from Port Operations Service Segment		92,37%	539.864	1.124.348	584.484	583.067
Profitabilitas Segmen Jasa Operasi Kepelabuhanan Profitability of Port Operations Service Segment		36,62%	67.221	258.095	183.541	159.520

*) reklasifikasi | reclassification

Seiring dengan meningkatnya pendapatan yang diterima segmen jasa operasi kepelabuhanan, profitabilitas atau laba kotor segmen ini turut mengalami peningkatan sebesar 36,62% atau setara dengan Rp76,22 miliar menjadi Rp258,10 miliar pada tahun 2019.

In line with the increasing revenues booked by port operations service segment, the profitability or gross profit recorded by this segment also increased by 36.62% or equal to Rp76.22 billion to Rp258.10 billion in 2019.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW



Pembahasan kinerja keuangan komprehensif disampaikan dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Transkontinental yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (EY).

Hasil audit Laporan Keuangan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2019 menghasilkan opini bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

The following discussion of comprehensive financial performance is presented with a reference to the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Trans Kontinental which ended on 31 December 2019 and 2018 and was audited by a Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja (EY).

The audit process of the PT Pertamina Trans Kontinental Financial Statements 2019 generated an opinion that the accompanying consolidated financial statements **has been presented fairly**, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. The Financial Statements is prepared according to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) applied in Indonesia.

ANALISIS POSISI KEUANGAN

Jumlah aset Perseroan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,73 triliun atau naik 6,30% dari tahun sebelumnya. Jumlah liabilitas Perseroan turut naik 0,19% menjadi Rp2,40 triliun pada tahun 2019.

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

In 2019, the Company booked total assets of Rp4.73 trillion or increased by 6.30% from previous year. Total liabilities also increased by 0.19% to Rp2.40 trillion in 2019.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Juta Rp Millions of Rp			
Aset Lancar Current Assets	17,51%	265.046	1.778.646	1.513.600	1.187.840
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	0,52%	15.297	2.954.877	2.939.580	2.699.512
Jumlah Aset Total Assets	6,30%	280.343	4.733.523	4.453.180	3.888.352
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	6,77%	85.712	1.351.807	1.266.095	1.250.799
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	(7,25%)	(81.231)	1.039.575	1.120.806	806.580
Jumlah Liabilitas Total Liability	0,19%	4.481	2.391.382	2.386.901	2.057.378
Ekuitas Equity	13,35%	275.862	2.342.141	2.066.279	1.830.973
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities & Equity	6,30%	280.343	4.733.523	4.453.180	3.888.352
Kurs Nilai Tukar Akhir Tahun Per 1 USD Exchange Rate per 1 USD	(4,01)	(580)	13.901,01	14.481,00	13.384,00

Aset

Jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4,73 triliun, meningkat 6,30% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,45 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset lancar Perusahaan sebesar 17,51% atau setara dengan Rp265,05 miliar.

Assets

As of December 31, 2019, the Company booked total assets of Rp4.73 trillion, increased by 6.30% if compared to Rp4.45 trillion in previous year. The increment was mainly driven by increasing current assets by 17.51% or equal to Rp265.05 billion booked by the Company.



dalam juta Rp | in millions of Rp

Aset Assets					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Nominal			
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	27,41%	153.690	714.498	560.808	390.956
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	(37,31%)	(350)	588	938	0
Piutang usaha Trade receivables	3,74%	11.209	311.114	299.905	565.531
Pihak berelasi Related parties	(31,42%)	(39.629)	86.504	126.133	507.749
Pihak ketiga Third parties	54,46%	144.360	409.445	265.085	57.782
Piutang usaha yang belum difakturkan Unbilled receivables	(9,66%)	(18.047)	168.697	186.744	125.595
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	127,63%	23.625	42.136	18.511	29.982
Persediaan Inventories	6,11%	1.425	24.745	23.320	320
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain Prepaid taxes - other taxes	127,63%	23.625	42.136	18.511	36.064
Uang muka dan biaya dibayar di muka Advances and prepayments	6,11%	1.425	24.745	23.320	39.356
Aset Lancar Current Assets	17,51%	265.046	1.778.646	1.513.600	1.187.840
Aset tetap Fixed assets	0,84%	22.970	2.750.120	2.727.150	2.448.601
Aset pajak tangguhan Finance lease receivables	(9,92%)	(3.696)	33.564	37.260	29.592
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	(14,67%)	(13.979)	81.301	95.280	148.816
Penyertaan saham Investment in shares	0,00%	0	598	598	603
Investasi pada ventura bersama Investment in a joint venture	32,72%	18.017	73.083	55.066	66.728
Taksiran pengembalian pajak Estimated tax refund	(41,03)	(9.159)	13.161	22.320	4.102
Aset lain-lain Other assets	60,02%	1.144	3.050	1.906	1.070
Aset pengampunan pajak Tax Amnesty Assets	-	-	-	-	1.000
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	0,52%	15.297	2.954.877	2.939.580	2.699.512
Jumlah Aset Total Assets	6,30%	280.343	4.733.523	4.453.180	3.888.352

*) reklasifikasi | reclassification

Aset Lancar

Aset lancar PTK tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,51% menjadi Rp1,78 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp1,51 triliun. Peningkatan ini didorong oleh naiknya kas dan setara kas serta naiknya piutang usaha khususnya dari pihak ketiga.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar perusahaan meningkat 0,52% atau sebesar Rp15,30 miliar dari Rp1,94 triliun pada tahu 2018 menjadi Rp2,96 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya aset tetap PTK serta naiknya investasi pada ventura bersama.

Current Assets

In 2019, PTK booked a growth of current assets by 17.51% to Rp1.78 trillion compared to Rp1.51 trillion in 2018. The growth was driven by increasing cash and cash equivalents and trade receivables primarily from third parties.

Non-current Assets

Non-current assets increased by 0.52% or Rp15.30 billion from Rp1.94 trillion in 2018 to Rp2.96 trillion in 2019. The increment was mainly contributed from increasing fixed assets booked by PTK and increasing investment in a joint venture.

Liabilitas

Hingga 31 Desember 2019, jumlah liabilitas Perusahaan mengalami sedikit kenaikan 0,19% menjadi Rp2,40 triliun. Liabilitas jangka pendek Perusahaan meningkat sebesar Rp85,72 miliar menjadi Rp1,35 triliun. Adapun liabilitas jangka panjang Perusahaan turun sebesar Rp85,71 miliar menjadi Rp1,04 triliun.

Liabilities

As of December 31, 2019, total liabilities was slightly increased by 0.19% to Rp2.40 trillion. The Company recorded an increase in current liabilities by Rp85.72 billion to Rp1.35 trillion. The Company's non-current liabilities decreased by Rp85.71 billion to Rp1.04 trillion.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Liabilita Liabilities					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Nominal			
Utang usaha Trade payables	44,23%	149.055	486.041	336.986	351.444
Pihak berelasi Related parties	52,30%	105.247	306.478	201.231	171.848
Pihak ketiga Third parties	32,27%	43.808	179.563	135.755	179.596
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	(8,97%)	(55.410)	562.353	617.763	502.909
Uang muka pelanggan Advances from customers	133,24%	37.022	64.808	27.786	93.736
Pihak berelasi Related parties	-	(4.144)	-	4.144	65.427
Pihak ketiga Third parties	174,12%	41.166	64.808	23.642	28.309
Utang pajak Taxes payable	1,84%	232	12.864	12.632	12.377
Pajak penghasilan Corporate income taxes	(23,18%)	(2.012)	6.667	8.679	1.786
Pajak lain-lain Other taxes	56,77%	2.244	6.197	3.953	10.591
Pinjaman jangka pendek Short term borrowings	-	25.516	25.516	-	-
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang Current portion of long-term borrowings	(26,10%)	(70.703)	200.225	270.928	269.130
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	6,77%	85.712	1.351.807	1.266.095	1.250.799
Pinjaman jangka panjang Long-term borrowings	(10,73%)	(105.535)	878.268	983.803	719.092
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefits obligation	17,74%	24.304	161.307	137.003	87.488
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	(7,25%)	(81.231)	1.039.575	1.120.806	806.580
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	0,19%	4.481	2.391.382	2.386.901	2.057.379

*) reklasifikasi | reclassification

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada akhir tahun 2019 sebesar Rp1,35 triliun, meningkat 6,77% atau sebesar Rp85,71 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan karena naiknya utang usaha yang cukup signifikan khususnya terhadap pihak berelasi sebesar 52,30% menjadi Rp306,48 miliar.

Current Liabilities

The Company booked current liabilities of Rp1.35 trillion by end of 2019, increased by 6.77% or Rp85.71 billion. The increment was mainly due to significant increase in trade payables, primarily with related parties by 52.30% to Rp306.48 billion.



Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan 7,25% dari Rp1,12 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp1,04 triliun pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan karena berkurangnya jumlah pinjaman jangka panjang Perseroan sebesar Rp105,53 miliar menjadi Rp878,27 miliar atas investasi pengadaan kapal. Namun terjadi peningkatan saldo pada liabilitas imbalan pascakerja.

Non-Current Liabilities

The Company booked a decrease in noncurrent liabilities by 7.25% from Rp1.12 trillion in 2018 to Rp1.04 trillion in 2019. The decrease was mainly due to decreasing total long-term loans by Rp105.53 billion to Rp878.27 billion from the ships procurement investment. However, there was an increasing balance in post-employment benefit obligation.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2,34 triliun atau naik 13,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya saldo laba Perusahaan tahun lalu dan tahun berjalan.

Equity

As of December 31, 2019, the Company booked total equity of Rp2.34 trillion or increased by 13.35% compared to previous year. The increment was driven by increasing retained earnings booked by the Company in previous and current years.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Ekuitas Equity					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017
	%	Nominal			
Modal saham Share capital	0,00%	0	693.709	693.709	693.709
Tambahan modal disetor Additional paid in capital Other comprehensive income	0,00%	0	3.000	3.000	3.000
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	(21,62%)	(19.136)	(107.656)	(88.520)	(44.510)
Saldo laba Retained earnings	20,23%	294.998	1.752.870	1.457.872	1.134.264
- Ditentukan penggunaannya Appropriated	0,00%	0	75.943	75.943	75.943
- Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	21,35%	294.998	1.676.927	1.381.929	1.058.321
Jumlah Ekuitas Total Equity	13,35%	275.862	2.342.141	2.066.279	1.830.973

ANALISIS LABA RUGI

Perseroan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 35,21% menjadi Rp2,77 triliun pada tahun 2019. Seiring dengan hal tersebut, laba tahun berjalan mengalami kenaikan 5,70% dari Rp279,09 miliar pada tahun 2018, menjadi Rp295,00 miliar pada tahun 2019. Adapun jumlah penghasilan komprehensif Perseroan turut tumbuh 17,24% menjadi Rp275,86 miliar pada tahun 2019.

PROFIT OR LOSS ANALYSIS

The Company recorded an increase in revenue of 35.21% to Rp2.77 trillion in 2019. Along with that, the profit of the year experienced an increase also of 5.70% from Rp279.09 billion in 2018 to Rp295.00 billion in 2019. As for the Company's comprehensive income also grew to 17.24% become Rp275.86 billion in 2019.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Nominal			
Pendapatan usaha Revenue	35,21	721.948	2.772.220	2.050.272	1.779.411
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(49,46)	(692.390)	(2.092.246)	(1.399.856)	(1.189.158)
Laba kotor Gross profit	4,54	29.558	679.974	650.416	448.031
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(25,96)	(59.381)	(288.144)	(228.763)	(207.046)
Keuntungan/(beban) lain-lain, bersih Other income/(expenses), net	185,70	76.499	35.303	(41.196)	(4.212)
Pendapatan keuangan Finance income	63,19	3.255	8.406	5.151	4.613
Beban keuangan Finance costs	(26,68)	(15.365)	(72.965)	(57.600)	(31.056)
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of a joint venture	96,36	14.920	30.403	15.483	25.551
Beban pajak final Final tax expenses	(12,56)	(2.100)	(18.816)	(16.716)	(3.351)
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	14,50	47.386	374.161	326.775	232.530
Pajak Kini Current Tax	(38,13)	(20.125)	(72.900)	(52.775)	(51.041)
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(192,01)	(12.753)	(6.111)	6.642	1.495
Penyesuaian tahun lalu Adjustment in respect of prior years	90,19	1.398	(152)	(1.550)	-
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	(66,02)	(31.480)	(79.163)	(47.683)	(49.546)
Laba tahun berjalan Profit for the year	5,70	15.906	294.998	279.092	182.984
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti Remeasurement of liabilities defined benefit plan	50,89	22.733	(21.942)	(44.675)	(18.201)
Pajak penghasilan terkait Related income tax	215,64	1.917	2.806	889	2.517
Jumlah rugi komprehensif lain setelah pajak Total other comprehensive loss net of tax	56,30	24.650	(19.136)	(43.786)	20.718
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	17,24	40.556	275.862	235.306	167.300
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	5,70	15.906	294.998	279.092	182.984
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada Total comprehensive income attributable to:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	17,24	40.556	275.862	235.306	167.300

Pendapatan Usaha

Pada tahun 2019, pendapatan usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp2,77 triliun. Jumlah tersebut meningkat 35,21% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp2,05 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh

Revenue

In 2019, the Company booked revenues of Rp2.77 trillion. The amount increased by 35.21% compared to Rp2.05 trillion in 2018. The increment was mainly driven by increasing business diversification service by 80.25% or



meningkatnya jasa diversifikasi usaha yang tumbuh 80,25% atau setara dengan Rp615,47 miliar dari Rp766,97 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1,38 triliun pada tahun 2019.

Laba Kotor dan Beban Pokok Pendapatan

Perusahaan mencatat kenaikan laba kotor sebesar 4,54% atau setara dengan Rp29,56 miliar dari Rp650,42 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp679,97 miliar pada tahun 2019. Peningkatan ini tak lepas dari tumbuhnya pendapatan usaha Perseroan.

Beriringan dengan hal tersebut, beban pokok pendapatan turut meningkat 49,46% atau setara dengan Rp692,39 miliar menjadi Rp2,09 miliar pada tahun 2019.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan usaha Perusahaan. Perusahaan mencatatkan kenaikan laba tahun berjalan sebesar 5,70% pada dari Rp279,09 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp295,00 miliar pada tahun 2019.

equal to Rp615.47 billion from Rp766.97 billion in 2018 to Rp1.38 trillion in 2019.

Cost of Revenue

The cost of revenue increased by 4.54% or equal to Rp29.56 billion from Rp650.42 billion in 2018 to Rp679.97 billion in 2019. The increment was related to the Company's revenues growth.

In line with this realization, cost of revenues also increased by 49.46% or equal to Rp692.39 billion to Rp2.09 billion in 2019.

Profit for the Year

Profit for the year increased along with the revenues growth booked by the Company. The Company recorded profit for the year growth by 5.70% from Rp279.09 billion in 2018 to Rp295.00 billion in 2019.

ANALISIS ARUS KAS

Kas dan setara kas PTK pada akhir tahun 2019 meningkat 27,41% dari Rp560,81 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp714,50 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh arus kas dari aktivitas operasi Perusahaan yang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan bisnis perusahaan.

CASH FLOW ANALYSIS

PTK booked an increase of cash and cash equivalents at end of 2019 by 27.41% from Rp560.81 billion in 2018 to Rp714.50 billion. The increment was mainly contributed from cash flows from operating activities that was in line with the Company's business growth.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flow					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017
	%	Juta Rp Millions of Rp			
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	51,80	925.200	2.711.218	1.786.018	1.693.790
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi Cash paid to suppliers for operating expenses	(60,29)	(754.392)	(2.005.579)	(1.251.187)	(1.257.022)
Pembayaran kepada karyawan Cash payments to employees	21,83	57.100	(204.493)	(261.593)	(178.041)
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan Payment of corporate income tax	(18,15)	(11.359)	(73.951)	(62.592)	(72.523)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided from operating activities	102,80	216.549	427.195	210.646	186.204

dalam juta Rp | in millions of Rp

Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Statement of Cash Flow					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017
	%	Juta Rp Millions of Rp			
Penerimaan dividen dari ventura bersama Dividends received from joint venture	(55,05)	(15.172)	12.386	27.558	19.959
Penerimaan piutang pembiayaan Received from lease receivables	(45,00)	(24.170)	29.537	53.707	-
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	52,88	193.870	(172.719)	(366.589)	(464.682)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used for investing activities	54,16	154.528	(130.796)	(285.324)	(444.723)
Penerimaan pinjaman Proceeds from borrowings	(61,27)	(360.111)	227.653	587.764	591.739
Pembayaran pinjaman Payment of borrowings	3,05	11.276	(357.935)	(369.211)	(349.670)
Arus kas bersih (digunakan)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash flows (used)/provided from financing activities	(159,61)	(348.835)	(130.282)	218.553	242.069
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	(147,84)	(38.404)	(12.427)	25.977	(1.956)
Kenaikan neto kas dan setara kas Net increase in cash and cash equivalents	(9,52)	(16.162)	153.690	169.852	(18.406)
Kas dan setara kas awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	43,45	169.852	560.808	390.956	409.362
Kas dan setara kas akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	27,41	153.690	714.498	560.808	409.362

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2019 sebesar Rp427,20 miliar atau naik 102,80% dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp210,65 miliar. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan.

Cash Flow from Operating Activities

Net cash flows provided from operating activities amounted Rp427.20 billion in 2019 or increased by 102.80% compared to Rp210.65 billion in 2018. The increment was mainly contributed from cash receipts from customers.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 54,16% dari Rp285,32 miliar pada tahun 2018 menjadi hanya Rp130,28 miliar pada tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan pengeluaran untuk akuisisi aset tetap yang dilakukan oleh Perusahaan tahun 2019 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash flows used for investing activities decreased by 54.16% from Rp285.32 billion in 2018 to only Rp130.28 billion in 2019. The decrease was mainly driven by payment for acquisition of fixed assets done by the Company in 2019 that was lower than previous year.



Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 perusahaan menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp130,28 miliar. Sedangkan tahun 2018 perusahaan memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp218,53 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan pinjaman jika dibandingkan dengan tahun lalu, serta meningkatnya pembayaran pinjaman dibandingkan dengan tahun lalu.

Cash Flow from Financing Activities

Net cash flows provided from financing activities decreased in 2019 if compared to 2018. In 2019, the Company booked net cash used for financing activities of Rp130.28 billion. Meanwhile, in 2018, the Company booked net cash flows provided from financing activities of Rp218.53 billion. The decrease was mainly due to decreasing borrowings if compared to previous year, and increasing loans payment if compared to previous year.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Berikut adalah rasio keuangan Perusahaan dalam tiga tahun terakhir:

FINANCIAL RATIO ANALYSIS

The Company's financial ratio for the last three years is as follows:

Rasio Keuangan Financial Ratios						
Uraian Description	Satuan Unit	2019	2018	2017*	2016**	2015
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios						
Rasio Kas Cash Ratio	%	52,90%	44,36%	31,25%	37,68%	80,03%
Rasio Lancar Current Ratio	%	131,58%	119,55%	91,39%	104,23%	163,58%
Rasio Solvabilitas Solvability Ratios						
Rasio Jumlah Modal Sendiri terhadap Total Aset Equity to Total Assets	%	49,48%	46,40%	47,09%	48,70%	55,23%
Kolektibilitas Piutang Collection Period						
Rata-rata Periode Penagihan Piutang Average Collection Periods (ACP)	hari days	84,59 hari	93,89 hari	98,44 hari	130,61 hari	108,55 hari
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios						
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity	%	14,41%	15,62%	11,10%	10,89%	18,35%
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment	%	13,57%	13,42%	10,85%	12,13%	15,09%
Marjin Laba Operasi (OPM) Operating Profit Marjin (OPM)	%	14,13%	20,57%	13,54%	14,30%	18,16%
Marjin Laba Bersih (NPM) Net Profit Marjin (NPM)	%	10,64%	13,61%	10,28%	9,00%	14,29%
Rasio Aktivitas Activity Ratios						
Perputaran Persediaan Inventory Turn Over (ITO)	hari days	0,00 hari	0,00 hari	0,07 hari	0,03 hari	0,04 hari
Perputaran Jumlah Aset Total Assets Turn Over (TATO)	%	60,14%	46,98%	48,92%	56,31%	61,41%

*) reklasifikasi | reclassification

**) disajikan kembali | as restated

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Pada tahun 2019 Perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat rasio lancar dan rasio kas. Tingkat likuiditas yang baik mencerminkan perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini juga mencerminkan perusahaan dapat menyelenggarakan kegiatan operasional harian dengan baik.

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka pendek dapat dilihat antara lain dari rasio lancar yang naik dari 119,55% pada tahun 2018 menjadi 131,58% pada tahun 2019. Kemudian rasio kas yang meningkat dari 44,36% pada tahun 2018 menjadi 52,90% pada tahun 2019. Hal ini tak lepas dari keberhasilan manajemen dalam menjaga stabilitas utang jangka pendek melalui pengelolaan aset lancar maupun kas Perusahaan untuk memastikan terjaminnya pembayaran utang yang akan jatuh tempo 12 bulan ke depan.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Kemampuan Perusahaan membayar utang jangka panjang tercermin pada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas Perusahaan terdiri dari rasio total modal sendiri terhadap total aset. Pada tahun 2019 rasio jumlah modal sendiri terhadap total aset Perusahaan meningkat dari 46,40% pada tahun 2018 menjadi 49,48%. Peningkatan rasio ini menunjukkan kemampuan membayar utang jangka panjang Perusahaan membaik.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perusahaan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang terdiri dari *average collection period* (rata-rata periode penagihan). Rata-rata periode penagihan piutang Perusahaan pada tahun 2019 adalah sebanyak 84,59 hari, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebanyak 98,89 hari.

Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level

Short-Term Solvency

In 2019, the Company has a fairly good liquidity level. This is indicated from current ratio and cash ratio. The good liquidity ratio reflects the Company not experiencing any issue to repay its short-term liabilities. This also reflects the Company has the capability to run its daily operational activities properly.

The Company's capability to pay short-term loans is indicated namely from current ratio that increased from 119.55% in 2018 to 131.58% in 2019. Next, cash ratio increased from 44.36% in 2018 to 52.90% in 2019. This is related from the Company's success in maintaining long-term loans stability through current assets and cash management to ensure the guaranteed loans payment with current maturity within the next 12 months.

Long-Term Solvency

The Company's capability to repay long-term loans is reflected from solvency ratio. The Company's solvency ratio consists of debt to assets ratio. In 2019, the Company's booked debt to assets ratio of 46.40% in 2018 to 49.48%. The increasing ratio indicated the Company has better capability to repay its long-term loans.

Receivables Collectibility

Receivables collectability level is applied to measure time period that is required by the Company to collect the receivables into cash since completion of the project/service. The receivables collectibility level consists of average collection period. The Company booked average collection period of 84.59 days in 2019, faster than 98.89 days recorded in 2018.



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal menggambarkan pembiayaan permanen yang terdiri atas utang dan modal sendiri. Perusahaan harus berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal.

Struktur modal Perusahaan pada 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICIES

Capital Structure illustrates permanent financing comprises debts and equity portion. The Company should strive for owning alternative efficient financing, one of which is through optimized capital structure.

The Company's capital structure for the last 3 (three) years is presented in table below:

dalam juta Rp, kecuali dinyatakan lain | in millions of Rp, unless otherwise stated

Struktur Modal Capital Structure						
Uraian Description	2019	%	2018	%	2017	%
Liabilitas Liabilities	2.391.382	50,52%	2.386.901	53,60%	2.057.379	52,91%
Ekuitas Equity	2.342.141	49,48%	2.066.279	46,40%	1.830.973	47,09%
Aset Assets	4.733.523	100,00%	4.453.180	100,00%	3.888.352	100,00%

Struktur modal perusahaan semakin kuat seiring dengan peningkatan aset yang dibiayai oleh ekuitas. Hingga akhir tahu 2019 komposisi aset Perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas sebesar 49,48%, meningkat dari semula 46,40% pada tahun 2018.

The capital structure is stronger in line with increasing assets backed by equity. As end of 2019, composition of the Company's assets backed by equity is 49.48%, increased from previously was 46.40% in 2018.

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan terus berupaya mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis, profitabilitas, serta mempertahankan kepercayaan investor, deposan, pelanggan, dan pasar.

Capital Structure Policy

The Company continued to maintain solid capital position to support business growth, profitability, as well as to uphold the trust from investors, depositors, customers, and market.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PTK berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak.

CONTRIBUTIONS TO THE COUNTRY

Responsibility on tax payment obligation becomes a reflection of nationalism in taxation field for the national development. Therefore, PTK is committed to fulfill the obligation to pay taxes, as a taxpayer and as a tax collector.



Tahun 2019, PTK sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan. Jumlah setoran PPh Badan di tahun 2019 sebesar Rp65,40 miliar atau meningkat 20,37% dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan kewajiban ini seiring dengan pertumbuhan Perusahaan.

In 2019, as a Taxpayer, PTK has contributed the Company in fulfilling the Corporate Income Tax obligations. The corporate income tax payments in 2019 amounted Rp65.40 billion, increased by 20.37% compared to 2018. The increase in liabilities was in line with the Company's growth.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Kontribusi Pajak PTK PTK Tax Contribution (Corporate Income Tax)					
Uraian Description	YoY 2018-2019		2019	2018	2017*
	%	Juta Rp Millions of Rp			
Pajak Kini Current Tax	(38,13)	(20.125)	(72.900)	(52.775)	(51.041)

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Key Performance Indikator (KPI) PTK sesuai Kontrak Manajemen antara Direksi dan Komisaris Perusahaan dengan Pemegang Saham menetapkan 3 Perspektif sebagai berikut:

1. Perspektif finansial
2. Perspektif Operasional
3. Perspektif Pertumbuhan dan Tata Kelola.

Realisasi KPI tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini:

KEY PERFORMANCE INDICATOR AND COMPANY SOUNDNESS LEVEL

Based on Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners with the Shareholders, PTK Key Performance Indicators (KPI) stipulated 3 Perspectives, as follows:

1. Financial Perspective
2. Operational Perspective
3. Growth and Governance Perspective

KPI realization in 2019 is explained below:



Nama KPI	Bobot	Satuan	2019	Target TW IV 2019	Realisasi TW IV 2019	% Realisasi thd Target TW IV 2019	Adjusted Performance (%)	Weighted Performance (%)
Group KPIs	10							10,34
1 EBITDA AP LSCI	100	Juta USD	120,87	120,87	125,00	103,42	103,42	103,42
	100							
Division KPIs	90							87,78
Financial	15							16,03
1 EBITDA	45	Juta USD	42,94	42,94	44,83	104,40	104,40	46,98
2 Cost Per Commission Day	25	USD	2019	2019	1798	110,96	110,96	27,74
3 Collection Period								
a) Pertamina	15	Hari	90	90	90	100,20	100,20	15,03
b) Non-Pertamina	15	Hari	86	86	74	114,00	114,00	17,10
	100							
Operational Excellence	50							49,14
1 Follow-up HSSE Assessment Recommendation	10	%	100	100	68,47	68,47	68,47	6,85
2 HSSE Excellence - LTIR Pertamina Group	10	Rate	0,1	0,1	0,03	170,00	105,00	10,50
3 Average Commission Days Kapal Milik	30	Hari	355	355	350	98,58	98,58	29,57
4 % Realisasi Operation per Commision Days	30	%	95	95	96	101,17	101,17	30,35
5 Transportation Losses (R2)	20	%	-0,07	-0,07	0	200,00	105,00	21,00
	100							
Growth & Governance	35							32,37
1 Strategic Initiatives	20	%	100	100	100	105,00	105,00	21,00
2 Customer Satisfaction Index	10	Skala Likert	3,91	3,91	3,91	100,00	100,00	10,00
3 Realisasi Investasi								
a) Anggaran Biaya Investasi	20	%	90	90	75,69	84,10	84,10	16,82
b) Progress Fisik	20	%	100	100	70,39	70,39	70,39	14,08
4 KSI (Knowledge, Standardization, & Innovation)	10	%	95	95	100	105,26	105,00	10,50
5 Risk Management Implementation	10	%	100	100	100	105,00	105,00	10,50
6 GCG Score	10	%	81	81	77,73	95,96	95,96	9,60
	100							
TOTAL KPI PERFORMANCE							98,12	98,12

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Total Nilai Kinerja Perusahaan pada tahun 2019 sebesar 91,00 dengan klasifikasi SEHAT (AA) lebih rendah dari RKAP yang sebesar 96,00 (AAA). Hal ini terutama disebabkan karena nilai kinerja pertumbuhan dan operasi tahun 2019 yang tercatat lebih rendah dibandingkan dengan RKAP.

Berikut gambaran penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari aspek yang dinilai:

Company Soundness Level

The Total Value of the Company's Performance in 2019 was 91,00 with the classification of HEALTHY (AA), lower from the RKAP of 96,00 (AAA). This was due to the recorded value of growth and operating performance in 2019 were lowest compared to RKAP.

The following is a view on the Company's Soundness Level assessment from the aspects assessed:

Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP		Realisasi 2019 2019 Realization	
	Pencapaian Achievement	Nilai Value	Pencapaian Achievement	Nilai Value
I. Kinerja Keuangan Financial Performance				
Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity (ROE)	15,52%	20,00	14,41%	20,00
Imbalan Investasi (ROI) Return on Investment	13,84%	15,00	13,57%	15,00
Marjin Laba Operasi (OPM) Operating Profit Margin (OPM)	16,10%	3,00	14,13%	3,00
Marjin Laba Bersih (NPM) Net Profit Margin (NPM)	11,77%	3,00	10,64%	3,00
Rasio Kas Cash Ratio	29,51%	4,00	52,90%	5,00
Rasio Lancar Current Ratio	96,07%	3,00	131,58%	5,00
Periode Penagihan Piutang Collection Period (CP)	85,53 hari days	2,00	84,59 hari days	2,00
Perputaran Persediaan Inventory Turn Over (ITO)	0,00 hari days	0,00	0,00 hari days	0,00
Perputaran Total Aset Total Assets Turn Over (TATO)	58,70%	3,00	60,14%	3,00
Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Ratio of Total Equity of Acompany to Total Assets	47,18%	7,00	49,48%	7,00
Time Interest Earned Ratio (TIER)	8,58	3,00	8,69	3,00
Nilai Kinerja Keuangan (NKK) Value of Financial Performance	69,00		72,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Keuangan Classification of Financial Performance	SEHAT HEALTHY		SEHAT HEALTHY	
II. Kinerja Pertumbuhan Growth Performance				
Aset Productivity Growth (ASPG)	0,33%	1,00	(15,91%)	0,00
Sales Growth (SALG)	29,31%	2,00	35,21%	2,00
Net Profit Margin Growth (NPMG)	(10,24%)	0,00	(21,83%)	0,00
Sales to Total Assets Growth (STAG)	21,28%	3,00	27,20%	2,00
Net Profit Growth (NPG)	16,07%	5,00	5,70%	1,00
Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP) Value of Growth Performance	11,00		5,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Pertumbuhan Classification Level of Growth Performance	TUMBUH SEDANG MEDIUM GROWTH		TUMBUH SEDANG MEDIUM GROWTH	
III. Kinerja Operasi Operational Performance				
Commission Days	100,00%	3,00	97,03%	1,00
HSSE	100,00%	3,00	100,00%	3,00
Nilai Kinerja Operasi (NKO) Value of Operational Performance	6,00		4,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Operasi Classification Level of Operational Performance	BAIK GOOD		BAIK GOOD	
Kinerja Administrasi Administrative Performance				
Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan Company's Monthly Financial Reports	7 hari kalender 7 calendar days	2,00	7 hari kalender 7 calendar days	2,00
Laporan Manajemen Perusahaan Bulanan Company's Monthly Management Report	≤ 16 hari kalender 16 calendar days	2,00	≤ 16 hari kalender 16 calendar days	2,00
Laporan Keuangan Tahunan Audited Audited Annual Financial Report	April April	3,00	Januari January	3,00
Rancangan RKAP RKAP Draft	Juni June	3,00	Juli July	3,00
Nilai Kinerja Administrasi (NKA) Value of Administrative Performance	10,00		10,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Administrasi Classification Level of Administrative Performance	TERTIB ORDERLY		TERTIB ORDERLY	
IV. Penilaian Tingkat Kinerja Perusahaan Assessment of Company's Performance Level				
Kinerja Keuangan Financial Performance	69,00		72,00	
Kinerja Pertumbuhan Growth Performance	11,00		5,00	
Kinerja Operasional Operational Performance	6,00		4,00	
Kinerja Administrasi Administration Performance	10,00		10,00	
Total Nilai Kinerja Perusahaan Total value of Company Performance	96,00		91,00	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Perusahaan Classification Level of Company Performance	AAA SEHAT AAA HEALTHY		AA SEHAT AA HEALTHY	

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019 SERTA PROYEKSI TAHUN 2020

Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Operasional

Beberapa indikator operasional menunjukkan pencapaian melampaui target 2019 seperti jumlah operation days, *Contract Of Affreightment* (COA), serta diversifikasi usaha. Adapun indikator yang belum tercapai adalah jumlah *commission days*, call keagenan, serta *charter & brokerage*. Perusahaan juga telah menetapkan target untuk tahun mendatang sebagai berikut:

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION IN 2019 AND PROJECTION 2020

Comparison between Target, Realization, and Operational Projection

Some operational indicators indicate achievement exceeding the 2019 target such as total operation days, contract of affreightment (COA) and business diversification. The indicators that are below the target include total commission days, agency calls, and charter & brokerage. The Company also has stipulated the target for the next year, as follows:

dalam ribuan Rp | in thousands of Rp

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Operasional Comparisons between Target, Realization, and Operational Projections					
Uraian Description	Satuan Unit	Target 2020 2020 Target	Pencapaian 2019 2019 Achievement	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target
Commission days	hari days	23.143	97,02%	23.015	23.720
Operation days	hari days	22.063	107,58%	22.760	21.156
Call Keagenan:	call	1.857	98,66%	2.361	2.393
Charter & Brokerage	hari days	98.927	86,15%	134,48	156,10
Contract of Affreightment (COA)	KL	93.867	103,22%	99,87	96,75
Diversifikasi Usaha	miliar billions	1.440,53	109,64%	1.382,44	1.260,91

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Keuangan

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan

Pada tahun 2019 jumlah aset Perseroan terealisasi sebesar Rp4,73 triliun atau 93,50% terhadap target yang telah ditetapkan sebesar Rp5,03 triliun. Jumlah liabilitas Perseroan sebesar Rp2,39 triliun atau 89,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,65 triliun. Adapun jumlah ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp2,34 triliun atau 98,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,39 triliun. Adapun Perusahaan telah menetapkan target untuk satu tahun mendatang sebagai berikut:

Comparisons between Targets, Realization, and Financial Projections

Comparisons between Targets, Realization, and Financial Position Projections

In 2019, the Company recorded total assets realization of Rp4.73 trillion or 93.50% compared to Rp5.03 trillion targeted. The Company booked total liabilities of Rp2.39 trillion or 89.43% from Rp2.65 trillion targeted. The Company booked total equity of Rp2.34 trillion or 98.05% from Rp2.39 trillion targeted. The Company has set the targets for the next one year, as follows:

dalam ribuan Rp | in thousands of Rp

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan
Comparisons between Target, Realization, and Financial Position Projections

Uraian Description	Target 2020	Pencapaian 2019 2019 Achievement	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target
Jumlah Aset Total Assets	6.591.107	93,50%	4.733.523	5.030.743
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.872.916	89,43%	2.391.382	2.648.982
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.718.191	98,05%	2.342.141	2.381.761

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi

Pada tahun 2019, pendapatan usaha Perseroan tercapai 101,65% atau terealisasi Rp2,77 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp2,73 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan tercapai 92,90% atau terealisasi Rp294,10 miliar. Adapun Perseroan telah menetapkan target satu tahun mendatang untuk pendapatan usaha sebesar Rp3,08 triliun dan laba tahun berjalan sebesar Rp375,44 miliar.

Comparisons between Targets, Realization, and Profit or Loss Projections

In 2019, the Company booked revenues realization of 101.65% or Rp2.77 trillion from Rp2.73 trillion targeted. Meanwhile, profit for the year achieved 92.90% or Rp294.10 billion realization. The Company has set the targets for the next one year for revenues to achieve Rp3.08 trillion and profit for the year to achieve Rp375.44 billion.

dalam juta Rp | in millions of Rp

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi
Comparisons between Target, Realization, and Profit or Loss Projections

Uraian Description	Target 2020 2020 Target	Pencapaian 2019 2019 Achievement	Realisasi 2019 2019 Realization	Target 2019 2019 Target
Pendapatan usaha Revenue	3.079.789	101,65%	2.772.220	2.727.096
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(2.205.725)	97,13%	(2.092.246)	(2.033.844)
Laba kotor Gross profit	874.063	98,08%	679.974	693.252
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	451.668	97,43%	374.161	384.035
Beban pajak penghasilan Income tax expenses	(76.232)	74,42%	(79.163)	(63.040)
Laba tahun berjalan Profit for the year	375.436	91,90%	294.998	320.996



Perbandingan antara Target, Realisasi, serta Proyeksi Pemasaran

1. PTK telah berhasil membangun Harbour Tug Pertama di Indonesia yaitu Transko Rajawali yang menggunakan bahan bakar *Dual Fuel* yaitu solar dan LNG yang ramah lingkungan dan di operasikan di PT Perta Arun Gas dengan kontrak selama 12 tahun.
2. Tahun 2019 PTK telah berhasil menambah armada kapal milik untuk mensupport Armada kapal sarana pelabuhan *Harbour Tug* dan *Mooring Boat Phase 1* dan 2 untuk memenuhi kebutuhan Marine Pertamina: 10 unit Harbour Tug dan 29 unit Mooring Boat.
3. Kapal milik jenis tanker telah terutilisasi di Pertamina Shipping sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) unit kapal dan 1 (satu) unit kapal terutilisasi di PT Pertamina International Shipping:

Pertamina Shipping

- a. Small I (1500 – 3500 KL) sebanyak 4 (empat) unit kapal;
- b. Small II (6500 KL) sebanyak 3 (Tiga) unit kapal; dan
- c. Asphalt Tanker sebanyak 1 (satu) unit kapal.

PT Pertamina International Shipping:

Small I (3500 KL) sebanyak 1 (satu) unit

4. Penggunaan *Plan Maintenance System & Fleet Management* Peningkatan performance kapal dengan peningkatan
5. Pencapaian Pemasaran kapal dengan target *operation days / commission days* sebesar 95%.

Comparison between Target, Realization, and Marketing Projection

1. PTK has successfully build the First Harbor Tug in Indonesia, that is the Rajawali Transko which consumes Dual Fuel, an eco-friendly diesel and LNG and is operated at PT Perta Arun Gas with a 12-years contract.
2. In 2019 PTK has successfully added own fleet to support the fleet of Harbor Tug and Mooring Boat facilities Phase 1 and 2 to fulfil the demands from Marine Pertamina: 10 units of Harbor Tug and 29 units of Mooring Boat.
3. Own-vessels in form of tanker type has been utilized at Pertamina Shipping as of 2019, with 8 (eight) ships and 1 (one) unit of the utilized ship at PT Pertamina International Shipping:

Pertamina Shipping

- a. Small I (1500 - 3500 KL) of 4 (four) vessels;
- b. Small II (6500 KL) of 3 (three) vessels; and
- c. Asphalt Tanker for 1 (one) unit vessels.

PT Pertamina International Shipping:

Small I (3500 KL) of 1 (one) unit

4. Use of Plan Maintenance System & Fleet Management Increased ship performance with improvements
5. Achievement of ship marketing with a target to achieve 95% operation days / commission days.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENT ON CAPITAL EXPENDITURE INVESTMENT

Sepanjang 2019, Perusahaan tidak melakukan ikatan material atas investasi barang modal. Dengan demikian, pembahasan ini tidak dapat mengungkapkan nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi & langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Throguhout 2019, the Company did not engage in any material commitment on capital expenditure. Therefore, this discussion does not disclose name of the party in the commitment, purpose of the commitment, source of funds expected to fulfil the commitment, denominated currency & the hedging plan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

SUBSEQUENT MATERIAL INFORMATION AND FACT AFTER ACCOUNTANT REPORTING DATE

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

There is no subsequent material information and fact after accountant reporting date.



ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT

PTK berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan bisnis dengan terus tumbuh dan meningkatkan kinerja operasi dan layanan. Dengan menganalisa daya tarik pasar dan daya saing industri, Pertamina Trans Kontinental telah melakukan analisa *five forces of potters* dengan hasil sebagai berikut:

PTK is committed to maintain our business continuity by continuously growing and improving our operational and service performance. By analysing market appetite and industry competitiveness, Pertamina Trans Kontinental has done five forces of potters analysis, as follows:

HAMBATAN BAGI PENDATANG BARU

Beberapa aspek yang diperlukan dalam menentukan kekuatan suatu produk untuk dapat bersaing dalam bisnis jasa pelayaran dan kegiatan maritim yaitu modal yang besar, SDM dengan keahlian khusus serta ketatnya persyaratan keselamatan dan keamanan yang diregulasi dan ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga internasional yang terkait. Bagi pendatang baru dalam bisnis ini tentunya aspek diatas menjadi hambatan yang cukup besar sehingga tidak banyak perusahaan sejenis yang muncul sebagai pendatang baru. Tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak ada penambahan secara signifikan dalam jumlah perusahaan pesaing baru sehingga persaingan tetap bersifat moderat.

BARRIERS FOR NEW ENTRANTS

Some aspects that are required in determining the strength of a product to be able to compete in the shipping service business and maritime activities are large capital, human resources with special expertise and strict safety and security requirements that are regulated and determined by the government and related international institutions. For newcomers in this business, of course, the above aspects become a significant issues thereby only few similar companies emerge as new entrants. 2019 shows that there is no significant increase in the number of new competitor companies resulting a fairly moderate competition.

DAYA TAWAR PEMBELI

Pemasok yang menunjang kegiatan operasional Perusahaan antara lain adalah penyedia/mitra kapal *back-to-Back* untuk kegiatan *charter brokerage*, galangan kapal/*shipyard*, pemasok BBM dan oli kapal, penyedia *sparepart*, penyedia crew kapal. Daya tawar pemasok relatif moderat hal ini disebabkan antara lain:

BARGAINING POWER OF CONSUMERS

Suppliers who support the Company's operational activities including the back-to-back vessels/partners for brokerage charter activities, dock yard/shipyards, fuel and ship oil suppliers, spare parts providers, ship crew providers. The bargaining power of suppliers is relatively moderate due to:

Daya tawar mitra penyedia kapal *back-to-Back* relatif moderat, Perusahaan menjalin jaringan kerjasama dengan perusahaan pelayaran dengan prinsip saling menguntungkan.

The bargaining power of back-to-back ship providers is relatively moderate, the Company has established a network of cooperation with shipping companies on the principle of mutual benefit.

Terdapat beberapa *sparepart* kapal yang memiliki spesifikasi khusus yang hanya diproduksi oleh pemasok tertentu namun terdapat barang sejenis sebagai substitusi.

There are some ship spare parts that have special specifications which are only produced by certain suppliers but there are similar goods as substitutes. The routine

Kebutuhan rutin kapal seperti bahan bakar, *material deck*, oli, cat, dan lain-lain jumlah pemasok besar dengan harga bersaing.

Untuk penyedia galangan kapal, reputasi, pengalaman kerja, kemampuan teknis, memiliki nilai lebih namun sehubungan jumlah penyedia galangan mencukupi, harga yang ditawarkan cukup kompetitif. Penyedia crew kapal, dalam hal ini perusahaan melakukan perekrutan sendiri untuk level perwira, sementara untuk level crew lainnya perusahaan menunjuk PKG sebagai penyedia jasanya. Daya tawar PKG dalam hal ini moderat, walaupun perusahaan tidak menunjuk perusahaan lain dalam penyediaan crew akan tetapi perusahaan juga melakukan perekrutan crew secara mandiri.

needs of ships such as fuel, deck material, oil, paint, etc. a large number of suppliers at competitive prices.

For the dock yard providers, reputation, work experience, technical ability, has more value, but with respect to the number of shipyard providers, the price offered is quite competitive. Providers of ship crews, in this case the Company conducted self-recruitment for officer level, while for other crew levels the Company has appointed PKG as the service provider. The bargaining power of PKG in this case is moderate, although the Company does not appoint other companies to hire crew, whilst the company also recruits the crew independently.

HAMBATAN PRODUK/JASA PENGANGGANTI

Dalam bisnis pelayaran dan maritime secara umum, PTK memiliki keunggulan dimana produk dan jasa yang ditawarkan bersifat khusus dan hal ini menjadikan tingkat persaingan pada tahun 2019 berlangsung secara moderat.

THREAT OF SUBSTITUTE PRODUCTS/SERVICES

In the general shipping line and maritime service, PTK holds competitive advantages where the offered products and services are specific and this also bring a moderate competition level throughout 2019.

DAYA TAWAR PEMASOK

Berkaitan dengan daya tawar pembeli, tentunya jika jumlah pemasok yang menyediakan bahan baku yang perusahaan butuhkan hanya sedikit, maka pemasok akan memonopoli bahan baku dan mematok harga tinggi yang dapat merugikan perusahaan. Pada tahun 2019 pemasok yang menunjang kegiatan operasional perusahaan adalah penyedia/mitra kapal *back-to-Back* untuk kegiatan *charter brokerage*; galangan kapal/*shipyard*; pemasok bbm dan oli kapal; penyedia *sparepart*, penyedia *crew* kapal.

Pemasok untuk tahun 2019 bersifat moderat dikarenakan perusahaan menjalin kerjasama dengan perusahaan – perusahaan pelayaran yang dapat menyediakan kapal untuk kebutuhan *back-to-Back*. Pemasok suku cadang untuk kapal masih memiliki spesifikasi khusus yang hanya diproduksi pemasok tertentu sehingga PTK masih berusaha untuk mendapatkan barang sejenis sehingga mendapat harga yang lebih efektif dari sebelumnya.

BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

Related to the buyers' bargaining power, only few suppliers provide the raw materials required by small companies, where the suppliers will monopolize the raw materials and set high prices that may threaten the Company. In 2019, the suppliers who support the company's operations are back-to-back vessels/ship suppliers for brokerage charter activities; dock yard/shipyard; oil fuel and vessels oil suppliers; parts provider, ship crew provider.

In 2019, the suppliers will have a moderate impact as the Company will engage in cooperation with shipping companies with capability to supply the vessels for back-to-back needs. The vessels spare parts suppliers will still have special specifications that are only manufactured for special suppliers where PTK still attempts to acquire similar items to have more effective price than before.



Sedangkan untuk kebutuhan rutin kapal seperti bahan bakar, material *deck*, oli, cat dan yang lainnya bersifat moderatif karena PTK memiliki banyak pilihan pemasok untuk barang tersebut. Dalam hal galangan, pemasok masih bersifat moderat karena jumlah penyedia galangan kapal dalam negeri masih mencukupi sehingga PTK mengacu pada kemampuan teknis dan harga dalam memilih galangan untuk bekerjasama. Dan terkait penyediaan awak kapal, PTK melakukan perekrutan secara mandiri untuk level perwira dan untuk level *crew* lainnya PTK menunjuk anak perusahaan PKG sebagai penyedia jasanya. Tetapi daya tawar PKG bersifat moderat karena PTK juga melakukan perekrutan *crew* secara mandiri.

In terms of regular vessels requirements such as fuel, deck material, oil, paint and others, there are moderate as PTK has range of suppliers preference for these items. With regards to the dock yard, the suppliers are also moderate as number of domestic dock yard providers is considered still sufficient thereby PTK considers technical and price requirements in selecting the partner dock yards. Next, related to the ship crew supply, PTK has conducted an autonomous recruitment for officers level and PTK has appointed PKG, our subsidiary, as service providers for other crew levels recruitment. However, bargaining power of PKG is moderate as PTK also recruits its crew independently.

PERSAINGAN PASAR DENGAN KOMPETITOR

Bisnis kapal penunjang kegiatan offshore, angkutan migas dan kegiatan maritim

Karakteristik pasar untuk produk dan jasa perusahaan yaitu penunjang kegiatan offshore, angkutan migas dan kapal penunjang kegiatan maritim adalah oligopoli ditandai dengan terbatasnya jumlah perusahaan sejenis yang beraktivitas dalam industri minyak dan gas.

Persaingan dalam industri ini ditentukan oleh penggunaan teknologi di atas kapal, kesesuaian dengan standar keselamatan, kesehatan dan lindung lingkungan terbaik, kehandalan dan efisiensi bahan bakar pada kapal, kesesuaian spesifikasi kapal dengan kebutuhan Customer dan ditentukan jumlah permintaan dan ketersediaan kapal pada saat dibutuhkan. Sehingga tingkat persaingan bersifat moderat.

Persaingan Pasar Industri Jasa Maritim

Keagenan tanker dan pengelolaan administrasi pelabuhan khusus Karakteristik pasar bersifat monopoli karena adanya penunjukan khusus dari Pertamina selaku induk Perusahaan. Kegiatan jasa maritim lainnya yaitu keagenan umum, *freight forwarding*, *custom clearance*, *bunker agent*, pengelolaan pelabuhan dan pergudangan, penyedia air

MARKET COMPETITION WITH THE COMPETITORS

Supporting vessels for offshore, oil and gas transportation and maritime activities

Market characteristics for the Company's products and services, such as supporting offshore activities, oil and gas transportation and maritime support vessels, are oligopolies marked by a limited number of similar companies operating in the oil and gas industry.

Competition in the industry is determined by the use of on board technology, compliance with the best safety, health and environmental protection standards, reliability and fuel efficiency on the vessels, the specifications of the ship according to customer needs and determined the number of requests and the availability of ships if needed. Therefore, the level of competition is moderate.

Maritime Service Industry Market Competition

Tanker agency and special port administration management Market have the monopolistic characteristics due to special appointment by Pertamina as the parent company. Other maritime service activities, such as general agency, freight forwarding, custom clearance, bunker agents, port and warehousing management, clean water providers for

bersih untuk kapal dan industri dan pengerukan bersifat pasar bebas dengan jumlah pemain yang besar sehingga tingkat persaingan tinggi.

ships and industry and dredging are free markets with a large number of players and high competition level.

SEGMENT PASAR DAN KONDISI PERSAINGAN

Selama tahun 2019, segmentasi pasar PTK terbagi menjadi Pertamina dan Non Pertamina. Dengan segmentasi pasar utama PTK adalah PT Pertamina (Persero) maupun Pertamina Group. Pemasaran Pertamina dilakukan dengan menjaga hubungan dengan *customer existing*, serta memastikan kebutuhan Kapal di Pertamina dan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara pengadaan kapal baru, pembelian kapal *second hand* dan pemenuhan kebutuhan kapal dengan sementara memenuhi dengan kapal B2B.

Posisi PTK di mata *customer* adalah sebagai perusahaan jasa pelayaran yang fokus kepada pelayanan jasa/kapal penunjang sarana pelabuhan /Harbour Tug dan spesialisasi kapal muatan dengan *shallow draft* /aliran sungai.

MARKET SEGMENTS AND COMPETITION CONDITIONS

In 2019, market segmentation of PTK was divided into Pertamina and Non Pertamina. PTK's main market segmentation is PT Pertamina (Persero) and the Pertamina Group. Pertamina's marketing is carried out by maintaining relationships with existing customers, as well as ensuring the vessels requirements of Pertamina and striving to fulfill their needs by supplying new vessels, purchasing second hand vessels and fulfilling the needs of vessels while temporarily meeting with B2B vessels as well.

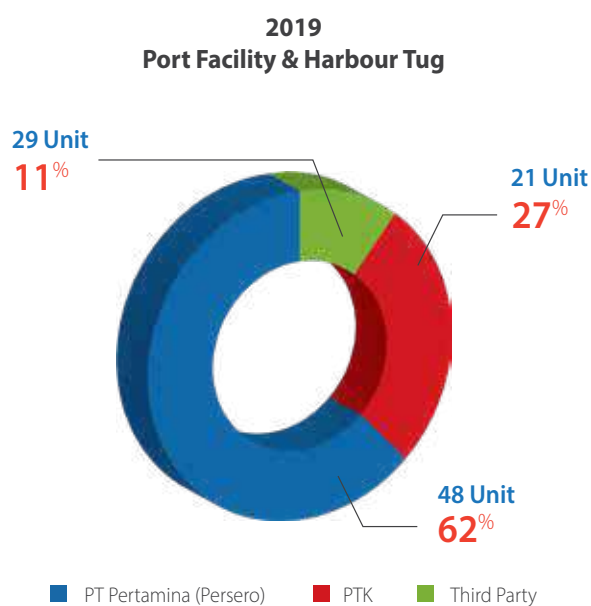
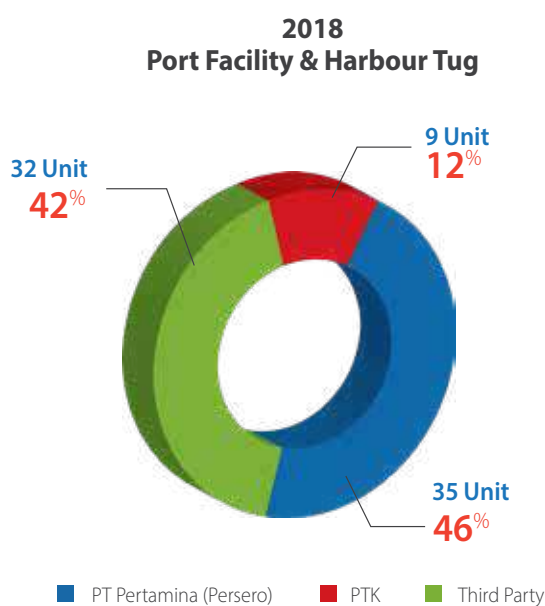
Among the customers, PTK's position is as a shipping service company that focuses on services/ port infrastructure supporting vessels/Harbor Tug facilities and specialization of cargo ships with shallow draft/river flow.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar PTK di *Pertamina Shipping* untuk *port facility and Harbour Tug* adalah sebagai berikut:

MARKET SHARE

Market share of PTK in *pertamina shipping* for *port facility and Harbour Tug* is as follows:



Sumber: PT Pertamina (Persero) | Source : PT Pertamina (Persero)



Pada tahun 2018 Kapal Harbour Tug PTK yang terutilisasi di Pertamina Shipping sebanyak 9 unit kapal dan PT Pertamina (Persero) sendiri mengoperasikan 35 unit kapal Harbour dan perusahaan lain mengoperasikan sebanyak 32 unit kapal Harbour Tug di Pertamina Shipping.

In 2018, PTK Harbor Tug Vessels that has been utilized in Pertamina Shipping as many as 9 units, and PT Pertamina (Persero) itself operates 35 units of Harbor Tug vessels, and another competitor company operates 32 units of Harbor Tug vessels in Pertamina Shipping.

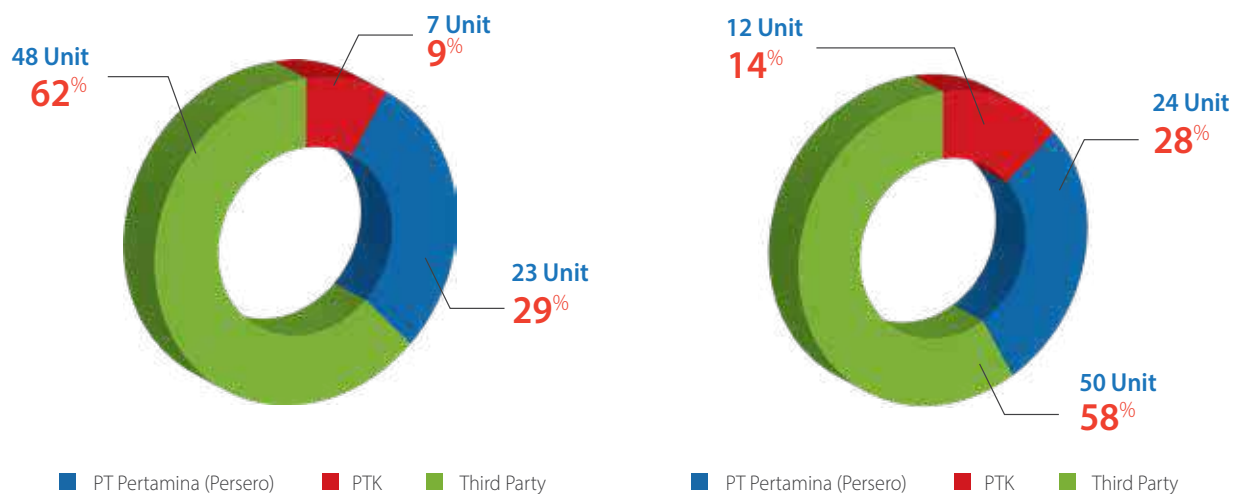
Pada tahun 2019 Kapal Harbour Tug PTK yang terutilisasi di Pertamina Shipping sebanyak 21 unit kapal dan PT Pertamina (Persero) sendiri mengoperasikan 48 unit kapal Harbour Tug dan Perusahaan competitor mengoperasikan sebanyak 29 unit kapal Harbour Tug di Pertamina Shipping.

In 2019, PTK Harbor Tug Vessels that has been utilized in Pertamina Shipping as many as 21 units, and PT Pertamina (Persero) itself operates 48 units of Harbor Tug vessels, and another competitor company operates 29 units of Harbor Tug vessels in Pertamina Shipping.

Pangsa pasar PTK di Pertamina shipping untuk Small I dan Small II adalah sebagai berikut:

The PTK market share in Pertamina Shipping for Small I and Small II vessels are as follows:

2019
Small I & Small II Di Pertamina Shipping



Sumber: PT Pertamina (Persero) | Source : PT Pertamina (Persero)

Pangsa Pasar PTK Dalam Bisnis Penyedia Angkutan Oil dan Gas Jenis Small Tanker Yang Digunakan Di Pertamina

Tahun 2019 PTK sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) telah menyediakan 4 unit kapal tanker Small I (1500DWT sd 3500 DWT), 3 unit Lube Oil Tanker, 1 unit

PTK Market Share in the Business of Providing Oil and Gas Small Tanker Used in Pertamina

In 2019, PTK as a subsidiary of PT Pertamina (Persero) has provided 4 units of Small I (1500DWT to 3500 DWT) tankers, 3 units of Lube Oil Tanker, 1 unit of Asphalt Tanker,

Asphalt Tanker, 2 unit *Tanker White Oil* (6500 DWT) untuk pasar Pertamina Perkapalan. Untuk kapal LPG Carrier 3500 CUM PTK memiliki 3 unit *kappa*. PT Pertamina (Persero) sendiri saat ini mengoperasikan 11 unit kapal milik jenis *tanker Small I* (1500DWT sd 3500 DWT) dan 13 unit *tanker Small II* (6500DWT – 6800DWT). Perusahaan competitor menyewakan 50 unit kapal Small I & Small II Di Pertamina Shipping.

2 units of White Oil Tanker (6500 DWT) for the Pertamina Shipping market. For LPG Carrier 3500 CUM, PTK has 3 units. PT Pertamina (Persero) currently operates their own 11 units of vessels type Small I (1500DWT to 3500 DWT) tanker and 13 units of Small II (6500DWT - 6800DWT) tanker. A competitor company leases 50 units of Small I & Small II vessels in Pertamina Shipping.

STRATEGI PEMASARAN

Mengacu kepada visi dan misi perusahaan untuk pengembangan bisnis jangka panjang dalam menghadapi persaingan di sektor bisnis pelayaran dan maritim, PTK telah menyusun strategi untuk pencapaian target pertumbuhan perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim yang memberikan keandalan operasi dan standar layanan tinggi kepada pelanggan dengan target:
 - a. Memprioritaskan aspek kesehatan, keselamatan dan lindung lingkungan (*health, safety, security and environment* – HSSE) dalam Operasional Perusahaan dengan target *zero number of accident & zero oil spill*.
 - b. Keandalan armada dengan target *average commission days* (kapal siap beroperasi) sebesar 352 hari.
 - c. Peningkatan *performance* kapal dengan peningkatan *Plan Maintenance System & Fleet Management*.
 - d. Pemasaran kapal dengan target *operation days / commission days* sebesar 95%.
2. Penambahan jumlah armada Antara lain untuk memenuhi kebutuhan di Pertamina Shipping dan kebutuhan kapal AP Pertamina Hulu dengan keterangan
 - a. Armada kapal sarana pelabuhan *Harbour Tug* dan *Mooring Boat Phase 2* dan 3 untuk memenuhi kebutuhan Marine Pertamina: 23 unit *Harbour Tug* dan 38 unit *Mooring Boat* di tahun 2019 dan 2020.

MARKETING STRATEGY

Referring to the vision and mission for long-term business development in dealing with competition in the shipping and maritime business sector, PTK has formulated the strategies to achieve the company's growth targets, as follows:

1. To become a shipping and maritime service company that provides operational reliability and high service standards to customers with targets, as follows:
 - a. Prioritize health, safety and environmental protection aspects (*health, safety, security and environment* - HSSE) in Company Operations with a zero number of accident & zero oil spill targets.
 - b. Fleet reliability with a target average commission days (ships ready to operate) of 352 days.
 - c. Increased ship performance by increasing the Plan Maintenance System & Fleet Management
 - d. Ship marketing with a target operation days/ commission days of 95%.
2. Increase the number of fleets, namely, to fulfill the vessels demands from Pertamina Shipping and Pertamina Hulu's subsidiaries with information, as follows:
 - a. The vessels fleet in Harbor Tug and Mooring Boat Phases 2 and 3 to fulfill the demands from of Pertamina: 23 units of Harbor Tug and 38 units of Mooring Boat in 2019 and 2020.



b. Armada tanker untuk Pertamina Shipping yaitu 6 unit kapal small I dan 8 unit kapal small II di tahun 2019 – 2026. c. Pengadaan 1 unit kapal keruk untuk AP PKJ d. Peluang penyediaan kapal – kapal pendukung kegiatan offshore di Pertamina Hulu Energi Group dan Pertamina Hulu Mahakam.	b. The tanker fleet for Pertamina Shipping is 6 units of small I vessels and 8 units of small II vessels in 2019 - 2026. c. Procurement of 1 dredger for subsidiaries of PKJ d. Opportunities to provide offshore activity supporting vessels in Pertamina Hulu Energi Group and Pertamina Hulu Mahakam.
-
3. PTK ditunjuk oleh Pertamina sebagai pelaksana kegiatan STS FAME di Balikpapan 4. Peremajaan 4 (empat) unit Armada Harbour Tug 3,200 – 4,000 HP, 3 (tiga) unit LPG Carrier dan 1 (satu) unit <i>Small Tanker</i> di 2019 s.d 2025 untuk meningkatkan Operasional ekselen. 5. Mempertahankan pasar eksisting dengan meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan operasi terbaik dengan layanan andal dan terpercaya dengan target <i>customer satisfaction index</i> dengan target 3,95 skala linkert di 2019. 6. Optimalisasi sinergi Pertamina dan Pertamina Group untu peningkatan bisnis kapal	3. PTK was appointed by Pertamina as the executor of the STS FAME activities in Balikpapan 4. Rejuvenation of 4 (four) Harbor Tug Fleet units 3,200 - 4,000 HP, 3 (three) LPG Carrier units and 1 (one) Small Tanker unit in 2019 to 2025 to improve excise Operations. 5. Maintaining existing market by increasing customer loyalty and satisfaction by providing excellent operational services with reliable and trustworthy services with customer satisfaction index targeted of 3.95 linkert scale in 2019. 6. Optimization of Pertamina and Pertamina Group synergy to improve vessels business.

KEBIJAKAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan 2019, PTK tidak memberikan dividen kepada pemegang saham atas laba Perusahaan tahun 2018.

Based on resolutions of Annual GMS 2019, PTK did not pay dividends to shareholders from the Company's profit booked in 2018.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

BAGI MANAJEMEN (MSOP) DAN KARYAWAN (ESOP)

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

Selama tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan/atau *Employee Stock Option Program* (ESOP).

Throughout 2019, the Company does not offer any management and or employee stock option plan (MSOP/ ESOP).

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

REALIZATION OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

PT Pertamina Trans Kontinental adalah perseroan terbatas tertutup dan sampai dengan akhir tahun 2019 tidak pernah mencatatkan saham di bursa manapun. Oleh karena itu, Laporan ini tidak menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

PT Pertamina Trans Kontinental is a limited liability company and as end of 2019 has never listed any shares at any stock exchanges. Therefore, this Report does not present any information related to realization of public offering proceeds.

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI

SHARES BUY BACK AND BONDS BUY BACK

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham maupun obligasi dari pihak lain. Dengan demikian Laporan ini tidak menampilkan informasi terkait tujuan pembelian kembali saham maupun obligasi, dan sumber dana yang digunakan untuk membeli kembali saham maupun obligasi.

As end of 2019, the Company does not perform any shares or bonds buy back from other parties. Therefore, this Report does not present any information related to purpose of the shares or bonds buy back and source of funds used to buy back the shares or bonds.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EKSPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Pada tahun 2019 Perusahaan tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.

In 2019 the Company did not conduct investment, expansion, divestment, acquisition, and debt / capital restructuring activities.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

MATERIAL INFORMATION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR AFFILIATED PARTY TRANSACTION

Berdasarkan Peraturan OJK No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditentukan oleh pemegang saham independen. Sesuai ketentuan tersebut Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu. Sampai dengan akhir tahun 2018 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris maupun Direksi.

Dalam operasionalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (catatan) seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Hubungan, sifat, serta saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pursuant to OJK Regulation No. IX.E.I regarding Affiliated Transactions and Conflicts of Interest Specific Transactions, transactions containing conflicts of interest are determined by independent shareholders. Pursuant to these provisions Independent Shareholders are shareholders who do not have a Conflict of Interest in connection with a particular transaction and /or are not an Affiliate of a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or a major shareholder who has a Conflict of Interest over a particular Transaction. Until the end of 2018 there were no transactions that contained conflicts of interest with the Board of Commissioners and Directors.

In its operations, the Company conducts transactions with related parties. All transactions with related parties have been disclosed in the Annual Report and Financial Statements (notes) as defined in PSAK 7: Disclosure of Related Parties. Relationship, nature, and account/ transaction balance with related parties are as follows:

Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dan Transaksi Related Parties, Nature of Relationship and Transaction		
Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Pertamina (Persero)	Induk dengan Anak Perusahaan Parent and Subsidiary	Kapal Milik, Keagenan & Diversifikasi Usaha Own-Vessels, Agency & Business Diversification
PT Pertamina Hulu Indonesia	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik Own-Vessels
PT Pertamina Hulu Energi	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik & Keagenan Own-Vessels & Agency
PT Pertamina Retail	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	BBM Operasional Operational Oil Fuels

Pihak Berelasi, Sifat Hubungan dan Transaksi
Related Parties, Nature of Relationship and Transaction

Uraian Description	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Pertamina Gas	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha Own-Vessels, Back-to-Back TC & Business Diversification
PT Pertamina Shipping	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik Own-Vessels
PT Nusantara Regas	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Agency
PT Elnusa	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kapal Milik & Charter Broker Own-Vessels & Broker Charter
PT Patra Niaga	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Umum & Diversifikasi Usaha General Agency & Business Diversification
PT Tugu Pratama Indonesia	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Asuransi dan Sewa Kendaraan Insurance and Vehicle Lease
PT Pertamina Lubricant	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Diversifikasi Usaha, Back-to-Back TC, Pelumas Umum Business Diversification, Back-to-Back TC, General Lubricant
PT Pertamina EP	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Umum, Back-to-Back TC & Diversifikasi Usaha General Agency, Back-to-Back TC & Business Diversification
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Keagenan Umum General Agency
PT Patra Jasa	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Perjalanan Dinas / Travel Business Trip/Travel
PT Pertamina Bina Medika	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Kesehatan Health
PT Pertamina Training & Consulting	Sesama Anak Perusahaan Entity Under Common Control	Pelatihan & Rekrutmen Training & Recruitment





Berikut ini adalah saldo dan transaksi dengan pihak berelasi: The balance and transaction with related parties are as follows:

dalam juta Rp | in millions of Rp

Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi Balances and Transactions with Related Parties		
Uraian Description	2019	2018
Pendapatan Usaha Revenues		
PT Pertamina (Persero)	1.403.148	1.365.274
PT Pertamina Hulu Mahakam	178.903	110.639
PT Pertamina Retail	109.870	37.260
PT Perta Arun Gas	106.843	96.326
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	91.723	3.067
PT Pertamina International Shipping	72.700	66.918
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	22.491	-
PT Nusantara Regas	19.511	16.886
PT Pertamina Hulu Energi OSES	18.153	885
PT Pertamina Patra Niaga	7.360	5.508
PT Elnusa Trans Samudera	6.087	5.938
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	4.294	3.776
PT Pertamina Hulu Energi WMO	3.960	3.287
PT Pertamina Hulu Energi JM	3.701	-
PT Pertamina Hulu Energi NSO	3.661	117
PT Pertamina Gas	2.689	-
PT Elnusa Tbk.	2.646	2.481
PT Pertamina EP	688	3.710
PT Pertamina EP	639	9.334
Lain-lain	4.551	2.005
Jumlah	2.063.618	1.773.411
Persentase dari Jumlah Pendapatan Percentage from Total Revenues	74,44%	84,55%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues		
PT Pertamina (Persero)	181.029	187.259
PT Perta Arun Gas	24.243	26.630
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	16.167	14.495
PT Pertamina Lubricants	9.096	-
PT Mitra Tours and Travel	2.111	-
Lain-lain	1.904	525
Jumlah	234.550	228.909
Persentase dari Jumlah beban pokok pendapatan Percentage from total cost of revenues	11,21%	16,35%

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING
EXTRAORDINARY EVENT

Selama tahun 2019, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

There is no financial information with extraordinary event throughout 2019.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY
THE COMPANY IN THE LAST FINANCIAL YEAR

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan Perusahaan pada tahun buku terakhir.

There is no change in accounting policy applied by the Company throughout 2019.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT ARE
SIGNIFICANT TO THE COMPANY

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan pada tahun 2019.

There is no change in laws and regulation with significant impact to the Company in 2019.



PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECTS

Bisnis pelayaran diprediksi masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2020. Sejumlah faktor seperti ketidakpastian ekonomi global memang menjadi tantangan tersendiri. Namun tidak berarti sama sekali tidak ada peluang bagi industri pelayaran di tahun 2020. Hal ini didorong oleh sejumlah katalis positif yang berpotensi mengerek permintaan jasa pelayaran pada sejumlah sektor. Pada sektor infrastruktur, berlanjutnya berbagai pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun ke depan juga diyakini akan akan mendorong pergerakan muatan dalam negeri. Hal ini pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan akan jasa pengangkutan oleh angkutan laut. Kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan salah satu katalis di sektor infrastruktur yang diduga akan mengerek kebutuhan akan angkutan material secara signifikan.

Kekayaan hulu Indonesia diproyeksikan oleh Fitch Solutions akan terus menurun dalam 10 tahun ke depan, di tengah-tengah penurunan alami dan penurunan investasi terhadap proyek-proyek baru. Reformasi pro bisnis yang dilakukan hingga saat ini, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak Foreign Direct Investment (FDI), terkendala oleh risiko non teknis dan persaingan dari pasar hulu lainnya. Pertumbuhan industri hilir diprediksi tetap konstruktif, didukung oleh kondisi lingkungan makro yang positif dan sektor fundamental. Prospek produksi minyak mentah dalam negeri diprediksi akan menurun menjadi rata-rata 755.000 b/d pada tahun 2019 dan 734.000 b/d pada tahun 2020, keduanya turun dari 776.000 b/d yang diproduksi pada tahun 2018. Tabel di bawah menunjukkan produksi minyak yang menurun selama satu dekade terakhir.

Shipping business is projected to have a promising prospects in 2020. Several factors including the global economics uncertainty have indeed become its own challenges. However, this does not mean there is zero opportunity for the shipping industry in 2020. This is driven by some positive catalysts that may potentially drive the shipping service demand in several sectors. In the infrastructure sector, the continued infrastructure development for at least the next five years is also believed drive the movement of domestic cargo. In turn, this condition will trigger the demand of freight services via shipping line. Government's policy to relocate the Capital to East Kalimantan will become one of the catalysts in the infrastructure sector which is analysed will boost the material transportation demands significantly.

Fitch Solutions projected Indonesia's upstream wealth will continue to decline in the next 10 years, amidst a natural decline and declining investment in the new projects. Pro-business reforms that is currently implemented with the purpose to attract more Foreign Direct Investment (FDI) encountered several non-technical risks and competition from other upstream markets. The growth of downstream industry is predicted to remain constructive, supported by positive macroeconomic conditions and the fundamental sectors. The domestic crude oil production prospect is estimated to decline to an average of 755,000 b/d in 2019 and 734,000 b/d in 2020, both decreased from 776,000 b/d produced in 2018. The following table presented the decreasing oil production over the past decade.

Produksi dan Konsumsi Minyak dan Gas di Indonesia Oil and Gas Production and Consumption in Indonesia

Indikator Indicator	2017e	2018e	2019e	2020e	2021f
Crude, NGPL & other liquids prod, 000b/d	897.0	871.0	848.5	830.4	807.4
Refined products production, 000b/d	1,060	1,054.7	1,049.4	1,044.2	1,033.7
Refined products consumption & ethanol, 000b/d	1,767	1,784.7	1,836.5	1,889.9	1,945.0
Dry natural gas production, bcm	67.0	65.0	59.2	57.4	54.5
Dry natural gas consumption, bcm	38.7	36.0	36.7	37.5	38.6
Brent, USD/bbl	54.75	71.69	67.00	65.00	61.00

e/f = Fitch Solution estimate/forecast. Source : EIA, SKK Migas, JODI, Fitch Solutions

Dari tabel di atas terlihat bahwa konsumsi domestik produk minyak dan olahannya yang diprediksi terus meningkat tidak diimbangi dengan produksi minyak dalam negeri yang terus menurun, hal ini menyebabkan pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan impor minyak demi memenuhi kebutuhan domestik yang telah dilakukan sejak tahun 2004. Selain itu tahun 2019 sampai dengan 2026 terdapat beberapa blok migas akan habis ijin operasionalnya baik yang dikelola Pertamina, swasta nasional, asing, maupun kerja sama BUMN dengan asing.

Prospek pertumbuhan konsumsi bahan bakar olahan di Indonesia diprediksi tetap positif, hal ini didukung oleh kondisi makro yang menguntungkan dan sektor fundamental, terutama dalam transportasi dan infrastruktur. Selain itu, pada tahun 2020 juga terdapat mandat untuk penyaluran biodiesel B30 sebagai salah satu cara untuk mengurangi impor minyak mentah, sembari mengelola kelebihan pasokan minyak sawit dalam negeri. Penyaluran B30 ini sebagian besar dilaksanakan melalui Pertamina, hal ini tentu saja membuka peluang usaha baru untuk PTK terutama dalam distribusi biodiesel *Fatty Acid Methyl Ester* (B30 FAME) melalui jalur perairan. Sejak bulan Januari tahun 2019, PTK sendiri telah melakukan pengelolaan *Ship to Ship* FAME di wilayah Balikpapan. Hal ini diharapkan dapat menambah kompetensi PTK selain kompetensi lain yang harus dipersiapkan baik dari proses bisnis maupun kompetensi operasional untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam bisnis distribusi FAME.

The above table explained domestic consumption of oil and by-products that are estimated to increase while was not offset by the declining domestic oil production, this condition encouraged the government to take the decision regarding oil import oil domestic needs that have been implemented since 2004. On the other hand, from 2019 until 2026 there are several oil and gas blocks available for operational licenses, whether managed by Pertamina, the national private enterprises, foreign private sector, or SOEs and foreign partnership.

The growth prospect of processed fuel consumption in Indonesia is projected to stay positive, supported by a profitable macro and fundamental sectors, especially in transportation and infrastructure. Furthermore, in 2020, there are some mandates for distribution of B30 biodiesel as a mechanism to reduce crude oil import, while managing oil reserves in the country. The B30 distribution is mainly carried out through Pertamina, this surely brings opportunity to PTK, especially in the Methyl Ester Fatty Acid (B30 FAME) biodiesel distribution through shipping lines. Since January 2019, PTK has conducted Ship to Ship FAME management in Balikpapan area. This is expected to increase the PTK's competency besides other competencies that shall be well prepared from business processes or operational competencies to further penetrate into the FAME distribution business.



Pada bulan Juli 2019, pemerintah mengumumkan penundaan implementasi peraturan IMO 2020 di perairan domestik hingga 1 Januari 2020, dengan pertimbangan kepentingan nasional. Meskipun demikian, kapal-kapal Indonesia dalam pelayaran internasional masih akan diminta untuk mematuhi peraturan IMO 2020. Terkait hal tersebut, PTK juga perlu mulai mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya operasional terkait penerapan IMO 2020 di armada milik PTK. Penerapan peraturan baru yang berorientasi K3LL, seperti penerapan ballast water management, pembatasan kadar sulfur dalam bunker kapal (global sulphur cap) dan penggunaan biodiesel B30 akan sedikit banyak berimbas pada kemungkinan kenaikan biaya operasional kapal yang pada akhirnya memungkinkan penyesuaian freight. Kemudian, pada sektor offshore dan angkutan curah cair (bulk carrier) terutama BBM diperkirakan stabil cenderung lebih baik dari sebelumnya.

Peluang untuk angkutan laut atau industri pelayaran domestik diperkirakan lebih baik di semua segmen, dilihat dari sisi pasar sepanjang mampu mengatasi tantangan dari sisi pembaruan regulasi baik yang berasal dari IMO maupun kebijakan dalam negeri.

In July 2019, the government has announced the postpone of IMO 2020 regulation implementation in territorial waters until January 1, 2020, considering national interests. However, Indonesian ships will still be required to comply with IMO 2020 regulations in the international shipping activity. Related to this condition, PTK also needs to start anticipate possibility of increasing operational cost following the IMO 2020 implementation for PTK's fleets. Implementation of the new K3LL-oriented regulations, including implementation of ballast water management, sulfur content in ship bunkers (global sulfur cap) and the use of B30 biodiesel will have a slight impact on the possibility of increasing vessels operational cost that may need to perform freight adjustment. Next, in offshore and bulk carrier sector, the Oil Fuel is primarily estimated to remain stable or even better than the previous year.

The opportunities for marine transportation or domestic shipping industry are expected to increase in all segments, considered from the market side as long they have the capability to overcome the challenges, both in terms of regulatory update from IMO and domestic policy as well.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ABOUT BUSINESS CONTINUITY

Kelangsungan usaha PTK secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perusahaan telah melakukan tinjauan untuk menetapkan asumsi-asumsi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha berdasarkan kinerja historis dan analisis kemampuan Perseroan.

Sepanjang tahun 2019, PTK memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan PTK yang SEHAT dan kinerja positif sepanjang tahun. Adapun kendala yang timbul hingga

Continuity of PTK's business is generally affected by various factors, both internal and external factors. The Company has reviewed and stipulated assumptions that may influence the business continuity based on the Company's historical performance and analysis.

Throughout 2019, PTK ensures there is no issues with significant impact on the Company's business continuity. This is indicated from HEALTHY financial condition of PTK and positive performance recorded along the year. The occurring issue which affected the Company's target

memengaruhi pencapaian target Perusahaan tidak sampai mengganggu kinerja operasional dan kinerja keuangan sehingga PTK dapat melaksanakan seluruh kewajibannya.

achievement does not affect the operational and financial performance thereby PTK is capable to fulfil all of its obligations.

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN

Manajemen menilai bahwa PTK memiliki potensi pertumbuhan yang lebih baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kelangsungan usaha Perusahaan akan dapat terjamin dengan baik dan berkelanjutan. Manajemen menilai dengan kinerja keuangan yang positif dari tahun ke tahun memberikan prospek dan jaminan positif terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan kedepan.

Selain itu, Perusahaan juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, PTK berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada PT Pertamina (Persero).

MANAGEMENT'S ASSESSMENT ON POTENTIAL SIGNIFICANT IMPACTS OF THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY

The Management assessed that PTK has a better growth potential. This indicates that the Company's business continuity will be secured and sustainable. The Management assumed the positive financial performance every year will contribute to positive prospect and assurance on the Company's future business continuity.

Moreover, the Company also continuously performs improvement in Human Resources (HR) quality, operational activity as well as other business supporting functions. With various strategies and initiatives that have been implemented, PTK believes will continuously maintain business continuity and increase contribution to PT Pertamina (Persero).

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASESMEN

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PTK di antaranya adalah kinerja dan kondisi keuangan PTK yang sehat; kepuasan pelanggan masih dipertahankan; terkait perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah serupa dikelola dapat diselesaikan dengan baik; serta opini audit dari auditor yang memiliki reputasi.

ASSUMPTIONS APPLIED BY MANAGEMENT IN THE ASSESSMENT

The underlying assumptions applied by the management in ensuring PTK's business continuity include healthy financial performance and condition of PTK; maintained customer's satisfaction, lawsuit, or similar cases that can be managed appropriately; and opinion from the reputable auditors.



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank





TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

244	Dewan Komisaris Board of Commissioners	379	Permasalahan Hukum Legal Case
262	Hubungan Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi Working Relationship Between The Board of Commissioners And Board of Directors	380	Akses Informasi Perusahaan Corporate Information Access
274	Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs Under Board of Commissioners	383	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility
301	Direksi Board of Directors	387	Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil Social Responsibility in Fair Operations
319	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	388	Tanggung Jawab Sosial Dalam Penerapan HAM Social Responsibility in The Implementation of Human Rights
327	Unit Audit Internal Internal Audit Unit	389	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility for The Environment
343	Audit Eksternal External Audit	392	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat Social Responsibility to The Community
346	Manajemen Risiko Risk Management	396	Tanggung Jawab Sosial Terkait K3 Social Responsibility Related to Hsse
356	Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	406	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan Social Responsibility to Customers
363	Kode Etik Code of Conduct		
372	Whistleblowing System Whistleblowing System		

Mendorong Penguatan Bisnis Melalui GCG

Encourage Business Strengthening Through GCG

“

Tahun 2019 merupakan periode penembangan dan diversifikasi usaha PTK melalui digitalisasi proses bisnis serta penguatan SDM. Seluruh rangkaian proses tersebut dapat berjalan dengan baik berkat landasan, komitmen, serta implementasi GCG yang konsisten.

The Year of 2019 is a PTK business development and diversification period through business processes digitalization and HR enforcement. All of these processes are implemented smoothly supported by a consistent GCG foundation, commitment and implementation.

”

Penguatan GCG secara holistik ikut memberikan peranan penting bagi pencapaian kinerja PTK selama ini. Diantaranya adalah Pencapaian PTK sebagai Top Three untuk Downstream Category Implementation of Good Corporate Governance 2018 pada ajang Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA) 2019. Hal itu membuktikan bahwa PTK telah menerapkan *best practice* dalam setiap operasi bisnisnya. Pencapaian ini merupakan kinerja perusahaan dalam penerapan operasional dan strategi perusahaan sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

The GCG enforcement holistically has played an important role for PTK's performance achievement until today. This also includes PTK's achievement the Top Three for the Downstream Category Implementation of Good Corporate Governance 2018 at the 2019 Annual Pertamina Subsidiary Award (APSA). The award proves that PTK has implemented best practices in every business operation. This achievement reflects the Company's performance in implementing operational and corporate strategies to encourage sustainable growth of the Company.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kami menegaskan komitmen implementasi tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang harus selalu dipegang teguh oleh setiap insan PTK. Sebab GCG merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan yang baik serta mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan perusahaan. Komitemen GCG ini dijalankan dalam seluruh aspek proses bisnis baik aktivitas operasional dan finansial guna mewujudkan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha perusahaan ke depan.

COMMITMENT ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

We emphasize the commitment to implement Good Corporate Governance (GCG) shall always be upheld by every employee of PTK. This considers GCG as a mechanism that governs good company management and is able to meet the expectations of company stakeholders. This GCG commitment is carried out in all aspects of business processes, both operational and financial activities in order to realize the growth and sustainability of the company's business in the future.



Dalam pelaksanaannya, komitmen GCG senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu upaya PTK untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Selain memegang prinsip-prinsip dasar GCG, PTK juga melandasi seluruh kegiatan bisnisnya dengan Tata Nilai Perusahaan serta Etika Bisnis dalam menjalankan tugas dan fungsi Perusahaan. Diantara bentuk komitmen tersebut diwujudkan dengan penandatanganan pernyataan bersama, yang direpresentasikan oleh tiga organ penting Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

In its implementation, the GCG commitment always concerns the GCG principles of as one of PTK's initiative to encourage the management of the Company in a professional, transparent and efficient manner. In addition to holding the basic principles of GCG, PTK also underpins all of its business activities with the Corporate Values and Business Ethics in carrying out the duties and functions of the Company. From all of the commitment manifested by the signing of a joint statement, represented by three important structures of the Company, such as the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Secara umum implementasi GCG PTK mengacu kepada kaidah universal praktik yang dianut secara universal oleh korporasi global. Secara khusus penerapan GCG PTK mengacu pada ketentuan hukum-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan internal perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
- Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/2014.
- Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 07 tanggal 3 Juli 2013
- Pedoman Code of Corporate Governance Pertamina Trans Kontinental No. A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke 00
- Pedoman Gratifikasi, Penolakan & Penerimaan Hadiah/ Cinderamata, Hiburan (Entertainment), No. PDM-005/ F0000/2015-S0 Revisi - 1
- Pedoman Konflik Kepentingan / Conflict of Interest, No. PDM-004/F0000/2015-S0 Revisi -1
- Pedoman Code of Conduct, No.A-002/F1000/2019-S0 Revisi Ke 00
- Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), No. 007/ M00000/2017-S0 Revisi Ke 2

GCG REGULATORY FRAMEWORK

In general, the implementation of PTK GCG refers to the universal rules of practice that are universally adopted by global corporations. Specifically the implementation of PTK GCG refers to the provisions of applicable laws and internal company regulations as follows:

- Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
- Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure
- Minister of SOEs Regulation No. 01 of 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs which has been amended by SOE Ministerial Regulation No. PER-09/MBU/2014.
- Articles of Association Number 07 dated July 3, 2013
- Pertamina Trans Kontinental Code of Corporate Governance Guideline No. A-003/F1000/2019-S0 Revision 00
- Gratification, Refusal & Acceptance of Gift/ Souvenir, Entertainment Guidelines, No. PDM-005/ F0000/2015-S0 1st Revision
- Conflict of Interest, No. PDM-004/F0000/2015-S0 1st Revision
- Code of Conduct Guidelines, No. A-002/F1000/2019-S0 00 Revision
- Guidelines on the Obligation to Submit State Officials Assets Report (LHKPN), No. 007/M00000/2017-S0 2nd Revision

- Tata Kerja Organisasi Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) No. B-008/F1000/2019-S0
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006
- OECD Principles of Corporate Governance Tahun 2004
- The Asean Corporate Governance Scorecard Tahun 2012
- Whistleblowing System (WBS) Management Organization SOP No. B-008/F1000/2019-S0
- The Republic of Indonesia Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets
- The Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption
- Indonesia General GCG Guidelines 2006
- OECD Principles of Corporate Governance 2004
- The Asean Corporate Governance Scorecard 2012

Melalui penerapan *best practice* GCG, PTK berupaya memberikan nilai lebih kepada pemangku kepentingan diantaranya melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya perusahaan, memberikan pelayanan yang ekselen, menjamin akuntabilitas melalui sistem pengendalian internal serta menciptakan iklim usaha yang sehat demi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Through the implementation of GCG best practices, PTK seeks to provide added value to stakeholders including attitudes and behaviors that are in line with company culture, provide excellent services, ensure accountability through internal control systems and create a healthy business climate in the company's business sustainability.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PTK mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. 01 Tahun 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN. Bentuk komitmen PTK terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ tata kelola sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Pertanggungjawaban

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

GCG PRINCIPLES

The application of GCG principles in CAR refers to SOE Ministerial Regulation No. 01 of 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. The form of PTK's commitment to the implementation of GCG principles is as follows:

Transparency

Transparency in decision making process and in disclosing material and relevant information on the Company.

Accountability

Clarity in functions, conduct, and accountabilities of governance structure for effective company management.

Responsibility

Conformity in company management toward laws and regulations as well as sound corporate principles.



Independensi

Keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independency

An event in which the Company is professionally managed with zero conflict of interest and influence/ pressure from any parties, which are not in line with laws and regulations, as well as sound corporate principles.

Keadilan dan Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Accountability

Fairness in equality in meeting the rights of stakeholders which emerge based on provisions, as well as laws and regulations.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Dalam penerapan GCG PTK memiliki tujuan yaitu memaksimalkan nilai Perusahaan dan terlaksananya pengelolaan secara profesional serta mandiri, menciptakan proses pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap seluruh pemangku kepentingan.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVE

The GCG implementation has objectives of maximizing the Corporate values and realizing professional as well as independent management. Other objectives are focused in creating a decision making process by all of the Company's structures based on high moral value, compliance to laws and regulations, as well as in supporting the embodiment of corporate social responsibility (CSR) in all stakeholders.



Pemegang Saham Shareholders

Memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan dukungan pelayanan kepada aktivitas usaha PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut senantiasa memiliki kinerja yang baik, sehat dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan laba dan memberikan kontribusi berupa dividen kepada Pemegang Saham.

Providing added value to Shareholders

- Pertamina Trans Kontinental is expected to support any services to business activities of PT Pertamina (Persero) as a Shareholder.
- Pertamina Trans Kontinental is expected to continuously achieve good, sound, and sustainable performance, as well as generate profit and contribute in the form of dividend to the Shareholders.



Pelanggan dan Mitra Kerja
Customer and Business Partners

Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra kerja

- Pertamina Trans Kontinental dituntut memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan guna menjaga kepercayaan pelanggan.
- Pertamina Trans Kontinental dituntut menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para mitra kerja guna menjaga kepercayaan para mitra kerja.

Maintaining trust from the customers and business partners

- Pertamina Trans Kontinental is expected to provide the best services to customers to uphold the customers' trust.
- Pertamina Trans Kontinental is expected to maintain mutually-benefitted cooperations with business partners to uphold the customers' trust.



Pekerja
Employees

Menjadi Tempat Kerja Terpercaya Dimata Pekerja

Pertamina Trans Kontinental memiliki tanggung jawab membangun hubungan kemitraan dengan pekerja, dengan menjadi tempat kerja yang ideal bagi profesional yang berinvestasi untuk pengembangan karir, dan memastikan lingkungan kerja yang kondusif bagi pekerja.

Becoming a Trustworthy Workplace for Employees

Pertamina Trans Kontinental is responsible for building partnerships with employees, by being an ideal workplace for professional who are investing in career development, and ensuring a conducive environment for employees.



Pemangku Kepentingan Lain
Other Stakeholders

Menjaga Keseimbangan Kepentingan Dari Pemangku Kepentingan Lainnya

Pertamina Trans Kontinental harus menjaga keseimbangan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan praktik pengelolaan yang sehat.

Keeping Balance of Interest from other Stakeholders

Pertamina Trans Kontinental should maintain the balance of interest from various other stakeholders. This is carried out by complying with the prevailing regulations and sound management practices.



**Otoritas
Pengelolaan
Lingkungan Hidup**
*Environment
Management
Authority*

**Aktivitas Usaha yang Berkaitan Dengan
Lingkungan Hidup**

Sebagai perusahaan jasa yang memiliki kegiatan usaha di bidang pelayaran, maritim dan logistik, Pertamina Trans Kontinental harus menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh kesadaran untuk mengelola dampak dari kegiatan usaha yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.

**Environment-Related Business
Activities**

As a service company with business activities in shipping, maritime, and logistic, Pertamina Trans Kontinental should perform its business activities with extreme awareness in managing the impacts from the implemented business activities to environment.

SOSIALISASI PENERAPAN GCG

PTK secara berkesinambungan terus melakukan sosialisasi penerapan GCG, kepada seluruh pekerja, pejabat perusahaan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi, serta para pemangku kepentingan lain. Selama tahun 2019 ada beberapa program/kegiatan sosialisasi GCG yang telah dilaksanakan, antara lain Sosialisasi Gratifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 di Makassar. Kegiatan dihadiri seluruh pekerja Cabang Makassar.

**SOCIALIZATION ON GCG
IMPLEMENTATION**

PTK continuously holds socialization on GCG implementation to all employees, company executives, including the Board of Commissioners, Board of Directors, as well as other stakeholders. In 2018, several programs/activities of GCG socialization were conducted, such as Gratification Socialization held on October 17, 2019 in Makassar. The activity was attended by employees of all Makassar Branch Offices.

**ROADMAP DAN PENGUATAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN**

Pada tahun 2019, PTK telah melakukan peningkatan dalam pengembangan prinsip-prinsip GCG. Berikut adalah peningkatan atau penguatan yang dilakukan oleh Perusahaan:

1. Pelaksanaan *Assessment* GCG oleh external assessor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
2. Sosialisasi GCG melalui media digital seperti siaran TV Internal, Broadcast dan pembuatan Video Sosialisasi;
3. *Compliance Awareness Programme* melalui Broadcast, Desktop Wallpaper dan Banner;
4. Pembuatan Pedoman Penanganan Pelaporan Pidana dan Pemberian Bantuan Hukum No. A-001/F1000/2019-SO Revisi Ke-00 Juli 2019;
5. Pembaruan standar penulisan *soft structure* GCG :
 - Pedoman Code of Conduct No. A-002/F1000/2019-SO Revisi Ke-00

**CORPORATE GOVERNANCE
ROADMAP AND ENFORCEMENT**

In 2019, PTK has conducted several improvements in GCG principles development. The improvement and enforcement initiatives done by the Company are as follows:

1. Implementation of GCG Assessment by external assessor, the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP);
2. GCG socialization through digital media, such as Internal TV publication, Broadcast and Socialization Video making;
3. Compliance Awareness Programme through Broadcast, Desktop Wallpaper and Banner;
4. Preparation of Criminal Act Reporting Process and Legal Assistance Support Policy No. A-001/F1000/2019-SO 00 Revision July 2019;
5. Update of the GCG soft-structure standards, as follows:
 - Code of Conduct Policy No. A-002/F1000/2019-SO 00 Revision

- Pedoman Code of Corporate Governance No.A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00
- Pedoman Gratifikasi No. Pdm-003/F0000/2016-S0 Revisi Ke-01
- Pedoman Col No. Pdm-004/F0000/2016-S0 Revisi Ke-01
- SK Ratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) Nomor 007/M00000/2017-S0 Revisi Ke-0 Mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- TKO Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) No. B-008/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00
- TKO Penyampaian Laporan-Laporan Atas Program Kepatuhan Melalui Compliance Online System No. B-007/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00
- Pedoman Code of Corporate Governance No.A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00
- Gratifikasi Policy No. Pdm-003/F0000/2016-S0 1st Revision
- Col Guideline No. Pdm-004/F0000/2016-S0 -01st Revision
- PT Pertamina (Persero) Manual Ratification Decree Number 007/M00000/2017-S0 0 Revision concerning Obligation to Submit State Officials Assets Report (LHKPN)
- Whistle Blowing System (WBS) TKO No. B-008/F1000/2019-S0 00 Revision
- Reports Submission TKO on Compliance Program via Compliance Online System No. B-007/F1000/2019-S0 00 Revision

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PTK melakukan *assessment* penerapan GCG secara berkala yang mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Indikator/ parameter penilaian merujuk pada Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, seperti yang digunakan PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penilaian dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG di PTK terhadap praktik-praktik terbaik GCG serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Pada tahun 2019, PTK melakukan *assessment* GCG dengan pihak eksternal yaitu BPKP.

Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG pada prinsipnya bisa dilakukan sendiri oleh Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, penilaian sendiri dapat meminta bantuan (asistensi) dari penilai independen.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

PTK regularly carries out assessment on GCG implementation. The assessment is held in accordance with Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprise. Indicators/parameters of assessment refers to Secretary of Ministry of SOE Decree Number SK-16/S.MBU/2012 of 1 October 2012 on Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation on Good Corporate Governance Implementation in State Owned Enterprise, as administered by PT Pertamina (Persero) as Parent Company and a State Owned Enterprise (SOE).

The assessment was carried out to obtain an overview of the conditions of applying GCG in CAR to the best practices of GCG and to identify areas that need further improvement. In 2019, PTK conducted a GCG assessment with an external party, the BPKP.

Assessment Procedure

In principle, the assesment on GCG implementation is could be self conducted by the Company. Self-assessment could use of assistance from an independent assessor.



Penilaian juga dapat dilaksanakan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk Dewan Komisaris, melalui proses sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi Pemerintah yang memiliki kompetensi di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

Kriteria Penilaian

Ruang lingkup penilaian GCG meliputi pengujian atas semua aspek yang mendukung pelaksanaan GCG, yaitu:

- Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan
- Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pengungkapan informasi dan transparansi
- Aspek lainnya

The assessment could also be accomplished by an independent assessor appointed by the Board of Commissioners through a process, in accordance with the provisions in goods and services procurement. In a more effective and efficient point of view, the assessment could be performed by using Government institutions' service with competence in GCG, directly appointed by the Board of Directors. Results of the assessment and evaluation are then reported to GMS along with Annual Report submission.

Assessment Criteria

The scope of GCG assessment includes examining all aspects supporting the GCG, which are:

- Commitment on sustainable GCG implementation
- Shareholders and GMS/Capital Owners
- Board of Commissioners
- Board of Directors
- Information disclosure and transparency
- Other aspects

Hasil Penilaian

Untuk tahun buku 2019, *assessment* GCG di PTK dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") dengan hasil skor GCG mencapai 77,730 (masuk dalam kategori "Baik"). Hasil ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan skor GCG tahun buku 2017 yang juga dilakukan oleh BPKP, di mana saat itu PTK mendapatkan skor 71,639. Skor tahun 2019 ini juga tidak berbeda jauh dari hasil *self-assessment* oleh tim internal PTK yang dilakukan pada tahun 2018 dengan skor 80,060

Penilaian *assessment* GCG Perusahaan berdasarkan beberapa aspek pengujian/ indikator/ parameter yang memiliki bobot masing-masing sesuai indikatornya dan menghasilkan nilai atau skor penilaian tersebut. Berikut ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG pada Perusahaan:

Assessment Results

For the 2019 fiscal year, the GCG assessment in CAR is carried out by the Financial and Development Supervisory Agency ("BPKP") with the GCG score result achieved 77.730 (classified in the "Good" category). This result experienced a significant improvement compared to the GCG score for the 2017 fiscal year, which was also carried out by BPKP, where PTK achieved a score of 71,639. The 2019 score is also relatively consistent from the results of a self-assessment conducted internally by PTK team in 2018 with a score of 80.060

The GCG assessment is based on several assessment/ indicators/parameters aspects, which have their respective weights according to the indicators and produce the value or score of the assessment. The following is summary of the GCG assessment evaluation results on GCG implementation in the Company:

Komparasi Hasil Penilaian Assessment GCG Perusahaan 2017-2019
Comparison of Company's GCG Assessment Evaluation Result 2017 - 2019

Aspek Pengujian Assessment Aspect	Capaian Tahun 2019 (External Assessment) Achievement in 2019			Capaian Tahun 2018 (Self Assessment) Achievement in 2018			Capaian Tahun 2017 (External Assessment) Achievement in 2017		
	Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achieved (%)	Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achieved (%)	Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achieved (%)
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	7,00	6,67	95,30	7,00	7,00	100	7,00	6,66	95,11
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders/Capital Owners	9,00	7,06	78,44	9,00	7,27	80,81	9,00	6,88	76,41
Dewan Komisaris Board of Commissioner	35,00	26,65	76,15	35,00	29,57	84,49	35,00	24,74	70,68
Direksi Directors	35,00	29,97	84,42	35,00	29,60	84,58	35,00	26,84	76,69
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Informasi dan Transparansi Information disclosure and transparency	9,00	7,34	79,53	9,00	6,61	73,46	9,00	6,52	72,49
Aspek Lainnya Other Factors	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Nilai rata-rata Average Value	100	77,73	77,09	100	80,06	80,06	100	71,639	71,639
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification of GCG Implementation Quality		"Baik" Good			"Baik" Good			"Cukup Baik" Fair	



Dari penilaian yang dilakukan, BPKP sebagai tim penilai memberikan beberapa rekomendasi guna peningkatan penerapan dan pelaksanaan GCG di lingkungan PTK. diperoleh 5 (lima) rekomendasi yang menjadi *area of improvement* dari 6 (enam) parameter terukur.

Tindak Lanjut atas Hasil Penilaian GCG

Berdasarkan hasil penilaian diperoleh rekomendasi guna meningkatkan penerapan dan pelaksanaan GCG di PTK. Adapun rekomendasi assessment 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

Based on the assessment, as the assessor team, BPKP has provided several recommendations to improve GCG implementation at PTK. There are 5 (five) recommendations that became the area of improvement from 6 (six) measured parameters.

Follow Up of GCG Assessment Results

Based on results of the assessment, several recommendations were obtained to improve the GCG implementation at PTK. The 2019 assessment recommendations are as follows:

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Rekomendasi dan Tindak Lanjut Recommendation and Follow-Up
Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan Commitment to sustainable GCG implementation	- Evaluasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi assessment GCG sebelumnya; - Peninjauan berkala terhadap perangkat pendukung Pengendalian Gratifikasi. - Evaluation and follow up on the results of previous GCG assessment recommendations; - Periodic review on the Anti-Gratification supporting infrastructures
Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal Pemegang Saham dan RUPS/ Pemilik Modal	- Pengisian jabatan Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut; - Menetapkan Komisaris Independen; - Pengesahan/Persetujuan RKAP tepat waktu (sebelum tahun anggaran berjalan). - Assignment of the Board of Directors position shall be no later than 30 (thirty) days after the position is vacant; - To appoint an Independent Commissioner; - The RKAP ratification/approval shall be on time (before the current fiscal year).
Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Rencana, anggaran, dan pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris; - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dimasukkan sebagai bagian dari RKAP dan disetujui oleh Pemegang Saham; - Menyusun rencana kerja dan melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham - Board of Commissioners training plan, budget and implementation; - The Board of Commissioners' Annual Work Plan and Budget shall be included as part of the RKAP and approved by the Shareholders; - To prepare a work plan and carry out the process of appointing an external auditor candidate and report to the Shareholders
Direksi Board of Directors	- Sistem pengukuran kinerja pekerja didukung dengan aplikasi computer; - Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum ke Pemegang Saham (tidak berbarengan); - Terdapat penyelesaian atas keluhan stakeholders secara tuntas. - Employee performance assessment system shall be supported by computerized applications; - Quarterly and Annual Management Reports shall be submitted to the Board of Commissioners before presented to Shareholders (not simultaneously); - There shall be a complete resolution for the stakeholder complaints.
Pengungkapan informasi dan transparansi Information disclosure and transparency	- Terdapat rencana dan pelaksanaan gathering dengan stakeholder - There is a plan and implementation of gathering with stakeholders
Faktor lainnya Other Factors	- Tidak ada - None

STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

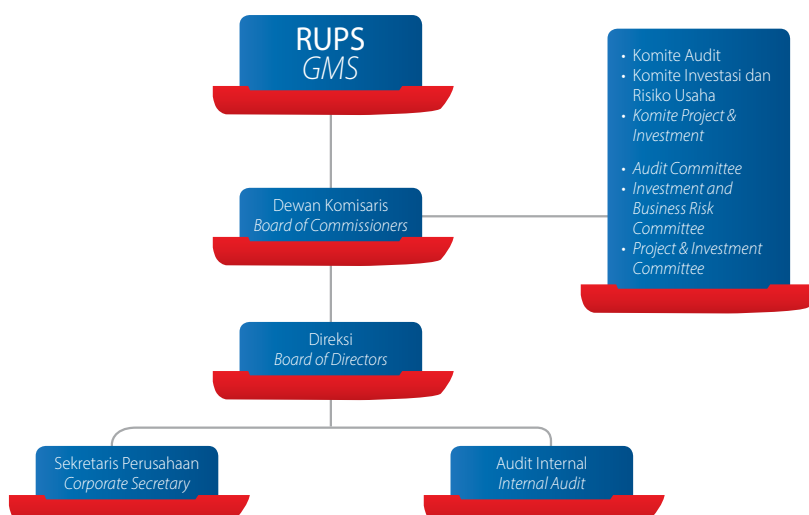
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan tergambarkan pada organ utama tata kelola Pertamina Trans Kontinental terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham. (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk komite dan fungsi berikut ini:

- Komite Audit
- Komite Investasi dan Risiko Usaha
- Komite Project & Investment
- Fungsi Corporate Secretary
- Fungsi Internal Audit

STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

In accordance to the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the corporate governance structure is reflected in the main governance structure of Pertamina Trans Continental including the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. In carrying out their duties, the Board of Commissioners and Board of Directors have established the following committees and functions:

- Audit Committee
- Investment and Business Risk Committee
- Project & Investment Committee
- Corporate Secretary Function
- Internal Audit Function



Organ Utama Tata Kelola Perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan yang penting terkait dengan pengelolaan PTK, baik untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Main Corporate Governance Structure

General Meeting Of Shareholder

According to the Limited Liability Companies Law and the Company's Articles of Association, General Meeting of Shareholders (GMS) assumes the highest position in the corporate governance structure and undertakes authorities that are not granted to Board of Directors or Board of Commissioners under the set limit. Shareholders perform important decision making related to PTK management, both for short- and long-term interests in the GMS, in accordance with the prevailing laws and regulations.



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi dalam menentukan arah dan tujuan pencapaian kinerja Perusahaan. Segala pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Pertamina Trans Kontinental serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki Board Manual yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Direksi

Direksi memiliki fungsi utama dalam pengelolaan Perusahaan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dan meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Pelaksanaan tugas Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada tata tertib kerja (*Board Manual*) yang mengatur tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Organ Pendukung Tata Kelola

Komite-Komite

PTK memiliki Komite Audit yang mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengendalian internal, Komite Investasi & Risiko Usaha yang mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengendalian risiko khususnya atas investasi usaha yang dilakukan.

Corporate Secretary

Corporate Secretary diangkat oleh Direksi dan bertugas membantu Direksi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya utamanya, yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi. Sekretaris Perusahaan juga memiliki peran mengelola dan menjaga komunikasi antara pihak internal dengan pihak eksternal termasuk pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Board Of Commissioners

Board of Commissioners has supervisory function related to Company management by the Board of Directors. The Board of Commissioners has the duty of directing and advising the Board of Directors in determining the Company's objectives and performance target. In performing the duties and responsibilities, the Board of Commissioners adheres the Articles of Association of Pertamina Trans Kontinental, as well as the prevailing laws and regulations. Moreover, the Board of Commissioners has Board Manual that regulates the work procedure of Board of Commissioners and Board of Directors. The Commissioners also should implement corporate governance principles in every activity performed.

Board Of Directors

Board of Directors hold key function in Company management to achieve the determined targets and increase performance every year. The implementation of duties by the Board of Directors refers to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, and adheres the Board Manual which regulates the work procedure of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Board of Directors also should implement corporate governance principles in every activity performed.

Corporate Governance Supporting Structure

Committees

PTK has Audit Committee that supports the Board of Commissioners in realizing internal control function, as well as Investment & Business Risk Committee that backs the Board of Commissioners in performing risk control function, especially in business investment.

Corporate Secretary

Corporate Secretary is appointed by and in charge of assisting the Board of Directors in performing its main duties and responsibilities, related to information disclosure implementation. The Corporate Secretary also actively manages and maintain communication between internal and external parties, including shareholders and stakeholders.

Audit Internal

Audit Internal berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama yang bertugas untuk memberikan masukan yang independen dan obyektif terkait pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan.

Internal audit

Internal Audit operates under the direct supervision of President Director which in charge of giving independent and objective inputs related to internal control and corporate governance process of the Company.

Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Infrastruktur tata kelola perusahaan PTK terdiri dari berbagai pedoman dan kebijakan tata kelola perusahaan atau yang disebut sebagai *soft structure* GCG.

Kebijakan tersebut meliputi *Code of Good Corporate Governance*, *Board Manual*, *Code of Conduct*, Piagam Komite, Pedoman *Conflict of Interest*, Pedoman Fungsi Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Gratifikasi, dan Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pedoman dan Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh manajemen dan pekerja yang secara berkala dilakukan sosialisasi dan evaluasi.

Corporate Governance Infrastructure

Pertamina Trans Kontinental has corporate governance infrastructure, comprising various guidelines and policies of corporate governance, or known as GCG soft structure.

Corporate governance policies cover Code of Good Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct, Committee Charter, Conflict of Interest Guidelines, Gratification Control Function Guidelines, Gratification Guidelines, and Submission Obligation of State Official Assets Report (LHKPN) Guidelines. The Corporate Governance Guidelines and Policies prevail for all management and employees, on which periodical socialization and evaluation are performed.

Kebijakan Tata Kelola PTK | PTK's Corporate Governance Policies

Parameter Penilaian | Assessment Parameter

Code of Corporate Governance ditetapkan berdasarkan No. A-003/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00. Pedoman mengatur mengenai:

- Referensi penerapan tata kelola perusahaan;
- Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung (Corporate Secretary, Internal Audit, Biro Sekretariat Komisaris dan Komite Audit);
- Proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, RJPP dan RKAP, mekanisme rapat, benturan kepentingan, pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya;
- Hubungan antara Pertamina Trans Kontinental dengan Induk dan Anak Perusahaan;
- Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.

The Code of Corporate Governance is stipulated based on Board of Directors Decree Number Pdm-002/F0000/2016-S0 (First Revision). The guidelines regulates:

- References of corporate governance implementation.
- Corporate governance structure, consisting of the main structures (GMS, Board of Commissioners and Board of Directors), and supporting structures (Corporate Secretary, Internal Audit, Commissioner Secretariat Bureau, and Audit Committee).
- Corporate governance process, consisting of appointing and dismissing the Board of Commissioners and Board of Directors, RJPP and RKAP, meeting mechanism, conflict of interest, operational management, financial management, and others.
- Relationship between Pertamina Trans Kontinental and
- the Parent Company, as well as the Subsidiaries.
- Relationship with stakeholders.

Board Manual | Board Manual

Mengatur mengenai tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi

Mengatur mengenai tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi



Kebijakan Tata Kelola PTK | PTK's Corporate Governance Policies

Pedoman Komite | Committee Guidelines

Kebijakan mengenai tata cara kerja Komite, meliputi:

- Piagam Komite Audit
- Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha

Policies on the Committee's work procedure include:

- Audit Committee Charter
- Investment and Business Risk Committee Charter

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku | (Code Of Conduct)

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) ditetapkan berdasarkan No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00, dan menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Pertamina Trans Kontinental dalam mengelola perusahaan.

The Code of Conduct is stipulated based on Board of Directors Decree Number Pdm-077/F0000/2016-S0 of First Revision, and became a reference of conduct to the Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees of Pertamina Trans Kontinental in managing the company.

Pedoman Benturan Kepentingan | (Conflict of Interest)

Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) ditetapkan berdasarkan No. Pdm-004/F0000/2016-S0 Revisi-01. Pedoman mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam benturan kepentingan dan mekanisme pelaporan benturan kepentingan.

The Conflict of Interest Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree Number Pdm-004/F0000/2015-S0 First Revision. The Guidelines regulate issues related to ethics in conflict of interest and reporting mechanism on conflict of interest.

Pedoman Fungsi Pengendalian Gratifikasi | Gratification Control Function Guidelines

Pedoman Fungsi Pengendali Gratifikasi ditetapkan berdasarkan No. Pdm-005/F0000/2016-S0 Revisi 1. Pedoman mengatur prinsip dasar pengendalian gratifikasi, parameter tindak lanjut penanganan laporan gratifikasi, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.

The Gratification Control Function Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree Number Pdm-005/ F0000/2015-S0 First Revision. The Guidelines regulated basic principles of gratification control, follow-up parameter on gratification reporting management, as well as gratification reporting mechanism.

Pedoman Gratifikasi | Gratification Guidelines

Pedoman Gratifikasi, Penolakan & Penerimaan Hadiah/ Cenderamata, Hiburan (Entertainment) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-003/F0000/2016-S0 (Revisi-1). Pedoman mengatur mengenai gratifikasi. Pedoman tersebut mengatur prinsip dasar, ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan pihak ketiga.

The Gratification, Rejection & Receiving Reward/Souvenir, Entertainment Guidelines is stipulated based on Board of Directors Decree Number Pdm-003/F0000/2015-S0 (First Revision). The Guidelines regulate basic principles, provisions in laws and regulations that organize gratification classification, as well as boundaries of receivment, provision of gift, and gift upon request from a third party.

Prosedur Whistleblowing System | Whistleblowing System Procedure

Prosedur Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. B-008/F1000/2019-S0 Revisi Ke-00 yang mengatur mengenai pengelolaan penanganan pengaduan dan penyingkapan whistleblowing system.

The Whistleblowing System (WBS) Management Procedure is stipulated based on Board of Directors Decree Number Psd- 015/F1000/2016-S0 that regulates complaint management and whistleblowing system disclosure.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menerapkan *best practice* tata kelola perusahaan sebagai landasan dan kunci keberhasilan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Serta berlandaskan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Keadilan, perusahaan berupaya untuk membangun lingkungan bisnis yang sehat dan memberi nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

RUPS

RUPS diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis bagi kesinambungan operasi dan bisnis Perusahaan. Keputusan-keputusan dalam RUPS selalu diinformasikan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, SERTA KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman tata tertib kerja atau Board Manual. Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan segala keputusan RUPS telah direalisasikan. Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala menyampaikan Laporan kinerja kepada Pemegang Saham.

PENERAPAN KEPATUHAN

Perusahaan berkomitmen mematuhi setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan operasional dan non operasional.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The Company applies best practice of corporate governance as the foundation and success key in building a sustainable business. As well as based on the Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness principles, the Company strives to build a healthy business environment and provide added value to all stakeholders.

GMS

GMS is held in accordance with time and procedure regulated in laws and regulations in order to generate strategic resolutions for the Company's operation and business continuity. The resolutions in GMS are consistently informed to the shareholders and stakeholders.

IMPLEMENTATION OF DUTIES, RESPONSIBILITIES, AS WELL AS AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Dewan Komisaris dan Direksi melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman tata tertib kerja atau Board Manual. Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan segala keputusan RUPS telah direalisasikan. Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala menyampaikan Laporan kinerja kepada Pemegang Saham.

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE

The Company commits to comply with every prevailing law and regulation in each operational and non- operational activity.



MELAKSANAKAN TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN

Perusahaan berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi untuk kondisi keuangan dan non-keuangan, serta memastikan Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan lain memiliki akses terhadap informasi dan data Perusahaan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan Perusahaan.

PERFORMING TRANSPARENCY TOWARD FINANCIAL AND NON- FINANCIAL CONDITION

The Company commits to perform information disclosure for both financial and non-financial condition, as well as to ensure the Shareholders and other stakeholders have the access to Company information and data while maintaining the Company's confidentiality.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pertamina Trans Kontinental melaksanakan kegiatan operasional dan non-operasional dengan menerapkan manajemen risiko, guna melindungi aset dan sebagai salah satu bentuk penerapan pengendalian internal terhadap seluruh aset Pertamina Trans Kontinental.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Pertamina Trans Kontinental performs operational and non-operational activities by implementing risk management for assets protection and as one of the internal control implementation to all assets of Pertamina Trans Kontinental.

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Pertamina Trans Kontinental baik operasional maupun non-operasional dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada berdasarkan prinsip-prinsip GCG, yang mengacu pada Anggaran Dasar dan pencapaian visi dan misi Pertamina Trans Kontinental.

BUSINESS ACTIVITIES

Business activities of Pertamina Trans Kontinental, operational and non-operational are conducted as per existing guidelines which are based on GCG principles that refer to the Articles of Association and Pertamina Trans Kontinental vision and mission achievements.

DOKUMENTASI PROSES

Seluruh proses kegiatan Pertamina Trans Kontinental didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PROCESS DOCUMENTATION

All activities process of Pertamina Trans Kontinental are well-documented as evidence of the events in accordance with the prevailing laws and regulations

EVALUASI HASIL

Pertamina Trans Kontinental melakukan evaluasi atas kinerja dan pencapaian yang telah dihasilkan, dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

EVALUATION RESULTS

Pertamina Trans Kontinental performs an evaluation on the performance and achievements for future improvements.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan yang berkaitan dengan kepentingan usaha PTK dan Anak Perusahaan dan memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat dalam mengambil keputusan.

Sesuai dengan Code of Corporate Governance (CoCG), RUPS terdiri atas:

RUPS Tahunan, untuk mengesahkan:

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), diselenggarakan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah periode akuntansi yang baru dimulai.
- Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, selambat-lambatnya dalam enam bulan setelah tahun buku berakhir.

RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/atau Direksi.

Selain itu Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Ketentuan tentang Keputusan Sirkuler diatur dalam Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai Pasal 91 UU Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Berikut adalah informasi mengenai struktur dan komposisi pemegang saham, serta persentase kepemilikan saham PTK per 31 Desember 2019.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS GMS

GMS acts as company structure assuming the highest power in the corporate governance structure. GMS has the authority to make all decisions related to the business interest of PTK and Subsidiaries. As the highest authority in PTK corporate governance structure, GMS has the rightful and binding power in making decisions.

In accordance with the Code of Corporate Governance (CoCG), the GMS consists of:

Annual GMS, to ratify:

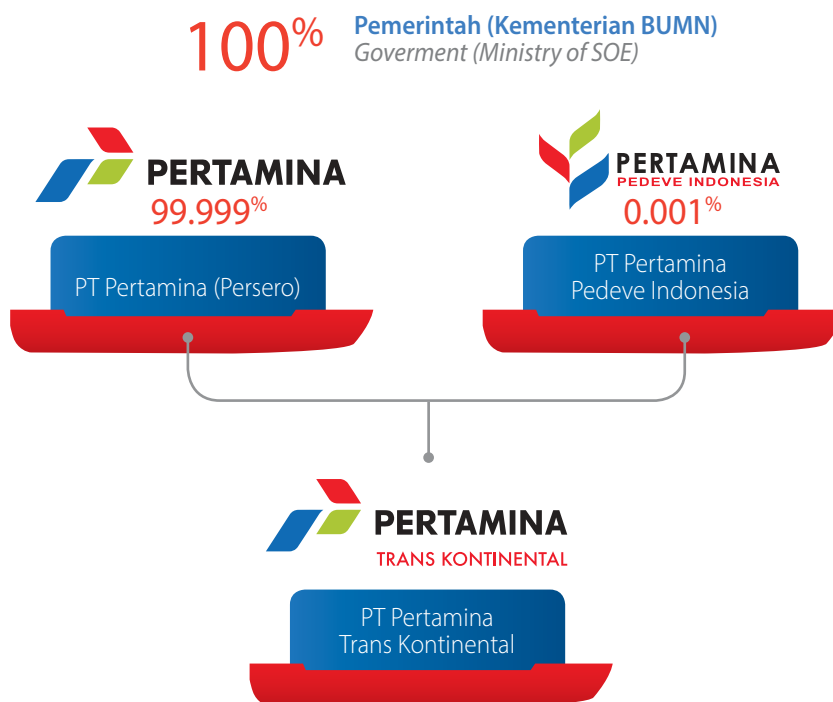
- Company Work Plan and Budget (RKAP), which is held at the latest thirty days after the commencement of new accounting period.
- Annual Report and Annual Calculation, which are started at the latest six months after the last fiscal year.

Extraordinary GMS which could be held anytime if it is deemed necessary by Shareholders or based on the proposal of Board of Commissioners and/or Board of Directors

In addition, Shareholders also could organize a Circular Decision-Making (Circular GMS), which is a decision making outside the GMS (without physical attendance). Stipulation on Circular Resolutions is regulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. As per Article 91 of Limited Liability Companies Law, Shareholders are allowed to make binding decisions outside the GMS with the same legal force as when GMS Resolution is made physically, provided all Shareholders with voting rights gives a written approval to GMS proposal that will be decided.

Majority and Controlling Shareholders

The following information illustrated the structure and composition of shareholders, as well as PTK shares ownership per December 31, 2019.



Hak Pemegang Saham

Berdasarkan CoCG, hak pemegang saham antara lain:

- Menghadiri dan memberikan suara dalam pada RUPS;
- Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik kepada Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang diterimanya;
- Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/ atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktunya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;
- Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Shareholders' rights

In accordance with the CoCG, Shareholders have the rights in:

- Attending and voting in GMS;
- Obtaining material information (including the right to ask) from the Board of Commissioners and Board of Directors on financial and other issues relating to the Company in a thorough, prompt, and orderly manner, so that it allows the Shareholders to make capital investment decision based on the information received;
- Holding GMS in case the Board of Directors and/ or Board of Commissioners are negligent to hold Annual GMS and incidentally Extraordinary GMS if deemed necessary, for example if the Company encounters significant performance;
- Acquiring explanation on GCG implementation.

Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

The Shareholders do not perform intervention to the duties, functions, and authorities of Board of Commissioners and Board of Directors by not eliminating the authority of GMS in exercising its rights in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Shareholders through GMS holds the authority to perform its rights as per the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Wewenang RUPS

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan jangka panjang perusahaan dan dilakukan secara wajar dan transparan. Wewenang RUPS adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat mendelegasikan kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar-organ Perusahaan. Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
- Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun masing-masing Direksi dan Komisaris;
- Menetapkan Auditor Eksternal untuk melakukan Audit keuangan atas laporan keuangan berdasarkan usulan yang diterima dari Dewan Komisaris;
- Menetapkan Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja;
- Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Komisaris;
- Menetapkan jumlah maksimum jabatan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Komisaris dan Direksi;
- Mendelegasikan kepada Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
- Menetapkan maksimum masa jabatan Pemangku Jabatan (PJ) bagi Komisaris dan Direksi;

GMS Authority

Decisions made by the GMS are based on long-term interest of the Company. The GMS and/or GMS decision-making are fairly and transparently conducted. It holds authority, such as follows:

- Having the capacity to delegate to GMS attorney in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. Maintaining independence among Company structures. The GMS Attorney is not the Company's Commissioner.
- Appointing and dismissing Directors and Commissioners.
- Ratifying Company Long-Term Plan (RJPP) and Company Work Plan and Budget (RKAP).
- Performing performance assessment collectively and individually on the Directors and Commissioners.
- Appointing External Auditor to perform financial Audit on the financial statement based on proposals received from the Board of Commissioners.
- Stipulating remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors by considering performance achievement.
- Stipulating policies on the possibilities of conflict related to the Board of Commissioners.
- Determining maximum number of concurrent positions allowed for a Commissioner and a Director.
- Delegating duties and authority of the Board of Directors to the Board of Commissioners.
- Stipulating maximum tenure for the Board of Commissioners and Board of Directors.



- Menetapkan perhitungan alokasi laba Perusahaan untuk Laba yang Ditahan dan Cadangan; Dividen kepada Pemegang Saham; Bonus Direksi, Komisaris dan Pekerja.
- Formulating allocation of Profit for Retained Earnings and Reserves; Dividend to Shareholders; Bonus for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS

Ketentuan pelaksanaan RUPS PTK, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun sedangkan RUPS Luar Biasa diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat-tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dan harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia;
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, menggunakan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar dengan peredaran nasional;
- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
- Dalam pemanggilan harus dicantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat penyelenggaraan RUPS;
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat;
- RUPS dipimpin Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat. Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Rapat;

Mechanism of GMS Implementation

The provisions of the PTK GMS, both the Annual GMS and the Extraordinary GMS are as follows:

- Annual GMS is held annually while Extraordinary GMS is organized incidentally based on an as-needed basis, with provisions as follows:
- GMS is held at the Company's domicile or locations where the Company performs its business activities, and must be within the territory of the Republic of Indonesia.
- GMS is organized by firstly inviting the shareholders through an official letter and/or advertisement placed in national newspapers.
- The invitation should be disseminated at the latest 14 (fourteen) days prior to the GMS by excluding the invitation and GMS date.
- The invitation should state the event, date, time, and venue of where the GMS is going to be held.
- The GMS invitation is deemed unnecessary if all shareholders approve the meeting agenda and resolutions are agreed to unanimously.
- GMS is chaired by the President Commissioner. If the President Commissioner is not present or absent due to any reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the members of Board of Commissioners who is present and appointed by the GMS. In a case where all members of the Board of Commissioners are not present or absent due to reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by the President Director. If the President Director is not present or absent due to reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the other members of Board of Directors who are present and appointed by the GMS.

- Dalam hal semua Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir dalam Rapat RUPS.
- In the event that all of the Board of Directors are not present or absent due to any reasons that do not require explanation to third party, the GMS is chaired by one of the selected by and those who attend the GMS.

Ketentuan Kuorum Dan Pengambilan Keputusan

Dalam penentuan kuorum serta pengambilan keputusan pada RUPS Tahunan, perusahaan mengacu pada Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007. Sesuai ketentuan tersebut, RUPS Tahunan (RUPST) dinyatakan kuorum apabila RUPST lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai peraturan yang berlaku melalui prosedur yang transparan dan adil. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang berlaku mensyaratkan jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan.

Hasil RUPS didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, dan Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2019

Pada Tanggal 16 Mei 2019, PTK telah menyelenggarakan RUPS Tahunan yang bertempat di Ruang Rapat Tanker Gedung PTK Pusat lantai 3 Jalan Kramat Raya nomor 29

Provisions On Quorum And Decision Making

Provisions on quorum in regards to attendance in Annual GMS is regulated in in the Act No. PT. 40 of 2007. In accordance with the provisions, the Annual GMS (AGMS) has constituted a quorum if the AGM is more than ½ (half) part of the total shares with voting rights present or represented, except the Law and/or articles of association determine a larger quorum.

Decision making in the GMS is carried out based on negotiation for consensus, as per the prevailing regulations through transparent and fair procedures. In the event of failed to reach decisions based on negotiation for consensus, the accepted decision making is based on the most votes, requiring a larger number of agreed votes.

Shareholders could also make legitimate decisions without holding a GMS physically, provided that all Shareholders have been notified in written and they are in agreement toward the proposed recommendation.

Results of GMS are documented by the Corporate Secretary, and Notary develops GMS Minutes of Meeting in each GMS. The signing of GMS Minutes of Meeting is not necessary if the minutes of meeting is included in the Notary Minutes of Meeting. The GMS Minutes of Meeting should be documented and kept by the Corporate Secretary.

Implementation of Annual GMS 2019

On May 16, 2019, PTK held an Annual General Meeting of Shareholders at the Tanker Meeting Room, PTK Head Office Building, 3rd floor Jalan Kramat Raya number 29 with a



dengan kuorum kehadiran sebesar 100% dari total saham atau setara dengan 693.708 saham seri A dan 819 saham seri B saham.

quorum attendance of 100% representing total shares or equivalent to 693,708 series A shares and 819 series B shares.

Proses Penyelenggaraan RUPS Tahunan The Annual General Meeting of Shareholders Process

Tanggal Date	Tahapan Stages
02 Mei 2019 May 2, 2019	Pengumuman dan pemberitahuan RUPS kepada Pemegang Saham disampaikan paling lambat 14 hari sebelum RUPS. Pemberitahuan disampaikan melalui surat PAnnouncement and notification of GMS to the Shareholders were conducted at the latest 14 days prior to the GMS. The notification was delivered in letters
02 Mei 2019 May 2, 2019	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham disampaikan melalui surat tercatat, paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS. Panggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan mengenai bahan RUPS Invitation of GMS to the Shareholders was conducted in registered mail, at the latest 14 days prior to the GMS date. The invitation of GMS stated the date, time, venue, and meeting agenda, including details of GMS materials.
16 Mei 2019 May 16, 2019	Pelaksanaan RUPS Bertempat di Ruang Rapat Tanker Gedung PTK Pusat lantai 3 Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat The GMS was held at the Tanker Meeting Room of the PTK Head Office Building, 3rd floor Jl. Kramat Raya No. 29 Central Jakarta
20 Juni 2019 June 20, 2019	Penyampaian Risalah RUPS kepada Pemegang Saham The submission of AGMS Minutes of Meeting to the Shareholders

Adapun keputusan dan realisasi RUPS Tahunan 2019 adalah sebagai berikut:

The Annual GMS resolutions and the realization are as follows:

Realisasi Keputusan RUPST 2019 Untuk Tahun Buku 2018 PT Pertamina Trans Kontinental Realization of PT Pertamina Trans Continental AGMS Fiscal Year 2018 Resolutions		
Agenda RUPS AGM Agenda	Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut Realization and Follow Up
Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Submission of 2018 Annual Report	Menerima Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2018. Accepted the Annual Report 2018.	Telah direalisasikan Realized
Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Approval of the Annual Report, including Ratification of the Financial Statements accompanied by the full Responsibility Dismissal and Discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surya (EY) disertai pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit de charge</i>) kepada kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang: 1. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2018. 2. Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan yang melawan hukum. Approved and ratified of the Company's Financial Statements for the 2018 fiscal year, which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surya (EY) accompanied by the granting the full responsibility dismissal and discharge from responsibility (<i>volledig acquit de charge</i>) to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company who are in charge of the Company's supervisory and managerial actions that have been carried out during 2018 Fiscal Year 2018, as long as: 1. These actions have been reflected in the Company's Annual Report for the Fiscal Year ended on December 31, 2018. 2. The action does not constitute a criminal offense and/or action against the law.	Telah direalisasikan Realized
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2018 Stipulation of the Use of the Company's Profit for 2018 Fiscal Year	Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp.279.000.000.000,- dan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan sebagai berikut: 1. 20% dari laba bersih 2018 digunakan sebagai cadangan wajib Perseroan 2. Sebesar 80% digunakan membayar angsuran pinjaman/hutang 3. 0% dari laba bersih 2018 digunakan untuk membayar dividen Approved stipulation of the use of the Company's Profit for the year for the periode ended on December 31, 2018 amounted Rp279,000,000,000, - and proposed the use of the Company's net profit as follows: 1. 20% of the 2018 net profit is allocated as a statutory reserves 2. 80% is allocated to pay loan/debt installments 3. 0% of 2018 net income is allocated to pay dividends	PT Pertamina Trans Kontinental tidak menyalurkan hutang deviden kepada Pemegang Saham PT Pertamina Trans Continental does not pay dividend payables to Shareholders



Realisasi Keputusan RUPST 2019 Untuk Tahun Buku 2018 PT Pertamina Trans Kontinental Realization of PT Pertamina Trans Continental AGMS Fiscal Year 2018 Resolutions

Agenda RUPS AGM Agenda	Keputusan Resolutions	Realisasi dan Tindak Lanjut Realization and Follow Up
Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 Stipulation of the Public Accountant Office as the Auditor for Financial Statements for 2019 Fiscal Year	Memberikan Kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019, berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan sama dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero). Delegated Attorney and authority to the Board of Commissioners to stipulate the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ended on December 31, 2019, altogether with the fee, in accordance with prevailing regulation, with the requirements that the Public Accounting Firm is the same Public Accounting Firm appointed by PT Pertamina (Persero).	Dewan Komisaris telah menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) berdasarkan RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2018 The Board of Commissioners has stipulated Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers) according to the Annual GMS for the 2018 Fiscal Year
Pengusulan dan Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2018 Proposal and Determination Board of Directors and Board of Commissioners of Performance Reward (Incentive) for the 2018 fiscal year	Menyetujui penetapan penghargaan atas kinerja (tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Approved stipulation of the Board of Directors and Board of Commissioners performance reward will be determined later and will be held in a separate circular GMS.	Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris telah ditentukan dalam RUPS Sirkuler tanggal 24 Juni 2018 dan dituangkan dalam Akta No.7 tanggal 17 Juli 2019 The Board of Directors and the Board of Commissioners incentives have been determined at the Circular General Meeting of Shareholders on June 24, 2018 and disclosed in Deed No. 7 dated July 17, 2019
Pengusulan dan Penetapan Remunerasi untuk atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun buku 2019 Proposal and Determination of the Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for Performance (Incentives) for the 2019 fiscal year	Menyetujui penetapan Remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2019 disampaikan dalam amplop tertutup Approved determination Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for the 2019 fiscal year to be submitted in a sealed envelope	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris telah ditentukan dalam RUPS Sirkuler tanggal 24 Juni 2018 dan dituangkan dalam Akta No.7 tanggal 17 Juli 2019 Board of Directors and the Board of Commissioners remuneration has been determined in the Circular General Meeting of Shareholders on June 24, 2018 and disclosed in Deed No. 7 dated July 17, 2019

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.

Decision Making in The Meetings

The Meetings resolutions will be taken through a collective consensus. If the collective consensus is not achieved, a voting will be conducted. Results of decision-making through voting.

Pelaksanaan RUPS Secara Sirkuler Tahun 2019

Selama tahun 2019, PTK telah menyelenggarakan RUPS Secara Sirkuler

Implementation of Circular General Meetings of Shareholders in 2019

In 2019, PTK held Circular GMS

Ringkasan RUPS dan Akta PT Pertamina Trans Kontinental 2019 Summary of GMS and Deed of PT Pertamina Trans Kontinental 2019

No	Tanggal RUPS Date of GMS	Ringkasan Hasil Keputusan RUPS / RUPS-LB Summary of GMS/EGMS Resolutions	Akta Notaris Notarial Deed
1	19 Desember 2018 December 19, 2018	Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 Revised Budget Plan (RKAP) 2018	Akta Notaris No. 04 tanggal 18 Januari 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 04 dated January 18, 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
2	02 April 2019 April 2, 2019	Pergantian Direktur Operasi Succession of Operations Director	Akta Notaris No. 09 tanggal 24 April 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 09 April 24, 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
3	02 April 2019 April 2, 2019	Revisi Key Performance Indicator (KPI)/Kesepakatan Kinerja Tahun 2018 Revised Key Performance Indicator (KPI)/Management Contract 2018	Akta Notaris No. 17 tanggal 30 April 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 17 April 30 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
4	20 Juni 2019 June 20, 2019	Pergantian Direktur Pemasaran Succession of Marketing Director	Akta Notaris No. 4 tanggal 12 Juli 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 4 dated 12 July 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
5	20 Juni 2019 June 20, 2019	Rencana Kerja dan Anggaran Dasar (RKAP) Tahun 2019 Budget Plan (RKAP) 2019	Akta Notaris No. 6 tanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 6 dated 17 July 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
6	24 Juni 2019 June 24, 2019	Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 & Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 Adjustments to the Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration for 2019 Fiscal Year & Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 Fiscal Year	Akta Notaris No. 7 tanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 7 dated July 17, 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
7	15 Juli 2019 July 15, 2019	Pergantian Direktur Utama Substitution of President Director	Akta Notaris No. 5 tanggal 17 Juli 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 5 dated 17 July 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH



Ringkasan RUPS dan Akta PT Pertamina Trans Kontinental 2019 Summary of GMS and Deed of PT Pertamina Trans Kontinental 2019

No	Tanggal RUPS Date of GMS	Ringkasan Hasil Keputusan RUPS / RUPS-LB Summary of GMS/EGMS Resolutions	Akta Notaris Notarial Deed
8	19 September 2019 September 19, 2019	Pergantian Komisaris Utama Succession of President Commissioner	Akta Notaris No. 5 tanggal 07 Oktober 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 5 dated October 7, 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
9	21 Oktober 2019 October 21, 2019	Key Performance Indicator (KPI)/Kesepakatan Kinerja Tahun 2019 Key Performance Indicator (KPI)/Kesepakatan Kinerja Tahun 2019	Akta Notaris No. 5 tanggal 20 November 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 5 dated 20 November 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
10	30 Oktober 2019 October 30, 2019	Penetapan Pejabat Definitif Direksi Stipulation of Definitive Board of Directors' Officials	Akta Notaris No. 6 tanggal 20 November 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 6 dated 20 November 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
11	01 November 2019 November 1, 2019	Pergantian Komisaris Succession of Commissioner	Akta Notaris No. 7 tanggal 20 November 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 7 dated 20 November 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
12	25 November 2019 November 25, 2019	Pemberhentian Direktur Keuangan & SDM Dismissal of Finance & HR Director	Akta Notaris No. 12 tanggal 23 November 2019 oleh Notaris Rismalena Kasri, SH Notarial Deed No. 12 dated 23 November 2019 by Notary Rismalena Kasri, SH
13	20 November 2019 November 20, 2019	Persetujuan Revisi Anggaran Biaya Investasi (ABI) RKAP Tahun 2019 Approval of the Revised Investment Budget (ABI) in RKAP 2019	Akta Notaris No. 437 tanggal 13 Januari 2020 oleh Notaris Fernandia Fabiola, SH., M.Kn Notarial Deed No. 437 dated January 13, 2020 by Notary Fernandia Fabiola, SH., M.Kn

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara Bahwa untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 PTK semua peserta setuju dengan pengambilan keputusan.

Decision Making in The Meetings

The Meeting resolutions is taken through a collective consensus. If the collective consensus is not achieved, a voting will be conducted. Results of decision making conducted through voting declared that all participants of the 2019 Fiscal Year Annual GMS PTK agreed with the decision making.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas penerapan GCG dan mengawasi Direksi untuk memastikan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktik-praktik terbaik GCG.

The Board of Commissioners is a corporate organ that has the duty and collective responsibility to supervise and provide advice to the Directors. The Board of Commissioners is responsible for implementing GCG and supervises the Directors to ensure that the management of the Company is in accordance with GCG principles and best practices.

KRITERIA DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang saham dan memenuhi kualifikasi pedoman serta kebijakan Corporate Governance Policy dan Board Manual. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki integritas, dedikasi dan itikad baik serta rasa tanggung jawab;
- Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
- Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perusahaan;
- Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu

BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA

The Board of Commissioners appointment is carried out by the shareholders and fulfils the qualifications of the guidelines as well as Corporate Governance Policy and the Board Manual. All of the Board of Commissioners members have fulfilled the criteria or requirements, as follows:

- Have integrity, dedication and good faith as well as a sense of responsibility;
- Have adequate knowledge in the company business field;
- Have sufficient time to carry out their duties;
- Have the ability to perform legal actions and have never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Commissioner who was found guilty, caused a company to go bankrupt or been convicted of a criminal offense that harmed state finances within five years before the appointment;
- Has a broad and beneficial relationship for the Company;
- Do not represent the interests of certain political parties

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PTK saat ini telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan dan Pemegang Saham Utama. Dengan demikian, seluruh Dewan Komisaris Perseroan merupakan anggota yang memiliki integritas (kepatutan) dan kompetensi (kelayakan) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban terkait fungsi pengawasan Direksi.

FIT AND PROPER TEST FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The board of commissioners of ptk currently has met the requirements and declared pass the fit and proper test by pt pertamina (persero), as the parent company and controlling shareholder. As such, all members of the company's board of commissioners are members with integrity (proper) and competence (fit) in performing the duties and responsibilities related to the supervisory function on the board of directors.



PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

RUPS memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

Sedangkan dalam proses pemberhentian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS. Hal tersebut terjadi jika terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi memberikan kerugian bagi Perusahaan atau melalaikan kewajibannya. RUPS juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang terbukti melanggar.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

Sepanjang tahun 2019, terdapat 2 (dua) kali perubahan susunan Dewan Komisaris PTK melalui RUPS Sirkuler yang memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Dharmawan H. Samsu selaku Komisaris Utama. RUPS Sirkuler juga mengangkat dan menetapkan Ignatius Tallulembang sebagai Komisaris Utama. Alasan perubahan komposisi Dewan Komisaris ini dilakukan karena penugasan lain.

RUPS Sirkuler juga memberhentikan dengan hormat Joko Eko Purwanto selaku Komisaris serta mengangkat dan menetapkan Alfian Nasution sebagai Komisaris. Alasan perubahan komposisi Dewan Komisaris ini dilakukan untuk penyegaran dinamika organisasi dan penugasan lain.

Berikut adalah komposisi dan masa jabatan Dewan Komisaris:

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT AND DISMISSAL

The GMS holds the authority to appoint and dismiss the Board of Commissioners members. The Board of Commissioners appointment and dismissal have considered aspects of integrity and competence that are in line with the company's business needs.

Meanwhile, in the dismissal process, the Board of Commissioners members may be temporarily dismissed by the GMS. This will happen if the member is proven committing action against the Articles of Association or there is any indication of causing a loss to the Company or neglecting its obligations. The GMS also holds the authority to dismiss the Board of Commissioners members who are proven guilty.

COMPOSITION AND TERMS OF OFFICE

During 2019, there were 2 (two) changes in the PTK Board of Commissioners members through the Circular RUPS which decided to honorably dismiss Dharmawan H. Samsu as President Commissioner. The Circular GMS also appointed and stipulated Ignatius Tallulembang as President Commissioner. The reason for the change in composition of the Board of Commissioners was due to another assignment.

The circular RUPS also honorably dismissed Joko Eko Purwanto as Commissioner and appointed and stipulated Alfian Nasution as Commissioner. The reason of the change in the Board of Commissioners composition is to refresh the organizational dynamics and other assignments.

Board of Commissioners composition and terms of office are as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition and Terms of Office

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Terms of Office
Dharmawan H Samsu	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 1 tanggal 10 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 10, 2018	1 Januari 2019 – 19 September 2019 January 1, 2019 – September 19, 2019
Ignatius Tallulembang	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2019 Deed No.5 dated October 7, 2019	19 September 2019 - 31 Desember 2019 September 19, 2019 – December 31, 2019
Joko Eko Purwanto	Komisaris Commissioner	Akta No. 28 tanggal 28 September 2018 Deed No. 28 dated September 28, 2018	1 Januari 2019 - 1 November 2019 January 1, 2019 – November 1, 2019
Alfian Nasution	Komisaris Commissioner	Akta No.7 tanggal 20 November 2019 Deed No.7 dated November 20, 2019	1 November 2019 – 31 Desember 2019 November 1, 2019 - December 31, 2019
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	Akta No. 15 tanggal 14 Februari 2018 Deed No. 15 dated February 14, 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 - December 31, 2019
Ivan Airlangga EP	Komisaris Commissioner	Akta No. 1 tanggal 14 Desember 2018 Deed No. 1 dated December 14, 2018	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 - December 31, 2019

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Seluruh profil Dewan Komisaris PTK tahun 2019 telah disajikan pada bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

All profile of the PTK Board of Commissioners in 2019 has been presented in the Company Profile chapter of this Annual Report.

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS BARU

Program pengenalan Dewan Komisaris dilakukan setelah anggota Dewan Komisaris terpilih serta dimaksudkan agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perusahaan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners orientation program is carried out after the the Board of Commissioners members are appointed and to ensure that the Board of Commissioners from various backgrounds and experiences will acknowledge and understand the Company's activities and condition.

Menindak lanjuti hasil Keputusan Pemegang Saham PTK secara Sirkuler serta mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang berlaku. Perusahaan telah melaksanakan program pengenalan perusahaan kepada Ignatius Tallulembang pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Alfian Nasution pada tanggal 20 November 2019. Program pengenalan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Following up on the results of the Circular Shareholders' Decision Circularly and referring to the applicable GCG principles. The company has implemented a company introduction program to Ignatius Tallulembang on October 7, 2019 and Alfian Nasution on November 20, 2019. The introduction program was carried out in conjunction with the Board of Commissioners and Board of Directors Meeting.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali,

INDEPENDENT COMMISSIONER

An independent commissioner is a member of a commissioner who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners



serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. *Code of Corporate Governance* telah mengatur ketentuan mengenai Komisaris Independen PTK yaitu sekurang-kurangnya 20% dari Anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan di luar perusahaan. Syarat-syarat untuk jabatan Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

- Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi;
- Tidak bekerja pada departemen/lembaga atau badan lainnya di lingkungan Pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak mempunyai keterikatan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produksi kepada Perusahaan dan afiliasinya;
- Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.
- Not serving as a Director in an affiliated company;
- Not working in a governmental department/ institution or other agencies in the last three years;
- Not working at the Company or its affiliations in the last three years;
- Not having any financial affiliation, directly and indirectly with the Company and other Companies providing services and production for the Company and its affiliations;
- Free from conflict of interest and business activities or other relationships which could constaint or reduce capability of the concerned Commissioners to act or think independently in the Company.

Pada tahun 2019, PTK memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen dari total 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris atau terhitung 25%, sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur keberadaan Komisaris Independen. Komisaris Independen PTK yaitu Achmad Fachruddin.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

PTK telah memenuhi ketentuan yang diatur regulator pasar modal terkait kriteria Komisaris Independen. Untuk menjadi Komisaris Independen, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

and controlling shareholders, and is free from business relationships or other relationships that can affect his ability to act independently or act solely in the interests of the company. Provisions on Independent Commissioner is regulated in the Code of Corporate Governance, stating at least 20% of the Board of Commissioners' Members should be appointed from outside the Company's circles with below requirements:

In 2019, PTK has 1 (one) Independent Commissioner from the total of 4 (four) Board of Commissioners members or 25%, thereby has complied with the Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which regulates the appointment of Independent Commissioners. Achmad Fachruddin serves as Independent Commissioner in PTK.

Stipulation of Independent Commissioners Criteria

PTK has fulfilled the regulations stipulated by the capital market regulators in relation to the Independent Commissioners criteria. The provisions are as follows:

- Having good character, morals, and integrity;
- Competent in carrying out legal actions;
- Within 5 (five) years before appointment and during his tenure:

- o tidak pernah dinyatakan pailit;
- o tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- o tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- o tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
- o Never declared bankrupt;
- o Never been a member of the Board of Directors and/or a Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt;
- o Never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector; and
- o Never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who during his tenure:
 - a. Never held an annual GMS;
 - b. Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or did not provide accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and
 - c. Has caused any company that obtained licenses, approvals, or registrations from the Financial Services Authority not to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.
 - d. Having a commitment to comply with the laws and regulations; and
 - e. Having knowledge and / or expertise in the fields required by Issuers or Public Companies.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memegang prinsip independensi dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam memberikan keputusan strategis terkait perusahaan yang bebas dari tekanan atau kepentingan pihak tertentu. Dewan Komisaris juga senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan dalam bentuk hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang saham pengendali maupun pihak eksternal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan.

INDEPENDENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners upholds the independency principle in carrying out its duties including in providing strategic decisions related to companies that are free from pressure or interests of certain parties. The Board of Commissioners also always avoids conflicts of interest in form of financial and family affiliations with other members of the Board of Commissioners, Board Directors, controlling shareholders as well as external parties who have business affiliation with the Company.



Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan pada Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

This complies with the regulations in the copy of the Minister of State Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises.

Sesuai Pasal 13 ayat 3 Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011, Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi ketentuan yang mengatur kriteria independensi sebagai berikut:

In accordance with Article 13 paragraph 3, the Board of Commissioners members should meet the provisions that regulate independency criteria.

- Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepengurusan Perusahaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali;
- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

- Not having any financial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholder.
- Board of Commissioners does not have any managerial affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder;
- Board of Commissioners does not have any ownership affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder;
- Board of Commissioners does not have any family affiliation with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder.

Hubungan keuangan hanya sebatas status sebagian Anggota Dewan Komisaris yang mewakili Pemegang Saham dan anggota Direksi, merupakan pekerja PT Pertamina (Persero) yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk ditempatkan di Perusahaan sesuai penugasan dari PT Pertamina (Persero).

There was a financial affiliation identified in the Company, in which some Members of the Board of Commissioners, representing the Shareholders and members of the Board of Directors were employees of PT Pertamina (Persero) who have passed fit and proper test to be placed at the Company in accordance with the assignment from PT Pertamina (Persero).

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya yang dilaksanakan Direksi; memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES, RESPONSIBILITIES, AUTHORITY, AND OBLIGATIONS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and the Board Manual, which is to supervise the management policies, generally the management of the Company carried out by the Directors; provide advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of The Company's Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, provisions of the Articles of Association and GMS

Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Anggota Dewan Komisaris harus:

- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, serta kewajaran;
- Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Persero dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perseroan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS

Kewenangan

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
- Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
- Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
- Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
- Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas;

Decree, as well as the prevailing law and regulations, on behalf of the Company's interest and in accordance with the aims and objectives of the Company.

In performing its duties, each Member of the Board of Commissioners should:

- aAbide by the Articles of Association, laws, regulations, as well as principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, as well as fairness;
- Demonstrates goodwill, prudence, and responsibility toward the Company by being represented by GMS in performing the supervisory duties and giving advice to the Board of Directors for the interest and objectives of the Company;
- Be prohibited from performing transactions with conflict of interest and take interest of the Company aside from honorarium and facilities established by the GMS.

Authority

The authority of the Board of Commissioners is as follows:

- To access to books, correspondences, as well as other documents, inspect cash for verification and other needs, and audit the Company's assets;
- To enter properties, buildings, and offices used by the Company;
- To request explanation from the Board of Directors and/or other officials on issues relating to the Company's management;
- To acknowledge all policies and actions that have and will be conducted by the Board of Directors;
- To request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend the Board of Commissioners' meeting;
- To appoint Secretary of the Board of Commissioners;
- To temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with provisions of the Limited Liability Companies Law;



- Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- To establish other Committees aside from Audit Committee if deemed necessary by taking account the Company's capability;
- To hire experts for specific issues and within a certain period of time at the expense of the Company, when necessary;
- To perform managerial affairs of the Company in specific circumstances for a specific period of time in accordance with the Articles of Association;
- To attend the Board of Directors meeting and provide insights toward the discussed issues;
- To perform other supervisory authority as long as it is not conflicted with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolution.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki kewajiban antara lain:

- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapatan dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
- Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
- Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Induk Perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS OBLIGATIONS

Board of Commissioners has obligations, among others:

- Giving inputs and advice to the GMS on The Company's Long Term Plan and Company Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors;
- Following the Company's activities development, giving inputs and advice to the GMS on each important issue for the Company's management;
- Reporting immediately to the GMS if there is an indication of the Company's decreasing performance;
- Investigation and analyzing periodical and annual reports prepared by the Board of Directors, as well as signing annual report;
- Carrying out other obligations for supervisory duties and advice provision as long as it is not conflicted to the legislations, Articles of Association, and/or GMS Resolution;
- Complying with other prevailing provisions at the Company's Parent Company and those which are prevailed at the Company and/or other provisions stipulated and approved by the GMS.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan serta memberikan nasihat untuk melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Kegiatan Rutin

- Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Menyetujui laporan triwulanan
- Menyetujui penetapan perangkat Dewan Komisaris

Persetujuan Strategic :

- Persetujuan atas rekomendasi penempatan perwakilan perusahaan di Anak Perusahaan sebagai Direktur pada PT Peteka Karya Gapura
- Persetujuan atas rekomendasi penempatan perwakilan perusahaan di Anak Perusahaan sebagai Direktur pada PT Peteka Karya Jala
- Persetujuan atas rekomendasi penempatan Komisaris PT Peteka Karya Jala dan PT Peteka Karya Tirta
- Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan SDM
- Persetujuan atas Piagam Internal Audit
- Persetujuan Pembentukan PTK Cabang Arun
- Persetujuan atas Laporan Management Triwulanan PTK
- Persetujuan atas perubahan visi dan misi perusahaan
- Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Rektifikasi Free Span Pipa Gas Bawah Laut 28in Pegerungan – Porong
- Persetujuan pembukaan sub cabang terkait dengan pengalihan kegiatan keagenan

Arahan Strategic :

- Arahan terkait monitoring pelaksanaan investasi yang lebih ketat
- Arahan terkait kegiatan *back to back charter* agar secara bertahap diganti dengan kapal milik.
- Arahan untuk dilakukannya kordinasi yang lebih baik antara PTK dengan Pertamina sehingga collection periode dapat ditekan
- Arahan pelaksanaan *Planned Maintenance System* untuk menekan *breakdown maintenance*
- Arahan agar selalu mengutamakan aspek HSSE dan menjadikan *recordable incident* sebagai *sharing lesson learned*

BOARD OF COMMISSIONERS DUTY IMPLEMENTATION REPORT 2019

The Board of Commissioners has carried out supervision and provided advice to implement the strategic steps, as follows:

Routine Activity

- Carrying out internal meetings of the BoC and joint meetings of the Board of Commissioners and Directors
- Approve quarterly reports
- Approved the establishment of the BoC tool

Strategic Approval :

- Approval of recommendations for the placement of company representatives in the Subsidiary as Director of PT Peteka Karya Gapura
- Approval of recommendations for placement of company representatives in the Subsidiary as Director of PT Peteka Karya Jala
- Approval of recommendations for the placement of Commissioners of PT Peteka Karya Jala and PT Peteka Karya Tirta
- Appointment of Acting Director of Finance and HR
- Approval of the Internal Audit Charter
- Approval for Establishing PTK Arun Branch
- Approval of the PTK Quarterly Management Report
- Approval of changes in the company's vision and mission
- Approval of the Implementation of Free Span Underwater Gas Pipeline Rectification 28in Pegerungan - Porong
- Approval for opening sub-branches related to the transfer of agency activities

Strategic Direction :

- Directions on monitoring investment implementation more stringently
- Direction related to back to back charter activities should be gradually replaced with owned vessels
- Direction for better coordination between PTK and Pertamina so that the collection period can be suppressed
- Directions to implement the Planned Maintenance System to suppress maintenance breakdowns
- Direction to always prioritize HSSE aspects and make recordable incidents a sharing lesson learned



- Arahan untuk meningkatkan budaya inovasi untuk meningkatkan kapabilitas SDM
- Arahan terkait pengembangan bisnis *non captive*
- Arahan untuk pembuatan bisnis plan yang detail untuk capture pasar di APH
- Arahan pembuatan *drawdown* bulanan untuk memonitor kinerja realisasi finansial dan fisik atas rencana investasi
- Arahan pembuatan *digital catalogue* terkait profil PTK
- Arahan untuk melakukan *re-based* ABI dalam pelaporan realisasi ABI 2019
- Arahan untuk melakukan kordinasi dengan Pertamina terkait status lahan Tanggamus
- Arahan untuk melakukan kordinasi dengan Pertamina terkait dengan penyelesaian status bangunan di lahan Bagus Kuning
- Arahan Terkait Penetapan Kantor Akuntan Publik
- Direction to improve the culture of innovation to improve HR capabilities
- Directives related to non-captive business development
- Direction for making detailed business plans for market capture in APH
- Direction for making monthly drawdowns to monitor financial and physical realization of investment plans
- Directives for making digital catalogs related to PTK profiles
- Direction to re-based ABI in reporting ABI 2019 realization
- Direction to coordinate with Pertamina regarding the status of Tanggamus land
- Direction to coordinate with Pertamina regarding the completion of building status in Bagus Kuning land
- Direction related to appointment of a Public Accounting Firm

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

Dalam hal pengawasan kinerja Direksi, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi pada tahun 2019 sebagai berikut:

- Persetujuan atas rekomendasi penempatan perwakilan perusahaan di Anak Perusahaan sebagai Direktur pada PT Peteka Karya Gapura
- Persetujuan atas rekomendasi penempatan perwakilan perusahaan di Anak Perusahaan sebagai Direktur pada PT Peteka Karya Jala
- Persetujuan atas rekomendasi penempatan Komisaris PT Peteka Karya Jala dan PT Peteka Karya Tirta
- Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan SDM
- Persetujuan atas Piagam Internal Audit
- Persetujuan Pembentukan PTK Cabang Arun
- Persetujuan atas Laporan Management Triwulanan PTK
- Persetujuan atas perubahan visi dan misi perusahaan
- Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Rektifikasi Free Span Pipa Gas Bawah Laut 28in Pagerungan – Porong
- Persetujuan pembukaan sub cabang terkait dengan pengalihan kegiatan keagenan

RECOMMENDATIONS FROM BOARD OF COMMISSIONERS

In terms of monitoring the Board of Directors' performance, the Board of Commissioners has provided recommendations in 2019 as follows:

- Approval of recommendations for the placement of Company's representatives in the Subsidiary as Director of PT Peteka Karya Gapura
- Approval of recommendations for the placement of Company's representatives in the Subsidiary as Director of PT Peteka Karya Jala
- Approval of recommendations for the placement of Commissioners of PT Peteka Karya Jala and PT Peteka Karya Tirta
- Appointment of Acting Director of Finance and HR
- Approval of the Internal Audit Charter
- Approval for the Establishment of PTK Arun Branch
- Approval of the PTK Quarterly Management Report
- Approval of changes in the Company's vision and mission
- Approval of the Implementation of Free Span Underwater Gas Pipe Rectification 28in Pagerungan – Porong
- Approval for opening sub-branches related to the transfer of agency activities

- Persetujuan Kesepakatan KPI Direktur Utama Tahun 2018
- Persetujuan Realisasi KPI Direktur Utama 2018 Audited
- KPI Direktur Utama Tahun 2019
- KPI Direktur Utama Tahun 2020
- Persetujuan RKAP Tahun 2019
- Persetujuan RKAP Revisi Tahun 2019
- Persetujuan RKAP Tahun 2020
- Persetujuan Revisi ABI 2019
- Persetujuan Penghapusan dan Pelepasan Kapal MPV Petrogas2 dan RIB 4
- Persetujuan Penggunaan kembali RIB 2
- Agreement on the President Director's KPI Agreement in 2018
- Approval on realization of Audited President Director KPI 2018
- President Director KPI 2019
- President Director KPI 2020
- Approval on RKAP 2019
- Approval of the Revised RKAP 2019
- Approval of RKAP 2020
- Approval of the 2019 ABI Revision
- Approval for the Elimination and Release of MPV Petrogas 2 and RIB 4 ships
- Approval for RIB Reuse 2

KUNJUNGAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan kunjungan kerja guna mendapatkan masukan-masukan di lapangan terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kunjungan kerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS' OFFICIAL

Throughout 2019, the Board of Commissioners has conducted work visits to obtain input in the field related to the implementation of supervisory duties and providing advice to the Board of Directors. The work visits conducted by the Board of Commissioners are as follows:

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris tahun 2019 Board of Commissioners' Official Visit in 2019

Waktu Pelaksanaan Time of Implementation	Agenda Agenda
15 Juni 2019 June 15, 2019	1. Kunjungan ke Peteka Karya Samudera (Anak Perusahaan PTK) Batam 2. Progres Pembangunan Kapal Dual Fuel di PAX Ocean 1. Visit to Peteka Karya Samudera (PTK subsidiary) Batam 2. Progress of Dual Fuel Vessels Construction at PAX Ocean

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Komisaris yang dapat menjadi acuan bagi Komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* disusun berdasarkan POJK 33/2014 serta GCG Assessment Report No. 0061- 01 (IA) yang dilakukan oleh unit Audit Internal pada tanggal 29 Mei 2015.

BOARD MANUAL FOR BOARD OF COMMISSIONERS (BOARD CHARTER)

The Board of Commissioners has been equipped with work guidelines (*Board Manual*) in carrying out its duties and responsibilities. The *Board Manual* contains instructions on the work procedures of the Commissioners that can become a reference for Commissioners in carrying out their duties to achieve the Company's vision and mission, so that standards are expected to be achieved in accordance with GCG principles. The *Board Manual* is based on POJK 33/2014 and GCG Assessment Report No. 0061-01 (IA) conducted by the Internal Audit unit on May 29, 2015.

Berikut adalah isi pedoman Dewan Komisaris dalam *Board Manual*: Contents of the Board Manual for Board of Commissioners' are as follows:

Pedoman Dewan Komisaris Board Manual for Board of Commissioners	
Pendahuluan Introduction	Mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang menjadi acuan. Covers objectives, scope and references which serve as a direction.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, penaturan Rapat Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris. Covers duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners, organization of Meeting of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners.
Direksi Board of Directors	Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, pengaturan Rapat Direksi dan organ pendukung Direksi. Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors.
Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Organizational Structure and Basic Principle of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Dewan Komisaris dan Direksi. Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors
Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Management of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors	Mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru pada organ Perseroan serta komunikasi formal. Covers attendance of the Board of Directors in the Meeting of Board of Commissioners, attendance of the Board of Commissioners in the Meeting of Board of Directors, and Joint Meeting of the Board of Commissioners – Board of Directors, as well as the Company's orientation program to new officials in the Company's organ, including formal communication.
Kegiatan Antar-organ Perseroan Activities of the Company's Inter-Organs	Mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris. Covers the implementation of GMS for ratifying RKAP and Annual Report; Annual GMS for ratifying Company Long-Term Plan (RJPP), and the Board of Directors' action requiring a Written Approval from the Board of Commissioners.
Lain-lain Others	Mencakup penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris; sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris; perjalanan dinas dan cuti. Covers allocation of time, facilities and infrastructure, including allocation of the Board of Directors and Board of Commissioners' time; allocation of time of the Board of Directors and Board of Commissioners; business trips and leaves.

KEBIJAKAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan mengenai rapat Dewan Komisaris PTK adalah sebagai berikut:

1. Rapat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan. Rapat Dewan Komisaris yang bersifat rutin/terjadwal terdiri dari:
 - Rapat internal Dewan Komisaris, dilaksanakan setiap bulan;
 - Rapat gabungan dengan Direksi dilaksanakan sekali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi;
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di luar jadwal rutin, jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris, dan/atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;
3. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis;
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
6. Keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Apabila melalui jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan secara tertutup;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara dan ditambah satu suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakili dengan disertai surat kuasa. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat. Lembar keputusan rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir;

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING POLICY

Board of Commissioners meeting policy in PTK are as follows:

1. Meetings are held at least once a month. Board of Commissioners meetings regular/scheduled consist of:
 - Board of Commissioners Internal meetings, held every month;
 - Joint meetings with the Directors are held once a month with a fixed agenda of consultations;
2. The Board of Commissioners meetings can be held outside the regular schedule, if deemed necessary by one or more Members of the Board of Commissioners, and/or written requests from one or more Members of the Board of Commissioners;
3. This Board of Commissioners Meeting is an immediate and strategic meeting;
4. Meetings of the Board of Commissioners can be held through teleconferencing media, video conferences, or other electronic facilities that allow all participants of the Board of Commissioners' meeting to see and hear each other directly and participate in meetings;
5. The Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is not attending or absent, the meeting will be chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner;
6. The Board of Commissioners' meeting Resolutions shall be determined by collective consensus, if no agreement is reached then the decision will be taken by voting. If the number of agree and not agree votes are equal, the meeting resolutions will be taken the same as the Chairman of the meeting, except in the event where the decision-making is taken through closed voting;
7. Each of the Board of Commissioners member is entitled the to cast one vote and another additional vote for the Board of Commissioners member who are represented with a power of attorney. A blank vote (abstained) is considered to approve the proposal submitted at the meeting and is responsible for the results of the meeting's decision. The meeting decision sheet must be signed by the meeting Chairman and all attending participants;

8. Dewan Komisaris mengakui bentuk rapat tanpa melalui kehadiran fisik, atau disebut rapat sirkuler, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk rapat sirkuler bukanlah keputusan yang bersifat strategis, bukan merupakan sebuah keputusan atas sebuah tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/RUPS, permasalahan telah diketahui sebelumnya/pernah dibahas, dan keputusan yang diambil disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. The Board of Commissioners acknowledges a meeting without physical presence, or known as circular meeting, provided the decision taken in the form of a circular meeting is not a strategic decision, it is not a decision on the actions of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners/GMS, the problem has been known before/discussed, and decisions taken were agreed in writing by all members of the Board of Commissioners.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam Melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Rapat Dewan Komisaris sepanjang 2019:

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has held 5 (five) meetings. The Board of Commissioners Meetings frequency and attendance throughout 2019 are as follows:

Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019 Board of Commissioners Attendance in the Board of Commissioners Meeting in 2019				
Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of office	Jumlah Kehadiran/ Jumlah Rapat Total Attendance/ Number of Meetings	% Kehadiran % Attendance
Dharmawan H Samsu	Komisaris Utama President Commissioner	10 Desember 2018 - 19 September 2019 December 10, 2018 – September 19, 2019	4/ 5	80%
Ivan Airlangga	Komisaris Commissioner	22 November 2018 - sekarang November 22, 2018 – now	4/ 5	80%
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	31 Januari 2018 - sekarang January 31, 2018 – now	5/ 5	100%
Joko Eko Purwanto	Komisaris Commissioner	28 September 2019 – 1 November 2019 September 28, 2019 – November 1, 2019	2/ 5	40%
Ignatius Tallulembang*	Komisaris Utama President Commissioner	19 September 2019 - sekarang September 19, 2019 – now	-	-
Alfian Nasution*	Komisaris Commissioner	1 November 2019 - sekarang November 1, 2019 – now	-	-

* Ignatius Tallulembang dan Alfian Nasution belum pernah mengikuti rapat Internal Dewan Komisaris disebabkan tidak adanya jadwal rapat untuk periode Oktober – Desember 2019

*Ignatius Tallulembang and Alfian Nasution have not yet participated in Board of Commissioners internal meetings as there was no meeting schedule for October – December 2019 period

Agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners meeting agenda are as follows:

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2019 Board of Commissioners Meeting Agenda in 2019		
Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
10 Januari 2019 January 10, 2019	1. Review rapat tgl. 28 Desember 2018 2. Permissible Delay 3. Wawancara Calon Anggota Kom. Investasi & RU 1. Review the meeting on December 28, 2018 2. Permissible Delay 3. Interview of Investment & RU Committee Member Candidate	DHS, IA, AF, JEP
28 Januari 2019 January 28, 2019	1. RKAP 2018 (Revisi) 2. RKAP 2019 3. PTK Cab. Arun 4. RJPP PTK 2019 – 2026 5. Rencana Kerja & KPI Dekom 2019 1. RKAP 2018 (Revised) 2. RKAP 2019 3. PTK Arun Branch 4. RJPP PTK 2019 - 2026 5. Work Plan & BOC KPI 2019	DHS, IA, AF, JEP
04 April 2019 April 4, 2019	1. FUPP Kapal MPV PS 2 dan Penggunaan kembali Kapal RIB 2 2. FUPP Kapal RIB 4 1. FUPP of MPV PS 2 and Reuse of RIB Ship 2 Vessels 2. FUPP of RIB 4 Vessel	DHS, IA, AF
30 April 2019 April 30, 2019	1. Telaah Atas Laporan Tahunan PTK 2018 2. Rekomendasi Tertulis atas Pengangkatan Kembali Direktur PKJ 3. Usulan Penghargaan atas Kinerja dan Remunerasi BOD-BOC PTK Tahun 2018 4. Kriteria Pembentukan Kantor Cabang 1. Review on PTK Annual Report 2018 2. Written Recommendation on the Reappointment of PKJ Director 3. Proposed PTK BOD-BOC Performance Reward and Remuneration in 2018 4. Criteria for the Establishment of a Branch Office	DHS, AF
26 Juli 2019 July 26, 2019	1. Kuorum Pelaksanaan Rapa BOC tanggal 26 Juli 2019 2. Usulan Anggota Komite Audit dan Fungsi Internal Audit 3. KPI Direksi PTK 2019 4. Perpanjangan Masa Jabatan Direktur PKG 5. Penyampaian Revisi ABI 6. Arahkan Dkom terkait Knerja 2019 dan Rencana Target Akhir Tahun 2019 1. Quorum for the BOC Meeting Implementation on July 26, 2019 2. Member candidates for Audit Committee and the Internal Audit Function personnel 3. PTK Board of Directors KPI 2019 4. Extension of PKG Director Term of Office 5. Submission of ABI Revisions 6. BoD recommendation related to Performance 2019 and End Year Target Plan 2019	IA, AF



Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, maka pada setiap rapat dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Begitu pula dengan risalah rapat gabungan Dewan komisaris dan Direksi, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir.

Risalah rapat-rapat tersebut dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris di tempat kedudukan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut. Salinan risalah rapat gabungan diberikan juga kepada Direksi.

Board of Commissioners Meeting Resolutions Monitoring and Follow-Up Evaluation

As a form of monitoring and evaluation of the resolutions of the Board of Commissioners' meetings, each meeting minutes are signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Commissioners present. Likewise with the minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Directors, signed by the Chair of the Meeting and all members of the Board of Commissioners and Directors present.

Minutes of internal and joint meeting is developed and administered by Secretary of the Board of Commissioners at the Company's domicile. Each member of the Board of Commissioners is entitled to receive a copy of the minutes meeting, regardless members of the Board of Commissioners present or not present in the meeting. The copy of joint minutes meeting is also provided to the Board of Directors.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi, antara lain pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya. Namun hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan. Pada tahun 2019, tidak ada pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT AND TRAINING

The Board of Commissioners continues to increase its knowledge and competence through competency development programs, including training, seminars, and other activities. However, this can be adjusted to the needs and priorities of the Company. In 2019, there was no training attended by the Board of Commissioners.

PENILAIAN ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS berdasarkan laporan kegiatan pengawasan Perusahaan oleh Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS Tahunan.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

The performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out by the GMS based on the Company's supervisory activities report by the Board of Commissioners submitted at the Annual GMS.

Kriteria Penilaian

Berdasarkan *Board Charter* Dewan Komisaris, penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat berdasarkan kriteria umum, antara lain:

- Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan pemegang saham;
- Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris atau Komite dengan unit kerja lainnya.

Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut:

- Integritas (misalnya benturan kepentingan yang muncul);
- Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas nilai-nilai misi, rencana jangka panjang perusahaan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun;
- Partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis perusahaan;
- Kemampuan Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan tren yang berpengaruh terhadap perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja perusahaan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang;
- Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Komisaris, dengan Direksi, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan.

Hasil Penilaian

Perihal penilaian kinerja Dewan Komisaris Umum diatur dalam Board Manual Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keberhasilan memenuhi target pencapaian Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan Pemegang Saham. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris telah dapat memenuhi target pencapaian KPI kinerja selama tahun 2019.

Assessment criteria

Based on the Board of Commissioners Charter, the Board of Commissioners performance evaluation can be based on general criteria, including:

- Attendance at Board of Commissioners internal meetings;
- Attendance at the Board of Commissioners with the Board of Directors meetings;
- Attendance at the Board of Commissioners meetings with shareholders;
- Attendance at the Board of Commissioners or Committees meetings with other work units.

In addition, the performance of the Board of Commissioners can be assessed according to other factors both individually and collectively as follows:

- Integrity (eg conflicts of interest that arise);
- The Board of Commissioners' knowledge and understanding of mission values, the company's long-term plan, and reflecting this understanding on important issues throughout the year;
- The participation of the Board of Commissioners in meetings, including their ability to deliver, provide arguments and provide solutions regarding the company's strategic issues;
- The ability of the Board of Commissioners to follow issues and trends affecting the company and use this information to assess and direct the company's performance, not only from year to year, but also in the long run;
- Relationship between members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners, with the Directors, and other parties as stipulated in the Articles of Association and laws and regulations.

Assessment result

The Board of Commissioners performance assessment is regulated in the Board Manual. The performance evaluation of the Board of Commissioners is based on the success in meeting the achievement targets of Key Performance Indicators (KPI) set by Shareholders. Overall, the Board of Commissioners has been able to meet the achievement targets of KPI performance during 2019.



Realisasi Kinerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Performance Realization					
Indikator Kinerja Utama Key Performance Indicators	Bobot Weight	Satuan Unit	KPI 2019		Bobot Pencapaian Achievement Weight
			Target Target	Realisasi Realization	
Internal Dewan Komisaris Internal Board of Commissioners					
Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting (Internal BOC, BOC & BOD) (Internal BOC, BOC & BOD)	5%	Frekuensi	12	15	5%
Pelatihan/Pembelajaran Anggota Dewan Komisaris Training for Board of Commissioners Members	5%		2	0	0%
Kunjungan anggota Dewan Komisaris ke lapangan Official Visit of the Board of Commissioners	5%		3	1	1,6%
Dewan Komisaris Dengan Direksi Board of Commissioners with Board of Directors					
Rancangan RKAP RKAP Draft	10%	Hari	25	1	10%
Rancangan RJPP RJPP Draft	10%		50	50	10%
Keputusan Atas Permintaan Dari Direksi Resolution Based on Request from the Board of Directors	20%		18	17	20%
Tanggapan Atas Permintaan Dari Direksi Response to Request from the Board of Directors	20%		18	17	20%
Dewan Komisaris Dengan RUPS Board of Commissioners with GMS					
Kehadiran Dewan Komisaris Dalam RUPS/LB Attendance of the Board of Commissioners in GMS/ Extraordinary GMS	10%	Frekuensi	1	1	10%
Pembuatan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Preparation of Annual Report, Supervisory Duties of the Board of Commissioners	10%		1	1	10%
Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kepada RUPS Public Accounting Firm Appointment Proposal to GMS	5%		1	1	5%
Jumlah Total	100%		91,67%		

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh komite-komite yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Investasi & Risiko Usaha, serta Komite Project & Investment. Penilaian terhadap kinerja Komite-komite berdasarkan hasil penilaian mandiri (self-evaluation) yang disampaikan bersama dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan kegiatan Komite. Uraian dan pengungkapan informasi mengenai penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris terdapat pada bab Komite di bawah Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.

EVALUATION OF COMMITTEE PERFORMANCE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties the Board of Commissioners is assisted by committees responsible directly to the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Investment & Business Risk Committee, and the Project & Investment Committee. The assessment of the performance of the Committees is based on the results of a self-evaluation submitted together with the Annual Report on the Implementation of the Committee's activities. Description and disclosure of information regarding the performance evaluation of the Committee under the Board of Commissioners can be found in the Committee section under the Board of Commissioners of this Annual Report.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Hal yang harus dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga dapat dicapai kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- Terlaksananya dengan baik *internal control* dan manajemen risiko;
- Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
- Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a check and balance relationship for the progress and health of the Company. The Board of Commissioners and Directors in accordance with their respective functions are responsible for the long-term sustainability of the Company's business. What must be done by the Board of Commissioners and Board of Directors together in accordance with their respective functions, so that the long-term sustainability of the company's business can be achieved reflected in:

- Proper implementation of internal control and risk management;
- Achieve a reasonable return for Shareholders;
- Properly protected interests of stakeholders;
- Implementation of leadership and management succession in all lines of the organization;
- The fulfillment of GCG implementation.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala mengadakan rapat gabungan sebagai bentuk kerjasama dan koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan diselenggarakan dalam rangka pembahasan terkait rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING

The Board of Commissioners and Board of Directors regularly hold joint meetings as a form of cooperation and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors. The joint meeting was held in the context of discussion related to work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the approval of the Board of Commissioners.

In 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors held 10 (ten) joint meetings with attendance as follows:



Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Pengurus Tahun 2019 Attendance of The Board of Commissioners and Directors at Join Meeting In 2019

Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Kehadiran/ Jumlah Rapat Attendance/Number of Meetings	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Dharmawan H Samsu*	Komisaris Utama President Commissioner	1 Januari 2019 – 19 September 2019 January 1, 2019 – September 19, 2019	6/ 7	86%
Ivan Airlangga	Komisaris Commissioner	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 – December 31, 2019	7/ 10	70%
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 – December 31, 2019	10/ 10	100%
Joko Eko Purwanto**	Komisaris Commissioner	1 Januari 2019 - 1 November 2019 January 1, 2019 – November 1, 2019	4/ 7	58%
Ignatius Tallulembang***	Komisaris Utama Commissioner	19 September 2019 - 31 Desember 2019 September 19, 2019 – December 31, 2019	3/ 3	100%
Alfian Nasution****	Komisaris Commissioner	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 January 1, 2019 – December 31, 2019	2/ 2	100%
*Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama pada 19 September 2019 No longer serves as President Commissioner on 19 September 2019 **Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris pada 1 November 2019 No longer serves as Commissioner on November 1, 2019 ***Diangkat sebagai Komisaris Utama pada 19 September 2019 Appointed as President Commissioner on September 19, 2019 ****Diangkat sebagai Komisaris pada 1 November 2019 Appointed as a Commissioner on November 1, 2019				
Direksi Board of Directors				
Giri Santoso	Direktur Utama President Director	1 Januari 2019 - 15 Juli 2019 January 1, 2019 – July 15, 2019	4/ 5	80%
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	15 Juli 2019 – 31 Desember 2019 July 15, 2019 – December 31, 2019	5/ 5	100%
Siswoyo	Direktur Operasi Operation Director	1 Januari 2019 – 02 April 2019 January 1, 2019 – April 2, 2019	1/ 1	100%
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	2 April 2019 – 31 Desember 2019 April 2, 2019 – December 31, 2019	9/ 9	100%
Wedi Kamaludin	Direktur Pemasaran Marketing Director	1 Januari 2019 – 20 Juni 2019 January 1, 2019 – June 20, 2019	3/ 4	80%
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	20 Juni 2019 – 31 Desember 2019 June 20, 2019 – December 31, 2019	6/ 6	100%
Demi Aswan	Direktur Keuangan & SDM Finance and HR Director	1 Januari 2019 – 25 November 2019 January 1, 2019 – November 25, 2019	9/ 9	100%

Adapun agenda rapat gabungan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

Board of Directors and Board of Commissioners joint meeting agenda are as follows:

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2019 Board of Commissioners and Directors Meeting Agenda 2019		
Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
28 Januari 2019 January 28, 2019	1. Permissible Delay 2. Evaluasi Kinerja PTK 2018 3. KPI 2018 4. Target Pengembangan Usaha 2019	BOD-BOC
04 April 2019 April 4, 2019	1. Permissible Delay 2. Evaluation on PTK Performance 2018 3. KPI 2018 4. Business Development Targets 2019	BOD-BOC
30 April 2019 30 April 2019	1. Evaluasi Kinerja Ytd. Pebruari 2019 2. FUPP Kapal MPV PS 2 dan Penggunaan kembali Kapal RIB 2 3. FUPP Kapal RIB 4 4. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tanggamus Lampung 5. Lain-lain	BOD – BOC
14 Juni 2019 14 Juni 2019	1. Catatan Dekom atas Surat PTK dan Review Rapat sebelumnya 2. Pembahasan Pra RUPS	BOD – BOC
	1. Board of Commissioners notes to the CAR and the previous meeting's review 2. Pre-AGM Discussion	
	1. Safety Talk 2. Papara Kinerja PTK 3. Rencana Usulan Scrab Kapal 4. Cemmercial Profile ABI 2019 5. RJPP ABI 2019 – 2026 6. Pengembangan Log Base Kabil Batam 7. Pengembangan Lahan Tanggamus 8. Lahan Bagus Kuning	BOD BOC
	1. Safety Talk 2. PTK Performance Papara 3. Proposed Ship Scrab Proposal 4. Cemmercial Profile ABI 2019 5. RJPP ABI 2019 - 2026 6. Development of Batam Kabil Log Base 7. Development of Tanggamus Land 8. Bagus Kuning Land	



Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2019 Board of Commissioners and Directors Meeting Agenda 2019

Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Participants
08 Juli 2019 July 8, 2019	1. Persiapan Pengalihan Kegiatan Keagenan 2. FUPP PS 2 3. Kajian Keekonomian RIB 2 4. Lahan Tanggamus dan Bagus Kuning 5. Kinerja PK Ytd. Mei 2019 6. Kinerja Kapal Ytd. Mei 2019 7. Progress ABI 8. Arahan Dekom 1. Preparation for the Transfer of Agency Activities 2. FUPP PS 2 3. RIB Economic Review 2 4. Tanggamus and Bagus Kuning Lands 5. PK Performance as of May 2019 6. Ship Performance as of May 2019 7. ABI Progress 8. Directives of the Board of Commissioners	BOD – BOC
30 Juli 2019 July 30, 2019	1. Rekomendasi Pengangkatan Kembali Direktur KPJ 2. Pencapaian ABI dan Usaha Revisi ABI 2019 3. Kinerja Keuangan dan Operasional Semester I 2019 4. Arahan Dekom untuk Pencapaian Kinerja 2019 1. Recommendation on Reappointment of KPJ Director 2. ABI Achievement and ABI Business Revision 2019 3. Financial and Operational Performance in Semester I 2019 4. Directives from the Board of Commissioners to Achieve 2019 Performance	BOD - BOC
03 September 2019 September 3, 2019	1. Arahan Dekom 2. Progrss Pencapaian ABI dan PMP 2020 3. Progres Penyampaian Rencana Bisnis PTK 4. Pengajuan Rekomendasi Direktur PKG 5. Rencana Penjualan Kapal MPV PS 2 sebagai scrab 6. Surat Gugatan dari Korindo Jasa Petra 7. Rencana BOD-BOC berikutnya 1. Direction from the Board of Commissioners 2. Program Achievement in ABI and PMP 2020 3. Progress in Submitting the PTK Business Plan 4. Submission of PKG Director's Recommendations 5. MPV PS 2 Ship Sales Plan as a scrab 6. Lawsuit by Petra Korindo Jasa 7. BOD-BOC Future plan	BOD - BOC
07 Oktober 2019 October 7, 2019	1. Sambutan Komut periode Nopember 2018 - September 2019 2. Pengantar Komut (baru) 3. Profile Kinerja dan Prioritas 2019 1. Speech by President Commissioner for November 2018 - September 2019 period 2. Introduction to the (new) President Commissioner 3. 2019 Performance and Priority Profile	BOD - BOC
20 November 2019 November 20, 2019	1. Arahan Komut 2. Pengajuan Perubahan Visi-Misi dan Nilai Perusahaan 3. Laporan Kinerja 2019 4. RKAP 2020 1. Directions from President Commissioner 2. Submission of Changes to Company Vision and Mission and Values 3. 2019 Performance Report 4. RKAP 2020	BOD - BOC
20 Desember 2019 December 20, 2019	1. Laporan Kinerja PTK 2. Rencana Pengembangan Bisnis & Lahan-lahan Milik PTK 1. PTK Performance Report 2. PTK Business & Land Development Plan	BOD - BOC

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Concurrent Position of the Board of Commissioners and Board of Directors			
Nama Nama	Jabatan Position	Jabatan di Perusahaan Lain Position at Other Companies	Nama Perusahaan Company name
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ignatius Tallulembang	Komisaris Utama President Commissioner	Direktur Megaproyek Pengolahan Petrokimia Direktur Megaproyek Pengolahan Petrokimia	PT Pertamina (Persero)
Alfian Nasution	Komisaris Commissioner	Senior Vice President Gas & LNG Management Senior Vice President Gas & LNG Management	PT Pertamina (Persero)
Ivan Airlangga	Komisaris Commissioner	Pensiun Pensiun	-
Achmad Fachruddin	Komisaris Commissioner	Tidak menjabat diperusahaan lain Tidak menjabat diperusahaan lain	-
Direksi / Directors			
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	-	-
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	Komisaris Utama President Commissioner	PT Peteka Karya Tirta
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	-	-
Demsi Aswan	Direktur Keuangan & SDM Finance and HR Director	Komisaris Commissioner	PT Trans Yeong Maritime

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM

Dewan Komisaris dan Direksi PTK tidak memiliki hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham secara langsung maupun tidak langsung.

AFFILIATION AMONG BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHAREHOLDERS

PTK Board of Commissioners and Directors do not have any direct or indirect affiliation among the Board of Commissioners, Board of Directors and Shareowners.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi tercermin melalui seleksi, fit and proper test, hingga ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS. Disamping itu juga memperhatikan kriteria atau persyaratan yang telah diatur dalam Board manual dan CoCG serta ketentuan lain terkait penerapan GCG perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION DIVERSITY

The diversity policy composition of the Board of Commissioners and Directors is reflected through selection, fit and proper test, until determined by shareholders in the GMS. Besides that, it also takes into account the criteria or requirements set out in the Board manual and CoCG as well as other provisions related to the implementation of corporate GCG.



Selanjut dengan kebijakan tersebut, PTK memperhatikan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan latar belakang keahlian, kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki keberagaman usia, pendidikan dan pengalaman kerja.

Pada tahun 2019, keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTK tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi dan usia dari masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selengkapnya dapat dilihat dalam profil Dewan Komisaris dan Direksi.

In line with this policy, CAR considers the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors based on background expertise, adequate competency and relevant to their positions to carry out their duties and responsibilities, as well as having a diversity of ages, education and work experience.

In 2019, diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors of CAR is reflected in the education, work experience, competence and age of each member of the Board of Commissioners. More can be seen in the profiles of the Board of Commissioners and Directors.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pencapaian kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi. Pertimbangan lain adalah ketentuan yang berlaku baik di internal PT Pertamina (Persero) maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- Undang-Undang PT Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 113;
- Peraturan Menteri No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Anggaran Dasar Perusahaan;
- Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 28 Juni 2018 perihal Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS secara sirkuler dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh perusahaan dan pemegang saham. Mekanisme penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK tergambar dalam skema sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors refers to the achievement of the performance of the Board of Commissioners and Directors. Another consideration is the provisions that apply both internally at PT Pertamina (Persero) and the laws and regulations in Indonesia

- PT Law Republic of Indonesia No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 113;
- Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-04/MBU/2014 Determination of the Income of Directors, Board of Commissioners, and Board of Trustees of State-Owned Enterprises;
- Articles of association;
- Decision of the Circular General Meeting of Shareholders on 28 June 2018 concerning the Determination of Awards for the Annual Performance (Tantiem) of the Directors and Board of Commissioners.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Procedure

Amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through a RUPS in a circular manner by taking into account the results of studies conducted by the company and shareholders. The remuneration mechanism for the PTK Board of Commissioners and Directors is illustrated in the scheme as follows:

Direksi mengajukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan industri, pencapaian kinerja perusahaan yang signifikan, tantangan dan/atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan

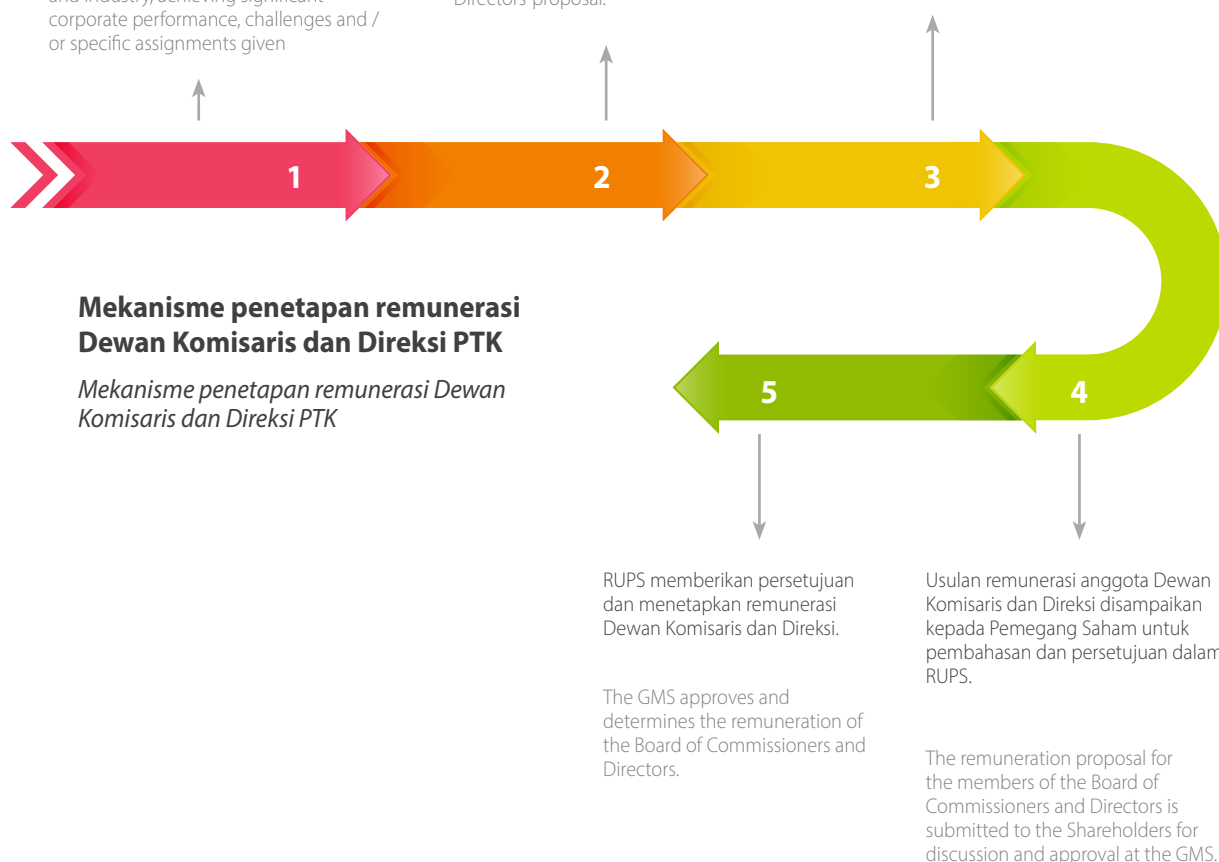
The Board of Directors proposes remuneration for the Board of Commissioners and Directors by considering the complexity of the business and industry, achieving significant corporate performance, challenges and / or specific assignments given

Dewan komisaris melakukan kajian atas kompensasi yang diberikan dengan menggunakan data internal dan eksternal dan menyampaikan tanggapan rekomendasi tertulis atas usulan Direksi.

The board of commissioners reviews the compensation provided by using internal and external data and submits the written recommendation responses to the Directors' proposal.

Rekomendasi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan pembahasan lanjutan dan persetujuan.

Recommendations are submitted to the Board of Commissioners for further discussion and approval.



1. Manajemen mengajukan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kompleksitas usaha dan industri, pencapaian kinerja perusahaan yang signifikan, tantangan dan/ atau penugasan-penugasan spesifik yang diberikan. Pengajuan tersebut diberikan kepada pemegang saham melalui Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV) PT Pertamina (Persero).

1. The management proposes remuneration for the Board of Commissioners and Directors by considering the complexity of the business and industry, the achievement of significant corporate performance, challenges and/or specific assignments given. The submission was given to shareholders through PT Pertamina (Persero) Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV).



2. VP SJV PT Pertamina (Persero) melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kepada Human Resource (HR) PT Pertamina (Persero) untuk menentukan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 3. (HR) PT Pertamina (Persero) melakukan kajian dan penyusunan rekomendasi kepada Direksi PT Pertamina (Persero) dalam bentuk risalah rapat Direksi secara sirkuler.
 4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Pertamina (Persero), HR PT Pertamina Persero menyampaikan kepada SJV Pertamina (Persero) untuk menyelenggarakan RUPS secara sirkuler guna menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK.
2. VP SJV PT Pertamina (Persero) conducted a study and prepared recommendations to PT Pertamina (Persero) Human Resources (HR) to determine the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners and Directors.
 3. (HR) PT Pertamina (Persero) conducts studies and prepares recommendations to the Directors of PT Pertamina (Persero) in the form of minutes of the Board of Directors' circular meeting.
 4. After obtaining approval from the Directors of PT Pertamina (Persero), HR PT Pertamina Persero conveyed to SJV Pertamina (Persero) to hold a RUPS in a circular manner to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners and Directors of PTK.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan besaran remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, mengingat PTK adalah Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN. Dalam penetapan tersebut, remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi antara lain gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Determination of remuneration amount refers to Minister of SOEs Regulation Number: PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, since PTK is a subsidiary of PT Pertamina (Persero) which is a SOE. In the stipulation process, the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors includes salaries or honorariums, allowances and facilities that are fixed, considering business scale factors, business complexity factors, inflation rates, conditions and financial capabilities of the Company, and other factors which is relevant.

The structure and components of the remuneration received by the Board of Commissioners and Directors in 2019 are as follows :

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure 2019

No	Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration	Remunerasi Direksi Board of Directors's Remuneration
1	Honorarium Honorarium	Gaji Salary
2	Tunjangan Tunjangan Transportasi Tunjangan Hari Raya Keagamaan Asuransi Purna Jabatan Allowance Transportation Allowance Religious Holiday Allowance Post-Service Allowance	Tunjangan Tunjangan Transportasi Tunjangan Hari Raya Keagamaan Asuransi Purna Jabatan Allowance Transportation Allowance Religious Holiday Allowance Post-Service Allowance
3	Fasilitas Fasilitas Kesehatan Fasilitas Bantuan Hukum Facilities Health Facilities Legal Assistance Facilities	Fasilitas Fasilitas Kendaraan Ringan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Bantuan Hukum Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi Facilities Light Vehicle Facilities Health Facilities Legal Assistance Facilities Communication and information technology facilities and infrastructure
4	Tantiem Incentive	Tantiem Incentive

Struktur dan komponen remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The structure and components of the remuneration received by the Board of Commissioners and Board of Directors in 2019 are as follows:

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
1	Gaji/Honorarium Salary/Honorarium	Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama Honorarium for the President Director amounted to 45% of President Director's Salary	Gaji Direktur Utama Rp.106.485.000,- Salary for President Director amounted to Rp.106.485.000
		Honorarium Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama Honorarium for Commissioner amounted to 90% of President Commissioner's Honorarium	Gaji Direktur sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama Salary for Director amounted to 90% of President Director's Salary
2	Tunjangan Allowance	Tunjangan Transportasi Dewan Komisaris sebesar 20% Honorarium Komisaris Utama/Komisaris Transportation Allowance for the Board of Commissioners amounted to 20% of President Commissioner/Commissioner's Honorarium	Tunjangan Perumahan (termasuk didalamnya Tunjangan Utilities) • Direktur Utama: Rp27.500.000 • Direksi : 85% dari Tunjangan Perumahan Direktur Utama Housing Allowance (in which includes Utilities Allowance) • President Director: Rp27,500,000 • Board of Directors: 85% of Housing Facilities of President Director



Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
		Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Honorarium Religious Holiday Allowance equivalent to 1 (one) time Honorarium	Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali Gaji Religious Holiday Allowance equivalent to 1 (one) time Salary
		Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Honorarium dalam satu tahun Post-Service Insurance is provided throughout incumbency with premium borne by the Company at maximum 25% of the one-year Honorarium	Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat dengan premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak (maksimum) 25% dari Gaji dalam satu tahun Post-Service Insurance is provided throughout the term of office with premium borne by the Company at 25% maximum of one-year Salary
3	Fasilitas Kesehatan Health Facilities	-	Fasilitas kesehatan Direksi dan keluarga dengan biaya pengobatan sesuai kemampuan Perusahaan Health facilities provided for the Board of Directors and the family with medical treatment adjusted to the Company's capability
4	Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities	-	- Direktur Utama : 1 (satu) unit kendaraan Sedan Kap 2400 cc, A/T Gasoline - Direktur : kendaraan SUV Kap. 2500 cc A/T Diesel, Kap 2700 cc A/T Gasoline atau Sedan Kap. 2000 cc A/T Gasoline - President Director: 1 (one) Sedan, 2400 cc Capacity, A/T Gasoline - Director: SUV with the Capacity of 2500 cc A/T Diesel, Capacity of 2700 cc A/T Gasoline or Sedan with Capacity of 2000 cc A/T Gasoline
5	Fasilitas komunikasi dan sarana teknologi informasi Communication and information technology facilities and infrastructure	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama; - Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (termasuk simcard data) - Tablet PC - Handphone Communication facilities, consisting of Data and Voice are paid by the Company with maximum limit as follows: - President Commissioner received 45% of President Director - Commissioner received 90% of President Commissioner Communication/work instruments were provided one time throughout the term of office in the form of: - Notebook + Modem (including simcard data) - PC Tablet - Handphone	Fasilitas komunikasi yang terdiri dari Data dan Voice dibayarkan oleh Perusahaan dengan batasan maksimum: - Direktur Utama Rp2.000.000; - Direktur sebesar 90% dari Direktur Utama Diberikan alat komunikasi/alat kerja satu kali selama masa jabatan berupa: - Notebook + Modem (termasuk simcard data) - Tablet PC - Handphone Communication facilities, consisting of Data and Voice are paid by the Company with maximum limit as follows: - President Director received Rp2,000,000 - Director received 90% of President Director Communication/work instruments were provided one time throughout the term of office in the form of: - Notebook + Modem (including simcard data) - PC Tablet - Handphone

Tabel Penghitungan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Remuneration Calculation for the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
6	Tantiem Tantiem	Komisaris Utama 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur Utama. President Commissioner received 45% (forty-five percent) of President Director.	Direktur Utama Rp1.783.000.000 President Director received Rp1.783.000.000
		Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama. Members of the Board of Commissioners received 90% of President Director.	Anggota Direksi 85% dari Direktur Utama. Members of the Board of Directors received 85% of President Director.

Rincian remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The remuneration details received by the Board of Commissioners and Directors in 2019 are as follows:

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
The Remuneration Details The Board of Commissioners and Directors

Jabatan Position	Take Home Pay (Rp/Net) Take Home Pay (Rp/Net)	Tunjangan Lain (Rp/Net) Other Benefits (Rp/Net)
Direksi Board of Directors	4.536.261.000	1.549.521.750
Dewan Komisaris Board of Commissioners	2.127.570.300	371.628.000

Rincian Jumlah Remunerasi yang Diperoleh Dewan Komisaris dan Direksi*
Details of Total Remuneration Received by the Board of Commissioners and Board of Directors*

Uraian Description	2019	2018	2017
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
diatas 2 miliar Rupiah above IDR 2 billion	-	-	-
diatas 1 miliar s.d 2 miliar Rupiah above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	-	-	-
diatas 500 juta s.d 1 miliar Rupiah above IDR 500 million up to IDR 1 billion	4	4	3
dibawah 500 juta Rupiah IDR 500 million and less	-	-	-
Direksi Directors			
diatas 2 miliar Rupiah above IDR 2 billion	-	-	-
diatas 1 miliar s.d 2 miliar Rupiah above IDR 1 billion up to IDR 2 billion	4	4	4
diatas 500 juta s.d 1 miliar Rupiah above IDR 500 million up to IDR 1 billion	-	-	-
dibawah 500 juta Rupiah IDR 500 million and less	-	-	-

*tidak termasuk tantiem | *excluded incentive



Tantiem

Ketentuan mengenai pemberian tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, mengacu pada Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 28 Juni 2018 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2017. Pembayaran tantiem bagi anggota Dewan Komisaris PTK yang berasal dari Direksi dan Pekerja PT Pertamina (Persero) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Direksi PT Pertamina (Persero) tidak berhak menerima pembayaran Tantiem. Tantiem yang menjadi haknya akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai jasa manajemen;
- Pekerja PT Pertamina (Persero) berhak menerima Tantiem setelah dikurangi bonus yang diterima yang bersangkutan dari PT Pertamina (Persero) dengan formula perhitungan yaitu: besaran tantiem net-besaran bonus net;
- Dalam hal Pekerja PTK menerima Tantiem lebih kecil dari bonus yang diterima dari PT Pertamina (Persero), maka yang bersangkutan tidak berhak menerima Tantiem;
- Bagian Tantiem dari Komisaris yang merupakan pekerja PT Pertamina (Persero) yang tidak dibayarkan kepada yang bersangkutan berdasarkan ketentuan poin b dan di atas akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada PT Pertamina (Persero) sebagai penghasilan lain-lain.

Incentive

Provisions on incentive distribution for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company refer to Circular GMS Resolution of 28 June 2018 on the Stipulation of Annual Performance Reward on Annual (Incentives) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company of Fiscal Year 2017. Payment of incentives for members of the Board of Commissioners of PTK which provided from the Board of Directors and Employees of PT Pertamina (Persero) is conducted based on the following provisions:

- The Board of Directors of PT Pertamina (Persero) has no rights over incentive. The incentive for which they are entitled for to be paid by the Company to PT Pertamina (Persero) as management service.
- Employees of PT Pertamina (Persero) are entitled for Incentive after being deducted with the bonus received by the concerned member from PT Pertamina (Persero) based on the following calculation formula: amount of net incentive – amount of net bonus;
- In the event Employees of PTK receive smaller Incentive than the bonus received from PT Pertamina (Persero), the concerned member has no rights over the Incentive;
- The Incentive portion from the Board of Commissioners, who are employees of PT Pertamina, which is not paid to the concerned member based on the provision point b and c above will be paid by the Company to PT Pertamina (Persero) as other income.

Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahunan (Tantiem) Determination for Reward for Performance (Incentive)

Uraian Description	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
Tantiem Incentive	Komisaris Utama 45% Dari Direktur Utama Rp802.350.000 President Commissioner received 45% of President Director, amounting to Rp802.350.000	Direktur Utama Rp1.783.000.000 President Director received Rp1.783.000.000
	Komisaris 90% Dari Komisaris Utama Rp722.155.000 Commissioner received 90% of President Director, amounting to Rp722.155.000	Anggota Direksi 85% Dari Direktur Utama Rp1.515.550.000 Members of the Board of Directors received 90% of President Director, amounting to Rp1.515.550.000

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah disajikan di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARES OWNERSHIP

Information of the Board of Commissioners and Board of Directors share ownership has been presented in the Company Profile chapter in this Annual Report.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

SUPPORTING ORGANS UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris PTK dibantu oleh organ pendukung, yaitu: Sekretaris Dewan Komisaris, Komite-Komite, yang diuraikan sebagai berikut:

In carrying out their duties, the PTK Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely: Secretary of the Board of Commissioners, Committees, which are described as follows:

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris berperan membantu Dewan Komisaris dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi serta mengkoordinasikan penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

SECRETARY TO BOARD OF COMMISSIONERS

Role of Secretary to Board of Commissioners is to assist the Board of Commissioners in carrying out administrative activities and coordinating the provision of information needed by the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of the Secretary of the Board of Commissioners is carried out by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of Secretary to Board of Commissioners'



Hendry

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary To Board of Commissioners

Warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1979. Saat ini berusia 40 tahun. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK-053/DEKOM. PTK/2018 tanggal 12 Oktober 2018.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2004 dan gelar Magister Manajemen Risiko dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sr. Analyst Infrastructure Planning, Direktorat Logistik, Supply Chain dan Infrastructure (LSCI) PT Pertamina (Persero) sejak Desember 2019.

Indonesian citizens, domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on October 26, 1979. Currently 40 years old. He served as Secretary of the Board of Commissioners according to SK-053/DEKOM.PTK/2018 on October 12, 2018.

He earned his Bachelor of Economics in Management from Universitas Indonesia in 2004 and Master's degree in Risk Management from the University of Indonesia in 2007. Currently he also serves as Sr. Analyst Infrastructure Planning, Directorate of Logistics, Supply Chain and Infrastructure (LSCI) of PT Pertamina (Persero) since December 2019.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
 - Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
 - Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
 - Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
 - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran administrasi atas pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasehatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya meliputi:

- Menyiapkan dan mengadakan Rapat-rapat Dewan Komisaris (15 kali).
- Menyiapkan draft persetujuan Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners

The Duties and Responsibilities of the Secretary to Board of Commissioners are as follows:

1. The Secretary of the Board of Commissioners conducts activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties in the form of:
 - Preparing meetings including materials for the Board of Commissioners' briefing sheet;
 - Prepare minutes of meetings of the BoC in accordance with the provisions of the Company's articles of association;
 - Administer the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
 - Arranging the Board of Commissioners' Work Plan and Budget
 - Drafting the Reports of the Board of Commissioners;
 - Carry out other duties of the Board of Commissioners.
2. In addition to carrying out the duties referred to above, the Secretary of the Board of Commissioners as the leader of the Secretariat, carries out other tasks in the form of:
 - Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies GCG principles;
 - Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinate Committee members, if needed in order to expedite the duties of the Board of Commissioners;
4. As liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

Secretary to Board of Commissioners Duty Implementation

In accordance with their duties to support the smooth administration of the implementation of supervisory and advisory functions carried out by the Board of Commissioners. Throughout 2019, the Secretary to Board of Commissioners has carried out his duties including:

- Prepare and hold Board of Commissioners Meetings (15 times).
- Prepare a draft approval of the Board of Commissioners.

- Membuat draft Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
- Membuat draft Laporan Kegiatan Tahunan Dewan Komisaris.
- Menindaklanjuti disposisi Dewan Komisaris.
- Draft a Board of Commissioners Annual Work Plan.
- Draft a Board of Commissioners Annual Activity Report.
- Following up on the Board of Commissioners disposition.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan dan diatur melalui PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Bab III pasal 7 bahwa (1) Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. (2) Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdiri dari:

- Honor maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- Fasilitas;
- Tunjangan;
- Tantiem atau insentif kinerja

Remuneration of Secretary to Board of Commissioners

Remuneration for the Secretary to Board of Commissioners is stipulated and regulated through PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, Chapter III article 7 that (1) The income of the Secretary and Staff Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board is stipulated by Board of Commissioners/Board of Trustees by taking into account the company's capabilities. (2) The amount and type of income of the Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board consists of:

- The maximum fee is 15% (fifteen percent) of the salary of the Company's President Director;
- Amenities;
- Allowances;
- Tantiem or performance incentives

KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, audit internal, proses pelaporan keuangan, sehingga perusahaan dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Disamping itu, pelaksanaan tugas Komite Audit, yang efektif akan meningkatkan transparansi struktur internal Perusahaan, sehingga mendorong adanya keterbukaan dan obyektivitas mengenai isu-isu yang berkaitan dengan risiko bisnis, pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

AUDIT COMMITTEE

The Board of Commissioners has established an Audit Committee with the functions to oversee the effectiveness of the internal control system, internal audit, financial reporting processes, thereby the company can be managed based on the transparency, accountability, accountability, independence, and fairness principles.

In addition, the effective implementation of the Audit Committee's tasks will increase the transparency of the Company's internal structure, thereby encouraging openness and objectivity regarding issues related to business risk, financial reporting and corporate governance which will finally improve the quality of decision making at the Board of Commissioners and Board of Directors level.



Visi Dan Misi Komite Audit

Visi

Menjadikan Komite Audit PT Pertamina Trans Kontinental sebagai komite yang memiliki kompetensi yang tinggi dan bekerja secara profesional serta independen.

Misi

Membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, khusus untuk mendorong agar Perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Keanggotaan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas persetujuan RUPS. Ketua Komite Audit adalah Anggota Dewan komisaris yang merupakan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen.

Penentuan anggota Komite Audit mengacu pada ketentuan Per-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan sebagai anggota Komite Audit, yaitu:

- Memiliki integritas yang baik, pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
- Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- Mampu berkomunikasi secara efektif dan dapat menyediakan waktu yang cukup.

Anggota Komite Audit terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali

Vision and Mission of The Audit Committee

Vision

To shape the Audit Committee of PT Pertamina Trans Kontinental as a high-competent committee, working professionally and independently.

Mission

To assist the Board of Commissioners in performing the supervisory function, specifically to encourage sound management in the Company in line with Good Corporate Governance principles.

Membership Of The Audit Committee

Membership of the Audit Committee consists of Chairman and Members, appointed and discharged by the Board of Commissioners and reported to GMS. The Audit Committee comprises at least one Commissioner and two experts who are not employees of Pertamina Trans Kontinental. Chairman of the Audit Committee is a Member of the Board of Commissioners who serves as an Independent Commissioner or a Member of the Board of Commissioners who can act independently.

The determination of the Audit Committee members refers to the provisions of Per-12/MBU/2012 dated August 24, 2012. These provisions regulates the Audit Committee members requirements, as follows:

- Having good integrity, insights as well as sufficient work experience in the field of supervision/ inspection;
- Not having personal interest/involvement that may cause negative impacts and conflict of interest toward the Company;
- Having adequate insights to study and comprehend financial statements;
- Capable to communicate effectively and provide ample time.

The elected members of the Audit Committee who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for

selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, dengan syarat antara lain:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;
- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.

two years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Dismissal of members of the Audit Committee can be done at any time even though his position has not ended, with the following conditions:

- Resigns;
- Loses the citizenship;
- Passed away;
- Performs any actions that brings loss to the Company;
- Violates or unable to meet the requirements as a member of the Audit Committee, as regulated in the Audit Committee Charter;
- Is unable to perform its duties and responsibilities based on the statement given by the Board of Commissioners

Komposisi Anggota Komite Audit

Pada tahun 2019, keanggotaan Komite Audit PTK sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari pihak profesional yang independen. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada POJK 55 dan sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit. Komposisi keanggotaan Komite Audit, PTK periode tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Composition of Audit Committee Members

In 2019, the membership of the Audit Committee in PTK consists of 3 (three) members including 1 (one) chairman who also an Independent Commissioner and 2 (two) members from independent professionals. This is in accordance with the applicable laws and regulations, including but not limited to POJK 55 and in accordance with the provisions of the Audit Committee Charter. The composition of the membership of the Audit Committee in PTK for the 2019 period is as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Composition and Term of Office			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basic Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Achmad Fachruddin	Ketua Chairman	015/DEKOM.PTK/2018 tanggal 08 Maret 2018 015/DEKOM.PTK/2018 tanggal 08 Maret 2018	2018 – saat ini 2018 – Until now
Budiarto	Anggota Member	SK-026/DEKOM.PTK/2019 tanggal 16 Mei 2019 015/DEKOM.PTK/2018 tanggal 08 Maret 2018	2018 – saat ini 2018 – Until now
Budi Prahoro	Anggota Member	SK-044/DEKOM.PTK/2019 tanggal 31 Juli 2019 SK-044/DEKOM.PTK/2019 tanggal 31 Juli 2019	2018 – saat ini 2018 – Until now

Profil Komite Audit



Achmad Fachruddin

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profile of the Audit Committee

Berusia 44 tahun, Warga negara Indonesia berdomisili di Bogor Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1975. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 2002. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai komisaris PT Washtex Indonesia periode 2009 - 2017, sebagai analis PT Media Track periode 2010 - 2015, serta Direktur PT Media Fake Nusantara periode 2014 - 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PTK sejak 2018 berdasarkan Kpts Pemegang Saham secara Sirkuler PTK tanggal 31 Januari 2018.

44 years old, Indonesian citizen domiciled in Bogor. Born in Jakarta on May 10, 1975. He earned his Bachelor's degree in 2002. In his career, he was appointed as Commissioner of PT Washtex Indonesia in the period 2009 - 2017, as an analyst at PT Media Track in the period 2010 - 2015, and Director of PT Media Fake Nusantara in the 2014-2017 period. Currently he is appointed as a PTK Commissioner since 2018 according to Circular PTK Shareholder resolutions as of January 31, 2018.



Budiarto

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Berusia 68 tahun, Warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi Lahir di Medan pada tanggal 04 Maret 1951. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 1980. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manager Internal Audit PT Pertamina (Persero) Daerah III Jawa Barat & DKI periode 2005 - 2006 dan telah memasuki masa pensiun

68 years old, Indonesian citizen domiciled in Bekasi. Born in Medan on March 4, 1951. He earned his Bachelor's degree in 1980. In his career, he was appointed as Manager of Internal Audit of PT Pertamina (Persero) Region III of West Java & DKI for the period 2005 - 2006 and has entered his retirement since 2006.



Budi Prahoro

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Berusia 55 tahun, warga negara Indonesia berdomisili di Jakarta Lahir di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1964. Beliau meraih gelar S2 pada tahun 1998. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manager Internal Audit Sumbagsel periode 2015 - 2017. Saat ini beliau menjabat sebagai Manager Refinery & ISC Internal Audit sejak 2018 - saat ini.

55 years old, Indonesian citizen domiciled in Jakarta. Born in Jakarta on December 29, 1964. He earned his Master's degree in 1998. During his career, he was appointed as the Internal Audit Manager of the Sumbagsel period 2015-2017. Currently he is the Internal Refinery & ISC Manager Audit since 2018 - now.

Independensi Komite Audit

Komite Audit berperan secara profesional dan independen dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya, serta tidak menerima/ melakukan intervensi dari/ kepada pihak lainnya. Hal tersebut sesuai dengan piagam komite dan prinsip-prinsip GCG. Persyaratan independensi telah sesuai dengan kriteria independensi anggota Komite Audit dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada tahun 2019, seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi anggota Komite Audit yaitu:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa nonasuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir;

Independency of Audit Committee Members

The Audit Committee has a professional and independent roles in carrying out its duties and reporting of its work, and does not accept/intervene from/to other parties. This is in accordance with the committee's charter and GCG principles. The independence requirements are in accordance with the independence criteria of members of the Audit Committee with Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No.55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for Audit Committee Work.

In 2019, all members of the Audit Committee have fulfilled the independence criteria for members of the Audit Committee, namely:

- Not being a personnel who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the past six months, except for Independent Commissioners;
- Not being a personnel in a Public Accountant Office, Legal Consultant Office, Public Appraisal Services Office or other parties providing insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last six months;



- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
- Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- Not working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the past six months, except for Independent Commissioners;
- Not having any direct or indirect share ownerships in Issuers or Public Companies.

Piagam Komite

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 006/DEKOM.PTK/2018 tanggal 28 Desember 2018. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Audit.

Committee Charter

Audit Committee has an Audit Committee Charter as the working guideline in carrying out the duties and responsibilities in monitoring and providing advice to the Board of Commissioners. The PTK Audit Committee Charter is stipulated according to Board of Commissioners Decree No. 006/DEKOM.PTK/2018 dated December 28, 2018. The Audit Committee Charter regulates several aspects related to implementation of Audit Committee Chairman and Members' duty, responsibility and obligation.

Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi pengawasan, meliputi:

- Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
- Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*);
- Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko;
- Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal dan Audit Internal serta efektivitas biaya Audit Eksternal;
- Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Audit Committee Duty and Responsibility and Authority

Duties and responsibilities

Duties of the Audit Committee include to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities related to the supervisory function, including:

- Maintain compliance with the Articles of Association, laws and applicable legal provisions and Company policies;
- Uphold organizational discipline and internal control to prevent fraud and abuse;
- Improve the quality of disclosure on matters of financial reporting, accounting systems and risk management policies;
- Examine the scope, accuracy, independence and objectivity of the External Auditor and Internal Audit as well as the cost effectiveness of the External Audit;
- The Audit Committee carries out its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations;

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- Menyeleksi dan mengusulkan calon Auditor independen, mengusulkan kompensasi untuk Auditor serta mengawasi pekerjaan Auditor Independen sesuai standar dan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen;
- Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
- Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Reviewing financial information that will be published such as financial statements, projections and other financial information;
- Selecting and proposing independent Auditor candidates, proposing compensation for the Auditor and supervising the work of the Independent Auditor in accordance with applicable standards and regulations;
- Conduct an evaluation to provide pre-approval for non-audit services assigned to the Independent Auditor;
- Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
- Reporting to the Board of Commissioners regarding the risks faced by the Company and the implementation of Risk Management by the Directors;
- Examining any violation of errors in the decisions of the Board of Directors meetings or irregularities in the results of the decisions of the Board of Directors meetings;
- Receive, examine and forward to interested parties and monitor the follow up of complaints relating to the Company;
- Conduct self-evaluation of the effectiveness of the implementation of tasks and periodically update the Audit Committee Work Guidelines;
- Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners based on the provisions of the applicable laws and regulations;
- In carrying out its duties, the Audit Committee is also guided by the applicable laws and regulations.

Wewenang

Wewenang Komite Audit yaitu:

- Komite Audit, jika diperlukan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, pekerja, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerjasama dengan Audit Internal;
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

Authority

The Audit Committee's authority are:

- When necessary, the Audit Committee has the authority to have full, free, and unlimited access to records, employees, funds, assets, as well as other company resources related to the implementation of its duties.
- Upon implementing its authority, the Audit Committee commits to cooperate with Internal Audit.
- When necessary, with a written approval from the Board of Commissioners, the Audit Committee has the capability to employ experts and/or consultants in assisting the Audit Committee.



Tanggung Jawab

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

- Laporan Tahunan pelaksanaan tugas kegiatan Komite Audit;
- Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran.

Lingkup Pekerjaan

Berdasarkan piagam Komite Audit, ini bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain meliputi:

1. Penelaahan atas informasi keuangan dilakukan mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan menjadi akurat, andal dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Review atas hasil pemeriksaan Auditor Independen atau Auditor Internal;
 - b. Review dalam atau selama proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.
2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen. Dalam rangka audit umum atas keuangan Perusahaan, Komite Audit berperan melaksanakan:
 - a. Seleksi dan penunjukkan Auditor Independen.
 - Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
 - Dalam proses seleksi Auditor independen, Komite Audit harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi dan independensi akuntan publik.
 - b. Pengawasan pekerjaan Auditor independen. Dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh Auditor Independen, Komite Audit harus memastikan bahwa Auditor Independen memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akutansi yang berlaku umum.

Accountability

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners The accountability of Audit Committee is conveyed to the Board of Commissioners in the form of reports as follows:

- Annual Report, detailing the implementation of duties of the Audit Committee activities.
- Report, containing each implementation of duties of the Audit Committee, such as facts from the field, conclusion and recommendation analysis.

Scope of Work

In order to perform its duties and responsibilities, scope of work of the Audit Committee covers the following:

1. Analysis on financial information is carried out in order to be published by the Company in an accurate, reliable, and trusted manner. The analysis may be performed by:
 - a. Reviewing the Independent Auditor or Internal Auditor findings;
 - b. Reviewing the preparation process of financial information that will be published.
2. Selection, appointment, and supervision of the Independent Auditor work. To carry out a general audit on the Company's finance, the Audit Committee has the role of:
 - a. Selecting and appointing an Independent Auditor.
 - Selecting and recommending candidates for Independent Auditor who will audit the Company's Financial Statements to the Board of Commissioners
 - Throughout the selection process, referring to the provisions on legality, competency, and independency of an public accountant.
 - b. Supervising the work of Independent Auditor Having to implement general audit on the financial statements by an Independent Auditor, the Audit Committee should ensure the Independent Auditor has the competence and experience in administering the generally accepted Public Accountant Professional Standards and Accounting Principles.

- Melakukan tinjauan *Audit Planning* dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;
 - Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor dengan Manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat Auditor dengan manajemen dan hal lainnya yang perlu mendapat perhatian, maka harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis.
3. Memastikan agar Auditor Independen mengkomunikasikan hal-hal berikut ini sesuai standar audit:
- a. Tingkat tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi pengendalian internal dan penyajian laporan keuangan;
 - b. Pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi berikut pelaksanaannya;
 - c. Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;
 - d. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;
 - e. Salah saji yang tidak dikoreksi oleh Manajemen dalam Laporan Keuangan dengan alasan yang tidak material;
 - f. *Fraud* dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan manajemen atau pekerja yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan;
 - g. Pertimbangan manajemen yang dipakai sebagai dasar estimasi akuntansi;
 - h. Koreksi Audit yang signifikan;
 - i. Tanggung jawab Auditor dalam mengevaluasi informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, prosedur yang telah dilaksanakan untuk itu dan hasilnya;
 - j. Ketidakepakatan dengan manajemen tentang penerapan prinsip-prinsip akuntansi, lingkup audit dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan Auditor dalam laporan auditnya;
 - k. Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut serta hambatan dalam pelaksanaan audit.
3. Ensuring the Independent Auditor to communicate the following as per the audit standards:
- a. Level of responsibility of an Auditor in evaluating internal control and presentation of financial statements.
 - b. Selection and changes in accounting policies along with its implementation.
 - c. Significant shortcoming in the design and implementation of internal control.
 - d. Method of recording, reporting and significant impact from extraordinary transactions to the financial statements.
 - e. Uncorrected misstatement by the Management in Financial Statements with immaterial reasons.
 - f. Frauds toward the laws and regulations conducted by the management or employees causing uncorrected misstatement in the financial statements.
 - g. Management consideration used as an estimation basis of accounting.
 - h. Significant Audit Correction.
 - i. Responsibilities of an Auditor in evaluating other information in documents containing audited financial statements, procedures conducted based on the audited information, and the results.
 - j. Disagreement with the management on the implementation of accounting principles, scope of audit, disclosure in the financial statements and words used by the Auditor in its audit report.
 - k. Consultation established by the management with other Public Accountant Firm and opinion of the Auditor toward the consulted issues, as well as obstacles in the audit implementation.



4. Memastikan konsep laporan keuangan audit diterima 10 hari sebelum diterbitkan oleh Perusahaan untuk dibicarakan dengan Auditor dan manajemen untuk menilai apakah Auditor sesuai dengan temuan Audit dan pengungkapannya telah memadai;
5. Memastikan bahwa Auditor menyampaikan representasi tertulis yang menyatakan penilaiannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan dan Manajemen terhadap peraturan perundangan dan efektivitas pengendalian internal;
6. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terbukti kuat bahwa independensi Auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa Auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik.
4. Ensuring the concept of an audited financial statements to be received in 10 days prior to the publication by the Company in order to be discussed by the Auditor and management to evaluate whether the Auditor is in accordance with the findings and its disclosure is adequate.
5. Ensuring the Auditor submits a written representation, stating its evaluation on issues related to the Company and Management compliance to the laws and regulations, as well as the effectivity of internal control.
6. Having the capability to recommend termination of employment with the Independent Auditor to the Board of Commissioners, if strongly proven that the Auditor's independency could be disrupted or proven that the examination conducted by the Auditor is not in line with the public accountant standards.

Pelaksanaan Tugas Khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis;
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
 - a. Dilakukan melalui tinjauan (*review*) terhadap semua pencatatan, dokumen, dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani pihak terkait;
 - c. Jika dianggap perlu, melakukan Audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Auditor Internal.
4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada Anggota Komite Audit dan Anggota Dewan Komisaris.

Implementation of Special Duties

1. Distribution of special duties to the Audit Committee by the Board of Commissioners is conducted through a written order.
2. Special duties may include but not limited to investigation to the allegation of errors in the Board of Directors' meeting resolution or fraud in the implementation of the Board of Directors' meeting resolution.
3. Implementation of special duties of the Audit Committee, among which could be performed by:
 - a. Reviewing all records, documents, and other necessary information, including Minutes of Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners' Meeting.
 - b. Proposing questions to the Board of Directors and its staff, to which the results to be included in Question and Answer Minutes of Meeting, signed by related parties.
 - c. If deemed necessary, performing investigative Audit which is conducted by cooperating with Internal Auditor.
4. The Audit Committee is obligated to submit special duties implementation report with maximum confidentiality level, limited to Members of the Audit Committee and Members of the Board of Commissioners.

Kebijakan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Setiap pelaksanaan Rapat dituangkan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (*disenting opinion*) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Rapat Kerja Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee Meeting Implementation Policy

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee's Meeting is held at least once a month. The Meeting of Audit Committee has the capability to make decisions if the attendance amounts to 2/3 of the total members. The meeting is chaired by Chairman of Audit Committee or the most senior of the Members of Audit Committee if the Chairman is unable to attend. If deemed necessary, the Audit Committee is allowed to invite other parties related to the meeting material.

Description of the Meeting implementation is stated in minutes of meeting. The minutes of meeting is signed by the meeting chairman and distributed to all attending and non-attending members of the Audit Committee. Dissenting opinion that occurs in the meeting to be included in the minutes of meeting along with the underlying reasons.

Audit Committee Meeting

In 2019, the Audit Committee held 8 (eight) meetings with attendance level, as follows:

Kehadiran Rapat Komite Audit 2019 Audit Committee Meeting Attendance 2019				
Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Achmad Fachruddin	Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee	1	1	100%
Budiarto	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	8	8	100%
Budi Prahoro	Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	-	-	-



Adapun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai berikut: Audit Committee meeting agenda are as follows:

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2019 Audit Committee Meeting Agenda in 2019		
Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
18 Januari 2019 January 18, 2019	Pemaparan Kinerja Fungsi Internal Audit tahun 2018 Presentation of Performance of Internal Audit Function in 2018	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA
26 Juni 2019 June 26, 2019	Pembahasan Laporan Hasil Audit Discussion of Audit Reports	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA
01 Juli 2019 July 1, 2019	Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan Ship to ship (STS) Datty Acid Methyl Ester (FAME) Discussion on the Implementation of Ship to ship (STS) Datty Acid Methyl Ester (FAME) Activity	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA
04 Juli 2019 July 4, 2019	Pembahasan Pelaksanan Kegiatan Operasional Keagenan Kapal periode Tahun 2019 Discussion on the Implementation of Vessel Agency Operational Activities in 2019	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA
16 Juli 2019 July 16, 2019	1. Hal-hal yang memerlukan Penjelasan 2. Laporan Internal Audit PTK 1. Issues that requiring explanation 2. PTK Internal Audit Report	Ketua dan Anggota Komite Audit serta Direktur Keuangan & SDM Chairman and Member of the Audit Committee also Director of Finance & HR
10 September 2019 September 10, 2019	Pembahasan Hasil Audit Fungsi Fleet Discussion of Fleet Function Audit Results	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA
22 Oktober 2019 October 22, 2019	Pembahasan Accrual Pendapatan dan Biaya Discussion of Accrual Revenues and Costs	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA
23 Oktober 2019 October 23, 2019	Pembahasan Laporan Hasil Tindaklanjuti Discussion of the Follow-up Results Report	Anggota Komite Audit dan IA Member of the Audit Committee and IA

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Laporan yang dibuat dan disampaikan oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris meliputi:

1. Laporan bulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam bulanan yang bersangkutan;
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit;
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Laporan Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melakukan penelaahan melalui rapat, dan berdasarkan kesimpulan penelaahan rapat tersebut, disampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

Implementation Of The Audit Committee's Activities

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners and submits the report to the Board of Commissioners. The report developed and submitted by the Audit Committee to the Board of Commissioners includes:

1. Monthly report regarding the duties performed and realization of work program in the month concerned.
2. Annual report illustrating the implementation of the Audit Committee activities.
3. Report on every special assignment provided by the Board of Commissioners.

Duty Implementation Report

In 2019, the Audit Committee has conducted several reviews through meetings, and based on the conclusion of the review of the meeting, recommendations were submitted to the Board of Commissioners, among others as follows:

Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan

Untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Perseroan secara akurat, andal dan dapat dipercaya, Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dan berdiskusi dengan manajemen dan Internal Audit mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian antara lain Laporan Rugi/Laba dan Pendanaan untuk investasi kapal.

Pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan beberapa aktivitas yaitu:

- Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Perseroan mengenai rencana audit dan implementasinya.
- Melakukan *monitoring* terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan.
- Menelaah temuan-temuan penting dari auditor eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

Evaluasi efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi Audit Internal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui aktivitas sebagai berikut:

- Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2019 dan rencana Audit Internal tahun 2020.
- Mengevaluasi pelaksanaan Audit Internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
- Komite Audit bersama dengan Internal Auditor telah melakukan diskusi dan rapat terkait dengan hal temuan hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
- Internal Auditor telah menerbitkan 16 (enam belas) Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan yang direncanakan dan menyampaikan 154 Rekomendasi

Financial Information and Financial Performance Reviewing

To encourage financial information that is presented and published by the Company accurately, reliably and reliably, the Audit Committee has reviewed the Monthly, Quarterly and Annual Financial Statements and discussed with management and Internal Audit regarding matters that require attention including the Loss Report/Profit and Funding for ship investment.

Supervision of the work of the External Auditor

In carrying out the oversight function of the work of the External Auditor, the Audit Committee carries out several activities, namely:

- Review and discuss with the Company's independent auditors the audit plan and its implementation;
- Monitor the financial reporting process by discussing the audit results of the Company's consolidated financial statements;
- Review important findings from external auditors and monitor the implementation of audit recommendations.

Evaluate the effectiveness of internal control and the implementation of the Internal Audit function

The Audit Committee evaluates the effectiveness of internal control and the implementation of the main duties and functions of the internal auditor through the following activities:

- Review and discuss with the Company's Internal Auditors the audit activities during 2019 and the 2020 Internal Audit plan;
- Evaluate the implementation of Internal Audit and review important findings from internal auditors and monitor the implementation of audit recommendations;
- The Audit Committee together with the Internal Auditor has conducted discussions and meetings related to the findings of the Audit results and the follow-up;
- The Internal Auditor has issued 16 (sixteen) Audit Reports (LHA) as planned and submitted 154 Recommendations.



Selama tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan 7 (tujuh) kali pertemuan dengan Auditor Internal untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan serta hal-hal yang menjadi perhatian Perusahaan dan 1 (satu) kali dengan manajemen Keuangan.

During 2019, the Audit Committee held 7 (seven) meetings with the Internal Auditor to discuss the Audit Reports conducted as well as matters of concern to the Company and 1 (one) time with Financial management.

Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perseroan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan.

Compliance with Regulations and Legislation

The Audit Committee has reviewed and supervised the Company's compliance with laws and regulations, including monitoring the regulations and laws related to the Company's business fields and cases/disputes related to the Company and the Company's business activities.

Melakukan Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris

Komite Audit menyampaikan masukan dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisa dan telaah atas Laporan Management maupun Laporan Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

Identify Issues that require the attention of the Board of Commissioners

The Audit Committee submits input in the form of Recommendations related to matters that require the attention of the Board of Commissioners based on the results of the analysis and review of Management Reports and Financial Reports that are published every month.

Program Pengembangan

Sepanjang tahun 2019, program pengembangan kompetensi Komite Audit adalah sebagai berikut:

Development Program

The Audit Committee competency development program throughout 2019 is as follows:

Pelatihan Komite Audit Audit Committee Training				
Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Location & Time of Implementation
Budiarto	Anggota Komite Audit Audit Committee Membert	Certification in Audit Committee Practices (CACP) Review Course	Indonesian Institute of Audit Committee	Jakarta, 12 – 14 November 2019 Jakarta, November 12-14, 2019
		Perjalanan Profesi Komite Audit di Indonesia: Tantangan dan Prospek Masa Depan The Audit Committee's Professional Journey in Indonesia: Future Challenges and Prospects	Indonesian Institute of Audit Committee	Jakarta, 18 Juni 2019 Jakarta, June 18, 2019

Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian kinerja Komite Audit berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit dan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit menyampaikan laporan kinerja kepada Dewan Komisaris, yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran secara berkala.

Hasil penilaian menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya. Secara umum Dewan Komisaris menilai, Komite Audit telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi Komite Audit mengacu pada peraturan PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Bab IV pasal 16 bahwa (1) Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. (2) Penghasilan Anggota Komite Audit berupa honor maksimal sebesar 20% (duapuluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Komite Investasi dan Risiko Usaha (IRU) berfungsi membantu Dewan Komisaris untuk memantau dan memberikan masukan atas kegiatan investasi yang dijalankan perusahaan serta risiko-risiko yang dimiliki. Pembentukan komite tersebut berdasarkan Surat Dewan Komisaris No.035/DEKOM.PTK/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan Ketua Komite investasi & Risiko Usaha dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK-039/DEKOM.PTK/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Audit Committee Performance Assessment

The Audit Committee's performance evaluation is based on the realization and completion of the work program listed in the Audit Committee's Work Plan and Budget and conducted by the Board of Commissioners. The Audit Committee submits performance reports to the Board of Commissioners, which include field facts, periodic analysis of conclusions and suggestions.

The assessment results become consideration of the Board of Commissioners of the Company to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee for the next term. In general, the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has carried out its duties, responsibilities and authority properly in assisting the Board of Commissioners in relation to the supervisory function.

Remuneration Policy

Audit Committee Remuneration refers to PER-12/MBU/2012 regulation dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board, Chapter IV article 16 that (1) The income of Audit Committee Members is stipulated by the Board of Commissioners/Supervisory Board with due regard to the company's ability. (2) The income of the Audit Committee Members in the form of a maximum fee of 20% (twenty percent) of the salary of the President Director of the Company.

INVESTMENT AND BUSINESS RISKS COMMITTEE

The Investment and Business Risk Committee (IRU) functions to assist the Board of Commissioners in monitoring and providing input on investment activities carried out by the company and its risks. The establishment of the committee was based on the Board of Commissioners' Letter No.035/DEKOM.PTK/2015 dated 30 November 2015 concerning the Determination of the Chairman of the Investment & Business Risk Committee and the Decree of the Board of Commissioners No.SK-039/DEKOM.PTK/2015 dated 28 December 2015 concerning Members Investment and Business Risk Committee.



Visi dan Misi

Penetapan visi dan misi Komite IRU berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DEKOM.PTK/2017 tentang Pemberlakuan Piagam Komite Investasi & Risiko Usaha tertanggal 24 Januari 2017.

Visi

Melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam bidang-bidang yang terkait investasi dengan proses penyusunan dan implementasi aksi-aksi korporasi yang sifatnya strategis demi keberlangsungan perusahaan dan tercapainya sasaran strategis jangka panjang perusahaan (RJPP).

Misi

Membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan secara profesional dan independen dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal-hal yang terkait dengan:

- Mengawasi dan memastikan investasi yang dilakukan Perseroan termasuk Anak Perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Perseroan termasuk pengelolaan risiko usaha yang terkait di dalamnya;
- Mewujudkan pengawasan yang baik atas pelaksanaan kebijakan investasi Perseroan;
- Memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pengelolaan investasi Perseroan.

Keanggotaan Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite IRU terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris sebagai Ketua dan 1 (satu) anggota ahli yang bukan pekerja PTK serta diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas persetujuan RUPS.

Terkait dengan keanggotaan Komite IRU, maka persyaratan dan kualifikasi yang harus dipenuhi adalah:

- Memiliki integritas, objektivitas, dedikasi, dan standar etika yang tinggi serta mampu berkomunikasi dengan baik;

Vision And Mission

Vision and Mission of the IRU Committee were stipulated based on the Board of Commissioners Decision Number 002/DEKOM.PTK/2017 on the Enforcement of Investment & Business Risk Committee Charter dated January 24th, 2017

Vision

To perform, regulate, and uphold Good Corporate Governance (GCG) principles in investments as well as process of preparation and implementation of strategic corporate actions for the company's continuity and achievements of company long-term strategic objectives (RJPP).

Mission

To assist the Board of Commissioners in performing professional and independent supervisory function by considering Good Corporate Governance (GCG) principles in:

- Supervising and ensuring investments conducted by the Company along with the Subsidiaries in accordance with the objectives set by the Company, including business risk management;
- Realizing good supervisory for the implementation of investment policy of the Company;
- Providing recommendations to increase the Company's investment management quality.

Membership Of The IRU Committee

Membership of the IRU Committee consists of at least one Commissioner as Chairman and one expert who is not an employee of PTK. Members of the IRU Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to GMS.

Related to the IRU Committee membership, the requirements and qualifications that shall be fulfilled are as follows:

- Having integrity, objectivity, dedication, and high ethical standards as well as able to communicate well;

- Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam akan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi & Risiko Usaha;
- Memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai antara lain pelaksanaan pengawasan investasi, dan manajemen risiko;
- Mampu melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan independen, semata-mata untuk kepentingan Perseroan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
- Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya.
- In-depth insights and understanding to the duties and responsibilities of the Investment & Business Risk Committee;
- Comprehensive understanding on the implementation of supervision in investment, and risk management;
- Capable in performing its service professionally and independently, for the interest of the Company without any influence from various parties with interest that may conflict with the interest of the Company;
- Able to provide time to perform and complete its duties.

Anggota Komite IRU terpilih yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan paling lama adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pemberhentian Anggota Komite Investasi dan Risiko usaha dapat dilakukan sewaktu-waktu meskipun jabatannya belum berakhir, apabila:

- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan;
- Meninggal dunia;
- Melakukan sesuatu yang bersifat merugikan Perusahaan;
- Melanggar atau tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit;
- Tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
- The appointed IRU Committee members who are not Members of the Board of Commissioners have a maximum term of office of three years and can be extended once for two years, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss them at any time. Dismissal of members of the Investment and Business Risk Committee can be done at any time even though his position has not ended, under following conditions:
- Resignation;
- Losing the citizenship;
- Passing away;
- Any actions that bring loss to the Company;
- Violating or not fulfilling the requirements as a member of the Audit Committee as regulated in the Audit Committee Charter; and
- Unable to perform its duties and responsibilities stipulated by the Board of Commissioners.



Komposisi Anggota Investasi dan Risiko Usaha

Susunan Investasi dan Risiko Usaha PTK pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Investment Members and Business Risks Composition

The composition of the PTK Investment and Business Risk as of December 31, 2019 is as follows:

Komposisi dan Masa Jabatan Composition and Terms of Office			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Masa Jabatan Tenure
Periode Januari – November 2019 January – November 2019 Period			
Joko Eko Purwanto	Ketua Komite Committee Chairman	051/DEKOM.PTK/2018 tanggal 08 Oktober 2018 051/DEKOM.PTK/2018 dated October 8, 2018	8 Oktober 2018 - 27 November 2019 October 8, 2018 – November 27, 2019
Alfian Nasution	Ketua Komite Committee Chairman	058/DEKOM.PTK/2019 tanggal 27 November 2019 058/DEKOM.PTK/2019 dated November 27, 2019	27 November 2019 - saat ini November 27, 2019 – now
Muhammad Irfan Zainul Fikri	Anggota Komite Committee Member	SK-005/DEKOM,PTK/ 2019 tanggal 31 Januari 2019 SK-005/DEKOM,PTK/ 2019 dated January 31, 2019	31 Januari 2019 - saat ini January 31, 2019 – now
Periode November – Desember 2019 November – December 2019 Period			
Alfian Nasution	Ketua Komite Committee Chairman	058/DEKOM.PTK/2019 tanggal 27 November 2019 058/DEKOM.PTK/2019 dated November 27, 2019	27 November 2019 - saat ini November 27, 2019 – now
Muhammad Irfan Zainul Fikri	Anggota Komite Committee Member	SK-005/DEKOM,PTK/ 2019 tanggal 31 Januari 2019 SK-005/DEKOM,PTK/ 2019 dated January 31, 2019	31 Januari 2019 - saat ini January 31, 2019 – now

Profil Komite Investasi dan Risiko Usaha

Profile of the Investment and Business Risk Committee



Alfian Nasution

Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha
Chairman of Investment and Business Risk Committee

1 November 2019 - sekarang
November 1, 2019 - now

Berusia 52 tahun, warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi Lahir di Pekanbaru pada tanggal 14 Pebruari 1967. Beliau meraih gelar Sarjana pada tahun 1992. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Senior Vice President Supply, Distribution & Infrastructure periode 2018 - 2019 Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Vice President Gas & LNG Management sejak 2019 – saat ini.

52 years old, Indonesian citizen domiciled in Bekasi Born in Pekanbaru on February 14, 1967. He earned his Bachelor's degree in 1992. In his career, he was appointed as Senior Vice President of Supply, Distribution & Infrastructure for the period 2018 - 2019. Currently he has served as Senior Vice President of Gas & LNG Management since 2019 - now.



Muhammad Irfan Zainul Fikri

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha
Member of Investment and Business Risk Committee

Berusia 42 tahun, Warga negara Indonesia berdomisili di Bekasi Lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 1977. Beliau meraih gelar S2 pada tahun 2011. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Site Manager Project Pembangunan Kapal periode 2014-2018. Saat ini beliau menjabat sebagai Technical Service Coordinator PT Pertamina International Shipping sejak 1 Juni 2019 berdasarkan SKMJ-00040/K20000/2019-S8 tanggal 27 Mei 2019.

42 years old, Indonesian citizen domiciled in Bekasi Born in Yogyakarta on September 22, 1977. He earned his Masters degree in 2011. In his career, he served as Site Manager of the Ship Building Project for the 2014-2018 period. He currently serves as Technical Service Coordinator for PT Pertamina International Shipping since June 1, 2019 based on SKMJ-00040/K20000/2019-201 on May 27, 2019.



Independensi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite IRU berperan secara profesional dan independen dalam pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil kerjanya. Komite IRU harus memenuhi kriteria independensi, integritas, objektivitas, antara lain:

- Tidak memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi independensi;
- Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.

Independency of IRU Committee Members

The IRU Committee has a professional and independent role in carrying out its duties and reporting on its work. The IRU Committee must meet the criteria of independence, integrity, objectivity, including:

- Has no management, share ownership and/or family affiliations with the Board of Commissioners, Directors, Controlling Shareholders, which can affect independence;
- Do not have personal interests/affiliation that can cause negative impacts and conflicts of interest on the Company.

Piagam Komite

Komite IRU memiliki Piagam Komite IRU sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas, tanggung jawabnya, dan kewajiban Ketua serta Anggota Komite. Piagam Komite IRU ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.002/DEKOM.PTK/2014 tentang Pemberlakuan Piagam Komite Investasi & Risiko Usaha, tertanggal 24 Januari 2017.

Piagam mengatur tentang pedoman agar Komite dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya jawabnya secara profesional, transparan, independen, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan dalam Piagam Komite IRU antara lain: Definisi; visi dan misi; tujuan penyusunan piagam; pembentukan dan keanggotaan komite; tugas, tanggung jawab, dan wewenang; tata cara kerja; kode etik, remunerasi, dan anggaran; serta pelaporan, evaluasi kinerja, pemberlakuan, dan penyempurnaan.

The IRU Committee's Charter

The IRU Committee has an IRU Committee Charter as a work guideline in carrying out the duties, responsibilities and obligations of the Chairman and Committee Members. The IRU Committee Charter was established based on Board of Commissioners Decree No.002/DEKOM.PTK/2014 concerning the Imposition of the Investment & Business Risk Committee Charter, dated 24 January 2017.

The Charter regulates guidelines so that the Committee can carry out its duties, responsibilities and authorities in a professional, transparent, independent, efficient, effective and accountable manner. The provisions in the IRU Committee Charter include: Definition; vision and mission; the purpose of the preparation of the charter; committee formation and membership; duties, responsibilities and authorities; working procedures; code of ethics, remuneration and budget; and reporting, performance evaluation, enforcement, and improvement.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Investasi dan Risiko Usaha

Komite IRU memiliki tugas dan tanggung jawab utama yaitu membantu melakukan pengawasan investasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengelolaan investasi Perusahaan termasuk Anak Perusahaan, termasuk realisasi dan implementasi RKAP dan RJPP.

Duties, Responsibilities, And Authority Of The IRU Committee

Main duties and responsibilities of the IRU Committee are to assist the supervision in investment activities as well as to provide recommendation to the Board of Commissioners on the Company's investment management, including the Subsidiaries along with the realization and implementation of RKAP and RJPP.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite IRU adalah:

- Menelaah efektivitas pedoman investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi Perseroan dan Anak Perusahaan;
- Menelaah dan mengkaji secara periodik pelaksanaan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan investasi yang digariskan termasuk tingkat risiko dari setiap investasi;
- Secara periodik melakukan pengkajian dan menelaah kelengkapan Piagam (Charter) dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;
- Memastikan dibuatnya risalah rapat yang dilakukan Komite Investasi & Risiko Usaha untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara regular;
- Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan Investasi dan Risiko Usaha apabila diminta;
- Membuat rencana kerja tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan investasi Perseroan;
- Melaporkan hasil-hasil kerja Komite Investasi & Risiko Usaha kepada Dewan Komisaris secara periodikal;
- Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan atas investasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Wewenang

Komite IRU memiliki wewenang antara lain:

- Mengakses catatan atau informasi tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Investasi, Panitia Lelang Investasi dan atau fungsi-fungsi operasional Perseroan, termasuk Anak Perusahaan;

Duties and responsibilities

The duties and responsibilities of the IRU Committee are as follows:

- Analyzing the effectivity of investment guidelines established for investment activities of the Company and Subsidiaries;
- Analyzing and reviewing investment activities periodically performed by the Company and Subsidiaries, including the compliance in applying the investment policies outlined covering risk level of each investment;
- Reviewing and analyzing the Charter's comprehensiveness and providing recommendation to the Board of Commissioners for necessary adjustments;
- Ensuring the development of minutes of meeting developed by the Investment & Business Risk Committee reported to the Board of Commissioners regularly;
- Providing references and information for the Board of Commissioners' needs related to the Investment and Business Risk management if requested;
- Developing annual work plan that is in line with the annual work plan established under the Company's investment policy;
- Reporting the results of the Investment and Business Risk Committee work to the Board of Commissioners periodically;
- Performing other duties from the Board of Commissioners related to the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in the context of supervision in the Company and Subsidiaries' investments.

Authority

The IRU Committee holds the authority as follows:

- Accessing records or information on investments, use of funds related to investments, assets as well as other resources of the Company concerning the implementation of duties;
- Requesting and/or assuming cooperation from work partners, among which are Secretariat of the Board of Commissioners and Other Committees, Investment Team, Investment Auction Committee, and/or the Company's operational functions, including the Subsidiaries;



- Melakukan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Tim Investasi;
- Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (Charter) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi & Risiko Usaha, dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Mendapatkan saran dari narasumber, konsultan ataupun tenaga yang profesional apabila diperlukan, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- Performing direct communication with the Board of Commissioners and Investment Team;
- Preparing, evaluating, changing, and implementing the Charter, including deciding the procedure and scope of work of the Investment and Business Risk Committee, with an approval from the Board of Commissioners;
- Obtaining recommendations from sources, consultants, or professional experts if deemed necessary, with a written approval from the Board of Commissioners.

Rapat Kerja Komite Investasi dan Risiko Usaha

Sepanjang tahun 2019, Komite Investasi dan Risiko Usaha melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Business Risk and Investment Committee Meeting

In 2019, the Investment and Business Risk Committee held meetings 5 (five) times with attendance as follows:

Kehadiran Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha 2019 Investment and Business Risk Committee Meeting Attendance in 2019					
Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Terms of Office	Jumlah Rapat Number of Meetings	Frekuensi Frequency	% Kehadiran %Attendance
Joko Eko Purwanto	Ketua Komite Committee Chairman	8 Oktober 2018 - 27 November 2019 October 8, 2018 - November 27, 2019	5	5	100
Muhamad Irfan Zainul Fikri	Anggota Komite Committee Member	31 Januari 2019 - saat ini January 31, 2019 - now	5	5	100

Adapun agenda rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah sebagai berikut :

The following is the agenda of the Investment and Business Risk Committee meeting as follows:

Agenda Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha Tahun 2019 Investment and Business Risk Committee Meeting Agenda in 2019		
Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
23 April 2019 April 23, 2019	Review Buku Tahunan PTK tahun 2018 Review on PTK Annual Report 2018	Ketua & Anggota Komite Chairman & Committee Members
12 Juni 2019 June 12, 2019	Kinerja PTK bulan April 2019 Realisasi pengadaan 18 unit Mooring Boat PTK performance as of April 2019 Realization of the procurement of 18 units Mooring Boat	Ketua & Anggota Komite Chairman & Committee Members
08 Juli 2019 July 8, 2019	Kinerja PTK bulan Mei 2019 KPI TW II 2019 Pembatalan FUPP Kapal RIB 2 Performance as of May in 2019 KPI TW II 2019 Cancellation FUPP RIB 2 ship	Ketua & Anggota Komite, Man SPBD Chairman & Committee Member, Man SPBD
27 Agustus 2019 August 27, 2019	Rencana ABI – Penyertaan Modal Pertamina tahun 2020 Kinerja PTK bulan Juli 2019 & Revisi ABI tahun 2019 Pelepasan Aset MPV PS 2 ABI Plan - Pertamina's Equity Participation in 2020 - PTK Performance as of July 2019 & ABI Revision in 2019 - Release of MPV PS 2 Assets	Ketua & Anggota Komite, Man SPBD Chairman & Committee Member, Man SPBD
28 Oktober 2019 October 28, 2019	Pembukaan Sub Cabang PTK & Pelaksanaan pekerjaan rektifikasi free span gas Pagerungan Prong Opening of PTK Sub Branches & Implementation of Pagerungan Prong free span gas rectification work	Ketua & Anggota Komite Chairman & Committee Members

Pelaksanaan Tugas

Sepanjang tahun 2019, Komite Investasi dan Risiko Usaha telah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2019 – 2026 untuk proyek *business development* (BD) kapal & non-kapal, dan proyek *non-business development* baik korporat PTK maupun grup anak perusahaan .
2. Evaluasi dan memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Investasi 2019;
3. Pembahasan dan evaluasi atas revisi RKAP Investasi 2019 yang diakibatkan berubahnya asumsi dan realisasi sampai dengan pertengahan tahun 2019;
4. Komite IRU memberi masukan kepada Dewan Komisaris untuk dijadikan rekomendasi ke Dewan Direksi PTK perihal pelaksanaan investasi;

Duty Implementation

Throughout 2019, the Investment and Business Risk Committee has reported the implementation of its duties to the Board of Commissioners as follows:

1. Evaluation of the 2019-2026 Company Long-Term Plan (RJPP) for ship & non-ship business development (BD) projects, and non-business development projects both PTK corporate and subsidiary groups;
2. Evaluate and approve the 2019 Investment Work Plan and Budget (RKAP);
3. Discussion and evaluation of the revised 2019 Investment RKAP resulting from changes in assumptions and realization until mid-2019;
4. The IRU Committee provides input to the Board of Commissioners to be made a recommendation to the PTK Board of Directors regarding investment implementation;



5. Pembahasan dan Evaluasi Rencana kerja tahun 2020 (RKAP) 6. Melakukan review dan memberikan masukan ke Dewan Komisaris atas usulan Penyertaan Modal Pertamina (PMP) untuk menunjang kebutuhan pendanaan Investasi tahun 2020 bersama Komite Audit.	5. Discussion and evaluation of the 2020 work plan (RKAP); 6. Reviewing and providing input to the Board of Commissioners on the proposed Pertamina Capital Participation (PMP) to support the funding needs for investment in 2020 with the Audit Committee.

Program Pengembangan

Sepanjang tahun 2019, program pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah sebagai berikut:

Development Program

Throughout 2019, Investment and Business Risk Committee development program is as follows:

Pelatihan Komite Investasi dan Risiko Usaha Business Risk and Investment Committee Training				
Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Location & Time of Implementation
Joko Eko Purwanto	Ketua Komite	-	-	-
Muhammad Irfan Zainul Fikri	Anggota Komite	Certification in Audit Committee	Indonesia Institute of Audit Committee	Jakarta, 12-14 November 2019 Jakarta, November 12-14, 2019

Penilaian Kinerja Komite Investasi dan Risiko Usaha

Pada tahun 2019, Komite IRU telah menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris terkait hasil pengawasan atas investasi perusahaan yang terdiri dari pelaksanaan atas kebijakan investasi, pelaksanaan investasi yang telah berjalan dan rencana investasi dalam tiga bulan berikutnya. Dewan Komisaris juga menerima salinan dari semua risalah/notulen rapat Komite IRU dan laporan-laporan lain yang diperlukan.

Terkait penilaian atas kinerja Komite IRU, Dewan Komisaris mengacu pada laporan dan dokumen, realisasi kegiatan Komite IRU berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris, serta pencapaian dari target-target kinerja yang sudah ditetapkan Dewan Komisaris.

Secara umum Dewan Komisaris memberikan penilaian, Komite IRU telah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan selama tahun 2019.

Investment and Business Risk Committee Performance Assessment

In 2019, the IRU Committee submitted a report to the Board of Commissioners regarding the results of the supervision of the company's investments which consisted of the implementation of the investment policy, the implementation of the ongoing investment and investment plans in the following three months. The Board of Commissioners also receives copies of all minutes of IRU Committee meetings and other necessary reports.

Regarding the assessment of the performance of the IRU Committee, the Board of Commissioners refers to reports and documents, the realization of IRU Committee activities based on the work plan and budget that has been approved by the Board of Commissioners, as well as the achievement of performance targets set by the Board of Commissioners.

In general, the Board of Commissioners provides an assessment, the IRU Committee has carried out its duties, responsibilities and authority properly in helping the Board of Commissioners carry out its supervisory function during 2019.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi bagi Komite Investasi dan Risiko Usaha ditetapkan dan diatur oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Bab IV pasal 22 bahwa (1) Penghasilan Anggota Komite Lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. (2) Penghasilan Anggota Komite Lain berupa honor maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Remuneration Policy

Remuneration for the Investment and Business Risk Committee is determined and regulated by the Board of Commissioners. Pursuant to PER-12/MBU/2012 dated 24 August 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board, Chapter IV article 22 that (1) The income of Other Committee Members is determined by the Board of Commissioners/Supervisory Board with due regard to the company's capabilities. (2) The income of Other Committee Members in the form of a maximum salary of 20% (twenty percent) of the salary of the President Director of the Company.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sampai dengan akhir periode pelaporan, PT Pertamina Trans Kontinental belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi. Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dijalankan oleh PT Pertamina (Persero).

Terkait dengan fungsi remunerasi yang mencakup struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, ditentukan PT Pertamina (Persero) sebagai induk perusahaan berdasarkan rekomendasi dari Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV) PT Pertamina (Persero), untuk kemudian ditetapkan berdasarkan RUPS secara sirkuler.

Terkait dengan fungsi nominasi yang mencakup kebijakan dan kriteria nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi, ditetapkan dalam mekanisme Sidang Dewan Pertimbangan Karir Pekerja PT Pertamina (Persero) dan kemudian ditetapkan Dewan Komisaris serta persetujuan Direksi PT Pertamina (Persero) untuk disahkan berdasarkan RUPS secara sirkuler.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

As of the end of reporting period, PT Pertamina Trans Kontinental has yet to establish Remuneration and Nomination Committee. As a Subsidiary of PT Pertamina (Persero), the function of Remuneration and Nomination Committee is carried out by PT Pertamina (Persero).

Referring to the remuneration function covering the structure, policy, and amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as performance evaluation on the Board of Commissioners and Board of Directors are determined by PT Pertamina (Persero) as the parent company, based on the recommendation of Vice President Subsidiary Joint Venture (SJV) of PT Pertamina (Persero), which then to be stipulated based on circular GMS.

Meanwhile, the nomination function covering policy and criteria of nomination of candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors are determined in the trial mechanism held by Employee Career Advisory Council of PT Pertamina (Persero), and to be stipulated by the Board of Commissioners as well as PT Pertamina (Persero) Board of Directors' approval for ratification in circular GMS.



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung jawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Direksi memiliki tanggung jawab dalam pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola pekerja dan melaporkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan kepada Pemegang Saham dalam RUPS.

Board of Directors is a corporate organ with responsibility upon management of the Company. In carrying out its duties, the Board of Directors is responsible to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is a manifestation of the accountability of the Company's management in accordance with the principles of GCG

The Board of Directors has the responsibility for internal control effectively and efficiently, monitoring risks and managing them, maintaining a conducive working climate so that productivity and professionalism are better, managing employees and reporting the overall performance of the Company to Shareholders at the GMS

KRITERIA DIREKSI

Anggota Direksi PTK wajib memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang telah diatur dalam *Board Manual* dan CoCG Perusahaan, yaitu:

- Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
- Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
- Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

PTK Board of Directors members are required to meet all the requirements of suitability and compliance, which have been regulated in the Company's Board Manual and CoCG, namely:

- Having expertise, integrity, leadership, experience, honesty, goodwill, and high dedication to advance and develop the Company.
- Capable to perform legal actions and have never been declared bankruptcy, as well as have never been a member of the Board of Directors or Board of Commissioners who was guilty of causing the Company bankruptcy.
- Have never been punished due to criminal action that brings loss to the state finance in five years prior to the appointment.
- Not allowed having familial relationship among Members of the Board of Directors and between Members of the Board of Directors with Members of the Board of Commissioners.
- Not representing the interest of a political party.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan perusahaan. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian tersebut meliputi:

- Tahap pertama adalah pengajuan usulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham dengan meminta persetujuan tertulis dari Direksi PT Pertamina (Persero) dan disetujui oleh RUPS PT Pertamina (Persero) sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan;
- Prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjurangan, proses penilaian melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) serta dan ketentuan-ketentuan perihal formulasi penilaian, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau pedoman yang berlaku di PT Pertamina (Persero);
- Sebelum meminta Persetujuan RUPS, Direksi PT Pertamina (Persero) akan meminta persetujuan dan pendapat Direksi PT Pertamina (Persero) terkait rekomendasi calon Direksi Anak Perusahaan. Prosedur permintaan persetujuan tersebut, meliputi:
 - o Direksi Pertamina menyampaikan calon Direksi Anak Perusahaan kepada Menteri BUMN setelah memperoleh persetujuan Direksi.
 - o RUPS Pertamina memberikan penetapan tertulis.
 - o Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak Manajemen.

RUPS memiliki kewenangan dalam pemberhentian Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian tersebut dapat disebabkan antara lain:

- Masa jabatannya berakhir;
- Mengundurkan diri;
- Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT AND DISMISSAL

The terms of appointment and dismissal of the Directors refer to the Articles of Association and the provisions of the company's laws and regulations. The appointment and dismissal procedures include:

- First stage is to propose candidates for Subsidiaries' Board of Directors by PT Pertamina (Persero) Board of Directors as Shareholder by requesting a written approval from the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) and approved by PT Pertamina (Persero) GMS prior to being stipulated in the Subsidiaries' GMS.
- The appointment procedure for candidates of the Company's Board of Directors undergoes evaluation, election process, assessment process through fit and proper test as well as provisions on assessment formulation by continuously referring to the prevailing laws and regulations and/or guidelines at PT Pertamina (Persero).
- Prior to requesting GMS Approval, the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) will request an approval and recommendation of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) regarding the recommendation of candidates for Subsidiaries' Board of Directors. The procedure of approval request includes:
 - o The Board of Directors of Pertamina to submit the candidates for Subsidiaries' Board of Directors to Minister of SOE after acquiring the Board of Directors' approval.
 - o Pertamina GMS to provide written stipulation.
 - o The selected Board of Directors to sign Management contract.

The authority of dismissing the Board of Directors belongs to GMS, in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association. The discharge of Members of the Board of Directors may occur due to:

- End of term of office;
- Resignation;
- Losing the Indonesian citizenship;
- Passed away;
- Discharge based on GMS Resolution



UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DIREKSI

Sebelum diangkat menjadi anggota Direksi PTK, calon anggota Direksi harus mengikuti mekanisme nominasi yaitu lulus *fit and proper test* serta memperoleh persetujuan dari pemegang saham. Pada tahun 2019, Direksi PTK telah memenuhi persyaratan dan lulus *fit and proper test* yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, seluruh Direksi Perseroan telah terbukti merupakan anggota yang memiliki integritas (kepatutan), kompetensi (kelayakan), reputasi, dan pengalaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BOARD OF DIRECTORS FIT AND PROPER TEST

Prior appointed as a member of the PTK Board of Directors, prospective members of the Board of Directors must follow the nomination mechanism, namely passing the fit and proper test and obtaining approval from shareholders. In 2019, the Directors of PTK have fulfilled the requirements and passed the fit and proper test conducted by PT Pertamina (Persero). As such, all the Directors of the Company have been proven to be members who have integrity (propriety), competence (worthiness), reputation, and experience in carrying out their duties and responsibilities.

KOMPOSISI DAN MASA JABATAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2019, terdapat 4 (empat) kali perubahan susunan Direksi PTK melalui RUPS Sirkuler. Berikut adalah komposisi dan masa jabatan Direksi PTK:

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION AND TERMS OF OFFICE

During 2019, there were 4 (four) changes in the composition of the PTK Directors through the Circular GMS. The following are the composition and terms of service of the PTK Directors:

Komposisi dan Masa Jabatan Direksi Board of Directors Composition and Terms of Office			
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Basis	Periode Masa Jabatan Terms of Office
Giri Santoso	PJ Direktur Utama Act. President Director	Akta No.12 tanggal 12 April 2017 Deed No.12 dated April 12, 2017	1 Januari 2019 - 15 Juli 2019 January 1, 2019 - July 15, 2019
Nepos MT Pakpahan	Direktur Utama President Director	Akta No.5 tanggal 17 Juli 2019 Deed No.5 dated July 17, 2019	15 Juli 2019 - 31 Desember 2019 July 15, 2019 - December 1, 2019
Wedi Kamaludin	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No.32 tanggal 13 Oktober 2017 Deed No.32 dated October 13, 2017	1 Januari 2019 - 20 Juni 2019 January 1, 2019 - June 20, 2019
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Akta No.4 tanggal 12 Juli 2019 Deed No.4 dated July 12, 2019	20 Juni 2019 - 31 Desember 2019 June 20, 2019 - December 31, 2019
Siswoyo	Direktur Operasi Operation Director	Akta No.1 tanggal 1 September 2016 Deed No.1 dated September 1, 2016	1 Januari 2019 - 02 April 2019 January 1, 2019 - April 2 2019
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	Akta No.9 tanggal 24 April 2019 Deed No.9 dated April 24, 2019	2 April 2019 - 31 Desember 2019 April 1, 2019 - December 31, 2019
Demsi aswan	Direktur Keuangan dan SDM Finance and Human Resources Director	Akta No.39 tanggal 18 Mei 2018 Deed No.39 dated May 18, 2018	1 Januari 2019 - 25 November 2019 January 1, 2019 - November 25, 2019
Nepos MT Pakpahan	PLT Direktur Keuangan dan SDM Act. Finance and Human Resources Director	Surat Penunjukan Pelaksana Tugas No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019 Letter of Acting Appointment No. SPPLT-056/DEKOM.PTK/2019	25 November 2019 - 31 Desember 2019 November 25, 2019 - December 31, 2019

PROFIL DIREKSI

Seluruh profil Direksi PTK tahun 2019 telah disajikan pada bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI BARU

Program pengenalan dilakukan untuk mengenalkan perusahaan kepada Direksi yang baru serta memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, panduan kerja, dan lain-lainnya. PTK melakukan pengenalan program pengenalan Direksi baru pada 2019 yakni Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Direktur Operasi dengan menyampaikan berita acara.

Program pengenalan bagi Anggota Direksi baru, mencakup beberapa hal:

- Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, nilai dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit usaha dan anak perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, Manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;
- Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta pendelegasian wewenang;
- Penjelasan mengenai stakeholders utama Perseroan dan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- Pengenalan operasi Perusahaan;
- Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
- Aspek *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DIREKSI

Board Manual merupakan pedoman yang mengatur berbagai aspek Direksi dalam menjalankan operasional maupun hubungan kerja di perusahaan antara lain dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Board Manual disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik

PROFILE OF BOARD OF DIRECTORS

All profiles of PT Board of Directors in 2019 have been presented in the Corporate Profile chapter of this Annual Report.

ORIENTATION PROGRAM BOARD OF DIRECTORS

The orientation program was carried out to introduce the company to the new Directors as well as provide an overview of business activities, future company plans, work guides, and others. PTK introduced the introduction of a new Board of Directors program in 2019 namely the President Director, Marketing Director and Operations Director by delivering the minutes.

Orientation program for new Board of Directors members includes several points, such as.

- Illustration about the Company related to the Vision and Mission, values and cultures, objectives and strategies, business units and subsidiaries, finance and operation performance, short- and long-term business plan, information technology application, Risk Management, business competition condition, and other strategic issues;
- Description on duties and responsibilities of the Board of Directors as well as the delegation of authority;
- Description on the Company's main shareholders and corporate social responsibility;
- Company's operation introduction;
- Laws and regulations related to business activities of the Company;
- Good Corporate Governance aspect in the Company.

BOARD MANUAL FOR BOARD OF DIRECTORS

The Board Manual is a guideline governing various aspects of the Board of Directors in carrying out operations and working relationships in the company, including in carrying out its duties, authorities and obligations. The Board Manual is based on best practices in implementing GCG



pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan, arahan dari Pemegang Saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Direksi.

Board Manual Direksi PTK mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

Mencakup maksud dan tujuan, ruang lingkup dan referensi yang menjadi acuan

Dewan Komisaris

Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris, pengaturan Rapat Dewan Komisaris dan organ pendukung Dewan Komisaris

Direksi

Mencakup tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, pengaturan Rapat Direksi dan organ pendukung Direksi

Struktur Organisasi dan Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Mencakup struktur organisasi, benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Tata Laksana Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Mencakup kehadiran Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris, kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan penyelenggaraan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi dan program pengenalan Perseroan kepada pejabat baru pada organ Perseroan serta komunikasi formal

principles, corporate legal principles, laws and regulations, directives from shareholders, and the provisions of the Articles of Association which govern the Board of Directors' work procedures.

PTK Board Manual for Board of Directors includes the following :

Introduction

Covers objectives, scope and references which serve as a direction

Board of Commissioners

Covers duties, authority, and obligations of the Board of Commissioners, organization of Meeting of the Board of Commissioners, and supporting organs of the Board of Commissioners

Board of Directors

Covers duties, authority, and obligations of the Board of Directors, organization of Meeting of the Board of Directors, and supporting organs of the Board of Directors

Organizational Structure and Basic Principle of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

Covers organizational structure, conflict of interest, and position ethics, as well as basic principles of relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors

Management of Work Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

Covers attendance of the Board of Directors in the Meeting of Board of Commissioners, attendance of the Board of Commissioners in the Meeting of Board of Directors, and Joint Meeting of the Board of Commissioners – Board of Directors, as well as the Company's orientation program to new officials in the Company's organ, including formal communication

Kegiatan Antar-organ Perseroan

Mencakup mengenai penyelenggaraan RUPS, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan RKAP, penyelenggaraan RUPS dalam rangka pengesahan Laporan Tahunan, penyelenggaraan RUPS Tahunan dalam rangka pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan perbuatan Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris.

Lain-lain

Mencakup penggunaan waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup waktu, sarana dan fasilitas yang mencakup penggunaan waktu Direksi dan Dewan Komisaris; sarana dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris; perjalanan dinas dan cuti

Inter-Organs Activities of the Company

overs the implementation of GMS for ratifying RKAP and Annual Report; Annual GMS for ratifying Company Long-Term Plan (RJPP), and the Board of Directors' action requiring a Written Approval from the Board of Commissioners

Others

Covers allocation of time, facilities and infrastructure, including allocation of the Board of Directors and Board of Commissioners' time; allocation of time of the Board of Directors and Board of Commissioners; business trips and leaves

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* antara lain sebagai berikut:

- Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non-keuangan;
- Memenuhi ukuran kinerja yang jelas lengkap dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan;
- Menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian intern;
- Melaksanakan manajemen risiko;
- Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;
- Menindaklanjuti temuan-temuan audit Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris;
- Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penanganan HSSE dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;

BOARD OF DIRECTORS DUTY AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of the Directors are set out in the Articles of Association and the Board Manual, as follows::

- Leading and managing the Company in accordance with the interest and objectives of the Company;
- Controlling, maintaining, and managing the Company's assets.
- Implementing RJPP and RKAP, including financial and non-financial target achievement;
- Fulfilling clear, complete, and balanced performance indicators, either from financial or non-financial aspects to determine the Company's mission and objectives achievement;
- Implementing effective internal control system and providing assertion on internal control;
- Performing risk management;
- Establishing and utilizing information technology;
- Following up audit findings of Internal Audit and External Audit, as well as reporting to the Board of Commissioners;
- Reporting relevant information to the Board of Commissioners, among which on key managers succession/mutation/promotion, HR development program, risk management accountability, HSSE management, and information technology utilization performance;



- Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS;
- Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Organizing GMS and preparing GMS Minutes Meeting;
- Taking into account the interest of stakeholders in accordance with ethical values and the prevailing laws and regulations.

Pembagian Tugas Direksi

Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan membagi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Direktur Utama

Bertindak atas nama Direksi dalam menentukan, memusyawatkan dan menetapkan penyusunan strategi, perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pengoperasian kapal-kapal milik Perusahaan pelayaran dan pihak-pihak pengguna jasa yang membutuhkan/mempergunakan jasa Perusahaan, baik yang bergerak di bidang pencarian minyak lepas pantai maupun sektor lain yang bersifat khusus dalam bidang angkutan laut maupun jasa kepelabuhan, agar memperoleh profit optimal dan mengembangkan pangsa pasar dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Direktur Operasi

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan penyusunan strategi serta pengembangan usaha terkait pelaksanaan operasional Perusahaan khususnya meningkatkan keandalan operasi kapal sehingga commission days dapat tercapai. Melalui penguatan operasional, diharapkan pelaksanaan Bisnis Perusahaan dapat memperoleh profit optimal dengan tetap memperhatikan etika Bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan

Direktur Pemasaran

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi dan pengembangan usaha serta mengidentifikasi kegiatan komersial baru (*new venture*) yang mendorong pertumbuhan bisnis PTK melalui pemasaran dan penjualan (*marketing & sales*) jasa sewa

Board of Directors Division of Duty

In carrying out its activities, members of the Company's Board of Directors divide their duties and responsibilities as follows:

President Director

Acting on behalf of the Board of Directors in determining, deciding, and stipulating the strategies, planning, as well as implementation of all operating activities of ships owned by the Shipping Company and other service users, requiring/utilizing services of the Company, either offshore oil exploration as well as other sectors specialized in marine transportation or port service in order to gain optimal profit and expand market share by taking into account business ethics and upholding the policies established by the Company's Board of Commissioners.

Operation Director

Deciding, controlling, and directing the preparation of strategies as well as business development related to the Company's operational, specifically in increasing the reliability of ship operation up to the achievement of commission days. Through operational enforcement, the Company's Business is expected to gain optimal profit by continuously considering Business ethics and upholding the policies established by the Company's Board of Commissioners.

Marketing Director

Deciding, controlling, and directing the preparation of strategies and business development, as well as identifying new commercial activities (*new venture*) which promote business growth in PTK through marketing and sales in ships rental and maritime services to the customers from oil

kapal dan jasa maritim kepada pelanggan dari segmen perusahaan oil & gas dan perusahaan non oil & gas, untuk tujuan peningkatan pendapatan dan memperoleh profit optimal bagi perusahaan melalui kegiatan komunikasi pemasaran yang profesional, dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan perusahaan

Direktur Keuangan & SDM

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan kelancaran dalam pengelolaan dana Perusahaan sehingga dapat menjamin likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menetapkan kebijakan dengan management akuntansi dan perbendaharaan serta penyiapan laporan/data keuangan yang akurat dan tepat waktu serta kegiatan Human Resources & General Affair untuk seluruh pekerja Perusahaan untuk menjadikan pekerja PT Pertamina Trans Kontinental sebagai sumber daya unggul, strategis yang mampu mengelola Perusahaan secara Profesional.

and gas and non- oil and gas segments, aiming to increase revenue and gain optimal profit for the company through professional marketing communication activities, by continuously considering business ethics and upholding the policies established by the company.

Director of Finance and Human Resource

Deciding, controlling, and directing the simplicity in managing the Company's funds in order to guarantee liquidity, solvency, and rentability in stipulating policies with accounting and treasure management, accurate and prompt financial report/data preparation, as well as Human Resources & General Affair activities for all employees of the Company to shape the employees of PT Pertamina Trans Kontinental into excellent and strategic resources with the capability to manage the Company professionally.

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DIREKSI

Dalam melakukan tindakan pengurusan perusahaan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- Mengidentifikasi peluang bisnis;
- Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesil mutasil promosi manajer

BOARD OF DIRECTORS' RIGHTS, OBLIGATIONS AND AUTHORITIES

In carrying out the Company management actions, the Board of Directors has the following authority:

- Stipulating policies relate to the Company's management, including manpower policies.
- Appointing and discharging employees based on the Company's internal regulations and the prevailing laws and regulations;
- Managing delegation of authority/power of attorney of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court. Preparing Company Long-Term Plan and Company Work Plan and Budget;
- Identifying business opportunities
- Composing and implementing proper accounting system with the Financial Accounting Standards
- Holding an orientation program for new relevant Directors to the Board of Commissioners, among which on the succession/mutation/promotion of



- kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
- Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS
 - Memperhatikan kepentingan Stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (*knowledge skill*) bagi Direksi
 - Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan;
 - Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan;
 - Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/ level;
 - Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan;
 - Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan;
 - Mencantumkan kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- key manager (senior), HR development program, Risk Management accountability, L2K3 implementation, and information technology utilization performance;
 - Organizing General Meeting of Shareholders (GMS) and preparing GMS minutes of meeting
 - Taking into account the interest of Stakeholders in accordance with ethical values and the prevailing laws and regulations;
 - Preparing and organizing learning program (*knowledge skill*) for the Board of Directors
 - Demonstrating accountability and providing all information on the Company's state of condition and operation;
 - Signing a Conflict of Interest Integrity Pact;
 - Determining the duties, responsibilities, and authority of the Management, as well as performance indicators in a clear manner to each level;
 - Signing a Management contract every year that states the Board of Directors' statement/commitment to meet all stipulated targets;
 - Preparing and publishing the Company's Annual Report;
 - Disclosing the Company's shares ownership and/ or families in other Companies in the Company's Annual Report.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Sepanjang tahun 2019 anggota Direksi PTK telah mengikuti pelatihan, seminar ataupun workshop, seperti yang tertera di bawah ini:

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT AND TRAINING

Throughout 2019 PTK Directors have participated in training, seminars or workshops, as follows:

Program Kompetensi Direksi 2019 Directors Competency Program 2019				
Nama Name	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Place & Time of Implementation
Hadi Purnomo	Direktur Operasi Operation Director	Digital Supply Chain	Asia Anti Fraud	Bandung, 21-22 Oktober 2019 Bandung, Oktober 21-22, 2019
Arsono Kuswardanu	Direktur Pemasaran Marketing Director	Digital Supply Chain	Asia Anti Fraud	Bandung, 21-22 Oktober 2019 Bandung, Oktober 21-22, 2019

PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DIREKSI TAHUN 2019

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus perusahaan.

Keputusan-Keputusan Strategis

Keputusan-keputusan strategis yang diberlakukan Direksi pada tahun 2019 antara lain terkait RJPP, RKAP, KPI, kebijakan keuangan, rencana investasi, pengangkatan Komisaris anak perusahaan, pembukaan sub cabang.

INDEPENDENSI DIREKSI

Independensi Direksi menjamin terlaksananya peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, Direksi PTK berkedudukan independen dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator yang menunjukkan independensi Direksi antara lain tidak adanya rangkap jabatan; serta tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat

Rapat Direksi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Direksi untuk membahas permasalahan operasional atau untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan Perseroan. Berdasarkan Board Manual Perusahaan, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri seluruh anggota Direksi secara fisik.

IMPLEMENTATION OF DUTIES, AUTHORITY, AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2018

In 2019, the Board of Directors has exercised its duties and responsibilities in managing the Company.

Strategic Decisions

Strategic decisions adopted by the Board of Directors in 2019 include among others RJPP, RKAP, KPI, financial policies, investment plans, appointment of Commissioners in subsidiaries, sub-branches opening.

INDEPENDENCY OF BOARD OF DIRECTORS'

The independency of the Board of Directors guarantees the implementation of roles and responsibilities in managing the company's business activities. Therefore, The Board of Directors of PTK is independent in performing its duties, authority, and obligations. The independency of the Directors guarantees the implementation of roles and responsibilities of each Member of the Board of Directors by continuously prioritizing compliance with the prevailing laws and regulations.

Indicators that display the Board of Directors' independency are the absence of concurrent position; as well as no third degree familial relationship among Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS MEETING POLICY AND IMPLEMENTATION

Policies of Meeting

Meeting of the Board of Directors is a meeting conducted by the Board of Directors to exchange views on operational issues or to make decisions on the Company's policies. According to the Company's Board Manual, Meeting of the Board of Directors should be held periodically and attended by all members of the Board of Directors physically.



Ketentuan pelaksanaan Rapat Direksi berdasarkan Board Manual:

1. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum satu kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:
 - a. Dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi;
6. Panggilan rapat terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;
7. Rapat Direksi dapat diadakan dengan cara konferensi antara para Anggota Direksi yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap Anggota Direksi dapat saling mendengar/berkomunikasi dan berpartisipasi dalam Rapat;
8. Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Perseroan. Materi rapat dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.

Rapat Direksi

Dalam Melaksanakan tugasnya, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Berikut adalah frekuensi dan kehadiran Rapat Direksi sepanjang 2019:

Provisions on the implementation of Meeting of the Board of Directors are based on the Board Manual:

1. Board of Directors meetings are held regularly at least once in 1 (one) month.
2. Directors' meetings can be held at any time if:
 - a. Considered necessary by one or more members of the Board of Directors.
 - b. By written request of one or more members of the Board of Commissioners.
 - c. Shareholders who have the largest number of shares by mentioning the matters that will be discussed.
3. Notice to Board of Directors meetings are conducted in writing by members of the Board of Directors who are entitled to represent the Company and submitted within a period of no later than 3 (three) days before the meeting is held.
4. The meeting call must include the event, date, time and place of the meeting.
5. Directors' meetings are held at the Company's place of domicile or at the place of business activities of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.
6. Prior meeting notice are not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting.
7. Board of Directors meetings can be held by conference between Directors who are in different places, through conference calls, video conferences or other communication equipment that enable each member of the Board of Directors to listen/ communicate with each other and participate in the Meeting.
8. Meeting materials are prepared by the Corporate Secretary. Meeting material can be delivered together with the invitation.

Board of Directors Meeting

In carrying out their duties, the Board of Directors has held 19 (nineteen) meetings. The Board of Directors' Meeting frequency and throughout 2019 are as follows:

Kehadiran pada Rapat Direksi 2019 Attendance at 2019 Directors' Meeting

Nama Name	Inisial Initial	Jabatan Position	Periode Jabatan Term of Office	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Meeting Attendance	% Kehadiran % Attendance
Giri Santoso	GS	Direktur Utama President Director	10 April 2017 - 15 Juli 2019 April 10, 2017 - July 15, 2019	14	14	100
Nepos MT Pakpahan	NP	Direktur Utama President Director	15 Juli 2019 - sekarang July 15, 2019 - until now	17	17	100
Siswoyo	SS	Direktur Operasi Operation Director	18 Agustus 2016 - 2 April 2019 August 18, 2016 - April 2, 2019	6	6	100
Hadi Purnomo	HP	Direktur Operasi Operation Director	2 April 2019 - sekarang April 2, 2019 - until now	26	23	88,4
Wedi Kamaludin	WK	Direktur Pemasaran Marketing Director	2 Oktober 2017 - 20 Juni 2019 October 2, 2017 - June 20, 2017	13	6	46,1
Arsono Kuswardanu	AK	Direktur Pemasaran Marketing Director	20 Juni 2019 - sekarang June 20, 2019 - until now	19	18	94,7
Demi Aswan	DA	Direktur Keuangan & SDM Finance & HR Director	08 Mei 2018 - 25 November 2019 May 8, 2018 - November 25, 2019	28	21	75

Agenda rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors meeting agenda are as follows:

Agenda Rapat Direksi 2019 2019 Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Senin, 09 Januari 2019 Monday, January 9, 2019	1. Rencana MWT Komisaris 2. Progress Project Tanggamus 3. Progress FS FAME Balikpapan 4. Progress Transko Antasena & Transko Yudistira 5. Rencana Investasi Pengadaan Kapal 2019 6. Lain-lain	GS, SS, WK, DA
Senin, 28 Januari 2019 Monday, January 28, 2019	1. Progress Project Tanggamus 2. Progress FS FAME Balikpapan 3. Penyelesaian Piutang 4. Lain-lain	GS, SS, DA



Agenda Rapat Direksi 2019 2019 Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Senin, 18 Februari 2019 Monday, February 18, 2019	1. Tanggamus 2. Progress Transko Antasena & Transko Yudistira 3. Kebutuhan Kapal untuk Sinergi Pertamina & Pelindo 4. SDM Cabang Sorong 5. Laporan Kinerja Keuangan Januari 2019 6. Lain-lain	GS, SS, WK, DA
Senin, 25 Februari 2019 Monday, February 25, 2019	1. Tanggamus 2. Transko Antasena & Transko Yudistira Progress 3. Vessels Requirements for Pertamina & Pelindo Synergy 4. HR in Sorong Branch Office 5. January 2019 Financial Performance Report 6. Others	GS, SS, WK
Senin, 19 Maret 2019 Monday, March 19, 2019	1. Hasil LSCI Retreat 2019 di Jogja 2. Progress Tanggamus 3. Pengadaan Kapal 4. Progress FS Fame Balikpapan 5. Lain-lain	GS, SS, WK
Senin, 01 April 2019 Monday, April 1, 2019	1. Results of LSCI Retreat 2019 in Jogja 2. Progress of Tanggamus 3. Vessels Procurement 4. Balikpapan FS Fame Progress 5. Others	GS, SS, WK, DA
Senin, 08 April 2019 Monday, April 8, 2019	1. Persiapan Materi BOD-BOC 2. Kinerja Keuangan Ytd. Februari 2019 3. SPPD Pekerja	GS, SS, WK, DA
Senin, 01 April 2019 Monday, April 1, 2019	1. Preparation of BOD-BOC Materials 2. Financial Performance as of February 2019 3. Workers SPPD	GS, SS, DA
Senin, 08 April 2019 Monday, April 8, 2019	1. Laporan Sinergi Hilir 2. Pemanfaatan Lahan Kabil Batam dan Bagus Kuning Plaju 3. Progress Kapal Dual Fuel 4. Kapal Lubricant 5. Optimalisasi Kapal 6. Progress Pengadaan Kapal Baru 7. Lain-lain	GS, SS, WK
Senin, 08 April 2019 Monday, April 8, 2019	1. Downstream Synergy Report 2. Utilization of Kabil Batam and Bagus Kuning Plaju lands 3. Progress of Dual Fuel Vessels 4. Lubricant Ships 5. Ship Optimization 6. Progress of Procurement of New Vessels 7. Others	GS, HP, WK
Senin, 08 April 2019 Monday, April 8, 2019	1. FUPP Petrogas 2, RIB 2, dan RIB 4 2. Sosialisasi Kebijakan KPI 3. Lain-lain	GS, HP, WK
Senin, 08 April 2019 Monday, April 8, 2019	1. FUPP Petrogas 2, RIB 2, and RIB 4 2. KPI Policy Socialization 3. Others	GS, HP, WK

Agenda Rapat Direksi 2019 2019 Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Senin, 15 April 2019 Monday, April 15, 2019	1. Laporan Kinerja Keuangan Ytd Maret 2019 2. Laporan Piutang 3. Lain-lain 1. Financial Performance Report as of March 2019 2. Accounts Receivable Report 3. Others	GS, HP, WK
Senin, 29 April 2019 Monday, April 29, 2019	1. STS FAME 2. Kapal-kapal off hire & docking 3. Petrogas 2 dan RIB 4. Lain-lain 1. STS FAME 2. Ships off hire & docking 3. Petrogas 2 and RIB 4. Others	GS, HP, WK
Senin, 06 Mei 2019 Monday, May 6, 2019	1. Progress Pengadaan Kapal Baru 2. STS Fame 3. Kegiatan Pengolahan Limbah 4. Rencana Pengadaan Kapal dengan BBHP 5. Lain-lain 1. Progress of New Ship Procurement 2. STS Fame 3. Waste Management Activities 4. Ship Procurement Plan with BBHP 5. Others	GS, HP, WK, DA
Senin, 13 Mei 2019 Monday, May 13, 2019	1. Satuan Tugas (Satgas) Lebaran 2. Tanggung Jawab Pengoperasian Kapal Back to back 3. Review Perbaikan Kapal 4. Progress Pembayaran STS FAME Balikpapan 5. Kinerja Kapal (Charter Kapal PIS) 6. Progress FUPP Kapal Petrogas II 7. Progress Pengadaan Kapal 8. Lain-lain 1. Eid Task Force (Satgas) 2. Responsibilities for Back to back Vessels Operations 3. Ship Repair Review 4. Progress of Payment for Balikpapan STS FAME 5. Vessles Performance (PIS Ship Charter) 6. FUPP Progress of Petrogas II Ship 7. Progress of Ship Procurement 8. Others	GS, HP, DA



Agenda Rapat Direksi 2019 2019 Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Senin, 27 Mei 2019 Monday, May 27, 2019	1. Satuan Tugas (Satgas) Lebaran 2. Tanggung Jawab Pengoperasian Kapal Back to back 3. Review Perbaikan Kapal 4. Progress Pembayaran STS FAME Balikpapan 5. Kinerja Kapal (Charter Kapal PIS) 6. Progress FUPP Kapal Petrogas II 7. Progress Pengadaan Kapal 8. Lain-lain	GS, HP
Selasa, 18 Juni 2019 Tuesday, June 18, 2019	1. Progress perbaikan kapal 2. RDMP 3. Pembayaran Aprobi 4. Laporan Kinerja Keuangan ytd Mei 2019 5. Progress pengalihan kegiatan keagenan ke PTK 6. Lain-lain	GS, DA
Senin, 24 Juni 2019 Senin, 24 Juni 2019	1. Kinerja Kapal 2. Progress Kegiatan Keagenan 3. Piutang Macet 4. Lain-lain	GS, HP
Selasa, 23 Juli 2019 Tuesday, July 23, 2019	1. Laporan Kinerja Keuangan Ytd Juni 2019 2. Piutang Usaha 3. Laporan Kinerja Kapal 4. Investasi 2019 & Rencana Investasi 2020	NP, HP, AK

Agenda Rapat Direksi 2019 2019 Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Senin, 12 Agustus 2019 Monday, August 12, 2019	1. Program Pemeliharaan Kapal 2. Rencana Pembangunan / Pengadaan Kapal 3. Rencana Kerja Pencapaian Target Laba 2019 4. Rencana Reorganisasi & Pengisian SDM 5. Bisnis Proses & STK 6. Pendanaan & Investasi 7. Konsep Procurement Yang Efektif 8. Revisi ABI 9. Usulan ABI 2020 10. Road Map 5 tahun ke depan 11. Lain-lain	NP, HP, AK, DA
Senin, 26 Agustus 2019 Monday, August 26, 2019	1. Vessels Maintenance Program 2. Vessels Construction/Procurement Plan 3. Profit Target Achievement Work Plan 2019 4. HR Reorganization & Filling Plan 5. Business Process & STK 6. Funding & Investment 7. The Concept of Effective Procurement 8. ABI Revision 9. ABI Proposal 2020 10. Road Map 5 years into the future 11. Others	
Senin, 26 Agustus 2019 Monday, August 26, 2019	1. Progress Tindak Lanjut Notulen Rapat Tanggal 12 Agustus 2019 2. Progress Rencana Kerja Marketing sd Bulan Desember 2019 3. Lain-lain	NP, HP, AK, DA
Senin, 09 September 2019 Monday, September 09, 2019	1. Progress of Minutes of Meeting on August 12, 2019 2. Progress of Marketing Plan as of December 2019 3. Others	
Senin, 09 September 2019 Monday, September 09, 2019	1. Progress Tindak Lanjut Notulen Rapat Tanggal 02 September 2019 2. Kinerja Operasi Per Agustus 2019 3. Progress Pembangunan Kapal 4. Lain-lain	NP, HP, AK, DA
Senin, 16 September 2019 Monday, September 16, 2019	1. Progress of Minutes of Meeting on September 2, 2019 2. Operations Performance as of August 2019 3. Ship Building Progress 4. Others	
Senin, 16 September 2019 Monday, September 16, 2019	1. Progress Tindak Lanjut Notulen Rapat Tanggal 09 September 2019 2. Kinerja Keuangan per Agustus 2019 3. Lain-lain	NP, HP, AK, DA
Senin, 16 September 2019 Monday, September 16, 2019	1. Progress of Minutes of Meeting on September 9, 2019 2. Financial Performance as of August 2019 3. Others	



Agenda Rapat Direksi 2019 2019 Board of Directors Meeting Agenda

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
Senin, 23 September 2019 Monday, September 23, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 16 September 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the follow up of the minutes of the meeting on September 16, 2019 2. And others	NP, HP, AK, DA
Senin, 30 September 2019 Monday, September 30, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 23 September 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 23 September 2019 2. Dan lain-lain	NP, HP, AK, DA
Senin, 07 Oktober 2019 Monday, October 7, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 30 September 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the minutes of the meeting on 23 September 2019 2. And others	NP, HP, AK, DA
Senin, 14 Oktober 2019 Monday, October 14, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 07 Oktober 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the minutes of the meeting on 23 September 2019 2. And others	NP, HP, AK, DA
Selasa, 22 Oktober 2019 Tuesday, October 22, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 14 Oktober 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the follow up of the minutes of the meeting on October 14, 2019 2. And others	NP, HP, DA
Selasa, 4 November 2019 Tuesday, November 4, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 22 Oktober 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the follow up of the minutes of the meeting on October 22, 2019 2. And others	NP, AK, DA
Selasa, 12 Nopember 2019 Tuesday, November 12, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 04 November 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the minutes of the meeting on November 4, 2019 2. And others	NP, GP, AK, DA
Senin, 18 Nopember 2019 Monday, November 18, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 12 November 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the minutes of the meeting on 12 November 2019 2. And others	NP, HP, AK, DA
Rabu, 18 Desember 2019 Wednesday, December 18, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 18 November 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the follow up of the minutes of the meeting on 18 November 2019 2. And others	NP, AK
Senin, 23 Desember 2019 Monday, December 23, 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 18 Desember 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the minutes of the meeting on December 18, 2019 2. And others	NP, HP, AK
Selasa, 31 Desember 2019 Tuesday, December 31 2019	1. Progress tindak lanjut notulen rapat tanggal 23 Desember 2019 2. Dan lain-lain 1. Progress of the minutes of the meeting on 23 December 2019 2. And others	HP, AK

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi kepemimpinan PTK mengacu pada kebijakan induk perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka suksesi kepemimpinan perusahaan berasal dari internal PTK dan eksternal PTK yaitu PT Pertamina (Persero) maupun anak perusahaan Pertamina yang lainnya.

Dalam mekanisme suksesi Direksi, PTK mengadakan pelatihan baik internal maupun eksternal serta pengembangan kompetensi khususnya kompetensi leadership dan kompetensi pejabat perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Hal tersebut guna mempersiapkan bakal calon anggota Direksi yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS serta mengikuti *fit and proper test*.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The PTK leadership succession policy refers to the policy of the parent company, PT Pertamina (Persero). Based on these provisions, the succession of company leadership comes from internal PTK and external PTK namely PT Pertamina (Persero) and other Pertamina subsidiaries.

In the Board of Directors succession mechanism, PTK conducts training both internally and externally as well as developing competencies, especially leadership competencies and competencies of company officials who meet the requirements to be promoted. This is in order to prepare prospective members of the Board of Directors which will further be submitted to shareholders at the GMS as well as following the fit and proper test.



SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Perusahaan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan, sejalan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara, mengingat PTK adalah Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat Direksi, serta bertanggung jawab kepada Direksi.

The Company has appointed a Corporate Secretary, in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) No.KEP-117 / M-MBU / 2002 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, since PTK is a subsidiary of PT Pertamina (Persero) which is a BUMN. The Corporate Secretary is appointed and appointed by the Directors, and is responsible to the Directors.

Fungsi Jabatan

Sekretaris Perusahaan memiliki posisi strategis untuk memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan, melaksanakan komunikasi perusahaan dalam rangka membangun citra Perusahaan, mengelola hubungan PTK dengan media, investor, komunitas dan pemangku kepentingan lain, memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum (baik litigasi maupun non-litigasi) dan kehumasan, serta mengelola perencanaan dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Position Function

The Corporate Secretary has a strategic position to ensure compliance and administrative decision making, carry out corporate communications in order to build the Company's image, manage PTK relationships with the media, investors, communities and other stakeholders, provide legal advice and assistance (both litigation and non-litigation) and public relations, as well as managing the planning and implementation of corporate social responsibility (CSR) programs

Selain itu pelaksanaan fungsi jabatan tersebut juga termasuk dalam fungsi legal & compliance dan fungsi sebagai *Public Relations & Administration Officer*, sebagai berikut:

In addition, the implementation of the function of the office is also included in the legal & compliance function and functions as a Public Relations & Administration Officer, as follows:

Fungsi Legal & Compliance

- Memberikan pertimbangan hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh Direksi dan atau pejabat manajemen lain di perusahaan;
- Menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi perusahaan dan/atau pekerja yang berhadapan dengan suatu proses hukum karena menjalankan tugasnya, baik didalam maupun diluar pengadilan;
- Memenuhi formalitas, legalitas, kepemilikan aset perusahaan dan kelengkapan dokumen perizinan yang mutakhir untuk kelangsungan bisnis dan perusahaan;
- Memberikan *legal opinion* dan *legal advice* dalam kebijakan Perusahaan;

The function as Legal & Compliance Officer

- Provide legal considerations on policies taken by the Directors and/or other management officials in the company.
- Resolve legal problems faced by companies and/ or workers who are faced with a legal process in relation with carrying out their duties, both inside and outside the court.
- Fulfilling the formalities, legality, ownership of company assets and complete licensing documents for the continuity of business and company
- Provide legal opinions and legal advice in Company policies;

- Melaksanakan kegiatan dan pelaporan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG, diantaranya penerapan program Whistleblower System.
- Carrying out activities and reporting on the development, guidance, implementation and enforcement of GCG principles, including the implementation of the Whistleblower System program.

Fungsi Sebagai Public Relations & Administration Officer

- Menjaga, meningkatkan, membangun citra, reputasi dan kredibilitas Perusahaan di mata stakeholder;
- Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi, dan Dewan Komisaris/Komite secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- Sebagai wakil Perusahaan dalam memberikan informasi yang diperlukan stakeholder;
- Menjalankan kewajiban Perusahaan dalam tanggung jawab sosial (CSR);
- Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar Pemegang Saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

The function as Public Relations & Administration Officer

- Maintain, enhance, build the image, reputation and credibility of the Company in the eyes of stakeholders.
- Periodically provide information needed by the Board of Directors, and the Board of Commissioners/ Committee and/or at any time when requested.
- As a representative of the Company in providing information needed by stakeholders.
- Carry out the Company's obligations in social responsibility (CSR).
- Administering and storing Company documents, including but not limited to the list of Shareholders, special lists and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners Meetings and GMS.

KRITERIA

Kriteria Sekretaris Perusahaan antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, hubungan masyarakat dan keterampilan administratif. Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya.

CRITERIA

Criteria for the Corporate Secretary must include knowledge of regulations relating to the Company, public relations and administrative skills. The Corporate Secretary must also have experience that supports the implementation of his duties.

PERSYARATAN

Sebagai kualifikasi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki pendidikan dan pengalaman yang mendukung.
- Memiliki kompetensi teknis.
Mencakup regulasi pelayaran, pengetahuan dan keterampilan hukum, pengelolaan risiko, perencanaan strategis dan kemampuan komunikasi.
- Memiliki kompetensi generik.
Meliputi pengetahuan bisnis, anggaran, perencanaan tenaga kerja, pengelolaan kinerja, teknik pelatihan dan konseling.

REQUIREMENTS

As a qualification for the Corporate Secretary, the Corporate Secretary must meet the following requirements:

- Having supporting education and experience.
- Having technical competency
Covering shipping regulations, knowledge and skills in law, risk management, strategic planning, and communication capability.
- Memiliki kompetensi generik.
Inclusive of knowledge on business, budget, manpower planning, performance management, training and counselling techniques.

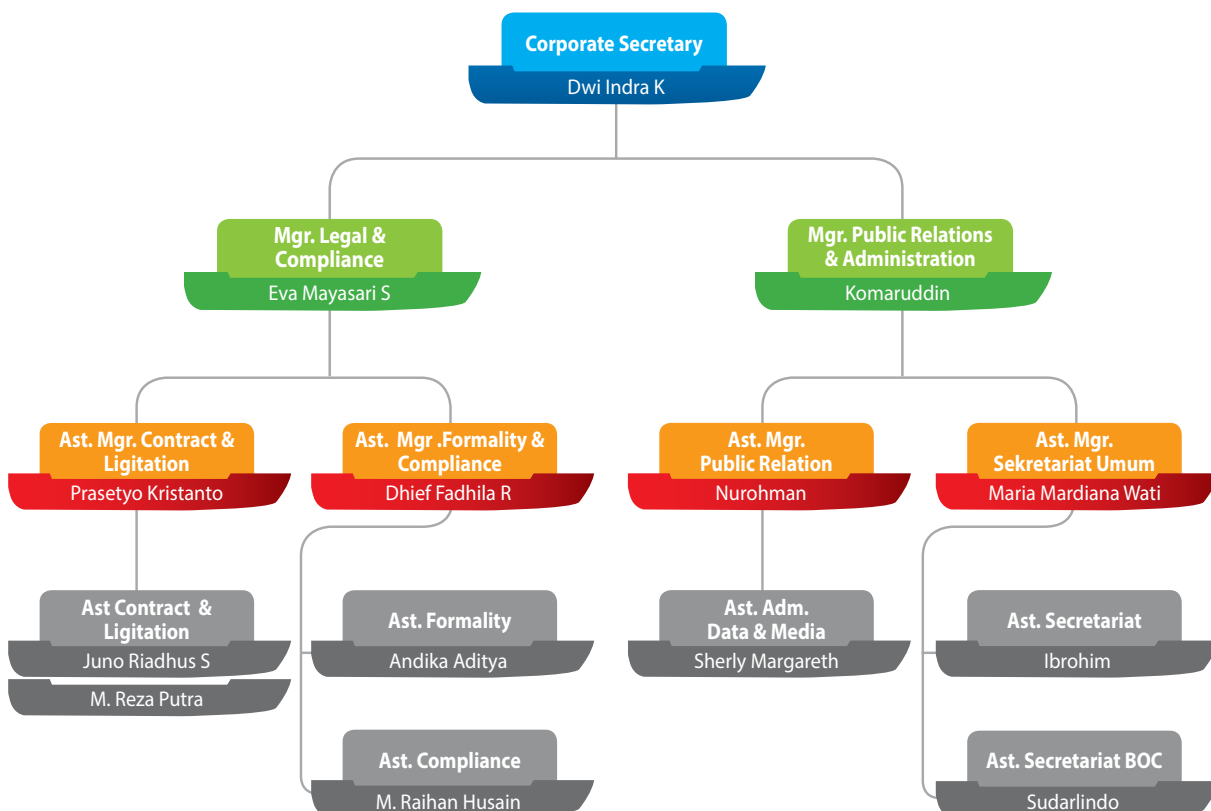
- Memiliki kompetensi perilaku.
Mencakup membangun kepercayaan, aksi inisiasi, membuat keputusan, standar kerja, fokus pelanggan, membangun kerja positif, membangun relasi, pelatihan, pendelegasian tanggung jawab, entrepreneurial insight, serta perencanaan dan organisasi.
- Having behavior competence
Inclusive of trust building, initiative action, decision making, work standards, customer-focused, positive work behavior, relations development, trainings, responsibility delegation, entrepreneurial insight, as well as planning and organization.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan PTK bertanggung jawab kepada Direksi atas pelaksanaan tugasnya. Adapun struktur organisasi struktur unit Corporate Secretary adalah sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The PTK Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors for carrying out his duties. The organizational structure of the Corporate Secretary unit is as follows:



PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY EXECUTIVES

Perusahaan telah mengangkat Dwi Indra Kuntoadji sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direktur Utama No.Kpts.P-055/C0000/2017-S2 tanggal 27 November 2017 dan berlaku efektif sejak tanggal 27 November 2017.

The Company has appointed Dwi Indra Kuntoadji as Corporate Secretary according to the President Director Decree No.Kpts.P-055/C0000/2017-S2 on November 27, 2017 and his term of office will be ended on November 2, 2019.



Dwi Indra Kuntoadji

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Berusia 48 tahun, Warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 22 Februari 1971. Beliau efektif diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan pada 27 November 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Utama No.Kpts.P-055/C0000/2017-S2 tanggal 27 November 2017 Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Merdeka, Malang pada tahun 1993

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai PJ Manajer OPK dan Diklat periode 2006-2010, sebagai Manajer Cabang Cilacap periode 2010-2011, sebagai Manajer Cabang Batam periode 2011-2012, sebagai Manajer Cabang Balikpapan periode 2012-2013, serta sebagai Direktur PT Peteka Karya Tirta periode 2013-2017

48 years old, Indonesian citizen and domiciled in Jakarta He was born in Jakarta on February 22, 1971. He is effectively appointed as Corporate Secretary on November 27, 2017 according to Decree of the President Director No.Kpts.P-055/C0000/2017-S2 on November 27, 2017 He obtained his Bachelor of Economics in Accounting from Universitas Merdeka, Malang in 1993.

In his career, he was appointed as PJ Manager of OPK and Education and Training for 2006-2010, as Cilacap Branch Manager for 2010-2011, Batam Branch Manager for 2011-2012, Balikpapan Branch Manager for 2012-2013, and as Director of PT Peteka Karya Tirta's works from 2013-2017



PEDOMAN KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pedoman kerja Sekretaris Perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaannya, antara lain:

- Code of Corporate Governance yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-002/F0000/2016-SO.
- Board Manual.
- Uraian jabatan Corporate Secretary yang telah ditetapkan manajemen.

CORPORATE SECRETARY WORK GUIDELINE

In performing its work, the Corporate Secretary refers to a number of work procedures, among which are:

- Code of Corporate Governance which was established based on the President Director Decision Number Pdm-002/F0000/2016-SO.
- Board Manual.
- Job description of Corporate Secretary determined by the management.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi rencana kerja dan sistem tata kerja Corporate Secretary;
- Membangun, memelihara dan meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meminimalisir dan menghindarkan Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan;
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, pengelolaan arsip, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan;
- Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) serta membuat risalah rapat Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
- Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan Pemerintah, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan;
- Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham secara periodik dan tahunan;
- Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat;

DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITY OF CORPORATE SECRETARY

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

- Planning, directing, monitoring and evaluating the work plan and work procedure of Corporate Secretary;
- Building, maintaining, heightening the Company's positive image in the eyes of public and stakeholders, as well as minimizing and avoiding the Company from potential negative image, litigation and non-litigation law related issued, as well as public relations impacting the Company;
- Organizing administrative activities for the Company's secretariat affairs, documents, and reports of the Company;
- Prepare meetings including material for the meeting (*briefing sheet*) and make minutes of meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company;
- Communicating policies of the Company and Government, either internal or external of the Company;
- Controlling accurate and valid management data and information for the interest of the Company and Shareholders periodically and annually;
- Evaluating and monitoring the implementation of CSR programs effectively, as per the established and on-target plans, as part of corporate compliance as well as elevating the Company's positive image in the public eyes;

- Memastikan ter-updatenya peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (*compliance issue*), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu;
- Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.
- Ensuring on time updates of laws and regulations and other legislations related to business process and products (*compliance issue*), as well as license and other legal aspects for the Company and subsidiaries;
- Ensuring the GCG principles development, fostering, implementation and enforcement activities report.

WEWENANG SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki kewenangan yaitu:

- Atas sepengetahuan Direksi mengadakan dan membina hubungan dengan para pihak sebagai upaya meningkatkan loyalitas para *stakeholder*;
- Memberikan keterangan pers (*press release*) mengenai kebijakan perusahaan;
- Memberikan pertimbangan hukum kepada Direksi dalam merumuskan suatu peraturan atas kebijakan;
- Merekomendasikan konsep perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh Direksi;
- Mengkoordinasikan penyusunan laporan triwulan perusahaan, Laporan Manajemen, Annual Report serta RJPP;
- Atas persetujuan Direksi mewakili perusahaan dalam rangka menyelesaikan perselisihan hukum dengan pihak lain di dalam maupun di luar pengadilan.

CORPORATE SECRETARY AUTHORITY

The Corporate Secretary holds the authority, as follows:

- At the knowledge of the Board of Directors establishes and fosters relationships with parties in an effort to increase the loyalty of stakeholders.
- Provide a press statement (*press release*) regarding company policy.
- Provide legal considerations to the Board of Directors in formulating a regulation on policy.
- Recommend the concept of a cooperation agreement that will be signed by the Board of Directors
- Coordinate the preparation of company quarterly reports, Management Reports, Annual Reports and RJPP
- With the approval of the Board of Directors representing the company in order to resolve legal disputes with other parties inside and outside the court.

PEDOMAN KERJA DAN LAPORAN BERKALA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta tugas lainnya dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi. Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi rencana kerja dan sistem tata kerja Corporate Secretary;

WORK GUIDELINES AND PERIODIC REPORTS OF THE CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary provides periodic reports on the implementation of his duties and responsibilities as well as other duties in assisting the implementation of the duties of the Board of Directors. Throughout 2019, the Corporate Secretary has carried out his duties and responsibilities with the following details:

1. Planning, directing, monitoring and evaluating the work plan and work system of the Corporate Secretary;



2. Membangun, memelihara dan meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan, serta meminimalisir dan menghindari Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan; 3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, pengelolaan arsip, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan; 4. Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (briefing sheet) serta membuat risalah rapat Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan; 5. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan Pemerintah, baik secara internal maupun eksternal Perusahaan; 6. Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan Pemegang Saham secara periodik dan tahunan; 7. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat; 8. Memastikan ter-updatenya peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (<i>compliance issue</i>), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu; 9. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.	2. Building, maintaining and enhancing the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimizing and avoiding the Company from the emergence of negative images, litigation and non-litigation legal issues and public relations that have an impact on the Company; 3. Carrying out corporate secretarial administration activities, managing archives, original documents, and company reports; 4. Prepare meetings including meeting materials (briefing sheets) and prepare minutes of meetings of the Directors in accordance with the provisions of the Company's articles of association; 5. Communicating Company and Government policies, both internally and externally of the Company; 6. Control data and management information that is accurate and valid for the interests of the Company and the Shareholders periodically and annually; 7. Evaluate and monitor the implementation of CSR programs effectively, in accordance with predetermined plans and on target, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public; 8. Ensuring the updating of laws and regulations relating to business processes and products (compliance issues), as well as licensing and other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner; 9. Ensuring reports on the activities of developing, guiding, implementing and enforcing GCG principles.

Realisasi pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019, di antaranya:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 1 (satu) kali.
2. Penyelenggaraan Rapat dan pengelolaan notulensinya.
 - Rapat Dewan Komisaris 5 (lima) kali.
 - Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 10 (sepuluh) kali.
 - Rapat Direksi 36 kali.
3. Pelaksanaan keterbukaan informasi dengan penyusunan dan penerbitan Laporan Tahunan.

Realization of the implementation of the duties, responsibilities and authority of the Corporate Secretary during 2019, including:

1. Organizing an Annual General Meeting of Shareholders 1 (one) time;
2. Organizing the Meeting and managing the minutes:
 - 5 (five) Board of Commissioners Meetings;
 - 10 (ten) Board of Commissioners and Directors Joint Meetings;
 - 36 Board of Directors Meetings.
3. Implementation of information disclosure by preparing and publishing Annual Reports;

4. Pelaksanaan program CSR dengan nilai realisasi sebesar Rp1,4 miliar kepada penerima manfaat dari berbagai instansi/lembaga maupun komunitas. 5. Tidak adanya Permasalahan Hukum yang Timbul Terkait Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang berdampak pada citra Perusahaan atau financial Perusahaan 6. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.	4. Implementation of CSR programs with a realization value of Rp1.4 billion to beneficiaries from various agencies/institutions and communities; 5. Absence of Legal Issues Arising Related to Agreements with Third Parties that have an impact on the Company's image or the Company's finances; 6. Ensuring reports on the activities of developing, guiding, implementing and enforcing GCG principles.

PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pengembangan kompetensi sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY TRAINING

In 2019, Corporate Secretary has participated in competency development programs, as follows:

Program Kompetensi Sekretaris Perusahaan 2019
Corporate Secretary Competency Development Program in 2019

No	Materi Pelatihan Training Material	Penyelenggara Organizer	Tempat & Waktu Pelaksanaan Location, Time of Implementation
1	Leadership	PT Kenawaenergi	Aula PTK & Agustus Aula PTK & Agustus
2	Workshop Of Enterprise Risk Management Iso 31000; 2018	Pertamina PTK, Retail, Patra Niaga	Juli
3	Vision Mision & Strategy Formulation	HR Strategic - Hotel Morrissey - Jakarta	Hotel Morrissey - Jakarta & Oktober Hotel Morrissey - Jakarta & Oktober
4	Workshop Penyusunan Matrik Tanggung Jawab Responsibility Matrix Preparation Workshop	HR Strategic - Hotel Grand Cempaka - Jakarta	Hotel Grand Cempaka - Jakarta & Desember Hotel Grand Cempaka - Jakarta & Desember



UNIT AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT UNIT

Pertamina Trans Kontinental Internal Audit (PTK IA) adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada PT Pertamina Trans Kontinental dalam mencapai tujuan.

Internal Audit of Pertamina Trans Kontinental (PTK LA) is a function that provides assurance and consulting services independently and objectively by implementing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve corporate governance, risk management and internal control to provide added value to PT Pertamina Trans Kontinental in achieving our goals.

VISI DAN MISI FUNGSI AUDIT INTERNAL

Visi

Menjadi Mitra Strategis Manajemen yang sesuai dengan Tata Nilai Unggulan dalam mencapai sasaran perusahaan menuju perusahaan Maritim kelas dunia.

Misi

1. Mendorong terciptanya efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
2. Mendorong pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA) pada setiap fungsi di lingkungan perusahaan dalam mengidentifikasi risiko dan sistem pengendalian internal.
3. Meningkatkan kompetensi agar menjadi Auditor Internal Profesional.

Tujuan

1. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan advice, pertimbangan dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

VISION AND MISSION OF THE INTERNAL AUDIT FUNCTION

Vision

To be a Strategic Partner that aligns with the Key Values to achieve company objectives toward a world-class maritime company.

Mission

1. Encouraging effectivity in risk management, control, and Governance process.
2. Promoting Control Self Assessment (CSA) implementation to the Function in identifying the risks and internal control system
3. Increasing functional supervisory competence.

Purpose

1. Assist the Company to achieve its objectives effectively and efficiently by evaluating and recommending improvements in the effectiveness of corporate governance, risk management and internal control;
2. Assist the management of the Company and other stakeholders by providing advice, considerations and recommendations that are useful for increasing the effectiveness and efficiency of the Company.

Nilai

1. Bersih (*Clean*) Menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas.
2. Kompetisi (*Competitive*) Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional.
3. Percaya Diri (*Confident*) Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.
4. Fokus pada pelanggan (*Customer Focus*) Berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
5. Komersial (*Commercial*) Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.
6. Mampu (*Capable*) Berkomitmen dalam membangun riset dan pengembangan.

Value

1. Clean - Prevent conflicts of interest, do not tolerate bribery, uphold trust and integrity;
2. Competitive - Able to compete at regional or international levels;
3. Confident - Contribute to national economic development;
4. Customer Focus - Committed to provide the excellent service to the customers;
5. Commercial - Create added value with a commercial orientation;
6. Capable: Commitment on research and development development.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian Internal Audit terdiri dari :

1. Lingkungan pengendalian yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas dan nilai etika dan kompetensi pekerja, Filosofi dan gaya Manajemen.
 - b. Pengoperasian, pengembangan sumber daya manusia dan perhatian dan arahan.
2. Pengkajian dan pengelolaan resiko yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai dan mengelola risiko usaha.
3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, mengenai kewenangan, otorisasi, rekonsiliasi dan penilaian atas kinerja.
4. Sistem Informasi dan komunikasi mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada perusahaan.
5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
6. Menjadi "*Counter Part*" serta mendukung pihak eksternal dalam bidang yang sama untuk kepentingan perusahaan.

Scope

Scope of Internal Audit control consists of:

1. A disciplined and structured control environment, consisting of:
 - a. Integrity and ethical values as well as employee competence, philosophy and management style
 - b. Operation, development of human resources as well as attention and direction;
2. Risk assessment and management, a process to identify, analyze, assess and manage business risks;
3. Control activities, namely actions taken in a process of controlling the activities of the company at each level and unit in the organizational structure of the company, concerning authority, authorization, reconciliation and evaluation of performance;
4. Information and communication system regarding operational, financial, and compliance with the rules and regulations prevail to the company;
5. Monitoring, namely the process of evaluating the quality of the internal control system at each level and unit of the company's organizational structure, so that it can be carried out optimally;
6. Become a "*Counter Part*" and support external parties in the same field for the benefit of the Company.



Lingkungan Perusahaan yang menjadi lingkup kerja Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Operasi
2. Direktorat Keuangan
3. Direktorat Pemasaran
4. Corporate Secretary
5. Fungsi-fungsi yang secara struktural berada dibawah Direktur Utama
6. Kantor Cabang, Anak Perusahaan serta badan Usaha yang dibentuk

Prinsip Utama Internal Audit

1. Integritas

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar kehandalan penilaian yaitu: bersikap jujur, obyektif, cermat, loyalitas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wajib menghormati, mendukung nama baik perusahaan dari sisi hukum maupun etika.

2. Obyektivitas

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus dapat menjalankan obyektivitas yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor membuat penilaian dengan kondisi yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian.

3. Konfidensial

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi pemberi informasi kecuali ada kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskan dilakukan hal tersebut dan auditor wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas.

The Company's environment as scope of work of Internal Audit is as follows:

1. Directorate of Operations;
2. Directorate of Finance;
3. Directorate of Marketing;
4. Corporate Secretary;
5. Structural functions under the President Director;
6. Branch Offices, Subsidiaries and Business Entities formed.

Main Internal Audit Principles

1. Integrity

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental earns trust and provides a basis for the reliability of the assessment, namely: being honest, objective, careful, loyal, as well as being responsible for carrying out duties and being obliged to respect, support the company's reputation from the legal and ethical sides;

2. Objectivity

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental shall be able to carry out professional objectivity in gathering, evaluating and communicating information about the audited activity or process. The auditors make prepare an audit with relevant conditions without being influenced by personal interests or by other parties in making judgments;

3. Confidentiality

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental respects the value and ownership of information obtained and does not disclose information without the authorization of the information provider unless there is a legal or professional obligation that requires it to be done and the auditor must be careful in using and maintaining the required information when performing the duties;

4. Kompetensi

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman secara profesional dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas layanan sesuai dengan standar profesi auditor internal serta kebijakan dan peraturan perusahaan.

5. Berwawasan Luas dan Jauh Kedepan

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental harus mampu mengantisipasi potensi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan dan membangun komunikasi yang efektif antar auditor Perusahaan.

4. Competency

Internal Audit of PT Pertamina Trans Kontinental shall address professional knowledge, expertise and experience in carrying out its duties. Therefore, the internal auditors are required to continuously improve the ability, effectiveness and quality of services in accordance with the professional standards of internal auditors and company policies and regulations;

5. Visionary

PT Pertamina Trans Kontinental Internal Audit must be able to anticipate the potential for various problems that can affect the achievement of Company's goals and build effective communication between the Company's auditors.

Independensi

1. Fungsi Internal Audit di dalam struktur organisasi Perseroan berada di leher Direktur Utama.
2. Fungsi Internal Audit dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit yang secara structural bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Komite Audit.
3. Head of Internal Audit diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
4. Direktur Utama dapat memberhentikan Head of Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Head of Internal Audit tidak memenuhi persyaratan dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
5. Pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari Head of Internal Audit dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.
6. Auditor Internal dalam Fungsi Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Head of Internal Audit.
7. Dalam melakukan pemeriksaan, dibentuk Tim Audit berdasarkan surat tugas lengkap dengan jabatan fungsional dan jangka waktu yang ditentukan dengan susunan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Pengawas, Ketua Tim dan Anggota Tim.

Independency

1. The Internal Audit function within the Company's organizational structure is in the coordination line under the President Director;
2. The Internal Audit function is led by a Head of Internal Audit who is structurally responsible to the President Director and has a functional relationship with the Audit Committee;
3. The Head of Internal Audit is appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
4. The President Director may dismiss the Head of Internal Audit after obtaining the approval of the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit does not meet the requirements and/or fails or is not capable of carrying out his duties;
5. The appointment and dismissal of the Internal Auditor is carried out by taking into account the opinion of the Head of Internal Audit and meeting the requirements set by the company;
6. Internal Auditors in the Internal Audit Function are directly responsible to the Head of Internal Audit;
7. In conducting the examination, an Audit Team is formed based on a complete assignment letter with a functional position and a period of time determined by the composition of the Examining Team consisting of Supervisors, Team Leaders and Team Members;



Wewenang

Internal Audit PT Pertamina Trans Kontinental mempunyai wewenang untuk :

1. Memberikan masukan/*advice* kepada Direktur Utama dalam hal pengelolaan perusahaan.
2. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja dalam rangka proses pelaksanaan audit.
4. Akses tidak terbatas terhadap semua dokumen, pencatatan dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa eksternal dalam hal tidak tersedia di organisasi Internal audit dengan biaya perusahaan.
6. Memiliki akses kepada Komite Audit.

Wewenang Internal Audit sebatas pada penilaian dan analisa atas aktivitas yang di-review/diaudit. Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dalam hal pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit.

Authority

The following is the authority of the Internal Audit Function :

1. Providing the President Director with inputs in the Company's managerial affairs;
2. Preparing, adjusting, and implementing internal audit activities, such as determining the procedure and scope of audit work;
3. Inquiring information and explanation to all management levels and employees in the process of audit;
4. Having unlimited access to all documents, records, personal and physical, information over the audited objects in order to obtain data and information related to the implementation of duties;
5. Requesting an assistance from external auditor in the event the Internal Audit organization is unavailable to acquire at the expense of the Company.
6. Having access to the Audit Committee

Authority of the Internal Audit is limited on the assessment and analysis of the activities that are being reviewed/audited. The Internal Audit does not have the authority in terms of implementation and responsibility for the audited activity.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) beserta anggarannya.
2. Melaksanakan "*Assurance*" yaitu melakukan pengujian secara objektif berdasarkan bukti, bertujuan memberikan suatu penilaian yang independen atas pengelolaan risiko, pengendalian atau proses tata kelola organisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Melakukan kegiatan "*Consulting*" yaitu memberikan jasa konsultasi yang dibutuhkan oleh Manajemen yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan tujuan memberikan nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses organisasi.
4. Sebagai "katalisator" yaitu agen perubahan (*Agent of Change*) dan pengendali potensi pemborosan biaya (Inefisiensi).

Duties and responsibilities

1. Arranging the Annual Audit Work Program (PKPT) and its budget;
2. Carry out "*Assurance*", namely testing objectively based on evidence, aimed at providing an independent assessment of risk management, control or organizational governance processes so as to provide added value to the company;
3. Conducting "*Consulting*" activities, namely providing consultancy services required by Management with the agreed nature and scope of the assignment with the aim of providing added value and improving risk management, control and organizational processes;
4. As a "*catalyst*", which is an agent of change and a controller of potential costs (inefficiency);

5. Melaksanakan Pemeriksaan rutin sesuai PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dan non PKPT berdasarkan penugasan Direktur Utama, dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap sistim dan prosedur serta operasi perusahaan pada semua fungsi dan kegiatan perusahaan secara berkelanjutan.
6. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada pihak-pihak terkait (Komite Audit dan Auditee).
7. Memantau tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sampai dengan pes pembahasan audit ditindaklanjuti sesuai diposisi Direktur Utama.
8. Meningkatkan kompetensi Internal Auditor melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Terdapat 2 (dua) laporan hasil pemeriksaan antara lain:
 - a. Pemeriksaan Umum sesuai dengan PKPT program yang dilaporkan kepada Direktur Utama, Fungsi Terkait dan Komite Audit.
 - b. Pemeriksaan Khusus/Non PKPT program yang dilaporkan hanya ke Direktur Utama.

Standar Pelaksanaan

Dalam melaksanakan kegiatan audit, Internal Audit harus memegang teguh dan mematuhi kode etik sebagai berikut :

1. Internal Audit wajib bersikap jujur, obyektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan memiliki integritas yang tinggi serta harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugas.
2. Internal Audit harus memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemberi tugas dan dapat memegang rahasia jabatan, serta dapat meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya dalam rangka memperoleh bukti-bukti yang akurat guna mendukung pernyataannya/saran dan rekomendasi, dan harus membangun komunikasi yang efektif antar auditor untuk kepentingan perusahaan.
3. Internal Audit harus menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal atau untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pemberi tugas maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya dalam bertindak secara independen.

Implementation Standards

In carrying out the audit activities, Internal Audit shall uphold and comply to the code of ethics, as follows:

1. Internal Audit shall be honest, objective, cautious, wise, responsible, brave and have high integrity and must act independently in carrying out tasks;
2. Internal Audit shall maintain the trust given by the assignor and be able to hold office secrets, and can increase the expertise and effectiveness in carrying out his work in order to obtain accurate evidence to support his statements/suggestions and recommendations, and must establish effective communication between auditors for the benefit of the company;
3. Internal Audit shall avoid involvement in illegal activities or not involve themselves in activities that may cause conflicting interests of the assignor or prejudices who can doubt their ability to act independently.

KEDUDUKAN DAN KUALIFIKASI

Kedudukan internal audit berada langsung di bawah Direktur Utama, sesuai dengan SK Kpts-019/C0000/2016-S0 tentang struktur organisasi kantor pusat dan kantor cabang PT Pertamina Trans Kontinental tanggal 1 Desember 2016. Fungsi Internal audit bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen kepada segenap auditee di Perusahaan, dan bekerja berdasarkan rencana audit tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan ditinjau Dewan Komisaris. Fungsi Internal audit dipimpin Kepala Internal audit dan dibantu oleh Senior Auditor, Senior Auditor, Auditor, Junior Auditor dan Sekretaris.

POSITION AND QUALIFICATION

The internal audit position is directly under the President Director, in accordance with Decree Kpts-019/C0000/2016-S0 concerning the organizational structure of the head PT Pertamina Trans Kontinental head office and branch offices on December 1, 2016. The Internal Audit Function is responsible for carrying out independent audits of all auditee in the Company, and work based on an annual audit plan that has been approved by the President Director and reviewed by the Board of Commissioners. The Internal Audit function is led by the Head of Internal Audit and is assisted by Senior Auditors, Senior Auditors, Auditors, Junior Auditors and Secretary.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AUDIT INTERNAL

Berikut adalah struktur organisasi Unit Internal Audit PTK

INTERNAL AUDIT UNIT ORGANIZATION STRUCTURE

Organization structure of Internal Audit Unit in PTK is as follows:



INDEPENDENSI AUDIT INTERNAL

Fungsi Internal Audit bersifat independen dan tidak memiliki keterkaitan kerja, tanggung jawab, maupun kepentingan tertentu. Sejalan dengan kedudukan dan sifat independen, maka Internal Audit dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit.

INDEPENDENCY OF INTERNAL AUDIT

The Internal Audit function is independent and does not have specific work, responsibilities or interests. In line with the position and nature of independency, the Internal Audit is eligible to communicate directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee, to inform various matters related to result of the audit.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Audit Internal dipimpin oleh Head of Internal Audit yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Presiden Direktur dapat mengusulkan penggantian Head of Internal Audit setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, apabila ditemukan Head of Internal Audit lalai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Piagam ini. Para internal auditor bertanggung jawab langsung kepada Head of Internal Audit.

APPOINTMENT AND DISMISSION

Internal Audit is led by a Head of Internal Audit who is appointed and terminated by the President Director with approval from the Board of Commissioners. The President Director may propose the replacement of the Head of Internal Audit after obtaining approval from the Board of Commissioners, if found the Head of Internal Audit is negligent and cannot fulfill his responsibilities as stated in this Charter. The internal auditors report directly to the Head of Internal Audit.

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Perusahaan mengangkat Triana Aria Rini sebagai Kepala Internal Audit berdasarkan Kpts P-049/C00000/2017-S2 yang menjabat hingga 04 Desember 2017 - sekarang

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE

The Company appointed Triana Aria Rini as Head of Internal Audit according to Decree Kpts P-049/C00000/2017-S2 which has been serving since 4 December 2017 – now.



Triana Aria Rini
Kepala Unit Internal Audit
Head of Internal Audit

Berusia 52 tahun, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 1968. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof Dr Mustopo pada tahun 1996. Menjabat sebagai Head of Internal Audit sejak tanggal 1 Desember 2017 berdasarkan keputusan Direksi No. KptsP-049/0000/2017-S2 tanggal 27 November 2017. Memulai karir di Pertamina Trans Kontinental sejak tahun 1990 dengan jabatan penting yang pernah diemban adalah Manager Cabang Tanjung Priok periode 2011-2013, pernah ditunjuk sebagai Direktur PT Peteka Karya Gapura periode 2013-2016 dan VP Operation periode 2016-2017.

52 years old, Indonesian citizen, domiciled in Jakarta, Indonesia, Born in Jakarta on January 23, 1968. She earned Bachelor of Economics in Management from the Universitas Prof. Dr. Mustopo in 1996. Served as Head of Internal Audit since 1 December 2017 based on Directors' decision No. KptsP-049/0000/2017-S2 on November 27, 2017. She started her career at Pertamina Trans Kontinental since 1990 and assigned in several key positions, such as an Tanjung Priok Branch Manager in the 2011-2013 period, appointed as Director of PT Peteka Karya Gapura for 2013-2016 period and VP Operation for the 2016-2017 period.



JUMLAH DAN KUALIFIKASI AUDITOR INTERNAL

Hingga akhir Desember 2019, jumlah personil Internal audit sebanyak 10 orang. Unit Internal audit dipimpin seorang Kepala Internal audit yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Internal audit.

TOTAL AND QUALIFICATION OF INTERNAL AUDITOR

As end of December 2019, there were 10 Internal Audit personnel. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who is responsible for the accountability of carrying out the duties and authority of the Internal Audit.

Komposisi Fungsi Internal Audit Per 31 Desember 2019 Composition of the Internal Audit Function as of December 31, 2019	
Jabatan Position	Jumlah Personel Total Personnel
Kepala Internal Audit Head of Internal Audit	1 Orang
Auditor Senior Senior Auditor	3 Orang
Auditor Auditor	3 Orang
Auditor Junior Junior Auditor	2 Orang
Sekretaris Secretary	1 Orang
Jumlah Total	10 Orang

KUALIFIKASI AUDIT INTERNAL

Jumlah personel Internal Audit per 31 Desember 2019 ada 8 (delapan) orang Auditor ditambah 1 (satu) orang sekretaris, dan dipimpin seorang Head of Internal Audit yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Internal audit. Setiap Auditor Internal wajib memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan Perusahaan.

Internal auditor membutuhkan kemampuan yang spesifik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian auditor adalah pengalaman baik dari segi operasional, bisnis, dan pendukung lainnya. Selain pengalaman dan strata pendidikan, sertifikasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keahlian auditor internal. Berikut adalah sertifikasi profesi yang telah diperoleh oleh internal auditor kami:

INTERNAL AUDIT QUALIFICATIONS

The Internal Audit personnel as of December 31, 2019 consisted of 8 (eight) Auditors and 1 (one) secretary, and led by a Head of Internal Audit who was responsible for accountability in carrying out the duties and authority of the Internal Audit. Every Internal Auditor must fulfill the qualification requirements set by the Company.

Internal auditors require specific abilities to carry out their duties and responsibilities. One parameter that measures the ability and expertise of auditors is experience from operational, business and other supporting aspects. In addition to experience and education strata, certification also becomes an important factor in increasing the expertise of internal auditors. The professional certifications that have been obtained by our internal auditors are as follows:

Sertifikasi Profesi Internal Auditor Internal Auditor Professional Certification

No	Nama/ Name	Jabatan/ Position	Sertifikasi/ Certification
1	Triana Aria Rini	Head of Internal Audit	Qualified Internal Audit (QIA)
2	Euis Resmawati	Senior Auditor	Qualified Internal Audit (QIA)
3	Indra Putera	Senior Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit
4	Ginik Windaryati	Senior Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit
5	Baehaki	Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit
6	Kiki Chandra	Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit
7	Arif Maulana	Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit
8	Arlidyasari	Junior Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit
9	Arini Putri Setoaty	Junior Auditor	Audit tingkat Manajerial Managerial level audit

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pedoman internal audit adalah Piagam internal audit (*Audit Charter*) yang mengatur struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik serta hubungan kerja dengan pihak terkait. Piagam internal audit telah disahkan yang tertuang dalam piagam internal audit antara Direksi dan Komisaris tanggal 31 Desember 2018.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit Guidelines refers to the Internal Charter (*Audit Charter*) which regulates the structure and position, duties and responsibilities, authority, code of ethics as well as work relationships with related parties. The Internal Audit Charter was ratified as regulated in the internal audit charter between the Board of Directors and Commissioners on 31 December 2018.

MEKANISME & PROSEDUR INTERNAL AUDIT

Mekanisme dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu sarana untuk memastikan pengelolaan Perusahaan telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip GCG dan prinsip korporasi yang sehat serta taat kepada peraturan perundang-undangan.

Selain Piagam Internal Audit, pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Fungsi Internal Audit juga berpedoman pada Pedoman Internal Audit, Pedoman Investigasi dan Prosedur yang terdiri dari:

- Psd-001/G0000/2017-S0 (Revisi ke 2) Perihal Penyusunan Program kerja audit tahunan (PKAT) & Rencana Kerja Anggaran
- Psd-002/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Penyusunan Surat Perintah (SP) dan Rencana Penugasan Audit (RPA)

INTERNAL AUDIT MECHANISMS & PROCEDURES

The internal control mechanism and system is one of the means to ensure that the management of the Company has been carried out in accordance with the principles of GCG and the principles of a healthy corporation as well as in compliance with laws and regulations.

In addition to the Internal Audit Charter, the implementation of duties, responsibilities and obligations of the Internal Audit Function is also guided by the Internal Audit Guidelines, Investigation Guidelines and Procedures which consist of:

- Psd-001/G0000/2017-S0 (2nd Revision) Regarding the Formulation of the annual audit work program (PKAT) & Budget Work Plan;
- Psd-002/G0000/2016-S0 (0 Revision) Regarding the Compilation of Warrants (SP) and Audit Assignment Plans (RPA);



- Psd-003/G0000/2018-S0 (Revisi ke 2) Perihal Pelaksanaan & Pelaporan Audit Operasional
- Psd-004/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Audit Khusus Mengenai Audit Kecurangan (Investigasi)
- Psd-005/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Pemberian Jasa Konsultasi
- Psd-006/G0000/2016-S0 (Revisi ke 0) Perihal Pembinaan Kompetensi Profesi Internal Audit
- Psd-007/G0000/2018-S0 (Revisi ke 0) perihal Monitoring Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Audit (LHA)
- Psd-008/G0000/2018-S0 (Revisi ke 0) perihal Pemberian Data dan Peminjaman Dokumen Kepada Auditor Eksternal (KAP)
- Psd-009/G0000/2018-S0 (Revisi ke 0) perihal Cash Opname
- Psd-003/G0000/2018-S0 (2nd Revision) Regarding Operational Audit Implementation & Reporting;
- Psd-004/G0000/2016-S0 (Revision 0) Regarding the Special Audit Regarding the Fraud Audit (Investigation);
- Psd-005/G0000/2016-S0 (0 Revision) Regarding Providing Consultation Services;
- Psd-006/G0000/2016-S0 (0 Revision) Regarding the Development of Internal Audit Professional Competence;
- Psd-007/G0000/2018-S0 (0 Revision) regarding Monitoring Follow-Up to Audit Reports (LHA);
- Psd-008/G0000/2018-S0 (0 Revision) regarding the Provision of Data and Borrowing of Documents to External Auditors (KAP);
- Psd-009/G0000/2018-S0 (0 Revision) regarding Cash Hospitalization.e

FUNGSI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain:

- Menyusun Rencana Jangka Panjang untuk jangka lima tahun yang disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) beserta anggarannya;
- Melaksanakan *assurance* yaitu melakukan pengujian secara objektif berdasarkan bukti bertujuan memberikan suatu penilaian yang independen atas pengelolaan risiko, pengendalian atau proses tata kelola organisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi Perusahaan;
- Melakukan kegiatan *consulting* yaitu memberikan advice dan jasa lainnya yang dibutuhkan oleh Manajemen yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati; Tujuannya memberikan nilai tambah dan meningkatkan pengelolaan risiko, pengendalian dan proses organisasi;
- Sebagai katalisator yaitu sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan pengendali potensi pemborosan biaya (inefisiensi) dan potensi *lost of money* melalui aktivitas *assurance* dan *consulting*;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES FUNCTION

Functions and responsibilities of Internal Audit include:

- Preparing Long-Term Plan for five-year period aligning with Company Long-Term Plan (RJPP);
- Preparing Annual Audit Work Plan (PKAT) along with its budget
- Performing assurance, an objective test based on evidence, aiming to draw an independent evaluation to risk management, organizational governance control or process providing added value ofr the Company;
- Performing consulting activity, providing consulting service required by the Management which characteristic and scope of assignment has been agreed upon with the purpose of giving added value and increasing the risk management, control, and organizatinal process;
- As a catalyst, an agent of change and a controller for potential dissipation (inefficiency) and lost of money through assurance and consulting activities;

- Melaksanakan Pemeriksaan rutin sesuai PKAT dan pemeriksaan (non-PKAT) atas tugas dan persetujuan Direktur Utama, dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap sistim dan prosedur serta operasi perusahaan pada semua fungsi dan kegiatan perusahaan secara berkelanjutan;
- Menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dengan tembusan pada pihak – pihak terkait;
- Memantau tindaklanjut laporan Hasil Audit (LHA), sampai dengan pos pembahasan audit ditindaklanjuti sesuai disposisi Direktur Utama;
- Meningkatkan kompetensi internal auditor melalui pendidikan dan latihan.
- Performing routine Investigation in accordance with PKPT (Annual Audit Work Plan) and non-PKPT as assigned by the President Director, by sustainably analyzing and evaluating the system and procedure as well as company's operation in all functions and activities.
- Submitting the Audit Report (LHP) to the President Director and copy related parties in (Audit Committee and Auditee).
- Monitoring the follow-up of Audit Report (LHP) up to a post audit discussion, and to be followed up according to the disposition from the President Director.
- Increasing the competence of Internal Auditor through education and training program.

WEWENANG

Wewenang Fungsi Internal Audit antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direktur Utama, dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan;
- Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan internal audit termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
- Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja dalam rangka pemeriksaan;
- Akses tidak terbatas terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas objek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Meminta bantuan tenaga pemeriksa dalam hal tidak tersedia di organisasi Internal audit dengan biaya perusahaan;
- Memiliki akses kepada Komite Audit.

Wewenang Internal Audit sebatas pada penilaian dan analisa atas aktivitas yang ditinjau (*review*)/diaudit. Internal Audit tidak mempunyai kewenangan dalam hal pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang diaudit. Fungsi Internal Audit tidak diberikan wewenang melaksanakan tugas-tugas operasional bagi organisasi dan atau jajarannya. Fungsi Internal Audit juga tidak

AUTHORITY

The following is the authority of the Internal Audit Function:

- Providing the President Director with inputs in the Company's managerial affairs;
- Preparing, adjusting, and implementing internal audit activities, such as determining the procedure and scope of audit work;
- Inquiring information and explanation to all management levels and employees in the process of audit;
- Having unlimited access to all documents, records, personal and physical, information over the audited objects in order to obtain data and information related to the implementation of duties;
- Requesting an assistance from external auditor in the event the Internal Audit organization is unavailable to acquire at the expense of the Company.
- Having access to Audit Committee.

The authority upheld by Internal Audit is limited to evaluation and analysis over the reviewed/audited activities. The Internal Audit does not have the authority in the implementation of and responsibilities for the audited activities. The Internal Audit Function has no authority to carry out operational duties for its organization and ranks. Moreover, they have no authority to direct activities for

diberikan wewenang mengarahkan kegiatan para pekerja di luar Fungsi Internal Audit untuk melakukan tugas Fungsi Internal Audit, kecuali ditugaskan untuk membantu Internal Audit dalam melaksanakan tugas audit.

employees outside the Internal Audit Function to execute the duties of the Internal Audit Function, except they are assigned to assist the Internal Audit in implementing the audit duties.

REALISASI AUDIT

Sepanjang tahun 2019, Audit Internal Tahun 2019 telah merealisasikan 14 audit terhadap 14 obyek audit umum dan audit operasional terkait Proses bisnis yang direncanakan.

AUDIT REALIZATION

Throughout 2019, Internal Audit in 2019 has implemented 14 audits of 14 general audit objects and operational audits related to planned business processes.

Pelaksanaan Tugas Internal Audit Tahun 2019 Implementation of the Internal Audit Duties of 2019		
Objek Audit Audit Object	Rencana Plan	Realisasi Realized
Kantor Pusat Head Office	3	6
Kantor Cabang Branch Office	6	6
Anak Perusahaan Subsidiaries	5	1
Project Project	0	1

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Sesuai dengan program kerja unit internal audit tahun 2019 yang telah ditetapkan, hingga akhir periode pelaporan, Unit Internal Audit telah melaksanakan audit terhadap:

1. Fungsi Vessel Marketing & Marketing Support
2. Fungsi Marine Service
3. Cabang Balikpapan
4. Cabang Bontang
5. Fungsi Legal
6. Cabang Plaju
7. Cabang Medan
8. Cabang Arun
9. PSTB Tg.Batu
10. Fungsi Tech Fleet I & Tech Fleet II
11. Fungsi Tech Fleet III & Tech KKR
12. Cabang Batam
13. Fungsi Operation (Vessel Ops & Vessel Compliance)
14. PT PKG

WORK IMPLEMENTATION REPORT

In accordance with the designated internal audit unit work program in 2019, until the end of the reporting period, the Internal Audit Unit has conducted audit on following aspects:

1. Vessel Marketing & Marketing Support Functions
2. Marine Service Function
3. Balikpapan Branch
4. Bontang Branch
5. Legal functions
6. Plaju Branch
7. Medan Branch
8. Arun Branch
9. PSTB Tg.Batu
10. Tech Fleet I & Tech Fleet II Functions
11. The function of the Tech Fleet III & Tech TRC
12. Batam Branch
13. Operation Functions (Vessel Ops & Vessel Compliance)
14. PT PKG

HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL 2019

Posisi tindak lanjut temuan per 31 Desember 2019, baik temuan Internal Auditor maupun Eksternal Auditor, dengan posisi sebagai berikut:

RESULTS OF THE INTERNAL AUDIT FINDINGS 2019

The position of the follow-up findings as of December 31, 2019, both the findings of the Internal Auditor and the External Auditor, with the following positions:

Hasil dan Tindak Lanjut Temuan Finding Result and Follow-Up			
Objek Audit Audit Object	Jumlah Rekomendasi Total Recommendation	Selesai Done	Proses On Progress
Kantor Pusat Head Office	74	74	-
Kantor Cabang Branch Office	80	79	1
Anak perusahaan Subsidiaries	-	-	-

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Selama tahun 2019 seluruh auditor dituntut untuk dapat lebih menguasai kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan, peraturan-peraturan eksternal dan internal, juga dalam hal perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan. Peningkatan kemampuan telah dilaksanakan secara terus menerus melalui *coaching*, diskusi dan pelatihan oleh pihak eksternal. Berikut adalah pengembangan kompetensi selama tahun 2019 yang diikuti oleh para auditor:

COMPETENCY DEVELOPMENT

In 2019, all auditors are required to be able to better control the Company's operational policies and procedures, external and internal regulations, also in terms of planning, preparation, implementation and reporting of audits. Capacity building has been carried out continuously through coaching, discussion and training by external parties. The following is the development of competencies during 2019 followed by auditors:

Pengembangan Kompetensi Internal Auditor Internal Auditor Competency Development					
No	Peserta Participant	Jenis Pelatihan Activity	Tanggal Date	Hari Days	Penyelenggara Organizer
1	Triana Aria Rini	Audit Intern Tingkat Manajerial Managerial Level Internal Audit	18-27 Maret 2019 March 18-27, 2019	9	YPIA
		Value Based Development Program Value Based Development Program	19 Jan 2019 Jan 19, 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Seminar Nasional Internal Audit National Internal Audit Seminar	23-26 April 2019 April 23-26, 2019	4	YPIA
		Workshop of Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	10-11 Juli 2019 July 10-11, 2019	2	Pertamina
		Workshop Penyusunan Matrix Tanggung Jawab Responsibility Matrix Preparation Workshop	10-11 Des 2019 Dec 10-11, 2019	2	HR Strategic
2	Euis Resmawati	Seminar Nasional Internal Audit National Internal Audit Seminar	23-26 April 2019 April 23-26, 2019	4	YPIA
		Workshop of Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	10-11 Juli 2019 July 10-11, 2019	2	Pertamina
		Pra Purna Bhakti	11-13 Des 2019 Dec 11-13, 2019	3	HR Strategic
		Workshop Penyusunan Matrix Tanggung Jawab Responsibility Matrix Preparation Workshop	10-11	2	HR Strategic



Pengembangan Kompetensi Internal Auditor Internal Auditor Competency Development

No	Peserta Participant	Jenis Pelatihan Activity	Tanggal Date	Hari Days	Penyelenggara Organizer
3	Indra Putera	Port Management	22-24 Juli 2019 July 22-24, 2019	3	PT SAR
		Workshop of Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	10-11 Juli 2019 July 10-11, 2019	2	Pertamina
		Audit Intern Tingkat Dasar Basic Internal Audit	19-31 Agust 2019 August 19-31, 2019	12	YPIA
		Audit Intern Tingkat Lanjutan Advance Internal Audit	16-28 Sept 2019 Sep 16-28, 2019	12	YPIA
		Vision Mision & Strategy Formulation	28-29 Okt 2019 Oct 28-29, 2019	2	HR Strategic
		Workshop Penyusunan Matrix Tanggung Jawab Responsibility Matrix Preparation Workshop	10-11	2	HR Strategic
4	Ginik Windaryati	Learning Disruptions in Corp Univercity	18 Jan 2019 Jan 18, 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Audit Intern Tingkat Dasar Basic Internal Audit	19-31 Agust 2019 August 19-31, 2019	12	YPIA
		Audit Intern Tingkat Lanjutan Advance Internal Audit	16-28 Sept 2019 Sep 16-28, 2019	12	YPIA
		Workshop of Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	10-11 Juli 2019 July 10-11, 2019	2	Pertamina
		Vision Mision & Strategy Formulation	28-29 Okt 2019 Oct 28-29, 2019	2	HR Strategic
		Audit Intern Tingkat Manajerial Managerial Level Internal Audit	11-21 Nov 2019 Nov 11-21, 2019	10	YPIA
5	Kiki Chandra	Workshop Penyusunan Matrix Tanggung Jawab Responsibility Matrix Preparation Workshop	10-11	2	HR Strategic
		Workshop Modus Penyalahgunaan Minyak Oil Misuse Mode Workshop	24-25 Jan 2019 January 24-25 2019	2	Vessel Compliance
		Value Based Development Program	Jan 2019 Jan, 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Investigasi Investigation	29-31 Mar 2019 March 29-31, 2019	3	Mitra Training Indonesia
		Awareness & Internal Auditor Training	8-12 Apr 2019 Apr 8-12, 2019	5	PT Rina
		Audit Intern Tingkat Lanjutan Advance Internal Audit	2019 2019	12	YPIA
6	Baehaki	Audit Intern Tingkat Manajerial Managerial Level Internal Audit	Sept 2019 Sept, 2019	12	YPIA
		Workshop of Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	10-11 Juli 2019 July 10-11, 2019	2	Pertamina
		Pembinaan Penanggulangan Kebakaran tingkat D Development of Fire Management level D	16-18 Sept 2019 Sept 16-18, 2019	3	PT Robere Manajemen Ind.
		Value Based Development Program	Jan 2019 Jan 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Pra Purna Bhakti	11-13 Des 2019 Dec 11-13, 2019	3	HR Strategic

Pengembangan Kompetensi Internal Auditor Internal Auditor Competency Development

No	Peserta Participant	Jenis Pelatihan Activity	Tanggal Date	Hari Days	Penyelenggara Organizer
7	Arip Maulana	Audit Intern Tingkat Lanjutan Advance Internal Audit	21 Jan – 2 Feb 2019 Jan 21 - Feb 2, 2019	12	YPIA
		Value Based Development Program	Jan 2019 Jan, 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Audit Intern Tingkat Manajerial Managerial Level Internal Audit	20-29 Mei 2019 May 20-29, 2019	10	YPIA
		Pembinaan Penanggulangan Kebakaran tingkat D Development of Fire Management level D	16-18 Sept 2019 Sep 16-18, 2019	3	PT Robere Manajemen Ind.
8	Arlidiasari	Value Based Development Program	Jan 2019 Jan, 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Audit Intern Tingkat Lanjutan Advance Internal Audit	18 Feb - 2 Mar 2019 Feb 18 - Mar 2, 2019	12	YPIA
		Awareness & Internal Auditor Training	25-29 Mar 2019 Mar 25-29, 2019	5	PT Rina
		Workshop Penyusunan Risalah CIP 2019 Workshop on CIP 2019 Minutes Preparation	8-9 Agust 2019 August 8-9, 2019	2	SPBD
		Audit Intern Tingkat Manajerial Managerial Level Internal Audit	19-28 Agust 2019 August 19-28, 2019	10	YPIA
9	Arini Putri Setoaty	Value Based Development Program	Jan 2019 Jan, 2019	1	Ruang Kerja (online)
		Awareness & Internal Auditor Training	25-29 Mar 2019 Mar 25-29, 2019	5	PT Rina
		Audit Intern Tingkat Dasar Basic Internal Audit	6-18 Mei 2019 May 6-18, 2019	12	YPIA
		Workshop Penyusunan Risalah CIP 2019 Workshop on CIP 2019 Minutes Preparation	8-9 Agust 2019 August 8-9, 2019	2	SPBD
		Audit Intern Tingkat Lanjutan Advance Internal Audit	19-31 Agust 2019 August 19-31, 2019	12	YPIA

PENYIMPANGAN INTERNAL

Tidak ada penyimpangan internal di tahun 2019.

INTERNAL FRAUD

As end of 2019, there is no internal fraud occurred at PTK.

RENCANA KERJA TAHUN 2020

Unit Audit Internal telah menyusun rencana kerja kedepan. Berikut adalah rencana tugas objek audit yang akan dilakukan oleh Unit Internal Audit pada tahun 2020:

WORK PLAN FOR 2020

The Internal Audit Unit has developed future work plans. The audit object work plan that will be carried out by the Internal Audit Unit in 2020 is as follows:

Rencana Tugas Internal Audit Tahun 2020 Internal Audit Work Plan 2020

Objek Audit Audit Object	Rencana Plan
Kantor Pusat Head Office	4
Kantor Cabang Branch Office	4
Anak Perusahaan Subsidiaries	5
Non PKPT Non PKPT	1



AUDIT EKSTERNAL

EXTERNAL AUDIT

Auditor eksternal merupakan badan independen yang telah memenuhi persyaratan dalam melakukan audit umum dan memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan sebagai fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan perusahaan. Untuk menjamin independensi hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat perusahaan. Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN), audit eksternal melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu ada Kantor Akuntan Publik (KAP).

External auditor is an independent body that has fulfilled the requirements in conducting general audits and provides opinions related to the suitability of the presentation of the company's financial statements with the prevailing Financial Accounting Standards (SAK).

External audit is carried out as an independent supervisory function of the company's financial aspects. To guarantee the independence of the audit results, the appointed external auditor may not have a conflict of interest with every executive level. As a subsidiary of PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise (BUMN), the external audit also involves the Supreme Audit Board (BPK). In addition, the audit is also conducted by the Public Accounting Firm (KAP).

AUDIT EKSTERNAL OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Tidak terdapat audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun 2019

EXTERNAL AUDIT BY THE AUDIT BOARD

There is no audit conducted by the Supreme Audit Board in 2019

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahunan yang terkait kewajiban, semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Mekanisme dan proses pemilihan KAP dilaksanakan Perusahaan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

In accordance with the prevailing laws and regulations, the Company through Public Accounting Firm (KAP) performs an audit to the financial statements related to fairness in all material aspects, financial position, business results, changes in equity and cash flows, as per the generally accepted accounting principles in Indonesia. Mechanism and selection process of Public Accounting Firm (KAP) are carried out by the Company in accordance with the prevailing provisions and regulations.

MEKANISME PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 16 Mei 2018, Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan, yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar. Dari hasil audit yang dilakukan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, Kantor Akuntan Publik memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

Penetapan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Eksternal telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 khususnya pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut.

Berikut adalah informasi pihak yang melakukan audit keuangan Perusahaan dalam lima tahun terakhir:

PUBLIC ACCOUNTING FIRM APPOINTMENT MECHANISM

Public Accounting Firm Appointment Mechanism refers the Resolutions of Annual GMS for Fiscal Year 2018 dated May 16, 2018, the Shareholders delegated authority to the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PricewaterhouseCoopers).

The Public Accounting Firm is responsible for conveying an opinion to the Company's compliance on the Financial Statements, which is audited based on the generally accepted Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and the prepared reports present financial position and fair business results. Of the audit findings on the Financial Statements of Fiscal Year 2018, Public Accounting Firm (KAP) declared "unqualified opinion" in all material aspects, financial position, as per the Statement of Financial Accounting Standards in Indonesia.

Stipulation of Public Accounting Firm (KAP) as an External Auditor has aligned with Minister of Finance Regulation Number 17/ PMK.01/2008 of 5 February 2008 especially Article 3 verse 1, stating that the provision of general audit service to the financial statements of an entity is performed by Public Accounting Firm (KAP) at the most six fiscal years consecutively.

Information about the party who performed the Company's financial audit within the last five years is as follows:

Kantor Akuntan Publik 5 Tahun Terakhir Public Accountant Firms Last 5 Years				
Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Opini Opinion	Professional Fee Professional Fee
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp606 juta million
2018	Purwanto, Sungkono & Surja (Ernst & Young)	Said Amru	Wajar Fair	Rp566 juta million
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers)	Daniel Kohar	Wajar Fair	Rp570 juta million
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) Tanudiredja, Wibisana,	Yusron	Wajar Fair	Rp591 juta million
2015	Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo dan Rekan (Crowe Horwath)	Nunu Nurdyaman	Wajar Fair	Rp475 juta million



BIAYA AUDIT DAN JASA LAIN YANG DILAKUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Total biaya Audit Umum Laporan Keuangan PTK tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2019 adalah Rp606 juta yang meliputi audit atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk tahun buku yang berakhir per tanggal tersebut, dan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. Audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Selama tahun 2019 KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) tidak memberikan jasa lain kepada PTK selain jasa audit. Dengan demikian pelaksanaan proses audit berjalan independen dan tidak terdapat benturan kepentingan.

AUDIT FEE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY PUBLIC ACCOUNTING FIRM

Total fee for General Audit of PTK's Financial Statements for fiscal year ended on 31 December 2019 amounted to Rp606 million which include audit on the Balance Sheet, Statement of Profit/Loss, Statement of Changes in Equity, as well as Statement of Cash Flows for fiscal year ended on that date, and to state an opinion on the fairness in presenting the financial position, business results, changes in equity, and cash flows of the company. The audit was conducted based on the auditing standards stipulated by Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and Public Accountant Professional Standards (SPAP).

In 2019, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) did not perform other services to PTK aside from audit service. Thus, the implementation of audit was accomplished independently and did not have conflict of interest.

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulangrisiko perusahaan secara efektif agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risikoseminimal mungkin. Penerapan manajemen risiko pada perusahaan guna menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*); mengoptimalkan peluang (*opportunity*); mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif; meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham; meningkatkan tata kelola yang sehat; mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat; serta mengintegrasikan korporat.

Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha. Risiko utama yang dihadapi timbul dari instrumen operasional, seperti kegiatan *operation days* kapal milik, keagenan, pelabuhan umum dan khusus, dan risiko lainnya. Sedangkan risiko lainnya adalah risiko keuangan yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar berupa tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko likuiditas.

Fungsi utama dari manajemen risiko yang dijalankan Perusahaan adalah mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perseroan. Secara rutin, Perusahaan menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perseroan dan praktik pasar terbaik.

Risk management is an initiative to identify, analyze / evaluate, manage and review the Company's risks effectively so that the established company goals can be achieved with minimal risk impact. Implementation of risk management in companies to avoid or minimize potential losses; optimize opportunities; maintain a conducive work environment; increase shareholder value; improve healthy governance; anticipating rapid environmental changes; and integrating corporates.

The risk management implemented includes risks faced in performing the business activities. The main risks arising from operational instruments, among which are operation days activity of the ship owned, agencies, general and special port, and other risks. Meanwhile, the other risks include financial risk, consisting of credit risk, market risk (interest rate and foreign exchange rate), and liquidity risk.

The main functions of risk management performed by the Company are to identify all key risks, measure these risks and manage the risks position as per the Company's policies and procedures. The Company routinely analyzes the risk management policy and system to align with the Company's business dynamics and best market practices.

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Dasar pelaksanaan atau pengelolaan risiko perusahaan adalah Pedoman Manajemen Risiko tentang pengelolaan risiko yang tertuang dalam Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Direksi No. Pdm-002/10000/2017-SO (Revisi ke-0) tanggal 16 Oktober 2017. Pedoman Manajemen Risiko senantiasa ditinjau dan diperbaharui secara berkala.

RISK MANAGEMENT POLICY

The enterprise risk implementation framework or management refers to the Risk Management Guidelines based on Directors Decree No. Pdm-002/10000/2017-SO (0 Revision) on October 16, 2017. The Risk Management Guidelines are regularly reviewed and updated.

Pedoman berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dan menjadi acuan Anak Perusahaan. Pedoman ini mencakup antara lain:

1. Prinsip dasar penerapan manajemen risiko;
2. Kerangka dan kebijakan manajemen risiko;
3. Proses penerapan manajemen risiko;
4. Atribut peningkatan manajemen risiko;
5. Tugas dan tanggung jawab satuan kerja terkait;
6. Penerapan manajemen risiko.

PTK memiliki Traktat Manajemen Risiko yang ditandatangani Direksi tanggal 11 Juli 2019. Traktat Manajemen Risiko merupakan pengembangan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang tertera dalam Pedoman Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Direksi PTK terhadap penerapan sistem manajemen risiko berbasis integrasi korporasi yang juga dikenal dengan *Enterprise-wide Risk Management* (ERM) di PTK, serta sebagai landasan bagi seluruh jajaran Perusahaan.

The guidelines prevail to activities or business activities that relate to the interests of the Company and become a reference for the Subsidiaries. These guidelines include, among others:

1. Risk management implementation basic principle;
2. Risk management framework and policy;
3. Risk management implementation process;
4. Risk management enforcement attributes;
5. Duties and responsibilities of related work units;
6. Risk management implementation.

PTK has Risk Management Tract signed by the Board of Directors on 8 June 2018. This Risk Management Tract constitutes a development of Risk Management principles stated in the Risk Management Manual, a form of commitment of PTK's Board of Directors toward the implementation of risk management system based on corporation integration (*Enterprise-wide Risk Management/ERM*) at PTK, as well as a foundation for all levels in the Company.

STRUKTUR DAN SISTEM PENGELOLAAN RISIKO

Struktur manajemen risiko PTK berawal dari pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha (IRU) serta Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Selain itu, perusahaan juga memiliki fungsi pendukung untuk menerapkan pengelolaan risiko antara lain fungsi Strategic Planning Business Development (SPBD), Manajemen Risiko Fungsi, serta Manajemen Risiko Anak Perusahaan.

Berikut adalah struktur manajemen risiko PTK:

RISK MANAGEMENT STRUCTURE AND SYSTEM

Risk management structure in PTK is started from the active supervision of the Board of Commissioners through the Investment and Business Risk Committee (IRU) and the Board of Directors through the Risk Management Committee. In addition, the company also has supporting functions to implement risk management, including the Strategic Planning Business Development (SPBD) function, Risk Management Function, and Risk Management of Subsidiaries.

The risk management structure in PTK is as follows:

Struktur Manajemen Risiko Risk Management Structure	
Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee	Komite Investasi dan Risiko Usaha merupakan komite dibawah Dewan Komisaris yang bertujuan untuk mendukung fungsi pengawasan serta memberikan nasihat dan rekomendasi terhadap risiko usaha. The Business Risk and Investment Committee is a committee under the Board of Commissioners that aims to support the supervisory function and provide advice and recommendations on business risks.
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Dewan Direksi (BOD) dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Risiko di Perusahaan. The Risk Management Committee is a committee consisting of a Board of Directors (BOD) in order to handle matters relating to Risk Management in the Company.

Struktur Manajemen Risiko Risk Management Structure

Strategic Planning Business Development
Strategic Planning Business Development

Merupakan unit yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi Perseroan sebagai Manajemen Risiko Perusahaan, untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Manajemen Risiko di masing-masing Direktorat dan fungsi leher.
It is a unit that is given authority and responsibility by the Board of Directors of the Company as Corporate Risk Management, to coordinate the implementation of Risk Management in each Directorate and neck function

Manajemen Risiko Fungsi
Risk Management Function

Merupakan PIC Manajemen Risiko Fungsi yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi melalui pejabat tertinggi pada satu fungsi (satuan kerja) terkait untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing fungsi.
It is a PIC Risk Management Function that is given the authority and responsibility by the Board of Directors through the highest official in a function (work unit) related to coordinating the implementation of risk management in each function.

Manajemen Risiko Anak Perusahaan
Pertamina Trans Kontinental
Risk Management of Pertamina Trans Kontinental's Subsidiary

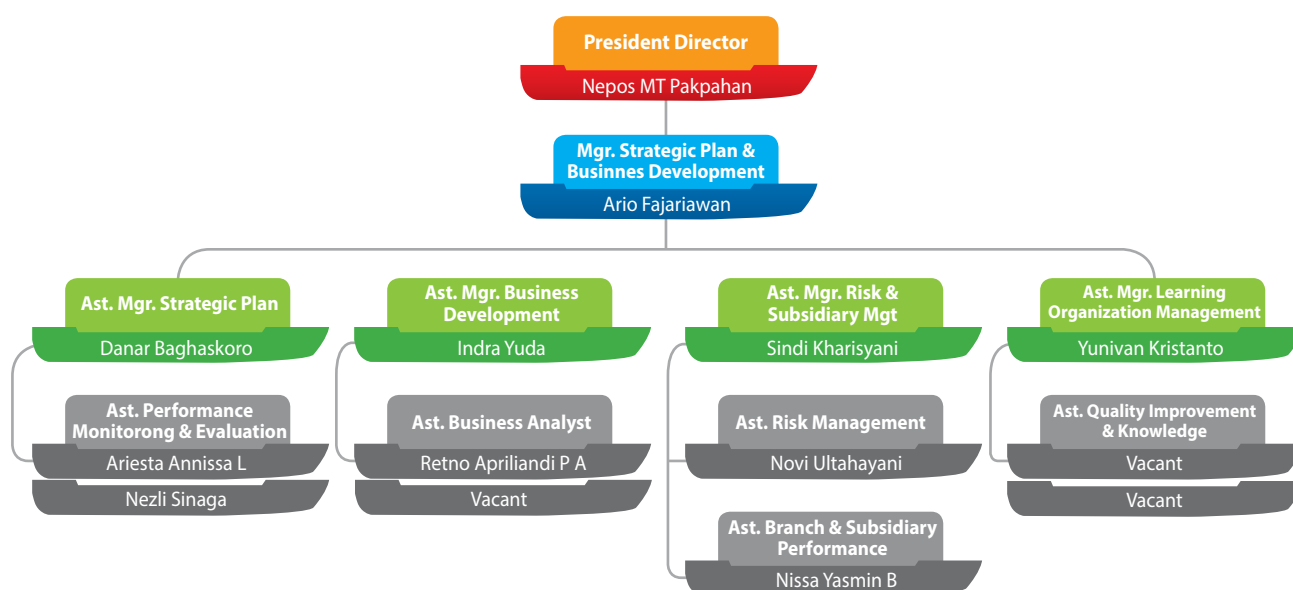
Merupakan fungsi manajemen risiko anak perusahaan Pertamina Trans Kontinental yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh Direktur Anak Perusahaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen risiko di masing-masing Anak Perusahaan Pertamina Trans Kontinental.
Is a risk management function of the Pertamina Trans Kontinental's subsidiary that is given authority and the responsibility by the Director of subsidiaries to coordinate the implementation of risk management in each of Pertamina Trans Kontinental's subsidiary.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh Strategic Planning Business Development (SPBD) yang disupervisi Direktur Utama. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari Asisstant Manager Risk & Subsidiary Management.

RISK MANAGEMENT WORK UNIT

The integrated risk management function is managed by the Strategic Planning Business Development (SPBD) supervised by the President Director. Specifically risk management is the responsibility of Assistant Manager Risk & Subsidiary Management.





PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko Perusahaan terdapat pada Divisi Manajemen Risiko yang dikelola oleh Manager *Strategic Plan & Business Development*. *Strategic Plan & Business Development* terbagi atas 4 sub-fungsi yang terdiri dari *Strategic Plan*, *Business Development*, *Risk & Subsidiary Management*, dan *Quality Management*.

RISK MANAGEMENT MANAGER

The risk management function in the Company is under the Risk Management Division, managed by the Strategic Plan & Business Development Manager. Strategic Plan & Business Development is divided into 4 sub-functions consisting of Strategic Plan, Business Development, Risk & Subsidiary Management, and Quality Management.

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Strategi penerapan manajemen risiko yang diterapkan perusahaan mencakup:

- Penetapan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*;
- Penetapan rencana Penanganan Risiko (*Risk Treatment Plan*);
- Profil Risiko sebelum dan setelah dilakukan penanganan;
- Pembuatan skala prioritas (Prioritas Risiko) dalam Penanganan Risiko;
- Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko;
- Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Risiko.

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION STRATEGIES

Strategies of the risk management implementation cover:

- Stipulating Risk Appetite and Risk Tolerance Stipulation;
- Stipulating Risk Treatment Plan;
- Implementing Risk Profile before and after handling;
- Developing Risk Priority in Risk Treatment;
- Monitoring the implementation of Risk Management policy and framework;
- Reporting the implementation of risk management.

MEKANISME MANAJEMEN RISIKO

Strategi terkait penerapan manajemen risiko tersebut diimplementasikan dalam sebuah mekanisme manajemen risiko, yang melibatkan proses penyusunan daftar risiko hingga audit pelaksanaannya. Berikut adalah daftar risiko perusahaan:

- *Risk Owner*, bertanggung jawab menerapkan Manajemen Risiko di Fungsinya terkait dengan aktivitas dan kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya serta mendokumentasikannya.
- *Risk Register*, disusun oleh setiap Fungsi untuk selanjutnya diagregasikan menjadi *Risk Register* tiap Fungsi Leher dan ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi Fungsi Leher.
- *Risk Profile*, korporat dibuat sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

RISK MANAGEMENT MECHANISM

The strategies are implemented in a risk management mechanism, involving a process of preparing a list of risks up to its implementation.

- Risk Owner, this individual is responsible to perform Risk Management in its Function related to the activities and business activities to which become its responsibility and document the process.
- Risk Register, a document prepared by each Function to be subsequently aggregated as Risk Register in each Functional Structure and signed by the Highest Functional Leader.
- Risk Profile, a profile of corporate risk which is created at least once a year.

- Laporan *Monitoring* Risiko ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Fungsi Leher dan dibuat secara periodic sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- Fungsi harus memasukkan Biaya Penanganan Risikonya (*Cost of Risk*) ke dalam RKAP, baik operasional maupun investasi. Untuk investasi, *Cost of Risk* diperhitungkan dalam analisa keekonomian.
- Perusahaan dapat melakukan *Risk Financing* sebagai rencana kontijensi apabila dianggap perlu oleh Fungsi berdasarkan suatu kajian dan disetujui oleh Direktorat/ Fungsi Leher.
- Perlu dilakukan *Risk Management Audit* guna memastikan bahwa proses pengelolaan Risiko telah dilaksanakan dengan baik.
- Risk Monitoring Report is signed by the highest Functional Leader and developed periodically at least once a year.
- The function should include Cost of Risk into RKAP, either operational or investment. In investment, Cost of Risk is calculated in economy analysis.
- The Company could perform Risk Financing as a contingent plan if deemed necessary by the Function based on an analysis and approved by the Directorate/ Functional Structure.
- Risk Management Audit is necessary in ensuring the risk management process

Dalam pelaksanaannya, penerapan mekanisme manajemen risiko di Perusahaan meliputi seluruh aktivitas dan kepentingan usaha PTK.

- Mandat dan Komitmen dari Direksi;
- Pengawasan pemimpin tertinggi di tiap Fungsi/ Cabang/Anak Perusahaan;
- Adanya kebijakan, prosedur dan penetapan *Risk Attitude*, *Risk Appetite*, dan *Risk Tolerance* yang mendukung rencana strategis Pertamina Trans Kontinental;
- Adanya proses penentuan lingkup risiko, *risk identification*, *risk analysis*, *risk evaluation*, *risk treatment*, *monitoring & review*, serta sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif, dan penyediaan data yang terintegrasi;
- Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja yang akan dilakukan;
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
- Peningkatan pemahaman secara komprehensif mengenai manajemen risiko, khususnya di tingkat manajemen.

Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *ongoing business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan

In its implementation, the risk management mechanism at the Company includes all activities and business interests of PTK.

- Mandate and Commitment from the Board of Directors;
- Supervision on the highest leader in each Function/ Branch/Subsidiary;
- Establishment of policy, procedure, and stipulation of Risk Attitude, Risk Appetite, and Risk Tolerance which support Pertamina Trans Kontinental strategic plans;
- Performing process of determining the scope of risk, risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk treatment, monitoring & review, as well as comprehensive risk management information system, and integrated data provision;
- Adequate procedure and requirements in performing evaluation and providing recommendation on the new business activities as well as changes in to be performed system and work procedures;
- Thorough internal control system;
- Increasing comprehensive understanding on risk management, especially in management level.

The process of risk management has the purpose of protecting the Company in every activity and/or business transaction, either ongoing business or investment activities. The ongoing business activities are a series of



serangkaian kegiatan PTK yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan.

PTK activities which have been performed routinely in accordance with the Company's business process based on business continuity principle. Meanwhile, investment activities are series of resources use in increasing the Company's values.

Proses Manajemen Risiko Sesuai Aktivitas Usaha PTK Risk Management Process in accordance with the PTK's Business Activities	
Ongoing Business	Investasi Investment
Establishing the context (Penentuan Lingkup Pengelolaan Risiko)	Perencanaan Manajemen Risiko Planning risk management
Risk Identification (Identifikasi Risiko)	Identifikasi risiko Identifying risks
Risk Analysis (Analisis Risiko)	Analisis risiko kualitatif dan kuantitatif Analyzing Qualitative and Quantitative Risks
Risk Evaluation (Evaluasi Risiko)	Perencanaan respon risiko Planning Risk Response
Risk Treatment (Penanganan Risiko)	Pemantauan dan pengendalian risiko Monitoring and Controlling Risks
Monitoring & Review (Pemantauan dan Kaji Ulang)	
Communication & Consultation (Komunikasi dan Konsultasi)	

HUBUNGAN KERJA DENGAN KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Secara aktif, Fungsi SPBD melakukan komunikasi dan pertemuan (rapat) dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Sepanjang tahun 2019 Fungsi SPBD telah bertemu dan melaksanakan beberapa kali rapat dengan Komite IRU, terkait untuk membahas pengelolaan risiko dari pelaksanaan investasi yang dilakukan Perusahaan.

WORK RELATIONSHIP WITH INVESTMENT AND BUSINESS RISK COMMITTEE

The SPBD Function actively performs communication and meetings with Investment and Business Risk Committee. In 2019, the SPBD Functions has convened and performed several meetings with the IRU Committee to discuss risk management of the investments conducted by the Company.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko guna meningkatkan pengembangan budaya sadar risiko (*risk consciousness*) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Kegiatan pelatihan terkait manajemen risiko yang dilaksanakan tahun 2019:

RISK MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company strives to encourage each employee to increase their capability in risk management through training programs, including professional certification training in Risk Management. Certified trainings are necessary in heightening risk consciousness and sharing knowledge. Training activities related to risk management realized in 2019 are as follows:

Pelatihan Terkait Manajemen Risiko tahun 2019 Training activities related to risk management realized in 2019

Peserta Participant	Tema Pelatihan Theme of Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
PIC Manajemen Risiko Korporat Corporate Risk Management PIC	Workshop dan Kick Off Meeting Risk Register 2020	24-26 Juni 2019 June 24-26, 2019	PT Pertamina (Persero)
PIC Manajemen Risiko Fungsi, Cabang & Anak Perusahaan Risk Management Functions, Branches & Subsidiaries PIC	Executive Briefing dan Workshop Enterprise Risk Management ISO 31000:2018	10-11 Juli 2019 July 10-11, 2019	PT Pertamina Trans Kontinental, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Retail
PIC Manajemen Risiko Korporat Corporate Risk Management PIC	Workshop ERMS on Going Business dan Investasi Direktorat LSCI 2019	5-6 Desember 2019 December 5-6, 2019	PT Pertamina (Persero)

PROFIL RISIKO PERUSAHAAN DAN MITIGASI RISIKO

Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi enam risiko: *Governance Risk, Strategi and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastruktur Risk, Compliance Risk*, serta *Reporting Risk*. Berikut uraian terkait jenis dan mitigasi risiko:

RISK PROFILE AND RISK MITIGATION

The Company carries out management on risks that are classified into six risks: Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk, and Reporting Risk.

Mitigasi Risiko Perusahaan Risk Mitigation Company

Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Finansial Financial Risk	Risiko ini berkaitan dengan optimalisasi keuangan perusahaan, yaitu terkait dengan tingginya Angka Piutang This risk related to optimization of the company's finances, which is related to high accounts receivable number	1. Pembuatan kesepakatan bersama mendahului kontrak yang dapat digunakan sebagai dasar penagihan 2. Pemberian surat peringatan atau somasi kepada <i>customer</i> 3. Pembentukan tim penagihan piutang (khusus untuk piutang lama) 1. Collective agreements preceding the contracts that can be used as a payment basis 2. The impose a warning or summon to the customer 3. Forming a receivables collection team (especially for matured receivables)
Risiko Operasional Operational Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu tidak beroperasinya kapal milik This risk is related to risks arising from operational processes, namely the non-operation of owned vessels	1. Fungsi Vessel Marketing mencari <i>project</i> yang sesuai dengan Spesifikasi teknis kapal AHTS. 2. Fungsi Vessel Marketing melakukan renegosiasi <i>charter rate</i> Kapal AHTS dengan pihak pen-<i>charter</i>. 3. Training <i>crew</i> terkait ISM dan PMS 4. Sentralisasi pelaksanaan familiarisasi ISM, PMS, dan Operasional Kapal 1. Fungsi Vessel Marketing mencari <i>project</i> yang sesuai dengan Spesifikasi teknis kapal AHTS. 2. Fungsi Vessel Marketing melakukan renegosiasi <i>charter rate</i> Kapal AHTS dengan pihak pen-<i>charter</i>. 3. Training <i>crew</i> terkait ISM dan PMS 4. Sentralisasi pelaksanaan familiarisasi ISM, PMS, dan Operasional Kapal



Mitigasi Risiko Perusahaan Risk Mitigation Company		
Jenis Risiko Risk Type	Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Risiko Operations Operation Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu kurangnya <i>performance</i> kapal dari yang dipersyaratkan dalam kontrak dengan <i>charterer</i> (<i>slow speed, slow pumping, over bunker, reduction scheme</i>) This risk is related to risks arising from operational processes, namely the lack of performance of the ship than required in the contract with the charterer (<i>slow speed, slow pumping, over bunker, reduction scheme</i>)	1. Training crew terkait ISM dan PMS 2. HSSE membuat <i>monitoring review</i> mengenai implementasi ISM 3. Sentralisasi pelaksanaan familiarisasi ISM, PMS, dan Operational Kapal 4. Kunjungan ke kapal terkait <i>review</i> penerapan ISM dan PMS secara periodik 1. Crew training related to ISM and PMS 2. HSSE makes a monitoring review regarding ISM implementation 3. Centralized implementation of ISM, PMS and Ship Operational familiarization 4. Periodic ship visits related to the implementation of ISM and PMS
Risiko Operations Operation Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu keterlambatan <i>Delivery Time</i> Kapal Baru (<i>New Build</i>) This risk is related to risks arising from operational processes, which are delays in <i>Delivery Time</i> of New Vessels (<i>New Build</i>)	1. Meminta surat jaminan pendukung keuangan kepada kandidat galangan pada saat tender 2. Melakukan <i>assessment</i> secara komprehensif terhadap galangan kapal 1. Request a financial support guarantee letter from prospective shipyard at the time of tender 2. Conduct a comprehensive assessment of the shipyard 3. Conduct periodic surveys with charters
Risiko Operations Operation Risk	Risiko ini berkaitan dengan risiko yang timbul dari proses operasional yaitu tidak tercapainya target durasi pelaksanaan <i>docking</i> This risk is related to risks arising from operational processes that are not achieving the target duration of the docking implementation	1. Memfokuskan pemilihan <i>dockyard</i>/galangan yang professional 2. Fungsi <i>Tech. Fleet</i> melakukan evaluasi Galangan dan Kontraktor Penunjang sebagai bahan Fungsi <i>Procurement</i> dalam proses tender pekerjaan <i>docking</i> berikutnya. 1. Focusing on selecting a professional dockyard 2. Tech function. Fleet evaluates the Shipyard and Supporting Contractors as material for the Procurement Function in the tender process for the next docking work.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Evaluasi atas sistem manajemen risiko dilakukan di tahun 2018 - 2019 yaitu dengan melakukan pengukuran maturitas risiko. berdasarkan pengukuran tersebut, tingkat maturitas pelaksanaan manajemen risiko PTK berdasarkan kerangka kerja ISO 31000:2018 adalah 3.73 (*mature growth*). Dengan perincian untuk aspek principles berada pada tahap advance, aspek *framework* dalam aspek *growth* dan aspek *process* dalam tahap *mature growth*. Dengan rincian:

- Aspek *Principles* berada dalam tahap *Advance*;
- Aspek *Framework* dalam tahap *Mature Growth*;
- Aspek *Process* dalam tahap *Mature Growth*.

EVALUATION ON RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

An evaluation on the risk management system is carried out in 2018 - 2019 by measuring risk maturity. Based on these measurements, the level of maturity of risk management in PTK according to the ISO 31000: 2018 framework is 3.73 (*mature growth*). Detail aspects of the principles are including the advance, framework, growth and process aspects in the mature growth stage, with detail, as follows:

- Principles Aspect in Advance stage;
- Framework Aspect in Mature Growth stage;
- Process Aspect in Mature Growth stage.

Pencapaian ini menandakan bahwa Enterprise Risk Management (ERM) telah terdokumentasi dan terkoordinasi, serta dijalankan secara terukur pada tiap fungsi organisasi. ERM terimplementasi secara komprehensif serta terdapat perangkat formal kendali ERM pada tingkat eksekutif. Integrasi ERM dengan perencanaan strategis dan penilaian kinerja perusahaan belum sempurna, namun telah terdapat tahap evaluasi *framework* ERM yang sistematis.

This achievement indicates that Enterprise Risk Management (ERM) has been documented and coordinated, and carried out in a measurable manner at each organizational function. ERM is implemented comprehensively and formal tools for ERM control at the executive level are in place. ERM integration with strategic planning and evaluation of company performance is not perfect, but there has been a systematic evaluation phase of the ERM framework.

SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pertamina Trans Kontinental secara berkesinambungan melakukan sosialisasi manajemen risiko guna membangun kesadaran risiko (*risk awareness*) kepada seluruh unit kerja, cabang dan juga pemangku kepentingan. Sosialisasi Manajemen Risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal *event* kepada seluruh pekerja PTK pada segenap tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*, serta pemangku kepentingan.

Media sosialisasi Manajemen Risiko antara lain dilakukan melalui:

- *Enterprise Risk Management* yang berada dalam portal ptk-shipping.com.
- *Upskilling* dan *coaching clinic Risk Management* kepada PIC 13 Cabang, seluruh Anak Perusahaan dan *Joint Venture*
- Pelaporan *Risk Monitoring*.
- Secara berkala, juga dilakukan sosialisasi terhadap unit kerja dan cabang.

Pada tahun 2019 PTK juga melakukan beberapa upaya pengembangan terkait penerapan Manajemen Risiko yaitu dilakukan pelaporan pelaksanaan monitoring risiko melalui sistem ERMS dan dilakukan penyusunan TKO manajemen risiko.

SOCIALIZATION AND DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Pertamina Trans Kontinental is persistent to perform socialization on risk management to promote risk awareness to all work units, branches, and also stakeholders. The Risk Management socialization is performed by utilizing various media and internal event to all PTK employees and levels, including outsourcing personnel and stakeholders.

The socialization media of Risk Management is performed through:

- Enterprise Risk Management, which is included in the portal, ptk-shipping.com.
- Upskilling and coaching clinic Risk Management to PIC of 13 Branches, all Subsidiaries, and Joint Venture.
- Risk Monitoring reporting.
- Periodical socialization to work units and branches.

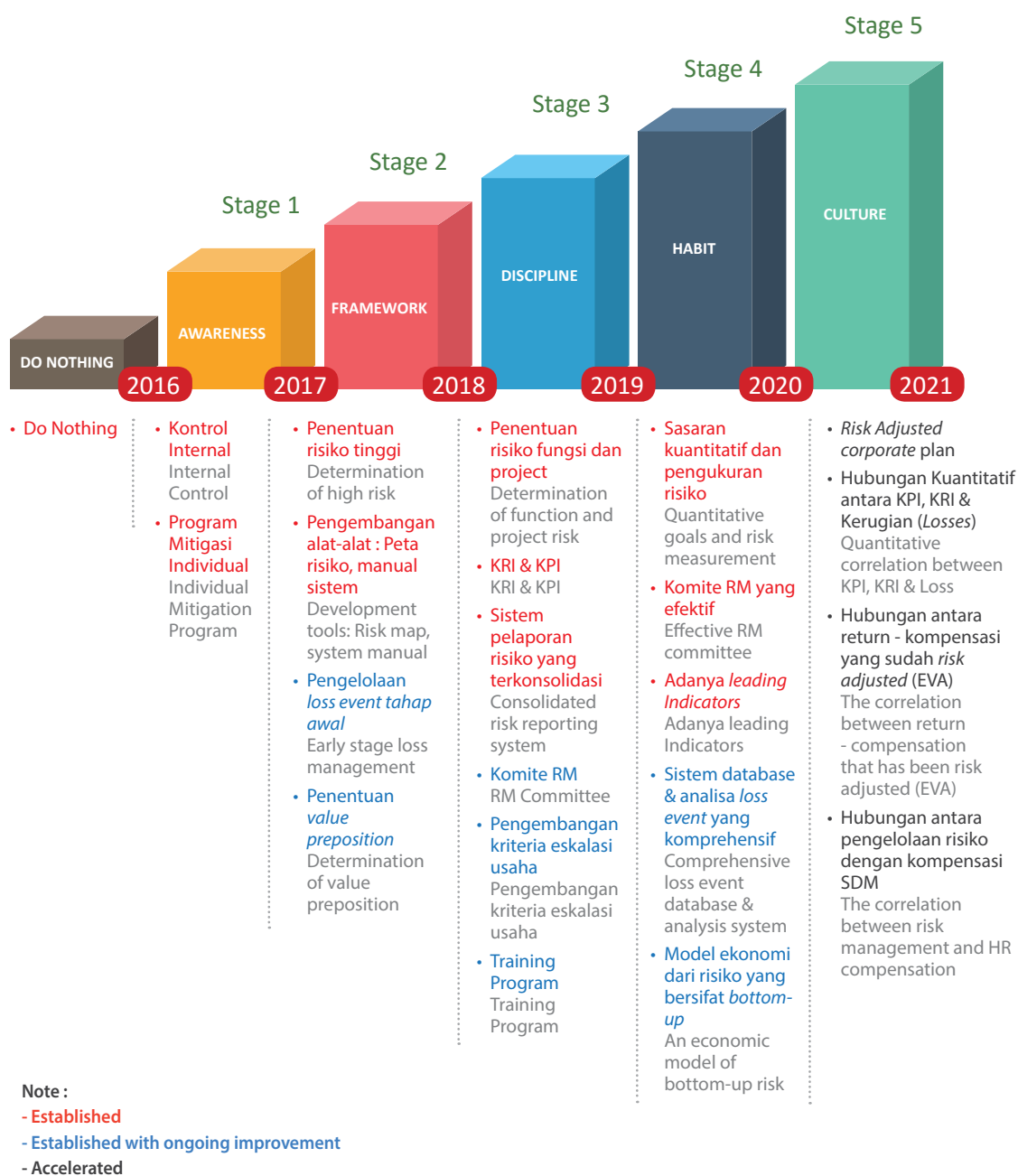
In 2019 PTK also made several development efforts related to the application of Risk Management, namely the implementation of risk monitoring reporting through the ERMS system and the preparation of risk management TKO.

ROADMAP PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada Roadmap Manajemen Risiko, tahun 2019 PTK membentuk Komite Manajemen Risiko yang bertanggungjawab atas pemantauan pelaksanaan manajemen risiko dan pengelolaan risiko yang diambil oleh PTK. Untuk tahun 2019, Divisi Manajemen Risiko telah berada pada Stage 3.

RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT ROADMAP

In the Risk Management Roadmap, PTK has established a Risk Management Committee in 2019, with responsibility to oversee the risk management implementation and risk mitigation implemented by PTK. For 2019, the Risk Management Division will be on Stage 3.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang terintegrasi dalam mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam proses bisnis dengan meningkatkan dan memperkuat lingkup pengendalian internal.

PTK mengupayakan pengembangan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO). Melalui sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan maupun pekerja dapat memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan perusahaan.

Internal control system is an integrated process in achieving operational effectiveness and efficiency, financial reporting reliability, compliance with prevailing law and regulations. The internal control system is functioned as a fraud prevention in the business processes by increasing and strengthening the internal control scope.

PTK strives the Control System development by adopting the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) approach. Through the internal control system which is implemented both by top management and employees of the Company, will generate assurance on the Company's goals achievement.

KESESUAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Proses perancangan sistem pengendalian internal PTK telah mengacu kepada kerangka *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions* (COSO) dengan memperhatikan 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan ditujukan untuk:

- Mengamankan aset;
- Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan;
- Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen;
- Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

INTERNAL CONTROL SYSTEM CONFORMITY WITH COSO FRAMEWORK

The internal control system designing process in PTK has referred to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO) framework by taking into account 5 components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervision. The implementation of internal control system is aimed for:

- Securing assets;
- Encouraging efficiency and effectivity in the Company's operation;
- Developing reliability and comprehensiveness in accounting/financial information and management;
- Guaranteeing compliance to policy and procedure as well as the prevailing laws and regulations.



Three Lines of Defense

Sesuai COSO, PTK telah menerapkan mekanisme *Three Line of Defense*, sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara terpadu.

Three Lines of Defense

In accordance with COSO, PTK has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance.

First line of defense

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties

- Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.
- Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.
- Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.
- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.
- Control and implementation of potential risks mitigation.

Second line of defense

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit *strategic & planning* dan fungsi *compliance* yang berada pada unit Corporate Secretary

Managed by risk management function under the strategic & planning unit and compliance function under the Corporate Secretary unit

- Peningkatan fungsi *check & balance* mendukung operasi Perusahaan.
- Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkatan organisasi.
- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.
- Increasing check & balance function in support of the Company's operation.
- Socializing awareness to the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels
- Implementing integrated risk management.
- Improving operational and non-operational manuals and policies.

Third line of defense

dikelola oleh Unit Audit Intern
Managed by Internal Audit Unit

- Pelaksanaan audit internal sesuai program kerja audit tahunan.
- Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran akan penerapan tata kelola perusahaan. Kepatuhan dan manajemen risiko.
- Database temuan audit internal dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan kualitas setiap unit/fungsi.
- Performing internal audit in accordance with the annual audit work program.
- Performing surprise audit to measure the awareness of corporate governance implementation. Compliance and risk management.
- Internal and external audit findings database as input for better quality in each unit/function

Penerapan Elemen Pengendalian Internal

PTK menerapkan elemen-elemen pengendalian internal dengan merujuk kepada COSO – *Internal Control Framework*.

Implementation of Internal Control Elements

PTK implements elements of internal control by referring to COSO – Internal Control Framework.

• Lingkungan Pengendalian

PTK berkomitmen membangun lingkungan pengendalian yang baik melalui penerapan serangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.

• Control Environment

PTK is committed to build a good control environment through a series of standards, processes, and structures which serve as basis for internal control implementation across the organization.

• **Penilaian Risiko**

PTK menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan pemetaan serta mitigasi risiko atas risiko-risiko yang terintegrasi: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk, reporting risk*.

• **Aktivitas Pengendalian**

PTK memiliki pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan nonoperasional. Mekanisme pengendalian terhadap risiko diterapkan dalam bentuk *Three Line of Defense*.

• **Komunikasi dan Informasi**

PTK memiliki sistem manajemen informasi yang baik dan terus mendorong komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak untuk memperoleh informasi yang memadai untuk proses pengambilan keputusan.

• **Aktivitas Pemantauan**

PTK memiliki mekanisme pemantauan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris – Direksi, Rapat Direksi dan berbagai aktivitas pengendalian lainnya.

• **Risk Assessment**

PTK implements risk management system and performs risk mapping and mitigations over the integrated risks: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk, and reporting risk*.

• **Control Activities**

PTK has a manual and policies for operational and non-operational activities. The control mechanism to risks is applied in the form of Third Line of Defense.

• **Information and Communication**

PTK has good information management system and strives to promote open communication with all parties to acquire sufficient information for decision making.

• **Monitoring Activity**

PTK has a monitoring mechanism in form of Coordination Meeting, Board of Commissioners Meeting, Management Meeting, Board of Directors Meeting, and other various control activities.

PENGENDALIAN KEUANGAN

Sejalan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, PTK melakukan pengendalian atau pengelolaan terkait keuangan sebab hal tersebut menjadi faktor penting dalam kelancaran aktivitas operasional dan bisnis perusahaan. Pengendalian/ pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sehat sehingga perusahaan dapat meminimalisir pemborosan, penyimpangan, serta mengoptimalkan arus keuangan perusahaan.

Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan

Tujuan pengelolaan keuangan adalah memaksimalkan laba serta mengejar tingkat pertumbuhan Perusahaan melalui pelaksanaan program kerja yang dilandasi prinsip

FINANCIAL CONTROL

In line with the implementation of effective internal control system, CAR carries out financial control or management because it is an important factor in the smooth running of the company's operational and business activities. Financial control/management is carried out with sound principles thereby the company can minimize waste, fraud, and optimize financial flow of the Company.

Financial Management Basic Principles

Financial management holds the purpose of maximizing profit as well as pursuing growth level of the Company through an implementation of work program based on



sadar biaya (*cost consciousness*). Perusahaan menganalisa dan mengantisipasi segala risiko yang mungkin terjadi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko yang terjadi.

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan secara profesional, terbuka, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Terkait prosedur, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik, serta sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai guna menjauhkan perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terkait proses pencatatan, kesalahan penyajian, hingga pelaporan keuangan perusahaan.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dalam bentuk rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dasar penyusunan anggaran adalah program kerja dan dikoordinasikan antar fungsi/kantor cabang untuk menyinergikan usulan anggaran setiap fungsi/kantor cabang dengan menganut prinsip *bottom-up* dan *top-down*. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis setiap fungsi kantor cabang dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, dan analisis terhadap peluang pasar yang kemungkinan besar bisa dicapai. Anggaran Perusahaan terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran biaya dan anggaran investasi. Perusahaan telah melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara fungsi verifikasi, pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dan penyetoran dana serta otorisasi dalam pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Perusahaan dilaksanakan dengan mengacu pada RKAP dan mempertimbangkan azas manfaat. Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kebijakan mengenai transaksi-transaksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, selain yang diatur dalam Anggaran

cost consciousness principle. The Company analyzes and anticipated all possible risks and performs necessary measures to address the risks.

The Company's financial management is carried out professionally, transparently, and based on the principle of prudence. Related to procedures, policies and regulations relating to financial management, it is prepared and evaluated periodically, and in accordance with Financial Accounting Standards and prevailing laws and regulations. Companies must create an adequate internal control system to keep the company away from various high-risk issues related to the recording process, mispresentation, to the company's financial reporting.

Financial Management Planning

The company's financial management is carried out in the form of short-term, medium-term and long-term plans. The basis for preparing a budget is a work program and is coordinated between functions/branch offices to synergize the proposed budget of each function/branch office by adopting the bottom-up and top-down principles. The Board of Directors has set realistic revenue and cost targets for each branch office function by taking into account the needs, resources, and analysis of market opportunities that are likely to be achieved. The Company's budget consists of an income budget, a cost budget and an investment budget. The Company has segregated duties between the functions of verification, recording and reporting, depositing and depositing funds as well as authorization in financial management.

Financial Management Implementation

Activities of the Company are carried out by referring to RKAP and considering benefits principle. The Board of Directors and Board of Commissioners prepare policies on transactions requiring approval from the Board of Commissioners, aside from the regulations in the Articles of Association.

Dasar. Setiap keputusan Dewan Komisaris terkait dengan transaksi-transaksi yang melalui persetujuan Komisaris, wajib ditaati Direksi.

Each decision made by the Board of Commissioners related to transactions that require approval from the Board of Commissioners must be obeyed by the Board of Directors.

Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan mengenai pendelegasian dan batas kewenangan untuk mempercepat proses aktivitas dengan tetap memperhatikan risiko. Pengeluaran-pengeluaran yang belum dicantumkan dalam RKAP dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Direksi.

The Board of Directors stipulates a financial management policy on the delegation and limit of authority to accelerate activity process by consistently considering the risks. Expenditures that have yet to be stated in RKAP could be made possible after obtaining an approval from the Board of Directors.

Perubahan revisi rencana kerja dan anggaran harus melalui prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan Direksi dan dilakukan dengan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan memberikan apresiasi terhadap fungsi/kantor cabang yang dapat mencapai target kinerjanya.

Changes in the revision of work plan and budget should undergo procedures/provisions stipulated by the Board of Directors and be based on justifications that can be held accountable for. The Company gives appreciation to functions/branch offices that could achieve its performance target.

Pengendalian Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor cabang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada Direksi. Manajer fungsi/ kepala cabang bertanggung jawab untuk memonitor, mengevaluasi dan mengefektifkan realisasi RKAP pada fungsi/kantor cabangnya.

Financial Management Control

Each function/branch office should be account for financial management to the Board of Directors. The manager of function/branch office is responsible for monitoring, evaluating, and making the realization of RKAP effective in its function/branch office.

Perusahaan melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP dan analisis terhadap penyimpangan (*variance*) yang dilakukan oleh fungsi kantor cabang secara keseluruhan. Adapun pemantauan pengelolaan keuangan kantor cabang menjadi tanggung jawab Fungsi Financial Accounting.

The Company carries out an evaluation over the RKAP implementation and analysis on the variance performed by the branch office function as a whole. The monitoring of financial management at a branch office became the responsibility of Financial Accounting Function.

Perusahaan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pelimpahan wewenang pemberian otorisasi terhadap pengeluaran uang. Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Direksi.

The Company stipulates a clear policy on the delegation of authority on giving authorization for cash expenditure. The Board of Commissioners monitors the financial management accomplished by the Board of Directors.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan

Setiap fungsi/kantor cabang/anak perusahaan wajib mengirimkan laporan keuangan ke Direktur Keuangan. Perusahaan melakukan konsolidasi laporan keuangan

Financial Management Reporting

Each function/branch office/subsidiary is obligated to submit financial statements to Finance Director. The Company performs the consolidated financial statements



dari seluruh fungsi/kantor cabang serta anak perusahaan. Direktur Keuangan harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur akuntansi diterapkan secara konsisten dan dilaksanakan oleh seluruh fungsi/ kantor cabang.

Direksi bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Penyampaian laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan tepat waktu, untuk dikonsolidasikan oleh induk perusahaan.

PENGENDALIAN OPERASIONAL

Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan pengiriman jasa. Proses bisnis kunci PTK terdiri dari kegiatan pemasaran dan operasi kapal (*Marketing and Operation*), keagenan kapal, *port operation and service* untuk pelabuhan khusus migas.

Prinsip Dasar Pengelolaan Operasional

- Tujuan bisnis perusahaan adalah terus melakukan, menguntungkan, dan ditujukan untuk kelangsungan hidup (*going concern*) Perusahaan.
- Memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jasa yang profesional dan penuh integritas.

Perencanaan Pengelolaan Operasional

- Direktur utama memastikan bahwa tujuan manajemen didefinisikan dalam semua proses kunci.
- Rencana dan pengembangan proses yang diperlukan untuk merealisasikan jasa perusahaan tertuang dalam Rencana Kerja Pendapatan dan Laba Tahunan (RKPL).
- *Management Representative* (MR) dan *Designated Person Ashore* (DPA) berwenang untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan memelihara sistem manajemen.

Pelaksanaan Pengelolaan Operasional

- Melaksanakan operasional perusahaan sesuai RKAP dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas biaya.
- Pemilik proses kunci dan proses owner memimpin pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai

from all functions/branch offices as well as subsidiaries. Finance Director should ensure the accounting policies and procedures are implemented consistently and by all functions/branch offices.

The Board of Directors is responsible in preparing the financial statements, in accordance with the prevailing financial accounting standards in Indonesia. The submission of audited financial statements should be handled in a timely manner in order to be consolidated by the parent company.

OPERATIONAL CONTROL

The Company administers the business activities starting by identifying the needs and ended with service delivery. The key business process of PTK consists of Marketing and Operation, ship agencies, port operation and service for oil and gas special port

Basic Principles of Operational Management

- The business objective of the Company continuously performs, benefits, and is aimed for the Company's going concern.
- Fulfilling the customers' needs with professional service and integrity.

Operational Management Planning

- President Director to ensure the management objectives are defined in all key processes.
- Required process planning and development for company services realization are regulated in Annual Revenues and Profit Budget Plan (RKPL).
- Management Representative (MR) and Designated Person Ashore (DPA) hold the authority to develop, implement, and maintain the management system.

Operational Management Implementation

- Performing company operational in accordance with RKAP by considering cost efficiency and effectivity.
- Owner of key process and owner process are in charge of implementing operational activities to achieve the

tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama.

- Jasa diberikan kepada pelanggan mengacu pada TOR (*Term of Reference*) untuk pekerjaan dalam dokumen kontrak yang telah disepakati.

objectives stipulated and agreed by the President Director.

- Services provided for the customers refer to TOR (Term of Reference) designed for the jobs in the agreed contract.

Pengendalian dan Pelaporan

- Pelaporan realisasi kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh unit/ fungsi yang terkait secara berkala kepada Direksi.
- Semua jasa yang diberikan kepada pelanggan dikaji dan ditinjau. Bila mana ada perubahan persyaratan dalam perjanjian maka perubahan diberitahukan kepada pelanggan dan fungsi yang bersangkutan.

Control And Reporting

- Reporting of the realization of company's operational activities is conducted by related units/functions periodically to the Board of Directors.
- All of the services provided to the customers to be analyzed and reviewed. If there is any change of requirements in the agreement, notification should be made to the customers and functions concerned..

EVALUASI DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal menjaga keamanan harta milik Perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Evaluasi tersebut dilakukan oleh fungsi audit internal untuk memonitoring kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Perusahaan melakukan evaluasi melalui pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi dan Kantor Cabang, untuk segera ditindaklanjuti.

Pengendalian internal dalam hal keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting/ ICOFR*). Pelaksanaan ICOFR sebagai tinjauan (*review*) dalam hal keuangan Perusahaan, telah dilaksanakan Internal Audit selama kurun waktu periode pelaporan. Kesimpulan hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh Control Group, memperlihatkan tingkat kecukupan dan efektivitas ICOFR berada pada tingkat efektif.

Pengendalian internal atas operasional Perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Control Review* (ICR) oleh Internal Audit melalui mekanisme audit

INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION AND EFFECTIVITY

Evaluate the effectiveness of the internal control system to safeguard the security of Company property, examine the accuracy and accuracy of accounting data, encourage efficiency, and help encourage compliance with established management policies. The evaluation is carried out by the internal audit function to monitor the adequacy and effectiveness of internal control. The company evaluates through monitoring of the follow-up results of operational checks and submits the results to the Directors and Branch Offices, for immediate action.

The internal control in finance is realized through an internal supervision mechanism over the financial statements (*Internal Control Over Financial Reporting/ ICOFR*). The implementation of ICOFR as a review in the Company's finance has been conducted by the Internal Audit throughout the reporting period. The conclusion of certification results, developed by Control Group, depicts the ICOFR level of adequacy and effectivity at effective level.

Internal control over the Company's operations is carried out through the Internal Control Review (ICR) mechanism by the Internal Audit through the operational audit



operasional. Hasil tinjauan yang dilakukan selama tahun 2019 memperlihatkan perusahaan telah melaksanakan standar prosedur operasi sesuai praktik-praktik terbaik pengelolaan jasa maritim.

mechanism. The results of the review conducted during 2019 indicated that the Company had implemented standard operating procedures in accordance with maritime services management best practices.

PEMBARUAN TERKAIT PENGENDALIAN INTERNAL

Guna mengefektifkan pelaksanaan sistem pengendalian internal, Perusahaan melakukan pembaruan terkait pengendalian internal yang akan mulai diterapkan pada tahun 2019. Pembaruan tersebut meliputi:

1. Sinergi Internal Audit PT Pertamina (Persero) dengan Anak perusahaan.
2. *Continuous Audit Management System* (CAMS) audit berbasis teknologi.
3. Audit Internal dilakukan berdasarkan Bisnis Proses dan *Risk Management*, sesuai *Audit Annual Program*.

UPDATES RELATED TO INTERNAL CONTROL

In order to have an effective internal control system, the Company carried out updating activities related to the internal control, to which the implementation will commence in 2019. The updates include:

1. Internal Audit Synergy of PT Pertamina (Persero) and Subsidiaries.
2. Technology based audit cams (continuous Audit Management).
3. Internal Audit to be based on Business Process and Risk Management, as per Audit Annual Program.

KODE ETIK CODE OF CONDUCT

Perusahaan senantiasa menjalankan bisnis operasional secara jujur, beretika, berintegritas, dan berupaya melakukan yang terbaik. Untuk mendukung komitmen tersebut, PTK menerapkan kode etik dan etika bisnis yang harus dipatuhi semua pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari pemangku kepentingan, serta menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan. Kode etik merupakan pedoman perilaku profesional seluruh insan perusahaan. Termasuk jajaran manajemen yaitu Dewan Komisaris dan Direksi.

The company always runs the operational business honestly, ethically, with integrity, and strives to do the best. To support this commitment, PTK has prevailed a code of ethics and business ethics (Code of Conduct) that shall be complied to by all parties in the Company. This was done to maintain the trust of stakeholders, and create sustainable performance growth. The code of conduct refers to a code of professional behavior for all employees of the Company, also the management, including the Board of Commissioners and Directors.

POKOK-POKOK DALAM PEDOMAN PERILAKU & ETIKA BISNIS (COC)

Pada tahun 2019, Pedoman Perilaku PTK termaktub dalam Pedoman COC No. A-002/F1000/2019-S0 Revisi ke-00. Pedoman Kode Etik tersebut dimutakhirkan secara berkala sebagai komitmen perusahaan untuk menjaga etika bisnis

CODE OF CONDUCT (COC) PRINCIPALS

In 2019, the PTK Code of Conduct is disclosed in COC Guideline No. A-002 / F1000 / 2019-S0 00 revision. The Code of Conduct is regularly updated as a commitment of the company to maintain a sustainable business ethics.

perusahaan yang berkesinambungan. Pedoman tersebut berlaku bagi:

1. Insan PTK
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PTK.
3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh PTK, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Mitra Kerja yang bekerjasama dengan PTK.

These guidelines apply to:

1. PTK personnel
2. External parties who act for and on behalf of PTK.
3. Subsidiaries and the company structure that follows, namely other legal/business entities controlled by PTK, either directly or indirectly.
4. Business Partners collaborating with PTK.

Secara umum, muatan Kode Etik Perusahaan yang dimiliki PTK adalah sebagai berikut:

In general, contents of the Code of Conducts in PTK are as follows:

Pokok-pokok Pedoman Perilaku Code of Conducts Contents	
Bab Chapter	Uraian Description
Umum General	• Pendahuluan Introduction • Tujuan Objectives • Ruang Lingkup Scope • Pengertian Definition • Referensi Reference
Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan Vision, Mission, and Excellent Values of the Company	• Visi dan Misi Vision and Mission • Tata Nilai Unggulan Perusahaan Company's Excellent Values
Prinsip-prinsip GCG, Perilaku Integritas Insan PTK GCG Principles, High Integrity Personnel of PTK	• Integritas Integrity • Persaingan Usaha Yang Sehat Healthy competition • Sikap Kerja Profesional Professionalism
Persaingan Sehat Fair Competition	• Persaingan Usaha yang Sehat Fair Business Competition • Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Goods/Services Procurement Process • Informasi Penting Significant Information
Kerahasiaan Data dan Transparansi Data Confidentiality and Transparency	• Kerahasiaan Data dan Informasi Data and Information Confidentiality • Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Accounting and Financial Reporting • Pengelolaan Arsip Archival Management
Sikap Profesional Professional Attitude	• Sikap Kerja Profesional Organisasi Profesi • Berani Mengungkapkan Masalah Professional Work Attitude • Pengambilan Keputusan Courage in Disclosing Any Issues • Hak Kekayaan Intelektual Decision Making • Menghindari Diskriminasi Intellectual Property Rights • Kesempatan Karir yang Sama Avoiding Discrimination • Standar Ketenagakerjaan Equal Career Opportunity • Bebas Narkoba dan Minuman Keras Free from Drugs and Alcohol Beverages • Aktivitas Politik Political Activity • Media Massa Mass Media • Organisasi Profesi Organizational Profession



Pokok-pokok Pedoman Perilaku Code of Conducts Contents	
Bab Chapter	Uraian Description
Komitmen Terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya Commitment to Other Stakeholders	- Komitmen Terhadap Pemegang Saham Commitment to Shareholders - Komitmen Terhadap Pekerja Commitment to Employees - Komitmen Terhadap Serikat Pekerja Commitment to Labor Union - Komitmen Terhadap Anak Perusahaan Commitment to Subsidiaries - Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa Commitment to Goods/ Services Provider - Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator - Commitment to Government As a Regulator - Komitmen Terhadap Legislatif Commitment to Legislative - Komitmen Terhadap Investor, Kreditor dan Bank - Commitment to Investor, Creditor, and Bank - Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi - Commitment to Business Partners, Research Institution, and Universities - Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan - Commitment to Health, Safety, Security (HSE), and Environment - Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial - Commitment to Community and Social Responsibility
Whistle Blowing System	- Ruang Lingkup Scope - Struktur Structure - Fungsi Pengelola Management function - Saluran Penyampaian Pelaporan Reporting channel

SOSIALISASI DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Perusahaan memastikan bahwa setiap insan PTK mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik baik di lingkungan dalam maupun di lingkungan luar perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman CoC bagi seluruh insan perusahaan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan *internal event* kepada seluruh pekerja pada segala tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*.

Perusahaan juga terus melakukan penegakan kepatuhan Pedoman Perilaku, yang melibatkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun Direksi serta dukungan seluruh Insan PTK.

- Direksi membentuk tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct* yang bertugas:
 - Melakukan sosialisasi *Code of Conduct* untuk memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan memahami substansi *Code of Conduct*.

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT

The Company ensures that every PTK employee has acknowledged, understood and applied the Code of Conducts inside and outside the company. An initiative to achieve this purpose is through the CoC guidelines socialization for all people of the company. The socialization was carried out by using various media and internal event opportunities to all employees at all levels including the outsourcing personnel.

The Company also continuously uphold the compliance to the Code of Conduct, involving the roles and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as all of the PTK People.

- The Board of Directors established a monitoring team for the implementation and upholding of Code of Conduct with duties as follows:
 - Implement the Code of Conduct socialization to ensure all of the Company's people has understood the contents of Code of Conduct.

- o Mengoordinasikan pembagian buku *Code of Conduct* kepada insan Perusahaan.
- o Mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan pernyataan kepatuhan terhadap *Code of Conduct*.
- Penerapan *Code of Conduct* dilengkapi dengan media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang timbul dan transparansi tindak lanjut atas pelanggaran dalam penerapan *Code of Conduct* tersebut.
- Setiap insan Perusahaan wajib meminta penjelasan kepada atasan langsung jika terdapat ketidak jelasan berperilaku sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- Setiap insan Perusahaan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap *Code of Conduct*, wajib melaporkan kepada tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct*, dan identitasnya akan dirahasiakan.
- Terdapat sanksi yang tegas dan jelas bagi insan Perusahaan yang melanggar *Code of Conduct*.
- Tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct* mengusulkan sanksi disiplin atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan bagian HR & GA.
- Direksi menerapkan sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang perlu dilaksanakan.
- Tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct* melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Setiap insan Perusahaan dapat memberi masukan untuk penyempurnaan *Code of Conduct* kepada Tim pemantau penerapan dan penegakan *Code of Conduct*. Perubahan atau revisi atas *Code of Conduct* dapat ditetapkan dengan pengesahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
- o Coordinate the Code of Conduct book distribution to the Company's people.
- o Coordinate the signing of compliance statement on the Code of Conduct.
- Implement the Code of Conduct along with the communication media to convey the arising issues and follow-up transparency on violations occurred in implementing the Code of Conduct.
- Each personnel of the Company is required to inquire an explanation to the immediate supervisor if there is behavioral obscurity, in accordance with its duties and responsibilities.
- Each personnel of the Company who recognizes any violations to the Code of Conduct should report it to the monitoring team on the implementation and upholding of the Code of Conduct with its identity remains confidential.
- Strict and straight forward sanctions for personnel of the Company who violates the Code of Conduct
- The monitoring team on the implementation and upholding of Code of Conduct proposes mandatory disciplinary sanctions or corrective measures as well as preventions after coordinating with HR & GA division.
- The Board of Directors determines the mandatory disciplinary sanctions and/or corrective measures as well as preventions.
- Monitoring team on the implementation and upholding of Code of Conduct reports its duties to the Board of Directors, and copy the Board of Commissioners in.
- Every personnel of the Company has the capability to give inputs on the Code of Conduct improvement to the Monitoring team on the implementation and upholding of Code of Conduct. Any changes or revisions to the Code of Conduct may be implemented with ratification from the Board of Directors and Board of Commissioners.

Selain mekanisme yang telah diatur tersebut, Perusahaan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala dalam berbagai kesempatan *event* internal ataupun pelatihan *inhouse* untuk memastikan konsistensi implementasi dan konsistensi kesepahaman pekerja dan manajemen terhadap kode etik.

Aside from the regulated mechanism, the Company also carries out socialization and internalization activities periodically in various internal events or in-house training to ensure the consistency of implementation and understanding among the employees and management toward the code of conduct.



PERILAKU INTEGRITAS INSAN PTK

Selain pedoman CoC, PTK juga memiliki pedoman perilaku integritas. Berikut adalah muatan pedoman perilaku integritas insan PTK:

- Insan PTK mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ditugaskan, maupun pada tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perusahaan;
- Insan PTK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan. Insan PTK menghindari situasi di mana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktivitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan PTK;
- Insan PTK tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima dan tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PTK, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan;
- Insan PTK tidak mendukung pemberian uang/ fasilitas/ hadiah atau janji kepada petugas pemerintahan atau lembaga pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perizinan dan lain sebagainya;
- Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di PTK atau yang berkaitan dengan PTK akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang pantas;
- PTK memiliki hubungan baik dengan Pusat Pelaporan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di PTK. Untuk itu, insan PTK tidak mentolerir tindakan pencucian uang yang dilakukan di lingkungan PTK.

INTEGRITY CONDUCT OF PTK PEOPLE

In addition to the CoC guidelines, CAR also has a code of integrity behavior. The following is the content of the PTK employees' integrity behavior guidelines:

- Personnel of PTK comply with the prevailing laws and regulations in areas they are located/assigned in, or on national and international levels, including the Company's internal regulations.
- Personnel of PTK uphold the responsibility in ensuring personal interest outside work does not interfere with its obligations to the Company. The personnel avoids any situations in which the personal interest (direct and indirect), outside activities, or financial interest, conflict or seem to be conflicted with or have the potentials of conflicting with the interest of PTK.
- Personnel of PTK will not be involved in any bribery and/or corruption, either as provider or recipient, and will not offer or receive it if according to the personnel of PTK the action could impact or gives the impression of impacting decision making.
- Personnel of PTK provide no support to provision of money/facilities/reward or promises to government officials or government institutions with the aim of obtaining or extending licenses and others.
- Every fraud, embezzlement, and robbery occurred at PTK or has relations to PTK will be investigated, reported, and after completing sufficient investigation appropriate punishment will be charged.
- Personnel of PTK has good relationship with Center of Financial Transaction Reporting and Analysis to jointly prevent and eradicate money laundering at PTK. Therefore, Personnel of PTK does not tolerate any money laundering in PTK environment.

PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Dalam menjalankan komitmen sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, PTK senantiasa menjaga persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan. PTK berkomitmen untuk memastikan bahwa

FAIR BUSINESS COMPETITION

In carrying out its commitment as a company that upholds the values of GCG, PTK always maintains fair business competition to stakeholders. PTK is committed to ensuring that the Company's business activities are compliant with

kegiatan bisnis Perusahaan patuh pada undang-undang antimonopoli dan persaingan sehat di Indonesia dan peraturan setempat dimana PTK menjalankan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Terkait dengan kegiatan bisnis dan persaingan usaha tersebut, seluruh insan PTK harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat, dan hanya melakukan bentuk praktik bisnis yang adil dan etis. Sehingga apabila dalam kegiatan operasionalnya, insan PTK menghadapi tindakan yang mengarah pada pertentangan prinsip persaingan usaha yang sehat diwajibkan melakukan konsultasi dengan fungsi legal atau hukum perusahaan.

antitrust and fair competition laws in Indonesia and local regulations where PTK operates its business/operations.

With regard to business activities and business competition, all PTK employees must be aware of efforts that lead to unfair business competition, and only engage in fair and ethical business practices. So if in its operational activities, PTK people face actions that lead to a conflict of principles of fair business competition, they are required to consult with the legal or legal functions in the company.

SIKAP KERJA PROFESIONAL

Selain menerapkan pedoman CoC serta pedoman perilaku integritas, insan PTK juga harus membangun sikap profesional yang ditandai dengan sikap-sikap sebagai berikut:

- Dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PTK dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PTK;
- Insan PTK melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab;
- Sesama Insan PTK tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat;
- Insan PTK berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja;
- Insan PTK menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

PROFESSIONAL WORK ATTITUDE

In addition to applying CoC guidelines and integrated behavior guidelines, PTK people shall also develop professional attitudes which are characterized by the following attitudes:

- In interacting with co-workers, Personnel of PTK are required to present mutual trust, sincerity, honesty; and warn each other as well as provide inputs, show strength, able to perform synergy for the achievement of vision and mission of PTK.
- Personnel of PTK performs each work with good intention and full of responsibility.
- Among Personnel of PTK should not pressure or intimidate, humiliate, abuse or provoke, and not cause unfair competition.
- A PTK People shall present discipline behavior, not neglecting any work activities prior to receiving permission from the supervisor, and/or not performing other activities for personal interest or interest of parties outside the Company without permission during the working hours.
- Personnel of PTK keep the confidentiality of documents and information on the Company.



STANDAR ETIKA USAHA

Standar Etika Usaha mengatur etika Perusahaan terhadap para Pemangku Kepentingan, termasuk diantaranya kepada para pekerja, pelanggan, penyedia barang dan jasa (pemasok), kreditur, masyarakat, pesaing, pemerintah, media massa. Penerapan standar etika usaha bertujuan untuk memastikan Perusahaan memenuhi komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Pemenuhan komitmen tersebut tetap dilaksanakan dalam kaidah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BUSINESS ETHIC STANDARDS

Business Ethics Standards regulate the Company's ethics toward Stakeholders, including to the employees, customers, goods and services provider (suppliers), creditors, community, competitors, government, and mass media. The implementation of business ethics standards aim to ensure the Company fulfilling its commitments to the stakeholders. The fulfillment of commitment is consistently performed based on the prevailing laws and regulations.

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan Business Ethics Standards for Stakeholders

Komitmen Terhadap Pemegang Saham Commitment to Shareholders	PTK berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (<i>shareholder value</i>) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku PTK strives to optimally and continuously increase shareholder value, such as level of profit, growth rate, and other interests of the shareholders as per the prevailing laws and regulations
Komitmen Terhadap Pekerja Commitment to Employees	PTK menghargai pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender, dan usia, yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. PTK memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan PTK respects employees as assets of the Company without discriminating race, skin color, religion, ethnicity, physical challenges, gender, and age, as well as those which capacity should be honed through education and training consistently. PTK gives rewards to outstanding employees, and imposes strict sanctions to individuals who are negligent about their duties, or violate the Company's provisions
Komitmen Terhadap Serikat Pekerja Commitment to Labor Union	PTK menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis. PTK places Labor Union as the Company's partner in its endeavors to achieve the Company's objectives for dynamic and harmonious industrial relationship.
Komitmen Terhadap Anak Perusahaan Commitment to Subsidiaries	Hubungan kerjasama dengan anak perusahaan maupun perusahaan patungan (perusahaan afiliasi) ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Cooperative relationship with subsidiaries and joint ventures (affiliations) is aimed to build better synergy and image as well as to increase the Company's performance.
Komitmen Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Commitment to Goods and Services Provider	PTK memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi Perusahaan. PTK melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. PTK menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. PTK maintains good communication with goods/services provider or partners as strategic partners with a role of guaranteeing the availability of goods and services supply required for the Company's operation continuity. PTK performs transparent goods and services procurement as per the prevailing provisions. Moreover, the Company avoids business with goods/services provider or partners which may have conflict of interest with officials and/or the Company that may have an indication of causing corruption, collusion, and nepotism
Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator Commitment to Government as Regulator	PTK mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. PTK mendukung program nasional maupun regional khususnya dibidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. PTK complies with and support laws and regulations related to the Company's operation, including adherence to tax payment, retribution, employment and environment issues. The Company supports national and regional programs, especially in technology, education, social, economy, and culture

Standar Etika Usaha Terhadap Pemangku Kepentingan Business Ethics Standards for Stakeholders

Komitmen Terhadap Legislatif Commitment to Legislative	PTK menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan bagi legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku. PTK memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan. PTK provides relevant information on the Company for legislative by continuously referring to the prevailing provisions. The Company observes and provides response to any inputs from the legislative that may aspire the community interest in accordance with the Company's interest and capability
Komitmen Terhadap Investor, Kreditor, dan Bank Commitment to Investors, Creditors, and Bank	PTK mengupayakan keamanan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor dengan mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal. Perusahaan juga berkomitmen untuk memberikan informasi keadaan perusahaan dengan jujur kepada kreditor dan bank PTK exerts its efforts in security toward investments conducted by investors through optimal investment return. The Company is also committed to provide transparent information on the Company's condition to the creditors and bank
Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi Commitment to Business Partners, Research Facilities, and Universities	PTK melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategis yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. Menjamin akurasi informasi layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis PTK exerts its efforts in security toward investments conducted by investors through optimal investment return. The Company is also committed to provide transparent information on the Company's condition to the creditors and bank
Komitmen terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan Commitment to Health, Safety, Security and Environment (HSSE)	Merupakan tanggung jawab PTK untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PTK dan kontraktor untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera dan wabah penyakit di tempat kerja. PTK akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lindungan lingkungan. PTK menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan. A form of responsibility for PTK in creating a safe and healthy work environment, as well as providing appropriate work equipment and protection for all Personnel of PTK and contractors to prevent accidents, injuries, and infectious diseases in the workplace. PTK will perform its activities by paying attention to environmental protection. Moreover, the Company uses energy and natural resources efficiently as well as strives to prevent pollution toward the environment
Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial Commitment to the Community and Social Responsibility	PTK menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. PTK expects its presence could contribute the utmost benefits to the community residing around the locations in which it performs its business/operational

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Seluruh insan PTK wajib mematuhi Kode Etik. Pelanggaran terhadap Kode Etik, etika bisnis yang berlaku atau undang-undang, akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan akan dikenai tindakan pendisiplinan. Hal ini juga bisa mengakibatkan pemberian hukuman atau sanksi bagi setiap pelanggarnya.

PUNISHMENT FOR CODE OF CONDUCT VIOLATION

All of PTK People shall comply with the Code of Ethics. Violations against the Code of Ethics, prevailing business ethics or the law, will be considered as intolerable behavior and will result in disciplinary punishment. This may also result in the imposition of penalties or sanctions for each violator.



Terkait kepatuhan terhadap kode etik, etika bisnis, dan peraturan yang berlaku, PTK memiliki fungsi pemantau kepatuhan yaitu Chief Compliance Officer (CCO). Sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap pedoman perilaku perusahaan akan ditindaklanjuti oleh CCO, yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan. Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PTK yang terbukti melakukan pelanggaran.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan diberikan sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. Namun, PTK juga menghormati hak membela diri dari Insan PTK yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Pedoman Perilaku sebagai Kode Etik, mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Bahwa di tahun 2019 tidak adanya pelanggaran terhadap kode etik Perusahaan namun pada tahun 2018 ditemukannya pelanggaran aturan perusahaan berupa penyalahgunaan wewenang oleh kru kapal yang keputusan *punishment*-nya dijatuhkan pada tahun 2019.

EVALUASI & REVIEW ATAS PENERAPAN KODE ETIK

Dalam upaya penerapan praktik terbaik tata kelola perusahaan, PTK juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan *Code of Conduct* di perusahaan. Evaluasi tersebut telah dilakukan sosialisasi secara online pada awal tahun 2019 kepada seluruh pekerja PTK sesuai kebutuhan atau dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan bisnis perusahaan.

In terms of compliance with the code of ethics, business ethics, and applicable regulations, CAR has a compliance monitoring function, the Chief Compliance Officer (CCO). Therefore, in the case of violation against the company's code of conduct, it will be followed up by the CCO, which will provide the results of its study to the top management of the Company. The top management (the Board of Directors or the Board of Commissioners) will decide on corrective actions or preventive actions that must be carried out by the direct supervisor of PTK's employees who are proven to have committed violations.

Sanctions to the performed violations are aligned with the provisions in Joint Working Agreement (PKB) and other prevailing provisions at the Company. PTK respects self-defense rights displayed by Personnel of PTK who allegedly perform violations and accept the explanation to be taken as a consideration in determining the form of disciplinary consequences. The sanctions imposed in the violation of Behavior Manual as Code of Conduct starting from written warning, warning letter, salary grade demotion up to work termination.

In 2019, there is no violations against the Company's code of ethics, however, in 2018 a violation against the corporate regulation was found in form of abuse of authority by a vessel crew whose punishment sentence had been charged in 2019.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION EVALUATION & REVIEW

As an initiative to implement corporate governance best practices, CAR also conducts regular monitoring and evaluation of the implementation of the Code of Conduct in the company. The evaluation was conducted online socialization in early 2019 to all of PTK workers as needed or in order to adjust to the development of applicable laws and regulations and the development of the company's business.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) merupakan media untuk menyampaikan informasi terkait perbuatan, perilaku atau kejadian ketidakpatuhan yang dapat berhubungan dengan tindakan *fraud*/kecurangan, pelanggaran hukum dan peraturan, etika perilaku bisnis serta pelanggaran lainnya.

Penerapan WBS di perusahaan telah dilakukan sejak tahun 2014, dengan tujuan menciptakan kegiatan operasional perusahaan yang bersih dan mencegah praktik penyimpangan. Selain itu, WBS PTK merupakan wujud dari komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan praktik terbaik dari tata kelola perusahaan yaitu sebagai dasar memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atas asas kewajaran dan kesetaraan.

Whistleblowing System (WBS) is a channel to submit information related to unlawful action, behavior or events that can be related to fraud, violation against the laws and regulations, Code of Conduct and other violations.

WBS implementation in the Company has been carried out since 2014, with the Purpose to create a clean company operational activities and preventing fraud practice. In addition, in PTK, WBS becomes a manifestation of the Company's commitment in implementing corporate governance best practices, which is the basis to concern interests of stakeholders based on fairness and equality principles.

RUANG LINGKUP WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penerapan WBS di perusahaan adalah berdasarkan Keputusan Direksi No. Psd 015/ F1000/2016-S0 (Revisi ke 00). WBS merupakan sistem yang mengelola pengaduan/penyimpangan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PTK dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan PTK.

Peranan penerapan WBS PTK terkait fungsi pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- Membuka praktik-praktik kecurangan karena adanya pengabaian internal control yang ada.
- Memberikan informasi penyimpangan substantif walaupun *internal control* yang ada tidak dilanggar.
- Memberikan informasi atas kelemahan-kelemahan *internal control* yang ada/tidak adanya *internal control*.

WBS IMPLEMENTATION SCOPE

The implementation of WBS or Whistleblowing System is stipulated based on the Board of Directors Decision Number Psd 015/F1000/2016-S0 (Revision 00). WBS is a system that manages report/disclosure on any behaviors against the law, unethical/inappropriate confidentially, anonymously, and independently used for optimizing the role, as well as personnel of PTK and business partners in disclosing violations occurred in the environment of PTK.

In general, WBS implementation holds three significant roles in Internal Control Function:

- Exposing fraud practices due to neglecting the existing internal control.
- Providing information on substantive deviation even though there is no violation of internal control.
- Providing information over weaknesses of current internal control/no internal control.



Sedangkan lingkup pengaduan/penyingkapan dalam WBS meliputi korupsi, suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, melanggar hukum dan peraturan perusahaan. Namun, lingkup pelaporan tidak termasuk permasalahan yang terkait K3LL, SDM dan fasilitas perusahaan. Berikut uraian lingkup paparan yang ditindaklanjuti oleh WBS PTK:

Meanwhile, scope of the complaints/disclosures in WBS including corruption, bribery, conflict of interest, theft, fraud, violation of laws and corporate regulations. However, the scope of reporting does not include issues related to OHSE, HR and Company's facilities. Description of the scope of the processed report by WBS in PTK is as follows:

Lingkup Laporan ditindaklanjuti oleh WBS Scope of Report Followed up by WBS	
Bentuk Pelanggaran Hukum Forms of Legal Violation	Uraian Description
Korupsi Corruption	Adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PTK, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan perusahaan Actions that are committed fraudulently or against the law by the Board of Commissioners, Directors, Management, and Employees who work for and on behalf of PTK, against the interest of the Company or abuse of authority/trust entrusted to the individual with the purpose of enriching one self, or other people, or corporate that may bring loss to the company
Suap Bribery	Adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi Any actions committed by an individual in the form of bribe money/bribery/giving money or promises that are given or received in any form to someone who has influence or has relations with its position, aiming to satisfy personal or corporate interest
Pencurian Theft	Adalah mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Actions of taking something, as a whole or partially that belongs to other people or the company with the intention of owning it by violating the law
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Adalah sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadinya A situation in which an individual is confronted with different interests, between personal or the company's interest causing the individual to choose and prioritize the company's interest over his or her personal interest
Kecurangan Fraud	Adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain Dishonest or deceitful actions, including fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/reports or use false documents, conducted by an individual/a group of people that may cause potential loss or any real losses toward the company or other people

STRUKTUR PENGELOLA

Pihak-pihak pengelola pelaporan pelanggaran telah diatur sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani setiap pengaduan laporan pelanggaran. WBS dibentuk secara khusus oleh Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan Etika Perilaku Bisnis, termasuk melakukan kajian terhadap laporan *Whistleblowing* di Perusahaan, termasuk di dalamnya menerima, mengidentifikasi, menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait pelaporan ketidakpatuhan dan/atau *Whistleblowing*.

Pihak-pihak pengelola pelaporan pelanggaran telah diatur sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani setiap pengaduan laporan pelanggaran.

- Direktur Utama dan Direksi lainnya
- *Chief Compliance Officer* (CCO)
- Pejabat Berwenang Terkait
- Dewan Komisaris
- Pelapor
- Terlapor
- Tim WBS
- Tim Investigasi

MANAGEMENT STRUCTURE

The whistleblowing managing party has been arranged according to their duties and responsibilities in handling each complaint of violation report. WBS was formed specifically by the Company to ensure the implementation of Business Conduct Ethics, including to perform a review upon Whistleblowing reports in the Company, including receiving, identifying, following up and providing recommendations to management regarding non-compliance reporting and/or Whistleblowing.

The management of violation reporting has been arranged according to their duties and responsibilities in handling each complaint of violation report.

- President Directors and other Directors
- Chief Compliance Officer (CCO)
- Related Authorities
- Board of Commissioners
- The Whistleblower
- The Offender
- WBS team
- Investigation team

Fungsi Pengelola *Whistleblowing System*

Fungsi atau tugas pengelola WBS perusahaan adalah sebagai berikut:

- Memfasilitasi mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran untuk segera ditangani;
- Memfasilitasi mekanisme deteksi dini untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran;
- Mendorong seluruh pekerja berani melaporkan terjadinya tindakan pelanggaran tanpa takut diketahui identitasnya;
- Meminimalkan risiko keuangan dan risiko non keuangan dalam menangani tindak pelanggaran;
- Mengidentifikasi kelemahan sistem kontrol internal untuk dilakukan perbaikan.

WBS Manager Function

The functions or tasks of a company WBS manager are as follows:

- Facilitating the mechanism for submitting reports of alleged violations to be addressed immediately;
- Facilitating early detection mechanisms to minimize the occurrence of violations;
- Encouraging all employees to report violations without fear of being identified;
- Minimizing financial risks and non-financial risks in handling violations;
- Identify weaknesses in the internal control system for improvement.

PRINSIP PELAPORAN PELANGGARAN WBS REPORTING PRINCIPLES

Prinsip Pelaporan WBS Wbs Reporting Principles	
Rahasia Secrecy	Prinsip ini mencakup: 1. Perlindungan terhadap identitas pelapor; 2. Perlindungan terhadap pelaksana investigasi dan pelapor; 3. Hanya pihak-pihak terbatas/ tertentu yang mengetahui; 4. Penerapan azas praduga tidak bersalah. This principle includes: 1. Protection against the identity of the reporter; 2. Protection against executor and investigator reporter; 3. Only limited parties/certain who knows; 4. Application of the principle of presumption not guilty.
Anonim Anonymity	Prinsip ini mencakup menjamin adanya kemungkinan untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor. Hal tersebut memberikan jaminan rasa aman kepada pelapor. This principle includes guaranteeing the possibility for not reveal identity reporter. That gives guarantee of security to reporter.
Independen Independent	1. WBS PT Pertamina Trans Kontinental dikelola secara profesional; 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti hanya yang memenuhi kriteria; 3. Tidak dimungkinkan untuk terjadinya intervensi terhadap laporan. 1. WBS PT Pertamina Trans Kontinental is managed professionally; 2. Complaints that are followed up are only those that meet the criteria; 3. It is not possible to intervene in the report.

PENYAMPAIAN PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

PTK menyediakan beberapa saluran untuk penyampaian pelaporan pelanggaran.

WHISTLEBLOWING SYSTEM REPORTING SUBMISSION

PTK provides several channels to submit whistleblowing reports

Saluran Pelaporan WBS PT Pertamina Trans Kontinental PT Pertamina Trans Kontinental WBS Channel



Telepon
(+62 21) 3149715



SMS
+62 812 1989 1000



Fax
(+62 21) 3903437



Web
www.ptk-shipping.com



Email
ptkclean@ptk-shipping.com



PTKCLEAN
PO BOX 1945 JKP 10019

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

Mekanisme penyaluran pengaduan/penyingkapan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait. Bila Pelapor memandang sarana pengaduan/ penyingkapan tidak efektif atau ada keraguan, Pelapor dapat menyalurkan pengaduan/penyingkapan melalui WBS.

Prosedur WBS adalah sebagai berikut:

- Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada pengelola WBS melalui sarana/media yang telah ditentukan.
- Tim WBS menerima pengaduan penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan.
 - b. Laporan penyingkapan (*disclosure report*).
- Memasukkan Laporan penyingkapan ke dalam e-Room yang hanya dapat diakses oleh Tim WBS dan Chief Compliance Officer.
- Tim WBS menyampaikan laporan penyingkapan (*disclosure report*) kepada *Chief Compliance Officer*/ Dewan Komisaris/Direktur Utama (sesuai kategori Terlapor).
- Tim WBS melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan tersebut dan membuat resumennya. Kemudian mempresentasikan kepada *Chief Executive Officer*. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, *Chief Compliance Officer* memutuskan tindak lanjut :
 - a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - b. Bekerja sama dengan eksternal Investigator jika substansi pengaduan/ penyingkapan terkait dengan citra/reputasi PTK dan/atau menimbulkan kerugian besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti Internal Audit.
 - c. Bekerja sama dengan Internal Audit dan/atau Sekuriti sesuai substansi.
 - d. Pengaduan/penyingkapan dilakukan Tim WBS atas justifikasi dan penunjukan dari *Chief Compliance Officer*.

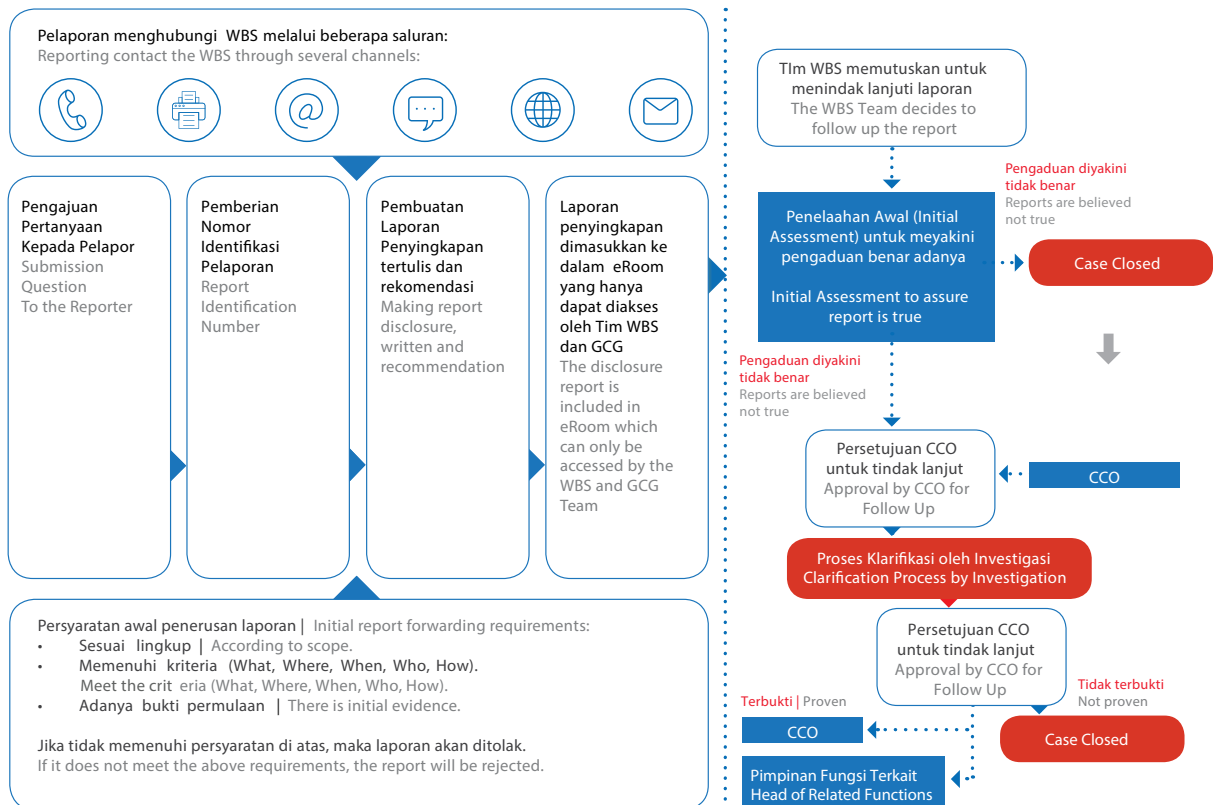
WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

The mechanism of report/disclosure flow by the whistleblower is basically conducted through formal channel, namely direct supervisor, directorate and related functions. If the Whistleblower views the report/ disclosure facility is ineffective or causes doubts, the Whistleblower could submit the report/disclosure through WBS.

The WBS procedure is as follows:

- Whistleblower establishes a report/disclosure and submits it to WBS manager through the determined means/media.
- WBS Team receives the report/disclosure, records, and prepares it in a standard format, generating:
 - a. Contact acceptance report in accordance with the scope of report category.
 - b. Disclosure report.
- Transferring the disclosure report into e-Room that could only be accessed by WBS Team and Chief Compliance Officer.
- WBS Team submits the disclosure report to Chief Compliance Officer/Board of Commissioners/ President Director (in accordance with the Offender category).
- WBS Team performs initial analysis/clarification on the report and develops si resumé. Afterward it is to be presented to Chief Executive Officer. Based on the presentation results, Chief Compliance Officer decides the follow up:
 - a. Suspended, if it does not meet the requirements of initial indication
 - b. Cooperating with an external investigator if the substance of report/disclosure is related to PTK image/reputation and/or may cause huge loss and/ or has never been followed up by Internal Audit.
 - c. Cooperating with Internal Audit and/or Security in accordance with the substance.
 - d. Report/disclosure is conducted by WBS Team on the justifications and appointment from Chief Compliance Officer.

- Tim Investasi melakukan investigasi dan memaparkan hasilnya kepada *Chief Compliance Officer*.
- Berdasarkan hasil presentasi tersebut, *Chief Compliance Officer* memutuskan.
- Investigation Team carries out an investigation and describes the results to Chief Compliance Officer.
- Based on the presentation results, Chief Compliance Officer makes a decision.



PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN

Apabila ada laporan yang masuk ke dalam *Whistleblowing System* akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi yang tegas dan konsisten jika terbukti bersalah, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran maupun pihak lain yang memiliki niat melakukan pelanggaran. Terkait penanganan pelaporan pelanggaran telah tertuang dalam mekanisme *Whistleblowing System*.

VIOLATION REPORT PROCESSING

If there is any report submitted through the *Whistleblowing System*, the report will be followed up with the strict and consistent punishment if proven guilty, thereby will give a deterrent effect for violators or other parties who have the intention to commit violations. With regards to the violation report processing, the procedure has been disclosed in the *Whistleblowing System* mechanism.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor sebagai *whistleblower* yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme WBS. Perlindungan tersebut untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan laporan pelanggaran serta identitas Pelapor. Perlindungan bagi Pelapor memiliki manfaat atas kepastian perlakuan terhadap Pelapor dan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor, akan menimbulkan rasa percaya bagi internal dan/atau pihak eksternal yang akan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Pengelola WBS dan meningkatkan kesadaran internal terhadap peraturan dan kebijakan Perusahaan.

Pengelola WBS dilarang mengungkapkan identitas Pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola WBS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis. Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi kriteria, yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/valid (setelah dilakukan verifikasi oleh Pengelola WBS). Kriteria perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi, dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

Selain itu, PTK juga memberikan perlindungan kepada terlapor, sebab Perusahaan juga mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam rangka melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan.

JUMLAH PENGADUAN PELANGGARAN

Sepanjang tahun 2019 terdapat 1 pelaporan pelanggaran dari eksternal maupun internal melalui WBS. Setiap pelaporan pelanggaran ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER

The Company provides protection for the Whistleblower. Such protection means to guarantee the confidentiality of whistleblowing report as well as the identity of Whistleblower. Protection for the Whistleblower has the benefit over certain treatment to the Whistleblower and guarantee on the Whistleblower identity confidentiality, leading to trust in the internal and/or external parties which will submit fraud indication report to the WBS Manager and increase internal awareness to the Company's regulations and policies.

The WBS Manager is prohibited to disclose the identity of Whistleblower. If in fact the Whistleblower identity needs to be disclosed or revealed as required by laws and court process or to take appropriate action, the WBS Manager is required to firstly ask permission from the Whistleblower in written. Protection for the Whistleblower takes effect if the whistleblowing report meets the criteria, of which the reported information and/or fraud has occurred and could be trusted/valid (after verification by WBS Manager). The protection criteria for the Whistleblower must be fulfilled in order to avoid false, slander, fabricated reports or those that of no good intention.

In addition, PTK also provides protection to the offenders as the Company also prioritizes confidentiality, the presumption of innocence and professionalism principles in the implementation of follow-up process for every report.

TOTAL VIOLATION REPORT

In 2019, there is 1 from external and internal submitted via WBS. Every violation report is followed up through the prevailing mechanism.



Laporan Pelaksanaan WBS WBS Implementation Report			
Status Laporan Report Status	Jumlah Laporan Total Report		
	2019	2018	2017
Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti Processed reports	1	1	0
Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti Unprocessed reports	0	0	0
Jumlah pengaduan/pelaporan Total WBS report	1	1	0

SOSIALISASI DAN EVALUASI

Pada tahun 2019, Perusahaan melakukan sosialisasi WBS melalui media wallpaper yang ada di dalam desktop seluruh pekerja dan seluruh pekerja dapat menyalurkan pengaduan melalui WBS.

SOCIALIZATION AND EVALUATION

In 2019, the Company will disseminate WBS through wallpaper media that is on the desktops of all workers and all workers can channel complaints through WBS.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Perusahaan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif. Hal tersebut tercantum pada Tata Kerja Organisasi Pengelolaan WBS No. B-008/F1000/2019-S0 Juni 2019.

VIOLATION PUNISHMENT

The Company apply the punishment according to the prevailing regulations, if proven and related to administrative actions. This provision is stated in the WBS Management Organization Procedure No. B-008/F1000/2019-S0 June 2019.

PERMASALAHAN HUKUM LEGAL CASE

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Selama tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki perkara penting terkait permasalahan hukum dengan pihak-pihak baik yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasi bisnis PTK.

LEGAL ISSUES INVOLVING THE COMPANY

In 2019, the Company did not involve in any litigation related to legal issues with parties both those who have direct or indirect relation with the business operations of PTK.

PERMASALAHAN HUKUM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama tahun 2019, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina Trans Kontinental yang sedang menjabat.

LEGAL ISSUES INVOLVING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

In 2019, there was no litigation involving the currently serving members of the Board of Commissioners and Directors of Pertamina Trans Kontinental.

SANKSI REGULATOR

Selama tahun 2019, PTK tidak menerima sanksi dalam bentuk apapun dari lembaga maupun regulator.

REGULATORY SANCTIONS

In 2019, PTK did not receive any form of sanctions from institutions or regulators.

KEPATUHAN TERHADAP PAJAK

Selama tahun 2019, PTK telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pembayaran pajak tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

TAX COMPLIANCE

In 2019, PTK has carried out tax payments and payments obligations on time in accordance with the prevailing tax regulations.

AKSES INFORMASI PERUSAHAAN CORPORATE INFORMATION ACCESS

Sebagai bentuk perwujudan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi, PTK membuka akses informasi bagi investor dan para pemangku kepentingan. PTK menyediakan akses informasi perusahaan melalui media, antara lain kantor korespondensi, *email*, *website*, portal internal perusahaan, dan media lainnya.

As manifestation of transparency principle and compliance with laws and regulations related to information disclosure, PTK provides a transparent information access for the investors and stakeholders. PTK provides a corporate information access through various media, including correspondence offices, e-mail, websites, company internal portals, and other media.

Alamat Kantor Korespondensi

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Telp : (+6221) 31923005
Fax : (+6221) 3106804
E-mail : ptkpusat@ptk-shipping.com
Website : www.ptk-shipping.com

Correspondence Office Address

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450
Telp : (+6221) 31923005
Fax : (+6221) 3106804
E-mail : ptkpusat@ptk-shipping.com
Website : www.ptk-shipping.com

KETERBUKAAN DALAM KOMUNIKASI INTERNAL

Komunikasi internal merupakan sarana komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, baik menyampaikan maupun menerima, dan terbentuknya hubungan timbal balik antar pihak internal dalam

DISCLOSURE IN INTERNAL COMMUNICATION

Internal communication is a means of communication carried out to disseminate information, both conveying and receiving, and the establishment of reciprocal relationships between internal parties in the organization.



organisasi. Oleh karena itu, PTK senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada pekerja melalui berbagai media komunikasi.

PTK memiliki media internal berupa aplikasi PRIDE. Aplikasi tersebut merupakan sarana penyampaian berita perusahaan hingga pengumuman terkait perusahaan. Selain itu, komunikasi internal di perusahaan juga dibangun dalam aktivitas-aktivitas operasional seperti *meeting* internal, *townhall meeting*, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi internal dalam bentuk selain aktivitas operasional melalui kegiatan *employee gathering/family gathering*.

Therefore, PTK always creates two-way communication to employees through various communication media

PTK has an internal media in form of a PRIDE application. The application is a channel to disseminate corporate news to until other announcement related to the Company. In addition, internal communication in the company is also built in operational activities such as internal meetings, townhall meetings, and others. Whereas internal communication in the form of other than operational activities through employee gathering/family gathering.

KETERBUKAAN DALAM KOMUNIKASI EKSTERNAL

Komunikasi eksternal merupakan bentuk transparansi kepada pihak eksternal. Komunikasi eksternal dengan para pemangku kepentingan senantiasa dijaga agar tercipta hubungan timbal balik antara Perusahaan dan pemangku kepentingan. Selain itu komunikasi eksternal juga sebagai bentuk kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator.

Rapat Umum Pemegang Saham & Paparan Publik

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum bagi pemegang saham dalam memutuskan arah Perusahaan serta forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada para pemegang saham.

Laporan Tahunan

PTK rutin menerbitkan laporan tahunan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada tahun buku tersebut. Laporan tahunan didistribusikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan.

DISCLOSURE IN EXTERNAL COMMUNICATION

External communication is a means of transparency to external parties. External communication with stakeholders is always maintained in order to create a reciprocal relationship between the Company and stakeholders. In addition, external communication is also a form of obligation to fulfill the disclosure of information as stipulated by the regulator.

General Meeting of Shareholders & Public Expose

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a forum where the shareholders decide the direction of the Company and a forum for the Board of Commissioners and Board of Directors to report and being responsible upon their duty implementation and performance to shareholders.

Annual report

PTK regularly publishes annual report that presents information about the company's performance during the fiscal year. The annual report is distributed to shareholders and stakeholders.

Siaran Pers

Sebagai bentuk informasi kepada pemangku kepentingan dalam bentuk berita. Sepanjang tahun 2019, PTK telah melakukan siaran pers untuk beberapa berita mengenai informasi positif perusahaan.

Situs Web

PTK menyediakan layanan akses informasi dan data perusahaan melalui situs web perusahaan di alamat www.ptk-shipping.com. Informasi terkait perusahaan yang dimuat pada situs web perusahaan.

Siaran Pers

As a manifestation of information to stakeholders in form of news. Throughout 2019, PTK has distributed press releases regarding some news about positive Company's information.

Website

PTK provides corporate information and data access through the official website at www.ptk-shipping.com. Information related to the Company are also presented on the official website.

HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PTK berupaya menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan guna menjaga keberlangsungan usaha perusahaan. Sebab pemangku kepentingan merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.

PTK melakukan hubungan dan komunikasi dengan seluruh stakeholdernya melalui kegiatan CSR, *vendor day*, publikasi berita melalui *website*, publikasi melalui sosial media, penerbitan bulletin cetak dan e-buletin dan siaran pers di media online serta publikasi berita melalui media cetak yang memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan antara kepatuhan aturan yang berlaku dengan kinerja perusahaan.

Dalam upaya menjaga komunikasi yang baik kepada pihak *stakeholder*, selama tahun 2019 telah melakukan berbagai rangkaian aktivitas yang dijelaskan dibawah ini:

RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

PTK strives to maintain good relations and communication with stakeholders in order to maintain the sustainability of the company's business. Because stakeholders are parties who have interests both directly and indirectly to the Company.

PTK engages and communicates with all of stakeholders through CSR activities, vendor days, news publications through websites, publications through social media, publishing bulletins and e-bulletins and press releases in online media and news publications through print media. who has the responsibility to integrate compliance with applicable rules and company performance.

In an effort to maintain good communication with stakeholders, various activities throughout 2019 have been described as follows:

Aktivitas Investor Relations Investor Relations Activities

No	Aktivitas Activity	Frekuensi Frequency
1.	CSR	28 kegiatan tahun 2019 28 Activities in 2019
2.	Vendor day	1 kali pertahun Once a Year
3.	Publikasi berita News Publication	Setiap bulan Monthly



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN CSR

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kesadaran perusahaan dalam upaya mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan pekerja, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

CSR COMMITMENT AND POLICY

Corporate social responsibility is a manifestation of the Company's awareness as the initiative to take responsibility on impact of our operations to the social, economic, and environmental dimensions, respect for human rights, the obligation to provide a comfortable place and a harmonious industrial relation with the employees, prioritize the maintenance of occupational health and safety and continuously ensure that these impacts contribute to the community and the environment.

Program CSR Pertamina Transkontinental dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan budaya masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan kesehatan, dan pendidikan. Sasaran kegiatan CSR kami adalah masyarakat sekitar, pekerja, dan pelanggan. Disamping itu, Pertamina Trans Kontinental juga berupaya merealisasikan program tanggung jawab sosial dalam penerapan hak asasi manusia dan pengelolaan operasi yang adil dalam kegiatan operasional perusahaan.

Kami percaya bahwa dengan melakukan kegiatan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi melainkan juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akan menjadikan pembangunan terus berkelanjutan serta akan menjamin usaha perusahaan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR PTK merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial.

- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pertamina Trans Kontinental CSR Program is carried out in various initiatives focusing on sustainable environmental management, social and cultural development of the society, improving the quality of health management, and education. Targets of our CSR activities include the surrounding community, employees and customers. In addition, Pertamina Trans Kontinental also strives to realize social responsibility programs in the implementation of human rights and equitable management of operations in the company's operational activities.

We believe that running the business activities that are not merely oriented towards economic aspects but also concerns the generated social and environmental impacts that will encourage a sustainable development and guarantee the company's business going concern.

CSR implementation in PTK refers to the laws and regulations concerning the social responsibility implementation.

- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
- Law No. 25 of 2007 concerning Investment
- Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management
- Law Number 13 of 2011 concerning Handling of the Poor
- Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Limited Corporate Social and Environmental Responsibility

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Lingkup tanggung jawab sosial Pertamina Trans Kontinental meliputi enam aspek yaitu: menjadi: (1) Tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan operasi yang adil; (2) Tanggung jawab sosial terhadap Hak Asasi Manusia; (3) Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan; (4) Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat; (5) Tanggung jawab sosial terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja; (6) Tanggung jawab sosial terhadap pelanggan.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Scope of social responsibility of Pertamina Trans Kontinental covers six aspects, such as: (1) Social responsibility on fair management of operations; (2) Social responsibility for human rights; (3) social responsibility to the environment; (4) social responsibility to the community; (5) Social responsibility for Occupational Health, Safety and Employment; (6) Social responsibility tot the customers.



ISU DAN STRATEGI PERUSAHAAN TERKAIT SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Pertamina Trans Kontinental menyoroti empat isu utama keberlanjutan terkait yaitu Pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kesehatan. Isu-isu tersebut kami pandang sangat krusial dan mendesak untuk dilaksanakan dalam program CSR PTK tahun 2019. Fokus perhatian PTK terhadap empat isu tersebut sejalan dengan program pemerintah serta arahan induk perusahaan, Pertamina (Persero).

CORPORATE ISSUES AND STRATEGY REGARDING SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL

Pertamina Trans Kontinental emphasizes on four issues related to sustainability, including Education, the environment, public economy development and health. We consider these issues crucial and urgent to be implemented in the PTK CSR program in 2019. The focus of PTK's attention to these four issues is in line with the government's program and the direction of PT Pertamina (Persero) as our parent company.

DUE DILIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Pertamina Trans Kontinental melakukan social mapping untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna menyusun program CSR agar tepat sasaran. Mapping tersebut meliputi letak geografis, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan lingkungan. Pada tahun 2019 due diligence dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan independen.

DUE DILIGENCE ON SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

Pertamina Trans Kontinental has conducted social mapping to determine the requirements to formulate CSR programs to be effective. The mapping includes geographical location, population, economic community, education, health, public facilities, and the environment. In 2019, the due diligence was carried out in collaboration with independent consultants.

RUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Rumusan CSR Pertamina Trans Kontinental mengacu kepada arahan dari induk perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero). Arahan induk perusahaan tersebut mengemban misi Pemerintah untuk menciptakan SDM yang unggul agar Indonesia maju serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari kerangka tersebut, maka Pertamina Trans Kontinental menyusun rumusan program pelaksanaan.

FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Formulation of CSR in Pertamina Trans Kontinental refers to the directives of the parent company, PT Pertamina (Persero). The directives of the parent company carry out the Government's mission to create superior human resources thereby Indonesia will progress and to improve economy of the society. From this framework, Pertamina Trans Kontinental has formulated the implementation program.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perencanaan CSR disusun mengacu kepada arahan induk perusahaan yang kemudian dituangkan dalam kebijakan Direksi Pertamina Trans Kontinental.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING

The CSR planning is prepared based on direction from the parent company as outlined in the Pertamina Trans Kontinental Board of Directors policy.

JUMLAH ANGGARAN BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perusahaan juga telah memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesuai dengan amanah undang-undang. Selama tahun 2019 Perusahaan telah merealisasikan anggaran Rp1,25 miliar untuk pembiayaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Total realisasi anggaran CSR selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TOTAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BUDGET OF

The company has also fulfilled the Social and Environmental Responsibility (TJSL) as mandated by the law. In 2019, the Company has realized a budget of Rp 1.25 billion to finance corporate social responsibility (CSR) programs. The total CSR budget realization in 2019 is as follows:

Realisasi Anggaran CSR Tahun 2019 CSR budget realization in 2019		
NO	PROGRAM CSR CSR Program	ANGGARAN (Rp) Budget (Rp)
1	Pendidikan Education	281.161.640
2	Lingkungan Environment	76.147.000
3	Sosial Masyarakat Social Community	216.302.400
4	Kesehatan Health	292.027.700
5	Infrastruktur Infrastructure	36.700.000
6	Pemberdayaan Ekonomi Economic Empowerment	350.300.000
Jumlah Total		1.252.638.740

EVALUASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Evaluasi atas kebijakan perusahaan di bidang CSR dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan CSR yang disampaikan kepada induk perusahaan dan Direksi Perusahaan. Selain itu monitoring pelaksanaan CSR dilakukan setiap tiga bulan sampai enam bulan untuk memantau efektifitas pelaksanaan di lapangan.

EVALUATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

Evaluation of company policies in the field of CSR is carried out in the form of compiling reports on CSR activities that are submitted to the parent company and Directors of the Company. Besides monitoring the implementation of CSR conducted every three months to six months to monitor the effectiveness of implementation in the field.

PENGUKURAN DAMPAK PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pengukuran dampak pelaksanaan CSR dilakukan dengan memonitor perubahan yang terjadi di target program yang dilaksanakan. Pengukuran ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana program CSR sudah berjalan sesuai perencanaan.

MEASUREMENT OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPACT

Measurement of the impact of the implementation of CSR is done by monitoring changes that occur in the target program implemented. This measurement is carried out to observe extent to which the CSR program has been implemented as planned.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

SOCIAL RESPONSIBILITY IN FAIR OPERATIONS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PTK berkomitmen untuk menerapkan pengembangan usaha dengan mengedepankan prinsip operasi yang adil. PTK tunduk dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Antikorupsi

Sejalan dengan semangat pemerintah Indonesia memberantas korupsi, PTK memiliki komitmen serupa. Komitmen itu tak terpisahkan dengan implemementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan pelanggan, vendor dan Pemegang Saham.

Untuk itu, berupaya untuk menutup pintu-pintu yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan, termasuk kemungkinan terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan. Komitmen menutup peluang terjadinya korupsi berlaku bagi seluruh pekerja PTK tanpa terkecuali.

Kebijakan PTK tentang anti korupsi mengharuskan semua pekerja untuk mengisi form gratifikasi setiap bulannya. form ini juga mengharuskan semua pekerja untuk bertindak jujur dan menghindari memberi maupun menerima hadiah atau penyuapan.

Pengadaan Barang dan Jasa Yang Transparan

PTK memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menjadi mitra dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, PTK menetapkan persyaratan tertentu untuk menjadi mitra/vendor.

Setiap perusahaan yang ingin menjadi mitra/vendor PTK harus terlebih dahulu mendaftarkan sebagai vendor PTK. Hal ini dimaksudkan agar PTK dapat memastikan keberadaan dan legalitas persyaratan administratif vendor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

COMMITMENT AND POLICY

PTK is committed to implement business development by promoting fair operating principle. PTK is a subject and comply to every prevailing laws and regulations.

Anticorruption

In line with the spirit of the Indonesian government in eradicating corruption, PTK has a similar commitment. This commitment is inseparable from the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG), the aim of which is to increase the trust of customers, vendors and shareholders.

Therefore, it seeks to close the doors that open up opportunities for abuse of office, including the possibility of the practice of gratuity and bribery. Commitment to close the opportunity for corruption applies to all PTK employees without exception.

PTK's anti-corruption policy requires all employees to submit gratification forms every month. This form also requires all employees to act honestly and avoid giving or receiving gifts or bribes

Transparent Goods and Services Procurement

PTK provides equal opportunities for all parties to become partners in the process of procurement of goods and services. However, PTK has implemented certain requirements to become a partner/vendor.

Every company that wants to become a TOD partner/vendor must first register as a PTK's vendor. This is intended thereby PTK can ensure the existence and legality of vendor administrative requirements in accordance with prevailing law and regulations.

RENCANA KEGIATAN

Kami mencanangkan program antikorupsi yang dilaksanakan melalui dua kegiatan yang mendukung terciptanya kondusifitas iklim bisnis. Pertama adalah kegiatan sosialisasi gratifikasi kepada seluruh pekerja. Berikutnya kegiatan pengisian form gratifikasi yang dilakukan oleh semua pekerja setiap bulan.

Guna mencegah praktik korupsi, Pertamina Trans Kontinental juga melaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan. Hal ini ditempuh dengan pengadaan barang dan jasa melalui tender. Sejalan dengan hal tersebut kami elakukan penilaian kinerja terhadap vendor.

ACTIVITY PLAN

We have launched an anticorruption program which has been carried out through two activities that support the creation of a conducive business climate. The first is gratification socialization activities for all workers. Next is the activity of filling out the gratification form which is done by all workers every month.

To prevent corrupt practices, Pertamina Trans Kontinental also implements transparent procurement of goods and services mechanisms. This is done by procuring goods and services through tenders. In line with this we have conducted a vendor performance assessment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PENERAPAN HAM

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Komitmen perusahaan terhadap Hak Azasi Manusia menjadi bagian dalam penerapan nilai-nilai dan budaya perusahaan serta termaktub dalam Pedoman Perilaku Perusahaan.

COMMITMENT AND POLICY

Human rights are basic rights for every human being. The company's commitment to human rights is part of the implementation of the corporate values and culture and is included in the Code of Conduct.

RUMUSAN DAN RENCANA KEGIATAN

Rumusan praktik hak asasi manusia telah dituangkan dalam dokumen Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) yang memuat etika individu dan etika bisnis. Dokumen ini telah mengatur tata hubungan antar individu untuk saling menjaga, menghormati, serta menghargai hak-hak sesama insan PTK. Diantaranya adalah bahwa Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh

FORMULATION AND ACTIVITY PLAN

The formulation of human rights practices has been stated in the Code of Conduct, which contains individual ethics and business ethics. This document has regulated the relationship between individuals to look after each other, respect and respect the rights of other PTK people. Among them is that the Company provides equal opportunities to the entire community to be able to work according to their



masyarakat untuk bisa bekerja sesuai kapasitas dan kemampuan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, ras, agama, dan gender.

capacity and ability without being limited by ethnic, racial, religious, and gender differences.

Kode etik ini telah disosialisasikan kepada seluruh insan Perseoran baik melalui penyebaran dokumen via website maupun pertemuan-pertemuan dan *sharing session*.

This code of conduct has been disseminated to all employees through the distribution of documents via the website as well as meetings and sharing sessions

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PTK menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tugas dan tanggung jawab bersama warga dunia, termasuk bagi PTK. Sekecil apapun tindakan dan kebijakan yang berdampak positif bagi lingkungan, hal itu harus diwujudkan. Kepedulian serupa itu harus ditumbuhkan karena kerusakan lingkungan bumi kian memburuk dari waktu ke waktu.

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, PTK memberikan dukungan dan komitmen untuk menjaga kelestarian bumi melalui berbagai kebijakan dan dalam melakukan kegiatan usahanya PTK berkomitmen untuk mendukung program pelestarian lingkungan. Dengan upaya itu, maka PTK ikut berperan untuk mengurangi dampak negatif kerusakan lingkungan bumi bagi manusia, sekaligus bermanfaat bagi generasi mendatang agar bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di bumi. Keberlanjutan kehidupan di bumi akan menjadi berkah pula bagi keberlanjutan perusahaan.

COMMITMENT AND POLICY

PTK realizes that environment protection becomes a shared obligation and responsibility among the global citizens, including PTK. No matter how small the actions and policies that have a positive impact on the environment, it must be realized. Such concern must be fostered because the damage to the earth's environment is getting worse over time.

As a responsible corporation, PTK provides support and commitment to preserve the earth through various policies and in conducting its business activities PTK is committed to supporting environmental conservation programs. With this effort, PTK will play a role in reducing the negative impact of damage to the earth's environment for humans, while at the same time benefiting future generations to enjoy a better life on earth. Sustainability of life on earth will also be a blessing for corporate sustainability.

RUMUSAN DAN RENCANA KEGIATAN

Pertamina Trans Kontinental memiliki rencana mitigasi dalam mengendalikan limbah buang baik air, dan udara yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Untuk

FORMULATION AND ACTION PLAN

Pertamina Trans Kontinental has a mitigation plan in controlling waste water, and air that has the potential to pollute the surrounding environment. For the company,

Perusahaan menggandeng lembaga independen untuk bekerjasama dalam melakukan monitoring limbah buang. Proses monitoring dilakukan setiap bulan dan terbagi atas dua periode dalam laporan tahunan yakni laporan tiap semester. Adapun uji yang dilakukan monitoring adalah 7 jenis uji, yakni uji udara ambien, udara lingkungan kerja, kebisingan luar, kebisingan dalam, cahaya, udara emisi genset, dan air limbah domestik.

collaborating with an independent institution to cooperate in monitoring waste disposal. The monitoring process is carried out every month and is divided into two periods in the annual report which is the report every semester. The monitoring tests are 7 types of tests, including the ambient air, work environment air, external noise, internal noise, light, air emission generator, and domestic waste water.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN CAPAIANNYA

Sepanjang tahun 2019 kegiatan di bidang pelestarian lingkungan mencakup program kampung hijau berupa penanaman sayur-sayuran di Desa Randakari, Ciwandan, Cilegon, Anyer, Banten. Selain itu adalah kegiatan pengelolaan sampah di Medan, Jambi, dan Makassar.

ACTIVITIES CARRIED OUT AND THEIR ACHIEVEMENTS

Throughout 2019, the activities in the environmental conservation aspect are including green village program in form of vegetables planting in the of Randakari village, Ciwandan, Cilegon, Anyer, Banten. In addition, waste management activities are also conducted in Medan, Jambi and Makassar.

LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pertamina Trans Kontinental menjalankan usaha di bidang perkapalan, kepelabuhanan, dan logistik, di mana seluruh rangkaian kegiatan operasional tidak memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan hidup. Produk dan jasa kami bukanlah industri yang mengeluarkan limbah sehingga tidak berpotensi terhadap pencemaran lingkungan.

SCOPE OF THE COMPANY'S IMPACT TO THE ENVIRONMENT

Pertamina Trans Kontinental operates business in the shipping, port and logistics sectors, where the entire operational activities does not generate any negative impact to the environment. Our products and services are not industries generating waste thereby not causing any potential environmental pollution.

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi konflik terkait lingkungan hidup sebagai akibat dari operasi bisnis Pertamina Trans Kontinental. Karena itu manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik lingkungan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

CONFLICT MANAGEMENT MECHANISMS REGARDING THE ENVIRONMENT

In 2019, there is no conflicts related to the environment as a result of Pertamina Trans Continental business operations. Therefore management does not carry out handling environmental conflicts with any parties who feel disadvantaged or affected.



DUE DILIGENCE TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan *due diligence* dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga independent dan perguruan tinggi (Universitas Indonesia) yang tertuang dalam laporan monitoring hasil uji di udara, kebisingan, cahaya, udara emisi genset, dan air limbah domestik yang masih sesuai dengan kategori NaB (Nilai ambang batas). PTK juga berkomitmen untuk terlibat langsung dalam program CSR yang terkait dengan isu lingkungan yaitu bencana alam, dan bank sampah.

DUE DILIGENCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING THE ENVIRONMENT

The due diligence activity was carried out in collaboration with independent institutions and universities (Universitas Indonesia) as contained in the monitoring report on the results of tests on air, noise, light, air emissions of generators, and domestic wastewater that still fit the NaB category (threshold value). PTK is also committed to be directly involved in CSR programs related to environmental issues, namely natural disasters and waste banks.

ANGGARAN BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sepanjang tahun 2019, PTK telah mengeluarkan dana untuk melakukan program pelestarian lingkungan hidup dengan rincian sebagai berikut:

BUDGET OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT

Throughout 2019, PTK has allocated the budget to execute environmental conservation programs with details, as follows:

Biaya CSR Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup Tahun 2019 Budget of CSR in Environmental Protection of 2019	
Program/ Kegiatan Program/Activities	Realisasi Dana CSR CSR Fund Realization
Bencana Alam Natural disaster	2.647.000
Bank sampah + monitoring evaluasi Bank waste + evaluation monitoring	73.500.000
Jumlah Total	76.147.000

SERTIFIKASI

Pertamina Trans Kontinental telah memperoleh sertifikasi monitoring lingkungan sudah tercatat dan terakreditasi dalam Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. : LHP.KHT.1907.1330 tentang Laporan Hasil Pengujian tanggal 11 Juli 2019, dan No. : LHP.KHT.1912.3560 tentang Laporan Hasil Pengujian tanggal 16 Desember 2019.

CERTIFICATION

Pertamina Trans Kontinental has obtained environmental monitoring certification that has been registered and accredited by the National Accreditation Committee (KAN) No. : LHP.KHT.1907.1330 concerning Test Results Report on July 11, 2019, and No. : LHP.KHT.1912.3560 concerning Test Results Report on December 16, 2019.

PENGADUAN TERKAIT PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2019 Pertamina Trans Kontinental tidak memperoleh pengaduan terkait lingkungan hidup dari pihak-pihak yang merasakan dirugikan sebagai akibat dari operasi bisnis kami. Meskipun demikian, praktik usaha

COMPLAINTS REGARDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Throughout 2019 Pertamina Trans Kontinental did not receive environmental complaints from parties who felt disadvantaged as a result of our business operations. Nevertheless, the Pertamina Trans Continental business

Pertamina Trans Kontinental senantiasa tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku baik terkait operasi bisnis maupun yang mengatur masalah lingkungan hidup.

practices have complied to the prevailing laws both in business operations and provisions that regulate environmental issues.

DAMPAK KUALITATIF KEGIATAN

Berbagai kegiatan dan program pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan selama ini telah ikut memberikan pengaruh terhadap terjaganya kelestarian lingkungan. Program penanaman sayuran yang dilaksanakan di Banten, telah ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan program bank sampah yang dijalankan oleh Perusahaan kami secara kuantitatif telah ikut mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat di Medan, Jambi, dan Makassar.

QUALITATIVE IMPACT OF THE ACTIVITIES

Various environmental management activities and programs that have been carried out so far have contributed to the preservation of environmental sustainability. Vegetable planting program carried out in Banten, has contributed to improve the welfare of the community. While the waste bank program run by our company quantitatively has contributed to the creation of a clean and healthy environment in Medan, Jambi and Makassar.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT

SOCIAL RESPONSIBILITY TO THE COMMUNITY

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

PTK berkomitmen memberikan manfaat positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Komitmen tersebut direalisasikan dengan menyelenggarakan program-program yang berdampak baik dan positif terhadap masyarakat. Program dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

COMMITMENT AND POLICY

PTK is committed to contribute positive and sustainable benefits for all stakeholders, especially the communities around the company's operational areas. This commitment is realized by arranging several programs that have a positive and positive impact on society. The program is carried out continuously to realize participation and support from the community while also improving the quality of life of the community.

RUMUSAN DAN RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan disusun sebagaimana tertuang dalam program sosial kemasyarakatan adalah meliputi: bantuan panti asuhan, bantuan anak yatim, kegiatan buka puasa bersama, kegiatan pemuda dan olah raga, bantuan sembako, dan bantuan keagamaan.

FORMULATION AND ACTION PLAN

The activities that are planned and arranged as disclosed in the social community program which includes: assistance for orphanages, assistance for orphans, breaking fasting together, youth and sports activities, food assistance, and religious assistance.



PTK Peduli korban Banjir Sentani
PTK Cares for Sentani Flood Victims

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN CAPAIANNYA

Dalam pelaksanaannya, PTK menerapkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam beberapa aspek program, yaitu pendidikan, lingkungan, sosial masyarakat, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan dana langsung (donasi), kegiatan, pembangunan infrastruktur, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

ACTIVITIES IMPLEMENTATION AND ACHIEVED

In its implementation, PTK has implemented social and environmental responsibility programs in several aspects, such as education, environment, social society, health, infrastructure, and empowerment. The form of assistance provided in form of direct funds (donations), activities, infrastructure development, and adjusted to the needs.

Bidang Sector	Kegiatan Activity
Pendidikan Education	Bantuan dana kegiatan maupun program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, namun tidak terbatas pada lembaga pendidikan formal, non-formal, serta kepada tenaga pendidik, dan lain-lain. Donation for activities and programs with purpose to improve the quality of education in Indonesia, but are not limited to formal, non-formal educational institutions, as well as to teaching staff, and others.
Sosial masyarakat Social Community	Kegiatan kepemudaan, keagamaan, bantuan anak yatim, dan lain-lain. Youth, religious activities, charity for orphans, and others.
Kesehatan Health	Pengobatan gratis, donor darah, pelatihan tenaga kesehatan. Free medication, blood donation, training of medical workers.
Infrastruktur Infrastructure	Pembangunan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan infrastruktur fasilitas umum. Construction, maintenance, maintenance and improvement of public facilities infrastructure.
Pemberdayaan Empowerment	Pelatihan dan kemitraan kewirausahaan. Entrepreneurship training and partnership

LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN TERKAIT ISU SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan dilaksanakan melalui Program PKBL yang ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan sosial masyarakat. Program telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan Pendidikan.

SCOPE OF INFLUENCE ON SOCIAL AND COMMUNITY ISSUES

Social community development activities are carried out through the PKBL Program with the purpose to increasing the economic activities of small businesses and community social empowerment. The program has had a positive impact on improving the community's economy and improving the quality of life through health and education.

MEKANISME PELIBATAN STAKEHOLDERS

Mekanisme pelibatan stakeholder dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang kemasyarakatan diuraikan dalam skema sebagai berikut:

MECHANISMS FOR INVOLVING STAKEHOLDERS

The mechanism for stakeholder involvement in the implementation of social responsibility in the community sector is described in the following table:

No	Aktifitas Activities	Keterlibatan Stakeholder Stakeholder Involvement	Keterangan Description
1	Pendidikan Education	Kantor pusat Head Office	Kebijakan Policy
		Kantor Cabang Branch office	Koordinasi dan pelaksanaan Coordination and implementation
		Perguruan tinggi College	Mitra pelaksana Implementing partner
		Masyarakat di lokasi Community on site	Penerima manfaat Benefit recipients
		Instansi Pemerintah Government agencies	Koordinasi Coordination
2	Kesehatan Health	Kantor pusat Head Office	Kebijakan Policy
		Kantor Cabang Branch office	Koordinasi dan pelaksanaan Coordination and implementation
		Perguruan tinggi College	Mitra pelaksana Implementing partner
		RS Pertamedika Pertamedika Hospital	Fasilitator The facilitator
		Masyarakat Public	Penerima manfaat Benefit recipients
3	Pemberdayaan Empowerment	Kantor pusat Head Office	Kebijakan Policy
		Kantor Cabang Branch office	Koordinasi dan pelaksanaan Coordination and implementation
		Perguruan tinggi College	Mitra pelaksana Implementing partner
		Masyarakat di lokasi Masyarakat di Lokasi	Penerima manfaat Benefit recipients
		Instansi Pemerintah Government agencies	Koordinasi Coordination
4	Fasilitas Umum dan Bencana Alam Social Facility and Natural Disaster	Kantor pusat Head Office	Kebijakan Policy
		Kantor Cabang Branch office	Koordinasi dan pelaksanaan Coordination and implementation
		Perguruan tinggi College	Mitra pelaksana Implementing partner
		Masyarakat Public	Penerima manfaat Benefit recipients
		Instansi Pemerintah Government agencies	Koordinasi Coordination

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi konflik antara Pertamina Trans Kontinental dengan masyarakat sebagai akibat dari operasi bisnis Pertamina Trans. Karena itu manajemen tidak melaksanakan penanganan konflik sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak mana pun yang merasa dirugikan atau terkena dampak.

CONFLICT MANAGEMENT MECHANISM

In 2019, there is no conflicts between Pertamina Trans Kontinental and the community caused by the operation of Pertamina Trans Kontinental. Therefore management does not carry out handling social conflict with any parties who feel disadvantaged or affected.



DUE DILIGENCE TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pertamina Trans Kontinental melakukan *social mapping* untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna menyusun program CSR agar tepat sasaran. Mapping tersebut meliputi letak geografis, jumlah penduduk, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan lingkungan. Pada tahun 2019 *due diligence* dilaksanakan bekerjasama dengan konsultan independen.

DUE DILIGENCE ON SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING SOCIAL COMMUNITY

Pertamina Trans Kontinental has conducted social mapping to determine the requirements to design CSR programs to be effective. The mapping includes geographical location, population, economic community, education, health, public facilities, and the environment. In 2019, the due diligence was carried out in collaboration with independent consultants.

EVALUASI REGULASI TERKAIT SOSIAL KEMASYARAKATAN

Evaluasi atas kebijakan perusahaan di bidang CSR dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan kegiatan CSR yang disampaikan kepada induk perusahaan dan Direksi Perusahaan. Selain itu monitoring pelaksanaan CSR dilakukan setiap tiga bulan sampai enam bulan untuk memantau efektifitas pelaksanaan di lapangan.

EVALUATION OF REGULATIONS RELATED TO SOCIAL COMMUNITY

Evaluation of company policies in CSR field is carried out in the form of compiling reports on CSR activities that are submitted to the company induk and Directors of the Company. Moreover, monitoring over the CSR implementation is also carried out every three months to six months to monitor the effectiveness of implementation in the field.

ANGGARAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEMASYARAKATAN

Hingga akhir Desember 2019, Penyaluran dana program tanggung jawab sosial kemasyarakatan PTK dengan total biaya Rp216.302.400,- Berikut adalah rincian kegiatan dan anggaran biaya tanggung jawab sosial kemasyarakatan PTK:

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITY BUDGET

As end of December 2019, the distribution of PTK's social responsibility program funds with a total budget of Rp216.302.400,- The a breakdown of the activities and budget of PTK's social responsibility responsibilities is as follows:

Biaya CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2019 CSR Budget in the Social Sector in 2019			
No	Program / Kegiatan Program / Activities	Triwulan Quarterly	Realisasi Dana CSR (Rp) Realization of CSR Funds (Rp)
1	Bantuan Panti Asuhan/ Penyandang Cacat Orphanage/Disability Donation	Dua Two	39.000.000
2	Bantuan Anak Yatim Buka Puasa Pertamina Charity for Orphans in Pertamina Break the Fasting event	Dua Two	100.000.000
3	Bantuan Anak Yatim HUT PTK Donation for orphans in PTK Anniversary event	Dua Two	26.000.000
4	Bantuan Perayaan HUT RI Donation for Republic of Indonesia's Independence Day	Dua Two	750.000

Biaya CSR Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2019 CSR Budget in the Social Sector in 2019

No	Program / Kegiatan Program / Activities	Triwulan Quarterly	Realisasi Dana CSR (Rp) Realization of CSR Funds (Rp)
5	Kegiatan Pemuda & Olah Raga Youth & Sports Activities	Dua Two	750.000
6	Bantuan Sembako Food assistance	Dua Two	750.000
7	Bantuan Hari Raya Untuk Sosial Masyarakat Holiday Aid for Social Community	Dua Two	900.000
8	Qurban Sacrificial Meat Donation	Tiga Three	45.000.000
Total			216.302.400

DAMPAK KUALITATIF KEGIATAN

Terciptakan hubungan yang baik antara masyarakat yang berada di lingkungan bisnis Perusahaan dengan Pertamina Trans Kontinental, serta citra yang positif bahwa Perseroan memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

QUALITATIVE IMPACT OF ACTIVITIES

Build a good relationship among the people in the Company's business circumstances with Pertamina Trans Kontinental, as well as a positive image that the Company has concern and concern for the interests of the community and the environment.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT K3 SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HSSE

KOMITMEN

Sebagai salah satu komitmen perusahaan dalam pengelolaan K3 adalah untuk menjamin terciptanya kondisi kerja yang kondusif, aman, dan sehat. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya melakukan langkah dan strategi yang tepat dalam menciptakan iklim kerja yang diharapkan serta menurunkan risiko di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

COMMITMENT

As one of the company's commitments in HSSE management is to guarantee establishment of conducive, safe and healthy working conditions. Therefore, the Company continues to strive to take appropriate measures and strategies in creating the expected work climate and reducing the occupational health and safety risk.

RUMUSAN DAN RENCANA KEGIATAN

Perusahaan dalam menerapkan HSSE diwujudkan melalui penyelenggaraan setiap aktivitas pekerjaan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja, pelanggan dan masyarakat di sekitar Perusahaan

FORMULATION AND PLAN OF ACTIVITIES

In implementing HSSE, the Company conducts implementation of each work activity by prioritizing the safety and health of the workers, customers and the community around the Company activities and protection



berkegiatan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Komitmen tersebut dicapai dengan memberlakukan kebijakan HSSE:

- Memberikan prioritas pertama untuk aspek HSSE;
- Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengurangi risiko serendah mungkin untuk mencegah terjadinya insiden;
- Menekankan kepada seluruh pekerja untuk mematuhi semua peraturan perundangan dan ketentuan HSSE;
- Meningkatkan secara berkelanjutan sistem pengelolaan HSSE;
- Mensyaratkan kontraktor untuk menerapkan CSMS dalam menjalankan kegiatan di lingkungan perusahaan;
- Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pekerja agar melakukan pekerjaannya dengan benar dan aman;
- Membina hubungan baik, penuh pengertian antara kegiatan operasional perusahaan dengan masyarakat sekitarnya;
- Mencegah dan menanggulangi terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan melalui upaya pembinaan dan pengintegrasian aspek K3LL dalam bisnis.

Dalam menjalankan bisnisnya PTK mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam mengikuti tender, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat suatu pekerjaan serta meminimalisasi kerugian yang timbul akibat dari terjadinya kecelakaan pada manusia, aset dan lingkungan.

KEGIATAN DAN CAPAIANNYA

Dalam kegiatan operasionalnya, PTK memegang prinsip kehati-hatian dan pentingnya keselamatan serta kesehatan pekerja. Pada tahun 2019, PTK melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja di bidang HSSE.

LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN DALAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Kehadiran Pertamina Trans Kontinental telah memberikan pengaruh dan dampak positif di bidang ketenagakerjaan dengan turut serta memberikan kesempatan bagi

of the environment. This commitment is achieved by implementing the HSSE policy:

- Giving first priority to the HSSE aspect;
- Identifying potential dangers and reducing the risks as low as possible to prevent the occurrence of incidents;
- Emphasizing to all employees to comply with all prevailing regulatory laws and stipulations of HSSE;
- Sustainably improving the HSSE management system;
- Requiring contractors to implement CSMS in performing activities in the company's environment;
- Increasing employee awareness and competence to perform their work correctly and safely;
- Cultivating good and understanding relations between company operations and the surrounding community;
- Preventing and mitigating the occurrence of accidents, occupational diseases, and environmental pollution through efforts of HSSE aspect development and integration in the Company's business.

In performing its business, PTK prioritizes the HSSE aspect as one of the key requirements in tender participation, prevents the occurrence of work accidents, environmental pollution, and occupational diseases, as well as minimizes loss due to accidents in humans, assets, and the environment.

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS

In its operations, PTK holds the principle of prudence and the importance of employee safety and health. In 2019, PTK implemented a training program and employee competency development in the HSSE field.

SCOPE OF COMPANY INFLUENCE IN THE FIELD OF LABOR

The presence of Pertamina Trans Kontinental has had a positive influence and impact in the field of manpower by participating in providing opportunities for the broadest

masyarakat seluas-luasnya untuk bekerja sesuai kapasitas dan persyaratan yang kerja yang berlaku. Sepanjang sejarahnya, perusahaan ini telah ikut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut menikmati manfaat ekonomi melalui remunerasi yang mereka terima sebagai pekerja. Saat ini Pertamina Trans Kontinental mempekerjakan pekerja sebanyak 668 orang.

MEKANISME PENANGANAN KONFLIK TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2019 tidak terjadi konflik ketenagakerjaan atau masalah hubungan industrial. Namun demikian, kami memiliki mekanisme penanganan dan mitigasi apabila terjadi konflik. Kepentingan pekerja dalam hubungan industrial terwakili oleh organisasi Serikat Pekerja PTK. Melalui organisasi ini, maka semua permasalahan ketenagakerjaan dimusyawarkan dengan mengacu kepada Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB).

DUE DILIGENCE TERKAIT PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN

Manajemen melakukan kajian atas berbagai permasalahan dan isu yang berkembang terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2019 kami menemukan permasalahan terkait struktur organisasi yang belum align dengan perkembangan bisnis perusahaan. Terkait hal tersebut kami melakukan rencana mitigasi dengan menunjuk konsultan untuk menyusun proses bisnis secara menyeluruh. Selain itu juga melakukan *accountability mapping matrix*.

EVALUASI REGULASI TERKAIT KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2019 manajemen melaksanakan evaluasi kebijakan tentang remunerasi mengenai kenaikan upah dengan mengubah struktur upah berdasarkan golongan menjadi Pertamina *Reference Level* (PRL). PRL adalah struktur kelompok nilai jabatan yang berlaku di perusahaan yang merujuk pada konsep dan praktik umum internasional yang disebut dengan *Hay Reference Level* (HRL).

community to work in accordance with the applicable work capacity and requirements. Throughout the history of Pertamina trans Kontinental, this company has helped provide opportunities for the community to enjoy economic benefits through the remuneration they receive as employees. Recently, Pertamina Trans Kontinental is supported by 668 employees.

LABOR-RELATED CONFLICT MANAGEMENT MECHANISMS

In 2019 there will be no labor conflict or industrial relations issues. However, we have a mechanism for handling and mitigating in the event of a conflict. Employees' interests in industrial relations are represented by the PTK Trade Union organization. Through this organization, all labor issues are discussed by referring to the Collaborative Cooperation Agreement (PKB).

DUE DILIGENCE RELATED TO LABOR PROBLEMS

Management conducts studies on various issues and issues that arise related to employment. In 2019 we discovered problems related to organizational structures that were not aligned with the company's business development. Regarding this issue, we have implemented a mitigation plan with the appointment of a consultant to develop a comprehensive business process. In addition, the Company has also formulated an *accountability mapping matrix*.

EVALUATION OF REGULATIONS RELATED TO EMPLOYMENT

In 2019, the management has carried out a policy evaluation on remuneration regarding wage increases by changing the wage structure based on class to the Pertamina Reference Level (PRL). PRL is the structure of the position value groups that apply to companies that refer to general international concepts and practices known as the *Hay Reference Level* (HRL).

PENGHARGAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Program Penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian sebagai berikut:

EMPLOYMENT AWARDS

The Awarding Program reflects acknowledgment and expression of gratitude to workers based on the designated criteria for their dedication and achievements. The Company gives the Service Anniversary (UTD) award with several levels as follows:

No	Masa Kerja Term of service	Lencana/Peniti Badge / Safety Pin	Uang Penghargaan Award Money
1	10 Tahun Years	2,5 gram emas murni pure gold	0,5 x Basic Salary
2	15 tahun Years	5,0 gram emas murni pure gold	1,0 x Basic Salary
3	20 Tahun Years	7,5 gram emas murni pure gold	1,5 x Basic Salary
4	25 Tahun Years	10,0 gram emas murni pure gold	2,0 x Basic Salary
5	30 tahun Years	12,5 gram emas murni pure gold	2,5 x Basic Salary
6	35 Tahun Years	15,0 gram emas murni pure gold	3,0 x Basic Salary

MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

PTK berkomitmen senantiasa memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penerapan system manajemen terpadu dan praktik Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment/HSSE*) secara konsisten. Tahun 2019, Perusahaan mempertahankan *zero fatality* dengan jumlah jam kerja yang terus meningkat. Namun demikian masih ada kasus *Loss Tim Injury* (LTI) dan *Total Recordable Incident* (TRI) yang masih terjadi selama tiga tahun terakhir dengan kecenderungan lebih baik pada tahun 2019 dimana hanya ada satu kasus TRI yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2019.

OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, SECURITY AND ENVIRONMENT

PTK is committed to always concern health, safety and security of workers as the our most valuable assets. This commitment is manifested in the implementation of an integrated Occupational health, safety, security and (HSSE) program consistently. In 2019, the Company maintains zero fatality with the number of working hours that continues to increase. However, there are still some Injury Team Loss (LTI) and Total Recordable Incident (TRI) cases which still occurred during the last three years with an improving trend in 2019 where only one case of TRI occurred on December 31, 2019.

Kebijakan

PTK menjiwai dan melaksanakan secara sungguh-sungguh nilai-nilai unggul 6C (*Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial, Capable*) untuk setiap keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan strategis Perusahaan, kami berkomitmen untuk mengembangkan,

Policy

PTK has whole-heartedly implemented the 6C (Clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial, Capable) excellent values for every taken decision and action. To achieve objectives of the Company's vision and mission objectives, we are committed to develop, implement, evaluate and drive continuous improvements

menerapkan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Pengamanan, dan Lindungan Lingkungan yang meliputi:

1. Mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku di semua wilayah dimana Perusahaan beroperasi;
2. Mengidentifikasi semua potensi bahaya dan kerugian serta mengkaji risiko untuk menetapkan prioritas dan menyusun langkah pencegahan dan mitigasi yang diperlukan;
3. Menetapkan tujuan, target dan program kerja untuk mencapai kinerja unggul dalam menghasilkan produk dan jasa, mencegah cedera dan sakit akibat kerja, memproteksi keamanan personil dan aset, mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi, keandalan dan keutuhan aset;
4. Membangun dan memelihara sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjalankan program kerja yang ditetapkan guna mencapai tujuan & target;
5. Mengkaji dan menerapkan pilihan teknologi terkini sebagai penunjang pelaksanaan proses bisnis Perusahaan;
6. Mengembangkan dan memelihara sistem tata kerja yang terstandarisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar dan kode internasional serta praktik-praktik industri terbaik yang telah diakui dan relevan;
7. Mengembangkan dan memelihara rencana dan prosedur tanggap darurat, manajemen krisis & pemulihan keberlangsungan bisnis yang diuji secara berkala untuk menjamin kesiapsiagaan dan efektivitasnya melalui program pelatihan dan latihan dengan skenario yang kredibel untuk meminimalkan potensi kerugian yang ditimbulkan;
8. Memastikan semua insiden dan ketidaksesuaian dilaporkan, diinvestigasi, dianalisis, dan dilakukan tindakan perbaikan untuk ditindaklanjuti secara efektif serta dikomunikasikan sebagai pembelajaran;
9. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen Perusahaan melalui proses audit yang terstruktur, independen dan kredibel sebagai bahan pertimbangan dalam tinjauan ulang manajemen untuk perbaikan yang berkesinambungan.

on Quality Management, Occupational Health & Safety, Security and Environmental Protection System continuously which includes:

1. Comply with all prevailing laws and regulations in all areas in the Company's operational area;
2. Identify all potential hazards and losses as well as assessing risks to set priorities and develop necessary prevention and mitigation measures;
3. Set goals, targets and work programs to achieve superior performance in producing products and services, prevent work injuries and illness, protect the security of personnel and assets, prevent environmental pollution and improve the efficiency, reliability and integrity of assets;
4. Build and maintain competent human resources and have a high concern to carry out the work program that is set to achieve goals & targets;
5. Review and implement the latest means of technology to support the implementation of the Company's business processes;
6. Develop and maintain a standardized work system that refers to the prevailing laws and regulations, international standards and codes as well as industry practices that are recognized and relevant;
7. Develop and maintain plans and procedures for emergency response, crisis management & business continuity recovery that are periodically tested to ensure their preparedness and effectiveness through training and training programs with credible scenarios to minimize potential losses incurred;
8. Ensure that all incidents and non-conformities are reported, investigated, analyzed and corrective actions taken to be followed up effectively and communicated as learning;
9. Evaluate the effectiveness of the implementation of the Company's management system through a structured, independent and credible audit process for consideration in management reviews for continuous improvement.



Sesuai dengan Visi, Misi dan Kebijakan QHSSE di atas, dalam menjalankan bisnisnya PTK mengedepankan aspek HSSE sebagai salah satu persyaratan utama dalam setiap fase pelaksanaan pekerjaan guna mencegah terjadinya insiden serta meminimalisasi kerugian yang timbul terhadap manusia, lingkungan dan aset serta reputasi Perusahaan.

Strategi HSSE

Sesuai dengan Visi, Misi, Tata Nilai dan Kebijakan QHSSE yang dimiliki, PTK melakukan pengelolaan QHSSE dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencegah semua potensi insiden dan melakukan mitigasi terhadap dampak dari insiden tersebut. Adapun strategi yang dibangun dan dikembangkan serta dilaksanakan adalah sebagaimana berikut ini:

- Mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen terpadu QHSSE yang kuat, ringkas, komprehensif dan efektif dengan turunan program dan sistem tata kelola (STK) sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan;
- Mengembangkan sistem digitalisasi (aplikasi komputer) untuk pengelolaan data HSSE untuk mendukung dalam pengambilan keputusan-keputusan penting Perusahaan dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen terpadu QHSSE;
- Membangun budaya kerja HSSE yang terbuka dengan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap keterlibatan aktif setiap insan PTK dalam upaya-upaya pencegahan dan pelaporan insiden di tempat kerja;
- Membangun kepemimpinan dalam QHSSE yang kuat dengan komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan sistem manajemen terpadu dan program QHSSE dengan peran aktif setiap Pimpinan menjadi teladan (*role model*) dalam penerapan aspek HSSE di tempat kerja.

Empat strategi tersebut menjadi landasan utama setiap insan PTK dalam bertindak untuk mencapai nihil insiden dan kinerja unggul dalam bidang QHSSE.

In accordance with the Vision, Mission and QHSSE Policy above, in conducting its business, PTK prioritizes the HSSE aspect as one of the main requirements in each phase of work implementation to prevent incidents and minimize losses arising from people, the environment and assets and the Company's reputation.

HSSE Strategy

In accordance with its Vision, Mission, Values and QHSSE Policies, PTK has implemented QHSSE management with a risk management approach to prevent all potential incidents and mitigate the impact of such incidents. The strategies developed and developed and implemented are as follows:

- Developing and implementing a strong, concise, comprehensive and effective QHSSE integrated management system with derivative programs and governance systems (STK) as a guide for implementation in the field;
- Develop a digitization system (computer application) for HSSE data management to support the decision making of important Company decisions and increase the effectiveness of the implementation of the QHSSE integrated management system;
- Build a transparent HSSE work culture by giving appreciation and appreciation for the active involvement of every CAR person in efforts to prevent and report incidents in the workplace;
- Build strong QHSSE leadership with a high commitment to support the implementation of an integrated management system and the QHSSE program with the active role of each leader being a role model in the HSSE implementation at the workplace.

The four strategies have become main foundation for every PTK's employee in behaving to achieve zero incidents and superior performance in the QHSSE aspect.

Kegiatan dan Capaiannya

Dalam kegiatan operasionalnya, PTK memegang prinsip kehati-hatian dan pentingnya keselamatan serta kesehatan pekerja. Pada tahun 2019, PTK melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi pekerja di bidang HSSE.

Berikut adalah realisasi pelatihan HSSE dalam kurun waktu 3 tahun:

Activities and Achievements

In its operations, PTK upholds the prudent principle and the priority of employee safety and health. In 2019, PTK has implemented a training program and employee competency development in the HSSE field

The HSSE training realization in 3 years is as follows:

Kinerja HSE HSE Performance			
Keterangan Description	2017	2018	2019
Fatalities	0	0	0
Lost Time Incident	0	2	0
Restricted Work Days Cases	0	0	0
Medical Treatment Cases	0	0	1
Environmental Damage > 15 barrel	0	-	-
First Aid Cases	0	0	0
Property Damage	0	-	-
Near Misses/ HIPO	5	19	59
Unsafe Act & Condition	111	193	560
Man Hours	5.333.160	5.905.976	6.271.064
LTIR	0	0,338	0

Kinerja HSE PTK selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik dengan *zero fatality*. Namun demikian masih terdapat catatan dalam kinerja tahun 2018 dimana ditemukan 2 (dua) kasus LTI (*lost time incident*) yaitu pada kapal Transko Aries dan kapal Transko Bima.

Untuk meningkatkan kinerja menyeluruh HSE, untuk tahun 2020 PTK merencanakan program yang akan diterapkan secara konsisten sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi dan *awareness* serta kemampuan organisasi dalam bidang HSE melalui pelatihan QHSSE untuk semua insan PTK mulai level Direksi hingga Asisten. Pelatihan ini akan mencakup visi, misi dan kebijakan QHSSE, sistem manajemen QHSSE, perangkat bantu untuk implementasi sistem manajemen QHSSE, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja aman. Untuk peningkatan siapan dan kemampuan dalam melakukan penanggulangan insiden dan krisis, PTK juga akan membangun pusat manajemen krisis dan komando insiden, dan

PTK HSE performance for the last 3 (three) years showed good performance with zero fatality. However, there are still records in 2018 performance where 2 (two) cases of LTI (*lost time incident*) were found, namely on the Aries Transko and the Bima Transko.

To improve HSE's overall performance, for 2020 PTK plans a program that will be consistently implemented as follows:

- Increased competence and awareness and organizational capability in the HSE field through QHSSE training for all PTK people from the Directors to Assistant levels. This training will cover the vision, mission and QHSSE policies, the QHSSE management system, tools to implement the QHSSE management system, duties and responsibilities as well as safe work procedures. To improve the preparedness and ability to handle incidents and crises, PTK will also establish a crisis management center and incident command,



melakukan pelatihan (*training*) serta latihan (*exercise/drill*) untuk Tim Manajemen Krisis dan Tim Manajemen Insiden termasuk Tim Taktis Penanggulangan Keadaan Darurat;

- Peningkatan tata kelola organisasi untuk memudahkan komunikasi dan peran serta aktif setiap elemen di PTK dengan melakukan refitalisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Safety Committee*) untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kapal;
- Peningkatan proses bisnis dan budaya QHSSE melalui program, *Positive Reinforcement & Just Culture; Human Performance Improvement, Lean Sigma, Housekeeping (5S/5R) & Kaizen*, serta program penghargaan dan apresiasi (*Recognition & Award*)

Berbagai program kerja QHSSE tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari sistem manajemen terpadu QHSSE yang telah dikembangkan oleh PTK dan sejalan dengan standar nasional dan internasional yang berlaku antara lain SMK3, ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, ISM Code dan ISPS Code serta standar internasional lainnya.

Melalui penerapan berbagai program QHSSE, PTK dapat memaksimalkan upaya-upaya pencegahan kecelakaan dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan sehingga tercipta lingkungan kerja yang nihil cedera dan insiden.

Program Kesehatan dan Sarana Keselamatan

Selama tahun 2019, PTK melakukan berbagai kegiatan guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, kondusif, serta menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja. Program terkait kesehatan dan sarana keselamatan kerja PTK antara lain:

- Klinik Kesehatan di lokasi PTK Shore Base Tanjung Batu (PSTB)
- MCU berkala bagi setiap pekerja
- Pelatihan P3K sesuai standar Kemenakertrans
- Kampanye HSE

and conduct training and exercise/drill for the Crisis Management Team and the Incident Management Team including the Tactical Emergency Management Team ;

- Improved organizational governance to facilitate communication and the active participation of each element in PTK by conducting the revitalization of the Occupational Health and Safety Advisory Committee (P2K3), the Safety and Health Committee for the Head Office, Branch Offices, and Ships;
- Improved QHSSE business processes and culture through the program, Positive Reinforcement & Just Culture; Human Performance Improvement, Lean Sigma, Housekeeping (5S/5R) & Kaizen, as well as awards and appreciation programs (Recognition & Award)

The various QHSSE work programs are a form of implementation of the QHSSE integrated management system that has been developed by PTK and is in line with applicable national and international standards such as SMK3, ISO 9001 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 45001 Safety and Health Management System Work, ISM Code and ISPS Code and other international standards.

Through the implementation of various QHSSE programs, PTK will be able to optimize the initiatives to prevent accidents and minimize impacts so as to create a zero-injury and zero-accident work environment.

Health Program and Safety Equipment

Throughout 2019, PTK has conducted several activities to create a healthy, conducive working environment as well as ensure effectiveness of the occupational safety implementation. The program related to occupational health and safety in PTK are as follows:

- Health Clinic in PTK Shore Base Tanjung Batu (PSTB) location.
- Regular MCU for every worker.
- First Aid training based on the Ministry of Manpower and Transmigration Standard
- HSE Campaign.

Anggaran Biaya Program HSSE

PTK menetapkan anggaran terkait pelaksanaan program HSSE sebesar Rp2.788.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

HSSE Program Budget

PTK has stipulated the budget related HSSE program with a total budget of Rp2.788.000.000 The a breakdown of budget is as follows:

Anggaran Biaya Program HSSE tahun 2019 HSSE Program Budget for 2019			
No	Kegiatan Activity	Biaya (Rp) Cost (Rp)	
1	Inspeksi Kapal Milik Owned-Vessels SMC Audit	1.229.500.000	
2	Inspeksi Kapal Milik Owned-Vessels SMC Audit	1.326.000.000	
3	Audit DOC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001 Audit DOC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001	232.500.000	

Sertifikasi HSSE

Selama periode tahun 2019, perusahaan meraih sertifikat sistem manajemen keselamatan baik di untuk di kantor maupun di kapal yaitu:

1. DOC (*Document Of Compliance*)
2. SMC (*Safety Management Certificate*)
3. ISO 9001:2015
4. ISO 14001:2015
5. OHSAS 18001:2007

HSSE Certification

Throughout 2019, the Company received safety management system certificate both for the offices and vessels, as follows:

1. DOC (*Document Of Compliance*)
2. SMC (*Safety Management Certificate*)
3. ISO 9001:2015
4. ISO 14001:2015
5. OHSAS 18001:2007

Penghargaan HSSE

Sepanjang tahun 2019, PTK telah meraih penghargaan dalam pengelolaan HSSE, yaitu:

HSSE Award

Throughout 2019, PTK received HSSE management award, as follows:

Penghargaan dalam pengelolaan HSSE HSSE Management Award			
No	Penghargaan Awards	Tahun Year	
1	Performance Supply Loss Kapal Gas Terbaik 2019 Untuk Kapal Gas Patra dari PT Pertamina (Perseo) PTKAM Summit 2020 The Best Gas Vessel Performance Supply Loss 2019 for Patra Gas Vessel from PT Pertamina (Perseo) PTKAM Summit 2020	2019	
2	Achieving Fair Performance Based on R4 (Supply Loss in Fuel Terminal Kotabaru) untuk Kapal SPOB Kapuas dari PT Pertamina (Persero) Achieving Fair Performance Based on R4 (Supply Loss in Fuel Terminal Kotabaru) from SPOB Kapuas Vessel from PT Pertamina (Persero)	2019	
3	Achieving Very Good Performance Based on R4 (Supply Loss in Fuel Terminal Kotabaru) untuk Kapal SPOB Mahakam dari PT Pertamina (Persero) Achieving Very Good Performance Based on R4 (Supply Loss in Fuel Terminal Kotabaru) for SPOB Mahakam Vessel from PT Pertamina (Persero)	2019	



DAMPAK KUANTITATIF TERKAIT PRAKTIK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

PTK berkomitmen senantiasa memperhatikan kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sebagai aset yang paling berharga. Komitmen tersebut diwujudkan dalam penerapan praktek Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan (*Health, Safety, Security, Environment*) secara konsisten. Tahun 2019 apakah Perusahaan mempertahankan zero fatality dengan jumlah kerja yang terus meningkat.

Program kesehatan dan keselamatan kerja yang dijalankan secara konsisten telah memberikan dampak positif yaitu kondusifitas dan kelangsungan operasi perusahaan yang terjaga dengan baik. Hingga akhir tahun 2019, tidak terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja Pertamina Trans Kontinental. Hal tersebut sebagai bukti komitmen perusahaan yang berupaya melakukan tindak preventif melalui berbagai kegiatan seperti edukasi, hingga kelengkapan atribut dan alat baik yang digunakan maupun yang ada di lingkungan kerja para pekerja.

DAMPAK KUALITATIF TERHADAP TURNOVER PEKERJA

Sepanjang tahun 2019 terjadi pengurangan jumlah pekerja akibat adanya pekerja yang mengundurkan diri dan atau berakhirnya masa kerja. Tingkat *turnover* pekerja di tahun 2019 sangatlah kecil di mana jumlah pekerja yang mengundurkan diri sebanyak 3 orang dari 668 pekerja atau hanya sebesar 0.45%. Jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018.

Sangat kecilnya jumlah *turnover* pekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap jalannya operasi perusahaan. Kecilnya jumlah *turnover* ini juga menunjukkan bahwa perlakuan perusahaan terhadap pekerja sudah berjalan secara etis dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak mereka di bidang kesehatan dan keselamatan kerja.

QUANTITATIVE IMPACT RELATED TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICE

PTK is committed always concern the health, safety and security of workers as the most valuable assets. This commitment is manifested in the consistent application of Occupational Health, Safety and Environmental practices. In 2019 does the Company maintained zero fatality with the increasing working hours.

Occupational health and safety programs that have been carried out consistently have had a positive impact, namely the conduciveness and continuity of company operations that are well maintained. Until the end of 2019, there were no work accidents at Pertamina Trans Kontinental employees. This is evidence of the company's commitment to preventive actions through various activities such as education, to the completeness of attributes and tools both used and those in the work environment of employees

QUALITATIVE IMPACT ON EMPLOYEE TURNOVER

Throughout 2019, there was an employee streamlining due to resigned employee or end of the working period. The employee turnover rate in 2019 was very small where the resigned employees were 3 employees from 668 employees or only 0.45%. The figure was equal to 2018.

The very small employee turn over rate does not significantly affect the Company's operational activity. The small turn over rate also indicates the Company's treatment to employees have been carried out ethically and full of responsibility to fulfill their rights in occupational health and safety aspects.

Jumlah Turnover Pekerja Employee Turnover Rate

Uraian Description	2019	2018	2017
Jumlah Pekerja Total Employee	668	673	609
Pekerja Mengundurkan Diri Employee Resigns	3	3	6
Turnover Pekerja (%) Turnover Employee (%)	0.45%	0.45%	0.99%

TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PELANGGAN

SOCIAL RESPONSIBILITY TO CUSTOMERS

Pelanggan memiliki arti yang sangat besar bagi PTK. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan tanggung jawab kepada pelanggan, PTK selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan bersifat proaktif dalam menanggapi segala keluhan atau permasalahan pelanggan. PTK memberlakukan berbagai kebijakan dan prosedur untuk menjaga kepuasan pelanggan dan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan.

Customers have a very significant meaning for PTK. In performing the corporate social responsibility related to responsibility to the customers, PTK strives to deliver excellent service and being proactive in responding to every customer complaint or issue. PTK applies various policies and procedures to maintain customer satisfaction level and as manifestation of responsibility to customers.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Pemangku kepentingan yang terkait dengan pemenuhan tanggung jawab produk/jasa adalah pelanggan dan pemasok. Komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/jasa kepada pelanggan, dilaksanakan dengan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, baik dalam segmen usaha perkapalan, pengelolaan pelabuhan dan jasa maritim, serta pengelolaan *shorebase* dan industri maritim dengan menjamin kualitas jasa yang diberikan melalui pengelolaan manajemen mutu. Sementara komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/ jasa kepada pemasok, dilaksanakan dengan penerapan proses tender/lelang yang terbuka dan pemenuhan kewajiban sesuai kontrak pemberian pekerjaan.

Secara berkala PTK melakukan survei kepuasan kepada pelanggan dan pemasok, untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan jasa yang diberikan

COMMITMENT AND POLICY

Stakeholders who are related to product/service responsibility fulfillment are customers and suppliers. Commitment to the implementation of product/service responsibilities to customers, carried out with efforts to provide the best service, both in the shipping business segment, port management and maritime services, as well as shorebase management and maritime industry by ensuring the quality of services provided through quality management. While the commitment to the implementation of product/service responsibilities to suppliers, is carried out through the adoption of an open tender process and fulfillment of obligations in accordance with the employment contract.

PTK regularly conducts customer and supplier satisfaction surveys, to determine the level of satisfaction with the products and services provided by the Company. In



Perusahaan. Selain itu PTK juga menyediakan saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan pelanggan maupun pemasok untuk menyampaikan keluhan terkait produk dan layanan jasa yang diberikan Perusahaan.

In addition, PTK also provides complaints channels that can be used by customers and suppliers to submit complaints related to products and services provided by the Company.

RUMUSAN DAN RENCANA KEGIATAN

PTK berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, salah satunya dengan mewujudkan 4 pilar *Quality Management* (QM) Pertamina, yaitu QMA (*Quality Management Assessment*), SM (*System Management*), KOMET (*Knowledge Management*), dan CIP (*Continuous Improvement Program*).

FORMULATION AND ACTIVITY PLAN

PTK is committed to provide the best service to customers, one of which is by realizing the 4 pillars of Pertamina's *Quality Management* (QM), namely QMA (*Quality Management Assessment*), SM (*System Management*), KOMET (*Knowledge Management*), and CIP (*Continuous Improvement Program*).

Manajemen mutu yang diterapkan berpedoman pada Kebijakan Manajemen Mutu Perusahaan yang ditetapkan tanggal 13 April 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Pokok-pokok manajemen mutu Perusahaan antara lain:

- Memastikan peran manajemen puncak sebagai *role model* dalam setiap kegiatan yang berbasis perbaikan berkelanjutan;
- Melaksanakan penyelesaian masalah pekerjaan dan ide inovasi dengan metode *continuous improvement* program yang berorientasi pada *value creation*;
- Menerapkan sistem manajemen terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, dan ISM Code), yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan tuntutan *stakeholder*;
- Mengembangkan budaya berbagi pengetahuan yang mampu memastikan hasil keluaran berupa barang dan jasa berbasis pada pengetahuan;
- Mengelola bisnis Perusahaan berbasis kinerja ekselen secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- Menciptakan dan memelihara kompetensi sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi persyaratan sistem manajemen mutu dan diakui secara internasional.

The applied quality management is guided by the Company's *Quality Management Policy* which was established on April 13, 2017 and signed by the President Director. The Company's quality management principles include:

- Ensuring the role of top management as a role model in every activity based on continuous improvement;
- Carrying out work problem solving and innovation ideas with a continuous improvement program oriented to value creation;
- Implement an integrated management system (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, and ISM Code), which is in accordance with business process needs and stakeholder demands;
- Developing a culture of sharing knowledge that is able to ensure outputs in the form of goods and services based on knowledge;
- Manage the Company's business based on excellent and comprehensive performance in a sustainable manner;
- Create and maintain human resource competencies that meet the quality management system qualification requirements and are recognized internationally.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN CAPAIANNYA

Pada tahun 2019 Perusahaan menyelenggarakan aktivitas *customer gathering* yang diikuti para pelanggan Pertamina Trans Kontinental. Selain itu Perusahaan juga menyediakan

ACTIVITY AND ACHIEVEMENT

In 2019, the Company held customer gathering activity participated by all customers of Pertamina Trans Kontinental. In addition, the Company also provides

saluran dan mekanisme penyampaian keluhan bagi pelanggan terkait kualitas produk dan layanan jasa yang diberikan Perusahaan. Setiap keluhan yang disampaikan pelanggan diterima dan ditindaklanjuti oleh Fungsi *Marketing Support*.

customer complaint channel and mechanism for the customers related to quality of products and services provided by the Company. Every complaint submitted by the customer will be accepted and processed by the Marketing Support Function.

Saluran Penyampaian Keluhan Channels for Complaint Filing



Telepon | Telephone
+62 21 31923005



Faksimili | Fax
+62 21 3106804



Email | Email
ptkpusat@ptk-shipping.com

LINGKUP PENGARUH PERUSAHAAN TERKAIT ISU KONSUMEN

Penanganan serta perhatian yang diberikan oleh Perseroan terkait isu-isu yang dibutuhkan oleh konsumen sejauh ini telah berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelangsungan hubungan bisnis. Hal ini disebabkan karena Pertamina Trans Kontinental mengedepankan kepuasan pelanggan.

SCOPE OF COMPANY'S IMPACT RELATED TO CONSUMER ISSUE

The process and concern of the Company to the several issues required by the customers so far have been implemented properly thereby not causing significant impact on business relation going concern. This is due to the Pertamina Trans Kontinental always prioritizes customer satisfaction.

EVALUASI REGULASI TERKAIT KONSUMEN

Secara umum segmen bisnis yang dijalankan Perusahaan selama tahun 2019 tidak berkaitan langsung dengan keselamatan pelanggan. Namun demikian dalam menjalankan bisnisnya, PTK berkomitmen menjamin keselamatan semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pemasok dan juga pekerja.

REGULATORY EVALUATION RELATED TO CUSTOMERS

In general, business segments operated by the Company in 2019 are not directly related to customer safety. However, in conducting its business, PTK is committed to ensuring the safety of all stakeholders including customers, suppliers and workers.

Keselamatan menjadi hal mutlak bagi PTK dalam menjalankan segmen bisnis perkapalan. Perusahaan berkomitmen memenuhi aspek-aspek keselamatan dan mematuhi setiap regulasi yang mengatur keselamatan, baik keselamatan di kapal maupun selama melaksanakan

Safety becomes a very essential for aspect for PTK in running the shipping business segment. The company is committed to fulfilling safety aspects and complying with every regulation governing safety, both safety on board and during shipping. In accordance with regulations

pelayaran. Sesuai regulasi yang ditentukan pihak berwenang, PTK melengkapi setiap unit kapal dengan peralatan keselamatan standar.

determined by the authorities, PTK provides each vessel with standard safety equipment.

DAMPAK KUALITATIF TERKAIT TANGGUNG JAWAB PRODUK

Berbagai inisiatif yang dilakukan Perseroan terkait tanggung jawab produk dan jasa memberikan dampak terhadap kepercayaan konsumen yang terjaga. Pertamina Trans Kontinental terus tumbuh bersama kepercayaan konsumen sehingga mampu menciptakan peningkatan kinerja usaha yang berkelanjutan.

QUALITATIVE IMPACT RELATED TO PRODUCT RESPONSIBILITY

Several initiatives done by the Company related to product and service responsibility also affected to a maintained customer's trust. Pertamina Trans Kontinental continuously grow altogether with trust from the customers to achieve a sustainable business performance growth.

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para pelanggan, kami melakukan tiga inisiatif yang kami yakini sangat membantu keberlanjutan hubungan dengan pelanggan yaitu:

- Secara berkala kami meminta masukan dari pelanggan untuk peningkatan kualitas layanan
- Menyediakan waktu mentoring untuk mengakomodir keluhan pelanggan
- Merespon klaim pelanggan sesuai service level agreement (SLA) maksimal 10 hari.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

As means of our responsibility to the customers, we have implemented three initiatives that we believe will highly support sustainability of relationship with the customers, as follows:

- Request feedback from the customers to improve service quality.
- Provide mentoring period to accommodate customer complaint
- Respond claim from the customers based on Service Level Agreement (SLA) of maximum 10 days.

Perusahaan juga melakukan survei kepuasan pelanggan untuk seluruh aspek layanan memperoleh skor 4.72 dari target 3.89.

The Company will also perform customer satisfaction survey for all service aspects and achieved score of 4.72 from 3.89 targeted.

Hasil Survei Kepuasan Terhadap Seluruh Aspek Layanan Result of Satisfaction Survey on All Service Aspects			
No	Aspek Aspect	Kepuasan Satisfaction	Harapan Expectation
1	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Secara Umum Satisfaction index for General Service	4.71	3.76
2	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sewa Kapal Satisfaction index for Vessel Rental Service	4.78	4.08
3	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keagenan Satisfaction index for Agency Service	4.68	3.82
Indeks Kepuasan Seluruh Aspek Layanan Satisfaction Index for all Services		4.72	3.89

Sementara itu untuk Kepuasan Konsumen Pertamina Trans Kontinental meraih Indeks Kepuasan Konsumen 4.72 dan Indeks Kepentingan 3.91

Meanwhile, Pertamina Trans Kontinental recorded Customer Satisfaction Index of 4.72 and Interest Index of 3.91.

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2019 PT Pertamina Trans Kontinental

Statement of Members of Board of Commissioners and Board of Directors on the
Responsibility for the 2019 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental

Anggota Direksi

Member of The Board of Directors



Giri Santoso
PJ. Direktur Utama
Act. President Director

1 Januari 2019 - 15 Juli 2019
January 1, 2019 - July 15, 2019



Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama
President Director

15 Juli 2019 - 31 Desember 2019
July 15, 2019 - December 31, 2019



Wedi Kamaludin
Direktur Pemasaran
Marketing Director

1 Januari 2019 - 20 Juni 2019
January 1, 2019 - June 20, 2019



Arsono Kuswardanu
Direktur Pemasaran
Marketing Director

20 Juni 2019 - 31 Desember 2019
June 20, 2019 - December 31, 2019



Siswoyo
Direktur Operasi
Operation Director

1 Januari 2019 - 02 April 2019
January 1, 2019 - April 2, 2019



Hadi Purnomo
Direktur Operasi
Operation Director

2 April 2019 - 31 Desember 2019
April 2, 2019 - December 31, 2019



Demsi Aswan
Direktur Keuangan & SDM
Finance & HR Director

1 Januari 2019 - 25 November 2019
January 1, 2019 - November 25, 2019



Nepos MT Pakpahan
PLT. Direktur Keuangan & SDM
Act. Finance & HR Director

25 November 2019 - 31 Desember 2019
November 25, 2019 - December 31, 2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2019 PT Pertamina Trans Kontinental telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
Jakarta, Maret 2020

We, the undersigned, testify that all information in the 2019 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental is presented in complete manner and we are fully responsible for the accuracy of the contents in the Annual Report and Financial Statement of the Company.

This statements is hereby made in all truthfulness
Jakarta, March 2020

Anggota Dewan Komisaris

Members of The Board of Commissioners



Dharmawan H Samsu
Komisaris Utama
President Commissioner

1 Januari 2019 – 19 September 2019
January 1, 2019 - September 19, 2019



Ignatius Tallulembang
Komisaris Utama
President Commissioner

19 September 2019 - 31 Desember 2019
September 19, 2019 - December 31, 2019



Joko Eko Purwanto
Komisaris
Commissioner

1 Januari 2019 - 1 November 2019
January 1, 2018 - November 1, 2019



Alfian Nasution
Komisaris
Commissioner

1 November 2019 – 31 Desember 2019
November 1, 2019 - December 31, 2020



Achmad Fachruddin
Komisaris
Commissioner

1 Januari 2019 – 31 Desember 2019
January 1, 2019 - December 31, 2019



Ivan Airlangga EP
Komisaris
Commissioner

1 Januari 2019 – 31 Desember 2019
January 1, 2019 - December 31, 2019

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2019/
*31 DECEMBER 2019***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Sesuai dengan resolusi Direksi PT Pertamina Trans Kontinental dan atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

In accordance with a resolution of the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental and on behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : Nepos MT Pakpahan
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021 - 3192 3005
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Nepos MT Pakpahan
Alamat : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telepon : 021 - 3192 3005
Jabatan : PLT Direktur Keuangan & SDM

1. Name : Nepos MT Pakpahan
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 - 3192 3005
Position : President Director
2. Name : Nepos MT Pakpahan
Address : Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat - 10450
Indonesia
Telephone : 021 - 3192 3005
Position : PLT Finance & HR Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. *The Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group");*
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or facts; and*
4. *The Board of Directors are responsible for the Group's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi,

For and on behalf of the Board of Directors.



Jakarta,
20 Februari/February 2020

Nepos MT Pakpahan
Direktur Utama/President Director

 Nepos MT Pakpahan
PLT Direktur Keuangan & SDM/Finance & HR Director



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2019, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries as at 31 December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA

20 Februari/February 2020

Daniel Kohar, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4, 22	714,498	560,808	Cash and cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		588	938	Restricted cash
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	5, 22	311,114	299,905	Related parties -
- Pihak ketiga	5	86,504	126,133	Third parties -
Piutang usaha yang belum difakturkan				Unbilled receivables
- Pihak berelasi	6, 22	409,445	265,085	Related parties -
- Pihak ketiga	6	168,697	186,744	Third parties -
Piutang sewa pembiayaan	8	20,325	31,760	Finance lease receivables
Persediaan		594	396	Inventories
Pajak dibayar di muka - pajak lain-lain	14a	42,136	18,511	Prepaid taxes - other taxes
Uang muka dan biaya dibayar di muka	7	<u>24,745</u>	<u>23,320</u>	Advances and prepayments
Jumlah aset lancar		<u>1,778,646</u>	<u>1,513,600</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	10	2,750,120	2,727,150	Fixed assets
Aset pajak tangguhan	14e	33,564	37,260	Deferred tax assets
Piutang sewa pembiayaan	8	81,301	95,280	Finance lease receivables
Penyertaan saham	22	598	598	Investment in shares
Investasi pada ventura bersama	9	73,083	55,066	Investment in a joint venture
Taksiran pengembalian pajak				Estimated tax refund
- Pajak penghasilan	14b	13,161	15,160	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	14b	-	7,160	Other taxes -
Aset lain-lain		<u>3,050</u>	<u>1,906</u>	Other assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>2,954,877</u>	<u>2,939,580</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>4,733,523</u>	<u>4,453,180</u>	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ December 2019</u>	<u>31 Desember/ December 2018</u>	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak berelasi	11, 22	306,478	201,231	Related parties -
- Pihak ketiga	11	179,563	135,755	Third parties -
Biaya masih harus dibayar	12	562,353	617,763	Accrued expenses
Uang muka pelanggan				Advances from customers
- Pihak berelasi	13, 22	-	4,144	Related parties -
- Pihak ketiga	13	64,808	23,642	Third parties -
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	14c	6,667	8,679	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	14c	6,197	3,953	Other taxes -
Pinjaman jangka pendek	15	25,516	-	Short term borrowings
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	15	<u>200,225</u>	<u>270,928</u>	Current portion of long-term borrowings
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>1,351,807</u>	<u>1,266,095</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Pinjaman jangka panjang	15	878,268	983,803	Long-term borrowings
Liabilitas imbalan pascakerja	16	<u>161,307</u>	<u>137,003</u>	Post-employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>1,039,575</u>	<u>1,120,806</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>2,391,382</u>	<u>2,386,901</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent
Modal saham - modal dasar dan disetor penuh 693.708 lembar saham A dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1.000	17	693,709	693,709	Share capital - authorised and fully paid 693,708 shares A at par value of Rp1,000,000 per share and 819 shares B at par value of Rp1,000 per share
Tambahan modal disetor		3,000	3,000	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain		(107,438)	(88,302)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	23	75,943	75,943	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		<u>1,676,927</u>	<u>1,381,929</u>	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS		<u>2,342,141</u>	<u>2,066,279</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>4,733,523</u>	<u>4,453,180</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pendapatan usaha	18	2,772,220	2,050,272	Revenue
Beban pokok pendapatan	19	(2,092,246)	(1,399,856)	Cost of revenue
Laba bruto		679,974	650,416	Gross profit
Beban umum dan administrasi	20	(288,144)	(228,763)	General and administrative expenses
Keuntungan/(beban) lain-lain, bersih	21	35,303	(41,196)	Other income/(expenses), net
Pendapatan keuangan		8,406	5,151	Finance income
Beban keuangan		(72,965)	(57,600)	Finance costs
Bagian atas laba bersih ventura bersama	9	30,403	15,483	Share in profit of a joint venture
Beban pajak final		(18,816)	(16,716)	Final tax expenses
Laba sebelum pajak penghasilan		374,161	326,775	Profit before income tax
(Beban)/manfaat pajak penghasilan				Income tax (expenses)/benefit
Kini	14d	(72,900)	(52,775)	Current
Tangguhan	14d	(6,111)	6,642	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	14d	(152)	(1,550)	Adjustment in respect of prior years
Beban pajak penghasilan		(79,163)	(47,683)	Income tax expenses
Laba tahun berjalan		294,998	279,092	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	16	(21,942)	(44,675)	Remeasurement of liabilities defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait		2,806	889	Related income tax
Jumlah rugi komprehensif lain setelah pajak		(19,136)	(43,786)	Total other comprehensive loss net of tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		275,862	235,306	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		294,998	279,092	Owners of the parent entity
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		275,862	235,306	Owners of the parent entity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent					
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Saldo laba/ Retained earnings		
				Telah determined penggunaannya/ Appropriated	Belum determined penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo per 31 Desember 2017	693,709	3,000	(44,516)	75,943	1,102,837	1,830,973
Rugi komprehensif lain	-	-	(43,786)	-	-	(43,786)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	279,092	279,092
Saldo per 31 Desember 2018	693,709	3,000	(88,302)	75,943	1,381,929	2,066,279
Rugi komprehensif lain	-	-	(19,136)	-	-	(19,136)
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	294,998	294,998
Saldo per 31 Desember 2019	693,709	3,000	(107,438)	75,943	1,676,927	2,342,141

Balance as at 31 December 2017

1,830,973

Other comprehensive loss

(43,786)

Profit for the year

279,092

Balance as at 31 December 2018

2,066,279

Other comprehensive loss

(19,136)

Profit for the year

294,998

Balance as at 31 December 2019

2,342,141

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		2,711,218	1,786,018	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok untuk beban operasi		(2,005,579)	(1,251,187)	Cash paid to suppliers for operating expenses
Pembayaran kepada karyawan		(204,493)	(261,593)	Cash payments to employees
Pembayaran atas beban pajak penghasilan badan		(73,951)	(62,592)	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		427,195	210,646	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari ventura bersama	9	12,386	27,558	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan		29,537	53,707	Received from lease receivables
Perolehan aset tetap		(172,719)	(366,589)	Acquisition of fixed assets
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(130,796)	(285,324)	Net cash flows used for investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman		227,653	587,764	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman		(357,935)	(369,211)	Payment of borrowings
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(130,282)	218,553	Net cash flows (used)/provided from financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		(12,427)	25,977	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kenaikan neto kas dan setara kas		153,690	169,852	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas awal tahun	4	560,808	390,956	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas akhir tahun	4	714,498	560,808	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Trans Kontinental ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 September 1969 oleh Tan Thong Kie yang diubah dengan notaris yang sama dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Januari 1975 dengan nama PT Pertamina Tongkang. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.Ya.5/5/4 tanggal 21 Januari 1975 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 10 tanggal 4 Februari 1975. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 3 Juli 2013 dari Rusnaldy, S.H, notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal dasar Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-38826.AH.01.012 dan AHU-AH.01.10-29670 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Kramat Raya No. 29.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Maksud Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik tersebut.
- Tujuan Perusahaan adalah untuk:
 - a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien.
 - b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Trans Kontinental (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 3 dated 9 September 1969, as amended by Notarial Deed No. 1 of the same notary dated 3 January 1975, by Tan Thong Kie under the name of PT Pertamina Tongkang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.Ya.5/5/4 dated 21 January 1975 and was published in State Gazette No. 10 dated 4 February 1975. The Company's name was changed to PT Pertamina Trans Kontinental based on Notarial Deed No. 12 dated 26 October 2011, of Dewantari Handayani, S.H., M.P.A, notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-58581.AH.01.02. Year 2011 dated 29 November 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment made by Notarial Deed No. 7 of Rusnaldy, S.H, notary in Jakarta, dated 3 July 2013, regarding the increase in authorised share capital of the Company. The change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-38826.AH.01.012 and AHU-AH.01.10-29670 Year 2013 dated 17 July 2013.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office located in Jl. Kramat Raya No. 29.

In accordance with Article 3 of the Company Articles of Association, the scope of its activities are as follows:

- *The Company's objective is to organise a business in shipping, maritime and logistics services both domestically and abroad, as well as other related business activities or support business activities in shipping, maritime and logistics services.*
- *Purposes of the Company are to:*
 - a. *Make profits based on the principles of effective and efficient management.*
 - b. *Contribute to the economic activities for the welfare and prosperity of the people.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup

i. Entitas anak

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, struktur Grup adalah sebagai berikut:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business activities	Domisili/ Domicile	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset/Total assets	
				2019	2018	2019	2018
1. PT Peteka Karya Samudera ("PKS") (Berdiri tanggal 10 Februari 1986)/ (Established on 10 February 1986)	Jasa bongkar muat/ Cargo handling	Jakarta	1996	99.99%	99.99%	118,242	109,993
2. PT Peteka Karya Gapura ("PKG") (Berdiri tanggal 5 Juni 1987)/ (Established on 5 June 1987)	Jasa angkutan, penyediaan tenaga kerja dan perdagangan umum/ Transportation service, labor supply and general trade	Jakarta	1998	99.99%	99.99%	156,252	106,973
3. PT Peteka Karya Tirta ("PKT") (Berdiri tanggal 21 Januari 1988)/ (Established on 21 January 1988)	Pengelolaan dan jasa pengadaan air/ Management and water supply services	Jakarta	1998	99.99%	99.99%	78,843	69,543
4. PT Peteka Karya Jala ("PKJ") (Berdiri tanggal 6 November 1991)/ (Established on 6 November 1991)	Perawatan dan pengadaan barang dan jasa/ Maintenance and procurement of goods	Jakarta	1991	99.99%	99.99%	86,019	53,704

ii. Ventura bersama

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 September 2014 yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Notaris No. 41 oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Perusahaan dan Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), mendirikan ventura bersama bernama PT Trans Yeong Maritime ("TYM") yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut. Kepemilikan saham Perusahaan di TYM adalah sebesar 51%.

Perusahaan induk langsung dan utama Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure

i. Subsidiaries

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

As at 31 December 2019 and 2018, the structure of the Group were as follows:

ii. Joint venture

Based on Annual Shareholder's meeting dated 16 September 2014, which documented in the Notarial Deed No. 41 by Dewantari Handayani S.H., MPA, the Company and Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), established a joint venture named PT Trans Yeong Maritime ("TYM") which located in Central Jakarta. The joint venture's purpose and objective are related to shipping and harbour services. The Company's share of ownership in TYM is 51%.

The Company's immediate and ultimate parent company is PT Pertamina (Persero), a state-owned enterprise.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Ignatius Tallulembang
Komisaris	Ivan Airlangga EP
Komisaris	Achmad Fachruddin
Komisaris	Alfian Nasution
Direksi	
Direktur Utama	Nepos MT Pakpahan
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Nepos MT Pakpahan*
Direktur Operasi	Hadi Purnomo
Direktur Pemasaran	Arsono Kuswardanu

*Pelaksana Tugas Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/Acting as Director Finance and Human Resources

d. Penyelesaian atas laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 20 Februari 2020.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Boards of Commissioners, Directors and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2019 and 2018 was as follows:

	2018	
		Board of Commissioners
Dharmawan H Samsu		President Commissioner
Ivan Airlangga EP		Commissioner
Joko Eko Purwanto		Commissioner
Achmad Facruddin		Commissioner
		Board of Directors
Giri Santoso		President Director
		Finance and Human Resources Director
Demsi Aswan		Operation Director
Siswoyo		Commercial Director
Wedi Kamaludin		

d. Completion of the consolidation financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company at 20 February 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesia Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the statement of cash flow.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK")**

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja - Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 26 "Biaya Pinjaman"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 46 "Pajak Penghasilan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 66 "Pengendalian Bersama"

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2020:

- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS")**

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Group's operation and effective for the financial year beginning 1 January 2019, which do not have a material impact on the consolidated financial statements of the Group are as follows:

- IFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- IFAS 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments"
- The amendments to SFAS 24 "Employee Benefits - Curtailment or Settlement"
- Annual Improvement to SFAS 22 "Business Combination"
- Annual Improvement to SFAS 26 "Borrowing Cost"
- Annual Improvement to SFAS 46 "Income Taxes"
- Annual Improvement to SFAS 66 "Joint Arrangements"

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Group's operation, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 are as follows:

Effective 1 January 2020:

- The amendments to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures"
- The amendments to SFAS 62 "Insurance Contracts - Applying SFAS 71: Financial Instruments to SFAS 62: Insurance Contracts"
- SFAS 71 "Financial Instruments"
- The amendments to SFAS 71 "Financial Instruments"

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Grup, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Efektif 1 Januari 2020: (lanjutan)

- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Judul Laporan Keuangan"
- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) "Penyajian Laporan Keuangan"
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba"
- Pencabutan PSAK 13 "Pencabutan PSAK 45 "Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"

Efektif 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"
- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"

Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan kecuali untuk ISAK 35, Amandemen PSAK 1 dan PSAK 1, sementara penerapan dini atas PSAK 73 diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK 72.

Berikut ini adalah amandemen dan standar baru yang diharapkan akan relevan terhadap Grup:

PSAK 73 "Sewa"

PSAK 73 disahkan di September 2017. Hal ini akan berdampak pada hampir seluruh sewa yang diakui di laporan posisi keuangan, karena perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dihapuskan. Dalam standar yang baru, sebuah aset (hak guna atas barang yang disewakan) dan liabilitas keuangan untuk membayar sewa diakui. Pengecualian hanya terdapat pada sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Group's operation, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 are as follows: (continued)

Effective 1 January 2020: (continued)

- SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers"
- SFAS 73 "Leases"
- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements Concerning the Title of Financial Statements"
- SFAS 1 (Annual Adjustments 2019) "Presentation of Financial Statements"
- IFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entity Financial Statements"
- Revocation of SFAS 13 "Revocation of SFAS 45 "Financial Reporting for Non-Profit Organisations"
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"

Effective 1 January 2021:

- The amendments to SFAS 22 "Business Combinations"
- SFAS 112 "Accounting for Endowments"

Early adoption of the above standards is permitted except for IFAS 35, Amendment to SFAS 1 and SFAS 1, while early adoption of SFAS 73 is permitted only upon the early adoption of SFAS 72.

The following amendments and new standards are expected to be of particular relevance to the Group:

SFAS 73 "Leases"

SFAS 73 was issued in September 2017. It will result in almost all leases being recognised in the statement of financial position, as the distinction between operating and finance leases is removed. Under the new standard, an asset (the right to use the leased item) and a financial liability to pay rentals are recognised. The only exceptions are short-term and low-value leases.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan)**

Standar akan berdampak utama kepada perlakuan akuntansi Grup atas sewa operasi. Pada tanggal pelaporan, Grup memiliki beberapa komitmen sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Namun, Grup belum menentukan sejauh mana komitmen tersebut akan berdampak kepada pengakuan aset dan liabilitas untuk pembayaran di masa depan dan bagaimana hal ini akan berdampak kepada laba dan klasifikasi arus kas Grup.

Beberapa komitmen dapat dicakup oleh pengecualian untuk sewa jangka pendek dan yang bernilai rendah dan beberapa komitmen dapat berhubungan dengan pengaturan yang tidak memenuhi syarat sewa dalam PSAK 73.

b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan ekuitas

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan entitas lain ketika Grup terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Grup. Entitas anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Grup kehilangan pengendalian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)**

The standard will primarily affect the accounting for the Group's operating leases. As at the reporting date, the Group has several non-cancellable operating lease commitments. However, the Group has not yet determined to what extent these commitments will result in the recognition of an asset and a liability for future payments and how this will affect the Group's profit and classification of cash flows.

Some of the commitments may be covered by the exception for short-term and low-value leases and some commitments may relate to arrangements that will not qualify as leases under SFAS 73.

**b. Principles of consolidation and equity
accounting**

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are deconsolidated from the date on which that control ceases.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan
ekuitas (lanjutan)**

(i) Entitas anak (lanjutan)

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan.

(iv) Metode ekuitas

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lain dari investee atas pendapatan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

(i) Subsidiaries (continued)

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investment in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 66 investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations each investor rather than the legal structure of the joint arrangement. Group has assessed the nature of its joint arrangement and determined them to be joint venture. Joint venture is accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the statement of financial position.

(iv) Equity method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in the profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**b. Prinsip atas akuntansi konsolidasian dan
ekuitas (lanjutan)**

(iv) Metode ekuitas (lanjutan)

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas-entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi dan ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

c. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Principles of consolidation and equity
accounting (continued)**

(iv) Equity method (continued)

When the Group's share of losses in an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the group and its associates and joint ventures are eliminated to the extent of the group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividends received or receivable from associates or joint ventures are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.

c. Foreign currency transactions

(i) Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Group.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>
Rupiah/1 Dolar Amerika Serikat	13,901

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Foreign currency transactions and balances

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

The rates of exchange used are as follows:

	<u>2018</u>	
	14,481	Rupiah/1 United States

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity period of 3 months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

e. Transactions with related parties

The Group have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

Significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

e. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

f. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

g. Piutang usaha yang belum difakturkan

Piutang usaha yang belum ditagih merupakan sejumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir tahun sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Transactions with related parties (continued)

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate ("EIR") method, less provision for impairment.

g. Unbilled receivables

Unbilled receivables represent the unbilled amount at year end in respect of services performed.

h. Prepayments

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Aset tetap (lanjutan)

i. Fixed assets (continued)

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi.

All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the profit or loss as incurred.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap 2 - 2,5 tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

The Group's vessels dock in every 2 – 2.5 years generally and the docking costs are capitalised to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalised costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortised over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous docking is derecognised, and charged to current year profit or loss.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

Tahun/Years

Bangunan	20
Kendaraan dan alat berat	5 -15
Peralatan kantor	5
Kapal	25
Peralatan kapal	5

Buildings
Vehicles and heavy equipment
Office equipment
Vessels
Vessel equipment

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss and in the period which the asset is derecognised.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

i. Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

j. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika aset kualifikasian telah selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan nilai aset non keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Fixed assets (continued)

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The costs of the construction of vessels are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

j. Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of the cost of those assets. Capitalisation of borrowing costs ceases when the qualifying assets are complete and ready for service.

k. Impairment of non-financial assets

The Group assess at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group make an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognised in the profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

k. Penurunan nilai aset non keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of non-financial assets
(continued)**

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

I. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Pembayaran sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian selama periode sewa.

Grup sebagai lessee:

- i) Dalam sewa pembiayaan, Grup mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan biaya pelunasan liabilitas sewa pembiayaan. Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laba rugi. Aset sewa (disajikan sebagai bagian dari aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa dengan masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa.
- ii) Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged to profit or loss over the term of the lease.

The Group as a lessee:

- i) *Under a finance lease, the Group recognised assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased assets or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments is apportioned between the finance cost and the reduction of the finance lease liability. The finance cost is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. The contingent lease is charged as expense in the period in which it is incurred. Finance charges are reflected in the profit or loss and other comprehensive income. Leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful lives of the assets and the lease terms, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership of the assets by the end of the lease terms.*
- ii) *Under an operating lease, the Group recognised lease payments as an expense with straight-line basis over the lease terms.*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai lessor:

- i) Dalam sewa pembiayaan, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.
- ii) Dalam sewa operasi, Grup mengajikan aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewa dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

m. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

I. Leases (continued)

The Group as a lessor:

- i) Under a finance lease, the Group recognised and a presented finance lease receivable in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investments as lessors in finance leases.
- ii) Under an operating lease, the Group presented assets subject to operating leases in its statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents, if any, are recognised as revenue in the period in which they are earned. Lease income from operating leases is recognised as income on a straight-line basis over the lease terms.

m. Trade and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

n. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode SBE.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Borrowings

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the year of the borrowing, using the EIR method.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pendapatan usaha Grup ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Certain revenues are subject to final income tax. The Group's vessel charter income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at rates of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

o. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan berasal dari pajak yang dapat dikompensasi diakui jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus jika ada hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan jika aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas pajak yang sama pada entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda serta jika ada keinginan untuk melakukan penyelesaian saldo secara neto.

p. Liabilitas imbalan kerja

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Taxation (continued)

The deferred tax assets of the tax loss carried forward are recognised when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

p. Employee benefits liabilities

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labour Law No. 13/2003 or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

p. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

q. Instrumen keuangan

1. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman dan piutang, dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan. Pada tanggal pelaporan keuangan, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Employee benefits liabilities (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses which reflects the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

q. Financial instruments

1. Financial assets

Initial recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following categories: at fair value through the profit or loss, held-to-maturity investments, loans and receivables and available-for-sale. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. As at the reporting date, the Group only has financial assets which are categorised as loans and receivables.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

**Pengakuan awal dan pengukuran
(lanjutan)**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak dikutip pada pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Grup terdiri dari "kas dan setara kas", "piutang usaha", dan "piutang usaha yang belum difakturkan" pada laporan posisi keuangan.

Pinjaman dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian yang memenuhi kriteria "pass-through"; dan (a) Grup telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Grup secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Penurunan nilai

Pada setiap akhir periode pelaporan Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**Initial recognition and measurement
(continued)**

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are included in current assets, except for those with maturities greater than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets. The Group's loans and receivables comprise "cash and cash equivalents", "trade receivables" and "unbilled receivables" in the statement of financial position.

Loans and receivables are initially recognised at fair value including directly attributable transaction costs and are subsequently carried at amortised cost using EIR method.

Derecognition

A financial asset is derecognised when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Group have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Impairment

At the end of each reporting period the Group assess whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Pada setiap tanggal akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai akibat satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa rugi tersebut memiliki dampak pada arus kas masa depan diestimasi atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini arus kas masa depan diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan SBE awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo memiliki tingkat bunga bervariasi, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitor), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original EIR. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Group may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in the profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam bentuk liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, utang lain-lain pihak berelasi, biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman jangka panjang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortised cost, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities in the form of financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at their fair values plus directly attributable transaction costs.

All of the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables to related party, accrued expenses and long-term borrowings.

Subsequent measurement

After initial recognition, interest bearing financial liabilities measured at amortised cost is subsequently measured at amortised cost using the EIR method

Gains and losses are recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognised as well as through the amortisation process.

Derecognition

A financial liability is derecognised, when and only when, it is extinguished i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

q. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substantial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

r. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, the entity currently has legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

r. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

s. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup serta jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

- jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh Grup;
- tingkat penyelesaian dari transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal; dan
- biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pendapatan dari jasa sewa kapal dan jasa pengelolaan kapal diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Jika pendapatan dari sewa kapal berbasis waktu (*vessel time charter*) mencakup lebih dari satu periode akuntansi maka pengakuan pendapatan diakui secara proporsional sesuai dengan periode yang dicakup.

Pendapatan dari jasa keagenan dan kegiatan pelabuhan dan penanganan muatan diakui pada saat penanganan kapal, peti kemas dan muatan selesai dilakukan. Pendapatan dari jasa penyediaan air bersih dan tenaga kerja diakui pada saat jasa selesai dilakukan.

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pendapatan dan beban operasi dalam perjalanan atas pelayaran yang belum selesai pada akhir periode pelaporan, ditangguhkan dan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka.

Beban diakui ketika terjadi (basis akrual).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

s. Revenue and expense recognition

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, excluding discounts and Value Added Taxes ("VAT").

The outcome of a transaction can be estimated reliably when all the following conditions are fulfilled:

- *the amount of revenue can be measured reliably;*
- *it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Group;*
- *the stage of completion of the transaction at the end of the reporting period can be measured reliably; and*
- *the costs incurred for the transaction and the costs to complete the transaction can be measured reliably.*

Revenue on vessel charter and ship management service are recognised when services are rendered to the customers. If the vessel time charter revenue covers more than one accounting period, then revenue is recognised proportionally over the period covered.

Income from agency services and activities of the port and handling charges are recognised as the handling of ships, containers and cargo has been completed. Revenue from clean water and labor supply are recognised when services are completed.

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortised cost is recorded using the EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Revenues and operating expenses in the course of the voyage, which has not been completed at the end of the reporting period are deferred and presented in the consolidated statements of financial statement as unearned revenue and prepaid expenses.

Expenses are recognised as incurred (accrual basis).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2q.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the consolidated financial statements:

Financial assets and liabilities classifications

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2q.

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan kerugian nilai piutang

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan, kualitas jaminan yang diterima dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan penurunan nilai piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 10 untuk pengungkapan lebih lanjut.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATES (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Allowance for impairment of receivables

The Group evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer, quality of collateral received and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expect to collect. These specific allowances are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables. Further details are disclosed in Notes 5.

Estimating useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year-end and are updated if expectations differ from previous estimates, due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 10.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya neto imbalan pascakerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi- asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pascakerja.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pascakerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pascakerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pascakerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 2p dan 16.

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan pengurangan beban tertentu dalam mengestimasi provisi beban pajak penghasilan untuk Grup. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Grup melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Penghasilan usaha Grup ada yang dikenakan pajak penghasilan final.

Grup mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATES (lanjutan)

Estimation and assumptions (lanjutan)

Post-employment benefit

The present value of post-employment liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment liabilities.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Group consider the interest rates of government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related employment benefits liability.

The key assumption used for determining post-employment liabilities include current market conditions. Additional information is disclosed in Notes 2p and 16.

Income taxes and other taxes

Judgements and assumptions are required to determine deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for the Group. In particular, the calculation of the Group's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain, during the ordinary course of business.

Certain revenues of the Group are subject to final income tax.

The Group estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya (lanjutan)

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2o dan 14.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai penggunaan.

Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi time charter, harga jual time charter (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

3. JUDGMENTS AND ESTIMATES (lanjutan)

Estimation and assumptions (lanjutan)

Income taxes and other taxes (continued)

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognised tax expense should be recognised.

The Group recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2n and 14.

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Group's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), reserves (see 'Reserve estimates' above), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Kas			Cash on hand
Dolar AS	3,026	3,581	US Dollar
Rupiah	<u>2,145</u>	<u>1,756</u>	Rupiah
Jumlah kas	<u>5,171</u>	<u>5,337</u>	Total cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 22)			entities (Note 22)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	63,643	77,750	(Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	204,815	51,942	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia.
(Persero) Tbk.	<u>22</u>	<u>22</u>	(Persero) Tbk.
	<u>268,480</u>	<u>129,714</u>	
Pihak ketiga	<u>22,683</u>	<u>26,373</u>	Third parties
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 22)			entities (Note 22)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	93,965	54,251	(Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4,439	4,767	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.	<u>64</u>	<u>68</u>	(Persero) Tbk.
	<u>98,468</u>	<u>59,086</u>	
Pihak ketiga	<u>42,650</u>	<u>37,751</u>	Third parties
Jumlah kas di bank	<u>432,281</u>	<u>252,924</u>	Total cash in banks
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 22)			entities (Note 22)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	<u>2,500</u>	<u>2,500</u>	(Persero) Tbk.
Pihak ketiga	<u>93,834</u>	<u>111,794</u>	Third parties
Dolar AS			US Dollar
Entitas berelasi dengan			Government-related
Pemerintah (Catatan 22)			entities (Note 22)
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk.	139,009	101,367	(Persero) Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.	<u>41,703</u>	<u>-</u>	(Persero) Tbk.
	<u>180,712</u>	<u>101,367</u>	
Pihak ketiga	<u>-</u>	<u>86,886</u>	Third parties
Jumlah deposito berjangka	<u>277,046</u>	<u>302,547</u>	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>714,498</u>	<u>560,808</u>	Total cash and cash equivalents

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rupiah	4.50% - 6.00%	5.00% - 8.50%
Dolar AS	0.75% - 3.20%	0.75% - 3.30%

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

The annual interest rates on time deposits during the year were as follows:

Rupiah
US Dollar

5. PIUTANG USAHA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pihak berelasi (Catatan 22)		
PT Pertamina (Persero)	236,460	220,689
PT Perta Arun Gas	26,210	21,335
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	12,916	655
PT Pertamina Hulu Mahakam	9,297	24,696
PT Pertamina Retail	8,456	7,074
PT Trans Yeong Maritime	7,365	10,897
PT Pertamina International Shipping	2,858	6,337
PT Pertamina Patra Niaga	2,294	1,396
PT Nusantara Regas	1,194	3,173
Lain-lain	4,064	3,653
	<u>311,114</u>	<u>299,905</u>
Pihak ketiga	181,757	221,255
Provisi penurunan nilai	<u>(95,253)</u>	<u>(95,122)</u>
	<u>86,504</u>	<u>126,133</u>

Jumlah piutang usaha, neto

397,618 **426,038**

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pihak berelasi		
0 - 30 hari	220,618	185,067
30 - 90 hari	68,100	79,925
90 - 365 hari	13,825	27,477
Lebih dari 365 hari	<u>8,571</u>	<u>7,436</u>
	<u>311,114</u>	<u>299,905</u>
Pihak ketiga		
0 - 30 hari	38,455	30,309
30 - 90 hari	22,379	54,143
90 - 365 hari	25,340	40,537
Lebih dari 365 hari	<u>95,583</u>	<u>96,266</u>
	<u>181,757</u>	<u>221,255</u>

Provisi penurunan nilai

(95,253) (95,122)
86,504 126,133

Jumlah

397,618 **426,038**

Related parties (Note 22)
PT Pertamina (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Retail
PT Trans Yeong Maritime
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Patra Niaga
PT Nusantara Regas
Others

Third parties
Provision for doubtful accounts

Total trade receivables, net

The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:

Related parties
0 - 30 days
30 - 90 days
90 - 365 days
More than 365 days

Third parties
0 - 30 days
30 - 90 days
90 - 365 days
More than 365 days

Provision for doubtful accounts

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo awal	95,122	77,701
Penambahan	16,229	17,421
Pemulihan	<u>(16,098)</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>95,253</u>	<u>95,122</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Saldo awal	95,122	77,701	Beginning balance
Penambahan	16,229	17,421	Addition
Pemulihan	<u>(16,098)</u>	<u>-</u>	Recovery
Jumlah	<u>95,253</u>	<u>95,122</u>	Total

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

6. PIUTANG USAHA YANG BELUM DIFAKTURKAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pihak berelasi (Catatan 22)		
PT Pertamina (Persero)	258,515	189,599
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	47,219	633
PT Pertamina International Shipping	24,151	19,121
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	22,491	-
PT Pertamina Hulu Mahakam	12,171	23,509
PT Pertamina Hulu Energi OSES	10,735	336
PT Perta Arun Gas	9,294	8,355
PT Pertamina Retail	9,169	7,368
PT Nusantara Regas	4,079	3,423
PT Pertamina Gas	2,689	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	-	9,337
Lain-lain	<u>8,932</u>	<u>3,404</u>
	<u>409,445</u>	<u>265,085</u>
Pihak ketiga	<u>168,697</u>	<u>186,744</u>
Jumlah	<u>578,142</u>	<u>451,829</u>

Pihak ketiga

Jumlah

6. UNBILLED RECEIVABLES

Related parties (Note 22)
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
PT Pertamina International Shipping
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina Hulu Energi OSES
PT Perta Arun Gas
PT Pertamina Retail
PT Nusantara Regas
PT Pertamina Gas
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Others

Third parties

Total

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Uang muka karyawan	12,992	4,724
Uang muka kerja	7,753	6,498
Biaya dibayar di muka	2,338	9,074
Lain-lain	<u>1,662</u>	<u>3,024</u>
Jumlah	<u>24,745</u>	<u>23,320</u>

Uang muka kerja merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional Grup.

7. ADVANCES AND PREPAYMENTS

Employee advances
Operational advances
Prepaid expenses
Others

Advances for operational activities represent advances paid to employees for operational activities of the Group.

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

The maturity analysis of gross finance lease receivable and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Piutang sewa bruto:			Gross finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	24,191	37,360	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>88,406</u>	<u>102,832</u>	Due between two and five years
	<u>112,597</u>	<u>140,192</u>	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	<u>(10,971)</u>	<u>(13,152)</u>	Less: unearned finance lease income
Piutang sewa neto	<u>101,626</u>	<u>127,040</u>	Net finance lease receivables
Piutang sewa neto:			Net finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	20,325	31,760	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	<u>81,301</u>	<u>95,280</u>	Due between two and five years
Jumlah	<u>101,626</u>	<u>127,040</u>	Total

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pada awal tahun	55,066	66,728	At the beginning of the year
Bagian atas laba bersih	30,403	15,483	Share of net profit
Penyesuaian tahun lalu	-	413	Prior year adjustments
Dividen yang diterima	<u>(12,386)</u>	<u>(27,558)</u>	Dividends receipt
Saldo akhir	<u>73,083</u>	<u>55,066</u>	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup memiliki ventura bersama sebagai berikut:

As at 31 December 2019 and 2018, the Group has a joint venture as follows:

<u>Nama entitas/ Name of entity</u>	<u>Lokasi usaha/Place of business</u>	<u>Persentase kepemilikan/ % of ownership interest</u>	<u>Kegiatan usaha/ Business activity</u>	<u>Metode pengukuran/ Measurement method</u>
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Indonesia	51%	Menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut/Conduct activities in related to the shipping and harbour services	Ekuitas/ Equity

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan
TYM pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang
dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Jumlah aset	387,056	408,020
Jumlah liabilitas	<u>(243,756)</u>	<u>(300,048)</u>
Aset neto	<u>143,300</u>	<u>107,972</u>
Laba neto tahun berjalan	<u>59,613</u>	<u>30,359</u>

Tidak ada liabilitas kontijensi terkait dengan
investasi TYM.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat
kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi,
sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai
atas investasi pada ventura bersama.

9. INVESTMENT IN A JOINT VENTURE (continued)

Set out below is the summary of financial
information for TYM as at 31 December 2019 and
2018, which accounted for using the equity method:

<i>Total assets</i>
<i>Total liabilities</i>
<i>Net assets</i>
<i>Net profit for the year</i>

There is no contingent liability related to the
Company investment in TYM.

Management is of the opinion that there are no
events or changes of circumstances which may
indicate impairment in the value of the investment,
therefore, no provision for impairment in value of
investment in joint ventures is necessary.

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	<u>2019</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Harga perolehan					Cost
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Tanah	31,902	1,156	-	33,058	Land
Bangunan	73,700	7,927	-	81,627	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,740	-	-	3,740	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	15,457	852	-	16,309	Office equipments
	<u>124,799</u>	<u>9,935</u>	<u>-</u>	<u>134,734</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	3,358,945	-	192,683	3,551,628	Vessels
Peralatan kapal	3,817	-	-	3,817	Vessel equipments
	<u>3,362,762</u>	<u>-</u>	<u>192,683</u>	<u>3,555,445</u>	
Aset dalam penyelesaian	45,151	206,940	(192,683)	59,408	Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	207	-	-	207	Vehicles
Jumlah	<u>3,532,919</u>	<u>216,875</u>	<u>-</u>	<u>3,749,794</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>					<u>Non-shipping fixed assets</u>
Bangunan	35,573	4,164	-	39,737	Buildings
Kendaraan dan alat berat	3,090	367	-	3,457	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	11,880	901	-	12,781	Office equipments
	<u>50,543</u>	<u>5,432</u>	<u>-</u>	<u>55,975</u>	
<u>Aset tetap pelayaran</u>					<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	751,663	188,388	-	940,051	Vessels
Peralatan kapal	3,106	85	-	3,191	Vessel equipment
	<u>754,769</u>	<u>188,473</u>	<u>-</u>	<u>943,242</u>	
<u>Aset sewa pembiayaan</u>					<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	457	-	-	457	Vehicles
Jumlah akumulasi penyusutan	<u>805,769</u>	<u>193,905</u>	<u>-</u>	<u>999,674</u>	Total accumulated depreciation
Nilai buku	<u><u>2,727,120</u></u>			<u><u>2,750,120</u></u>	Net book value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

2018							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		Cost
Harga perolehan							Non-shipping fixed assets
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>							<u>Land</u>
Tanah	30,804	-	-	1,098	31,902		
Bangunan	64,886	1,414	(225)	7,625	73,700		<u>Buildings</u>
Kendaraan dan alat berat	2,166	212	-	1,362	3,740		<u>Vehicles and heavy equipments</u>
Peralatan kantor	15,122	335	-	-	15,457		<u>Office equipments</u>
	<u>112,978</u>	<u>1,961</u>	<u>(225)</u>	<u>10,085</u>	<u>124,799</u>		
<u>Aset tetap pelayaran</u>							<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	2,792,830	-	(18,024)	584,139	3,358,945		<u>Vessels</u>
Peralatan kapal	3,817	-	-	-	3,817		<u>Vessel equipments</u>
	<u>2,796,647</u>	<u>-</u>	<u>(18,024)</u>	<u>584,139</u>	<u>3,362,762</u>		
Aset dalam penyelesaian	189,795	490,440	(41,325)	(593,759)	45,151		Construction in progress
<u>Aset sewa pembiayaan</u>							<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	672	-	-	(465)	207		<u>Vehicles</u>
Jumlah	3,100,092	492,401	(59,574)	-	3,532,919		Total
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
<u>Aset tetap non-pelayaran</u>							<u>Non-shipping fixed assets</u>
Bangunan	31,337	4,248	(12)	-	35,573		<u>Buildings</u>
Kendaraan dan alat berat	1,927	876	-	287	3,090		<u>Vehicles and heavy equipment</u>
Peralatan kantor	12,203	151	(187)	(287)	11,880		<u>Office equipments</u>
	<u>45,467</u>	<u>5,275</u>	<u>(199)</u>	<u>-</u>	<u>50,543</u>		
<u>Aset tetap pelayaran</u>							<u>Shipping fixed assets</u>
Kapal	602,511	166,552	(17,400)	-	751,663		<u>Vessels</u>
Peralatan kapal	3,106	-	-	-	3,106		<u>Vessel equipment</u>
	<u>605,617</u>	<u>166,552</u>	<u>(17,400)</u>	<u>-</u>	<u>754,769</u>		
<u>Aset sewa pembiayaan</u>							<u>Finance lease assets</u>
Kendaraan	407	50	-	-	457		<u>Vehicles</u>
Jumlah akumulasi penyusutan	651,491	171,877	(17,599)	-	805,769		Total accumulated depreciation
Nilai buku	2,448,601				2,727,150		Net book value

Penyusutan yang dibebankan pada operasi adalah sebagai berikut:

Depreciation charged to operations are as follows:

	2019	2018	
Beban pokok pendapatan (Catatan 19)	190,600	166,552	Cost of revenue (Note 19)
Beban umum dan administrasi (Catatan 20)	3,305	5,325	General and administrative expenses (Note 20)
Jumlah	193,905	171,877	Total

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang Grup.

Certain fixed assets are pledged as collateral for long-term loans by the Group.

Aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan resiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$314.710.387 pada tahun 2019 dan (2018: AS\$300.852.947). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Fixed assets of the Group are insured against losses, accidents, fire and other risks with sum insured amounting to US\$314,710,387 in years 2019 (2018: US\$300,852,947). Management believes that the sum insured are adequate to cover possible losses arising from such risks.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset dalam penyelesaian terutama terdiri dari pembuatan kapal yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan.

10. FIXED ASSETS (continued)

Based on the management's assessment, there is no impairment indicator identified to fixed assets as at 31 December 2019.

Construction in progress mainly consisted of construction of vessels that have not been completed at the reporting date.

11. UTANG USAHA

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pihak berelasi (Catatan 22)		
PT Pertamina (Persero)	291,139	170,257
PT Pertamina International Shipping	4,355	-
PT Perta Arun Gas	2,735	25,310
Lain-lain	<u>8,249</u>	<u>5,664</u>
	<u>306,478</u>	<u>201,231</u>
Pihak ketiga	<u>179,563</u>	<u>135,755</u>
Jumlah	<u>486,041</u>	<u>336,986</u>

Related parties (Note 22)
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina International Shipping
PT Perta Arun Gas
Others

Third parties

Total

11. TRADE PAYABLES

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Jasa penunjang operasi dan penyediaan tenaga kerja	174,775	36,915
Keagenan umum	59,513	3,108
Sewa kapal	41,984	173,124
Pemanduan dan penundaan	24,911	21,600
Provisi bonus karyawan	19,999	25,414
Pembangunan kapal	5,560	125,812
Lain-lain	<u>235,611</u>	<u>231,790</u>
Jumlah	<u>562,353</u>	<u>617,763</u>

Marine operations support and labor supply services
General agencies
Ship rentals
Towage and pilotage
Employees bonus provision
Construction of vessels
Others

Total

12. ACCRUED EXPENSES

13. UANG MUKA PELANGGAN

Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pihak ketiga	64,808	23,642
Pihak berelasi (Catatan 22)		
PT Pertamina (Persero)	<u>-</u>	<u>4,144</u>
Jumlah	<u>64,808</u>	<u>27,786</u>

The details of advances from customers are as follows:

Third parties
Related parties (Note 22)
PT Pertamina (Persero)

Total

13. ADVANCES FROM CUSTOMERS

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak dibayar di muka

a. Prepaid taxes

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") - Perusahaan	38,460	16,470	Value Added Taxes
PPN - Entitas anak	<u>3,676</u>	<u>2,041</u>	("VAT") - the Company
			VAT - Subsidiaries
Jumlah	<u>42,136</u>	<u>18,511</u>	Total

b. Taksiran pengembalian pajak

b. Estimated tax refund

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income taxes
Perusahaan			The Company
- 2018	<u>13,161</u>	<u>14,025</u>	2018 -
	<u>13,161</u>	<u>14,025</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
- 2018	-	628	2018 -
- 2017	<u>-</u>	<u>507</u>	2017 -
	<u>-</u>	<u>1,135</u>	
	<u>13,161</u>	<u>15,160</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Entitas anak			Subsidiaries
PPN			VAT
- 2017	<u>-</u>	<u>7,160</u>	2017 -
	<u>-</u>	<u>7,160</u>	
Jumlah	<u>13,161</u>	<u>22,320</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income taxes
Perusahaan			<i>The Company</i>
Kurang bayar pajak penghasilan			<i>Underpayment of corporate income taxes</i>
- 2019	3,487	-	<i>2019 -</i>
	<u>3,487</u>	<u>-</u>	
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
Kurang bayar pajak penghasilan			<i>Underpayment of corporate income taxes</i>
- 2019	3,180	-	<i>2019 -</i>
- 2018	-	8,679	<i>2018 -</i>
	<u>3,180</u>	<u>8,679</u>	
	<u>6,667</u>	<u>8,679</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Perusahaan			<i>The Company</i>
Pasal 21	2,468	1,536	<i>Article 21</i>
Pasal 23	719	326	<i>Article 23</i>
Pasal 26	120	141	<i>Article 26</i>
Pasal 15	204	529	<i>Article 15</i>
Pasal 4(2)	-	52	<i>Article 4(2)</i>
	<u>3,511</u>	<u>2,584</u>	
Entitas anak			<i>Subsidiaries</i>
PPN	1,940	1,273	<i>VAT</i>
Pasal 23	599	71	<i>Article 23</i>
Pasal 4(2)	117	5	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 21	30	17	<i>Article 21</i>
Pasal 22	-	2	<i>Article 22</i>
Pasal 15	-	1	<i>Article 15</i>
	<u>2,686</u>	<u>1,369</u>	
	<u>6,197</u>	<u>3,953</u>	
Jumlah	<u>12,864</u>	<u>12,632</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Perusahaan			The Company
Kini	50,888	32,729	Current
Tangguhan	5,831	(5,929)	Deferred
			Adjustment in respect of
Penyesuaian tahun lalu	<u>-</u>	<u>1,516</u>	prior years
	<u>56,719</u>	<u>28,316</u>	
Entitas anak			Subsidiaries
Kini	22,012	20,046	Current
Tangguhan	280	(713)	Deferred
			Adjustment in respect of
Penyesuaian tahun lalu	<u>152</u>	<u>34</u>	prior years
	<u>22,444</u>	<u>19,367</u>	
Jumlah	<u>79,163</u>	<u>47,683</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between consolidated profit before income tax and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2019 and 2018, are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Laba konsolidasian sebelum beban pajak penghasilan	374,161	326,775	Consolidated profit before income tax expenses
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada tingkat konsolidasian	<u>(22,709)</u>	<u>(63,889)</u>	Profit before tax of subsidiaries after consolidation adjustment
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>351,452</u>	<u>262,886</u>	Profit before income tax - the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Provisi atas liabilitas imbalan pascakerja	27,304	5,373	Post-employment benefits obligation
Provisi atas bonus karyawan	(6,903)	3,848	Provision for employee's bonus
Provisi atas cadangan penurunan nilai piutang	1,720	3,394	Provision for impairment of receivables
Penyusutan yang diijinkan untuk aktiva tetap lebih dari biaya penyusutan dalam laporan keuangan	<u>(9,727)</u>	<u>(9,861)</u>	Tax allowable depreciation of fixed assets in excess than depreciation expense in the financial statements
	<u>12,394</u>	<u>2,754</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	157,713	103,143	<i>Expense not deductible for tax purposes</i>
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(6,414)	(3,698)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(1,102,208)	(1,066,199)	<i>Revenue subject to final tax</i>
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	821,016	847,512	<i>Cost of revenue related to revenue subject to final tax</i>
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(30,403)	(15,483)	<i>Share in net profit of a joint venture</i>
	<u>(160,296)</u>	<u>(134,725)</u>	
Laba kena pajak Perusahaan	<u>203,550</u>	<u>130,915</u>	Taxable income of the Company
Beban pajak kini:			<i>Current tax expenses:</i>
Perusahaan	50,888	32,729	<i>The Company</i>
Entitas Anak	<u>22,012</u>	<u>20,046</u>	<i>Subsidiaries</i>
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>72,900</u>	<u>52,775</u>	Consolidated current income tax
Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:			<i>The details of the Company's current income tax and taxes payable are as follows:</i>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Beban pajak kini	50,888	32,729	<i>Current income taxes</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak dibayar di muka			<i>Prepaid income taxes</i>
- Pasal 25	23,642	35,509	<i>Article 25 -</i>
- Pasal 23	23,759	11,244	<i>Article 23 -</i>
- Pasal 22	<u>-</u>	<u>1</u>	<i>Article 22 -</i>
	<u>47,401</u>	<u>46,754</u>	
Kurang bayar/(lebih bayar) pajak penghasilan - Perusahaan	<u>3,487</u>	<u>(14,025)</u>	Underpayment/(overpayment) corporate income tax - the Company

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when Annual Tax Return ("SPT") are submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense (continued)

Pajak atas laba konsolidasian Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas konsolidasian sebagai berikut:

The tax on the Group's consolidated profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the consolidated entities as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	374,161	326,775	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	93,540	81,694	<i>Income tax calculated at applicable tax rate</i>
Dampak pajak penghasilan atas:			<i>Tax effects of:</i>
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	60,501	29,838	<i>Expenses not deductible for tax purposes</i>
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(291,811)	(277,094)	<i>Revenue subject to final tax</i>
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	215,624	220,805	<i>Cost of revenue related to revenue subjected to final tax</i>
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(7,600)	(3,871)	<i>Share in profit of a joint venture</i>
Penyesuaian tahun lalu	152	1,550	<i>Adjustment in respect of prior years</i>
Penyesuaian pajak tangguhan	<u>8,757</u>	<u>(5,239)</u>	<i>Deferred tax adjustment</i>
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>79,163</u>	<u>47,683</u>	<i>Consolidated income tax expense</i>

Penyesuaian tahun lalu dilakukan untuk menyesuaikan perhitungan pajak penghasilan tahun 2019 dengan Surat Pemberitahuan Badan Tahunan untuk tahun pajak 2019 yang telah dilaporkan.

Adjustment in respect of prior years was made to adjust the current income tax calculation for the year 2019 with the submitted Annual Corporate Tax Return for fiscal year 2019.

e. Aset pajak tangguhan

e. Deferred tax assets

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Aset pajak tangguhan			<i>Deferred tax assets</i>
<u>Perusahaan</u>			<i>The Company</i>
Penyusutan aset tetap	193	261	<i>Fixed assets depreciation</i>
Provisi atas bonus karyawan	2,398	3,944	<i>Provision for employee's bonus</i>
Liabilitas imbalan pascakerja	20,373	20,720	<i>Post-employment benefit obligations</i>
Provisi penurunan nilai piutang usaha	<u>15,678</u>	<u>14,376</u>	<i>Provision for impairment of trade receivables</i>
	<u>38,642</u>	<u>39,301</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

e. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

e. Deferred tax assets (continued)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Aset pajak tangguhan			Deferred tax assets
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Penyusutan aset tetap	3	3	Fixed assets depreciation
Liabilitas imbalan pascakerja	980	872	Post-employment benefit obligations
Provisi penurunan nilai piutang usaha	1,525	1,954	Provision for impairment of trade receivables
Provisi penurunan nilai persediaan	<u>3</u>	<u>3</u>	Provision for impairment of inventories
	<u>2,511</u>	<u>2,832</u>	
	<u>41,153</u>	<u>42,133</u>	
 Liabilitas pajak tangguhan			 Deferred tax liabilities
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Aset atas sewa pembiayaan	<u>(7,130)</u>	<u>(4,767)</u>	Finance lease assets
	<u>(7,130)</u>	<u>(4,767)</u>	
 <u>Entitas anak</u>			 <u>Subsidiaries</u>
Aset tetap	<u>(459)</u>	<u>(106)</u>	Fixed assets
	<u>(459)</u>	<u>(106)</u>	
	<u>(7,589)</u>	<u>(4,873)</u>	
 Jumlah	<u>33,564</u>	<u>37,260</u>	 Total

f. Analisa perubahan aset pajak tangguhan

f. Analysis of changes in deferred tax assets

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Aset pajak tangguhan - awal tahun	37,260	29,592	Deferred tax asset - beginning balance
(Beban)/manfaat pajak tangguhan	(6,111)	6,642	Deferred tax (expense)/benefit
Penyesuaian	(391)	137	Adjustment
Laba aktuarial yang dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	<u>2,806</u>	<u>889</u>	Actuarial gain recognised in other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - akhir tahun	<u>33,564</u>	<u>37,260</u>	Deferred tax assets - ending balance

g. Administrasi

g. Administration

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company which is domiciled in Indonesia calculates and pay taxes on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN

Pinjaman jangka pendek

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pihak ketiga		
PT Bank BNI Syariah	25,516	-
Jumlah	<u>25,516</u>	<u>-</u>

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Berdasarkan surat keputusan pembiayaan No. 001/QARDH813/PLAFOND/II/19 tanggal 27 Februari 2019, BNIS menyetujui pinjaman yang diajukan oleh PKG, dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp30.000.

Jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak akad ditandatangani. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp25.516 dan Rpnil.

Pinjaman kepada BNIS akan jatuh tempo pada bulan Februari 2020.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, PKG diwajibkan memenuhi batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 PKG telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian kredit.

Pinjaman jangka panjang

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 22)		
<i>Notional pooling</i> - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	72,294
Pihak ketiga		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	848,336	976,123
PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ	147,084	204,910
PT Bank BNI Syariah	83,073	1,404
	<u>1,078,493</u>	<u>1,182,437</u>
Jumlah	<u>1,078,493</u>	<u>1,254,731</u>
Bagian lancar	<u>(200,225)</u>	<u>(270,928)</u>
Bagian tidak lancar	<u>878,268</u>	<u>983,803</u>

15. BORROWINGS

Short-term borrowings

Third parties
PT Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Based on the decision letter No. 001/QARDH813/PLAFOND/II/19 dated on 17 February 2019, BNIS approved the proposed loan by PKG, with a maximum amount of Rp30,000.

The loan would be valid for 12 months from the financing agreement id signed. The loan balance as at 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp25,516 and Rpnil, respectively.

The bank loan from BNIS will be due in February 2020.

As specified by the loan agreement, PKG is required to comply with certain covenant, such as financial ratio covenants

As at 31 December 2019, PKG has complied with the required relevant covenants stated in the loan agreement.

Long-term borrowings

Government-related entities (Note 22)
Notional pooling - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Third parties
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ
PT Bank BNI Syariah

Total

Current portion

Non-current portion

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

PKT

Berdasarkan surat keputusan pembiayaan No. CLG/04/309/R tanggal 17 September 2014, BNIS menyetujui pinjaman yang diajukan oleh PKT, entitas anak, sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kredit Investasi I (Murabahah) dengan nilai maksimum sebesar Rp3.859 jangka waktu 12 bulan sejak akad pembiayaan ditandatangani; dan
- b. Fasilitas Kredit Investasi II (Murabahah) dengan jumlah maksimum Rp6.200 atau maksimum 80% dari nilai proyek yang akan dibiayai. Jangka waktu pinjaman 5 tahun sejak akad pembiayaan ditandatangani. Marjin nominal ditetapkan pada saat pencairan adalah setara dengan 13,75% per tahun.

Saldo pinjaman pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp139 dan Rp1.404.

Pinjaman kepada BNIS akan jatuh tempo pada bulan Februari dan Juni 2020.

Pinjaman ini dijamin dengan beberapa aset tetap milik PKT.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, PKT diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial dan tidak melakukan *merger*.

Pada tanggal 31 Desember 2019 PKT telah memenuhi semua persyaratan terkait sebagaimana diharuskan dalam perjanjian kredit.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")

Berdasarkan surat keputusan pembiayaan No. 101/mmq800/884/VII/2019 tanggal 25 Agustus 2019, BNIS menyetujui pinjaman yang diajukan oleh PTK dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp82.934.

Jangka waktu pinjaman 7 tahun sejak akad pembiayaan ditandatangani. Bunga atas pinjaman tersebut adalah 7,58% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp82.934 dan RpNil.

Pinjaman kepada BNIS akan jatuh tempo pada bulan Juni 2026.

15. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

PKT

Based on the decision letter No. CLG/04/309/R dated on 17 September 2014, BNIS approved the proposed loan by PKT, a subsidiary, which is as follows:

- a. Investment Credit Facility I (Murabahah) with maximum credit limit amounting to Rp3,859 for a period of 12 months after the financing agreement was signed; and
- b. Investment Credit Facility II (Murabahah) with maximum credit limit of Rp6,200 or 80% of the value of the project to be financed. The loan would be valid for 5 years from the financing agreement is signed. Nominal margin set at the time of disbursement is equivalent to 13.75% per annum.

The loan balance as at 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp139 and Rp1,404, respectively.

The long-term borrowings from BNIS will be due in February and June 2020.

The loan is secured by certain fixed assets owned by PKT.

As specified by the loan agreement, PKT is required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants, no substantial change in the general business and not entering into mergers.

As at 31 December 2019, PKT has complied with the required relevant covenants stated in the loan agreement.

PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")

Based on the decision letter No. 101/mmq800/884/VII/2019 dated on 25 August 2019, BNIS approved the proposed loan by PTK, with a maximum amount of Rp82,934.

The loan would be valid for 7 years from the financing agreement is signed. Interest of loan is 7.58% per annum. The loan balance as at 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp82,934 and RpNil.

The long-term borrowings from BNIS will be due in June 2026.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI")

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSMI
adalah sebagai berikut:

15. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia ("BSMI")

The details of the long-term bank loans from BSMI
are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Peruntukan/ Purpose	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Saldo 31 Desember 2019/ Balance as at 31 December 2019
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$9.382.400 (nilai penuh)/ US\$9,382,400 (full amount)	Tingkat bunga LIBOR +2,35% per tahun/Interest at rates LIBOR +2.35% per annum	Oktober 2022/ October 2022	Pembiayaan pembelian kapal Transko Arafura/Financing for purchase of Transko Arafura	RpNil/RpNil
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548 /Rp148,548	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	November 2023/ November 2023	Pembiayaan pembelian kapal Transko Antasena/Financing for purchase of Transko Antasena	Rp119.121/ Rp119,121
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$8.800.000 (nilai penuh)/ US\$8,800,000 (full amount)	Tingkat bunga LIBOR +1,37% per tahun/Interest at rates LIBOR +1.37% per annum	November 2021/ November 2021	Pembiayaan pembelian kapal Transko Aquila & Aries/ Financing for purchase of Transko Aquila & Aries	US\$4.724.208 (nilai penuh), setara dengan Rp65.671/ US\$4.724.208 (full amount), equivalent to Rp65,671
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$4.400.000/US\$4,400,000	Tingkat bunga LIBOR +1,37% per tahun/Interest at rates LIBOR +1.37% per annum	November 2021/ November 2021	Pembiayaan pembelian kapal Transko Bimal/Financing for purchase of Transko Bima	US\$2.444.449 (nilai penuh), setara dengan Rp33.980/ US\$2.444.449 (full amount), equivalent to Rp33,980
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$11.326.400/US\$11,326,400	Tingkat bunga LIBOR +1,35% per tahun/Interest at rates LIBOR +1.35% per annum	September 2024/ September 2024	Pembiayaan pembelian kapal Transko Cempala, Sikatan & Gelatik/Financing for purchase of Transko Cempala, Sikatan & Gelatik	US\$8.886.868 (nilai penuh), setara dengan Rp123.536/ US\$8.886.868 (full amount), equivalent to Rp123,536
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp330.239/Rp330,239	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	Agustus 2024/ August 2024	Pembiayaan pembelian kapal HT3200 HP dan Gagak/Financing for purchase of HT3200 HP and Gagak	Rp268.672/ Rp268,672
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp103.983/Rp103,983	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Yudhistira/ Financing for purchase of Transko Yudhistira	Rp100.518/ Rp100,518
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp44.564/Rp44,564	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	September 2024/ September 2024	Pembiayaan pembelian Transko Yudhistira/ Financing for purchase of Transko Yudhistira	Rp43.079/ Rp43,079
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp19.120/Rp19,120	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp19.120/ Rp19,120
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp47.800/Rp47,800	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp47.800/ Rp47,800
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp26.839/Rp26,839	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at rates JIBOR +1.75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp26.839/ Rp26,839

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

***Notional pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")***

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 006/H00000/2016-SO tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. 008/H0000/2016-SO tanggal 14 Oktober 2016, Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun dan otomatis diperpanjang sampai dengan lima tahun.

Berdasarkan surat No. 014/H1810/2016-SO tanggal 18 Agustus 2016, PT Pertamina (Persero) setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar RpNil dan Rp72.294.

PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ ("BOTM")

Berdasarkan perjanjian kredit No. 17-0320-GC-LN tanggal 13 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan nilai fasilitas maksimum sebesar AS\$15.935.000.

Jangka waktu pinjaman adalah tahun 2022 dengan *grace period* selama 3 bulan sejak tanggal perjanjian. Bunga atas pinjaman tersebut adalah LIBOR + 1,35% per tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2019 Rp147.084 atau setara dengan AS\$10.580.840 (nilai penuh) (2018: US\$14.150.280 (nilai penuh) atau setara dengan Rp204.910).

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Grup memberikan imbalan pascakerja kepada semua karyawan tetapnya. Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja yang tergantung pada lamanya masa kerja. Grup mengakui timbulnya biaya pada saat Grup menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

Grup melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang. Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 23 Januari 2020, menggunakan metode *projected unit credit* dan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Miliman, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 6 Februari 2019, menggunakan metode *projected unit credit*.

15. BORROWINGS (continued)

Long-term borrowings (continued)

***Notional pooling PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
("Mandiri")***

Based on the *Notional Pooling* agreement No. 006/H00000/2016-SO dated 15 August 2016 which later amended based on agreement No. 008/H0000/2016-SO dated 14 October 2016, Mandiri have agreed to provide *Notional Pooling* facilities to PT Pertamina (Persero) and its several subsidiaries. The term of the agreement was one year and will be automatically renewed to five years.

Based on the letter No. 014/H1810/2016-SO dated 18 August 2016, PT Pertamina (Persero) had approved to provide loan to the Company. The balance of the loan as at 31 December 2019 and 2018 were RpNil and Rp72,294, respectively.

PT Bank Tokyo Mitsubishi UFJ ("BOTM")

Based on loan agreement No. 17-0320-GC-LN dated 13 October 2017, the Company obtained financing facility with a maximum amount of US\$15,935,000.

The loan period is 2022 with grace period of 3 months from the date of the agreement. Interest of the loan is LIBOR + 1.35% per annum. The loan balance as at 31 December 2019, is Rp147,084 or equivalent to US\$10,580,840 (full amount) (2018: US\$14,150,280 (full amount) or equivalent to Rp204.910).

16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Group provides post-employment benefits to all permanent employees. Benefits provided are defined benefits related with long service appreciation. The Group recognises expenses when the economic benefits of services provided by the employees have been received.

The Group and certain subsidiaries provided provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as at 31 December 2019 is based on calculation performed by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its reports dated 23 January 2020, using the projected unit credit method and 31 December 2018 is based on calculation performed by PT Miliman, an independent actuary, as per its reports dated 6 February 2019, using the projected unit credit method.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang berasal dari Grup sehubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Nilai kini liabilitas	283,967	254,567
Nilai wajar aset program	<u>(122,660)</u>	<u>(117,564)</u>
Liabilitas imbalan kerja	<u>161,307</u>	<u>137,003</u>

Beban imbalan pascakerja yang dibebankan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Biaya jasa kini	11,033	7,413
Biaya jasa lalu	2,070	15,280
Biaya bunga	<u>11,514</u>	<u>7,125</u>
Biaya imbalan pascakerja	<u>24,617</u>	<u>29,818</u>

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pada awal tahun	137,003	87,488
Penyesuaian tahun lalu	-	(693)
Dibebankan pada laporan laba rugi	24,030	29,818
Dibebankan pada penghasilan komprehensif lain	21,942	44,675
Iuran Perusahaan	(10,402)	(16,986)
Pembayaran imbalan	<u>(11,266)</u>	<u>(7,299)</u>
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	<u>161,307</u>	<u>137,003</u>

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Tingkat diskonto	7.7%	8.5%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9.0%	9.0%
Tabel mortalita	TMI III - 2011	TMI III - 2011
Usia pensiun normal	56	56

**16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the Group's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

*Present value of obligation
Fair value of plan assets*

Employee benefits liability

Amounts charged in the profit or loss and in respect of these post-employment benefits are as follows:

*Current service cost
Past service cost
Interest cost*

Employee benefits expense

The movements in the present value of unfunded obligations in the current year were as follows:

*Beginning of the year
Prior year adjustment
Charged to profit or loss
Charged to other comprehensive income
Company's contribution
Benefit payment*

Present value of obligation at the end of the year

The main assumptions used are as follows:

*Discount rate
Basic salary growth rate
Mortality table
Normal retirement age*

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA (lanjutan)

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%) perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**16. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

A one percentage (1%) point change in the assumed discount rate and increase rate at 31 December 2019, would have the following effects:

Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/Change in assumption	Kenaikan asumsi/Increase in assumption	Penurunan asumsi/Decrease in assumption		
Tingkat diskonto	1.0%	(20,806)	24,050	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.0%	11,940	(10,715)	Salary growth rate

Pada 31 Desember 2019, rata-rata durasi atas provisi imbalan pascakerja karyawan adalah 11,05 tahun.

As of 31 December 2019, the weighted average duration of the provision for employee service entitlements is 11.05 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2019 is presented below:

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years	5 sampai 10 tahun/ Between 5 and 10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	Jumlah/Total	
Liabilitas imbalan pascakerja	28,621	106,818	161,778	814,226	1,111,443	Post-employment benefit obligation

17. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

17. SHARE CAPITAL

The structure of shareholders and the percentage of ownerships at 31 December 2019 and 2018 are as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PT Pertamina (Persero)	693,698	693,698	99.88%	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0.01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PT Pertamina (Persero)	819	1	0.11%	PT Pertamina (Persero)
Jumlah	694,527	693,709	100%	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PENDAPATAN USAHA

18. REVENUE

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Sewa kapal	1,159,688	1,043,263	Vessel charter
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	898,236	467,714	Marine operations support services
Jasa penyediaan tenaga kerja	273,447	142,384	Labor supply services
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	242,638	248,975	Shipping agency and port services
Pengerukan	69,338	42,180	Dredging
Air bersih	52,469	50,950	Clean water
Perdagangan umum	38,635	28,446	General trading
Bongkar muat	31,783	18,586	Cargo handling
Sewa gudang	3,864	2,974	Warehouse rental
Lain-lain	2,122	4,800	Others
Jumlah	<u>2,772,220</u>	<u>2,050,272</u>	Total

19. BEBAN POKOK PENDAPATAN

19. COST OF REVENUE

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Sewa kapal	666,542	544,098	Vessel charter
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	504,538	159,864	Marine operations support services
Penyediaan tenaga kerja	410,640	308,286	Labor supply services
Penyusutan (Catatan 10)	190,600	166,552	Depreciation (Note 10)
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	154,460	104,722	Shipping agency and port services
Pengukuran	60,745	33,755	Dredging
Perdagangan umum	46,416	36,288	General trading
Air bersih	38,620	34,330	Clean water
Bongkar muat	17,317	7,895	Cargo handling
Lain-lain	2,368	4,066	Others
Jumlah	<u>2,092,246</u>	<u>1,399,856</u>	Total

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Umum			General
Biaya karyawan dan kesejahteraan	203,509	160,177	Employee cost and welfare
Pemeliharaan bangunan dan gedung kantor	33,174	23,932	Maintenance of buildings and office building
Perlengkapan kantor	11,435	8,894	Office supplies
Hubungan masyarakat	9,954	7,881	Public relations
Sewa	8,124	6,948	Rent
Telekomunikasi	4,295	2,248	Telecommunication
Lain-lain	4,011	5,426	Others
	<u>274,502</u>	<u>215,506</u>	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

**20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)**

Administrasi			Administrative
Biaya bank	5,935	5,142	Bank charge
Jasa profesional	4,113	2,120	Professional fees
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 10)	3,305	5,325	Depreciation and amortisation (Note 10)
Lain-lain	289	670	Others
	<u>13,642</u>	<u>13,257</u>	
Jumlah	<u>288,144</u>	<u>228,763</u>	Total

21. KEUNTUNGAN/(BEBAN) LAIN-LAIN, NETO

21. OTHER INCOME/(EXPENSES), NET

	2019	2018	
Penerimaan atas denda penyerahan kapal	38,596	-	Settlement from late delivery of vessels
Penyisihan piutang tak tertagih	(2,415)	(17,421)	Bad debt expense
Rugi selisih kurs, neto	(1,763)	(23,880)	Foreign exchange loss, net
Lain-lain, neto	885	105	Others, net
Jumlah	<u>35,303</u>	<u>(41,196)</u>	Total

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH**

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Group enters into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase price among related parties is made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties.

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Cash and cash equivalents (Note 4)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 11,62% dan 6,57% dari jumlah aset.

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of cash and cash equivalents placed in Government-related entities amounted to 11.62% and 6.75%, respectively, of the total assets.

Piutang usaha (Catatan 5)

Trade receivables (Note 5)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo piutang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 6,57% dan 6,73% dari jumlah aset.

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of trade receivables to related parties amounted to 6.57% and 6.73%, respectively, of the total assets.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**Piutang usaha yang belum difakturkan
(Catatan 6)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo piutang usaha yang masih belum difakturkan yang ditempatkan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 8,65% dan 5,95% dari total aset.

Penyertaan saham

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2019	2018	
PT Pertamina Patra Niaga	1.96%	598	598	PT Pertamina Patra Niaga
Jumlah		598	598	Total

Utang usaha (Catatan 11)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo utang usaha pada pihak berelasi masing-masing sebesar 12,82% dan 8,43% dari jumlah liabilitas.

Uang muka pelanggan (Catatan 13)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo uang muka pelanggan pada pihak berelasi masing-masing sebesar 0% dan 0,17% dari jumlah liabilitas.

Pinjaman jangka panjang (Catatan 15)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo pinjaman jangka panjang pada entitas berelasi dengan pemerintah masing-masing sebesar 0% dan 3,03% dari jumlah liabilitas.

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Unbilled receivables (Note 6)

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of unbilled receivables placed in related parties amounted to 8.65% and 5.95%, respectively, from the total assets.

Investment in shares

Trade payables (Note 11)

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of trade payables to related parties amounted to 12.82% and 8.43%, respectively, of the total liabilities.

Advances from customers (Note 13)

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of advances from customers to related parties amounted to 0% and 0.17%, respectively, of the total liabilities.

Long-term borrowings (Note 15)

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of long-term borrowings to government-related entities amounted to 0% and 3.03%, respectively, of the total liabilities.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Pendapatan usaha (Catatan 19)

Revenue (Note 19)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
PT Pertamina (Persero)	1,403,148	1,365,274	PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Hulu Mahakam	178,903	110,639	PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Retail	109,870	37,260	PT Pertamina Retail
PT Perta Arun Gas	106,843	96,326	PT Perta Arun Gas
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	91,723	3,067	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
PT Pertamina International Shipping	72,700	66,918	PT Pertamina International Shipping
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	22,491	-	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
PT Nusantara Regas	19,511	16,886	PT Nusantara Regas
PT Pertamina Hulu Energi OSES	18,153	885	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ
PT Pertamina Patra Niaga	7,360	5,508	PT Pertamina Patra Niaga
PT Elnusa Trans Samudera	6,087	5,938	PT Elnusa Trans Samudera
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	4,294	3,776	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
PT Pertamina Hulu Energi WMO	3,960	3,287	PT Pertamina Hulu Energi WMO
PT Pertamina Hulu Energi JM	3,701	-	PT Pertamina Hulu Energi JM
PT Pertamina Hulu Energi NSO	3,661	117	PT Pertamina Hulu Energi NSO
PT Pertamina Gas	2,689	-	PT Pertamina Gas
PT Elnusa Tbk.	2,646	2,481	PT Elnusa Tbk.
PT Pertamina EP	688	3,710	PT Pertamina EP
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	639	9,334	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Lain-lain	4,551	2,005	Others
Jumlah	<u>2,063,618</u>	<u>1,733,411</u>	Total
Persentase dari jumlah pendapatan	<u>74.44%</u>	<u>84.55%</u>	Percentage from total revenues

Beban pokok pendapatan (Catatan 20)

Cost of revenues (Note 20)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
PT Pertamina (Persero)	181,029	187,259	PT Pertamina (Persero)
PT Perta Arun Gas	24,243	26,630	PT Perta Arun Gas
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	16,167	14,495	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
PT Pertamina Lubricants	9,096	-	PT Pertamina Lubricants
PT Mitra Tours and Travel	2,111	-	PT Mitra Tours and Travel
Lain-lain	1,904	525	Others
Jumlah	<u>234,550</u>	<u>228,909</u>	Total
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan	<u>11.21%</u>	<u>16.35%</u>	Percentage from total cost of revenues

Kompensasi dan imbalan lain

Compensation and other benefits

Kompensasi yang diberikan oleh Perusahaan kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Compensation provided by the Company to its key management is as follows:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Gaji dan imbalan lainnya	<u>10,813</u>	<u>12,765</u>	Salaries and other benefits

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang
berelasi adalah sebagai berikut:

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT ENTITIES (continued)**

The nature of transactions and relationships with
related parties are as follows:

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina (Persero)	Pemegang saham mayoritas/ Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, utang usaha, dan modal saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, trade payables and share capital
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Pemegang saham/Shareholder	Modal saham/Share capital
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan penyertaan saham/Revenue, trade receivables and investment in shares
PT Perta Arun Gas	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables and trade payables
PT Pertamina International Shipping	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan utang usaha /Revenue, trade receivables and trade payables
PT Pertamina Gas	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Mahakam	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi OSES	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi WMO	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi JM	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Lubricants	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Nusantara Regas	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina EP	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Elnusa Tbk.	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Elnusa Trans Samudera	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Retail	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**22. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN
PEMERINTAH (lanjutan)**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

**22. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT ENTITIES (continued)**

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Bina Medika	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Mitra Tours and Travel	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of revenue and trade payables
PT Trans Yeong Maritime	Perusahaan ventura bersama/ <i>Joint venture</i>	Piutang sewa pembiayaan/ <i>Finance lease receivables</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas dan setara kas/ <i>Placement of cash and cash equivalents</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables

23. SALDO LABA DICADANGKAN

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp75.943.

23. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007, requires the each company should establishment of a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a Company's issued and paid up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

As at 31 December 2019 and 2018, the Company has provided for Rp75,943 as the general reserves.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

24. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Perjanjian kerjasama dengan PT Perta Arun Gas

Pada tanggal 30 Januari 2015 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan terminal antara Perusahaan dengan PT Perta Arun Gas. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah untuk jasa rutin sebesar Rp40.990 per tahun, dan untuk jasa non rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan fee yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2017, telah ditandatangani perpanjangan dari perjanjian kerjasama tersebut yang berlaku selama lima belas tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

b. Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Produsen Biofel Indonesia ("APROBI")

Pada tanggal 30 April 2019 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan *ship-to-ship* antara Perusahaan dengan APROBI. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut untuk jasa rutin adalah sebesar Rp28.968 per bulan, dan untuk jasa non rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan fee yang sudah di atur dalam perjanjian.

c. Komitmen sewa operasi – Grup sebagai pihak yang menyewa

Grup menyewa kapal, alat berat, lahan, bangunan, dan gudang dengan perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan. Masa sewa antara lima sampai sepuluh tahun dengan mayoritas perjanjian jasa dapat diperbarui pada akhir periode sewa sebesar harga pasar.

Jumlah pembayaran sewa minimum di masa depan dalam perjanjian sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

a. Cooperation agreement with PT Perta Arun Gas

On 30 January 2015, a cooperation agreement for port terminal management has been signed between the Company with PT Perta Arun Gas. The agreement is valid for three years and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine service at Rp40,990 per year, and for non-routine services amounted to real expenditures plus a fee that has been set in the agreement.

On 30 May 2017, an extension of this agreement has been signed and validated for fifteen years, and may be extended according to the agreement.

b. Cooperation agreement with Indonesia Biofuel Producer Association ("APROBI")

On 30 April 2019, a cooperation agreement for ship-to-ship management has been signed between the Company with APROBI. The agreement is valid for one year and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine service at Rp28,968 per month and for non-routine services amounted to real expenditures plus a fee that has been set in the agreement.

c. Operating lease commitments – Group as lessee

The Group lease vessels, heavy equipments, land, buildings and warehouses under non-cancellable operating lease agreements. The lease terms are between five and ten years, and the majority of lease agreements are renewable at the end of the lease period at the market rate.

The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as follows:

	<u>2019</u>	
Tidak lebih dari 1 tahun	80,208	No later than 1 year
Lebih dari 1 tahun namun kurang dari 5 tahun	57,645	Later than 1 year and no later than 5 years
Lebih dari 5 tahun	-	Later than 5 years
Jumlah	<u>137,853</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

- **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 100 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp14.726 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

- **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka panjang, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya yang masih harus dibayar, dan piutang sewa pembiayaan dalam mata uang Dolar AS.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

- **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, consumer finance liability, finance lease liabilities, and long-term bank loans

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at 31 December 2019, had the interest rates of the loans and borrowings been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended 31 December 2019 would have been Rp14,726 lower/higher, accordingly, mainly as a result of, higher/lower interest charge on the loans and borrowings with floating interest rates.

- **Foreign exchange rate risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from USD denominated long-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses and finance lease receivables.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar (lanjutan)

- **Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp3.485.

Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko *counterparty* gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah maksimal eksposur dari risiko kredit adalah Rp1.787.301 (2018: Rp1.561.316).

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang yang belum difakturkan, piutang sewa pembiayaan, piutang karyawan dan kas yang dibatasi penggunaannya. Untuk transaksi kas dan bank serta deposito berjangka, Grup telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik terlihat dengan sebagian besar bank tersebut berperingkat mulai dari "Aa3" ke "Baa2" dari lembaga pemeringkat Moody's.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk kontrak penjualan, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah. Kebijakan umum Grup untuk pelanggan yang baru dan pelanggan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

- Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
- Menerima pelanggan baru yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Grup.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk (continued)

- **Foreign exchange rate risk (continued)**

As at 31 December 2019, had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended 31 December 2019 would have been Rp3,485 higher/lower.

Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group. As at 31 December 2019 and 2018, the total maximum exposure to credit risk was Rp1,787,301 (2018: Rp1,561,316).

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade receivables, unbilled receivables, finance lease receivables, employee receivables and restricted cash. For cash and bank and time deposit, the Group had placed its bank balances and time deposit in banks that have good credit quality as evidenced by most of the banks arerated ranging from "Aa3" to "Baa2" based on Moody's.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Group has clear policies on the selection of customers, where the Group have legally binding agreements for its sales contracts, and historically low levels of bad debts. The Group have also established general policies to new and existing customers which are as follows:

- Selection of customers with strong financial conditions and good reputations.
- Acceptance of new customers is approved by the authorised personnel according to the Group's delegation of authority policy.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual dalam kontrak:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicate that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from repayments of bank loans and related interest and vessel operational cost. The source of fund to fulfill repayment of long-term bank loans from contractual rental with third party in short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

The Group evaluate its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 year</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 year</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 year</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
31 Desember 2019						31 December 2019
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha						Trade payables
- Pihak berelasi	306,478	-	-	-	306,478	Related parties -
- Pihak ketiga	179,563	-	-	-	179,563	Third parties -
Biaya yang masih harus dibayar	562,353	-	-	-	562,353	Accrued expenses
Uang muka pelanggan						Advance from customers
- Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties -
- Pihak ketiga	64,808	-	-	-	64,808	Third parties -
Pinjaman jangka pendek	25,516	-	-	-	25,516	Short-term borrowings
Pinjaman jangka panjang	197,721	444,534	296,619	111,294	1,050,168	Long-term borrowings
Jumlah	<u>1,336,439</u>	<u>444,534</u>	<u>296,619</u>	<u>111,294</u>	<u>2,188,886</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 year</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 year</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 year</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
31 Desember 2018						31 December 2018
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang usaha						Trade payables
- Pihak berelasi	194,920	6,311	-	-	201,231	Related parties -
- Pihak ketiga	130,893	4,862	-	-	135,755	Third parties -
Utang lain-lain						Other payables
- Pihak berelasi	-	-	-	-	-	Related parties -
Biaya yang masih harus dibayar	617,763	-	-	-	617,763	Accrued expenses
Uang muka pelanggan						Advance from customers
- Pihak berelasi	4,144	-	-	-	4,144	Related parties -
- Pihak ketiga	18,748	4,719	168	7	23,642	Third parties -
Pinjaman jangka panjang	271,317	210,016	249,702	523,696	1,254,731	Long-term borrowings
Jumlah	1,237,785	225,908	249,870	523,703	2,237,266	Total

26. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

26. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang usaha yang belum difakturkan dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp1.792.472 (2018: Rp1.566.653) sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp598 (2018: Rp598) sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

As at 31 December 2019, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, unbilled receivables and finance lease receivables amounting to Rp1,792,472 (2018: Rp1,566,653) as loan and receivables, and classified its investment in shares amounting to Rp598 (2018: Rp598) as available-for-sale financial assets.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, uang muka pelanggan, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang sebesar Rp2.217.211 (2018: Rp2.237.266) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi.

As at 31 December 2019, the Group classified its trade payables, accrued expenses, advances from customers, short-term borrowings and long-term borrowings amounting to Rp2,217,211 (2018: Rp2,237,266) as financial liabilities measured at amortised cost.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2019

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. INFORMASI TAMBAHAN KAS

27. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

Transaksi non-kas

Non-cash transaction

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	
Perolehan aset tetap melalui peningkatan biaya yang masih harus dibayar	5,560	125,812	Acquisition of fixed assets through increase in accrued expenses
Perolehan aset tetap melalui penerimaan atas denda penyerahan kapal	38,596	-	Acquisition of fixed assets through settlement from late delivery of vessels
Penghapusan aset tetap melalui laba-rugi	-	41,974	Disposal of fixed assets through profit and loss
Penambahan taksiran pengembalian pajak melalui restitusi pajak pertambahan nilai	-	7,160	Addition of estimated tax refund through value added taxes restitution

Informasi tambahan kas

Supplementary cash flow information

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statements are as follows:

	<u>1 Januari/ 1 January 2019</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Selisih kurs/ Foreign exchange</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2019</u>	
Pinjaman jangka panjang	1,254,731	(155,798)	(20,440)	1,078,493	Long - term borrowings
Pinjaman jangka Pendek	-	25,516	-	25,516	Short - term borrowings
Jumlah	<u>1,254,731</u>	<u>(130,282)</u>	<u>(20,440)</u>	<u>1,104,009</u>	Total
	<u>1 Januari/ 1 January 2018</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Selisih kurs/ Foreign exchange</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2018</u>	
Pinjaman jangka panjang	988,222	218,553	47,956	1,254,731	Long - term borrowings

**28. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN
SEBELUMNYA**

**28. RECLASSIFICATION OF PRIOR
FINANCIAL STATEMENTS**

	<u>31 Desember 2018 seperti yang dilaporkan sebelumnya/ 31 December 2018 as previously reported</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>31 Desember 2018 setelah reklasifikasi/ 31 December 2018 as reclassified</u>	
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	498,705	(198,800)	299,905	Related party -
- Pihak ketiga	157,588	(31,455)	126,133	Third party -
Piutang usaha yang belum difakturkan				Unbilled receivables
- Pihak berelasi	-	265,085	265,085	Related party -
- Pihak ketiga	221,574	(34,830)	186,744	Third party -

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

2019

**ANNUAL REPORT
LAPORAN TAHUNAN**



Head Office

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450

Telp : (+6221) 31923005

Fax : (+6221) 3106804

E-mail : ptkpusat@ptk-shipping.com

Website : www.ptk-shipping.com

Marketing Department

Jl. Kramat Raya No. 29
Jakarta Pusat 10450

Telp : (+6221) 31923005 (ext- 225)

Fax : (+6221) 39899923

E-mail : marketingptk@ptk-shipping.com

